



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

2023

RKPD DIY

Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2023-2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023 - 2026.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB 1 : PENDAHULUAN
- b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
- f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- h. BAB 8 : PENUTUP

(2) Rincian uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 menjadi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. dasar penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

URAIAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	9
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	15
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	53
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	102
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	383
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berkenaan.....	403
2.2.1 Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Pemda DIY Tahun 2021	404
2.2.2 Capaian Kinerja Program Pemda	453
2.2.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2021	538
2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan	550
2.2.5 Ihtisar Kinerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I, Tahun 2022.....	675
2.2.6 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal	677
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	687
2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	687

2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	694
BAB 3	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN.....	755
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	755
3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2016-2021	755
3.1.2	Inflasi	760
3.1.3	ICOR	761
3.1.4	Ketenagakerjaan	762
3.1.5	Kemiskinan	762
3.1.6	Ketimpangan Regional.....	763
3.1.7	Ketimpangan Pendapatan	764
3.1.8	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023	764
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	768
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	769
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	778
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	785
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	787
BAB 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	789
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026.....	789
4.2	Perumusan Tema RKPD 2023.....	790
4.2.1	Tema RKPD Tahun 2023.....	790
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	791
4.2.3	Keselarasn Tema RKPD Tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.....	792
4.2.4	Keselarasn Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.....	795
4.2.5	Keselarasn Keselarasn Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD DIY Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023.....	800
4.3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	804
4.3.1	Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	804
4.3.2	Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi DPRD	805
BAB 5	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....	857

5.1	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten dan Kota se-DIY	857
5.1.1	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo	857
5.1.2	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul	858
5.1.3	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul	858
5.1.4	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman	859
5.1.5	Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta	860
BAB 6	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	861
6.1	Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD DIY 2023	861
6.1.1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	863
6.1.2	Dinas Kesehatan	906
6.1.3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	921
6.1.4	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	959
6.1.5	Satuan Polisi Pamong Praja	972
6.1.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	981
6.1.7	Dinas Sosial	988
6.1.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	1025
6.1.9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1038
6.1.10	Dinas Perhubungan	1054
6.1.11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1059
6.1.12	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1065
6.1.13	Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal	1078
6.1.14	Dinas Kebudayaan	1085
6.1.15	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	1097
6.1.16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1106
6.1.17	Dinas Pariwisata	1122
6.1.18	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1130
6.1.19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1154
6.1.20	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1163
6.1.21	Sekretariat Daerah	1175
6.1.22	Sekretariat DPRD	1217

6.1.23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1229
6.1.24 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset.....	1242
6.1.25 Badan Kepegawaian Daerah	1274
6.1.26 Badan Pendidikan Dan Pelatihan.....	1283
6.1.27 Badan Penghubung Daerah	1289
6.1.28 Inspektorat.....	1294
6.1.29 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1302
6.1.30 Paniradya Kaistimewan	1314
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	1321
BAB 8 PENUTUP	1331

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota	17
Tabel 2-2	Potensi Ketersediaan Air (juta m3)	28
Tabel 2-3	Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2021 (m3/detik)	29
Tabel 2-4	Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS	29
Tabel 2-5	Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan	30
Tabel 2-6	Penggunaan lahan di DIY	33
Tabel 2-7	Peruntukan lahan di DIY	41
Tabel 2-8	Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY	46
Tabel 2-9	Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2016 - 2020	47
Tabel 2-10	Korban Bencana DIY Tahun 2016 – 2020	48
Tabel 2-11	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2015 - 2020	48
Tabel 2-12	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2020	52
Tabel 2-13	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)	55
Tabel 2-14	Data Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 per bulan Agustus 2021	56
Tabel 2-15	Penanggulangan Kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewonan DIY	57
Tabel 2-16	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021)	60
Tabel 2-17	Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021)	62
Tabel 2-18	Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2021 (%)	62
Tabel 2-19	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rp)	66
Tabel 2-20	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021	68
Tabel 2-21	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021	68
Tabel 2-22	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021	70

Tabel 2-23	Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2021	71
Tabel 2-24	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019.....	74
Tabel 2-25	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2021.....	74
Tabel 2-26	IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2021.....	77
Tabel 2-27	IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	79
Tabel 2-28	AHH DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)	87
Tabel 2-29	Prevalensi Balita KEP di DIY Tahun 2018-2020	93
Tabel 2-30	Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2017 - 2021.....	93
Tabel 2-31	Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021.....	96
Tabel 2-32	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021	97
Tabel 2-33	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021.....	98
Tabel 2-34	Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021	99
Tabel 2-35	Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021.....	102
Tabel 2-36	Perkembangan Jumlah Tiap Jenjang Sekolah Tahun 2017-2021	104
Tabel 2-37	Persentase Sekolah Berakreditasi A di Tiap Jenjang Pendidikan di DIY Tahun 2017-2021	104
Tabel 2-38	Kondisi Fisik Ruang Kelas Jenjang SD-SMA Sederajat di DIY Tahun 2017-2021	106
Tabel 2-39	Persentase Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2017 - 2021	107
Tabel 2-40	Persentase Keterserapan di Dunia Kerja melalui Pendidikan Formal dan Informal Tahun 2017 - 2021.....	107
Tabel 2-41	Jumlah Pengguna Layanan Jogja Belajar Tahun 2017-2021.....	108
Tabel 2-42	Persentase Penggunaan Layanan BTKP DIY Tahun 2021	109
Tabel 2-43	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Yang Membutuhkan Layanan Pendidikan	111
Tabel 2-44	Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY, Tahun 2018-2021	115
Tabel 2-46	Jumlah dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY	118
Tabel 2-47	Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY	118
Tabel 2-48	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2017-2021.....	120
Tabel 2-49	Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021	122
Tabel 2-50	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY	123

Tabel 2-51	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY	124
Tabel 2-52	Jumlah Kasus HIV 2017-2021	126
Tabel 2-53	Jumlah Kasus AIDS 2017-2021	126
Tabel 2-54	Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan di DIY Tahun 2021	127
Tabel 2-55	Prasarana Irigasi/Pengairan.....	130
Tabel 2-56	Daerah Irigasi di DIY.....	132
Tabel 2-57	Rerata Penurunan Muka Air Tanah DIY tahun 2018-2021	134
Tabel 2-58	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Menurut Kabupaten Kota Di DIY Tahun 2017-2021	134
Tabel 2-59	Akses Air Minum Masyarakat DIY tahun 2018-2021	135
Tabel 2-60	Jumlah dan Volume Prasarana Pengolahan Limbah di DIY Tahun 2017-2021	137
Tabel 2-61	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2017-2021	138
Tabel 2-62	Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 2018-2021	139
Tabel 2-63	Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY	139
Tabel 2-64	Proyeksi timbulan sampah TPA Regional Piyungan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	143
Tabel 2-65	Perhitungan Daya Tampung <i>Landfill</i> TPA Piyungan	144
Tabel 2-66	Perhitungan Akumulasi Volume Sampah yang Masuk ke <i>Landfill</i>	144
Tabel 2-67	Daftar Ruas Jalan Provinsi	146
Tabel 2-68	Kondisi Jalan Provinsi 2017-2021	147
Tabel 2-69	Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2021	148
Tabel 2-70	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (terserfikasi).....	153
Tabel 2-71	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	155
Tabel 2-72	Penanganan RTLH 2017-2021.....	156
Tabel 2-73	Penanganan PSU Tahun 2018-2021.....	157
Tabel 2-74	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK kab/kota 2016) dan Progress Penanganan.....	159
Tabel 2-75	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten /Kota Tahun 2021).....	159
Tabel 2-76	Jumlah Pelanggaran Perda dari tahun 2018-2021	164
Tabel 2-77	Jumlah Kasus DIY berdasarkan Elemen Tahun 2018-2022.....	167
Tabel 2-78	Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021	169
Tabel 2-79	Perbandingan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021.....	169

Tabel 2-80	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY 7 tahun terakhir	170
Tabel 2-81	Perbandingan Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dengan Rata-rata Nasional Tahun 2019.....	170
Tabel 2-82	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY	171
Tabel 2-83	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2017-2021	174
Tabel 2-84	Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2021 ..	175
Tabel 2-85	Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di DIY Tahun 2021	175
Tabel 2-86	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2018-2021.....	183
Tabel 2-87	Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021	189
Tabel 2-88	Capaian IDG DIY Tahun 2018-2022.....	189
Tabel 2-89	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi	191
Tabel 2-90	Perbandingan hasil peta komposit tahun 2020 dengan tahun 2021.....	204
Tabel 2-91	Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2017-2021.....	205
Tabel 2-92	Nilai Indeks Kualitas Air Sungai DIY tahun 2016-2021.....	215
Tabel 2-93	Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2020	216
Tabel 2-94	Rekapitulasi Triwulan III 2020 PKAM DIY Kualitas Air Sumur dan Minum 2020	219
Tabel 2-95	Nilai Indeks Kualitas Udara di DIY Tahun 2021.....	220
Tabel 2-96	Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan	221
Tabel 2-97	Luas Hutan di DIY Tahun 2018-2021	222
Tabel 2-98	Luas Kawasan Hutan Yang Direboisasi Tahun 2018 - 2021.....	223
Tabel 2-99	Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2021	225
Tabel 2-100	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY	225
Tabel 2-101	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2021	226
Tabel 2-102	Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021	227
Tabel 2-103	Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY	228
Tabel 2-104	Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021.....	229
Tabel 2-105	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2021	230
Tabel 2-106	Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa	231
Tabel 2-107	Kegiatan Keswadayaan Masyarakat	232
Tabel 2-108	Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021	233
Tabel 2-109	Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2021.....	234

Tabel 2-110	Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2045	237
Tabel 2-111	Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2021	239
Tabel 2-112	Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021	240
Tabel 2-113	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2021	241
Tabel 2-114	Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2020 dan 2021.....	242
Tabel 2-115	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2021	243
Tabel 2-116	Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2021	244
Tabel 2-117	Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2020	245
Tabel 2-118	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021	246
Tabel 2-119	Kendaraan Angkutan di DIY	250
Tabel 2-120	Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017-2021	250
Tabel 2-121	Peringkat Daerah Rawan Kecelakaan dengan kriteria Blackspot	253
Tabel 2-122	Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021..	256
Tabel 2-123	Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY	257
Tabel 2-124	Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2021 ..	258
Tabel 2-125	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018	260
Tabel 2-126	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019	261
Tabel 2-127	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020	261
Tabel 2-128	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021	262
Tabel 2-129	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2021	264
Tabel 2-130	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2018-2019 berdasar Jenis Usaha	265
Tabel 2-131	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2020-2021 berdasarkan Jenis Usaha	265
Tabel 2-132	Jumlah UKM di DIY berdasarkan Skala Usaha Tahun 2017 - 2021	266
Tabel 2-133	Perkembangan Investasi di DIY	269
Tabel 2-134	Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY	271
Tabel 2-135	Budaya Benda di DIY Tahun 2017-2020	278
Tabel 2-136	Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY	278
Tabel 2-137	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021	282
Tabel 2-138	Organisasi Seni dan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta	285
Tabel 2-139	Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala Tahun 2017-2021	286

Tabel 2-140	Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2021	290
Tabel 2-141	Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2021	291
Tabel 2-142	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2021	291
Tabel 2-143	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah	292
Tabel 2-144	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2021	294
Tabel 2-145	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Hari)	300
Tabel 2-146	Jumlah Usaha Perjalanan Wisata di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2020	300
Tabel 2-147	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2021 (ton)	304
Tabel 2-148	Produksi Hortikultura DIY Tahun 2017 - 2021 (ton)	305
Tabel 2-149	Populasi Ternak di DIY Tahun 2017-2021 (ekor)	306
Tabel 2-150	Luas Areal Komoditas Perkebunan Strategis, Tahun 2017-2021 (Ha).	309
Tabel 2-151	Hasil Produksi Komoditas Perkebunan Strategis, Tahun 2017-2021... ..	309
Tabel 2-152	Luas Hutan di DIY tahun 2017-2021 (Ha)	310
Tabel 2-153	Hasil Hutan di DIY Tahun 2017-2021	311
Tabel 2-154	Kerusakan Hutan di DIY Tahun 2017-2021	312
Tabel 2-155	Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di DIY (Ha)	313
Tabel 2-156	Data Status Permohonan WIUP	316
Tabel 2-157	IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi	316
Tabel 2-158	Jangkauan Pelayanan Energi Listrik di DIY Tahun 2018-2021	319
Tabel 2-159	Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018-2021	320
Tabel 2-160	Perkembangan Jumlah UKM berdasarkan SIUP di DIY berdasarkan Tahun 2017 - 2021	322
Tabel 2-161	Perkembangan Jumlah Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2017 - 2021	323
Tabel 2-162	Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2018-2021	324
Tabel 2-163	Nilai Komoditas Ekspor di DIY Tahun 2017-2021 (dalam Juta US \$)	324
Tabel 2-164	Persentase Kontribusi Ekspor <i>non</i> Migas berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2022	326
Tabel 2-165	Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2017-2021	327
Tabel 2-166	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2017-2021	328
Tabel 2-167	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2017-2021	329
Tabel 2-168	Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2021	330
Tabel 2-169	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2017-2021	332

Tabel 2-170	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2017 - 2021	333
Tabel 2-171	Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2016-2020	336
Tabel 2-172	Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2016-2021	337
Tabel 2-173	Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2021*	343
Tabel 2-174	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY, 2016-2021	345
Tabel 2-175	Survei Kepuasan Masyarakat, 2016-2021	347
Tabel 2-176	Jumlah Aset di Pengguna dan Pengelola	353
Tabel 2-177	Jumlah Aset yang Dioptimalkan	354
Tabel 2-178	Persentase Deviden BUMD terhadap Penyetaraan Modal, 2017 - 2021	354
Tabel 2-179	Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021	355
Tabel 2-180	Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021	358
Tabel 2-181	Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2020	358
Tabel 2-182	Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024	360
Tabel 2-183	Hasil dan Tindaklanjut atas Temuan Inspektorat DIY	367
Tabel 2-184	Hasil dan Tindaklanjut atas Temuan BPK RI	368
Tabel 2-185	Capaian Kinerja Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2021	373
Tabel 2-186	Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Tahun 2015-2020	376
Tabel 2-187	Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2022	377
Tabel 2-188	Penyelenggaraan event Taman Budaya DIY pada Tahun 2021	377
Tabel 2-189	Pengembangan seni di DIY pada Tahun 2021	378
Tabel 2-190	Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2020	379
Tabel 2-191	Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021	380
Tabel 2-192	Rekapitulasi Realisasi Data Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	381
Tabel 2-193	Rekapitulasi Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa	381
Tabel 2-194	Progres Pendaftaran Tanah Desa Bersertifikat dan Perubahan Data Sertifikat Tanah Desa	382
Tabel 2-195	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	387
Tabel 2-196	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY	388
Tabel 2-197	Jumlah Tindak Pidana berdasarkan Jenisnya Tahun 2017 - 2021	388

Tabel 2-198	Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2017-2021	389
Tabel 2-199	Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2017 - 2021	390
Tabel 2-200	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Perkotaan dan Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.....	396
Tabel 2-201	Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Tahun 2017-2020 (dalam persen).....	396
Tabel 2-202	Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2017-2020 (dalam juta dolar AS).....	397
Tabel 2-203	Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY tahun 2016-2020	398
Tabel 2-204	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2021	399
Tabel 2-205	Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2015-2021	399
Tabel 2-206	Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2021.....	402
Tabel 2-207	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY	405
Tabel 2-208	IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	410
Tabel 2-209	IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen 2021	411
Tabel 2-210	IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020	414
Tabel 2-211	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020.....	414
Tabel 2-212	<i>Gini Ratio</i> DIY dan Indonesia Periode September 2020 – September 2021	419
Tabel 2-213	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 (%)... ..	423
Tabel 2-214	Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2021.....	425
Tabel 2-215	Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2021.....	426
Tabel 2-216	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%).....	428
Tabel 2-217	Nilai dan Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021	429
Tabel 2-218	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021	430
Tabel 2-219	Kategori Nilai IKLH secara Nasional	432
Tabel 2-220	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY	434
Tabel 2-221	Daftar Dokumen Perencanaan Tata Ruang di 18 Satuan Ruang Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta.....	440
Tabel 2-222	Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2019-2021.....	446

Tabel 2-223	Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	451
Tabel 2-224	Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	452
Tabel 2-225	Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2021.....	453
Tabel 2-226	Rincian Jumlah Sekolah yang Memenuhi SNP>90	458
Tabel 2-227	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2021.....	459
Tabel 2-228	Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021	461
Tabel 2-229	Jumlah Pemuda Kader Aktif 2020-2021 di DIY.....	462
Tabel 2-230	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2021.....	463
Tabel 2-231	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2021.....	465
Tabel 2-232	Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2021.....	466
Tabel 2-233	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2021	469
Tabel 2-234	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2021	471
Tabel 2-235	Target dan Capaian Indikator Program Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2021.....	472
Tabel 2-236	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2021	473
Tabel 2-237	Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2021.....	476
Tabel 2-238	Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Tahun 2021	477
Tabel 2-239	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2021.....	479
Tabel 2-240	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021.....	481
Tabel 2-241	Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017-2021	482
Tabel 2-242	Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2021	483
Tabel 2-243	Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2021	484
Tabel 2-244	Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan Tahun 2021.....	486

Tabel 2-245	Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2021	489
Tabel 2-246	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2021	492
Tabel 2-247	Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021	496
Tabel 2-248	Desa Mandiri Budaya 2020	499
Tabel 2-249	Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang Diusulkan Pada Tahun 2021 ..	499
Tabel 2-250	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2021.....	500
Tabel 2-251	Hasil Perhitungan Agregasi IKA DIY dan Kabupaten/Kota tahun 2018 – 2021	501
Tabel 2-252	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021	502
Tabel 2-253	Data IKU DIY tahun 2021	505
Tabel 2-254	Kategori IKU	505
Tabel 2-255	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara Tahun 2021	506
Tabel 2-256	Tren Nilai IKU Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021	506
Tabel 2-257	Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan	509
Tabel 2-258	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021.....	510
Tabel 2-259	Jumlah Kapanewon/Kemantren Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana	512
Tabel 2-260	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Risiko Bencana Tahun 2021	512
Tabel 2-261	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2021.....	513
Tabel 2-262	Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2021.....	514
Tabel 2-263	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2021	518
Tabel 2-264	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2021..	519
Tabel 2-265	Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2021.....	521
Tabel 2-266	Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2021	524

Tabel 2-267	Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021	525
Tabel 2-268	Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2021	527
Tabel 2-269	Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2021.....	528
Tabel 2-270	Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2021	529
Tabel 2-271	Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM	531
Tabel 2-272	Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2021	533
Tabel 2-273	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2021	535
Tabel 2-274	Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	536
Tabel 2-275	Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	536
Tabel 2-276	Capaian Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan	537
Tabel 2-277	Capaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	541
Tabel 2-278	Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal DIY 2019-2021.....	680
Tabel 3-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017 - 2021.....	758
Tabel 3-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2017 - 2021.....	758
Tabel 3-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2017 - 2021.....	762
Tabel 3-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2017 - 2021 (September)	763
Tabel 3-5	Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2023	764
Tabel 3-6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....	773
Tabel 4-1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023-2026	789
Tabel 4-2	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan DIY Tahun 2023.....	791
Tabel 4-3.	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPD 2023-2026.....	795
Tabel 4-4	Penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026.....	799
Tabel 4-5	14 <i>Highlight Major Project</i> yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2023..	802
Tabel 4-6	Tabel Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	803
Tabel 4-7	Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional.....	803
Tabel 4-8	Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021	806

Tabel 4-9	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2016-2021.....	806
Tabel 5-1	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023	857
Tabel 5-2	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul Tahun 2023	858
Tabel 5-3	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	859
Tabel 5-4	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman Tahun 2023	859
Tabel 5-5	Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta Tahun 2023	860
Tabel 7-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta	1322
Tabel 7-1	Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Istimewa Yogyakarta ...	1322
Tabel 7-2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta	1323

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY.....	5
Gambar 1-2	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	10
Gambar 2-1	Peta Administrasi DIY.....	16
Gambar 2-2	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY	18
Gambar 2-3	Peta Morfologi DIY	20
Gambar 2-4	Peta Curah Hujan DIY	22
Gambar 2-5	Peta Geologi DIY	25
Gambar 2-6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY.....	27
Gambar 2-7	Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	31
Gambar 2-8	Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	32
Gambar 2-9	Peta Penggunaan Lahan DIY.....	33
Gambar 2-10	Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019	39
Gambar 2-11	Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 – 2039.....	42
Gambar 2-12	Peta Rawan Bencana DIY	45
Gambar 2-13	Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota	49
Gambar 2-14	Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia	50
Gambar 2-15	Peta Kepadatan Penduduk DIY.....	53
Gambar 2-16	Tingkat Kemiskinan DIY (Maret 2017-September 2021)	54
Gambar 2-17	Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2021 (Maret 2017-September 2021)	65
Gambar 2-18	Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – 2021	69
Gambar 2-19	Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2021	70
Gambar 2-20	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2021	73
Gambar 2-21	Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2021.....	78
Gambar 2-22	Perkembangan Angka Melek Huruf di DIY Tahun 2014 – 2021 (%).....	80
Gambar 2-23	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)	81
Gambar 2-24	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021.....	83

Gambar 2-25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen).....	84
Gambar 2-26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen).....	85
Gambar 2-27	Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2014-2021 (Tahun)	86
Gambar 2-28	Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2017-2021 (Orang)	88
Gambar 2-29	Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2020 (Kasus)	89
Gambar 2-30	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2017-2021 (Anak)	90
Gambar 2-31	Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY Tahun 2014-2020 (Anak)	91
Gambar 2-32	Jumlah Kematian Balita pada Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2020 (Anak)	92
Gambar 2-33	Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Tahun 2017-2021.....	106
Gambar 2-34	Pengguna Jogja Belajar Class tahun 2015 sd Februari 2022 Sesuai Jenjang Pendidikan	109
Gambar 2-35	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	112
Gambar 2-36	Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	113
Gambar 2-37	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2016-2020 di tiap kabupaten/kota DIY	114
Gambar 2-38	Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 – 2021	116
Gambar 2-39	Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021.....	124
Gambar 2-40	Pola Penyakit Menurut Riskedas Tahun 2017.....	125
Gambar 2-42	Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi	148
Gambar 2-43	Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Jenis Kelamin	194
Gambar 2-44	Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin.....	196
Gambar 2-45	Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2019-2020 (BPRSR Dinsos DIY).....	197
Gambar 2-46	Kalurahan Rawan Pangan 2011-2021.....	203
Gambar 2-47	Produksi Daging di DIY Tahun 2020-2021 (kg/Tahun).....	207
Gambar 2-48	Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)	207
Gambar 2-49	Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)	208
Gambar 2-50	Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021	209

Gambar 2-51	Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021.....	210
Gambar 2-52	Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2021	210
Gambar 2-53	Perkembangan TFR di DIY Tahun 2017 – 2021.....	236
Gambar 2-54	Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035	238
Gambar 2-55	Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021	240
Gambar 2-56	Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020	243
Gambar 2-57	Lembaga Bina Keluarga di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020.....	246
Gambar 2-58	Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-Kota Di Sekitarnya	248
Gambar 2-59	Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2021.....	264
Gambar 2-60	Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2021 (Miliar)	269
Gambar 2-61	Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Menurut SK Gub DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya.....	288
Gambar 2-62	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Orang)	296
Gambar 2-63	Grafik Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY Tahun 2017-2021.....	297
Gambar 2-64	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021.....	298
Gambar 2-65	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2016-2021 (Orang).....	301
Gambar 2-66	Sebaran Wisatawan di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Orang)	302
Gambar 2-67	Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY	303
Gambar 2-68	Grafik Proporsi Nelayan DIY Tahun 2021 (orang)	335
Gambar 2-69	Perkembangan Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut DIY Tahun 2017 - 2021	336
Gambar 2-70	Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2016-2021.....	339
Gambar 2-71	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2017-2021.....	341
Gambar 2-72	Tingkat Konsumsi Ikan di DIY Tahun 2016 - 2021 (Kg/Kapita/Tahun)	342
Gambar 2-73	Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY (%), 2016-2021.....	352

Gambar 2-74	Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2017-2021 (dalam ribu).....	393
Gambar 2-75	Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan)	393
Gambar 2-76	Perkembangan NTP di DIY Tahun 2017-2021	394
Gambar 2-77	NTP Per Subsektor Tahun 2017-2021	395
Gambar 2-78	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	401
Gambar 2-79	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021.....	408
Gambar 2-80	Perkembangan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY Tahun 2017-2021.....	410
Gambar 2-81	Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2017-2021.....	410
Gambar 2-82	Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di DIY Tahun 2016-2020.....	413
Gambar 2-83	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2020	415
Gambar 2-84	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2017 – September 2021.....	419
Gambar 2-85	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021	423
Gambar 2-86	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2021 (%) ..	427
Gambar 2-87	Pertumbuhan Ekonomi DIY 2019-2022.....	430
Gambar 2-88	Target dan Realisasi IKLH tahun 2018 - 2021.....	433
Gambar 2-89	Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis.....	439
Gambar 2-90	Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021	443
Gambar 2-91	Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2021	446
Gambar 2-92	Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2021.....	460
Gambar 2-93	Capaian HLS Kabupaten/Kota dan DIY 2017-2021	461
Gambar 2-94	Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya.....	464
Gambar 2-95	Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2017-2021	466
Gambar 2-96	<i>Crime Rate</i> Tahun 2017-2021	476
Gambar 2-97	<i>Crime Total</i> per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2021.....	478
Gambar 2-98	Perkembangan WUB Tahun 2017-2021	479
Gambar 2-99	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2017 – 2021 (Ribu Orang)	481
Gambar 2-100	Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2017 - 2021	488
Gambar 2-101	Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor	489

Gambar 2-102	Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2017-2021	491
Gambar 2-103	Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2021	494
Gambar 2-104	Perkembangan TPT DIY dan Indonesia tahun 2017 - 2021	497
Gambar 2-105	Tren Indeks Kualitas Air di DIY tahun 2018 - 2021	503
Gambar 2-106	Tren Nilai Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2018 – 2021	506
Gambar 2-107	Tren Indeks Risiko Bencana di DIY Tahun 2019 – 2021.....	511
Gambar 2-108	Kinerja Fisik	538
Gambar 2-109	Kinerja Keuangan	539
Gambar 2-110	Target dan Realisasi Kinerja Fisik Pemda DIY, s.d. TW I, 2022.....	675
Gambar 2-111	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemda DIY, s.d. TW I, 2022... ..	675
Gambar 2-112	Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi Pemda DIY	676
Gambar 3-1	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2017 - 2021.....	755
Gambar 3-2	Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY di Tahun 2021 (%), 2017 – 2021	756
Gambar 3-3	Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2016 – 2021.....	757
Gambar 3-4	Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2016 - 2021	759
Gambar 3-5	Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2021.....	760
Gambar 3-6	Laju Inflasi IHK DIY (%), 2016 - 2021	761
Gambar 3-7	Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 - 2021	762
Gambar 3-8	Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2021	763
Gambar 3-9	Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017 - 2021 (September)	764

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 memerintahkan secara khusus bagi Gubernur DIY untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Dokumen RPD DIY sebagai dokumen perencanaan jangka menengah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023.

Dokumen RKPD DIY Tahun 2023 berada pada tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026, yang berada pada tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dengan penekanan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Pandemi Covid-19, yang muncul pada awal tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup menyita perhatian serta pemanfaatan segala sumber daya di DIY. Dampak dari Pandemi Covid-19 membutuhkan suatu penanganan yang ekstra terutama pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY, dengan tanpa mengesampingkan peningkatan daya saing SDM dan terjaganya daya dukung lingkungan hidup serta memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DIY.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan strategis RKPD memerlukan perhatian yang besar dan komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

- b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Gambaran umum kondisi Daerah.
- 3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.
- 4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- 5) Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- 6) Rencana kerja dan pendanaan Daerah.
- 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 8) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP.

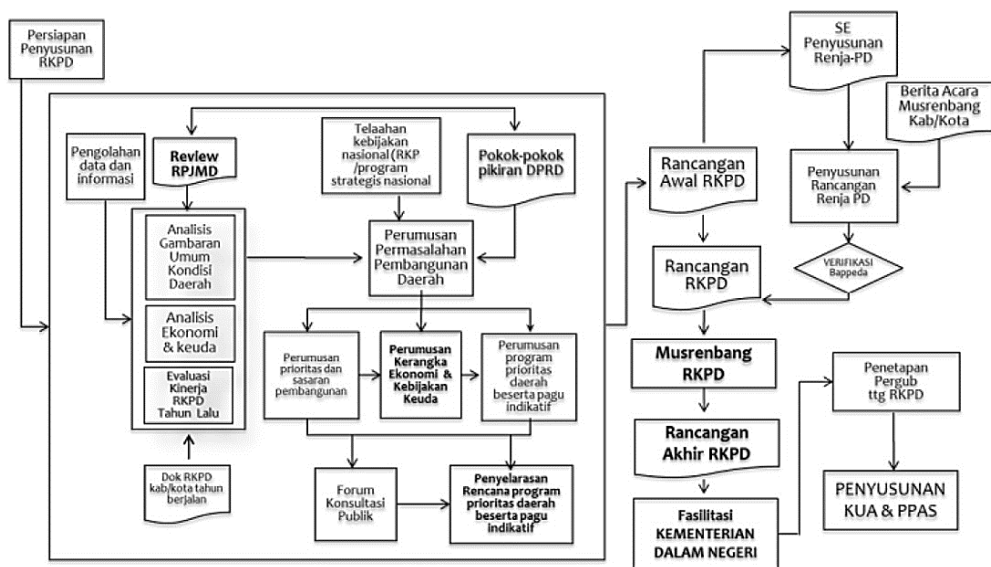
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD, RPJMN 2020-2024, Evaluasi Capaian RKPD periode sebelumnya dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama RPD Tahun 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan digunakan juga sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

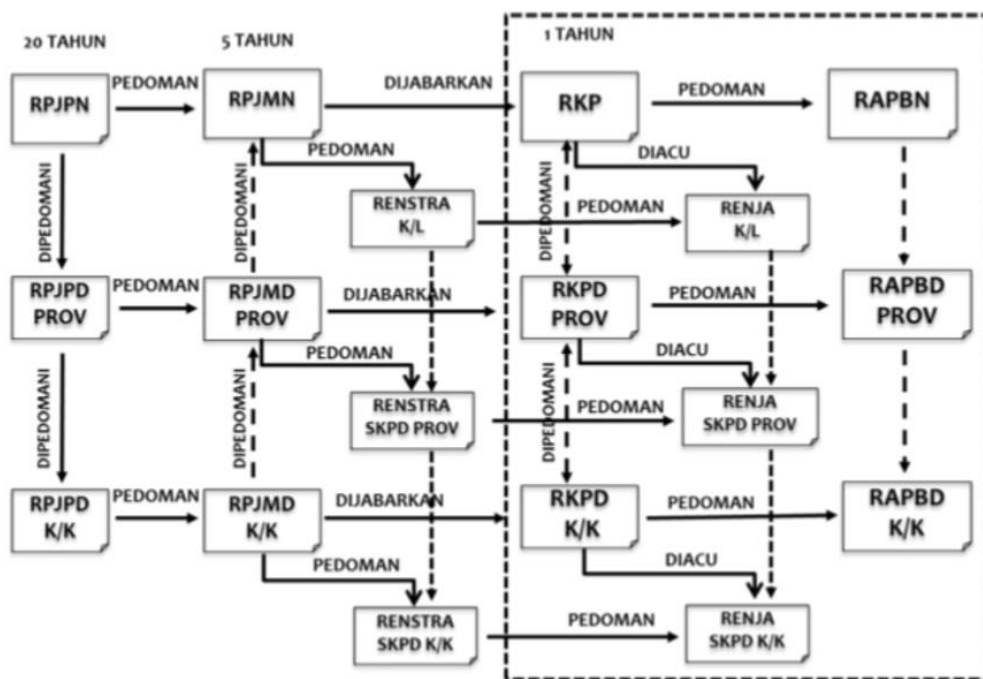
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Tahun 2008 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tantang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12)
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Desain Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042;
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat kondisi geografi daerah, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, rancangan kerangka

keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju.

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Badan/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

5. **Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**
Memuat mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan DIY.
6. **Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
7. **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.
8. **Bab VIII Penutup**

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012 DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan nagari Kasultanan dan Kadipaten dan sekaligus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan yang dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik

feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran menimbang huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Penyelenggaraan urusan keistimewaan ini dengan adanya penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Penugasan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dapat dicari rujukannya dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan sebagai revidi dari Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara aspek geografis, wilayah DIY terletak ditengah-tengah Pulau Jawa, dimana dengan bentuk segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggian 2.911 m diatas permukaan air laut, Gunung merapi merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia, sedangkan di bawah terdapat dataran pantai yang memanjang sepanjang pantai selatan yang terletak di pinggiran samudera Indonesia. Wilayah DIY tergolong subur yang berpotensi untuk ditanami berbagai tanaman pertanian, dengan potensi alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota, kondisi alam menjadi sumber potensi pariwisata, potensi sumber daya laut di Sleman, kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul terletak pada satuan fisiografi Gunung Merapi sehingga wilayah-wilayah tersebut sangat subur dan Kabupaten Kulon Progo dan Bantul yang terletak pada dataran rendah yang juga potensial untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. Akan tetapi Kabupaten Gunungkidul dan wilayah timur Kabupaten Bantul yang terletak pada jalur Pegunungan Seribu yang didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst kurang potensial untuk pertanian semusim. Sementara itu di wilayah pesisir DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sungai yang melintas di DIY berpotensi mendukung pengembangan wilayah, dan perkembangan penggunaan lahan di DIY yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan lahan dari pertanian ke bukan pertanian.

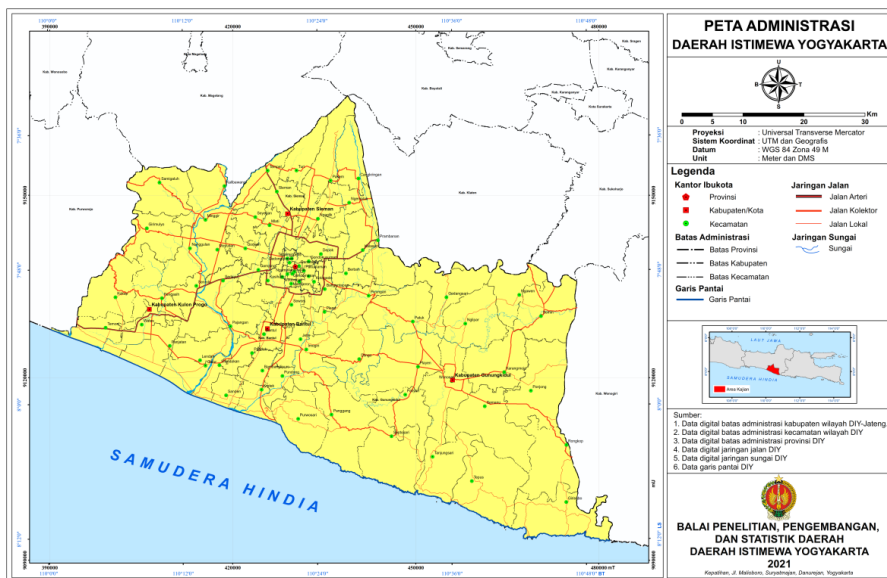
Ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY yang mengalami peningkatan baik penduduk yang berusia produktif maupun yang tidak produktif. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) Jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sebesar 3.185,80 km², maka kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.152 orang per km². Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58 persen. Jumlah penduduk menurut kabupaten/Kota di DIY hasil SP2020 jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta

yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Ditinjau secara astronomis wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak pada posisi 7.33'- 8.12' Lintang Selatan dan 110.00'-110.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di sisi bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah

Kabupaten/kota dan Kalurahan dilakukan penyesuaian nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan kemandren untuk kecamatan di wilayah kota. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan kemandren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemandren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 RW dan 26.896 RT.

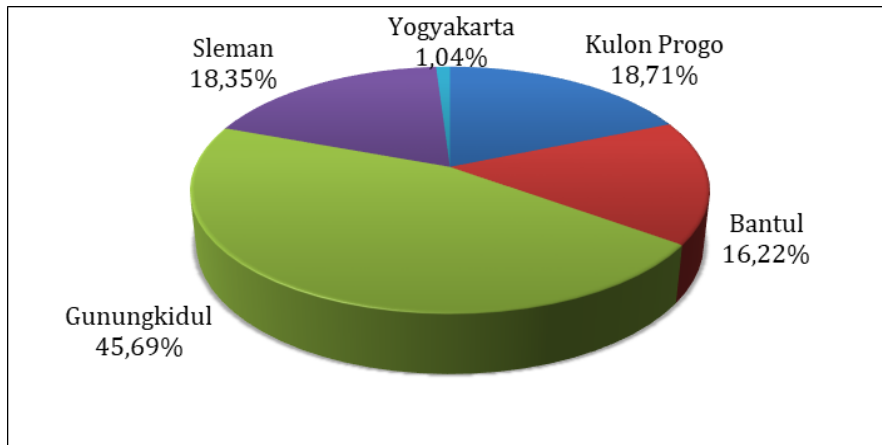
Tabel 2-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten / Kota	Kapanewon/ Kemandren	Kalurahan / Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
DIY		78	438	4.508	7.102	26.896

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Luas seluruh wilayah DIY adalah 3.133,15 km² atau 0,16% dari total luas Indonesia (1.916.906,77 km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 45,69% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,04%

dari luas DIY. Gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

2.1.1.1.2 Topografi

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (landform) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan lahan

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

2) Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl

sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

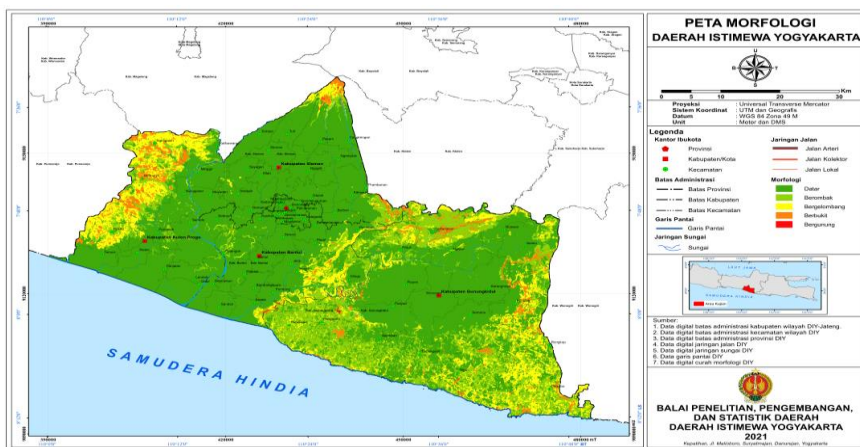
3) Unit Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan Samudera Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut :

- a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80 – 2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan

Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;

- d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-3 Peta Morfologi DIY

2.1.1.1.3 Klimatologi

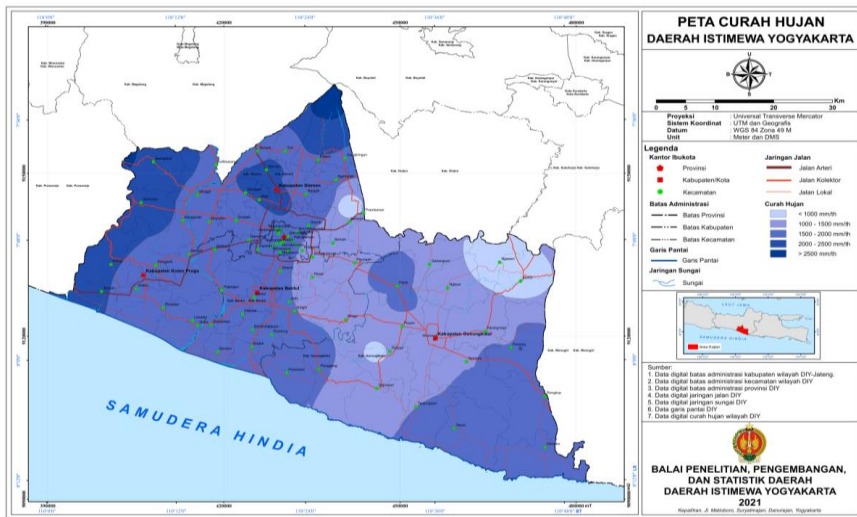
Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumber daya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap

periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Hindia, terjadi banyak penguapan air laut yang menyebabkan udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2021, DIY tercatat memiliki:

- 1) Suhu udara minimum 23 °C dan maksimum 28,90°C;
- 2) Jumlah curah hujan perbulan terbesar sebanyak 560 mm³ pada bulan maret di Kabupaten Sleman dan terendah sebanyak 0 mm³ di semua kabupaten;
- 3) Kelembaban udara minimum 54,0 dan maksimum 92;
- 4) Tekanan udara antara 988,20 mb – 997 mb;
- 5) Kecepatan angin minimum 1 knot dan maksimum 7 knot.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-4 Peta Curah Hujan DIY

2.1.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

- a. Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah

barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

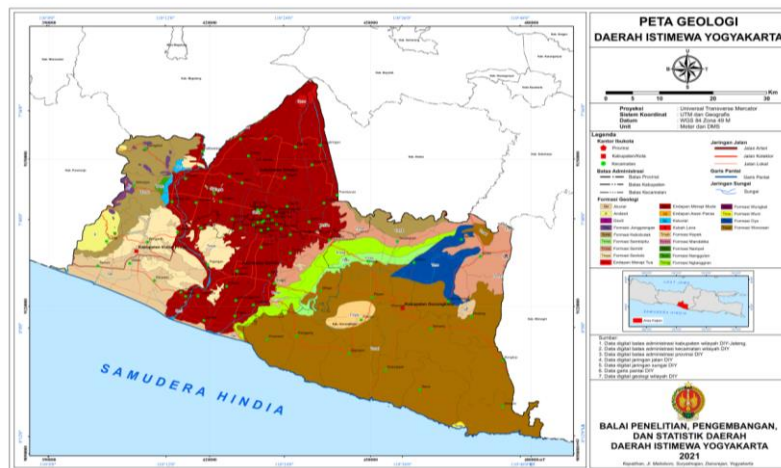
- b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
- c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan Gunung Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
- d. Formasi Kepek (TmPk) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
- e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang

kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.

- f. Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.
- g. Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.
- h. Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.
- i. Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.
- j. Formasi Kebo Butak (Tomk) Formasi Kebo Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya. Wilayah ini mempunyai lereng curam-

hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.

- k. Formasi Andesit Tua (Bemmelen) Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi vulkanik dengan fragmen andesit, lapilli tuf, tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batupasir vulkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.

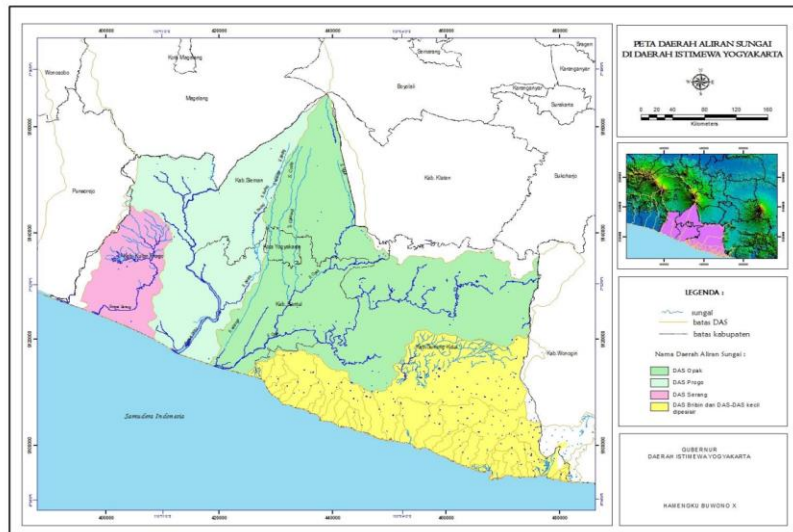


Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021
Gambar 2-5 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunungapi Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06 km² atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km², lithosol 1.052,93 km², resina 78,83 km², grumusol 349,35 km², mediteran 345,40 km², dan lathosol 394,49 km².

2.1.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa Daerah Aliran Sungai yang bermuara di Samudra Hindia. Berdasarkan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.



Sumber: Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS

Gambar 2-6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. DAS Bribin mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo dan hilir di Pantai Baron. Secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) aquifer, yaitu:

- 1) Mayor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor aquifer adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- 2) Minor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah minor aquifer adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
- 3) Poor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah poor aquifer adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambi pitu dan Oyo, dan Andesit tua.
- 4) Non Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah non aquifer adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Tabel 2-2 Potensi Ketersediaan Air (juta m3)

DAS	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Serang	301,80	129,60	141,72	207,00	207,00 *	Juta m3
Progo	6.013,00	3.807,25	6.423,39	6.178,00	6.178,00 *	Juta m3
Opak	463,71	370,79	352,69	356,00	356,00 *	Juta m3
Oyo	678,10	1.530,10	756,70	1.090,00	1.090,00 *	Juta m3

*Keterangan: *) Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022) Sementara*

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri

maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing- masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2-3 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2021 (m³/detik)

Sungai	Tahun							
	2018		2019		2020		2021	
	min	maks	min	maks	min	maks	min	maks
Sungai Progo (Duwet)	0,02	209,79	0,18	183,54	0,30	561,00	0,30 *	561,00 *
Sungai Bedog (Guwosari)	0,01	49,84	0,18	33,66	0,05	30,90	0,05 *	30,90 *
Sungai Code (Kaloran)	0,02	10,95	0,01	38,25	0,01	12,70	0,01 *	12,70 *
Sungai Winongo (Padokan)	0,03	37,93	0,01	20,06	0,09	25,40	0,09 *	25,40 *
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,49	9,93	0,05	6,66	0,27	6,72	0,27 *	6,72 *
Sungai Opak (Pulo)	0,14	4,06	0,27	4,80	0,06	3,50	0,06 *	3,50 *

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022, *) Sementara*

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Tabel 2-4 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: *RPSDA WS Progo Opak Serang 2015*

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga)

Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

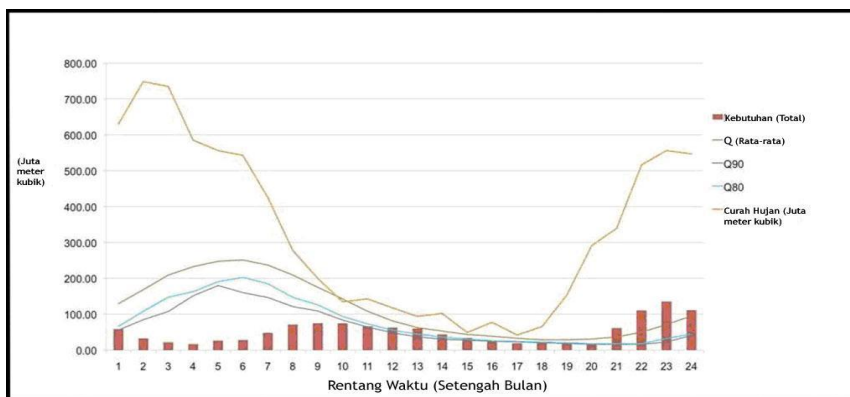
Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m³/dt sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. Namun demikian, kenyataannya pada waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa cukupnya prasarana pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Tabel 2-5 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan

Progo - Opak - Serang	
Imbangan Air - Hidrologi Rerata Tahunan dalam Juta M3	
Curah Hujan pada WS	8.769
	Hujan 2.119 mm/tahun
Hilang dalam system	3.469
Aliran WS	5.300

Imbangan Air – Penggunaan Rerata Tahunan dalam Juta M ³	
Aliran pada WS	5.300
Konsumsi Bersih	1.060
Irigasi	947
RKI	113
Terbuang ke laut	4.240
Total	5.300

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015



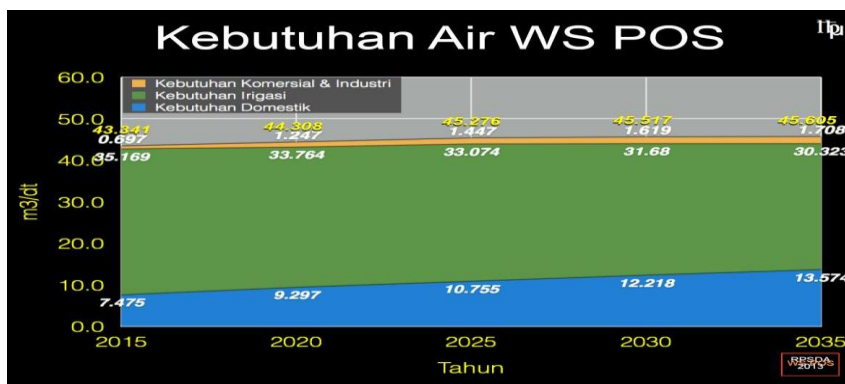
Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar 2-7 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan (Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta Ekogeowisata karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis Provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Berikut Total Kebutuhan air per periode pada WS POS, Kebutuhan air dibedakan menjadi Irigasi, Domestik, Komersial & Industri. Dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi

non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun 4,849 m³/dt (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,804 m³/dt (79%), sedangkan kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m³/dt (45%). Dengan demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81% irigasi, 17% domestik, 2% komersial & industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi, 29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035. Grafik Kebutuhan Air di WS POS selengkapnya disajikan pada Gambar berikut.

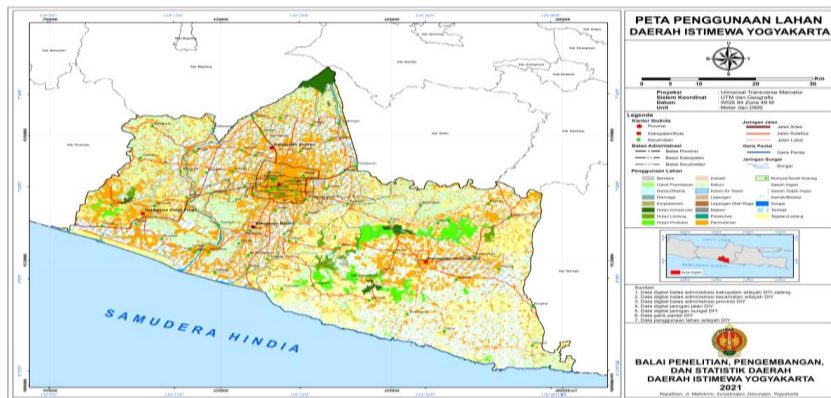


Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar 2-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-9 Peta Penggunaan Lahan DIY

Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi permukiman, semak/belukar, pertanian, perkebunan dan hutan. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 90.030,39 Ha atau sebesar 28,294%. Pertanian yang didominasi tegalan/ladang dan sawah irigasi yaitu 17.319% atau sekitar 55.109,92 Ha untuk tegalan/ladang dan 17,301% atau seluas 55.053,05 Ha untuk sawah irigasi, sedangkan sawah tadah hujan hanya sekitar 7,998% atau 25.451,23 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas yaitu sebesar 15,925% atau 50.674,21 Ha. Hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 6,379% atau seluas 20.299,08 Ha. Penggunaan lahan Semak/Belukar seluas 15.334,30 Ha atau 4,819%. Penggunaan lahan lainnya terdiri dari tanah berbatu, candi, danau/waduk, gedung, pasir darat dan rumput/tanah kosong.

Tabel 2-6 Penggunaan lahan di DIY

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Tanah Berbatu	8,54	0,003%
Danau/Waduk	1.118,02	0,351%
Hutan	20.299,08	6,379%

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Candi	32,46	0,010%
Permukiman	90.030,39	28,294%
Sawah Irigasi	55.053,05	17,301%
Sawah Tadah Hujan	25.451,23	7,998%
Semak/Belukar	15.334,30	4,819%
Sungai	2.578,08	0,810%
Tambak	365,08	0,115%
Tegalan/Ladang	55.109,92	17,319%
Gedung	1.118,02	0,351%
Kebun/Perkebunan	50.674,21	15,925%
Pasir Darat	0,11	0,000%
Rumput/Tanah Kosong	1.027,97	0,323%

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

2.1.1.1.7 Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir DIY yang meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi tersebut antara lain:

a. Perikanan tangkap laut.

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumberdaya perikanan yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Sementara untuk ikan jenis pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Selain itu, untuk jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang

potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisangpisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.

Potensi sumberdaya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi underfishing karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumberdaya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang open access, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan yang lebih luas pula.

b. Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehnan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

c. Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang khas berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau berada di muara sungai, sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem antara darat dan laut. di dalam hutan

mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2014 seluas 141 ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia caseolaris* dan *Nypa fruticans*) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius*, *Hibiscus tiliaceus*, *Ipomoea pes-caprae*, *Pandanus tectorius*, *Sesuvium portulacastrum*, dan *Terminalia cattapa*)

d. Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunung Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lengas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatan situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

e. Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulon Progo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

f. Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5 kWh/m dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s, sedangkan di Sundak,

Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

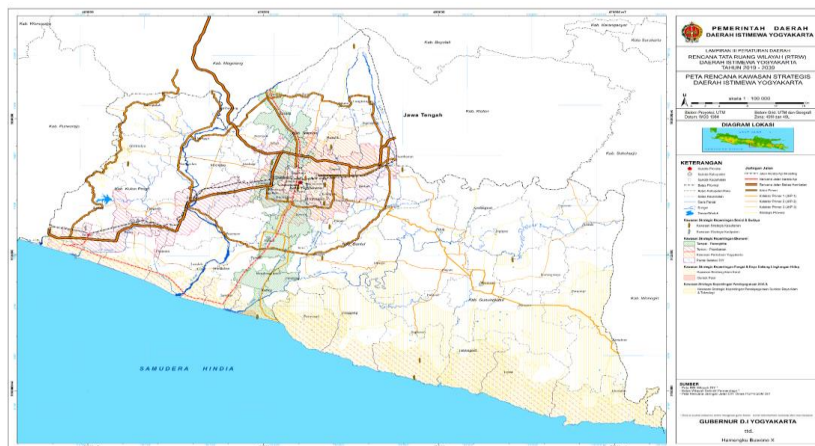
2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039, untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5 Tahun 2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang yang berada pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta Aerotropolis di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.



Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 – 2039
Gambar 2-10 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019

Rencana pola ruang wilayah DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 – 2039 terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun lahan di DIY yang ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan ruang terbuka hijau;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan cagar budaya.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lahan di DIY dengan peruntukan sebagai kawasan Budidaya sebagai berikut :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Luasan lahan untuk masing-masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2-7 Peruntukan lahan di DIY

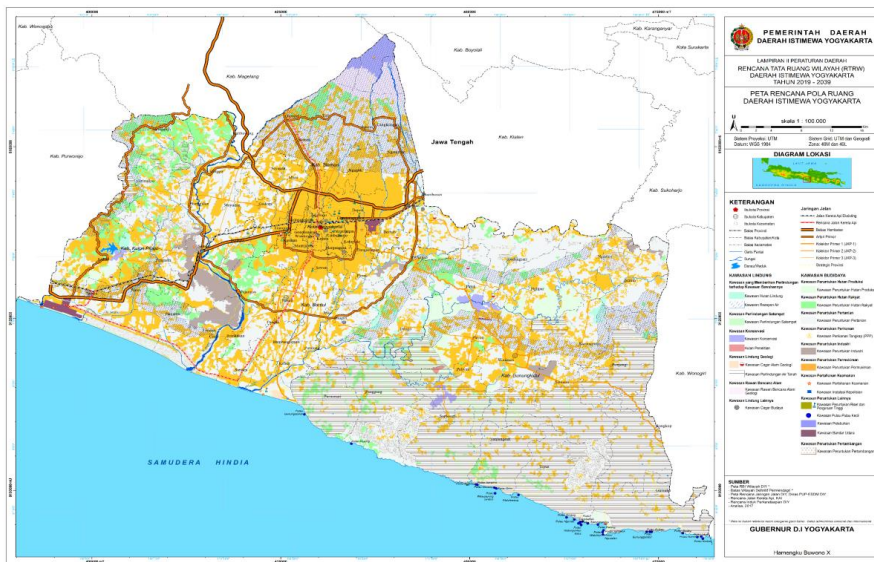
Kawasan Lindung di DIY	Luas (Ha)
Hutan Lindung	2.294,92
Sempadan Pantai	1.311,10
Sempadan Sungai	5.455,40
Sempadan Waduk	72,20
Suaka Margasatwa	619,59
Taman Hutan Raya	634,10
Taman Nasional Gunung Merapi	2.047,62
Taman Wisata Alam	1,03
Cagar Alam	11,88
Hutan Penelitian	101,91
Cagar Alam Geologi	145,18
Rawan Bencana Geologi	3.355,86
Sungai	2.307,55
Danau/Waduk	151,19

Kawasan Budidaya di DIY	Luas (Ha)
Peruntukan Hutan Produksi	13.411,70
Peruntukan Permukiman Pedesaan	66.193,30
Peruntukan Permukiman Perkotaan	21.044,18
Peruntukan Hutan Rakyat	19.140,78
Peruntukan Industri	5.589,79
Peruntukan Perkebunan	21.467,09
Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi	50.827,52
Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	100.408,43
Peruntukan Bandar Udara	893,39

Kawasan Budidaya di DIY	Luas (Ha)
Peruntukan Pelabuhan	23,07
Peruntukan Riset dan Pendidikan Tinggi	25,95
Peruntukan Pertambangan	10.674,99

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambaran secara umum peruntukan lahan di DIY tersaji dalam Peta Pola Ruang berikut.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-11 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 – 2039

2.1.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039, meliputi:

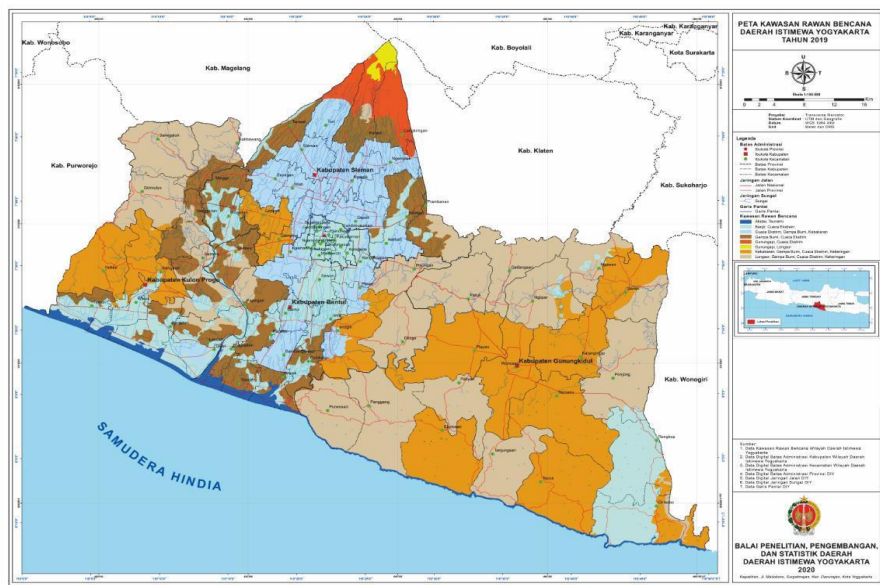
- Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat di Kecamatan Turi,

Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar.

- b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Temon.
- c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Girisubo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tepus.
- d. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Girisubo.

- e. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates; Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari.
- f. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di Kabupaten Bantul; Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman, di Kabupaten Sleman.
- g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni Kecamatan Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap,

Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan GiriSubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Playen.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana DIY

Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi di suatu daerah. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di daerah tersebut. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di daerah. Rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar

(hektar) untuk bencana yang berpotensi di Provinsi DIY, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-8 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

Sumber: RPB DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kelas Yogyakarta bahaya di DIY berada pada rentang kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor

nonalam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan nonalam, selama ini masih relatif kecil.

Selama tahun 2016-2020, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, banjir, angin ribut dan kebakaran. Pada tahun 2017 sebanyak 1,097 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 kejadian bencana yang sering terjadi masing-masing angin ribut 31 kali dan longsor 506 kali kejadian. Pada tahun 2020, terjadi penurunan korban meninggal bencana alam sebanyak 11 orang dan luka-luka 38 orang.

Tabel 2-9 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2016 - 2020

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
Angin Kencang	138	89	147	168	162
Gempa Bumi	26	89	124	122	135
Letusan Gunungapi	0	0	12	4	9
Kebakaran	151	343	217	343	205
Kebakaran Hutan/Lahan	3	0	50	199	35
Tanah Longsor	394	1.097	216	506	436
Gelombang Pasang	4	2	1	2	1
Abrasi	0	2	0	0	0
Banjir	14	14	12	12	13
Kekeringan	1	1	1	1	1
Konflik sosial	1	0	1	1	0
Epidemi & Wabah Penyakit (Covid-19)	0	0	0	1	1

Sumber: DIBI DIY 2020

Tabel 2-10 Korban Bencana DIY Tahun 2016 – 2020

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meninggal	6,00	10,00	4,00	13,00	2,00 *	Orang
2	Luka-Luka	n/a	11,00	23,00	50,00	12,00 *	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, *) Sementara

2.1.1.2 Aspek Demografi

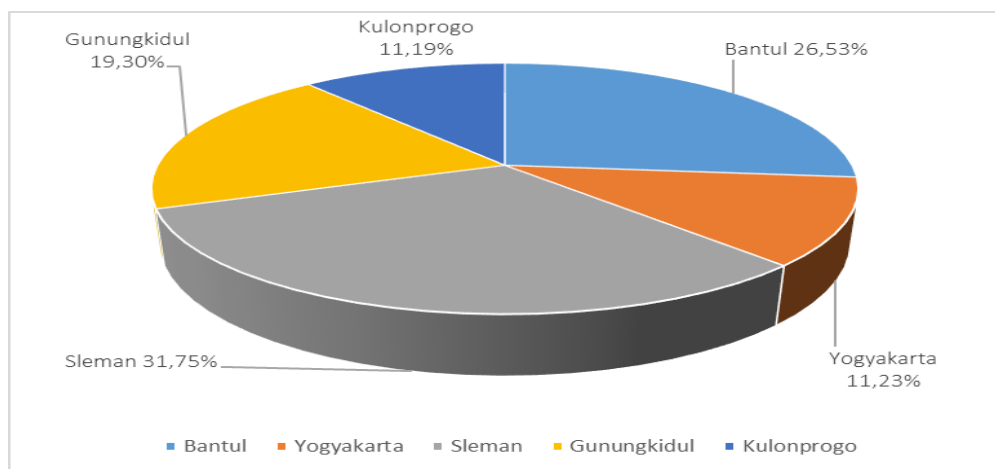
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 sebanyak 3.882.288 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk DIY selalu ada di atas 97%, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. *Sex ratio* jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 adalah 98,01.

**Tabel 2-11 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa)
Tahun 2015 - 2020**

Kelamin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	1.818.765	1.839.951	1.860.900	1.887.294	1.901.763	1.921.605
Perempuan	1.860.411	1.880.961	1.901.300	1.930.972	1.941.169	1.960.683
Jumlah	3.679.176	3.720.912	3.762.200	3.818.266	3.842.932	3.882.288
<i>Sex Ratio</i>	97,76	97,82	97,88	97,73	97,97	98,01

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (BIRO TAPEM)

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.219.640 jiwa atau 31,75% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling padat kedua yaitu sebanyak 1.018.402 jiwa atau sekitar 26,53%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 430.220 jiwa (11,19%).



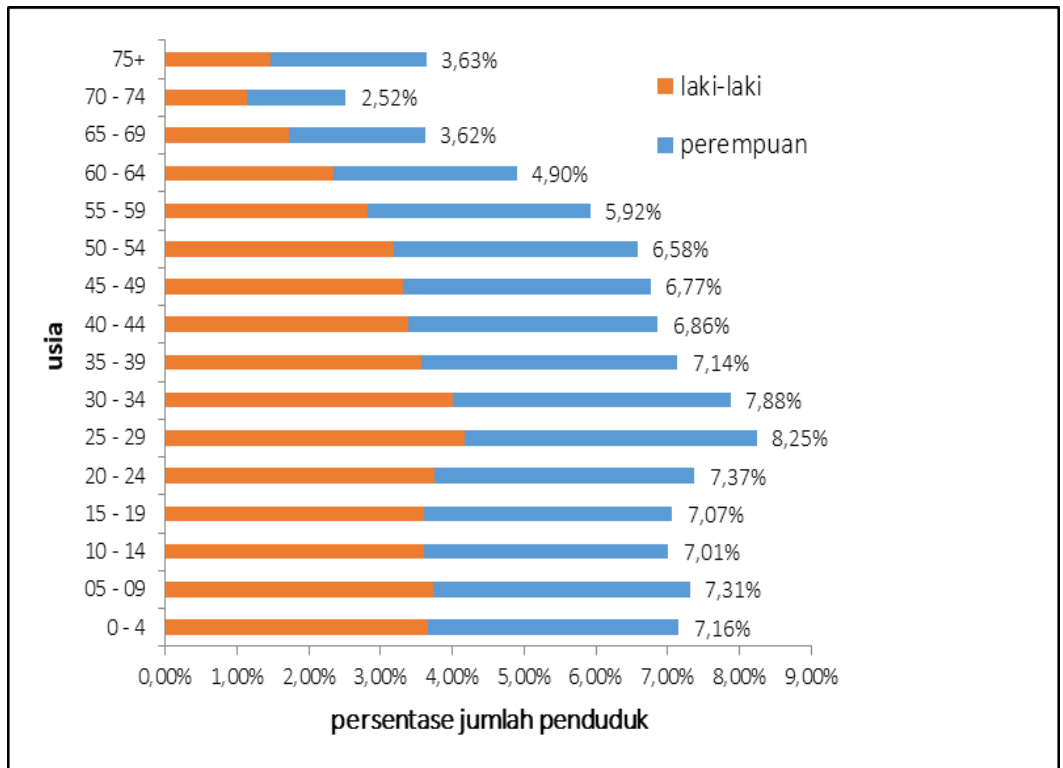
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (Data Diolah)

Gambar 2-13 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 8,25% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 7,88%. Dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa

potensi sumber daya manusia yang berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-14 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan

dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2020), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2020 sebesar 1,02%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,88% dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,14%.

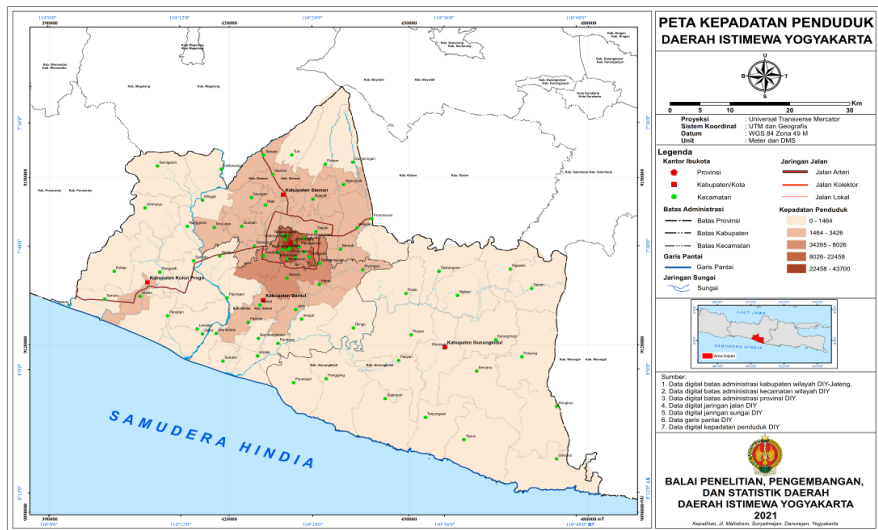
Tabel 2-12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2020

Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kulon Progo	1,09%	1,11%	1,06%	1,05%	0,99%*
Kabupaten Bantul	1,24%	1,19%	1,15%	1,16%	1,14%*
Kabupaten Gunungkidul	1,01%	0,95%	0,94%	0,89%	0,88%*
Kabupaten Sleman	1,11%	1,10%	1,11%	1,07%	1,06%*
Kota Yogyakarta	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%	0,93%*
DI Yogyakarta	1,13%	1,11%	1,08%	1,15%	1,02%*

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 Keterangan: *) Angka Proyeksi

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2019 mencapai 1.206 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut :

- 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.290 jiwa per km²,
- 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.122 jiwa per km²,
- 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.009 jiwa per km²,
- 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 734 jiwa per km², dan
- 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 500 jiwa per km².



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk DIY

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

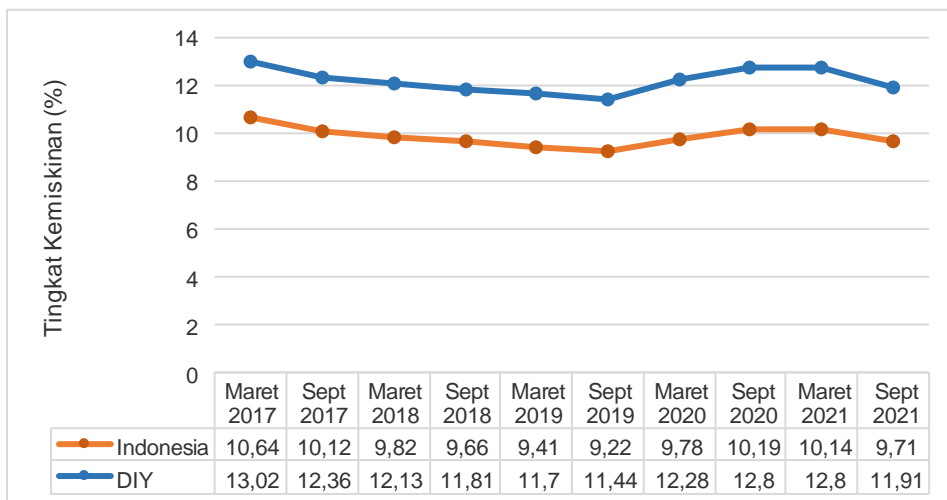
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.1.2.1.1 Penduduk Miskin

Setelah sebelumnya tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada September tahun 2020 tingkat kemiskinan di DIY meningkat mencapai 12,80% atau mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kondisi pada September 2019 yang sebesar 11,44%. Maret tahun 2021 tingkat kemiskinan DIY sebesar 12,80% pada September 2021 turun 0,89% sehingga angka kemiskinannya sebesar 11,91% masih berada diatas angka nasional yaitu sebesar 9,71% .

Penurunan kemiskinan di DIY pada September 2021 diduga didorong dari upaya Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di DIY yang berkaitan bantuan sosial bagi warga masyarakat melalui program perlindungan sosial (perlinsos) tepat sasaran.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-16 Tingkat Kemiskinan DIY (Maret 2017-September 2021)

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti

yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel 2-13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,7	12,8	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,39
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	13,5
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,12
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,27

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan terus menurun dalam periode 2017 hingga 2019. Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,1% di mana tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan *cost effectiveness*. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, dan mendayagunakan potensi, sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi

dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk miskin di pedesaan tahun 2021 (September) sebesar 11,20% penduduk miskin di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 331,71 ribu penduduk. Sementara itu, di wilayah pedesaan hanya sekitar 142,78 ribu jiwa (13,99%). Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-14 Data Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 per bulan Agustus 2021

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 (jiwa)
1	Gunungkidul	580.558
2	Sleman	548.086
3	Kulon Progo	581.626
4	Bantul	545.215
5	Yogyakarta	156.253
DIY		2.411.738

Sumber: Data DTKS Kemensos RI, 2021

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS diperoleh dari Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat berdasarkan prelist awal dan usulan baru. Musdes/Muskel akan menghasilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah dan perangkat kalurahan lainnya, yang kemudian menjadi *Prelist Akhir*. *Prelist Akhir* dari Hasil Musdes/Muskel digunakan oleh Dinas Sosial

untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi SIKS Offline oleh Operator Kalurahan/Kapanewon. Data yang sudah diinput di SIKS Offline kemudian di ekspor berupa file extentionsiks.

File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam Aplikasi SIKS *Online*. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengunggah surat Pengesahan Bupati/Walikota dan Berita Acara Musdes/ Muskel. Pendaftaran fakir miskin kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Link) tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan

Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2-15 Penanggulangan Kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewonan DIY

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Playen	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Gedangsari	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Nglipar	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Ponjong	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Tepus	- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
	Karangmojo	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
Kulon Progo	Sentolo	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Kokap	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Mitigasi bencana
	Pengasih	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Samigaluh	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Bantul	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Akses listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Sleman	Tempel	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Seyegan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
	Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal

Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor 401/0161

Tabel 2-16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Tahun 2017 - 2021 (Maret 2017-September 2021)

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2017	309,03	11,72	179,51	16,11
September 2017	298,39	11,00	167,94	15,86
Maret 2018	305,24	11,03	154,86	15,12
September 2018	298,47	10,73	151,78	14,71
Maret 2019	304,66	10,89	143,81	13,89

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
September 2019	298,74	10,62	142,15	13,67
Maret 2020	326,13	11,53	149,59	14,31
September 2020	353,21	12,17	149,93	14,57
Maret 2021	358,66	12,23	147,80	14,31
September 2021	331,71	11,70	142,78	13,99

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2-17 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 - 2021 (Maret 2017-September 2021)

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Perdesaan
Maret 2017	385.308	348.061
September 2017	413.631	352.861
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507,007	414.240
September 2021	358285	438.412

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Empat komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras walaupun dengan komposisi yang berbeda-beda. Sementara itu, beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2-18 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2021 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Garis Kemiskinan Makanan			
Beras	18,54	Beras	22,75
Rokok kretek filter	8,01	Telur ayam ras	4,39
Telur ayam ras	5,888888	Daging ayam ras	3,18
Kue basah	2,65	Rokok kretek filter	5,07

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Daging ayam ras	4,93	Bawang Merah	1,94
Garis Kemiskinan non Makanan			
Perumahan	7,83	Perumahan	7,01
Bensin	7,15	Bensin	5,86
Pendidikan	2,03	Perlengkapan mandi	1,26
Listrik	2,38	Air	1,92
Perlengkapan mandi	1,27	Kesehatan	1,26

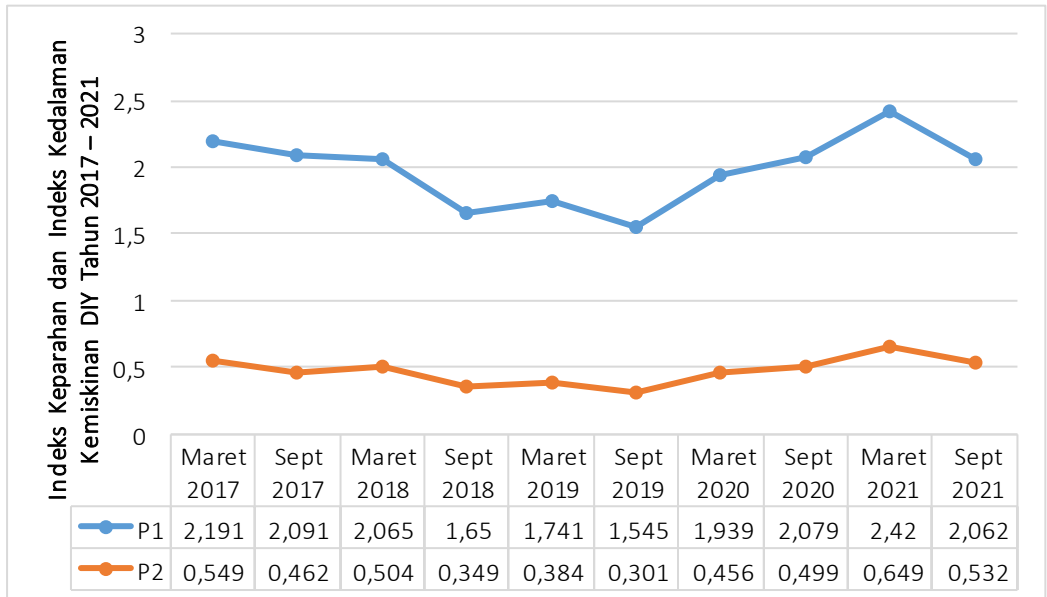
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada September 2019, indeks P1 tercatat sebesar 1,741. Pada September 2019, nilai indeks P1 turun menjadi 1,545. Namun pada Maret 2020 indeks P1 meningkat menjadi 1,939 dan kembali meningkat pada September 2020 menjadi 2,079. Kemudian, pada Maret 2021, indeks P1 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,420. Namun pada September 2021, indeks P1 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,062. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan

kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di perdesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan Berbeda dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan fluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2019, Indeks P2 di DIY tercatat sebesar 0,384. Pada September 2019 nilai indeks P2 turun menjadi 0,301 cenderung menurun yang berarti kesenjangan antara penduduk miskin semakin menyempit. Namun pada Maret 2020, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya kedalaman kemiskinan, indeks P2 juga mengalami peningkatan menjadi 0,456 dan semakin naik menjadi 0,499 pada September 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. Satu semester kemudian, pada Maret 2021, indeks P2 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 0,649. Selanjutnya pada September 2021, nilai indeks P2 turun menjadi 0,532. Meskipun menurun, namun bila dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, angka indeks P2 tersebut masih lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan masih meningkatnya kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Profil Kemiskinan DIY- BPS 2022).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-17 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2021 (Maret 2017-September 2021)

2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10,980 triliun dengan nilai

PDRBnya sebesar 149.369 triliun. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar Rp27,42 triliun hal ini akibat dari pandemi Covid-19 yang melaksanakan PPKM dimana aktivitas sosial dan ekonomi sangat terbatas sehingga berkurangnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp107.308 triliun. Komponen pengeluaran berikutnya yang mendorong pertumbuhan triwulan IV-2021 adalah komponen ekspor luar negeri, konsumsi LNPRT, dan pembentukan modal tetap bruto, masing-masing tumbuh 24,52 persen, 7,38 persen, dan 5,58 persen. Demikian pula komponen impor luar negeri dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga tumbuh 4,78 persen, dan 3,33 persen.

Tabel 2-19 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.456.173	11.933.401	13.237.380	14.095.797	14.521.691
Pertambangan dan Penggalian	593.156	615.943	713.919	677.483	668.454
Industri Pengolahan	14.547.753	15.636.603	18.086.378	17755279	18.458.784
Pengadaan Listrik dan Gas	141.794	173.689	202.276	198.151	203.054
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	114.765	121.272	139.653	141.444	153.139
Konstruksi	10.286.734	11.303.630	11.303.630	13.325.553	15.147.860
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.332.038	10.241.621	11.958.914	11.639.485	12.169.431
Transportasi dan Pergudangan	6.251.304	6.783.681	7.960.610	6.327.777	6.609.464
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.255.100	12.304.099	14.631.663	12.234.070	13.689.597
Informasi dan Komunikasi	8.957.494	9.789.586	11.262.725	13.455.358	16.015.667

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.334.288	4.640.944	564.5948	558.2173	5.954.918
Real Estate	7.808.289	8.382.668	9.871.072	10.220.305	10.489.736
Jasa Perusahaan	1.115.194	1.207.970	1.437.497	1.248.376	1.379.630
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.217.108	10.213.350	11.556.325	11.679.911	12.056.096
Jasa Pendidikan	9.013.442	9.711.308	11.472.125	12.276.381	13.234.223
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.759.865	3.004.112	3.518.720	4.396.362	4.729.131
Jasa Lainnya	2.824.990	3.109.029	3.655.439	3.134.839	3.888.295
PDRB	119.128.718	129.818.357	141.068.183	138.388.752	149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB bertambah rata-rata sebesar 7,49%. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 adalah Rp31.665 juta kemudian meningkat menjadi Rp36,708 juta di tahun 2019. Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi Rp35,646 juta Dan tahun 2021 menjadi Rp38,808 juta.

Tabel 2-20 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	119.128.718	129.818.358	141.068.183	138.388.752	149.369.169
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH Berlaku (juta rupiah)	31,665	34,137	36,708	35,646	38,808
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH Berlaku (%)	7,14	7,81	7,53	-2,89	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata sebesar 4,378%. PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp38,808 juta dari Rp35,646 juta di tahun 2020. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 2-21 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021

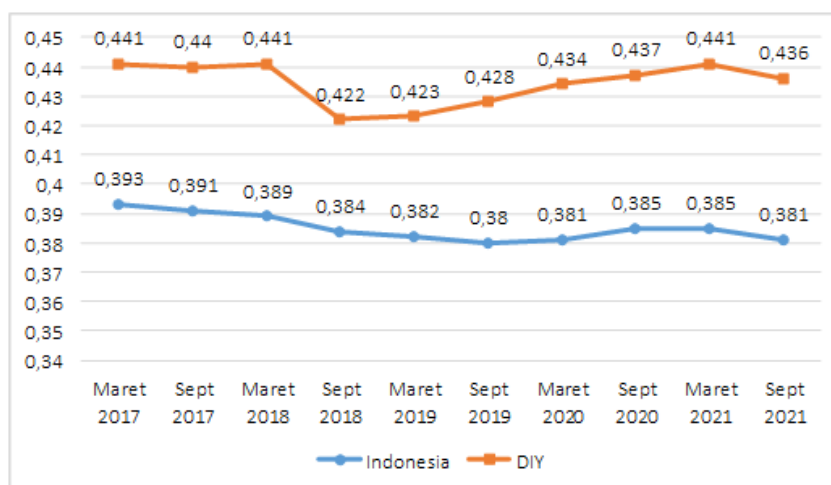
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	92.300.243	98.300.243	104.487.543	101.679.600	107.308.555
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita	24,534	25,849	27,190	26.191	27,462

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
ADH konstan 2010 (juta rupiah)					
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	4,10	5,36	5,18	-3,67	4,85

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

2.1.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan Dan Ketimpangan Regional

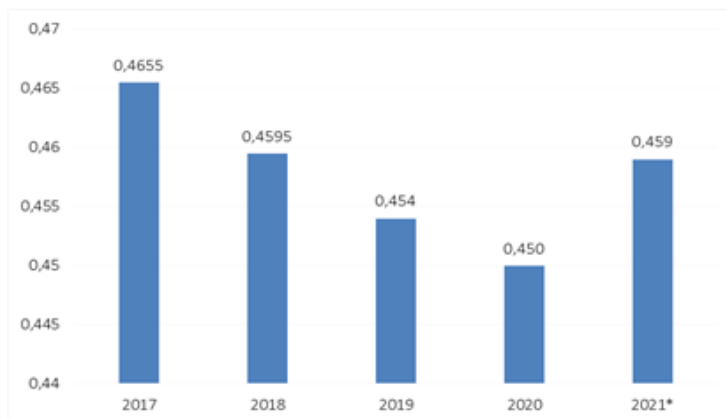
Gambar di bawah menunjukkan perkembangan rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2017-September 2021 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu September 2019 sampai dengan September 2021 mengalami peningkatan yang berturut-turut dan kondisinya berada di atas rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-18 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 - 2021

Indeks Williamson pada periode 2017-2021, pada Gambar 2-19, menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 0,4655 di tahun 2017 menjadi 0,459 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 Keterangan: *) olahan

Gambar 2-19 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2021

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-22 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	9.060.465	10.312.524	11.995.771	11.654.319	12.443.063

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bantul	22.611.706	24.443.273	26.345.477	26.161.312	28.090.839
Gunungkidul	16.199.841	17.527.715	18.844.736	18.972.196	20.418.147
Sleman	40.047.863	43.793.253	47.580.784	45.833.487	49.500.004
Kota Yogyakarta	31.309.045	30.300.824	32.817.771	32.043.100	34.514.313
DIY	119.128.718	129.818.357	141.047.688	138.306.833	149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

2.1.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2-23 Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2021

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,24	0,55	0,42	0,27	0,54
Februari	0,36	-0,05	-0,08	0,40	0,14
Maret	-0,06	0,15	0,26	0,07	0,08
April	0,28	0,10	0,46	0,24	0,01
Mei	0,33	0,08	0,42	0,22	0,07
Juni	0,69	0,46	0,25	0,08	0,05
Juli	0,43	0,56	0,05	-0,08	0,11
Agustus	-0,45	-0,26	0,07	-0,04	0,05
September	0,13	-0,11	-0,07	0,03	-0,17
Oktober	0,16	0,13	0,18	0,08	0,24

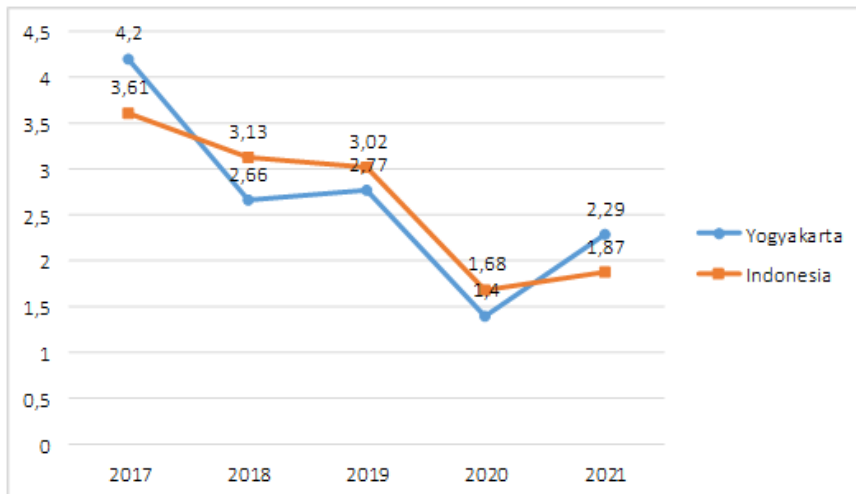
Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
November	0,2	0,46	0,31	0,13	0,45
Desember	0,9	0,57	0,46	0,48	0,71
Inflasi Tahunan	4,20	2,66	2,77	1,40	2,29

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 Kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga

komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. Disamping itu pembatasan aktivitas melalui kebijakan PPKM di wilayah DIY sejak bulan Juli 2021 mengakibatkan penurunan produktivitas sektor-sektor ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19 di wilayah DIY pada triwulan III juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-20 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Pola inflasi tahunan Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 selalu dapat dikendalikan lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun

menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2021 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Tabel 2-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,63	5,63	2,43
4	Sandang	3,84	3,04	3,84
5	Kesehatan	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,81	3,34	3,92
7	Transportasi & komunikasi	6,72	2,46	0,37
	Inflasi Kota Yogyakarta	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tabel 2-25 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2021

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun	
		2020	2021
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,10	1,01
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,04	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,15	0,11
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,16	0,15
5	Kesehatan	0,11	0,13
6	Transportasi	1,36	0,17

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun	
		2020	2021
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	0,02
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0,40
9	Pendidikan	0	1,92
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	2,40
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13	0,65
	Inflasi Kota Yogyakarta	1,40	2,29

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi di tahun 2021 terbesar adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Bulan September 2021 mengalami deflasi sebesar 0,17% yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,01%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%; dan kelompok transportasi sebesar 0,17%. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15%; kelompok kesehatan sebesar 0,13%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,40%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65%. Adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan

sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein) dan rasio penduduk yang bekerja.

Capaian indikator IPM perlu mendapat perhatian yaitu dalam hal upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian IPM-nya masih di bawah kenaikan provinsi. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara OPD-OPD pengampu di provinsi dan kabupaten/kota.

Pada capaian angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/kota, pembangunan pendidikan di tiga kabupaten/kota, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antarkabupaten/kota di DIY. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam meningkatkan dan pemeratakan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Sedangkan pada capaian Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Dalam hal ini masih diperlukan upaya

intervensi untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas.

Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari beberapa indikator, yaitu angka Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP). Dari capaian indikator pembangunan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah AKI di DIY yang terus meningkat selama lima tahun terakhir.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Berikut IPM DIY beserta komponen pembentuknya.

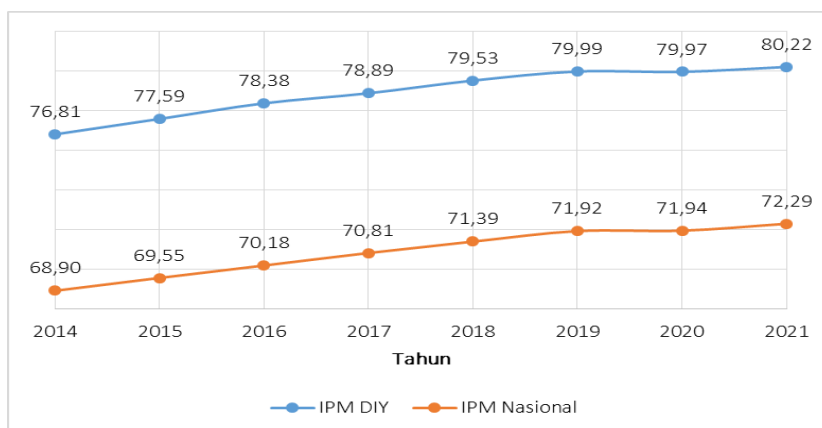
Tabel 2-26 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2017	74,74	15,42	9,19	13.521	78,89
2018	74,48	15,56	9,32	13.946	79,53
2019	74,92	15,58	9,38	14.394	79,99

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2020	74,99	15,59	9,55	14.015	79,97
2021	75,04	15,64	9,64	14.111	80,22

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka IPM DIY beserta komponen-komponennya cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Capaian IPM sempat turun di tahun 2020 karena terjadi pandemi Covid 19, namun meningkat kembali di tahun 2021. Capaian IPM DIY sampai tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Posisi IPM DIY pada tahun 2021 berada dalam kategori “sangat tinggi” (berdasarkan kriteria dari UNDP 70-80).



Sumber: BPS dan Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-21 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2021

Dari data di atas terlihat, bahwa perkembangan IPM DIY selalu berada di atas IPM nasional. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Indeks harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan

terbesar terhadap capaian IPM DIY. Angka Harapan Hidup (AHH) DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Ditinjau dari capaian IPM kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selalu mempunyai nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

Tabel 2-27 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Kabupaten Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00
Kabupaten Gunungkidul	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16
Kabupaten Kulon Progo	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71
Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18
DIY	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22

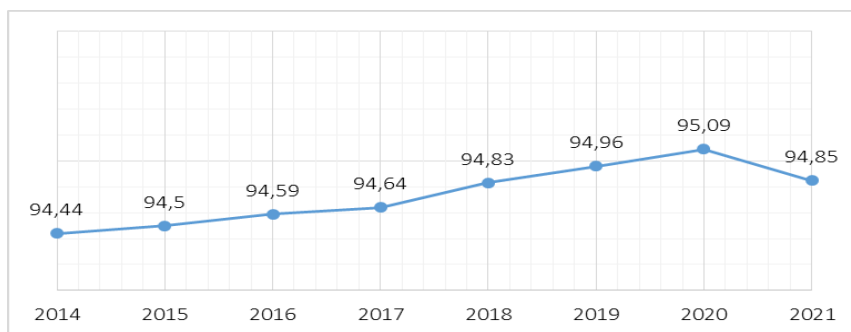
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Capaian IPM menurut wilayah sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun telah menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”. Keberhasilan

pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2020 sebesar 0,68%. Pada tahun 2014 AMH tercatat sebesar 94,44% naik menjadi 95,09% di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 AMH mengalami penurunan dari tahun 2020, dari angka 95,09% menjadi 94,85%.



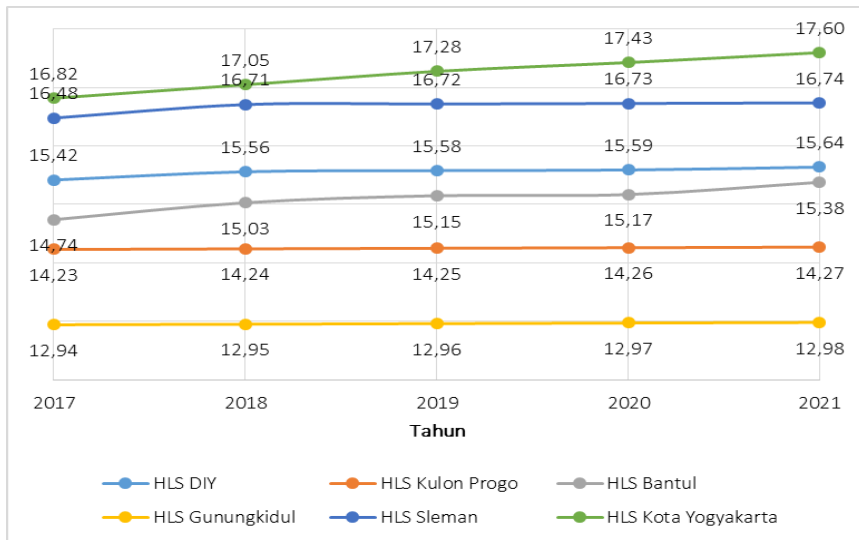
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-22 Perkembangan Angka Melek Huruf di DIY Tahun 2014 - 2021 (%)

2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun). AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS DIY

tahun 2021 sebesar 15,64 tahun, meningkat 0,05 poin dari 15,59 pada tahun 2020.



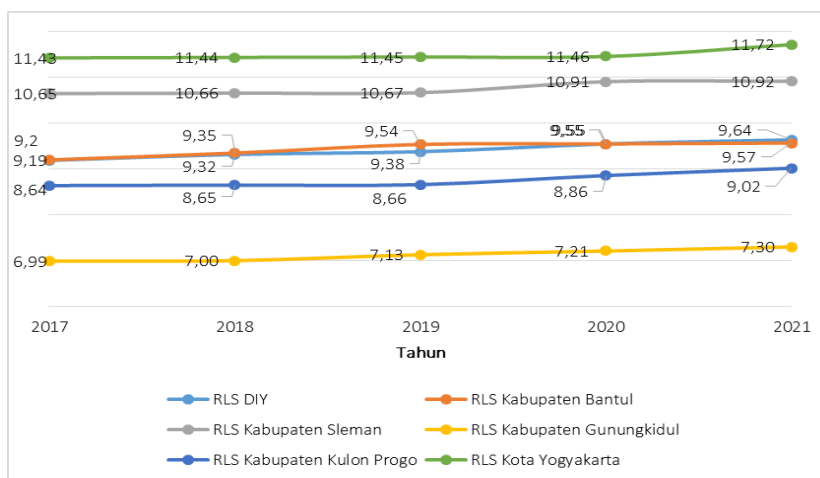
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)

Dari data tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY sedangkan AHLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS kabupaten kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian AHLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan AHLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang signifikan. Selain itu capaian AHLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan gap yang signifikan dibandingkan dengan capaian AHLS di kabupaten/ kota di DIY.

2.1.2.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2017-2021 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,19 di tahun 2017 menjadi 9,64 tahun di tahun 2021. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2017-2021.



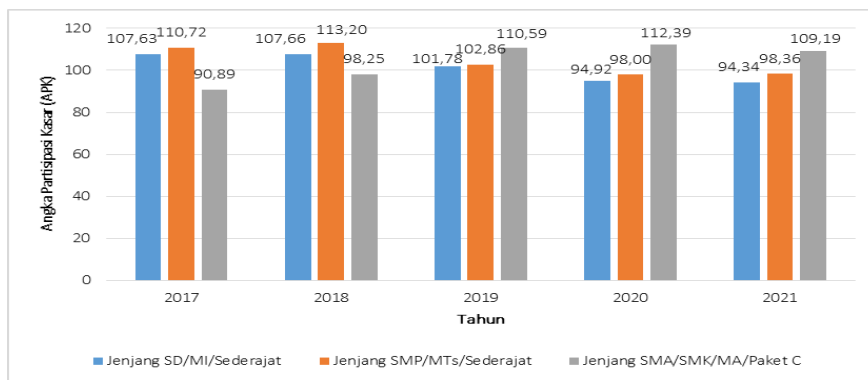
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-24 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian RLS selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya disparitas capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

2.1.2.2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan nonFormal (Paket A, Paket B dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK. Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Capaian APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

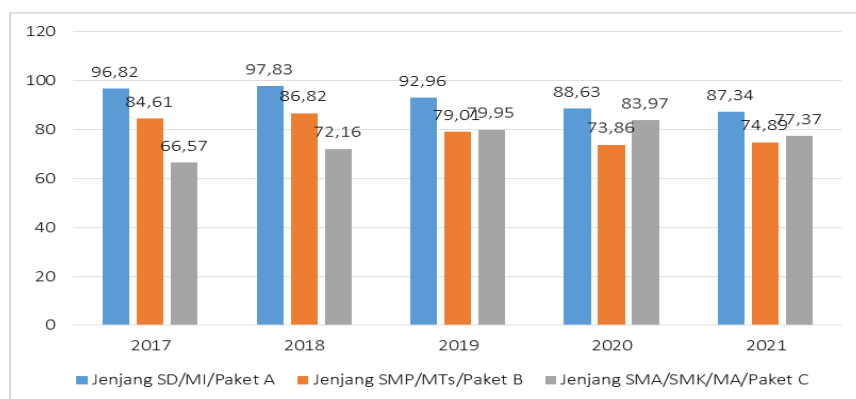
Gambar 2-25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2019 capaian APK SD/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di DIY lebih dari 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada APK SMA/SMK/MA/Paket C mencapai angka 100% pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemda DIY mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat SMA. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, belum semua anak di kelompok usia target SD dan SMP menempuh pendidikan sesuai jenjangnya. Pemda DIY berperan dalam memberikan akses bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah.

2.1.2.2.6 Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur

proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Secara rinci, capaian APM DIY tingkat SD, SMP dan SMA periode 2017 sampai dengan periode 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 - 2021 (Persen)

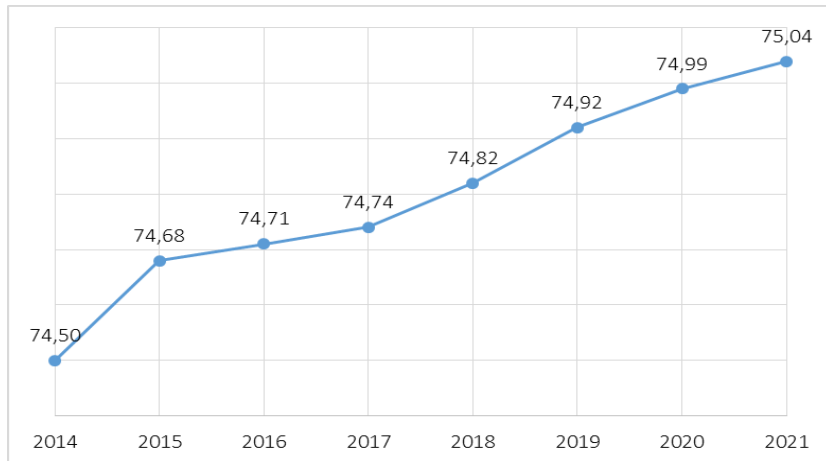
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 jenjang SD, APM mengalami penurunan. Pada jenjang SMP dan SMA sejak 2018 hingga 2021 APM terlihat fluktuatif.

2.1.2.2.7 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah

berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

AHH di DIY dalam kurun waktu 2014-2021 menunjukkan peningkatan dari 74,50 pada tahun 2014 meningkat menjadi 75,04 pada tahun 2021.



Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Gambar 2-27 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2014-2021 (Tahun)

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dan terlihat bahwa gapnya tidak terlalu signifikan antar kabupaten/kota. AHH paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo dan terendah di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 AHH di kabupaten Kulon Progo mencapai 75,27 dan lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH

terendah di Kabupaten Bantul, pada tahun 2021 mencapai 73,89. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-28 AHH DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)

Kabupaten/Kota	AHH				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89
Kabupaten Sleman	74,63	74,69	74,77	74,81	74,92
Kabupaten Gunungkidul	73,82	73,92	74,03	74,12	74,19
Kabupaten Kulon Progo	75,06	75,12	75,20	75,24	75,27
Kota Yogyakarta	74,35	74,45	74,56	74,65	74,76
DIY	74,74	74,82	74,92	74,99	75,04

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

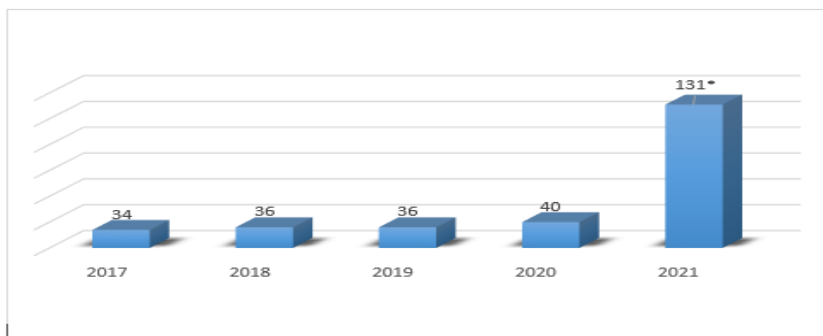
Beberapa faktor yang mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan tersebut. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

2.1.2.2.8 Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut World Health Organization (WHO), kematian ibu atau maternal death menurut adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan

kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

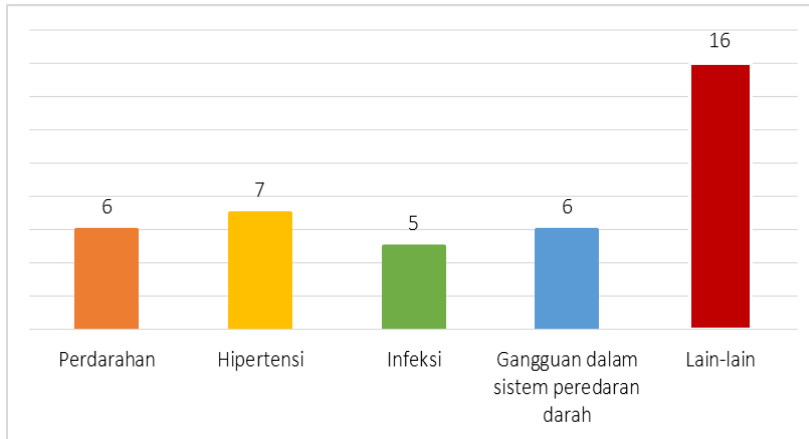
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus (data sementara Dinkes DIY).



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, *) angka sementara

Gambar 2-28 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2017-2021 (Orang)

Pada tahun 2020, penyebab kematian ibu paling banyak ditemukan di DIY karena penyakit lain-lain sebanyak 16 kasus. Kematian ibu yang lain disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan sistem peredaran darah.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Gambar 2-29 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2020 (Kasus)

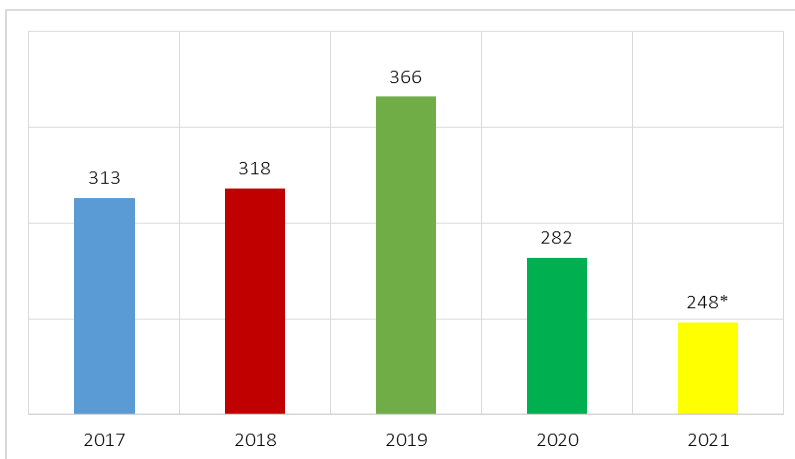
Jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk ibu merupakan tanggung jawab bersama mulai dari saat hamil, persalinan, perawatan pasca persalinan hingga akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

2.1.2.2.9 Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurut BPS, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan

menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup).

Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2017-2021 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, *) angka sementara

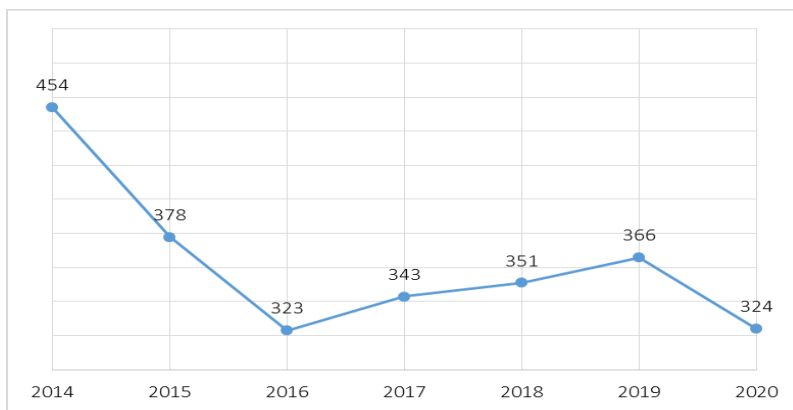
Gambar 2-30 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2017-2021 (Anak)

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 AKB mengalami kenaikan dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 AKB di DIY terus mengalami penurunan. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

2.1.2.2.10 Angka Kematian Balita (AKBA)

Menurut BPS, balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Oleh karena itu, angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

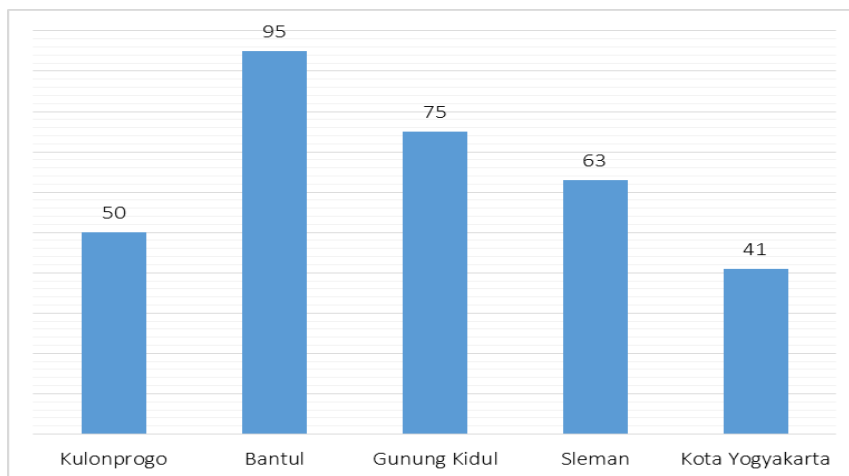
Profil kesehatan DIY tahun 2020 menyebutkan bahwa AKBA DIY adalah 7,9 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa DIY telah memenuhi target Pemerintah Indonesia (32 per 1000 kelahiran hidup). Kasus kematian balita di DIY juga fluktuatif dari tahun 2012-2020, tetapi pada kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 454 pada tahun 2014 dan turun menjadi 378 pada tahun 2015, turun lagi menjadi 323 pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 343, tahun 2018 naik menjadi 351 dan tahun 2019 naik menjadi 366 kasus kematian balita.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Gambar 2-31 Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY Tahun 2014-2020 (Anak)

Pada tahun 2020 kasus kematian balita menurun cukup banyak 42 kasus menjadi 324. Kasus kematian balita tertinggi di Kabupaten Bantul (95 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (41 kasus).



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Gambar 2-32 Jumlah Kematian Balita pada Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2020 (Anak)

2.1.2.2.11 Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita Kurang Energi Protein (KEP) atau gizi buruk dan kurang di DIY fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 prevalensi balita KEP yaitu 7,94. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 8,35 dan tahun 2020 menurun 0,05 menjadi 8,30. Angka prevalensi selama tiga tahun terakhir

masih berkisar pada angka 7-8 yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal. Kondisi paling tinggi prevalensi balita KEP adalah Kota Yogyakarta sebesar 10,70 dan terendah di Sleman 6,50. Angka prevalensi KEP di DIY selama tiga tahun terakhir berkisar pada angka 8 (delapan) yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal.

Tabel 2-29 Prevalensi Balita KEP di DIY Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Kulon Progo	11,84	9,89	10,40
2.	Bantul	8,46	8,62	7,90
3.	Gunungkidul	7,06	7,18	9,20
4.	Sleman	7,84	8,17	6,50
5.	Yogyakarta	8,53	8,46	10,70
DIY		7,94	8,35	8,30

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

2.1.2.2.12 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja.

Tabel 2-30 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2017 - 2021

Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.117,19	2.191,74	2.203,92	2.228,16	2.334,96
Bekerja (Ribuan Orang)	2.053,17	2.118,39	2.134,75	2.126,32	2.228,52

Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja	96,98	96,65	96,86	95,42	95,44

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Sedangkan mengacu pada Perdas No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan

dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*). Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi religio-spiritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya pranata mangsa, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, pawukon, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian), keselarasan alam (merti kali, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (Nyadran, Ruwahan, Suran dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi profane atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni

yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di diy tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, artshop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel 2-31 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Organisasi Seni Rupa	17	15	25	25	29
Organisasi Sinematografi	42	42	44	44	44
Organisasi Seni Pertunjukan	5.808	6.420	8.757	8.757	8.757
Tokoh seniman/ budayawan	496	507	504	968	968
Kerajinan Properti Budaya	244	244	276	276	276
Perusahaan Bioskop	3	3	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	38	38	38	38	38

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan properti budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2019, namun stagnan dari tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah tokoh seniman/ budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Sedangkan perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak ada perubahan selama lima tahun terakhir. Perkembangan kebudayaan di DIY

tidak lepas dari dukungan lembaga maupaun sarana prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2-32 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lembaga Budaya	181	78	186	186	186
Lembaga Pendidikan Budaya	49	49	66	66	66
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Galeri Seni Rupa	29	63	70	70	70

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun 2017 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2021. Sedangkan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan DIY, sampai tahun 2020 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa mitoni, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain merti dusun, ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020 DIY memiliki 56 desa budaya, dan berkembang pada tahun 2021 menjadi 76 desa budaya. Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang

mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan adanya sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka tunggal ika-an. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021.

Tabel 2-33 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Upacara adat	475	478	482	717	717
Upacara tradisi	35	35	35	35	35
Makanan tradisional	180	208	223	276	276
Jenis permainan tradisional	58	58	58	69	69
Jenis busana tradisional	35	38	38	38	38
Sanggar rias tradisional	405	405	406	536	536
Cerita rakyat	33	37	80	63	63
Naskah kuno	509	509	509	714	714

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragam budaya dan kesenian, DIY juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-34 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Bangunan cagar budaya	1.042	1.041	1.077	1.599	1.599
Kawasan cagar budaya	17	17	20	17	17
Benda cagar budaya	807	808	834	1.685	1.687
Situs	339	343	343	343	343
Museum	43	44	47	48	48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinarga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di

Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.1.2.3.2 Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di DIY.

Tabel 2-35 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021

Jenis Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Jumlah lapangan/gedung olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
Jumlah kegiatan olahraga	19	13	12	2	4
Jumlah organisasi pemuda	50	74	74	74	56
Jumlah kegiatan kepemudaan	12	11	11	4	6
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-Undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-

masing sektor. Di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian DIY di atas rata-rata nasional, tetapi perlu upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan Investasi Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai budaya. Pendidikan dengan nilai-nilai kebudayaan akan mewujudkan tercapainya peradaban baru unggul menghasilkan manusia yang utama (jalma kang utama), berasaskan rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan yang selaras dengan semangat *renaissance* di DIY. Dengan demikian, pembangunan pendidikan wajib bersifat inklusif, peka terhadap perkembangan teknologi informasi, responsif bagi hak siswa berkebutuhan khusus dan adaptif untuk penerapan sistem zonasi. Dengan demikian Pemerintah DIY bertanggung jawab akan penyediaan infrastruktur pendidikan yang aksesibel dan memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, serta penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada budaya lokal dan inklusif. Perkembangan terkini pembangunan pendidikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY dapat dilihat pada indikator berikut:

a. Jumlah dan Jenjang Sekolah/Pendidikan

Jumlah dan jenjang sekolah atau pendidikan di DIY tergolong lengkap dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Jumlah sekolah belum tentu menunjukkan kualitas pembangunan pendidikan melainkan persentase sekolah yang terakreditasi. Perkembangan jumlah tiap jenjang sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-36 Perkembangan Jumlah Tiap Jenjang Sekolah Tahun 2017-2021

Jenjang	2017	2018	2019	2020	2021
Taman Kanak Kanak	2.130	2.118	2.122	2.275	2.101
Sekolah Luar Biasa	79	79	79	79	79
Sekolah Dasar	2.014	2.028	2.029	2.011	2.027
Sekolah Menengah Pertama	540	439	550	524	568
Sekolah Menengah Atas	216	162	217	228	229
Sekolah Menengah Kejuruan	218	217	212	214	218
Akademi atau Program Diploma	41	41	41	41	41
Perguruan Tinggi	84	84	84	84	84
Lembaga Pendidikan Ketrampilan	289	202	192	193	193
Jumlah Sekolah	5.279	5.199	5.439	5.252	5.222
Sekolah Terakreditasi	2.770	2.770	3.087	2.575	2.909
Persentase sekolah terakreditasi (%)	52,47	53,27	56,75	49,02	55,7

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pada tahun 2021 jumlah sekolah yang terakreditasi sebanyak 2.909 atau 55,7% dari total jumlah sekolah. Persentase sekolah terakreditasi A di tiap jenjang di DIY pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-37 Persentase Sekolah Berakreditasi A di Tiap Jenjang Pendidikan di DIY Tahun 2017-2021

Kab/Kota	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Dasar (SD)						
Kota Yogyakarta	%	89,29	89,29	77,70	77,70	90,48
Kab. Bantul	%	78,32	80,36	69,64	69,64	81,75
Kab. Kulon Progo	%	53,70	57,53	42,94	42,94	61,85
Kab. Gunungkidul	%	56,06	56,24	52,22	52,22	58,83
Kab. Sleman	%	63,50	66,67	59,41	59,41	68,79

Sekolah Menengah Pertama						
Kota Yogyakarta	%	75,76	77,27	87.32	87.32	75,76
Kab. Bantul	%	71,68	71,68	80.87	80.87	69,75
Kab. Kulon Progo	%	64,56	64,56	71.60	71.60	70,00
Kab. Gunungkidul	%	60,28	60,28	73.68	73.68	66,67
Kab. Sleman	%	72,86	73,57	84.25	84.25	78,68
Sekolah Menengah Atas						
Kota Yogyakarta	%	75,00	75,00	89.74	89.74	70,00
Kab. Bantul	%	76,60	76,60	84.62	84.62	83,33
Kab. Kulon Progo	%	60,00	60,00	90.63	90.63	70,59
Kab. Gunungkidul	%	67,74	67,74	75.00	75.00	73,91
Kab. Sleman	%	56,92	55,38	71.43	71.43	54,72

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana

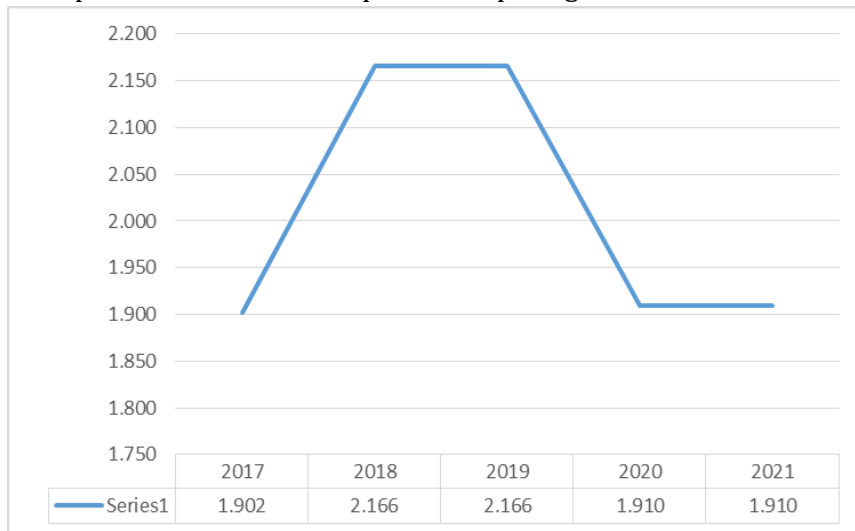
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu input krusial untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas. Sarana dan prasarana tersebut antara lain ratio ruang kelas dan fasilitas laboratorium komputer. Rasio ruang kelas untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah memenuhi standar yaitu dibawah 32 peserta didik per kelas. Pada tahun 2021 rasio kelas untuk SD adalah 20 siswa per kelas, SMP 29 per kelas, SMA 29 per kelas dan SMK 26 per kelas. Selain rasio kelas dukungan ruang kelas yang layak dan nyaman juga penting. Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat terdapat disemua jenjang kecuali jenjang SMA dan SMK. Kondisi fisik ruang kelas jenjang SD-SMA Sederajat di DIY tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-38 Kondisi Fisik Ruang Kelas Jenjang SD-SMA Sederajat di DIY Tahun 2017-2021

Jenjang Sekolah	2017			2018			2019			2020			2021		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
MI	833	252	64	842	221	69	916	261	63	1019	256	66	1.029	238	61
SD	11.404	1.732	353	11.358	1.795	346	11,221	1,908	434	6245	6195	65	6.249	6.605	48
MTs	899	77	14	871	69	24	911	86	19	777	119	19	805	127	18
SMP	3.894	759	73	3.891	801	121	3,770	856	94	2513	2049	27	2.443	2.272	21
SMA	1.977	149	35	1973	132	13	1,475	94	18	1285	781	0	1.323	850	0
SMK	2.672	136	20	2.644	202	28	2,571	198	17	2027	1207	1	1.866	1.449	0
MA	2.672	136	20	585	19	2	418	18	7	590	20	3	616	22	5

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dukungan berikutnya adalah ketersediaan fasilitas laboratorium komputer dan internet. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah fasilitas laboratorium dan internet dari 2.166 di tahun 2018 menjadi 1.910 di tahun 2020. Tren penurunan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-33 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Tahun 2017-2021

c. Kualitas Guru

Dalam pembangunan pendidikan kualitas guru merupakan hal yang tidak boleh luput untuk terus menerus ditingkatkan. Kualitas guru dapat dilihat dari kesesuaian kualifikasi dan dilanjutkan dengan pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa kualifikasi guru di DIY dari jenjang SD sampai dengan SMA tergolong baik dengan pencapaian persentase lebih dari 90%. Selanjutnya untuk persentase guru tersertifikasi di DIY untuk tiap jenjang masih membutuhkan peningkatan. Data perkembangan persentase guru sertifikasi.

Tabel 2-39 Persentase Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2017 - 2021

Jenjang Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
SD	51,28	51,90	37,42	56,95	52,81
SMP	65,92	69	61,23	62,56	53,62
SMA	59,52	67,80	56,05	63,07	53,94
SMK	47,25	55,30	47,93	58,46	57,26

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

d. Keterserapan Di Dunia Kerja

Salah satu indikator pendidikan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi adalah kesiapan seorang alumni untuk memasuki atau diterima di dunia kerja. Jenjang pendidikan yang diharapkan dapat langsung bekerja adalah lulusan SMK dan lulusan kursus, pelatihan, magang dan kelompok belajar. Pada perkembangan lima tahun terakhir ketersepan jenjang pendidikan tersebut di dunia kerja masih kurang memuaskan karena dibawah angka 50%. Data persentase keterserapan di dunia kerja melalui pendidikan formal dan informal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-40 Persentase Keterserapan di Dunia Kerja melalui Pendidikan Formal dan Informal Tahun 2017 - 2021

Lulusan pendidikan informal/formal yang memasuki dunia kerja	2017	2018	2019	2020	2021
Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki	76,94	n/a*	n/a*	37,73	-

dunia kerja					
Lulusan SMK diterima di dunia kerja	51,08	54,63	64,45	45,32	46,08

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

e. Layanan Teknologi Informasi

Pemerintah Daerah DIY melalui Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY telah menyediakan sejumlah layanan teknologi pendidikan yang aksesibel bagi guru dan siswa baik untuk penyediaan informasi pendidikan sekaligus media interaktif pendukung pembelajaran. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah Jogja Belajar yang terdiri dari Jogja Belajar Radio, Jogja Belajar Budaya, Jogja Belajar Tube, Jogja Belajar Media dan Jogja Belajar Class. Jumlah pengguna layanan Jogja Belajar dapat dilihat pada tabel berikut:

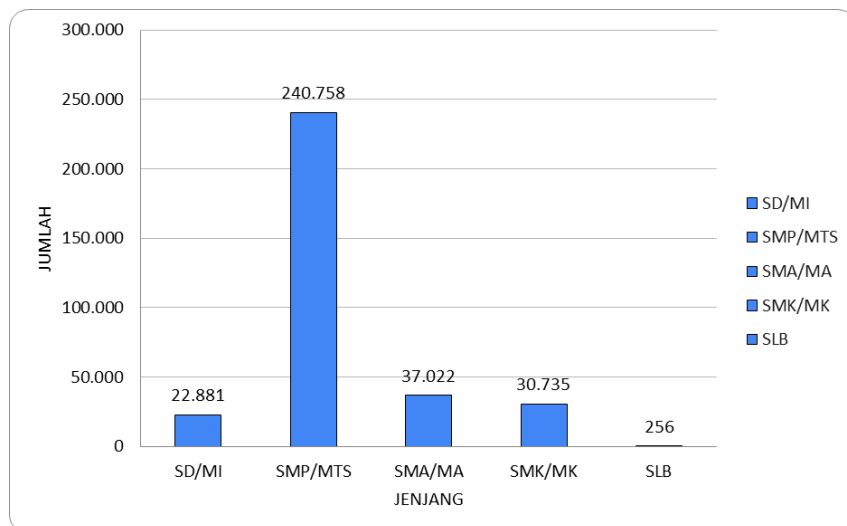
Tabel 2-41 Jumlah Pengguna Layanan Jogja Belajar Tahun 2017-2021

Jenis JB	2017	2018	2019	2020	2021
Jogja Belajar Radio	11.542	30.235	31.691	25.498	27.373
Jogja Belajar Budaya	-	1.618	3.458	184.549	546.096
Jogja Belajar Tube	-	75.302	75.040	240.758	132.698
Jogja Belajar Media	-	-	-	-	4.852
Jogja Belajar Class	-	104.129	158.423	558.291	141.546

Dari tabel diatas layanan Jogja Belajar telah aktif sejak tahun 2017 yang dimulai dengan Jogja Radio. Layanan yang paling banya diminati adalah Jogja Belajar Budaya dan Jogja Belajar Class dengan jumlah pengunjung pernah mencapai diatas 500.000.

Layanan Jogja Belajar merupakan layanan unggulan yang merupakan adaptasi dari sitem pendidikan konvensional yang dimodifikasi dalam bentuk elektronik dan berbasis website.

Layanan Jogja Belajar Class telah dinikmati oleh siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Jumlah penggunaan Jogja Belajar Class berdasar jenjang pendidikan dari tahun 2015 sampai dengan Februari 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2-34 Pengguna Jogja Belajar Class tahun 2015 sd Februari 2022 Sesuai Jenjang Pendidikan

Kegiatan pendidikan yang dilakukan lewat Jogja belajar antara lain diseminasi, Kihajar, Lokakarya, bimbingan teknis, buletin dan warta guru, *mobile learning service* dan layanan Jogja Belajar Class. Pada tahun 2021 jumlah guru pengguna layanan atau kegiatan tersebut mencapai 19.407 guru atau 49,01%. Sedangkan jumlah siswa pengguna layanan mencapai 108.207 siswa atau 18,89%. Jumlah partisipasi untuk masing masing kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-42 Persentase Penggunaan Layanan BTKP DIY Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Guru Partisipasi	Jumlah Siswa Partisipasi
1	Diseminasi	0	0
2	Kihajar	0	0
3	Bimbingan Teknis	340	0

4	Lokakarya	8284	0
5	Buletin dan Warta Guru	0	0
6	Mobile Learning Service	450	0
7	Layanan Jogja Belajar Class	10.333	108.207
TOTAL GURU PARTISIPASI		19.407	
TOTAL GURU DIY		39.596	
PROSENTASE GURU PENGGUNA LAYANAN		49.01%	
TOTAL SISWA PARTISIPASI		108.207	
TOTAL SISWA DIY		572.703	
PROSENTASE SISWA PENGGUNA LAYANAN		18.89%	

f. Layanan Pendidikan berbasis Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan aspek utama dalam pembangunan SDM di DIY untuk menciptakan ‘manusia yang utama’ (*jalmâ kang utâmâ*). Pendidikan berperan dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera, dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya.

Pendidikan berbasis budaya merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Pada tahun 2021 berdasarkan sampel 464 SD dari total 2027 SD, dinyatakan bahwa SD di DIY yang telah menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya dengan kategori baik keatas sebanyak 98,71%.

g. Layanan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang salah satunya terkait dengan urusan

pendidikan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan. Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Data pada tahun 2016 menyebutkan bahwa masih terdapat 1.692 anak berkebutuhan khusus di DIY yang belum mengakses layanan pendidikan. Jumlah tersebut terbanyak ada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 701 anak dan disusul 342 anak di Kulon Progo dan 301 di Kabupaten Sleman. Beberapa faktor penyebabnya selain akses juga disebabkan oleh keluarga dan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, pengembangan kurikulum, pengembangan manajemen sekolah, serta peningkatan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak siswa berkebutuhan khusus. Data jumlah anak berkebutuhan khusus di tiap Kabupaten dan golongan umur yang membutuhkan layanan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-43 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Yang Membutuhkan Layanan Pendidikan

Kabupaten/ Kota	2016				
	0 - 4	5 - 6	7 - 13	14 - 16	17 - 21
Bantul	18	15	97	71	69
Gunungkidul	53	47	223	167	211
Kota Yogyakarta	5	4	27	16	26
Kulon Progo	24	27	86	67	97
Sleman	25	26	121	75	95

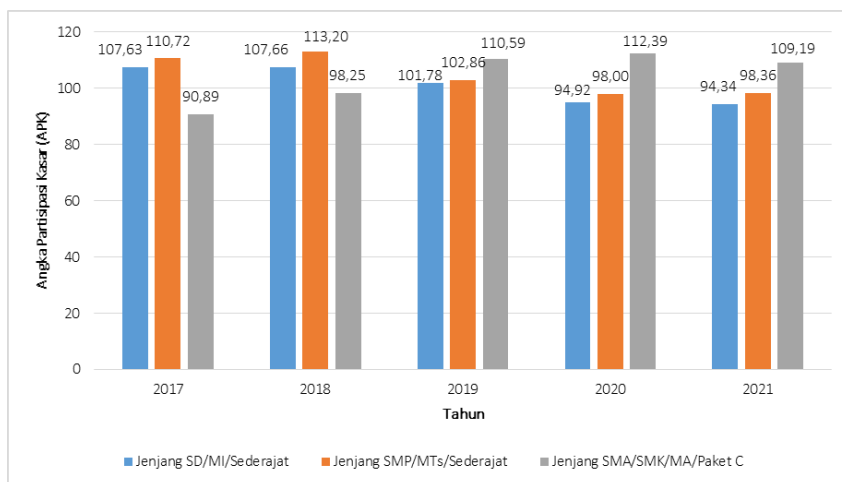
Sumber: Dinas Pendidikan dan Olahraga 2022

Nb: Data diatas diambil setiap empat tahunan dan selanjutnya akan diambil kembali tahun 2022

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

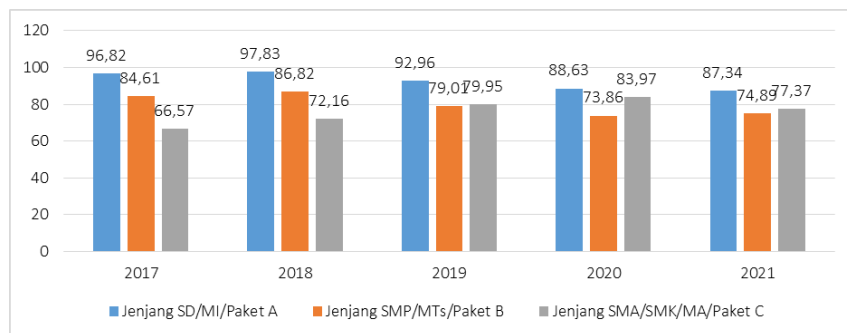
Gambar 2-35 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Dari periode 2017-2021, capaian APK SD/ sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Hal yang sama terjadi pada capaian APK SLTP DIY/ sederajat juga di atas 100%, karena banyak

kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun, kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP di atas 100%. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga karena anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/sederajat.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.



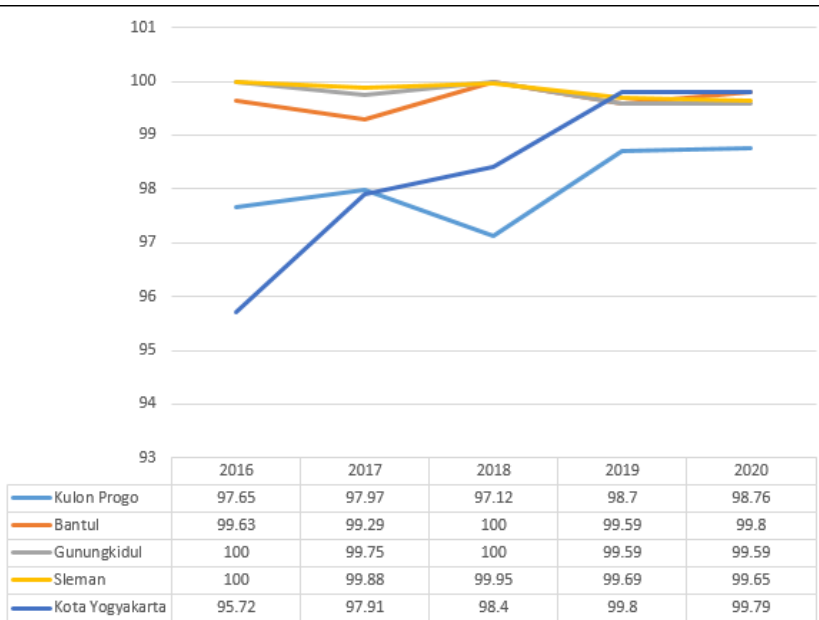
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-36 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami tren penurunan, di samping itu capaian APM terlihat semakin menurun seiring dengan

meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah, tinggal kelas dan tidak melanjutkan sekolah baik untuk jenjang SD, jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY Tahun 2021 untuk semua jenjang pendidikan berkecenderungan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2017-2021.

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD tertinggi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 100% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 96,65%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia dibawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-37 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2016-2020 di tiap kabupaten/kota DIY

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

2.1.3.1.2.1 Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

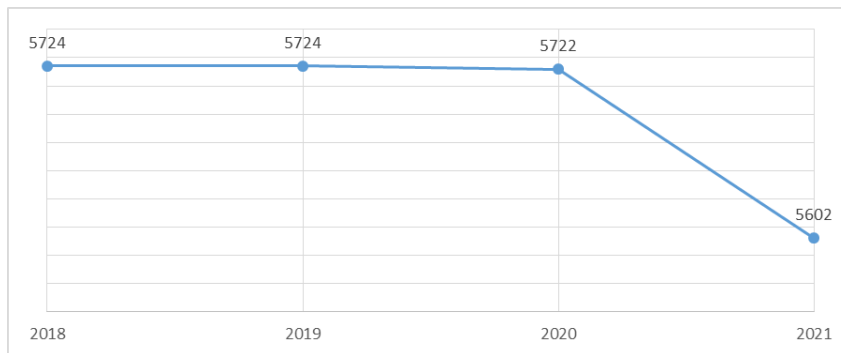
Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY pada tahun 2018-2021 sebanyak 5.718 posyandu dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5.722 posyandu. Dari total jumlah posyandu tersebut masih ada sebagian yang termasuk dalam kategori posyandu yang kurang aktif. Proporsiposyandu aktif pada tahun 2018 adalah sebesar 78,87% dan menunjukkan angka yang fluktuatif hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 menunjukkan penurunan persentase posyandu aktif menjadi sebesar 61,97% posyandu aktif dari total keseluruhan posyandu di DIY.

Tabel 2-44 Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY, Tahun 2018-2021

Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020			2021		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	776	80,83	960	792	82,50	960	827	86,14	960	577	60,10

Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020			2021		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Bantul	1.141	913	80,01	1.141	913	80,01	1.139	912	80,07	1.139	160	14,04
Gunungkidul	1.465	1245	84,98	1.468	1.299	88,48	1.469	1.345	91,55	1.468	1.225	83,44
Sleman	1.529	1197	78,28	1.530	1.233	80,58	418	158	37,79	1.532	1.136	74,15
Kota Yogyakarta	623	379	60,83	623	366	58,74	623	393	63,08	623	448	71,91
DIY	5.718	4.510	78,87	5.722	4.603	80,44	4.609	3.635	78,86	5.722	3.546	61,97

Sumber: Profil Kesehatan DIY, diolah



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-38 Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 - 2021

2.1.3.1.2.2 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2021 sebanyak 440 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.353 penduduk.

Dibandingkan dengan standar nasional, jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Jumlah penduduk DIY tahun 2020 sebanyak 3.627.962 jiwa maka kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 30 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2020 terdapat 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah penduduk DIY adalah 3.958.400 jiwa, maka kebutuhan puskesmas yang harus tersedia adalah hanya 33 unit. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Sedangkan standar nasional untuk penyediaan puskesmas pembantu (Pustu), jumlah yang harus ada di suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004, yaitu setiap 30.000 penduduk minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu. Total penduduk DIY tahun 2020 sebanyak 3.675.662 jiwa sehingga kebutuhan pustu minimal sebanyak 121 unit. Namun demikian jumlah pustu yang ada di DIY sampai tahun 2020 sebanyak 319 unit yang berarti bahwa DIY saat ini hingga tahun 2022 mendatang (3.958.400 penduduk¹) telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan puskesmas maupun puskesmas pembantu.

2.1.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Pada tahun 2021 sarana kesehatan yang tersedia di D.I. Yogyakarta sebanyak 61 unit rumah sakit umum, 21 unit rumah sakit khusus, dan 120 unit puskesmas (DIY dalam Angka; BPS Provinsi DIY 2022).

Tabel 2-45 Jumlah dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas ¹	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kulon Progo	9	9	0	0	21	21
Bantul	10	10	10	7	30	27
Gunungkidul	7	8	2	0	31	30
Sleman	21	22	8	6	28	27
Yogyakarta	11	12	15	8	16	15
D.I. Yogyakarta	58	61	35	21	126	120

Sumber: BPS (2022)

Ket 1) Jumlah minimal Puskesmas yang harus tersedia di DIY tahun 2022 adalah 132 unit (3.958.400 penduduk dibagi dengan 30.000)

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 58,28% dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY).

Tabel 2-46 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY

KAB/ KOTA	2017				2018				2019				2020				2021			
	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)
Kulon Progo	8	8	496	50,75	8	7	507	49,60	9	8	548	51	9	9	573	25,01	9	8	15	15,63
Bantul	16	15	1107	44,6	15	15	1107	49,26	16	16	1205	38,6	16	16	1220	33,48	17	16	74	29,1
Gunungkidul	1	1	177	78,5	5	5	338	69,04	3	3	345	71,56	8	7	525	56,99	8	7	17	22,7

KAB/ KOTA	2017				2018				2019				2020				2021			
	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)
Sleman	28	27	2857	44,6	27	26	3032	42,11	27	26	2983	48,71	27	26	2914	37,25	30	20	102	28,3
Kota Yogyakarta	21	18	1853	34,7	21	14	1624	35,67	20	15	1701	1,9	20	10	1471	27,41	20	11	70	21,74

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 15 unit. Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2021 adalah 84 unit, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY.

2.1.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2021, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 3.555 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2021 sebesar 96,72. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 1.034 penduduk. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2021 adalah sebanyak 1.237 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2021 adalah sebesar 33,65. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 2.972 penduduk. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2021 sebanyak 1.041 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 28,32 atau dapat diartikan bahwa 1 orang dokter gigi di DIY melayani 3.531 penduduk.

Tabel 2-47 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	3.587.921	3.631.015	3.656.108	3.671.189	3.675.662
Dokter umum	931	1090	1446	1937	3555
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	25,95	30,02	39,55	52,76	96,72
Dokter spesialis	1142	1838	1062	1397	1237
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	31,83	50,62	29,05	38,05	33,65
Dokter gigi	482	1776	555	487	1041
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	13,43	48,91	15,18	13,27	28,32
Perawat	6578	7794	8269	9507	10355
Rasio perawat per 100.000 penduduk	183,34	214,65	226,17	258,96	282
Bidan	1597	2019	2046	2356	2893
Rasio bidan per 100.000 penduduk	44,51	55,60	55,96	64,18	78,71

Sumber: *Dataku Bappeda, DIY 2022*

Pada tahun 2021, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 5.833 orang yang terdiri dari 3.555 dokter umum, 1.041 dokter gigi, dan 1.237 dokter spesialis. Kebutuhan tenaga medis di DIY idealnya adalah 3.628 orang. Dengan kata lain, saat ini DIY dinilai telah tercukupi kebutuhan tenaga medis.

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan ini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meskipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

2.1.3.1.2.5 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio perawat di DIY tahun 2021 sebesar 282 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2021 sebesar 78,71 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

2.1.3.1.2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tren penurunan, dari 97,37% di tahun 2017 menurun menjadi 87,35% di tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksi ibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi dini terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

Tabel 2-48 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

WILAYAH	Tahun														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	bumil risti/ kompl i-kasi	bumil risti/ kompl i-kasi dita-ngani	(%)	bumil risti/ kompl i-kasi	bumil risti/ kompl i-kasi dita-ngani	(%)	bumil risti/ kompl i-kasi	bumil risti/ kompl i-kasi dita-ngani	(%)	bumil risti/ kompl i-kasi	bumil risti/ kompl i-kasi dita-ngani	(%)	bumil risti/ kompl i-kasi	Bumil risti/ kompl i-kasi dita-ngani	(%)
Kab. Kulon Progo	1.329	1.329	100,0	1.457	1.457	100	1.267	1.267	87	1.073	1.073	100,0	1.175	1.144	97,36
Kab. Bantul	2.854	2715	95,1	3.031	3.031	100	3.143	3.143	103	2.954	2.954	100,0	2.914	2.802	96,15
Kab. Gunungkidul	3.693	3693	100,0	1.789	1.473	82	1.783	1.405	79	1.738	1.237	71,00	1.723	1.217	70,63
Kab. Sleman	3.110	2934	94,3	3.084	2.661	86,3	3.041	2.435	100	2.909	2.137	73,46	2.815	2.269	80,60
Kota Yogyakarta	1.009	1.009	100,0	1169	1169	100	1.067	1.067	100	962	962	100	827	827	100%
DIY	11.995	11680	97,37	10.530	9.791	92,98	10.301	9.317	90,44	9.636	8.363	86,78	9.454	8.259	87,35

Sumber: Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

2.1.3.1.2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan DIY 2022, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2021 mencapai 87,99% di atas rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 100,00% menurun pada tahun 2019 menjadi 99,9% dan menjadi 87,99 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2-49 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY

WILAYAH	TAHUN														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)
Kulon Progo	4995	4993	100	5.086	5.085	99,94	4.865	4.862	99,94	4.738	4.733	99,94	5622	4476	99,94
Bantul	12375	12373	100	12.931	12.928	99,98	13088	13087	99,98	12708	12705	99,99	13932	11777	84,53
Gunungkidul	7340	7332	99,9	7.540	7.528	99,84	7.723	7.712	99,86	7.640	7.630	99,87	7513	7149	95,16
Sleman	14015	14014	100	13869	13869	100	13474	13.468	100	12948	12839	99,98	13431	12381	92,18
Kota Yogyakarta	3617	3617	100	3.587	3.587	100	3.346	3.344	99,91	3.127	3.127	100	3.304	2760	83,54
DIY	42342	42329	100	43.005	43.005	100	42.496	42.473	99,9	41.161	41.034	99,69	43.802	38543	87,99

Sumber: Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

2.1.3.1.2.8 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukkan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100 persen. Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI.

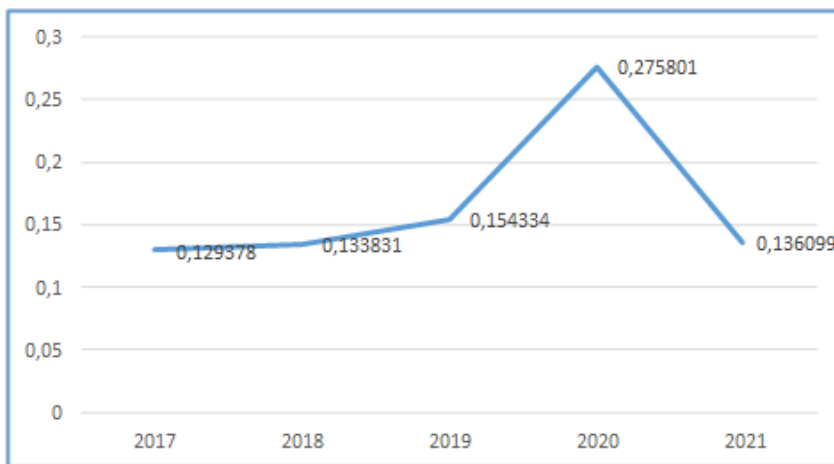
Tabel 2-50 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY

WILAYAH	2017			2018			2019			2020			2021*)		
	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%	Jml desa	Desa UCI	%
Kulon Progo	88	86	97.7	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	4	4.5
Bantul	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100
Gunungkidul	144	142	98.61	144	144	100	144	144	100	144	144	100	144	140	97.2
Sleman	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	42	48.8
Kota	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
Diy	438	434	99	438	438	100	438	438	100	438	438	100	438	306	69.86

Sumber: Dinas Kesehatan DIY

2.1.3.1.2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi buruk di DIY adalah 0,136%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4 kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar 2-39 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB), semuanya mendapatkan perawatan. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

2.1.3.1.2.10 Pola Penyakit

Pola penyakit di DIY dipantau oleh sistem Surveilans Terpadu Penyakit (STP) dan Sistem Informasi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pemantauan dilakukan terhadap kunjungan pasien di tempat-tempat pelayanan kesehatan tersebut.

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti: hipertensi, stroke, diabetes dan kanker melebihi angka nasional.



Sumber: Riskedas, 2018 (diolah)

Gambar 2-40 Pola Penyakit Menurut Riskedas Tahun 2017

Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya: HIV AIDS, Tuberkulosis (TB), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya (anthrax, flu burung, pes, leptospirosis). Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5.954 kasus dengan 1.919 kasus telah memasuki fase AIDS.

Tabel 2-51 Jumlah Kasus HIV 2017-2021

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	335	1403	516	1486	1454	5954
2020	319	1294	502	1360	1392	5627
2019	294	1191	445	1247	1335	5264
2018	265	1064	369	1119	1212	4781
2017	204	880	293	907	976	4212

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Tabel 2-52 Jumlah Kasus AIDS 2017-2021

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	105	446	289	440	296	1919
2020	105	422	251	425	291	1820
2019	95	384	234	402	285	1726
2018	86	362	230	369	274	1642
2017	75	324	158	354	246	1485

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Sedangkan untuk Demam Berdarah Dengue (DBD), tahun 2021 terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan, kasus dari tahun 2020 sebesar 3.623 kasus menurun di tahun 2021 menjadi 1.187 kasus atau sebesar 205,2%. Penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian di DIY adalah TB dan Malaria. Penyakit TB juga mengalami peningkatan kasus, dari tahun SPM 2020 sebesar 2.228 kasus meningkat di tahun 2021 menjadi 2.258 kasus atau sebesar 1,34%. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Penyakit malaria di tahun 2021 mengalami peningkatan kasus, di tahun 2020 penyakit malaria sebanyak 9 kasus dan di tahun 2021 meningkat menjadi 27 kasus atau meningkat sebesar 200%.

Tabel 2-53 Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan di DIY Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			100%
		*Jumlah total yang harus dilayani	*Jumlah total yang terlayani	*Yang belum terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani:	40	40	0	100%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0	0	0	0

NO		INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
	2	Makanan Tambahan / Pendamping utk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA), dll)	0	0	0	0
	3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	0	0	0	0
2		Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			100%
			*Jumlah total yang harus dilayani	*Jumlah total yang terlayani	*Yang belum terlayani	
		Jumlah yang Harus Dilayani :	2.928.242	2.928.242	0	100%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian 100%
			(1)	(2)	(3)	(4)
	1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	5.998.389	5.998.389	0	100%
	2	Profilaksis/ Vitamin/Obat/ Vaksin	1.273416	1.273416	0	100%
	3	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	198.843	198.843	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
4	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) utk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	245.773	245.773	0	100%
5	Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)	5	5	0	100%
6	Tempat Sampah Biologis	15	15	0	100%
7	Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan	19	19	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air (Drainase, Irigasi, Air), Sub Urusan Keciptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, dan Sub Urusan Penataan Ruang.

2.1.3.1.3.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Arah kebijakan pembangunan sub urusan sumber daya air (SDA) harus bisa menjawab isu strategis yang berkembang di tingkat lokal yang dalam masa 5 tahun keduanya pasca keistimewaan

mengangkat tema “Menyongsong Abad Samudra Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, serta mengikuti arah kebijakan nasional terkait pembangunan sektor sumber daya air, antara lain target *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Nawacita.

Sub urusan SDA dalam lingkup kegiatan pemda DIY adalah melaksanakan ketugasan di dalam peningkatan kinerja sistem irigasi, peningkatan kondisi jaringan irigasi dan penambahan kapasitas air baku. Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur dalam mencapai ketahanan pangan yaitu untuk melayani ketersediaan air di lahan basah/sawah. Layanan penyediaan air irigasi di DIY tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, namun dilakukan juga oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY pada tahun 2021 sebesar 11.138,33 Ha yang terbagi menjadi 41 satuan Daerah Irigasi (DI) permukaan. Luas tersebut menunjukkan pengurangan dari luas sebelumnya yaitu sebesar 13.987 Hektar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini terjadi antara lain karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke nonpadi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel 2-54 Prasarana Irigasi/Pengairan

No	Sub Elemen	Tahun							Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Teknis	171.562,72	169.082,72	255.874,18	255.874,18	255.874,18	255.874,18 *	260.450,78	m
2	Primer	57.192,24	57.192,24	78.589,59	78.589,59	78.589,59	78.589,59 *	80.436,74	m
3	Sekunder	114.390,48	111.890,48	177.284,59	177.284,59	177.284,59	177.284,59 *	180.014,04	M
4	Tersier	171.582,72	417.559,39	906.198,08	906.198,08	906.198,08	906.198,08 *	819.233,25	M
5	Luas Irigasi	13.987,19	13.987,00	12.158,11	12.158,11	13.987,00	11.770,77 *	11,138,33	Ha
6	Panjang	45.532,32	44.219,39	93.096,04	93.096,04	119.826,87	133.068,78*	100.480,21	M

No	Sub Elemen	Tahun							Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik								
7	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	4.348,06	4.339,26	4.348,98	4.348,98	5.466,75	6.040,97 *	4.387,94	Ha
*) Sementara n/a Tidak ada									

Sumber: BPPSD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik terus menurun dari tahun 2020 sebesar 133.068,78 meter menjadi 100.480,21 meter di tahun 2021. Kondisi serupa terjadi pada luas irigasi dalam kondisi baik yang menurun dari 6.040,97 hektar menjadi 4.387,94 di tahun 2021.

Kebijakan Pemda DIY dalam penyediaan air baku dilakukan melalui pembangunan embung yang berfungsi sebagai penampung air sekaligus untuk mempertahankan stabilitas muka air tanah dan dengan sumur bor. Pembangunan embung telah dimulai pada tahun 2005. Pada tahun 2020 telah dibangun 25 embung yang tersebar sebanyak 8 unit di Sleman, 3 unit di Bantul, 4 unit di Kulon Progo, 9 unit di Gunungkidul dan 1 unit di Kota Yogyakarta.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY dalam Pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 DI, kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar, terdiri dari 35 DI lintas kabupaten/Kota dengan luas 4.909 Ha dan 6 DI utuh yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo dengan luas 9.078 Ha. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai Tahun 2021 pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul: 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Sesuai Permen PUPR Nomor

4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat. Pelaksanaan pengelolaan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hingga tahun 2021 jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif 11.992,46 hektar atau 85,74% dari luas areal daerah irigasi DIY (13.987 Ha). Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,28% dari target sebesar 85,50%.

Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Pijenen/Kamijoro
- Peningkatan jaringan Irigasi D.I Mergangsan
- Peningkatan jaringan Irigasi D.I Pijenan
- Peningkatan jaringan Irigasi D.I Simo
- Pembangunan Irigasi Dusun Pulesari Wonokerto, Turi
- Bangket Irigasi Bulak Ngepet di Dukuh Ngepet Srigading Sanden
- Pembangunan Irigasi Dusun Manggungsari, Wonokerto, Turi

Tabel 2-55 Daerah Irigasi di DIY

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI Air Tanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas(Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	Gunungkidul	182	55	-	237	7.722
5.	Sleman	853	-	75	928	25.814
6.	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
7.	Kota	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber: Permen PI dan PR Nomor 14/PRT/M/2015

Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, perencanaan suplai air baku mempertimbangkan arah pengembangan wilayah dan program prioritas pembangunan. Kebutuhan air untuk Domestik (Rumah tangga) mengalami peningkatan sebesar 79% (dari 5,804 m³/dt menjadi 8,88 m³/dt) selama kurun waktu dari tahun 2015-2035. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi penduduk, juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memicu peningkatan standar kuantitas dan kualitas pemakaian air bersih per kapita. Melalui pembangunan Sumur Air Tanah dan Embung untuk Air baku di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul, penyediaan air baku dengan target 19,50 liter/detik tercapai 56,56 liter/detik dengan rincian dari sumur bor 36,56 liter/detik dan konstruksi embung Sendangtirto (oleh BBWS) sebesar 20 liter/detik.

Adanya rencana pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi di DIY, diprediksikan adanya peningkatan permintaan air untuk kegiatan ini. Demikian juga dengan perkembangan wilayah perkotaan dengan berbagai prasarannya akan menyebabkan peningkatan permintaan air untuk sektor komersial. Hal tersebut mendorong masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kebutuhan airnya dengan membuat sumur artesis atau sumur bor. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan karena dapat menyebabkan debit air tanah berkurang dan jika tidak dikendalikan akan menyebabkan hilangnya sumber air untuk kebutuhan hidup dan menyebabkan penurunan muka air tanah

Berdasarkan data dibawah ini, persentase rerata penurunan muka air tanah menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hingga akhir tahun 2021, persentase rerata penurunan muka air tanah menjadi hanya 9,92%. Diperlukan beberapa upaya-upaya berkesinambungan antara stake holder terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan.

Tabel 2-56 Rerata Penurunan Muka Air Tanah DIY tahun 2018-2021

Data	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Rerata penurunan muka air tanah	%	10,29	10,58	10,26	9,92

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

2.1.3.1.3.2 Sub Urusan Keciptakaryaan

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Sedangkan, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian dalam lima tahun terakhir persentase penduduk berakses air minum memiliki tren meningkat dibandingkan tahun 2017. Selanjutnya perkembangan lima tahun terakhir persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Menurut Kabupaten Kota Di DIY Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	74,04	77,92	83,59	92,56	89,33
Bantul	75,02	76,61	96,81	97,65	96,11
Gunungkidul	83,10	90,37	93,09	94,50	94,70
Sleman	75	79,19	96,29	95,20	96,26
Yogyakarta	81,21	80,13	99,27	99,75	100
D.I Yogyakarta	77,19	80,62	94,94	96,02	95,69

sumber: BPS, 2022

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitasproduksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Mulai tahun 2020 SPAM Regional telah dikelola oleh PDAB, jadi untuk penanggung jawab kegiatan sudah bukan kewenangan Balai PIALAM. Hal tersebut berdasarkan Perda DIY Nomor 5/2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama (berdiri pada tanggal 27 Juli 2021). Sedangkan untuk penggunaan aset, dapat digunakan sejak 1 Januari 2021 dengan dasar Pergub DIY Nomor 413/KEP/2020 tentang penugasan PDAB Tirtatama untuk menggunakan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di DIY, tertanggal 31 Januari 2020. Sumber data capaian air minum regional lintas Kabupaten/Kota Tahun 2020 (SPAM Regional Kartamantul: 400 L/dtk, Unit Layanan Sedayu/PDAM Bantul: 26 L/dtk, Tirtonirmolo/PDAM Bantul: 55 L/dtk, Banguntapan/PDAM Bantul: 28 L/dtk, Ngestiharjo/PDAM Bantul: 30 L/dtk, Panggungharjo/PDAM Bantul: 26 L/dtk, Bangunharjo/PDAM Bantul: 15 L/dtk, Selopamioro: 30 L/dtk, Prambanan/PDAM Sleman: 62 L/dtk, Gemawang/PDAM Kota Yogyakarta: 78 L/dtk).

Hingga tahun 2021 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 92,92% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.638.049 jiwa. Jika dilihat pada tabel dibawah ini, terdapat peningkatan persentase jumlah penduduk berakses air minum dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 walau sempat terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 91,30%.

Tabel 2-58 Akses Air Minum Masyarakat DIY tahun 2018-2021

Data	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Akses Air Minum Masyarakat	%	91,77	91,30	92,82	92,92

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kap. 300 L/det, Prov. DI. Yogyakarta. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Penyediaan layanan prasarana pengolahan limbah DIY dilakukan untuk mencegah pencemaran sumber air dan lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit atau ancaman kesehatan. Layanan prasarana pengolahan limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DIY adalah sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat, sistem pembuangan air limbah rumah tangga (komunal) dan unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat tersebut berlokasi di Sewon Bantul yang melayani kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terdiri dari Kota Yogyakarta sebagian wilayah Bantul dan Sleman. Penambahan sistem layanan limbah terpusat tersebut di prioritaskan pada daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah nya belum tersedia. Sedangkan, sistem pengolahan limbah komunal disediakan secara prioritas untuk daerah yang memiliki kepadatan penduduk 100 jiwa/hektar dan belum terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada di daerah cekungan. Data jumlah dan volume prasarana pengolahan limbah di DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-59 Jumlah dan Volume Prasarana Pengolahan Limbah di DIY Tahun 2017-2021

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	satuan
Sistem pembuangan limbah domestik secara terpusat	1	1	1	1	5	Unit
Sistem pembuangan limbah rumah tangga	210	404	404	456	456	Unit
Jumlah IPAL terpusat	1	1	1	1	1	Unit
Kapasitas IPAL terpusat	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	M ³
Jumlah IPLT	4	4	4	4	4	Unit
Kapasitas IPLT	140	140	140	140	140	M ³

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Layanan pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah DIY untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri maupun

bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di DIY mencapai 97,12%. Perkembangan persentase tersebut menurut Kabupaten/Kota di DIY dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2-60 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	75,10	70,83	90,45	95,06	95,95
Bantul	94,68	93,20	92,80	97,96	96,20
Gunungkidul	76,86	79,12	93,34	95,80	96
Sleman	94,52	94,51	97,76	97,55	98,41
Yogyakarta	95,33	95,54	95,30	96,49	98,17
D.I Yogyakarta	89,40	88,92	94,67	96,96	97,12

Sumber: BPS, 2022

Seiring dengan pertumbuhan penduduk khususnya di daerah perkotaan maka pengelolaan air limbah domestik menjadi hal yang penting. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual atau komunal. Banyaknya rumah tinggal yang memiliki akses fasilitas sanitasi, minimal yang bersifat komunal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018-2021 disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2-61 Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	23.481 SR	25.018 SR	25.294 SR	26.050 SR

Sumber: Dataku, Bappeda 2021

Kondisi kapasitas IPAL Sewon di awal tahun 2020 sudah *overload* dengan kapasitas 25.000 SR sudah terpasang 25.294 SR, sehingga dilakukan pembatasan pemasangan SR, dan pada akhir tahun 2021 terpasang 26.050 SR. Upaya peningkatan kapasitas IPAL Sewon dilakukan oleh BPPW DIY melalui pekerjaan fisik peningkatan kapasitas IPAL Sewon yang selesai di bulan Desember 2021. Pekerjaan peningkatan kapasitas IPAL Sewon ini dilakukan untuk menambah kapasitas IPAL menjadi 52.000 m³/hari yang setara dengan pengolahan sampai dengan 75.000 SR terpasang.

Pelayanan persampahan DIY dilakukan dengan tersedianya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah (TPA) dan depo sampah. Jumlah layanan fasilitas sampah di DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-62 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	satuan
Jumlah TPS	419	287	287	565	565	Unit
Daya Tampung TPS	500	600	600	660	720	Ton
Jumlah Depo Sampah	113	106	103	101	92	Unit
Jumlah TPA	3	3	3	3	3	Unit
Jumlah TPST	61	61	61	57	69	Unit

Sumber: Dataku, Bappeda 2022

Data neraca sampah tahun 2021 menunjukkan bahwa potensi timbulan sampah di DIY mencapai 763.425,55 ton per tahun. Wilayah penyumbang sampah terbesar adalah Kabupaten Sleman dengan volume 256.883,39 Ton/Tahun dan yang terkecil adalah

Kabupaten Kulon Progo 62.257,32 Ton/Tahun. Pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat menyumbang penanganan volume sampah sebesar 208.119 ton atau 27,26%. Selanjutnya penanganan sampah oleh TPA mencapai volume 242.873 ton/tahun atau menyumbang sebesar 31,81%. Dengan demikian sampah yang terkelola total sebesar 59,07% dan yang tidak terkelola sebesar 40,93% atau sebesar 312.433,48 ton/tahun. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang paling baik dalam melakukan penanganan sampah sebab 99,43% sampahnya terkelola, sedangkan yang tertinggal adalah Kabupaten Gunungkidul yang baru mampu mengelola sampahnya sebesar 37,87%

No	Keterangan	Realisasi Tahun 2021					
		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	118.633,19	192.021,91	62.257,32	133.629,74	256.883,39	763.425,55
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	24.247,94	77.628,72	16.861,50	31.623,65	57.757,19	208.119,00
	Persentase Pengurangan dari sumber	20,44%	40,43%	27,08%	23,67%	22,48%	27,26%
a.	Pembatasan Timbulan Sampah	9.490,62	56.376,27	2,86	27.900,60	3.814,99	97.585,34
b.	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	-	-	32,84	-	-	32,84
c.	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	14.757,32	21.252,45	16.825,80	3.723,05	53.942,20	110.500,82
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	93.710,11	39.814,91	12.439,20	18.980,00	77.928,85	242.873,07
	Persentase penanganan	78,99%	20,73%	19,98%	14,20%	30,34%	31,81%

No	Keterangan	Realisasi Tahun 2021					
		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY
	sampah						
d.	Pengumpulan	-	-	-	-	-	-
e.	Pemilahan	-	-	-	-	-	-
f.	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	-	-	-	-	-	-
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-	-	-	-	-	-
g.	Pengolahan	327,60	415,27	-	-	-	742,87
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	327,60	415,27	-	-	-	742,87
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	-	-	-	-	-	-
h.	Pemrosesan akhir	93.382,51	39.399,64	12.439,20	18.980,00	77.928,85	242.130,20
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	93.382,51	39.399,64	12.439,20	18.980,00	77.928,85	242.130,20
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	117.958,05	117.443,63	29.300,70	50.603,65	135.686,04	450.992,07
	Persentase sampah terkelola	99,43%	61,16%	47,06%	37,87%	52,82%	59,07%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	675,14	74.578,28	32.956,62	83.026,09	121.197,35	312.433,48
	Persentase sampah tidak	0,57%	38,84%	52,94%	62,13%	47,18%	40,93%

No	Keterangan	Realisasi Tahun 2021					
		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY
	terkelola						

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul: Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA *Sanitary Landfill* Kulon Progo dan TPA *Sanitary Landfill* Gunungkidul.

Peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA akan terus naik setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah (reduksi) di sumber sampah. Peningkatan volume sampah tersebut berlanjut kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan pewadahan sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk TPS beserta penanganan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, kebutuhan akan armada yang layak beserta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan lahan untuk TPA yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan penanganan permasalahan sampah di daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila diawali dari pokok permasalahannya yaitu pada wilayah pelayanan kebersihan dan sumber sampah, yang dalam hal ini juga mencakup masalah volume timbulan, komposisi sampah serta penanganan sampah di sumber sampah itu sendiri.

Perhitungan proyeksi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Piyungan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber sampah, tingkat ekonomi sosial, cara hidup masyarakat, dan sebagainya (Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017). Untuk melakukan penelitian mengenai tingkat timbulan sampah memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu proyeksi jumlah timbulan sampah yang masuk TPA

Piyungan dilakukan dengan pendekatan, menghitung nilai laju peningkatan berat sampah setiap tahunnya dari data yang didapat mulai data tahun 2010 s.d. tahun 2016 (persentase rata-rata laju peningkatan sampah sebesar 09,14/ tahun).

Setelah diperoleh nilai rata-rata laju peningkatan sampah setiap tahun yang masuk TPA Regional Piyungan, maka dapat dihitung proyeksi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan pada tahun-tahun berikutnya. Proyeksi timbulan sampah TPA Regional Piyungan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-63 Proyeksi timbulan sampah TPA Regional Piyungan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Tahun	Berat Sampah			Volume sampah
	Kg/tahun	Kg/hari	Ton/hari	m ³ /hari
2019	239.157.039	655.225	655,22	1.206,7
2020	261.006.056	715.085	715,09	1.316,9
2021	284.851.167	780.414	780,41	1.437,2
2022	310.874.730	851.712	851,71	1.568,5
2023	339.275.765	929.523	929,52	1.711,8

Sumber: analisa perhitungan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017

Area *Landfill* eksisting yang masih dapat ditimbuni sampah lagi mempunyai luas ± 72.620.83 m². Ketinggian sampah bervariasi, beda tinggi timbunan sampah yang terendah dan tertinggi kurang lebih 27,5 m. Karena *landfill* yang terendah lebih luas area timbunannya, maka tinggi *landfill* rata dapat diperoleh 60% dikalikan beda tinggi *landfill* terendah dan tertinggi, sehingga diperoleh nilai ketinggian *landfill* sebesar 13,75 m. Jika di rencanakan ketinggian sampah 12 m dari titik tertinggi, maka rencana ketinggian sampah total adalah 25,75 m. Berikut dibawah ini, disajikan perhitungan daya tampung *Landfill* TPA Piyungan.

Tabel 2-64 Perhitungan Daya Tampung *Landfill* TPA Piyungan

Luas landfill (m ²)	Rencana Tinggi landfill (m)	Daya Tampung landfill (m ³)
72.620,832	34	864.187,90

Sumber: analisa perhitungan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017

Dengan asumsi metode *Controlled landfill* mulai dilaksanakan pada tahun 2018 yang didukung dengan upaya reduksi sampah maksimum maka penimbunan sampah pada *landfill* direncanakan setiap lapis sel sampah mempunyai ketinggian 1,5 meter. Setelah mencapai 2 lapis sel sampah, *landfill* mencapai lift 1. Lift merupakan suatu lapis deretan sel sampah harian. Namun sebelum dilakukan penimbunan pada landfill, maka diperlakukan perlakuan untuk menyempurnakan TPA, agar metode penimbunan *controlled /sanitary landfill* dapat diterapkan. Perlakuan tersebut antara lain :

- a) Perapian *landfill* dengan melakukan perataan dan pemadatan sampah, kemudian dilakukan penutupan sampah dengan tanah penutup.
- b) Membuat saluran yang berfungsi untuk menangkap air lindi yang meluber dipinggir *landfill* agar tidak mengalir ke luar sel
- c) Penanaman pipa *gas portable* di area *landfill* yang ada

Umur pakai TPA diperhitungkan berdasarkan daya tampung landfill dengan akumulasi volume sampah yang masuk ke TPA setelah dilakukan kompaksi. Perhitungan akumulasi volume sampah yang masuk ke *landfill* dapat dilihat dibawah ini

Tabel 2-65 Perhitungan Akumulasi Volume Sampah yang Masuk ke *Landfill*

Tahun	Vol. Sampah	Vol. Sampah Kompaksi		Akumulasi Vol. Sampah
	m ³ /hari	(0,8) m ³ /hari	m ³ /tahun	m ³
TPA penuh pada akhir tahun 2019				864.187,9
2019	1.206,7	965,3	352.349,2	971.030,5
2020	1.316,9	1.053,5	384.539,3	1.355.569,8

Tahun	Vol. Sampah	Vol. Sampah Kompaksi		Akumulasi Vol. Sampah
	m ³ /hari	(0,8) m ³ /hari	m ³ /tahun	m ³
2021	1.437,2	1.149,8	419.670,2	1.775.240,0

Sumber: analisa perhitungan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017

Dengan melihat perbandingan daya tampung *landfill* sebesar 864.187,9 m³ dengan akumulasi volume sampah pada akhir tahun 2019 sebesar 971.030,5 m³, maka diperkirakan *landfill* akan penuh pada akhir tahun 2019. Dengan perhitungan tersebut diatas, maka pihak pengelola TPA Regional Piyungan dalam hal ini Balai PISAMP pada awal tahun 2019 sudah harus mempunyai *landfill* lagi atau mempersiapkan teknologi alternatif lainnya yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pengolahan sampah.

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
2. Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan
3. Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan
4. Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan: 450 Meter

Selain itu, dengan dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2021 dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS3R di 2 lokasi yaitu Playen, Gunungkidul dan Pakem, Sleman

Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Penyelesaian permasalahan genangan di KPY bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan

agar hasilnya optimal. Pada tahun 2016 kegiatan perencanaan penanganan genangan dilakukan untuk menghasilkan perencanaan penanganan genangan di KPY secara keseluruhan termasuk identifikasi aset dan kelembagaan.

Jumlah genangan pada KPY berdasarkan hasil Identifikasi dan Evaluasi Penanganan Genangan di KPY oleh Bidang Cipta Karya pada tahun 2016 sebanyak 57 titik yaitu 29 titik lokasi (sisa target RPJMD 2013 s.d. 2017) dan 28 titik lokasi genangan baru. Sampai dengan tahun 2018 baru tertangani 2 titik yaitu di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan Jalan Kaliurang Simpang MM UGM, Sleman.

2.1.3.1.3.3 Sub Urusan Jalan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional. Berikut disajikan daftar ruas jalan Provinsi tahun 2020.

Tabel 2-66 Daftar Ruas Jalan Provinsi

No	Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Panjang Ruas (Km)
1	Kota Yogyakarta	-
2	Kabupaten Bantul	162,150
3	Kabupaten Kulon Progo	175,140
4	Kabupaten Gunungkidul	306,840
5	Kabupaten Sleman	116,320
Total Panjang Ruas Jalan		760,450

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016

Perkembangan kondisi jalan di DIY pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut nampak dari panjang kondisi jalan baik yang menurun dari 366,52 Km menjadi 341,44 Km, peningkatan panjang jalan rusak sedang dari 155,05

Km menjadi 156,93 km dan meningkatnya panjang jalan rusak berat dari 61,23 Km menjadi 67,22 Km. Selanjutnya persentase panjang jalan dalam kondisi mantap menurun dari 71,56% menjadi 70,52%. Lebih rinci kondisi jalan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-67 Kondisi Jalan Provinsi 2017-2021

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jalan Baik	304,41	333,21	357,37	366,52	341,44	km
2	Jalan Sedang	245,10	221,33	201,45	177,66	194,85	km
3	Jalan kondisi mantap	549,51	554,53	558,81	544,17	536,29 *	km
4	Jalan Rusak Sedang	148,23	140,37	143,99	155,05	156,93	km
5	Jalan Rusak Berat	62,72	65,55	57,65	61,23	67,22	km
6	Jalan kondisi tidak mantap	210,95	205,92	201,64	216,28	224,15	km
7	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	72,26	72,92	73,48	71,56	70,52	%

sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2021

*) angka sementara

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Di DIY telah terbangun 247,91 km jalan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 760,45 Km dan jembatan sejumlah 225 buah sepanjang 4.557 m dengan 70,523% dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang). Rincian data Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2021

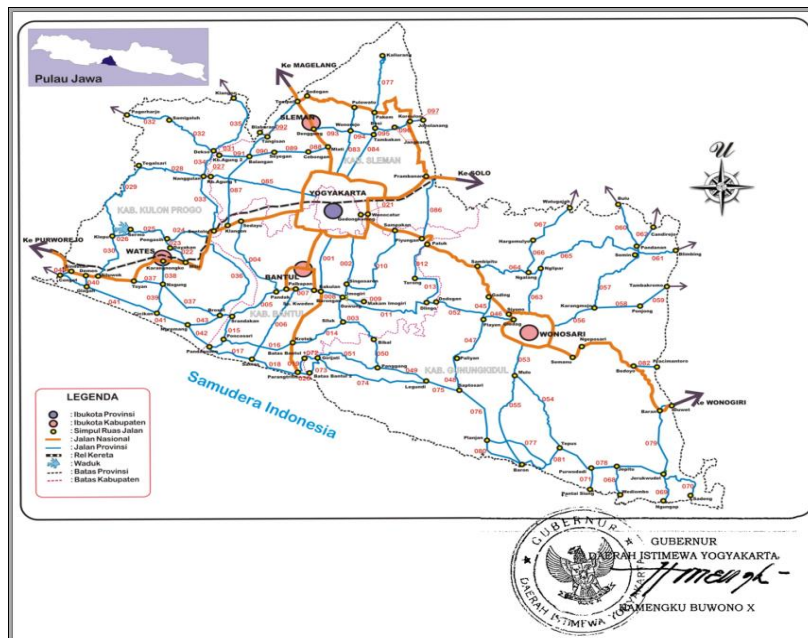
berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-68 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2021

Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	Km	%		Km	%
Mantap	536,295	70,523	Baik	341,840	44,952
			Sedang	194,455	25,571
Tidak Mantap	224,155	29,477	Rusak Ringan	156,935	20,637
			Rusak Berat	67,220	08,884
Jumlah	760,45	100		760,45	100,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ruas jalan Provinsi DIY berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: lampiran SK Gob. DIY No. 118/KEP/2016

Gambar 2-41 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Penetapan status jalan provinsi berlaku selama 5 tahun sehingga pada tahun 2022 akan dilaksanakan review terkait status jalan provinsi berdasarkan SK Jalan Nasional yang berlaku pada tahun tersebut.

Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, Jogjakarta Outer Ringroad (JORR), Prambanan-Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Peningkatan aksesibilitas di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh pembangunan jalan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik (APBN), dan pembangunan Jalan Prambanan (Sleman)-Gading (Gunungkidul). Sampai dengan akhir tahun 2021, telah terbangun jalan baru sepanjang 26.62 Km (Jalur Jalan Lintas Selatan 17.35 Km dan Jalan Prambanan-Gading 9.27 Km), sehingga telah terbangun 984.93 Km jalan dari 996,16 Km jalan yang direncanakan atau setara dengan 98,87%.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2021 (status per 28 Desember 2021) antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 116,07 Km (100%)
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 74,08 km (63,80%)
3. Konstruksi jalan yang telah terbangun sepanjang 72,22 Km (62,22%)

Sedangkan pekerjaan konstruksi yang masih/ sedang berlangsung sd. TA 2021 sebagai berikut:

1. Jembatan Kretek 2 sepanjang 2,15 Km
2. Segmen Legundi-Planjan sepanjang 4,70 Km
3. Segmen Planjan-Tepus sepanjang 9,725 Km
4. Segmen Tepus-Jeruk Wudel sepanjang 6,70 Km
5. Segmen Jeruk Wudel-Baran-Duwet sepanjang 10,60 Km

Berdasarkan data dari Dinas PUP ESDM DIY, JJLS yang telah terbangun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hingga akhir tahun 2021, JJLS yang telah terbangun yaitu sepanjang 76,87 Km. Target penyelesaian pekerjaan konstruksi JJLS akan berakhir pada akhir tahun 2022, sehingga diharapkan dengan selesainya pekerjaan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sepanjang pantai selatan (Congot-Duwet) dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan khususnya masyarakat sekitar.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2021 (status per 28 Desember 2021) antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 116,07 Km (100%)
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 74,08 km (63,80%)
3. Konstruksi jalan yang telah terbangun sepanjang 72,22 Km (62,22%)

Sedangkan pekerjaan konstruksi yang masih/ sedang berlangsung sd. TA 2021 sebagai berikut:

1. Jembatan Kretek 2 sepanjang 2,15 Km
2. Segmen Legundi-Planjan sepanjang 4,70 Km
3. Segmen Planjan-Tepus sepanjang 9,725 Km
4. Segmen Tepus-Jeruk Wudel sepanjang 6,70 Km
5. Segmen Jeruk Wudel-Baran-Duwet sepanjang 10,60 Km

Berdasarkan data dari Dinas PUP ESDM DIY, JJLS yang telah terbangun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hingga akhir tahun 2021, JJLS yang telah terbangun yaitu sepanjang 76,87 Km. Target penyelesaian pekerjaan konstruksi JJLS akan berakhir pada akhir tahun 2022, sehingga diharapkan dengan selesainya pekerjaan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sepanjang pantai selatan (Congot-Duwet) dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan khususnya masyarakat sekitar.

2.1.3.1.3.4 Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui antara lain:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an; dan
3. Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Sampai dengan akhir tahun 2021 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1.045 dokumen LHU (terdiri dari 1.031 LHU Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 14 LHU uji Aspiratif). Realisasi sejumlah 1.045 LHU tersebut, jauh melebihi target tahun 2021 yang hanya 800 LHU. Salah satu faktor pendorongnya yaitu beberapa proyek konstruksi di luar DIY melaksanakan pengujian di laboratorium konstruksi Balai PJK. Selain itu, beberapa laboratorium lain yang masih tutup di area Jogja selama pandemi menyebabkan laboratorium konstruksi Balai PJK menjadi satu-satunya rujukan dalam layanan penerbitan sertifikat/ LHU.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi dan layanan sistem informasi konstruksi yang dilakukan secara tatap muka/sosialisasi/pembinaan, penyebaran informasi, pameran teknologi ke-PU-an dan klinik konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga/badan seperti Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Jika dilihat data dari tahun 2018 terdapat Jumlah Permintaan Tenaga Ahli sebanyak 9018 orang, sedangkan yang tersedia hanya sebanyak 3.709 orang (satu tenaga ahli menangani 3-4 proyek). Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Jumlah Permintaan Tenaga Ahli menjadi sebanyak 10.842 orang, sedangkan yang tersedia hanya sebanyak 3.709 orang (satu tenaga ahli menangani 4-5 proyek).

Fenomena diatas tersebut, memberikan gambaran bahwa kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi di DIY semakin demanding dari tahun ke tahun. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada di luar DIY.

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli Konstruksi yang tersertifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Puncak penurunan jumlah tenaga ahli Konstruksi terjadi di tahun 2020 yang hanya sejumlah 30 orang dari target 300 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kasus lonjakan Covid-19 pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit.

Tabel 2-69 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi)

Data	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi)	orang	300	297	30	92

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Hingga akhir tahun 2021 telah dilakukan sertifikasi terhadap 92 orang Tenaga ahli Konstruksi dari target 150 orang Tenaga Ahli Konstruksi dikarenakan adanya SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2021. SE tersebut menyatakan bahwa, biaya Sertifikasi

ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN). Selain itu, ada juga SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, menyebabkan permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Des 2021. Dengan berlakunya dua SE tersebut diatas, mengakibatkan dampak lain yaitu Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta mengaku kesulitan dalam mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum

Adapun layanan penerapan sistem informasi jasa konstruksi telah di akses sejumlah 444.268 orang dari target 419.360 orang melalui website klinik konstruksi, dan akses informasi di media sosial youtube; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI yang tercapai 70%.

2.1.3.1.3.5 Sub Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasil guna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2019 – 2039. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,4825%. Peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2,07%. Hal ini disebabkan karena adanya percepatan penyusunan RDTR sesuai dengan amanat Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*) untuk kemudahan investasi. Dibawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2-70 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Target	64.75	76.50	78.50	79.50	81.00
	Realisasi (Sesuai)	75.09	77.05	78.85	78.95	81.02
	Belum Terwujud (%)	13.59	13.57	15.34	15.24	13.26
	Tidak Sesuai (%)	11.32	09.38	05.81	05.81	05.72

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Terkait RDTR yang sesuai dengan PP 21/2021 (terintegrasi dengan OSS) sudah ada tiga perkara dari rencana 25 RDTR, antara lain:

1. Peraturan Bupati Kab. Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman Timur
2. Peraturan Bupati Kab. GK Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Siung Wediombo
3. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta

Sedangkan RTRW yang sesuai dengan PP 21/2021 yaitu dua Perda dari rencana lima Perda Kab/Kota dan satu Perda DIY sebagai berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Yogyakarta
2. Perda Kab Sleman Nomor 13 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Hingga pada tahun 2021, penanganan (Rumah Tinggal Layak huni) RTLH di DIY telah mencapai sebanyak 36.801 unit atau 56,11% terhadap jumlah RTLH Kab./kota se-DIY. Apabila dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah RTLH mengalami peningkatan secara pesat terutama pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Penanganan RTLH yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir merupakan upaya dan peran dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan perusahaan swasta (sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi).

Tabel 2-71 Penanganan RTLH 2017-2021

LOKASI	DATA BASE KAB	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	TER TANGANI TH 2019	TER TANGANI TH 2020	TER TANGANI TH 2021
KOTA YOGYAKARTA	2.797	227	488	1267	1.612	2.267
KAB. KULONPROGO	14.891	2.106	2.005	6.511	7.604	8.031
KAB. BANTUL	5.703	2.101	1.848	6.310	8.032	9.447
KAB. SLEMAN	16.347	1.863	1.447	5.440	6.976	7.897
KAB. GUNUNGGIDUL	25.840	912	1.934	5.958	7.819	9.159
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	25.486	32.043	36.801

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Hingga tahun 2021, jumlah penyediaan PSU layak di kawasan permukiman DIY telah mencapai 791 titik. Jika dilihat capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2020 kegiatan penanganan PSU tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 (seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini).

Tabel 2-72 Penanganan PSU Tahun 2018-2021

Lokasi	2018	2019	2020	2021	Jumlah Penanganan
Kota Yogyakarta	-	-	-	2	2
Kab. Kulon Progo	25	35	-	28	88
Kab. Bantul	35	47	-	65	147
Kab. Sleman	65	126	-	102	293
Kab. Gunungkidul	119	61	-	81	261
Jumlah	244	269	-	278	791

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM

diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Dalam upaya mewujudkan target tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan intervensi berupa :

1. Penyediaan perumahan dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR;
2. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);
3. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman;
4. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan *baseline* RPJMD 2018-2022 Pemda DIY mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100% (seperti yang terlihat pada tabel berikut ini).

Tabel 2-73 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK kab/kota 2016) dan Progress Penanganan

Kab. / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
YOGYA	Gondomanan	Ngupasan	12.91	RW 1,2,4,5,6,7,8,9	2017	Selesai 100%
		Prawirodirjan		RW 1,2,3,5,6,8,10,11,12, 14,15,16,17,18	2017	Selesai 100%
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	RW 8,10,11	2018	Selesai 100%
		Patangpuluhan		RW 5,6,7,10	2018	Selesai 100%
		Wirobrajan		RW 6,7,9	2018	Selesai 100%
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	RW 1,2,9,11,12.	2019	Selesai 100%
		Notoprajan		RW 1,2,3,4.	2019	Selesai 100%
		JUMLAH 1	36.59			
BANTUL	Sewon	Pendowoharjo	11.71	Cepit RT 05	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 2	11.71			
SLEMAN	Depok	Condong Catur	11.39	Padukuhan Ngropoh, Dusun Ngropoh RT 02/ RW 23	2018	Selesai 100%
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	Padukuhan Turen, Dusun Tegalrejo RT 05/ RT 02	2018	Selesai 100%
			JUMLAH 3	23.07		
KULON PROGO	Galur	Brosot	14.16	Padukuhan III Pulo (RT 02/RW 01 & RW 05. RW 06	2018	Selesai 100%
			12.93	Padukuhan Bantengan Lor	2018	Selesai 100%
	Pengasih	Pengasih	9.52	Padukuhan Dayakan (RT 16,17/ RW 06)	2019	Selesai 100%
			2.41		2019	Selesai 100%
			JUMLAH 4	39.02		
JUMLAH 1 s/d 4 KEWENANGAN PROVINSI			110.39			

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Sementara Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY berdasarkan SK Kabupaten/Kota tahun 2021, pemerintah propinsi harus menangani kawasan kumuh baru seluas 134, 35 Ha,

Tabel 2-74 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten /Kota Tahun 2021)

KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PEMDA DIY (10-15 Ha)						Luas Total Kws. Kumuh Semua Kewenangan	Dasar Hukum
No	Kab /Kota	Kec.	Kel/ Kal	RW / Dusun	Luas (Ha)		
1	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	3, 6, 7	12.29	114.7	Keputusan Walikota Yogyakarta No. 158/2021 ttg Penetapan Lokasi
			Purbayan	8, 11, 13			
			Rejowinangun	3			
2	Wirobrajan	Pakuncen	1, 5, 6	13.75			

KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PEMDA DIY (10-15 Ha)						Luas Total Kws. Kumuh Semua Kewenangan	Dasar Hukum
No	Kab /Kota	Kec.	Kel/ Kal	RW / Dusun	Luas (Ha)		
3		Gondokusuman	Patangpuluhan	1, 2, 5, 7, 10	10.64		Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Wirobrajan	1, 10, 12			
			Baciro	18, 20			
			Klitren	5			
			Terban	1, 10, 11			
Total Kota Yogya (Ha)					36.68		
4	Bantul	Banguntapan	Jambidan	Pamotan RT 1, 3, 4, 5	10.92	330.26	Keputusan Bupati Bantul No. 82/2021 ttg Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
5			Potorono	Salakan RT 1, 3, 4, 5, 6	10.29		
6		Bantul	Trirenggo	Bogoran RT 1, 3	12.64		
7		Sewon	Panggunharjo	Jaranan RT 1, 2, 3, 4, 5	12.44		
8		Pajangan	Guwosari	Dukuh RT 1, 2, 3, 6	10.53		
9		Pajangan	Sendangsari	Benyo RT 4, 7, 8, 9	13.52		
Total Kab. Bantul (Ha)					70.34		
10	Sleman	Ngaglik	Sariharjo	Jongkang	14.22	96.61	Keputusan Bupati Sleman No. 93.3/20210 ttg Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Total Kab. Sleman (Ha)				
11	Kulon Progo	Sentolo	Banguncipto	RT 012- RW 006 Padukuhan Ploso	13.11	151.78	Keputusan Bupati Kulonprogo No. 416/2020 ttg Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2020-2024
			Sentolo	RT 013-RT 014 RW 007, RT 015 RW 008, Padukuhan Sentolo Lor			

KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PEMDA DIY (10-15 Ha)						Luas Total Kws. Kumuh Semua Kewenangan	Dasar Hukum
No	Kab /Kota	Kec.	Kel/ Kal	RW / Dusun	Luas (Ha)		
				RT 019-RT 020 RW 010 Padukuhan Sentolo Kidul			
			Total Kab. Kulonprogo (Ha)		13.11		
	Total DIY		11 kawasan		134.35	693.35	

2.1.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan kota Pendidikan, kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

- a. Pelaku ekonomi yang tidak patuh terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Telah diketahui bahwa hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan;

- b. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata, banyak wisatawan domestik yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat memicu anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berdatangan dari luar daerah;
- c. Saat ini banyak terdapat fenomena penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam;
- d. Banyak beredar minuman keras/minuman berakohol di wilayah DIY yang dijual pada warung-warung kecil/toko kelontong yang seharusnya tidak menjual barang tersebut secara ilegal.
- e. Meski kasus Covid-19 sudah relatif landai, namun upaya untuk penegakan protokol kesehatan, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai masker, melakukan jaga jarak dan menjauhi kerumunan di tempat umum, kemudian melakukan disinfeksi di tempat umum seperti pasar, dan tempat ibadah, selanjutnya melakukan supervisi di tempat tempat usaha, toko dan café serta tempat wisata mengenai penerapan prokotokol kesehatan dan melakukan operasi non yustisi yang terkait.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan

pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tenang dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tenang dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tenang dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi: Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar agar penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi, antara lain melalui peran Polisi Pamong Praja yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tugas Satpol PP diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Beberapa langkah dan kebijakan diambil oleh Satpol PP DIY sebagai instansi yang mengampu tugas penyelenggaraan

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka deteksi dini dan cegah dini Satpol PP DIY akan mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan operasi penegakan perda dan patroli Tibum yang dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari untuk menjamin terlaksananya sepuluh tertib tersebut. Terkait dengan adanya Perdais, Pemda DIY melalui Satpol PP DIY akan berupaya untuk lebih menggalakkan pelaksanaan penegakan Perdais yang selama ini belum banyak dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Perkada yang salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah dalam menciptakan budaya sadar Perda dan Perkada di masyarakat. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas.

Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah pelanggaran perda yang terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 2-75 Jumlah Pelanggaran Perda dari tahun 2018-2021

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun				Satuan
			2018	2019	2020	2021	
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,	Jumlah Pelanggaran Perda	1.397,00	2.187,00	63,00	907,00	Unit/ Kasus

	Kepegawaian dan Persandian						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: SATPOL PP DIY, 2022

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, keteritban, dan keamanan di DIY, dilakukan melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Jaga Warga sendiri merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok Siskamling,

kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana dan lain sebagainya.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI dimana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu

dan memahami kondisi situasi disekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel di bawah merupakan jumlah kasus DIY berdasarkan elemen yang paling menonjol. Pada ketiga elemen, terjadi sebanyak 392 kasus di tahun 2020 dan naik menjadi 492 kasus di tahun 2021.

Tabel 2-76 Jumlah Kasus DIY berdasarkan Elemen Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan	Sumber Data
			2018	2019	2020	2021	2022		
1	Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	4	13	26	5*	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2	Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah	Jumlah Kasus Narkoba	434	511	270	357	70*	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3	Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah	Jumlah Kasus Seksual	26	105	109	109	36*	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

*) *Data sementara*

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan

ketenteraman masyarakat” serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik dan status kelas ekonominya.

Melalui Jaga Warga, permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Dari aspek kebencanaan di DIY menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di DIY pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di DIY adalah sebesar 124,15. Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, Skor IRBI 124,41 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi.

Tabel 2-77 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021

Tahun	Angka Indeks
2018	150,00
2019	148,00
2020	124,41
2021	124,15

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel 2-78 Perbandingan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021

Tahun	IRBI DIY	IRBI Rata-rata Nasional
2021	124,15	133,0

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jika disandingkan secara nasional maka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY masih dibawah rata-rata nasional. Namun demikian, angka IRBI DIY sebesar 124,15 masih tergolong tinggi sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Terakhir terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi. Berdasarkan Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY di bawah ini merupakan angka persentase penduduk pernah pakai narkoba dalam 1 tahun terakhir di DIY . Pada tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan di DIY adalah sebesar 2,18%. Angka ini sempat turun menjadi 1,77% pada tahun 2017. Namun demikian pada tahun 2019 angka prevalensi tercatat meningkat sebesar 0,53% menjadi 2,30%. Kenaikan angka prevelansi penggunaan narkoba perlu menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental dimana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya *New Psychoactive Substances* atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

Tabel 2-79 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY 7 tahun terakhir

Tahun 2014 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2019 (%)
2,18%	1,77%	2,30%

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2019

Tabel 2-80 Perbandingan Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dengan Rata-rata Nasional Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Angka Prevalensi Tahun 2019 (%)
1	Sumatera Utara	6,5%
2	Sumatera Selatan	5,0%
3	DKI Jakarta	3,3%
4	Sulawesi Tengah	2,8%
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,3%
Rata-rata Nasional		1,8%

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut.

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan advokasi dan sinergi.

2.1.3.1.6.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2-81 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	484.064	660.627	637.457	n/a	n/a
Anak Jalanan	348	67	72	n/a	47
Eks Psikotik	1.742	1.654	1.375	n/a	1.819
Pengemis	170	134	147	n/a	111
Gelandangan	236	190	197	n/a	123
Anak Balita Terlantar	1.309	762	620	n/a	441
Anak Terlantar	13.960	11.009	9.607	n/a	7.902
Korban Tindak kekerasan	829	762	697	n/a	560
Pemulung	511	467	465	n/a	412
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.405	12.454	12.365	n/a	12.407

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lanjut Usia Terlantar	45.765	42.417	37.442	n/a	33.129
Penyandang Disabilitas	29.530	29.025	27.129	n/a	26.866
Penyandang Tuna Netra	2.207	2.015	1.728	n/a	2.192
Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data gabungan tuna wicara, rungu, rungu-wicara)	2.214	1.996	1.689	n/a	2.415
Penyandang Tuna Daksa	8.811	8.761	6.488	n/a	7.630
Penyandang Tuna Grahita	7.980	7.153	6.099	n/a	8.336
Penyandang Disabilitas Mental	1.742	1.635	1.357	n/a	1.819
Penyandang Disabilitas Ganda	1.719	1.390	1.113	n/a	1.468
Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	185	301	185	170	185
Tidak diketahui jenis kecacatannya	4.857	5.131	7.212	n/a	2.021
Tuna Susila	406	290	259	n/a	361
Bekas Warga Binaan	170	247	225	n/a	170

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lembaga Masyarakat (BWBLP)					
Korban Penyalahgunaan NAPZA	500	466	439	n/a	323
Keluarga Fakir Miskin	367.540	550.868	534.994	n/a	n/a
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.943	4.960	4.979	n/a	4.515
Korban Bencana Alam	433	61	8	n/a	7.687
Korban Bencana Sosial	29	0	117	n/a	80
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	361	303	327	n/a	278
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.104	3.712	4.193	n/a	5.127
Pemulangan Orang Telantar	-	n/a	302	237	330

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Data PMKS di DIY dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, dan fakir miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

2.1.3.1.6.2 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

Tabel 2-82 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2017-2021

Jenis PSKS	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Karang Taruna	438	438	438	438	438	Kelompok
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	78	78	78	78	78	Orang
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	372	381	381	387	316	Unit
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	4.960	5.020	5.130	5.130	5.057	Orang
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1.058	1.030	1.068	736	1.091	Orang
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	193	223	263	263	229	Kelompok

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); government Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2-83 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2021

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	185	185	185	185	185
2	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	60	60	60	60	60
3	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	300	300	300	300	300
4	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	80	80	80	80	80
5	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	214	214	214	224	228
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	140	140	140	140	140

Sumber: Dinas Sosial DIY 2022, diolah

Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di DIY tahun 2021.

Tabel 2-84 Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di DIY Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	555	555	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)

NO		INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	555	555	0	100%
2		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	-	-	-	-
3		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4		Penyediaan Sandang	555	555	0	100%
5		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	16	16	0	100%
6		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	-	-	-	-
7		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8		Penyediaan Alat bantu	23	23	0	100%
9		Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	555	555	0	100%
10		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	555	555	0	100%
11		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	555	555	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	158	158	-	100%
2	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	555	555	0	100%
3	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	25	25	0	100%
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	27	27	0	100%
5					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	737	737	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengasuhan	737	737	0	100%
2	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak	737	737	0	100%
3	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	-	-	-	-
4	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
5	Penyediaan Sandang	737	737	-	100%
6	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang	20	20	-	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
	Memiliki Panti Anak				
7	Penyediaan Asrama yg mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	-	-	-	-
8	Penyediaan Asrama yg mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
9	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	124	124	-	100%
10	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	5	5	-	100%
11	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	8	8	-	100%
12	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	27	27	-	100%
13	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	725	725	-	100%
14	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	9	9	-	100%
15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29	29	-	100%
16	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	5	5	-	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah yang Harus Dilayani :	1.314	1.324	0	
1	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah yg Memiliki Panti Lanjut Usia	1.314	1.324	0	100,76%
2	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	-	-	-	-
3	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4	Penyediaan Sandang	1.314	1.324	0	100,76%
5	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	23	23	0	100%
6	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	-	-	-	-
7	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8	Penyediaan Alat bantu	72	72	0	100%
9	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	1	1	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
10	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	214	224	0	104%
11	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	214	224	0	104%
12	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	27	27	0	100%
13	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	214	224	0	104%
14	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	27	27	0	100%
15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	197	197	0	100%
16	Pemulasaraan	7	7	0	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	252	252	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	252	252	0	100%
2	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
3	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4	Penyediaan Sandang	252	252	0	100%
5	Penyediaan Asrama yg mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	7	7	0	100%
6	Penyediaan Asrama yg mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	-	-	-	-
7	Penyediaan Asrama yg mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	252	252	0	100%
9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	252	252	0	100%
10	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	252	252	0	100%
11	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	252	252	0	100%
12	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	5	0	100%

NO		INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
	13	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	252	252	0	100%
	14	Pemulangan ke Daerah Asal	159	159	0	100%
5		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100%
			*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	
		Jumlah yang Harus Dilayani :	9.868	9.868	0	
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yg belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
			(1)	(2)	(3)	(4)
	1	Penyediaan Permakanan	8.206	8.206	0	100%
	2	Penyediaan Sandang	84	84	0	100%
	3	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	47	47	0	100%
	4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2.365	2.365	0	100%
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	900	900	0	100%

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja

menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.3.2.1.1 Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2018–2021, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS DIY, PUK DIY pada tahun 2018 adalah sebesar 2.987.330 orang dan pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 3.175.789 orang.

Tabel 2-85 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2018–2021

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	2.191.742,00	2.246.194,00	2.228.162,00	2.334.955,00
- Bekerja	2.118.392,00	2.174.712,00	2.126.316,00	2.228.523,00

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021
- Penganggur	73.350,00	71.482,00	101.846,00	106.432,00
Bukan Angkatan Kerja	795.588,00	842.635,00	904.592,00	840.834,00
- Sekolah	247.191,00	278.350,00	277.808,00	253.480,00
- Rumah Tangga	452.310,00	463.355,00	526.850,00	472.342,00
- Lainnya	96.087,00	100.930,00	99.934,00	115.012,00
Penduduk Usia Kerja	2.987.330,00	3.021.647,00	3.132.754,00	3.175.789,00
TPAK (Persen)	73,37	72,94	71,12	73,52
TPT (Persen)	3,37	3,18	4,57	4,56

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2020 sebanyak 2.228.162 orang, mengalami penurunan 0,80% (18.000 orang) dibandingkan Agustus 2019, fenomena ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah tangga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,12%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2020 sebesar 4,57%, mengalami peningkatan 1,39% poin dibanding TPT Agustus 2019 (3,18%). Penduduk bekerja DIY sebanyak 2.216.316 orang, berkurang 48.396 orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Perdagangan (2,03% poin) dan Pertanian (1,12%poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Penyediaan akomodasi dan makan minum (1,16% poin), Jasa Perusahaan (0,83% poin), dan Konstruksi (0,76% poin). Diperlukan kebijakan lintas sektor yang lebih konkret untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementerian

Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

2.1.3.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Menurut data BPS/Statistik DIY 2021, TPAK DIY pada periode 2018 hingga 2021 masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018, TPAK DIY adalah sebesar 73,37%, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 yang mencapai angka 71,12% dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2021 (Agustus) mencapai kenaikan kembali dengan angka sebesar 73,52%. Angka TPAK sebesar 73,52% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 74 orang diantaranya disebut sebagai angkatan kerja. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan angka sebelumnya (tahun 2020) yaitu 71,12%.

2.1.3.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bias mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja

bergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya “*Gap*” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijumpatani untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan. *Link & match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.

Pada tahun 2020 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi yaitu mencapai 53,48% diposisi kedua adalah penganggur berpendidikan tinggi (diploma & universitas) sebesar 24,55% diikuti dengan penganggur berpendidikan SMP kebawah 21,96%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih pekerjaan (BPS DIY,2020) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih berada dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2018 sebesar 3,37% dan nasional sebesar 5,30%, sedangkan TPT DIY tahun 2021 sebesar 4,56% dan nasional sebesar 6,49%. Meskipun demikian TPT harus diupayakan untuk tidak cenderung naik.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang

kerja bagi penduduk usia kerjanya. *Supply* tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di perdesaan.

Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. Menurut data dari BPS terdapat 540.120 orang penduduk DIY yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran (3.370 orang), Bukan angkatan kerja (22.830 orang), Sementara tidak kerja (36.570 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (448.350 orang).

2.1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 turut

berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAP2) DIY, antara lain Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan lain sebagainya. Salah satu layanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga). Tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan Tesaga juga dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada bertemu langsung. Selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

2.1.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, capaian IPG terus mengalami peningkatan

dan termasuk dalam lima provinsi teratas ranking IPG di seluruh Indonesia. Sedangkan tren IPG DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2020, terus mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit.

Tabel 2-86 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	2018	2019	2020	2021
DIY	94,73	94,77	94,80	94,88

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html> diakses 6 Juni 2022

2.1.3.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2021, Capaian IDG terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 sebesar 69,64 sampai dengan tahun 2021 dengan posisi berada di angka 76,57 dan tahun 2022 pada angka 76,57* (angka sementara). Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

Tabel 2-87 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2022

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	69,64	73,59	74,73	76,57	76,57*

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

2.1.3.2.2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tidak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Tahun 2020, target dari indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 adalah sebesar 0,46 realisasi capaian sebesar 0,52 dengan persentase capaian sebesar 86,96%, dengan demikian maka target pada tahun 2020 belum tercapai. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian tahun 2019 sebesar 94,00% maka capaian tahun 2020 ini ada penurunan sebesar 7,04%. Melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
- Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di tingkat provinsi maupun terbentuknya UPT PPA di kabupaten/kota.
- Pengembangan Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa) menjadi multiplatform komunikasi melalui Whatsapp, Blog, Instagram, Youtube dll.
- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Radio, Televisi dan Media Cetak.
- Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 67 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan semakin efektif.
- Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat Kapanewon dan kalurahan di DIY
- Penerbitan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022

Kasus kekerasan di DIY jika dilihat dari tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan diperoleh data kenaikan tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan kejadian kekerasan tertinggi dibanding lingkungan kerja/sekolah atau tempat lainnya.

Tabel 2-88 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	17	16	23	17	13
		18 - 25 Th	1	-	1	0	0
		25 Th Keatas	2	-	0	0	0
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	10	7	12	15	10
		Tempat Kerja	4	3	4	1	1
		Lainnya	6	6	8	1	2
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	19	18	46	63	44
		18 - 25 Th	8	24	27	13	14
		25 Th Keatas	14	29	28	26	10
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	30	52	76	79	55

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Tempat Kerja	2	1	4	1	0
		Lainnya	9	18	21	22	13
Bantul	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	24	32	49	33	46
		8 - 25 Th	4	2	4	6	6
		25 Th Keatas	4	5	7	5	7
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	16	23	31	32	22
		Tempat Kerja	4	5	13	4	21
		Lainnya	-	-	16	8	16
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	30	48	98	75	80
		18 - 25 Th	19	20	59	22	53
		25 Th Keatas	82	102	157	83	64
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	90	138	233	127	160
Tempat Kerja		7	9	12	7	1	
Lainnya		34	23	69	46	36	
Gunungkidul	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	10	6	3	2	19
		18 - 25 Th	2	-	0	0	3
		25 Th Keatas	2	1	2	1	1
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	10	4	4	2	7
		Tempat Kerja	3	2	0	0	0
		Lainnya	1	1	1	1	16
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	17	29	15	12	20
		18 - 25 Th	9	1	10	6	17
		25 Th Keatas	17	19	20	11	22
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	27	35	40	20	39

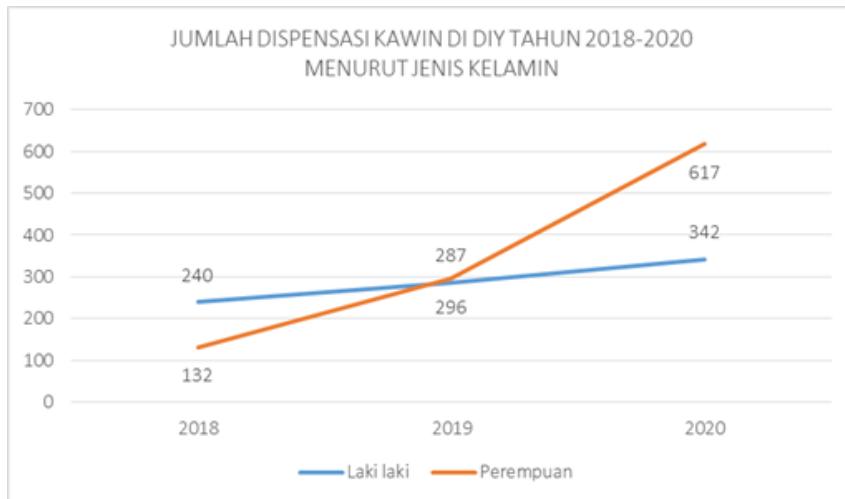
Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Tempat Kerja	6	3	1	0	2
		Laki-laki	10	11	4	9	18
Sleman	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	60	56	69	63	38
		18 - 25 Th	6	5	1	1	1
		25 Th Keatas	14	24	10	2	1
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	43	70	42	39	26
		Tempat Kerja	14	8	15	10	2
		Lainnya	23	7	23	17	12
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	79	138	108	72	68
		18 - 25 Th	39	50	124	39	54
		25 Th Keatas	155	194	291	125	106
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	211	275	352	172	185
		Tempat Kerja	17	64	20	8	4
		Lainnya	45	43	151	56	39
Kota Yogyakarta	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	20	12	28	24	27
		18 - 25 Th	2	1	1	7	0
		25 Th Keatas	6	6	8	9	11
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	16	10	19	21	29
		Tempat Kerja	9	6	12	3	2
		Lainnya	2	3	6	16	7
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	50	53	55	80	63
		18 - 25 Th	79	88	73	141	135
		25 Th Keatas	342	299	152	328	312
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	275	380	210	438	431

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Tempat Kerja	15	22	15	14	10
		Lainnya	43	38	55	97	69

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.3.2.2.4 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Dalam 3 tahun terakhir, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh PA kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam, terlebih dispensasi kawin untuk anak perempuan. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar 19%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat mencapai 124% di tahun 2019 dan 108% di tahun 2020.

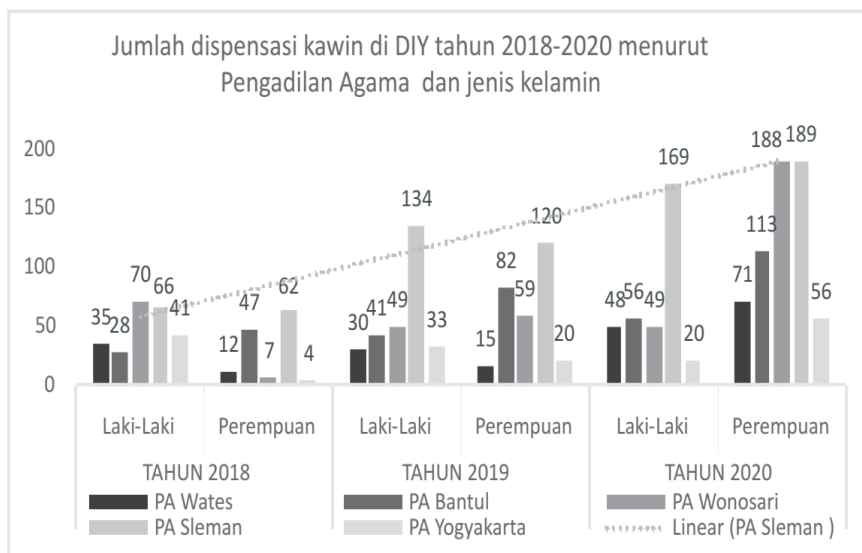


Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Gambar 2-42 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Jenis Kelamin

Meningkatnya persentase perkawinan usia anak bisa disebabkan karena kemiskinan, ataupun kehamilan tidak dikehendaki. Alasan terbesar permintaan dispensasi kawin di PA Wonosari adalah karena kehamilan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di PA yang lain. Data ini sejalan dengan data Dinas Kesehatan yang menyebutkan bahwa dari 1.032 kasus Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), 662 kasus terjadi pada perempuan tidak menikah. Meskipun bukan berarti perempuan tidak menikah adalah perempuan usia anak, tetapi tingginya angka KTD pada perempuan tidak menikah dikontribusi oleh KTD yang terjadi pada anak perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi disusul Kabupaten Gunungkidul. Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah. Pengadilan Agama Sleman berkontribusi paling banyak dalam pengeluaran dispensasi kawin. Dalam kurun waktu 3 tahun, dispensasi kawin yang dikeluarkan jumlahnya meningkat nyaris 3 kali lipat dari total 128 pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 358 dispensasi kawin.

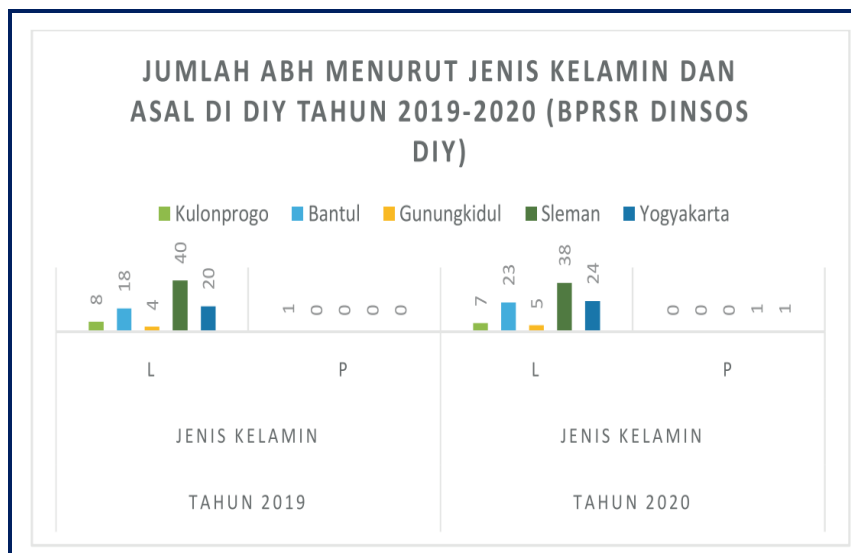


Gambar 2-43 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin

2.1.3.2.2.5 Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Data anak yang berhadapan dengan hukum –yang selanjutnya disingkat dengan ABH— pada tahun 2019-2020 cenderung menurun di bawah angka 100. Sebagaimana data yang bersumber dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Yogyakarta. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2019-2020, angka kasus ABH yang ditangani BPRSR mengalami penurunan jika dibandingkan periode 2017-2018. Meskipun demikian, ada kenaikan angka kasus antara tahun 2019-2020 dari 91 kasus menjadi 99 kasus. Kenaikan kasus terjadi di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Sementara di Kabupaten Sleman, angkanya terlihat menurun dari 40 kasus di 2019 menjadi 38 kasus pada tahun 2020. Namun dilihat dari sebaran kasus dan jenis kelamin, data masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kasus ABH paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman yang disusul oleh Kota Yogyakarta lalu Bantul.

Sebaran ini tidak berubah dari tahun sebelumnya di mana kawasan perkotaan masih menjadi lokus temuan kasus-kasus ABH.



Gambar 2-44 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2019-2020 (BPRSR Dinsos DIY)

2.1.3.2.3 Urusan Pangan

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Urusan Pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

2.1.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil susenas BPS capaian skor PPH tahun 2020 di DIY sebesar 94,7 jauh lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar 86,30. Kalau kita lihat dengan capaian skor PPH tahun 2020 telah melebihi target tahunan RPJMD 2017 –2022. Namun demikian realisasi skor PPH mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,8 jauh lebih kecil dari penurunan di tingkat nasional yang mencapai 1,6.

Angka capaian skor PPH di atas 90 merupakan katagori cukup ideal dan nilai ideal adalah 100, sehingga walaupun selama 1 tahun terakhir di DIY terjadi penurunan skor PPH, kualitas konsumsi masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun demikian berdasarkan konsumsi kalori/kapita/hari di DIY, masih perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih dibawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan

lokal. Untuk mencapai skor PPH ideal dan peningkatan keseimbangan konsumsi kalori/kapita/hari di masyarakat, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui program/kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan. Melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. Pada tahun 2020, pemerintah daerah menambah cadangan pangan sejumlah 60 ton beras. Tahun 2020 tidak ada penyaluran cadangan pangan, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras secara kumulatif telah mencapai 275,041 ton. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus ditambah melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat. Ketersediaan cadangan pangan terkait dengan ketersediaan energi. Tahun 2020 ketersediaan energi yang dilhitng dengan Neraca Bahan Makanan (NBM), ketersediaannya mencapai 3.734 kkal/kapita/hr.

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Tahun 2020 ada penyesuaian nama Toko Tani Indonesia (TTI) menjadi Pasar Mitra Tani (PMT). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT juga pernah melakukan kerjasama dengan market place online seperti Aplikasi Gojek/Goshop dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkir murah /diskon ongkir jika belanja di PMT.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinu dengan harga yang terjangkau.

Aspek keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Oleh karena itu diperlukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif dengan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis maupun mikrobiologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi. Adanya JKPD mendukung penyelesaian kasus-kasus pangan yang insidental dan melibatkan rantai pasok pangan dari hulu sampai hilir. Pada tahun 2020 ada 74 kelompok usaha yang memperoleh nomor register

Produk Domestik (PD) atau Register Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersebar di Sleman 21 unit, Kulon Progo 10 Unit, Bantul 34 Unit dan Kota Yogyakarta 9 unit. Sertifikat *Packing House* (PH) pada tahun 2020 diberikan kepada 2 unit usaha.

2.1.3.2.3.2 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2019 sesuai data yang dirilis BPS sebesar 40,79%. Capaian tahun 2020 sebesar 41,03%, tercapai sebesar 96,75% dibanding target tahun 2020, yaitu 39,74%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 38,65% tingkat capaiannya sebesar 93,84%. Kondisi pandemi selama tahun 2020 telah menyebabkan melemahnya perekonomian di DIY yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. Menurut teori dari Ernest Engel, persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2019, ada peningkatan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan sebesar 0,24%. Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi-umbian, daging, telur dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang, buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Turunnya pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian sudah sejalan dengan penurunan tingkat konsumsi padi-padian/beras pada komposisi Skor PPH yang merupakan indikator kinerja lainnya di penyelenggaraan

urusan pangan. Rokok yang juga merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan 0,03%. Hal ini sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini. Sesuai teori yang ada, bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan yang meningkat di suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.

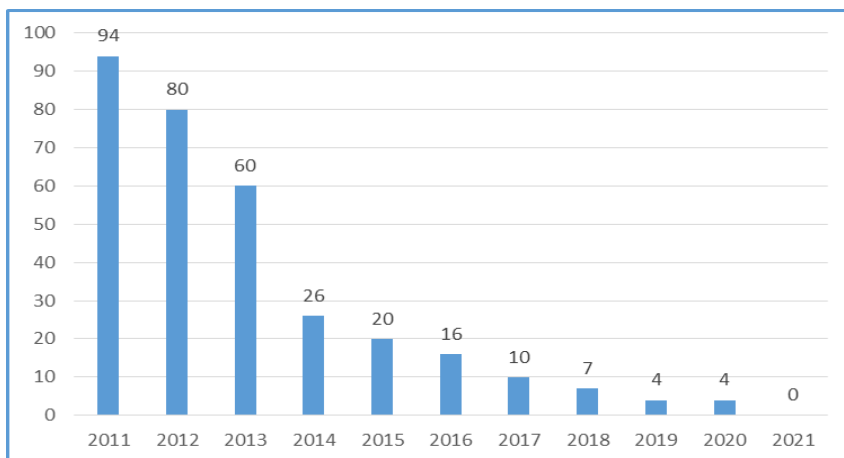
Sampai dengan tahun 2020 masih ada 4 Kalurahan Rawan Pangan di DIY, yaitu Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo; Kalurahan Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo; Kalurahan Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo; dan Kalurahan Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul. Hal ini menjadi tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas melibatkan peran serta lintas sektor karena menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan di DIY dari 11,70% di tahun 2019 menjadi 12,28% di tahun 2020.

Dari 4 Kalurahan Rawan Pangan yang tersisa disebabkan oleh indikator akses pangan yang dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan di kalurahan tersebut. Walaupun tantangannya cukup berat namun Pemda DIY tetap melaksanakan berbagai upaya mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan melalui usaha ekonomi produktif, antara lain melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dan Pengembangan Korporasi Usahatani, serta Penguatan Lumbung Pangan dan Distribusi Pangan. Ke depan perlu ditingkatkan upaya sinergis yang melibatkan para pihak terkait untuk pencapaian target kinerja.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat dari banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas,

serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

Hasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kalurahan yang ada di seluruh DIY tahun 2021 melalui analisis indikator aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan (data keluarga pra sejahtera), dan aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil tidak adanya kapanewon dan kalurahan yang terindikasi rawan pangan. Terdapat 1 kapanewon, yaitu Kapanewon Pajangan dan 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari, Wirokerten, dan Jambidan di Kabupaten Bantul yang masuk dalam kategori waspada pangan (kuning).



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-45 Kalurahan Rawan Pangan 2011-2021

Peta komposit FSVA Tahun 2021 ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kapanewon yang masuk kedalam kategori rawan (Prioritas 1, 2 dan 3). Perbandingan hasil komposit FSVA Tahun 2020 dan 2021 tersaji pada table berikut.

Tabel 2-89 Perbandingan hasil peta komposit tahun 2020 dengan tahun 2021

Prioritas	Jumlah Kapanewon		Persentase	
	2020	2021	2020	2021
Prioritas 1	0	0	0%	0%
Prioritas 2	0	1	0%	1%
Prioritas 3	1	4	1%	5%
Prioritas 4	17	16	22%	21%
Prioritas 5	35	40	45%	51%
Prioritas 6	25	17	32%	22%

Dari tabel tersebut dapat kita lihat sebaran peta komposit di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Telah terjadi peningkatan jumlah Kapanewon prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 5 serta terjadi penurunan jumlah Kapanewon yang masuk prioritas 4 dan prioritas 6.

Kapanewon yang masuk kedalam Prioritas 2 yaitu Kapanewon Mergangsan Kota Yogyakarta. Analisa terhadap 9 indikator menunjukkan hasil rawan pada: 1) Indikator persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Prioritas 3); dan 2) Indikator angka kesakitan/*morbidity* (Prioritas 1). Sedangkan kapanewon yang masuk kedalam prioritas 3 antara lain:

1. Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Dari 9 indikator yang dianalisa, Kapanewon Purwosari menunjukkan hasil rawan di 4 indikator yaitu:
 - Indikator persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran (Prioritas 3);
 - Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (Prioritas 3);
 - Indikator angka kesakitan/*morbidity* (Prioritas 1);
 - Indikator rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun (Prioritas 1)

2. Kapanewon Saptosari di Kabupaten Gunungkidul. Untuk Kapanewon Saptosari, dari 9 indikator yang dianalisa, 3 indikaor menunjukkan hasil rawan yaitu:
 - Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (Prioritas 2);
 - Indikator angka kesakitan/*mobirdity* (Prioritas 1);
 - Indikator rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun (Prioritas 1).
3. Kapanewon Wirobrajan di Kota Yogyakarta. Untuk kapanewon Wirobrajan, dari 9 indikator yang dianalisa, 3 indikaor menunjukkan hasil rawan yaitu indikator angka kesakitan/*mobirdity* (Prioritas 2);
4. Kapanewon Kraton di Kabupaten Gunungkidul. Untuk Kapanewon Saptosari, dari 9 indikator yang dianalisa, 3 indikaor menunjukkan hasil rawan yaitu:
 - Indikator angka kesakitan/*mobirdity* (Prioritas 2);
 - Indikator persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Prioritas 3).

Konsumsi energi kelompok padi-padian tahun 2021 sebesar 100,90 kg/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2020 (102,40 kg/kap/hari). Konsumsi energi kelompok daging tahun 2021 juga lebih rendah dibanding tahun 2020. Konsumsi energi kelompok telur mengalami peningkatan pada tahun 2021 (8,50 kg/kap/hari) dibandingkan tahun 2020 (7,90 kg/kap/hari). Sedangkan pada kelompok susu dan ikan di tahun 2021 secara berturut turut adalah 3,50 kg/kap/hari dan 12,40 kg/kap/hari sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 berturut turut 3,70 kg/kap/hari dan 12,50 kg/kap/hari.

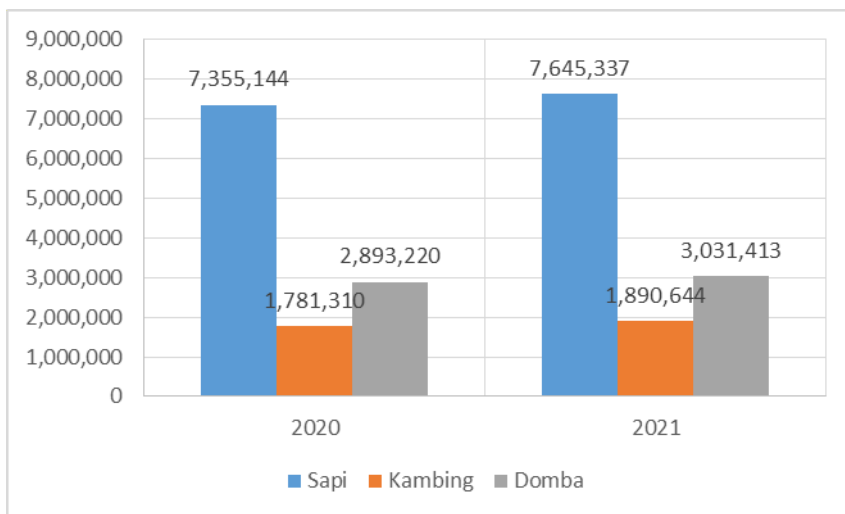
Tabel 2-90 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2017-2021

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/kap/hari)				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Padi-padian	112,30	108,70	104,50	102,40	100,90

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/kap/hari)				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Beras	92,70	88,30	83,40	82,20	81,40
b. Jagung	0,90	0,70	0,80	1,40	0,70
c. Terigu	18,70	19,70	20,30	18,80	18,80
II. Umbi-umbian	16,58	11,80	11,70	12,90	16,70
a. Singkong	12,30	7,90	7,20	8,30	11,40
b. Ubi jalar	2,40	1,80	1,80	1,90	2,40
c. Kentang	1,88	2,10	2,70	2,70	2,90
III. Pangan Hewani					
a. Daging ruminansia	6,10	7,80	7,30	6,90	5,50
b. Daging unggas	11,10	10,10	10,70	11,00	10,80
c. Telur	8,10	8,30	8,10	7,90	8,50
d. Susu	2,80	4,00	3,80	3,70	3,50
e. Ikan	12,30	12,30	12,00	12,50	12,40

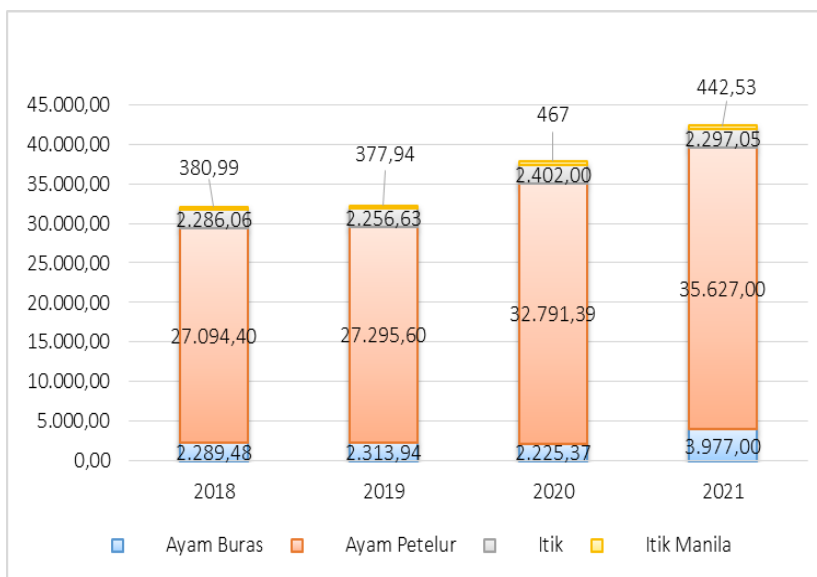
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Apabila dilihat dari produksi daging sapi, daging domba, serta daging kambing pada tahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun 2020. Produksi daging ayam pedaging dan ayam buras pun mengalami peningkatan jumlah produksi pada dua tahun terakhir.



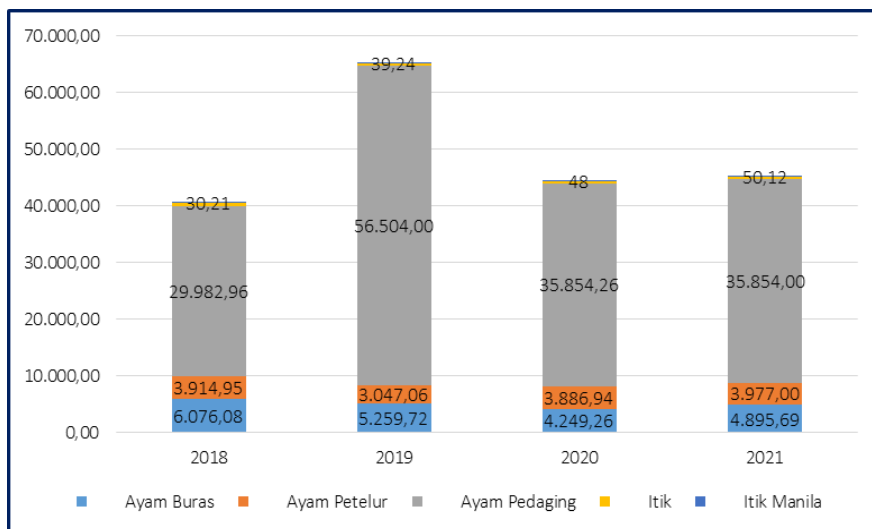
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-46 Produksi Daging di DIY Tahun 2020-2021 (kg/Tahun)



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-47 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-48 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)

Jumlah kalurahan rawan pangan di DIY menurun dari 7 kalurahan pada 2018 menjadi 4 kalurahan pada tahun 2020 dan menjadi 0 kalurahan pada tahun 2021. Hal ini dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kalurahan rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di kalurahan tersebut.

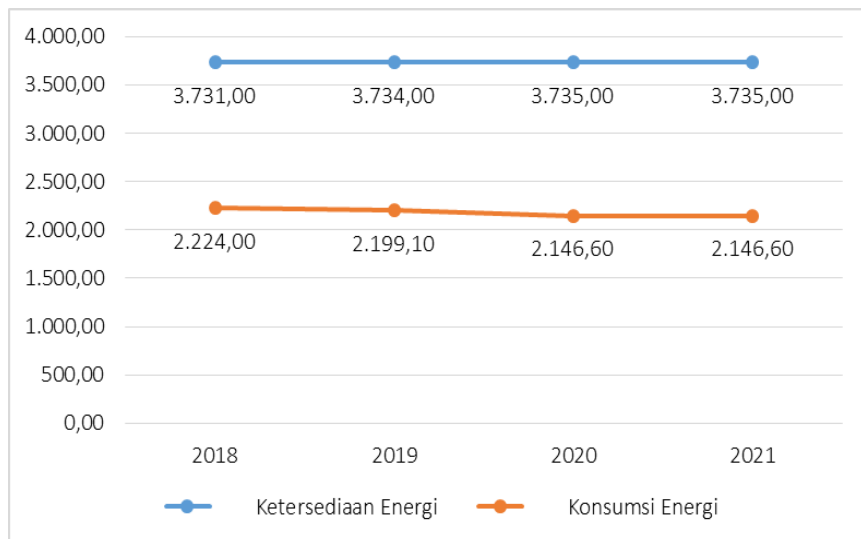
2.1.3.2.3.3 Distribusi Pangan

Telah dilakukan upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dan dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan

dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

2.1.3.2.3.4 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

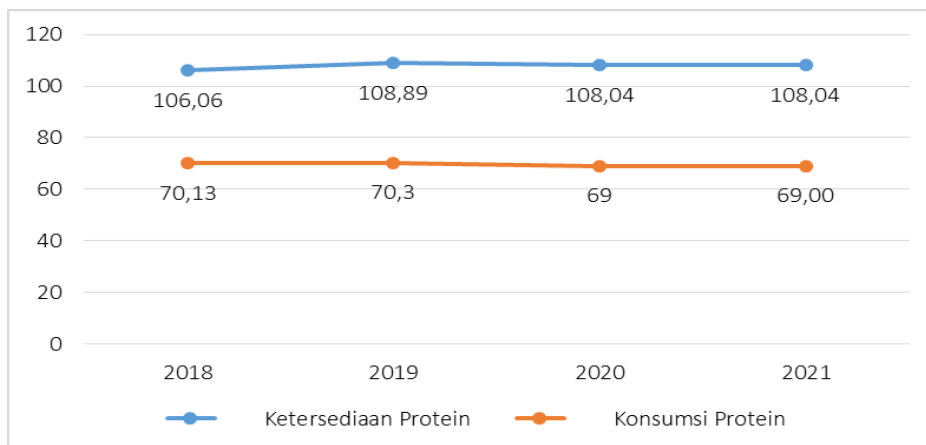
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY konstan namun cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.224.0 Kkal/kapita/hari sedangkan pada tahun 2021 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.146 Kkal/kapita/hari Terjadi surplus ketersediaan energi yang pada tahun 2021 berada pada angka 3.735,00 namun tingkat konsumsi energi justru berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-49 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021

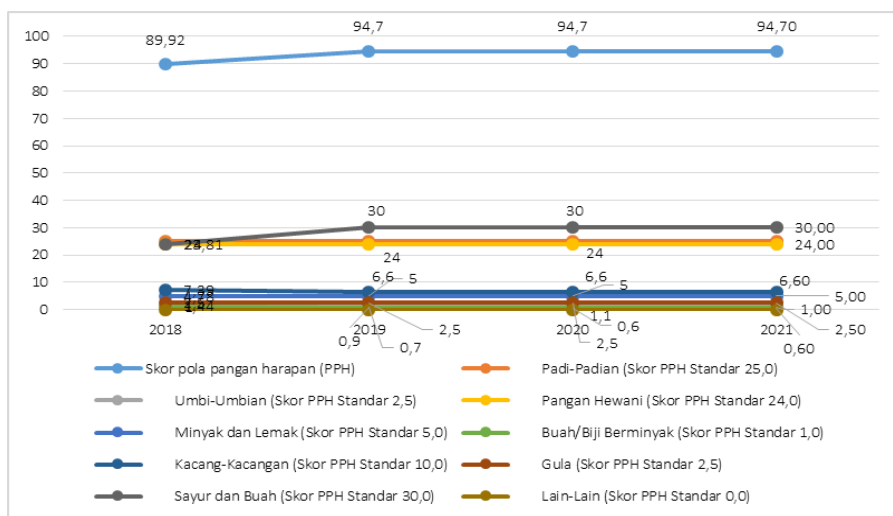
Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 70,13 gram/kapita/hari dan menurun pada angka 69,00 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 57 gr/kapita/hari.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-50 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY sektor padi padian pada tahun 2021 adalah 94,7, lebih baik dari skor nasional 85,2. kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-51 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2021

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Tingkat konsumsi kelompok bahan pangan yang masih perlu ditingkatkan diantaranya komoditi umbi, sayur dan buah, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganeekaragaman pangan di DIY.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat dari banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan dicabut sebagian dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggaduh (atau anggadhuh) melalui serat kekancingan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundang Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU No 13 Tahun 2012 dan Perdais DIY No 1 Tahun 2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di DIY, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya keistimewaan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di DIY berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni: (1) permasalahan pertanahan secara umum berhubungan dengan masyarakat; dan (2) permasalahan pertanahan terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Permasalahan yang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat luas diantaranya:

1. tingginya alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;
2. tingginya fragmentasi tanah-tanah pertanian;
3. tidak terkendalinya harga tanah;
4. belum semua bidang-bidang tanah mempunyai alas hak;
5. belum optimalnya sistem informasi pertanahan berbasis bidang-bidang tanah; dan
6. masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Permasalahan yang terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipatendiantaranya:

1. belum semua bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten mempunyai alas hak
2. pemeliharaan dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum optimal
3. pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten
4. perlindungan terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum optimal
5. penggunaan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum sesuai dengan peraturan perundangan; dan
6. pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (termasuk tanah desa) yang menuai sengketa dan konflik.

2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Pemerintah Daerah DIY dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 untuk urusan lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri dari 3 indeks yaitu:

$$\text{IKLH Provinsi} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

1. Indeks Kualitas Air (IKA), berupa hasil pengukuran kualitas air di 10 sungai untuk 7 parameter yaitu DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Sungai yang menjadi lokasi pengukuran yaitu Winongo, Code, Gajah Wong, Tambakbayan, Kuning, Konteng, Bedog, Beli, Bulus, dan Oyo.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), berupa hasil pengukuran kualitas udara pada kawasan transportasi, industri, perkantoran/komersial, dan permukiman untuk 2 parameter yaitu SO₂ dan NO₂.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), berupa hasil pengukuran luas tutupan lahan berupa hutan dan vegetasi.

2.1.3.2.5.1 Kualitas Air Sungai

IKA didapatkan melalui pengukuran 7 parameter kualitas air yang dilakukan 3 kali dalam setahun yaitu bulan Februari mewakili musim hujan, bulan Mei mewakili perubahan dua musim dan bulan Agustus mewakili musim kemarau. Dalam tiap periode pengukuran diambil sampel di 50 titik sehingga data yang ada sebanyak 150 titik.

Tabel 2-91 Nilai Indeks Kualitas Air Sungai DIY tahun 2016-2021

Nama Sungai	Nilai IKA							
	2016	2017	2018	Feb 2018 (Hujan)	Mei 2018 (Peralihan)	Agust 2018 (Kemarau)	2020	2021
Winongo	32,50	33,33	37,50	32,50	35,00	45,00	43,09	35,9
Code	35,83	33,33	41,67	35,00	45,00	45,00	39,30	32,07
Gajahwong	33,33	31,67	38,33	30,00	37,50	47,50	37,89	29,64
Tambakbayan	31,67	40,00	35	30,00	30,00	45,00	37,50	33,33
Kuning	33,33	33,33	36,67	30,00	40,00	40,00	40,77	40,93
Konteng	31,67	36,67	43,33	40,00	45,00	45,00	25,71	27,67
Bedog	27,33	31,33	43,33	38,00	46,00	46,00	45,00	42,36
Belik	14,44	27,78	43,33	36,66	43,33	50,00	40,00	33,33
Bulus	23,33	43,33	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00	33,33
Oyo	28,33	28,33	33,33	30,00	35,00	35,00	35,00	47,96
Rerata	29,18	33,91	40,25	35,22	40,68	44,85	38,43	35,42

Sumber: Laporan IKLH DIY tahun 2021

Dari pemantauan 10 sungai di DIY, IKA semakin meningkat dari sebesar 29,18 pada tahun 2016 menjadi 44,85 di tahun 2018 kemudian turun lagi menjadi 35,42 pada tahun 2021. Penurunan kualitas air di tahun 2021 ini disebabkan oleh parameter Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Total Coliform yang melebihi baku mutu. Keberadaan bakteri ini menunjukkan bahwa kadar pencemar yang mendominasi berasal dari limbah domestik.

Kualitas air sungai di DIY dilihat dari Buku Data IKPLHD DIY Tahun 2020. Pemantauan dilakukan secara periodik untuk memotret apakah kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum. Hasil pemantauan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penghitungan Indeks Kualitas Air di DIY. Tahun 2020 Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan pemantauan terhadap 10 sungai pada bulan Februari. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Hasil pemantauan tersebut kemudian dihitung besaran pencemarannya terhadap sungai dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Berdasarkan perhitungan dengan metode tersebut dan dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY diketahui bahwa pencemaran air di kesepuluh sungai di DIY itu semuanya kondisinya tercemar. Bila dihitung berdasarkan indeks pencemaran hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Ringan – Sedang: Sungai Winongo, Oyo, Bulus, Kuning; dan
2. Ringan – Berat: Sungai Code, Gajah Wong, Bedog, Konteng, Belik, dan Tambak Bayan.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 10 Sungai yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik dan Sungai Bulus dalam tiga periode, yaitu bulan Februari, Juni, dan September. Dari hasil pemantauan tersebut, diperoleh data kualitas air sungai sebagai berikut.

Tabel 2-92 Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2020

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran	keterangan
1	Bedog	5,45 - 10,33	cemar sedang - cemar berat
2	Belik	3,62 - 11,90	cemar rendah - cemar berat
3	Bulus	4,53 - 8,05	cemar rendah - cemar sedang
4	Code	3,05 - 22,83	cemar rendah - cemar sangat berat
5	Gajahwong	3,65 - 12,38	cemar rendah - cemar berat
6	Kuning	3,16 - 9,36	cemar rendah - cemar sedang
7	Konteng	8,57 - 11,93	cemar sedang - cemar berat
8	Oyo	5,23 - 7,72	cemar rendah - cemar sedang
9	Tambak Bayan	5,27 - 16,08	cemar sedang - cemar berat
10	Winongo	3,56 - 9,84	cemar rendah - cemar sedang

Sumber: IKPLHD DIY, 2020

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa parameter bakteri koli tinja (*Fecal coliform*) dan total koli (*Total coliform*) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar yang menyebabkan rendahnya nilai indeks pencemaran. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik.

Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air sungai antara lain:

- a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
- b. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
- c. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- d. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.

Parameter yang dominan terdeteksi melebihi baku mutu antara lain timbal, tembaga, zink, sulfida, fenol, klorin bebas, bakteri total koli dan bakteri koli tinja. Adapun nilai parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli masih melebihi baku mutu disinyalir berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak.

Dampak lain dengan tercemarnya air sungai di DIY adalah pemanfaatan untuk air baku air minum PDAM menjadi tidak dapat dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya harus mengambil air baku dari sumber mata air di lereng Gunung Api Merapi yang berada di Kabupaten Sleman, sebab kualitas air yang masuk

perkotaan Yogyakarta masih buruk. Hal ini memberikan beban biaya yang lebih besar untuk mendapatkan air minum karena harus mengambil dari kabupaten lain.

Pemerintah DIY membuat program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pencinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih lemah.

2.1.3.2.5.2 Kualitas Air Tanah

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2020 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY. Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota. Terdapat 221 sampel di Kabupaten Bantul, 133 sampel di Kabupaten Sleman, 16 sampel di Kabupaten Gunungkidul, 18 sampel di Kabupaten Kulon Progo, dan 84 sampel di Kota Yogyakarta. Lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat di wilayah DIY.

Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit.

Hasil pengukuran di laboratorium menunjukkan bahwa nilai dari masing-masing parameter bervariasi, bahkan dari berbagai sampel yang diperoleh, ada pula yang menunjukkan nilai ekstrem, baik itu ekstrem maksimum ataupun ekstrem minimum. Nilai ekstrem adalah nilai-nilai yang menyimpang cukup jauh dari nilai rata-rata.

Hasil pengujian kualitas air tanah di DIY pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-93 Rekapitulasi Triwulan III 2020 PKAM DIY Kualitas Air Sumur dan Minum 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana diambil Sampel	Sarana Memenuhi Syarat	Sarana Tidak Memenuhi Syarat
1	Bantul	221	167	54
2	Kulon Progo	18	6	12
3	Gunungkidul	16	16	0
4	Sleman	133	10	105
5	Yogyakarta	84	78	6
	Total	472	287	177

Sumber: IKPLHD 2020

2.1.3.2.5.3 Kondisi Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) ditetapkan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah, baik secara nasional maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Indeks kualitas udara berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara terdiri dari 5 (lima) parameter utama, yaitu Ozon (O_3), Partikulat (PM_{10}), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO_2) dan Sulfur dioksida (SO_2). Namun untuk IKU di DIY berdasarkan pemilihan parameter yang telah ditetapkan KLHK dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO_2 dan SO_2 . Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler

pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota, dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode passive yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode passive mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Tabel 2-94 Nilai Indeks Kualitas Udara di DIY Tahun 2021

No.	Lokasi	Rerata NO ₂	Rerata SO ₂	Ieu	IKU
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	Indeks	Indeks
1.	Kulon Progo	9,11	5,15	0,24253	92,08
2.	Bantul	14,92	8,58	0,40103	83,28
3.	Gunungkidul	10,93	3,46	0,22332	93,15
4.	Sleman	11,87	9,75	0,39209	83,77
5.	Kota Yogyakarta	11,07	5,26	0,26974	90,57
IKU Rata-rata					88,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 88,57. Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2020 sebesar 89,14 maka pada tahun 2021 ini, nilai IKU mengalami penurunan. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti transportasi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara yaitu meteorologi dan bencana, seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi.

2.1.3.2.5.4 Kondisi Hutan dan Lahan

IKTL didapatkan dari perhitungan tutupan vegetasi dibandingkan dengan luas wilayah administrasi. Jenis tutupan vegetasi yang dapat dihitung adalah hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, pertanian lahan kering, kebun campuran, semak, ruang terbuka hijau perkotaan dan taman keanekaragaman hayati, dengan melalui konversi untuk jenis tutupan vegetasi selain hutan.

Rumus perhitungan IKTL adalah :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Angka 84,3 adalah nilai konstanta yang merupakan persentase luasan tutupan vegetasi ideal.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 adalah sebesar 58,34 tidak memenuhi target dalam RPJMD 60,86. Perhitungan oleh DLHK DIY seperti yang tercantum dalam Laporan IKLH Tahun 2021.

Tabel 2-95 Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (ha)
1.	Hutan Produksi	13.421	1	13.421
2.	Hutan Lindung	2.160	1	2.160
3.	Hutan Rakyat	79.249,99	1	79.249,99
4.	Cagar alam Geologi	145,179	1	145,179
5.	Cagar alam	11,820	1	11,820
6.	Taman Wisata Alam	1,080	1	1,080
7.	Taman Hutan Raya	771,320	1	771,320
8.	Taman Nasional	2.050,04	1	2.050,04
9.	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10.	Suaka Margasatwa	619,820	1	619,820
11.	Rawan Bencana Alam Geologi	3.355,859	1	3.355,859
12.	Perkebunan	21.002,973	0,4	8.401,189
13.	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	40.594,840	0,1	4.059,484
14.	Sempadan Pantai	1.311,106	0,6	786,664
15.	Sempadan sungai	5.498,068	0,6	3.298,841
16.	Ruang Terbuka	9.818,780	0,6	5.891,268

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (ha)
	Hijau (RTH)*			
	TOTAL			124.325,198

Sumber: *) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY

Sumber data: Olah data citra satelit KLHK yang dioverlaykan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2021

Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang perpertumbuhannya kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel 2-96 Luas Hutan di DIY Tahun 2018-2021

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Luas Hutan Negara	19.133,95	19.133,95	19.094,08	19.035,09
Hutan Produksi	13.519,47	13.519,47	13.439,19	13.421,00
Hutan Lindung	2.297,61	2.297,61	2.294,93	2.160,00
Hutan Konservasi	3.316,87	3.316,87	3.359,96	3.454,09
Luas Hutan Rakyat	78.400,27	78.400,27	79.262,58	79.262,58

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tantangan terbesar dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di DIY adalah banyaknya lahan marginal atau lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah berupa karst dengan lapisan tanah (solum) yang dangkal. Selain itu kondisi lapisan tanah yang dangkal dan berada pada kelerengan rawan terhadap kerusakan berupa longsor

lahan dan tergerus erosi. Untuk mencegah kerusakan lahan akibat bencana atau erosi dapat diupayakan tindakan teknis pengelolaan lahan berupa pembuatan teras atau penanaman sejajar kontur untuk menghindari hilangnya tanah karena aliran air terutama air hujan.

Tabel 2-97 Luas Kawasan Hutan Yang Direboisasi Tahun 2018 - 2021

No	Bidang Urusan	Tahun				Satuan
		2018	2019	2020	2021	
1	Reboisasi	786,40	525,00	20,00	30,00	Ha
2	Penghijauan	2.464,18	547,00	30,00	46,00	Ha
3	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	12,59	4,26	0,19	0,29	%
4	Persentase Penurunan kerusakan hutan	1,29	0,30	0,80	2,15	%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Persentase kerusakan hutan pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,28% (246,28 Ha) dari total luas kawasan hutan. Pada tahun 2020 kerusakan hutan sebesar 0,17% (33,5 Ha). Kerusakan hutan ini disebabkan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi hutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial. Upaya yang dilaksanakan meliputi kegiatan perlindungan hutan dari gangguan keamanan hutan maupun upaya minimalisasi kerusakan hutan dari bencana terutama kebakaran, kegiatan rehabilitasi dan peningkatan peran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati.

Besarnya kerusakan hutan yang diakibatkan karena adanya lahan kritis mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan yang dapat dilakukan dengan pengkayaan tanaman pada daerah hutan bertumbuhan kurang, penanaman tanaman pada tanah kosong.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

2.1.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2021, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.827.301 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.675.662 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.812.568 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP el- sebesar 99,48%.

Tabel 2-98 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2021

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH WAJIB KTP TELAH PEREKAMAN	ANGKA PEREKAMAN
2017	3.587.921	2.736.850	2.695.705	98,50 %
2018	3.631.015	2.778.157	2.728.559	98,21 %
2019	3.656.108	2.801.298	2.781.908	99,31 %
2020	3.671.189	2.817.907	2.809.057	99,69 %
2021	3.675.662	2.827.301	2.812.568	99,48 %

Keterangan

* Data tahun 2017 - 2020 merupakan data DKB Semester II Kemendagri pada tahun tersebut

* Data tahun 2021 merupakan data DKB Semester I / 2021 Kemendagri

Sumber: Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY 2022

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 94,44%, bisa diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 952.330 orang, ada sekitar 899.391 anak yang sudah memiliki akta kelahiran 5,56% dari jumlah anak tersebut belum memiliki akta kelahiran disebabkan antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel 2-99 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2017	954.963	905.692	94,84%
2018	960.762	906.734	94,38%
2019	952.767	900.449	94,51%
2020	956.606	904.743	94,58%
2021	952.330	899.391	94,44%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2022

Selanjutnya, tiap anak juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY total kepemilikan KIA sejumlah

848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut.

Tabel 2-100 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2021

TAHUN	JUMLAH KIA	WAJIB KIA	PERSENTASE KEPEMILIKAN
2017	136.885	851.071	16,08%
2018	319.279	852.858	37,44%
2019	476.662	854.810	55,76%
2020	563.773	824.684	68,36%
2021	635.866	848.361	74,95%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut.

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut.

2.1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk

mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Tabel 2-101 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021

Tahun	Status Indeks Desa Membangun (IDM)				
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021

Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY.

Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain:

2.1.3.2.7.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

Tabel 2-102 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	ASOSIASI	JUMLAH
1	Kab. Bantul	75	-	1	76
2	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
7	Total	393	45	6	444

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pemda DIY melibatkan LPM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya kegiatan revitalisasi *Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto)* dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kegiatan Revitalisasi *Segoro Amarto* dilakukan sejak tahun 2018 dengan konsep *community development* penguatan kegotongroyongan melalui usaha ekonomi berbasis komunitas. Sedangkan peran LPM dalam kegiatan fasilitasi TMMD adalah

dengan pembelanjaan bantuan hibah Pemda DIY dalam wujud bahan material untuk pembangunan fisik melalui program TMMD.

2.1.3.2.7.2 Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

Tabel 2-103 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021

Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020			2021		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	776	80,83	960	792	82,50	960	827	86,14	960	577	60,10
Bantul	1.141	913	80,01	1.141	913	80,01	1.139	912	80,07	1.139	160	14,04
Gunungkidul	1.465	1245	84,98	1.468	1.299	88,48	1.469	1.345	91,55	1.468	1.225	83,44
Sleman	1.529	1197	78,28	1.530	1.233	80,58	418	158	37,79	1.532	1.136	74,15
Kota Yogyakarta	623	379	60,83	623	366	58,74	623	393	63,08	623	448	71,91
DIY	5.718	4.510	78,87	5.722	4.603	80,44	4.609	3.635	78,86	5.722	3.546	61,97

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Jumlah Posyandu yang aktif semakin menurun dari 4.510 tahun 2018, menjadi 3.546 tahun 2021. Persentase posyandu aktif paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul dengan angka 83,44%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Sedangkan persentase posyandu aktif paling rendah adalah Kabupaten Bantul yaitu pada angka 14,04%. Kabupaten Bantul diharapkan agar meningkatkan komitmennya dalam mendorong

peran aktif Posyandu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

2.1.3.2.7.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2018-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-104 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2021

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bantul	75	50	50	68	68
2	Kab. Kulon Progo	87	87	87	87	87
3	Kab. Gunungkidul	144	92	119	133	133
4	Kab. Sleman	86	50	50	55	61
	Jumlah	392	279	306	343	349

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.3.2.7.4 Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat

kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profil desa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian Lomba kalurahansehingga semua desa termotivasi untuk menyusunprofil yang memenuhi standar.

Sampai dengan tahun 2021, berdasarkan data capaian entry di www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id, entrian Profil Kalurahan dan Kelurahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 438 Kalurahan/Kelurahan sudah mencapai 100% dan DIY merupakan provinsi dengan capaian tertinggi di Indonesia.

Tabel 2-105 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa

No	Kab/Kota	kalurahan/ kelurahan	Kalurahan Yang Telah Mempunyai Profil Kalurahan				%
			2018	2019	2020	2021	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	75	75	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	144	144	144	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	86	86	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45	100,00
Jumlah		438	85	216	299	423	100,00

Sumber: DP3AP2 DIY

2.1.3.2.7.5 Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut.

Tabel 2-106 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat

No	Prov/Kab/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kab/Kota	Swadaya Masyarakat
1	Pemda DIY	875.000.000	-	-
2	Kota Yogyakarta		383.513.950	49.054.185
3	Kab. Bantul		486.975.400	2.480.454.000
4	Kab. Gunungkidul		295.242.900	32.922.362.166
5	Kab. Kulon Progo		338.625.000	557.830.000
6	Kab. Sleman		366.548.000	68.300.000
Jumlah		875.000.000	1.870.905.250	36.078.000.351
Total		2.745.905.250		36.078.000.351
Total Pem +Masy		38.823.905.60		
		1		
% swadaya masyarakat		92.93		

Sumber: BPPM DIY,2020

Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat kalurahan sangat tinggi mencapai 92,93%.

Kondisi Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Kalurahan di DIY.

Tabel 2-107 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021

TAHUN	STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)				
	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Desa di DIY yang diukur melalui IDM pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan menuju kategori Maju dan Mandiri. Untuk kategori desa dengan status Berkembang mengalami penurunan karena statusnya meningkat menjadi Maju dan Mandiri, dan tidak ada lagi desa di DIY yang berada pada status Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat pada tahun 2021, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Meskipun capaian DIY sudah sangat baik tetapi masih perlu mendorong desa yang masih pada status IDM berkembang agar naik ke level di atasnya melalui pembinaan pemberdayaan dan pemenuhan aspek sosial, ekonomi dan ekologi secara terintegrasi.

2.1.3.2.7.6 PKK Aktif

Gerakan PKK merupakan sebuah gerakan yang memberdayakan perempuan sebagai kekuatan penggerak keluarga. Gerakan ini dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan. TP PKK pada level daerah diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. Cakupan PKK aktif di DIY pada tahun 2021 menunjukkan angka yang mengembirakan dimana

dari 438 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-108 Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PKK
1	Yogyakarta	46
2	Bantul	75
3	Kulonprogo	87
4	Gunungkidul	144
5	Sleman	86
	DIY	438

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2021*

Gerakan PKK menjangkau keluarga melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10–20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina sepuluh rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini selanjutnya disampaikan kepada kelompok PKK setingkat di atasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

2.1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan menciptakan jendela peluang (*windows of opportunity*) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa DIY pada kondisi *demographic trap* yang akan menghasilkahn persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan *unmet need*.

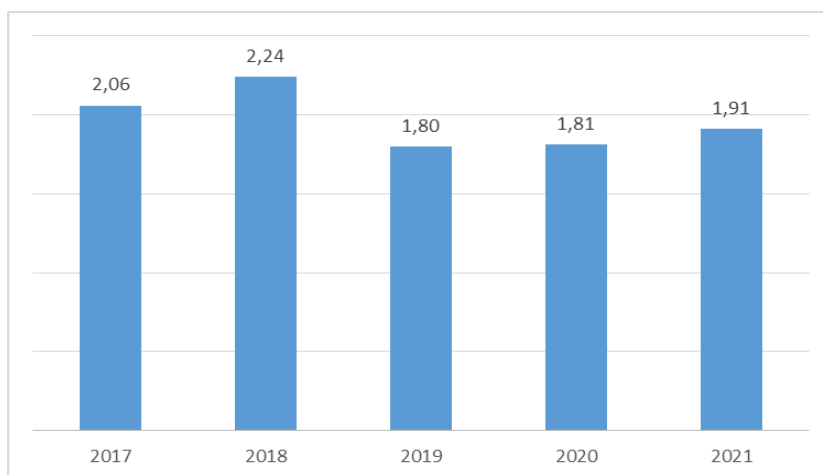
2.1.3.2.8.1 Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate*

Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi

Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *NetReproduction Rate* (NRR) sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Penduduk tumbuh seimbang bila TFR mencapai 2,0.

Data Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) tahun 2019 yang dirilis oleh BKKBN menunjukkan *Total Fertility Rate* (TFR) DIY di angka 1,80 , terendah secara nasional dan di bawah TFR ideal atau "*Replacement level fertility*" pada angka 2,1.



Sumber: BKKBN Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-52 Perkembangan TFR di DIY Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2.8.2 Perubahan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data BPS proyeksi penduduk periode 2015-2035, khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 20,50% pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY

yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2020 tercatat sekitar 69,50% akan menurun perlahan pada kisaran 66,50% di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

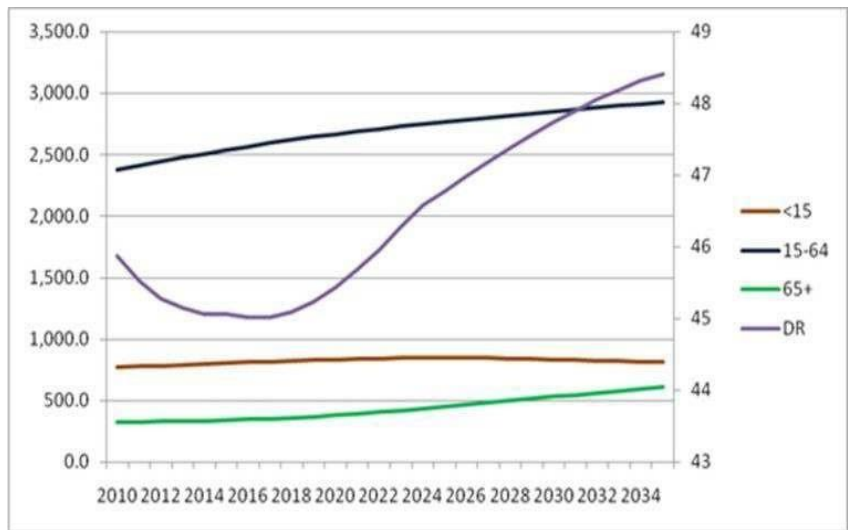
Tabel 2-109 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2045

PENDUDUK	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	1.815.800	1.935.400	2.058.900	2.184.900	2.308.400	2.428.300	2.547.700
Perempuan	1.853.400	1.983.800	2.120.400	2.260.400	2.398.400	2.533.700	2.668.900
Total	3.669.200	3.919.200	4.179.300	4.445.300	4.706.800	4.962.000	5.216.600
Komposisi Umur (%)							
0-14	21,00	20,30	20,30	20,50	20,50	20,20	19,90
15-64	69,50	69,50	68,60	67,30	66,50	66,00	65,80
65+	9,60	10,20	11,10	12,20	13,00	13,80	14,30
<i>Dependency Ratio (000)</i>	44,00	43,90	45,80	48,50	50,40	51,60	52,00
FERTILITAS							
TFR	1,82	1,84	1,85	1,85	1,86	1,86	1,87
GRR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
NRR	0,90	0,88	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92
CBR	14,20	14,40	14,20	13,70	13,30	13,40	13,60
Jumlah Kelahiran (000)	52,20	56,60	59,40	60,80	62,60	66,30	70,90

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015

Dependency Ratio (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa kenaikan angka ketergantungan yang tajam akan terjadi

kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan disebabkan peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.



Gambar 2-53 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan mulai meningkat pada tahun 2018 sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus demografi telah tercapai. Artinya, DIY akan menghadapi permasalahan yang saling komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin membesarnya jumlah lansia.

2.1.3.2.8.3 Akseptor KB

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap

tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per km² atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY menggerakkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah dengan melakukan penjarangan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan & Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Rasio akseptor KB DIY tahun 2018 hingga 2021 tercatat fluktuatif tetapi memiliki tren meningkat.

Tabel 2-110 Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Peserta KB	381.029	375.708	378.902	389.575
Jumlah Pasangan Usia Subur	535.615	500.930	429.862	510.169
Rasio	71,14	75,00	88,15	76,36

Sumber: BKKBN Provinsi DIY, 2021

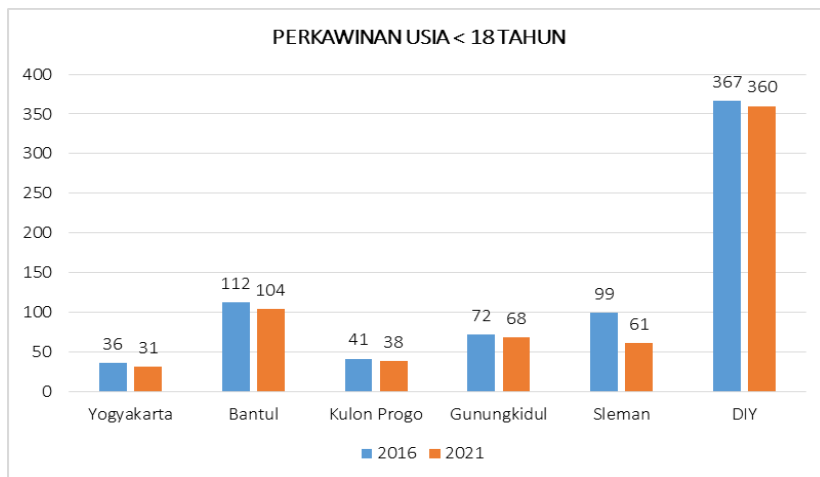
2.1.3.2.8.4 Pernikahan Dini

Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam pembentukan PIK R dan melakukan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 Kapanewon pada tahun 2017.

Tabel 2-111 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2016		2021	
		P	L	P	L
1.	Yogyakarta	31	15	17	19
2.	Bantul	8	37	31	81
3.	Kulon Progo	11	23	17	24
4.	Gunungkidul	51	72	16	56
5.	Sleman	36	83	24	75
	Jumlah	137	230	105	255

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021 diolah



Gambar 2-54 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021

Perkawinan usia anak diketahui dari adanya putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin. Dari data tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dispensasi kawin di DIY masih sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini. Dalam 3 tahun terakhir, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam di tahun 2020 dan sedikit turun di tahun 2021, terlebih dispensasi kawin untuk anak perempuan. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar

19% di tahun 2019 dan turun sebesar 25% di tahun 2021, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat mencapai 108% di tahun 2020 dan turun sekitar 18% di tahun 2021.

Tabel 2-112 **Jumlah Putusan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2021**

No.	PA	DISPENSASI KAWIN					
		2019		2020		2021	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	PA Wates	30	15	48	71	23	56
2.	PA Bantul	41	82	56	113	58	104
3.	PA Wonosari	49	59	49	188	46	172
4.	PA Sleman	134	120	169	189	114	119
5.	PA Yogyakarta	33	20	20	56	13	51
	D.I. Yogyakarta	287	296	342	617	254	502

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

2.1.3.2.8.5 Perceraian

Angka perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Baik itu perceraian dalam kategori permohonan suami ataupun gugatan istri. Peningkatan angka ini masih dengan pola yang sama dengan data dari dua tahun ke belakang di mana angka perceraian dari gugatan istri jauh lebih tinggi atau meningkat dari 3.972 kasus di tahun 2020 menjadi 4.383 di tahun 2021. Sementara kategori permohonan suami mengalami penurunan angka perceraian dari 1.576 kasus di tahun 2020 bertambah menjadi 1.559 kasus.

Tabel 2-113 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2020 dan 2021

No.	Wilayah PA	2020			2021		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Suami	Istri		Suami	Istri
1	PA Wates	584	144	440	621	164	457
2	PA Bantul	1.279	341	938	1.607	406	1.201
3	PA Wonosari	1.373	378	995	1.390	397	993
4	PA Sleman	1.667	568	1.099	1.661	426	1.235
5	PA Yogyakarta	645	145	500	663	166	197
Jumlah		5.548	1.576	3.972	5.942	1.559	4.383

Sumber: Data Gender dan Anak 2021; DP3AP2 DIY

2.1.3.2.8.6 *Unmet Need*

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KB-nya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2012. Berdasarkan hasil SDKI 2012, DIY memiliki *unmet need* di atas rata-rata nasional yaitu 11,5%. Kemudian pada tahun 2015 *unmet need* DIY tercatat 7,73%. Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi.

Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu

dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.

Lokasi	Unmeet Need				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	13,32	10,25	10,25	8,23	8,89
Bantul	8,42	9,76	10,55	9,99	9,20
Gunungkidul	8,43	8,80	9,48	8,82	8,87
Sleman	10,64	9,50	9,04	7,95	7,13
Kota Yogyakarta	13,74	15,14	14,15	12,10	12,05

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Gambar 2-55 Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020

2.1.3.2.8.7 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi, ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi. Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan akses yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan KB. Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

Tabel 2-114 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2021

No	Klinik KB	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	PKBRS	39	40	50	45
2	Pemerintah	144	146	149	147
3	Swasta	206	150	193	221
4	PPKBD	438	438	438	438
5	Sub PPKBD	5.356	5.359	5.361	5.358

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Keterangan :

PKBRS: Program KB Rumah Sakit

PPKBD: Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

Sub PPKBD: Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)

Secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.1.3.2.8.8 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

Tabel 2-115 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2021

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2018	110	545	244	899
2019	106	514	221	841
2020	80	415	236	731
2021	18	405	217	640

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya selalu menurun dari tahun ke tahun. Tenaga bidan mengalami penurunan paling tajam dari tahun 2018 sebesar 545 menjadi 405 di tahun 2021. Jumlah dokter juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 110 pada tahun 2018 menjadi 18 pada tahun 2021.

2.1.3.2.8.9 Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga pernah dilakukan oleh BKKBN mengklasifikasikan keluarga Indonesia ke dalam lima tahapan

keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Namun saat ini secara nasional, untuk Pendataan Keluarga 2021 tidak lagi mengenal pengelompokan keluarga berdasarkan tahapan seperti Pra-Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pentahapan seperti itu, BKKBN mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal ini BKKBN DIY merilis data tahapan keluarga sejahtera pada aplikasi Jogja Dataku BAPPEDA DIY sebagai berikut;

Tabel 2-116 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2020

Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Total	1.039.651,00	1.040.668,00	1.040.668,00
Keluarga Prasejahtera	121.926,00	122.042,00	122.070,00
Keluarga Sejahtera Tahap 1	619.065,00	606.271,00	606.243,00
Keluarga Sejahtera Tahap 2	298.060,00	312.355,00	312.355,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera II.

2.1.3.2.8.10 Program Bina Keluarga

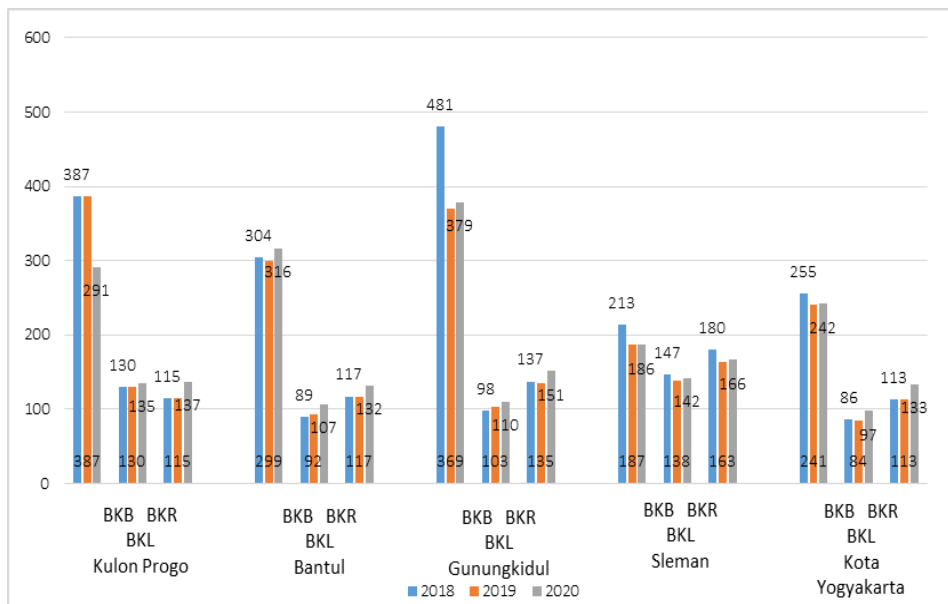
Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga, yang terdiri tiga kategori, yakni: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

Tabel 2-117 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021

Kabupaten/ Kota	BKB				BKR				BKL			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	387	387	291	291	130	130	135	135	115	115	137	137
Bantul	304	299	316	317	89	92	107	106	117	117	132	124
Gunungkidul	481	369	379	379	98	103	110	110	137	135	151	151
Sleman	213	187	186	187	147	138	142	143	180	163	166	166
Kota Yogyakarta	255	241	242	245	86	84	97	101	113	113	133	135
Jumlah	1.640	1.483	1.414	1.419	550	547	591	595	662	643	719	713

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Gambar 2-56 Lembaga Bina Keluarga di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020

Pada rentang tahun 2018 - 2020 BKB memiliki kecenderungan menurun, namun disisi lain BKR dan BKL justru berkecenderungan

meningkat. Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, peningkatan jumlah BKR ini sudah semestinya diupayakan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

2.1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di DIY, sudah sangat mencukupi.

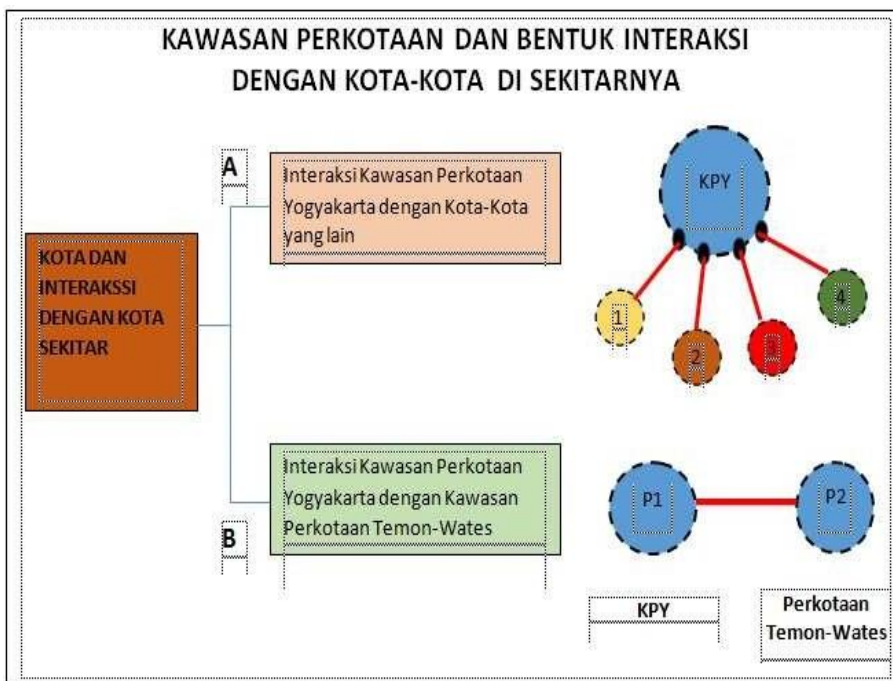
Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DIY, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya.

Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengembangan Keselamatan Transportasi, Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Keempat indikator sasaran tersebut, mencerminkan hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah

Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang terintegrasi.

Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 2-57 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-Kota Di Sekitarnya

Memperhatikan gambar di atas, dan rencana pembangunan kedepan, hubungan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan dengan pengembangan interaksi kawasan perkotaan dengan kota-kota lain (model A), yaitu: 1) Perkotaan Yogyakarta sebagai pusatnya dan perkotaan Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul sebagai kota satelitnya. Atau 2) tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang sama kuat yaitu Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Temon-Wates sebagai kawasan pendukung Bandara Baru.

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, artinya pengembangan angkutan umum massal tidak hanya fokus pada moda utamanya saja tetapi juga dengan layanan *feeder*. Pada interaksi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan kota-kota lain maupun dengan kawasan perkotaan Temon-Wates, pengembangan angkutan *feeder* salah satunya adalah dengan perkuatan perencanaan penyelenggaraan AKDP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dalam integrasi angkutan umum secara menyeluruh maka peran pemerintah Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan angkutan pedesaan harus secara simultan dilakukan agar kinerja angkutan AKDP dapat berjalan optimal.

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar di DIY pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.278.795 unit, naik 3,67% dari tahun 2020 yang berjumlah 2.198.116 unit dengan pembagian sebagai berikut: mobil penumpang (12,91%), truk (0,89%), bus (0,20%), dan sepeda motor (85,99%).

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Sarana transportasi pada jalan raya di DIY dikelompokkan menjadi Angkutan umum perkotaan, AKDP dan Pedesaan. Angkutan perkotaan terdiri dari angkutan bus dengan

sistem *Buy The Service* (Trans Jogja) dan angkutan perkotaan reguler. Pada tahun 2020 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* telah melayani 17 jalur dan 128 armada. Penambahan armada terus dilakukan untuk menuju pelayanan ideal 167 armada.

Tabel 2-118 Kendaraan Angkutan di DIY

No	Jenis Angkutan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Angkutan AKDP	475	482	80	36
2	TAKSI	1025	485	493	167
3	Angkutan Perkotaan	187	184	149	130

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2021 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah di semua jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan AKDP dan taksi hingga pada tahun 2021 tersisa hanya 10% saja dari jumlahnya di tahun 2018.

Tabel 2-119 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017-2021

Sub Elemen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penumpang/hari	7.321,00	8.056,00	7.150,00	7.607	4.132
Penumpang/tahun	5.317.484,00	5.880.610,00	5.282.737,00	2.776.667	1.508.450

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2021

Dari tabel diatas jumlah penumpang Trans Jogja terangkut sejak tahun 2017 terus menurun, dari 5.317.484 penumpang menjadi 1.508.450 penumpang. Angkutan reguler di DIY terus mengalami penurunan jumlah penumpang dikarenakan kondisi armada yang sudah tidak ideal, baik dari segi sarana angkutan maupun mutu layanan sedangkan untuk angkutan pedesaan sampai dengan saat ini belum ada layanan yang menjangkau. Selain itu, penurunan tersebut disebabkan antara lain tingginya angka kepemilikan

kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Akibatnya, masyarakat leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktivitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas telah dilakukan untuk mempermudah pergerakan angkutan umum dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan dan penanganan pada kawasan-kawasan prioritas. Sejak tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (*area traffic control systems*). Dalam konsep ATCS beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan tahun 2021 telah terpasang 64 unit ATCS dan 17 unit VMS. VMS merupakan perangkat kontrol lalu lintas yang dapat menampilkan satu atau lebih pesan kepada pengguna jalan. Fungsi VMS secara umum adalah untuk menyampaikan informasi peringatan, larangan, perintah dan petunjuk. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini didukung dengan sinyal bus priority sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal *bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Keberadaan layanan Trans Jogja dengan konsep *buy the service* tidak serta merta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang

baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Pelayanan sistem transportasi multimoda telah dilakukan melalui pembangunan *park and ride* di wilayah DIY sebagai prasaranan perpindahan moda bagi pengguna Trans Jogja yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pembangunan *park and ride* di Gamping, Dongkelan, dan Prambanan. Sedangkan untuk kebutuhan lahan parkir khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu

1. tempat khusus parkir Abu Bakar Ali;
2. tempat khusus parkir Ngabean;
3. tempat khusus parkir Senopati; dan
4. tempat khusus parkir XT Square.

Terkait dengan transportasi berbasis jalan rel di DIY, saat ini DIY memiliki 5 stasiun dan 1 bengkel kereta api yaitu: Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di Bandara Adisutjipto, Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Jalur eksisting kereta api di DIY meliputi koridor Timur – Barat sebagai bagian dari jalur perkeretaapian Selatan Jawa. Perencanaan dan pengembangan perkeretaapian di DIY meliputi pengembangan di jalur Timur – Barat dan Utara – Selatan, meliputi penetapan trase, kebutuhan lahan, dan penetapan lokasi stasiun dengan pengembangan jaringan kereta api penumpang di DIY pada jalur:

1. Bandara Kulon Progo – Kedundang – Yogyakarta – Prambanan
2. Bandara Kulon Progo – Parangtritis
3. Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas

Dalam rangka penurunan rasio kecelakaan di wilayah DIY, telah dilakukan Studi tentang Daerah Rawan Kecelakaan yang ditindaklanjuti dengan penanganan pada daerah yang berpotensi menimbulkan kecelakaan melalui penerapan manajemen rekayasa dan pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas pada kawasan tersebut. Berdasarkan dari analisis hasil identifikasi data IRSMS maka penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dengan kriteria Blackspot banyaknya kejadian kecelakaan per km untuk nilai tertinggi di tiap kabupaten yaitu :

Tabel 2-120 Peringkat Daerah Rawan Kecelakaan dengan kriteria Blackspot

No Ruas	Ruas Jalan	Kabupaten	Panjang Ruas (KM)	Σ Kejadian Laka	Σ Kejadian Laka/KM	Ranking
001	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)	Bantul	8,35	100	11,98	1
005	Bantul - Srandakan	Bantul	8,95	93	10,39	2
008	Bakulan - Barongan	Bantul	3,18	27	8,50	3
021	Gedongkuning-Wonocatur	Bantul	1,2	6	6,67	4
027	Kebonagung I-Nanggulan	Kulonprogo	0,8	5	6,25	5

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

Dalam rangka mendukung integrasi pelayanan angkutan umum di DIY, sampai tahun 2021 telah terbangun 4 unit *transfer point/park and ride* sebagai simpul integrasi antar moda angkutan umum perkotaan dan AKDP yaitu 4 unit di Gamping, Dongkelan, Ngabean dan Prambanan melalui APBD DIY serta 2 unit di Pasar Godean dan Terminal Pakem melalui APBN.

2.1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal <http://jogjaprovo.go.id>. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY

menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarkan secara digital melalui berbagai *platform*, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat dan lebih efektif.

Untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mendorong percepatan implementasi tanda tangan elektronik dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2021 sudah ada 130 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY

yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Dinas Kominfo DIY juga membangun aplikasi Sadewa sebagai sarana penandatanganan dokumen elektronik secara berjenjang di lingkungan Pemda DIY. Disamping itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan paperless office untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Pada tahun 2021, untuk mendukung penerapan Perpres 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan pemerintah untuk banyak menggunakan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Keamanan Informasi dan Persandian membangun *Security Operation Center (SOC)*. SOC merupakan pusat operasi yang terdiri dari perangkat audio visual pemantauan, sensor pemantauan, perangkat komunikasi dan perangkat pendukung. SOC. Dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi di Pemda DIY, khususnya terkait dengan pembangunan SOC maka pada tahun 2021 dibentuk tim JOGJAPROVCSIRT periode tahun 2021. Tim JOGJAPROVCSIRT yang salah satu tugas utamanya adalah penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi di Pemda DIY.

Selain itu, pada tahun 2021 melakukan *Penetration Testing (pentest)* untuk menguji keamanan informasi pada 10 aplikasi yang digunakan oleh Pemda DIY. Pencapaian kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100%. Selanjutnya, sesuai dengan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang Keamanan Informasi dan Persandian juga mengelola jaringan telekomunikasi internal Pemda DIY dengan jumlah titik yang terkoneksi 600 titik, kemudian juga dilakukan *upgrade* dan relokasi perangkat PABX untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Dari kedua target tersebut, dapat terselenggara 100% sesuai indikator yang ditentukan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemda DIY telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana interaksi pemerintah kepada masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki Instagram, Facebook dan Twitter. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY, Pemda DIY telah membangun aplikasi 'Jogja Istimewa' yang bisa diakses melalui telepon pintar (*smart phone*) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (*E-ticket*) pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna, demikian juga dengan perkembangan pandemi Covid-19 telah dibangun berbagai sistem informasi diantaranya corona.jogjaprov.go.id dan ayovaksin.jogjaprov.go.id. Untuk memudahkan layanan internet bagi warga masyarakat juga telah dibangun beberapa titik *free WiFi*. Demikian juga untuk dapat mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai obyek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi 'Jogja Istimewa'.

Jumlah kasus/insiden peretasan sistem informasi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) pada tahun 2019 sebanyak 12 insiden. Jumlah kasus peretasan sempat turun menjadi 10 insiden pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021 tercatat meningkat 3 insiden menjadi 13 insiden. Jumlah kasus/insiden peretasan pada sistem informasi milik Pemda DIY ini masih tergolong tinggi, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.

Tabel 2-121 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Peretasan
2017	10 insiden
2018	13 insiden
2019	12 insiden
2020	10 insiden
2021	13 insiden

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengampu jaringan intranet Pemda DIY, saat ini mengampu 260 titik jaringan intranet Pemda DIY yang tersebar di seluruh DIY, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 172 titik menggunakan jalur Fiber Optik
- b. 87 titik menggunakan jalur Wireless, 12 BTS
- c. 1 titik menggunakan VPN

Pembangunan jaringan fiber optic Pemda DIY dimulai pada tahun 2013 mengacu pada *blueprint* pengembangan *backbone* fiber optik yang dibuat dalam 3 tahap yaitu dimulai dari koridor timur, koridor tengah-utara-barat dan koridor selatan berupa kabel tanam dan kabel udara. Selanjutnya pembangunan *fiber optic* diprioritaskan untuk SMUN/SMKN dan optimalisasi jaringan instansi Pemda DIY dari jaringan *wireless* menjadi *fiber optic*.

Tabel 2-122 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018		11.575	11.575
2019		4.450	4.450
2020		379.875	379.875
2021		5.350	5.350
2022*		50.000	50.000
Total	37.243	478.113	515.356

**) Angka Sementara*

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 118 Sekolah Lanjut Tingkat Atas bergabung ke dalam jaringan intranet Pemda DIY dan pada tahun

2020 semua SMUN/SMKN di DIY sudah terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY baik menggunakan jalur kabel fiber optik maupun wireless. Selanjutnya untuk memperkuat dan memperbaiki kapasitas jaringan internet pada SMUN/SMKN, maka jaringan wireless harus ditingkatkan menjadi jaringan fiber optik, karena kebutuhan bandwidth internet untuk kegiatan belajar di sekolah SMUN/SMKN rata-rata membutuhkan 200 Mbps dan itu hanya bisa difasilitasi dengan jaringan fiber optik.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan layanan publik melalui diseminasi informasi. Pemberdayaan dan penguatan peran sumber daya informasi dan komunikasi diarahkan kepada komunitas masyarakat yang berbasis budaya, sedangkan dari sisi pengelolaan informasi di pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) diantaranya pembinaan terhadap PPID pembantu, pengembangan aplikasi pelayanan informasi dan penyusunan SOP integrasi kehumasan SKPDse pemda DIY.

Pada era digital sekarang ini, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik level Provinsi diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat. Pada Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, DIY menduduki peringkat ke-10 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan kategori penilaian informatif.

Tabel 2-123 Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2021

Ranking	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Jawa Tengah	98,17	Informatif
2	Aceh	96,93	Informatif
3	Nusa Tenggara Barat	96,77	Informatif
4	DKI Jakarta	96,41	Informatif
5	Riau	95,81	Informatif
6	Kepulauan Bangka Belitung	95,56	Informatif

Ranking	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
7	Kalimantan Timur	93,79	Informatif
8	Bali	93.62	Informatif
9	Banten	91,70	Informatif
10	Daerah Istimewa Yogyakarta	91,23	Informatif

Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2021

Keterbukaan informasi menjadi kontrol terhadap fungsi badan publik bagi masyarakat terutama sebagai pengguna layanan. Informasi yang terbuka menjadi cerminan sejauh mana akuntabilitas badan publik bekerja. Peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing badan publik beserta aparatur yang ada di dalamnya akan menentukan arus informasi bekerja sebagaimana mestinya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Daerah DIY mengadopsi konsep *smart city/region* dan menyesuainya menjadi *smart province*. Orientasi kepada warga dan masyarakat, pendekatan komprehensif, dan cara inovatif berbasis TIK menjadi landasan untuk mengembangkan solusi-solusi bagi berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh DIY. Dalam pandangan ini, konsep *smart province* diposisikan sebagai akselerator bagi arah, strategi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2017-2022. Sebagai akselerator artinya konsep *smart province* yang diterapkan harus mengacu pada spesifikasi RPJMD DIY 2017-2022, serta mencari peluang-peluang untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD secara lebih cerdas (*smart*). Implementasi *Jogja Smart Province* dalam periode RPJMD 2017-2022 mendapat penguatan legitimasi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tantangan pelaksanaannya di DIY adalah dalam upaya meningkatkan maturitas (tingkat kematangan/kemantapan) kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dari *Jogja Smart Province* sebagai wujud dari SPBE di DIY.

Meskipun konsep *smart city/province* sudah ada *best practices* yang dapat diadopsi dalam penerapannya, namun Pemda DIY

mengadopsi konsep *smart province* secara kritis dan menyesuaikannya dengan kondisi khas DIY. Hal ini penting dilakukan karena: 1) secara formal, DIY diakui sebagai daerah istimewa menurut Undang-Undang nomor 13/2012 yang membedakannya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dan 2) secara faktual, implementasi konsep *smart province* harus benar-benar terinternalisasi dalam keseharian semua pihak yang terlibat. Internalisasi hanya akan efektif jika konsep *smart province* memiliki ciri yang sama dengan identitas yang dimiliki oleh segenap komponen pemangku kepentingan di DIY.

2.1.3.2.10.1 Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-124 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Kades Catur Tunggal, Depok, Sleman	001/I/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Sela
2.	Camat Ngemplak, Sleman	002/V/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
3.	Kades Tirtoadi, Mlati, Sleman	003/VIII/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantah Kota Yogyakarta	004/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantah Kab. Bantul	005/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	PPID Utama Pemda DIY	006/IX/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Putusan Ajudikasi
7.	Kepala Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	007/X/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
8.	PPID Utama	008/X/KID DIY-	Anggaran	Damai

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
	Kab. Sleman	PS/2018		
9.	Kades Sidomoyo, Godean	009/X/KIDDIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
10.	Kepala Desa Catur Tunggal, Kabupaten Sleman	010/XI/KIDDIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-125 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	001/II/KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Desa Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	002/IV/KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
3.	Kepala Desa Condongcatur, Kec.Depok, Kab.Sleman, DIY	003/V/KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantor Pertanahan Bantul, DIY	004/V / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	005/VII / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-126 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wonokromo Kec.Pleret, Kab.Bantul, DIY	001/II/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	002/I/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Kesepakatan mediasi damai dan putusan

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
				ajudikasi
3.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	003/II/KID DIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/III/KIDDIY- PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
5.	Kades Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	005/IV/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	Kades Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	006/VII/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
7.	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta	007/VIII/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	008/X/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	009/XI/KIDDIY- PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	010/XI/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan ajudikasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-127 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Lurah Lumbungrejo,	001/I/KID DIY- PS/2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

	Kec. Ngaglik, Kab. Sleman			
2.	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab.Sleman	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

2.1.3.2.10.2 Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website pemerintah daerah dimana masing- masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah menggunakan domain resmi jogjaprov.go.id dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441 domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan domain resmi jogjaprov.go.id.

2.1.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

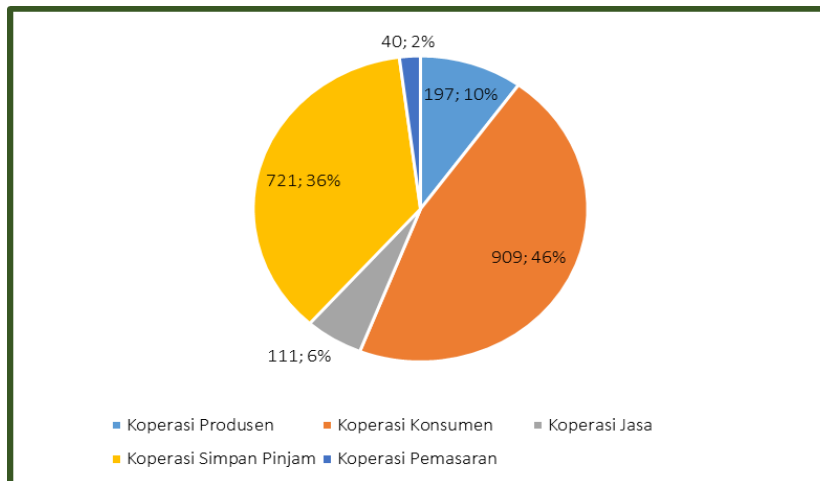
Selama tahun 2018-2021, jumlah koperasi di DIY mengalami pertumbuhan yang negatif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 berkurang sejumlah 41 unit (2,3%) dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah koperasi aktif sebesar 1.758 unit. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 86,36% dari total koperasi di DIY. Jumlah koperasi pasif di DIY juga mengalami peningkatan dari semula 180 unit pada tahun 2020 menjadi 271 unit pada tahun 2021, naik sebesar 5,17%. Perkembangan koperasi berdasarkan volume usaha dalam kurun waktu 2018 – 2020 tercatat mengalami penurunan, dan baru mulai mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 yaitu sebesar 129.488.000 dari 4.142.871 juta menjadi 4.272.359 juta atau kenaikan sebesar 3,12%.

Tabel 2-128 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	1.989	1.918	1.938	1.988
1.1	Koperasi Aktif	1.926	1.722	1.758	1.717
1.2	Koperasi Pasif	63	196	180	271
2	Modal sendiri	1.425.918	1.625.568	1.595.511	1.630.287
3	Modal Luar	2.262.263	2.512.343	2.188.554	2.372.549
4	Volume Usaha Koperasi	4.394.362	4.325.218	4.142.871	4.272.359
5	Aset Koperasi	5.302.476	4.562.978	4.422.833	4.003.885

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dilihat dari klasifikasi koperasi berdasarkan jenis usaha, maka koperasi konsumen yang anggotanya berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya merupakan jenis koperasi yang dominan di DIY (46%). Di sisi lain, koperasi produsen yang merupakan koperasi penghasil barang/jasa justru hanya berkontribusi sejumlah 10% terhadap total jumlah koperasi DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021 (diolah)

Gambar 2-58 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2021

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2.549 unit usaha (0,98%) dari semula

259.581 unit usaha pada tahun 2018 menjadi 262.130 unit usaha pada tahun 2019. Dilihat dari aspek jenis usaha, mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan dengan jumlah 73.970 unit usaha atau sebesar 28,50% dari total UKM di DIY, diikuti oleh sektor Industri Pertanian (25,81%), sektor Industri non Pertanian (23,83%). Persentase Jumlah UKM terkecil dimiliki oleh sektor aneka usaha sebesar 21,86%.

Tabel 2-129 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2018-2019 berdasar Jenis Usaha

No	Jumlah UKM berdasarkan Jenis Usaha	Tahun			
		2018		2019	
1	Aneka Usaha	56.753	21,86%	57.312	21,86%
2	Perdagangan	73.970	28,50%	74.695	28,50%
3	Industri Pertanian	67.007	25,81%	67.665	25,81%
4	Industri Non Pertanian	61.851	23,83%	62.458	23,83%
	Jumlah Total	259.581		262.130	

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Mulai tahun 2020, klasifikasi UKM di DIY yang semula 4 sektor menjadi 15 sektor.

Tabel 2-130 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2020-2021 berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	2020	2021	Satuan
1.	Sektor Pertanian	31.352	1.590	Unit
2.	Sektor Perdagangan	48.157	49.943	Unit
3.	Sektor Kelautan dan Perikanan	1.076	443	Unit
4.	Sektor Kehutanan	25	14	Unit
5.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	79	97	Unit
6.	Sektor Transportasi	6.927	6670	Unit
7.	Sektor Komunikasi	85	116	Unit
8.	Sektor Pariwisata	520	146	Unit
9.	Sektor Jasa Kesehatan	141	205	Unit

No.	Jenis Usaha	2020	2021	Satuan
10.	Sektor Konstruksi	694	699	Unit
11.	Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	529	872	Unit
12.	Sektor Jasa Pendidikan	191	212	Unit
13.	Sektor Industri Pengolahan	177.720	246.165	Unit
14.	Ekonomi Kreatif	17.606	9,691	Unit
15.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.580	11.089	Unit

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Apabila diukur dari aspek skala usaha, pada tahun 2021 kelompok usaha mikro mendominasi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan jumlah 311.540 unit usaha (94,49%) dari total jumlah UKM di DIY. Diikuti oleh kelompok usaha kecil 16.069 unit (4,8%), dan kelompok usaha menengah 2.110 unit (0,64%). Hal tersebut menunjukkan peran strategis usaha mikro dan kecil dalam struktur perekonomian DIY merupakan usaha mikro dan kecil. Keberadaan UMKM dirasa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Selain itu, UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Meskipun memiliki jumlah unit usaha yang cukup besar, jika dilihat dari nilai omsetnya, total omset Usaha Kecil masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Hal ini perlu menjadi perhatian, bahwa selain menumbuhkan kuantitas usaha kecil, perlu adanya upaya peningkatan kelas dari UKM.

Tabel 2-131 Jumlah UKM di DIY berdasarkan Skala Usaha Tahun 2017 - 2021

Skala Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Usaha Mikro	135.799	141.991	143.385	188.033	311.540
Usaha Kecil	62.042	64.896	65.533	58.980	16.069
Usaha Menengah	37.472	39.196	39.581	30.664	2.110
Usaha Besar	12.904	13.498	13.631	10.005	n/a

Skala Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Total	248.217	259.581	262.130	287.682	329.719

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2021*

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Penumbuhan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah perlu didorong dan diarahkan agar segera membentuk atau tergabung dalam sebuah wadah koperasi karena kedepannya peran koperasi akan dioptimalkan sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan hasil produksi sektor UKM termasuk.

Koperasi dan UKM diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY, mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan UKM. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.

Untuk meningkatkan skala usaha koperasi dan UKM, berbagai skema pembiayaan telah digulirkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Dana bergulir yang dikelola oleh sektor koperasi mencapai Rp8.400.000.000. Sementara itu, dana bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mencapai sejumlah Rp50.000.000.000 dengan jumlah penerima sebanyak 48 koperasi. Untuk UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima oleh UMKM binaan sektor Koperasi dan UMKM mencapai Rp10.211.400.000 dengan jumlah penerima 1.020 unit usaha. Meskipun penyaluran kredit sudah intensif dilakukan, namun realisasi tersebut masih dinilai rendah. Penyebab utama kesulitan pelaku usaha terutama UMKM dalam

mengakses pembiayaan adalah pengelolaan usaha yang belum memenuhi kelayakan perbankan (*bankable*).

2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

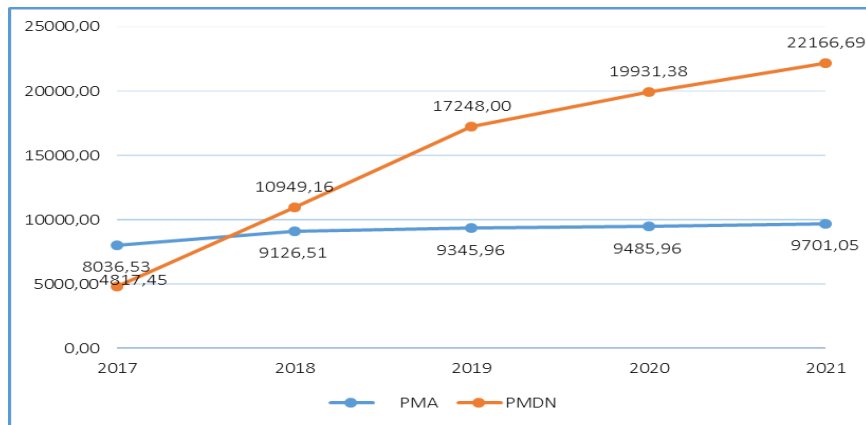
Kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2018 – 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2021 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 8,33%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2021 adalah Rp31.867.736.163.970,90 yang terdiri dari PMDN Rp22.166.688.993.467,00 dan PMA Rp9.701.047.170.503,90.

Tabel 2-132 Perkembangan Investasi di DIY

Tahun	Investasi PMDN (juta)	Investasi PMA (juta)	Total Investasi (juta)	Growth	growth%
2018	10.949.163,46	9.126.508,08	20.075.671,54	7.221.483,08	56,18%
2019	17.248.001,99	9.345.955,08	26.593.957,07	6.518.285,52	32,47%
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.166.688,99	9.701.047,17	31.867.736,16	2.450.396,50	8,33%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-59 Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2021 (Miliar)

Secara keseluruhan investasi di DIY pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta (42%) dan Kabupaten Sleman (41%). Konsentrasi investasi di kedua wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yang berada di atas rata-rata provinsi. Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan

demikian, permasalahan penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.

2.1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat

profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah klub olahraga pada tahun 2021 terdapat 1.207 buah.

Tabel 2-133 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY

Uraian	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Pemuda dan Olah raga					
Jumlah Klub Olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	Klub
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	Unit
Jumlah kegiatan olahraga	13	12	2	4	Kali
Jumlah organisasi pemuda	74	74	74	56	Unit
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	11	4	6	Kali
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	Unit

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.3.2.14 Urusan Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Hal itu memberikan andil penting dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran untuk

memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersamadengan BPS.

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program dan kegiatan urusan Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan

Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip satu data yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Tujuannya adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian

pembangunan daerah baik oleh Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tugas dan Fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah DIY telah memiliki tool dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

2.1.3.2.15 Urusan Persandian

Melalui Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina), saat ini sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se-DIY serta UTP Jaringan persandian Muspida yang meliputi :

1. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia
2. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY;
3. Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU;
4. Jajaran POLDA;
5. Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

2.1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan atas keberagaman warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi sebagai bentuk identitas bangsa di tengah peradaban dunia. Dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa diperlukan upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang merdeka. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah

terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY.

Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (*associate cultural landscape*) merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina; serta kebudayaan Nusantara. Sumber utama yang memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari awal sejarah hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten.

Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten sarat dengan karsa dan karya berupa kebudayaan benda maupun kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta sehingga perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Kebudayaan sebagai *mainstream* di segala bidang telah menjadi spirit pembangunan di DIY terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Sejumlah kemajuan kebudayaan baik yang sifatnya kebendaan maupun bukan kebendaan di berbagai sektor telah dihasilkan. Kemajuan kebudayaan terus berpacu dengan dinamika perkotaan dan masyarakatnya yang terus diuji ketahanan budayanya oleh arus perubahan.

1. Budaya Benda

Para ahli sejarah membagi fase-fase perjalanan peradaban di DIY dalam periode prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Kasultanan Yogyakarta, Kolonial, dan Pasca Kemerdekaan (Kontemporer). Setiap fase peradaban meninggalkan simbol-simbol eksistensi sebagai warisan budaya benda (tangible cultural heritage). Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Upaya awal perlindungan cagar budaya dilakukan dengan dikeluarkannya SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 188/38.A/2014 tentang cagar budaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua objek benda yang bernilai sejarah dan kebudayaan atau sering di sebut sebagai warisan budaya dapat terpelihara dengan baik. Penemuan kembali cagar budaya masih dimungkinkan, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar. Kapitalisme, laju demografi, dan kekuatan alam yang sangat ekstrem akan dapat menggerus aset-aset budaya bendawi dan kekuatan ketahanan budaya masyarakat DIY. Jumlah aset budaya benda di DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-134 Budaya Benda di DIY Tahun 2017-2020

Aset Budaya	2017	2018	2019	2020	2021
Struktur	34	34	34	34	34
Situs	343	343	343	343	343
Benda Cagar Budaya	808	834	1685	1687	1687
Bangunan Cagar Budaya	1041	1077	1599	1599	1599
Kawasan cagar budaya	17	20	17	17	17
Jumlah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.168	1.197	2.045	2.045	2.045

Sumber :Dataku 2022

Selain perlindungan fisik, telah dilakukan perlindungan hukum melalui Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Perlindungan hukum diperlukan agar terjadi kepastian dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Tabel 2-135 Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/ Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/ Kota	SK Penetapan
			tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	
8	Kawasan Pleret	Bantul	
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.278/M/2014 Tentang Satuan Ruang Geografis Prambanan.
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	Kep. Mendikbud 157/M/1998
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	
15	Kawasan Ambarbinangun	Yogyakarta	
16	Kawasan Ambarketawang	Sleman	

sumber: www.jogjabudaya.com; Dinas Kebudayaan DIY

2. Budaya Tak Benda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2009 telah melakukan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Tak benda Indonesia. Karya budaya yang ditetapkan meliputi: a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa; b) seni pertunjukan; c) adat istiadat; d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; e) ritus dan perayaan; serta f) kemahiran kerajinan tradisional.

Tujuan dari penetapan tersebut adalah: a) untuk menjamin dan melindungi warisan budaya tak benda Indonesia yang merupakan milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan; b)

meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat karakter, identitas, dan kepribadian bangsa; c) meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap keunikan dan kekayaan ragam budaya Indonesia; d) meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya warisan budaya tak benda; e) saling menghargai terhadap warisan budaya bangsa; dan f) mempromosikan warisan budaya tak benda bangsa Indonesia kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1 Adat Istiadat, Tradisi dan Sistem Nilai Budaya Lainnya

Peradaban baru yang hendak diwujudkan bagi masyarakat DIY yang memiliki keunggulan dalam nilai mental dan tata laku adalah peradaban yang dijiwai dan digerakkan oleh visi akbar yang dilandasi filosofi universal "*Hamêmayu-Hayuning Bawânâ*", yang di dalamnya terkandung kewajiban Tri Satyâ Brâtâ. Pertama, *rahayuning buwânâ kapurbâ waskitaning manungsâ* (kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa), harmoni hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia (*world*) sebagai kewajiban "*Hamangku Buwânâ*", maupun seluruh alam semesta (*universe*) sebagai kewajiban "*Hamêngku Bawânâ*".

Kedua, *darmaning manungsâ mahanani rahayuning nêgârâ* (tugas hidup manusia adalah menjaga keselamatan negara), sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, dimana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu "*Hamêngku Nagârâ*". Ketiga, *rahayuning manungsâ dumadi karânâ kamanungsané* (keselamatan manusia oleh kemanusiaannya sendiri).

Dapat dimengerti jika filosofi tersebut menyandang misi akbar bagi manusia dalam tiga substansi, yaitu: "*Hamêngku Nagârâ, Hamangku Buwânâ, Hamêngku Bawânâ*". Kewajiban "*Hamêngku Nagârâ*" karena Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bergolong-golong dan bersuku-suku, sehingga diperlukan

eksistensi negara dan pemerintahan yang mengaturnya agar tidak terjadi seling-surup dan saling-silang antarmanusia.

Basis keunggulan sebuah bangsa, atau komunitas ialah manusia yang unggul spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya. Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan kitab *Sutasoma*, kitab *Nêgarakêrtagama*, *Sêrat Cênthini*, candi Borobudur, dan candi Prambanan. Manusia-manusia unggul itulah kini yang menghasilkan invensi di bidang sains dan teknologi, inovasi di bidang industri, *masterpiece* di bidang seni, serta tata kelola yang baik di bidang pemerintahan.

Nilai-nilai tersebut telah diwujudkan dalam adat istiadat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya serta telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan beragam wujud adat istiadat dan tradisinya. Tercatat terdapat 717 upacara adat, 35 upacara tradisi, 69 cerita rakyat dan 69 permainan tradisional yang masih ada walaupun dilaksanakan tidak secara merata. Daerah-daerah tertentu mengupayakan dapat mengaplikasikan beberapa jenis adat dan tradisi. Upacara adat yang sangat menarik masyarakat antara lain tradisi *nguras enceh* atau mengganti air gentong di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, saparan bekakak, upacara Grebeg, tradisi cupu panjala, dan jamasan kereta pusaka.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival, baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan. Setiap perwakilan dari lima kabupaten/kota di DIY menampilkan upacara adat yang menjadi tradisi di masing-masing wilayah. Jumlah perkembangan sistem nilai budaya di DIY tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-136 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Upacara Adat	478	482	717	717	717
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35
Jenis Permainan Tradisional	58	58	69	69	69
Cerita rakyat	37	80	63	63	63

sumber: *Dataku 2022*

2.2 Kesenian

Kegiatan berkesenian di DIY telah dieksplorasi dengan berbagai cara dan media, diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ragam, baik berupa seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, seni perfilman, maupun campuran berbagai bentuk dan ragam. Semua kegiatan berkesenian berakar pada rasa dan diwujudkan untuk melayani rasa, yakni rasa keindahan. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Beberapa tahun terakhir semarak event seni sangat menonjol di DIY. Perhelatan seni dapat disaksikan di lingkungan kraton, kampus, kampung maupun keprajan dalam bentuk lomba, festival, karnaval dan pameran sebagai wadah kreativitas dan inovasi seni masyarakat. Bentuk-bentuk seni yang biasanya berkembang di kraton dan hanya dipertunjukkan bagi kalangan tertentu, kini sudah dapat disaksikan oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajagan terhadap ruang budaya tradisional berupa Festival Kebudayaan Yogyakarta dilakukan untuk memberi ruang bagi seni tradisional. Festival ini diproyeksikan agar menjadi *event* yang lebih spektakuler.

Kerjasama dengan kelompok orkestra dari luar negeri mampu menghasilkan konser musik kolaborasi. Musik jazz yang dianggap hanya konsumsi orang kelas menengah atas sudah merambah ke pedesaan melalui *event* Ngayogjazz. Seni rupa pun mengalami

perkembangan pesat. Para seniman seni rupa telah menunjukkan kiprahnya dalam dunia internasional dengan berusaha menerobos *event-event* seni rupa di luar negeri.

Karya seni yang telah menjadi warisan budaya dunia adalah batik, keris, wayang, dan gamelan. Selain sebagai karya seni, warisan karya tersebut juga merupakan pusaka Indonesia yang diakui dunia internasional. Wayang kulit sebagai seni pertunjukan tradisional yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa telah diakui UNESCO pada tahun 2008. Keris diakui dunia pada tahun 2005, Batik tercatat dalam daftar UNESCO pada tahun 2009, sedangkan Gamelan diakui dunia internasional sebagai karya budaya Indonesia pada tahun 2014, bersamaan dengan penetapan Sekaten.

Seni yang saat ini berkembang pesat di DIY adalah dunia film. Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik skala nasional maupun internasional, antara lain film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak dirindukan, Java Heat, dan The Philosophers yang mengambil lokasi di kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi karya budaya film unggul antara lain: Amarta (Gadis dan Air), Bawang Kembar, Ilalang ingin Hilang Waktu Siang, Jaranan, Kirana, Kitorang Basudara, Natalan, Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, Pulang Tanpa Alamat, Sasi Takon. Pada tahun 2016 Film yang diproduksi Dinas Kebudayaan terdiri dari Film Dokumenter (Jamu (Saking Wingking Mengajeng), Jogja Kembali, Sosrokusuman), dan Film Fiksi (*Happy Family*, Kleang Kabur Kanginan, Ruah).

Kelompok pembuat film di DIY memiliki latar belakang yang beragam dari segi umur, organisasi, bentuk organisasi, maupun ukuran organisasi. Dari segi umur, hampir semua kelompok pembuat film didirikan pasca reformasi. Komunitas film sangat mempengaruhi perkembangan perfilman di DIY. Beberapa komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan kine klub berbasis kampus adalah UGM, ISI Yogyakarta, APMD, UAJY, UIN, dan UMY. Komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis

kampus antara lain: De Javu, Kinoki, Montase, Rumah Sinema, dan Forum Film Dokumenter. Komunitas film yang sudah berorientasi pada produksi antara lain Limaenam Films, Studio Kasat Mata, dan Fourcolours Films.

DIY diuntungkan dengan keberadaan 111 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 200 ribu orang. Keberadaan perguruan tinggi seperti universitas, akademi dan berbagai sekolah vokasi tersebut memungkinkan perjumpaan orang-orang yang berminat pada produksi film dan mendukung kemunculan kelompok-kelompok film yang berorientasi pada seni. Selain untuk mencari pendapatan, film bagi kelompok pembuat film di DIY merupakan ungkapan seni budaya. Hasil produksi film di DIY tidak melayani pasar bioskop sebagaimana industri perfilman nasional yang banyak berbasis di Jakarta. Film produksi DIY lebih banyak melayani berbagai kebutuhan dari rumah produksi luar negeri, perusahaan iklan, instansi pemerintah, festival film, hingga lembaga swadaya masyarakat internasional.

Pemda DIY mestinya mengintervensi melalui aspek distribusi dan eksibisi yang masih jarang mendapat perhatian banyak pihak. Produktivitas kelompok pembuat film di DIY harus dipertemukan dengan pasar sebagai cara mempertemukan film dan penontonnya. Kelompok pembuat film di DIY membutuhkan perluasan pasar dari aspek distribusi maupun eksibisi yang perlu disediakan bersama oleh para pihak baik swasta maupun Pemda. Penyebarluasan dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. Event-event internasional yang selalu diikuti oleh DIY antara lain melalui Bienalle, Sister Province, Europhalia, dan MSO.

Maraknya film pendek akhir-akhir ini yang booming di masyarakat di manfaatkan dengan baik oleh para sineas di Yogyakarta. Terbukti banyak hasil karya sineas Yogyakarta maupun PH di Yogyakarta banyak meraih simpati maupun penghargaan baik nasional bahkan internasional. Data-data terkait Organisasi Seni

dan Budaya di DIY serta Pelaku Seni Budaya di DIY tersaji di tabel di bawah ini :

Tabel 2-137 Organisasi Seni dan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Aset Budaya	2017	2018	2019	2020	2021
Organisasi seni rupa	17	15	25	29	29
Organisasi seni pertunjukan	5.808	6.420	8.757	8.757	8.757
Organisasi perfilman	42	42	44	44	44
Lembaga budaya	181	78	186	186	186
Lembaga pendidikan budaya	49	49	66	66	66
Desa/kelurahan budaya	56	56	56	56	56
Tokoh Seniman Budayawan	507	504	968	968	968
Penghargaan seniman Budayawan	264	271	284	301	301

Sumber: Dataku, 2022

3. Nilai Kesejarahan

Sejarah sebagai sebuah catatan peradaban suatu bangsa berkontribusi dalam membentuk identitas suatu bangsa sekaligus memberikan informasi yang menggugah kesadaran untuk melakukan tindakan demi masa depan yang lebih baik. Upaya-upaya pelestarian nilai kesejarahan merupakan hal penting agar tetap tersampaikan pada generasi mendatang.

Berbagai peristiwa sejarah baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda yang tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

Tabel 2-138 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Monumen Sejarah Perjuangan	70	70	89	89	89
Museum	47	47	48	48	48
Pelaku sejarah	21	21	21	21	21
Peristiwa Sejarah	144	144	206	206	262
Naskah Kuno	509	509	714	714	714

Sumber: *Dataku 2022*

4. Permuseuman

Lembaga atau wadah permanen yang melaksanakan fungsi pelestarian dan menyajikan berbagai koleksi dan bukti-bukti material manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi berada di tangan museum. Museum dapat bermakna sebagai lembaga tempat penyimpanan, perawatan, serta pengamanan dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Museum juga merupakan lembaga *nonprofit* yang terbuka untuk umum, tempat memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda bukti keberadaan manusia dan lingkungannya guna kepentingan pendidikan dan edukasi kultural, serta rekreasi,

DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional. Sejumlah 14% museum di Indonesia berada di DIY. Salah satu museum tersebut adalah Museum Negeri Sonobudoyo yang merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan memiliki koleksi terbanyak kedua setelah Museum Nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi Museum Negeri Sonobudoyo dilakukan secara *multiyears*. Museum di DIY cenderung bertambah dan berkembang dengan baik serta makin menarik untuk di kunjungi. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan DIY, sampai tahun 2021 tercatat ada 48 museum.

Museum negeri yang berada di bawah Pemda DIY yaitu Museum Negeri Sonobudoyo dan Museum Purbakala Pleret. Museum yang berada di bawah naungan Kemendikbud adalah Museum Benteng Vredenburg dan Museum Perjuangan, sedangkan museum di bawah naungan TNI adalah Museum TNI AD, Museum Sudirman, Museum Diponegoro, Museum TNI AU, Museum Sandi, Museum Istana Negara Gedung Agung, Museum MMTC, dan Museum Gedung Bank Indonesia. Beberapa museum yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY yaitu Museum Gunung Merapi (Pekab Sleman), Museum Bale Agung (Pekab Kulon Progo), Museum Padepokan Sumber Karahayon (Pekab Bantul), dan Museum Taman Pintar (Pekot Yogyakarta).

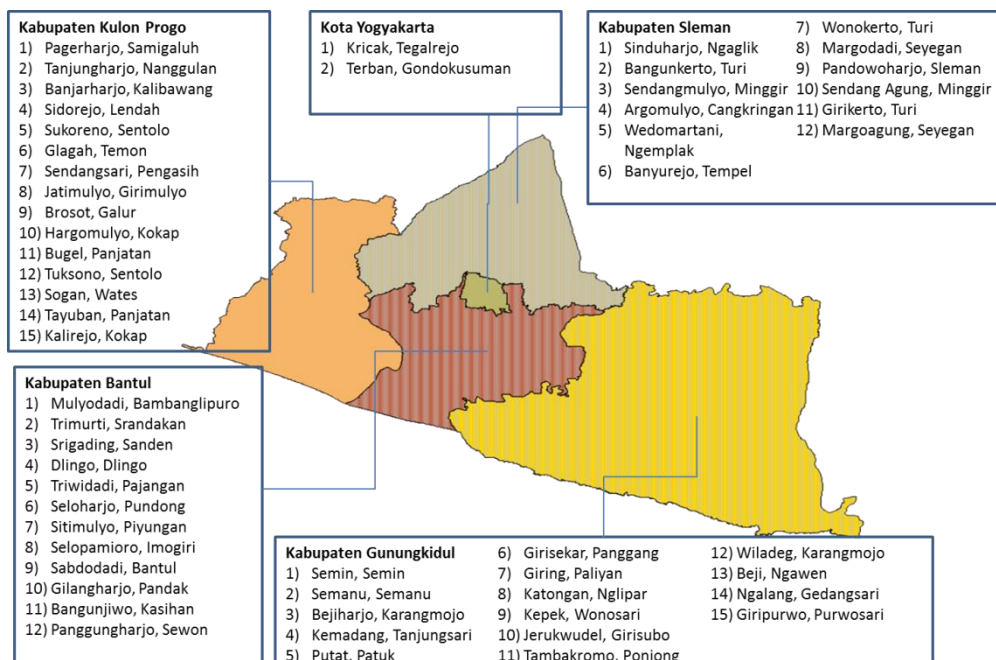
Beberapa museum juga dikembangkan oleh lembaga pendidikan di DIY. UGM memiliki museum UGM, Biologi, Peta, Geospasial, Paleoantropologi, Wanagama; UNY memiliki Museum Pendidikan Indonesia; UPN Veteran memiliki Museum Geoteknologi Mineral yang mengembangkan penelitian tentang geoheritage, dan UII memiliki Museum Candi Kimpulan.

Pemajuan museum di DIY dilakukan dengan rehabilitasi fisik museum, fasilitasi konservasi benda koleksi museum, pendampingan museum melalui tenaga edukator dan duta museum, serta festival museum.

5. Desa Budaya

Desa/Kelurahan Budaya merupakan desa/kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, penataan ruang, dan warisan budaya. DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Pengelolaan 56 desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan desa/kelurahan budaya meliputi: a) peningkatan manajemen, b) peningkatan wawasan dan ketrampilan teknis, c) Dukungan promosi dan informasi, d)

fasilitasi sarana dan prasarana, e) fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi, f) pengkajian pengembangan, dan g) pendampingan tenaga teknis. Pada tahun 2016 telah terbentuk tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya.



sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Gambar 2-60 Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Menurut SK Gub DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya

2.1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa

pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan Rennaisans Yogyakarta. Pembangunan perpustakaan juga dijiwai

oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di DIY sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan atau 100% dari 438 desa/kelurahan dan telah menerima bantuan sarana prasarana perpustakaan dalam bentuk buku, rak buku dan computer melalui hibah Pemda DIY.

Tabel 2-139 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	92	92	92	92
Kabupaten Bantul	75	75	75	75
Kabupaten Gunungkidul	140	139	140	140
Kabupaten Sleman	86	86	86	86
Kota Yogyakarta	45	45	45	45

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan.

Tabel 2-140 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Pustakawan DIY	56	66	65	70	Orang
Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	43	52	54	54	Orang
Kabupaten Kulon Progo	11	11	11	11	Orang
Kabupaten Bantul	10	12	13	13	Orang
Kabupaten Gunungkidul	8	8	8	8	Orang
Kabupaten Sleman	8	8	8	8	Orang
Kota Yogyakarta	6	15	15	15	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel 2-141 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2021

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.870.667	3.001.428	1.601.069	2.073.461
Jumlah pengunjung perpustakaan				
Tingkat pemda DIY	738.757	793.695	566.226	833.049
Kabupaten Kulon Progo	335.239	341.944	152.919	214.541
Kabupaten Bantul	358.217	365.381	198.112	240.224
Kabupaten Gunungkidul	322.171	361.799	175.899	198.872
Kabupaten Sleman	587.216	598.961	231.492	293.542
Kota Yogyakarta	529.067	539.648	276.421	293.233
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	2.245.100	3.196.500	3.220.511	3.265.200

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2021, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut.

Tabel 2-142 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	245.350	252.017	257.132	225.584
Jumlah koleksi eksemplar buku yg tersedia di Perpustakaan	350.930	359.444	359.691	357.510

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Jogja Library for All (JLA)* yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence*, *Kyoto Corner*, *Yogyasiana*, *Pustaka Nusantara*. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification (RFID)*, *Jogja Library for All*, *Jogja Mobile Library*, *Webgis*, *Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital* serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone/PC*. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

Jogja Mobile Library adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang di cari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari update informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan- kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa.

Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Aplikasi iJogja diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan digital di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan digital. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambil buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet, sampai akhir tahun 2016 koleksi digital yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyakarta yang berupa dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, *VCD*, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan *wifi area*, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner* yaitu bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Perфекtur Kyoto adalah *Kyoto Corner* (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di DIY yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak

yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain diarena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan,ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan layanan perpustakaan yang sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *the International Publishers Association (IPA)*, *the International Booksellers Federation (IBF)*, *the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* menetapkan ibu kota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

2.1.3.2.18 Urusan Kearsipan

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip.

Tabel 2-143 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2021

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Pengelolaan arsip secara baku	36	39	48	48	Unit

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	5	4	5	Kegiatan
Jumlah Arsiparis	91	84	93	102	Orang
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	5500	6605	9370	19439	Berkas
Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	81145	82177	36292	4717	Orang

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

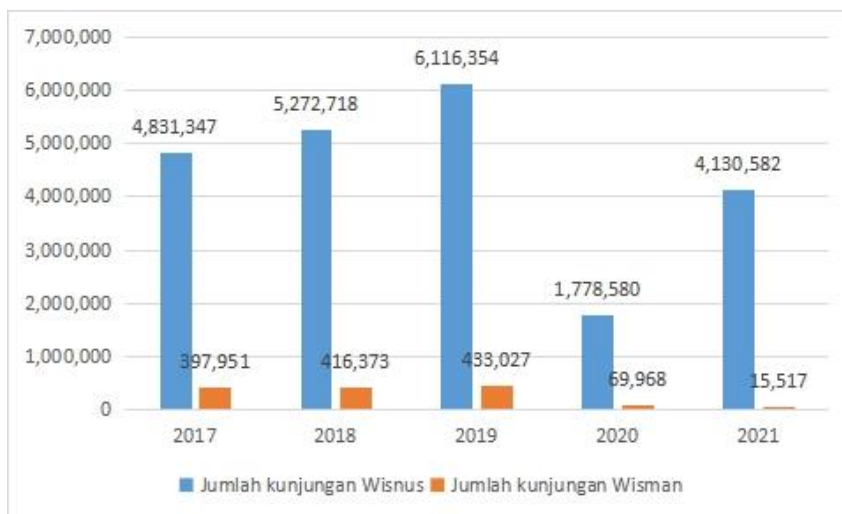
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Pariwisata

Sesuai dengan Visi Pembangunan DIY, pembangunan pariwisata dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan DIY. Tercermin dalam lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB DIY.

Kunjungan wisatawan ke DIY cenderung meningkat selama kurun waktu 2017-2019. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY tercatat sejumlah 4.831.347 kunjungan dan 397.951 kunjungan wisatawan mancanegara. Bertambah sejumlah 441.371 dibanding tahun 2017, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY pada tahun 2018 tercatat sebesar 5.272.718 kunjungan sementara kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 416.373 kunjungan. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2019 yakni 6.116.354 kunjungan wisatawan nusantara

dan 433.027 kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik nusantara maupun mancanegara. Sepanjang tahun 2020 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY hanya mencapai 1.778.580 kunjungan, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 69.968 kunjungan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia dan mengakibatkan terbatasnya mobilitas manusia. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan baik nusantara ke DIY kembali mengalami peningkatan. Tercatat sejumlah 4.130.582 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY sepanjang 2021. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY pada tahun 2021 hanya 15.517 kunjungan.

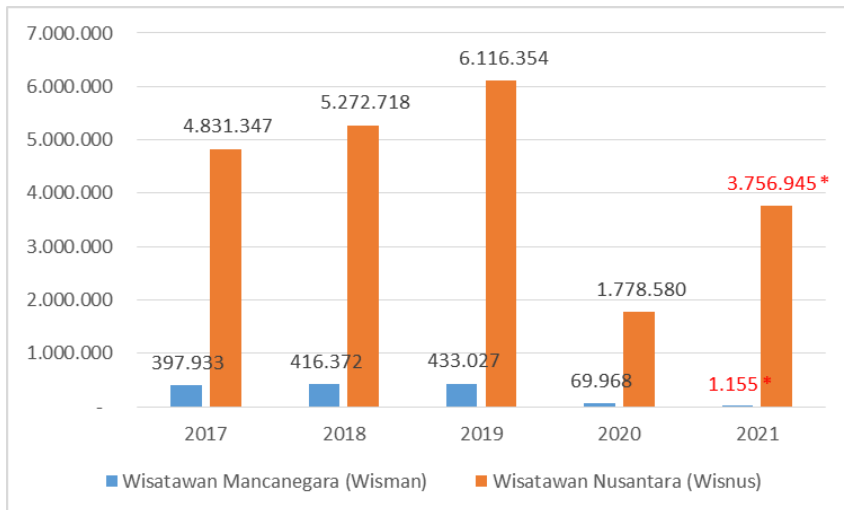


Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022

Gambar 2-61 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Orang)

Dimasa Pandemi saat ini, sektor Pariwisata mengalami dampak yang paling terasa. Sebab pembatasan pergerakan manusia mempengaruhi tingkat hunian kamar hotel-hotel di DIY serta menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung di DIY. Berdasarkan data dari Jogja Dataku jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa akomodasi tahun 2021

hanya sekitar 173 orang dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 96.286 orang. Sementara pada tahun 2020 juga telah terjadi penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, yakni sebanyak 69.968 wisatawan mancanegara pada tahun 2020 atau menurun sebesar 83,84% dari tahun 2019 sebanyak 433.027 wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk wisnus, jumlah wisnus yang menggunakan jasa akomodasi hanya sebesar 1.778.580 wisnus pada tahun 2020, menurun sebesar 70,92% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 6.116.354 wisnus. Sementara untuk jumlah kamar hotel yang terjual baik pada hotel berbintang maupun non bintang pada tahun 2020 sebanyak 1.096.819 kamar, menurun sebesar 76,34% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 4.653.404 kamar.



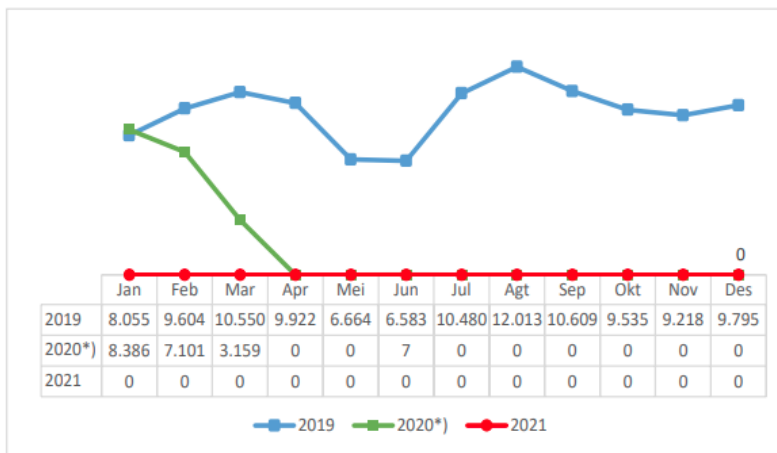
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

*) data sementara

Gambar 2-62 Grafik Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY Tahun 2017-2021

Pada Januari 2020, kunjungan wisman sempat lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2019. Namun, sejak terjadinya pandemi Covid-19, menyebabkan merosotnya kunjungan wisman ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat, sejak Maret 2020

kunjungan wisman mengalami penurunan, bahkan mencapai titik terendah pada bulan April, Mei, Juli hingga Desember 2020. Sampai dengan penghujung tahun 2021, kunjungan wisman ke DIY tercatat masih nihil seperti pada kondisi bulan sebelumnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-63 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021

Hal yang harus menjadi perhatian DIY bahwa dalam pengembangan *event* atau festival pariwisata DIY perlu berorientasi pada daya tarik yang berkelas dunia Sektor pariwisata tengah menjadi sektor yang diusung oleh berbagai daerah. Persaingan antar daerah tentu menjadi tantangan bagi DIY dalam menempatkan posisinya sebagai tujuan pariwisata favorit. Di sisi lain tentu saja persaingan antar daerah ini juga memunculkan inovasi dalam pengembangan daya tarik wisata baik yang berupa objek wisata maupun penyelenggaraan atraksi.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menghantam sektor utama pariwisata dan pendidikan di DIY telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi anjlok. Tidak mudah memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian secara umum di tengah wabah yang masih berlangsung. Sebagai daerah utama tujuan wisatawan, salah satu yang digenjut oleh DIY adalah mendesak asosiasi yang menaungi para pelaku pariwisata dapat mengatur sendiri

penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sebab Pemda DIY tidak mengeluarkan kebijakan untuk menutup tempat wisata, hotel, ataupun rumah makan di masa pandemi ini. Dalam mensikapi penurunan jumlah wisatawan dan perubahan pola wisatawan maka pemerintah daerah beserta pelaku usaha pariwisata mesti lebih kreatif dan berinovasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengusaha pariwisata harus mencari tahu apa minat wisatawan dan jangan mengandalkan destinasi wisata yang sudah ada.

Lama tinggal wisawatan di DIY pada tahun 2021 capaiannya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada mobilitas wisatawan, hal tersebut dipengaruhi pula oleh kecenderungan wisawatan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan (*weekend*). Fakta bahwa DIY masih menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah Bali juga turut andil dalam mempengaruhi lama tinggal wisatawan di DIY baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di DIY pada tahun 2021 mencapai 2,27 hari dan lama tinggal wisatawan nusantara mencapai mencapai 1,42 hari. Beroperasinya bandara baru diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di tahun-tahun mendatang seiring meningkatnya frekuensi penerbangan langsung dari luar negeri. Dengan demikian wisatawan mancanegara yang datang ke DIY tidak tergantung dengan paket wisata dari Bali dan Jakarta atau daerah lainnya.

Lama tinggal wisatawan yang menunjukkan rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan di DIY baik untuk wisman mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk wisnus mengalami sedikit penurunan. Peningkatan Lama Tinggal Wisawatan Mancanegara dipengaruhi oleh ragam destinasi dan atraksi yang ada dan dilaksanakan di DIY di sepanjang tahun 2021. Penyelenggaraan event pariwisata yang diagendakan pada bulan Juli-September, diperkirakan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat liburan musim panas

di Eropa dan Amerika adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 tentu saja berdampak pada lama tinggal wisatawan di 2020, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata DIY terlihat bahwa lama tinggal Wisatawan Mancanegara turun menjadi 1,9 hari dan Wisatawan Nusantara turun menjadi 1,65 hari.

Tabel 2-144 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Hari)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,13	2,15	2,31	1,9	2,27
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,98	1,99	1,99	1,65	1,42

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022

(*) Data Sementara

Jumlah Usaha Perjalanan Wisata belum tersebar secara merata di kabupaten/Kota di DIY, jumlah Usaha Perjalanan Pariwisata untuk tahun 2020 sebanyak 706. Perkembangan kepariwisataan menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa keterbatasan serta tantangan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan. Sebagai contohantisipasi terhadap perkembangan dengan dioperasionalkan bandara baru *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kulon Progo namun jumlah Usaha Perjalanan Wisata masih terbatas berjumlah 19 usaha. Keterbatasan usaha Perjalanan wisata terutama dirasakan di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan Sleman yang memiliki 305 usaha dan Kota Yogyakarta 193 usaha.

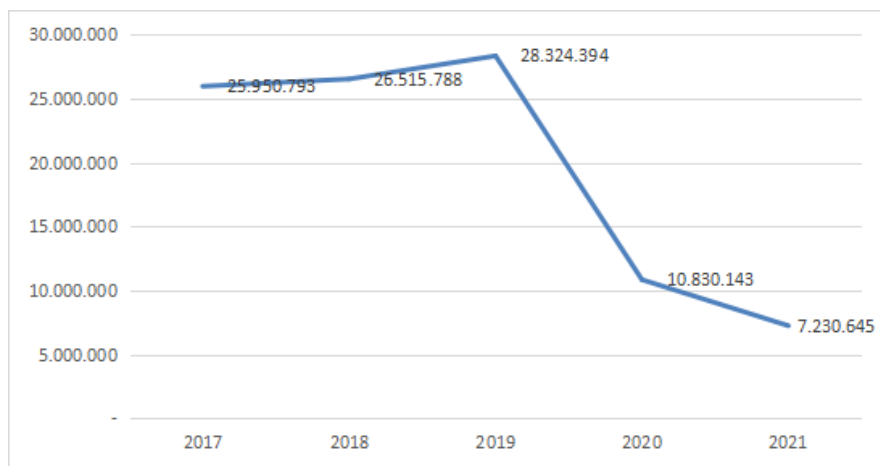
Tabel 2-145 Jumlah Usaha Perjalanan Wisata di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Biro Perjalanan / Wisata	Cabang Biro Perjalanan / Wisata	Agen Perjalanan Wisata
Sleman	269	19	17
Bantul	87	0	60
Kulon Progo	10	0	9

Kabupaten/ Kota	Biro Perjalanan / Wisata	Cabang Biro Perjalanan / Wisata	Agen Perjalanan Wisata
Gunungkidul	41	0	1
Kota Yogyakarta	180	0	13

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021

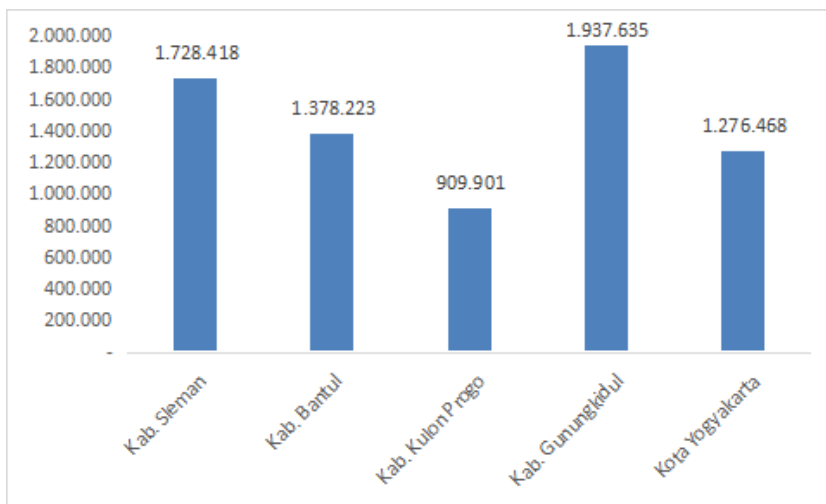
Jumlah kunjungan wisatawan di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) mengalami tren kenaikan pada periode 2017-2019. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung di ODTW di kabupaten/kota mencapai 28.324.394 orang. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, jumlah pengunjung turun signifikan menjadi menjadi 10.830.143 kunjungan pada tahun 2020. Penutupan sejumlah objek wisata serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi penyebab utama terjadinya penurunan tersebut. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung di ODTW masih belum pulih. Berbagai pengelola wisata masih memilih untuk belum membuka untuk kunjungan wisatawan. Langkah tersebut harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022 dan BPSD Kab/Kota, 2022

Gambar 2-64 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2016-2021 (Orang)

Menurut data dari BPS Kabupaten/Kota di DIY, total jumlah pengunjung ODTW adalah sebesar 7.230.646 pengunjung. Penutupan sejumlah objek wisata serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi penyebab mengapa pada tahun 2021 jumlah pengunjung masih relatif rendah. Jika dilihat dari sebarannya, wilayah Kabupaten Gunungkidul relatif masih menikmati kunjungan wisatawan yang besar. Hal ini disebabkan karena daya tarik wisata di wilayah tersebut bersifat wisata alam dengan lokasi yang lebih memungkinkan didatangi pengunjung tanpa menimbulkan kerumunan yang berisiko. Sementara itu, kunjungan di Sleman dan Kota Yogyakarta relatif menurun pada tahun 2021. Berbagai pengelola tempat wisata seperti PT Taman Wisata Candi atau pengelola museum pada tahun 2021 masih lebih sering menutup atau membatasi kunjungan.

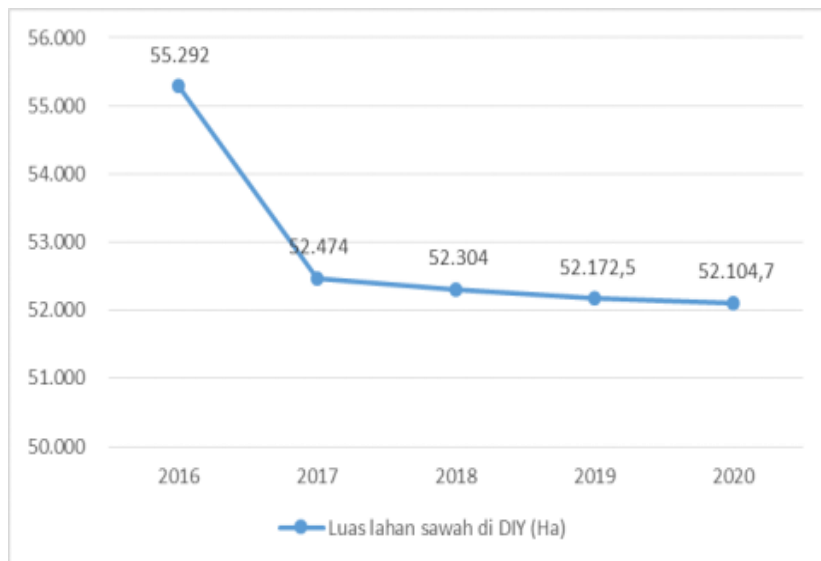


Sumber: BPS Kab/Kota, 2022

Gambar 2-65 Sebaran Wisatawan di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Orang)

2.1.3.3.2 Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian PDRB DIY pada sampai dengan triwulan IV tahun 2021 masih merupakan salah satu yang terbesar dengan sumbangan 9,72%. Namun kontribusinya cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015 hingga triwulan IV Tahun 2021 dan menjadi kontributor terbesar keempat pada triwulan IV 2021. Penurunan kontribusi pertanian selain disebabkan oleh kurangnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian, juga disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke *non*pertanian. Alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada lahan sawah beririgasi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu alih fungsi lahan menjadi isu strategis DIY agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-66 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY

Produksi tanaman pangan DIY mengalami kecenderungan peningkatan pada kurun waktu 2018-2021. Pada tahun 2018 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan

cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 168.600 ton namun. Tahun 2019 produksi padi sawah mengalami peningkatan sebesar 123.603 ton, namun untuk produksi padi ladang mengalami penurunan produksi sebesar 25.129 ton. Produksi padi sawah pada tahun 2018 merupakan yang terendah dalam lima tahun, sedangkan sebaliknya produksi padi ladang justru yang tertinggi dalam lima tahun.

Produksi kedelai DIY mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019, namun kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Sementara produksi kacang tanah mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan curah hujan yang cukup namun di tahun 2020 mengalami penurunan produksi karena musim kemarau yang relatif lebih panjang. Produksi kacang tanah diketahui meningkat pada tahun 2021, dengan angka produksi mencapai 84.801 ton. Produksi tanaman pangan di DIY Tahun 2017-2021 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-146 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2021 (ton)

Jenis tanaman pangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padi Sawah	678.530,00	497.599,00	621.202,00	653.128,00	658.740,00
Padi Ladang	202.576,00	214.907,00	189.778,00	195.013,00	194.824,00
Jagung	311.764,00	309.221,00	366.031,00	369.347,00	363.039,00
Kacang Kedelai	8.656,00	10.931,00	5.041,00	7.969,00	8.532,00
Kacang Hijau	301,00	376,00	226,00	531,00	439,00
Kacang Tanah	79.907,00	80.172,00	80.682,00	75.119,00	84.801,00
Ubi Kayu	1.025.641,00	890.898,00	778.806,00	1.073.314,00	864.209,00
Ubi Jalar	5.289,00	4.113,00	3.149,00	2.765,00	2.445,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel 2-147 Produksi Hortikultura DIY Tahun 2017 - 2021 (ton)

No	Komoditas Hortikultura (ton)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Mangga	32.237,80	61.171,40	58.130,00	29.832,70	7.946,01
2	Jeruk	2.110,30	2.443,00	3.004,50	2.827,00	558,07
3	Pepaya	6.038,00	6.815,10	8.376,20	13.995,20	3.852,98
4	Pisang	40.920,70	45.065,60	47.554,30	66.729,60	16.826,52
5	Nanas	532,60	418,70	496,20	518,80	164,98
6	Durian	6.766,70	6.596,20	6.264,70	6.770,60	5.485,39
7	Manggis	1.801,60	1.652,30	2.938,90	2.434,80	543,57
8	Melon	17.861,40	30.742,10	24.015,80	22.230,40	14.550,00
9	Alpukat	3.777,10	3.149,20	2.385,00	2.303,60	8.803,24
10	Belimbing	611,80	744,40	824,90	661,20	220,40
11	Dukuh/Langsar	1.489,40	1.373,50	1.763,30	2.374,20	1.560,51
12	Jambu Biji	2.116,50	2.410,90	2.754,10	4.283,80	1.632,89
13	Jambu Air	2.724,90	2.287,80	2.588,20	3.838,00	1.424,92
14	Nangka/Cempedak	12.823,90	13.381,50	12.172,00	14.210,20	4.546,41
15	Salak	37.913,40	90.295,50	41.119,80	54.995,50	21.362,13
16	Rambutan	12.406,50	10.287,80	9.547,20	9.013,10	4.476,65
17	Sawo	4.667,20	4.420,50	3.988,80	2.470,40	969,27
18	Sirsak	1.534,60	2.177,80	1.929,40	5.886,10	356,13
19	Sukun	6.311,60	6.969,10	6.387,60	23.357,10	2.993,31
20	Melinjo	14.645,50	13.924,90	16.350,30	18.274,90	3.768,75
21	Bawang Merah	13.980,10	14.949,70	16.998,50	18.810,50	29.808,66
22	Kubis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
23	Cabai	37.902,60	44.590,10	42.972,40	59.573,30	54.311,09
24	Petsai/Sawi	3.630,50	3.240,70	3.093,90	3.337,10	4.136,30
25	Daun Bawang	326,50	168,80	141,20	143,70	95,70
26	Kembang Kol	453,20	319,20	260,50	250,50	188,75

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Komoditas cabe besar merupakan kontributor terbesar kelompok buah dan sayur semusim. Sementara itu, kontributor terbesar kelompok buah dan sayur tahunan adalah komoditas Salak yang banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, Pakem). Sedangkan Jahe merupakan kontributor terbesar kelompok tanaman biofarmaka. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mudah dikembangkan serta permintaan pasarnya sebagai bahan farmasi herbal cukup tinggi.

Sementara itu, peternakan di DIY masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil. Pada tahun 2020, jumlah ternak unggas di DIY melonjak tajam menjadi 16.448.394 ekor. Sapi perah merupakan jenis ternak yang tidak dominan dilakukan di DIY karena baik iklim maupun topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah. Berikut rincian populasi ternak di DIY tahun 2017-2021.

Tabel 2-148 Populasi Ternak di DIY Tahun 2017-2021 (ekor)

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ternak Sapi Potong						
Jumlah Populasi	309.960,00	313.425,00	304.423,00	309.259,00	312.805,00 *	Ekor
Ternak Sapi Perah						
Jumlah Populasi	4.003,00	3.747,00	3.873,00	3.520,00	3.500,00 *	Ekor
Ternak Kecil						
Jumlah Populasi Kambing	401.219,00	405.948,00	402.943,00	416.400,00	417.386,00 *	Ekor
Jumlah Populasi Domba	194.788,00	148.942,00	143.957,00	148.191,00	142.599,00 *	Ekor
Jumlah Populasi Babi	16.634,00	14.339,00	16.214,00	11.725,00	9.299,00 *	Ekor
Jumlah Populasi Kerbau	646,00	616,00	510,00	488,00	471,00 *	Ekor
Jumlah Populasi Kuda	1.951,00	1.914,00	1.846,00	1.842,00	1.757,00 *	Ekor
Jumlah Populasi Kelinci	28.701,00	38.658,00	44.703,00	42.260,00	44.294,00 *	Ekor
Unggas						
Jumlah Populasi Unggas	-	15.632.193,00	15.691.163,00	16.448.394,00	16.935.095,00 *	Ekor

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ayam Buras						
Jumlah Populasi	4.530.899,00	3.584.305,00	3.622.616,00	3.496.119,00	3.442.342,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Daging	5.682,03	6.076,08	5.259,72	4.249,26	3.854,00 *	Ton
Jumlah Produksi Telur	2.849,11	2.289,48	2.313,94	2.225,37	2.704,00 *	Ton
Ayam Petelur						
Jumlah Populasi	3.418.237,00	3.514.189,00	3.489.305,00	4.618.205,00	4.712.467,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Telur	26.354,61	27.094,40	27.295,60	32.791,39	35.627,00 *	Ton
Jumlah Produksi Daging	3.907,71	3.914,95	3.047,06	3.886,94	3.977,00 *	Ton
Ayam Pedaging						
Jumlah Populasi	6.668.834,00	6.209.515,00	6.172.870,00	6.184.378,00	6.481.974,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Daging	34.273,98	29.982,96	56.504,00	35.854,26	36.158,00 *	Ton
Itik						
Jumlah Populasi	496.196,00	416.405,00	411.044,00	437.690,00	444.489,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Telur	2.724,12	2.286,06	2.256,63	2.402,00	2.297,05 *	Ton
Jumlah Produksi Daging	565,15	509,60	386,37	411,00	393,65 *	Ton
Jumlah Kelompok Peternak	15,00	42,00	45,00	41,00	n/a *	Kelompok
Itik Manila						
Jumlah populasi	28.551,00	69.398,00	68.842,00	85.148,00	77.736,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Telur	156,75	380,99	377,94	467,00	442,53 *	Ton
Jumlah Produksi Daging	13,12	30,21	39,24	48,00	50,12 *	Ton
Jumlah Kelompok Peternak	2,00	2,00	2,00	n/a	n/a	Kelompok
Burung Puyuh						
Jumlah Populasi	2.114.059,00	1.751.823,00	1.856.978,00	1.555.234,00	1.712.947,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Telur	3.665,78	2.599,90	3.220,00	2.701,00	2.700,68 *	Ton
Jumlah	71,91	250,72	95,00	75,00	87,82 *	Ton

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Produksi Daging						
Jumlah Kelompok Peternak	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	Ton
Burung Dara						
Jumlah Populasi	64.373,00	86.558,00	69.508,00	71.620,00	63.140,00 *	Ekor
Jumlah Produksi Telur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Ton
Jumlah Produksi Daging	12,71	24,99	17,37	8,00	8,00*	Ton
Jumlah Kelompok Peternak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kelompok

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Populasi ternak besar DIY didominasi oleh Sapi Potong yang banyak dikembangkan di Gunungkidul. Sementara kambing yang juga banyak dihasilkan di Gunungkidul juga merupakan kontributor terbesar kelompok ternak kecil. Di sisi lain, ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas. Kabupaten Sleman adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar di DIY. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap semua kelompok ternak begitu juga di tahun 2019 hal ini terjadi dikarenakan banyak ternak yang keluar daerah terutama untuk komoditas sapi potong. Kelahiran dan ternak masuk ke DIY tidak seimbang dengan keluarnya ternak dari DIY.

Produksi perkebunan DIY dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke komoditas lain, serta penurunan produksi beberapa komoditas strategis, seperti kopi dan tebu. Data luas areal komoditas perkebunan strategis DIY tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-149 Luas Areal Komoditas Perkebunan Strategis, Tahun 2017-2021 (Ha)

Luas Areal (Ha)	2017	2018	2019	2020	2021*
Kelapa	42.524,22	40.547,06	39.905,05	39.659,82	39.475,00 *
Kakao	5.150,92	5.164,41	5.280,69	5.109,88	5.039,68 *
Kopi	1.721,87	1.724,23	1.707,49	1.727,60	1.746,20 *
Tembakau	1.203,63	1.060,70	965,80	930,65	861,20 *
Tebu	3.312,31	2.638,77	3.008,26	2.963,75	2.808,67 *

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

(*) Data Sementara

Sementara bila dilihat lebih rinci, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan di DIY pada tahun 2021. Sedangkan komoditas strategis tebu merupakan penyumbang terbesar kedua, hal ini disebabkan peningkatan produksi yang sangat signifikan pada tahun 2020, namun untuk tahun 2021 mengalami penurunan produksi. Data mengenai hasil produksi komoditas perkebunan strategis tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-150 Hasil Produksi Komoditas Perkebunan Strategis, Tahun 2017-2021

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021*	
Kelapa	53.359,00	47.369,49	48.065,92	48.375,90	50.488,34 *	Ton
Kakao	1.904,89	1.773,22	1.792,47	1.893,99	2.184,33 *	Ton
Kopi	610,45	482,92	512,56	514,09	525,77 *	Ton
Tembakau	610,45	888,15	692,89	744,47	707,16 *	Ton
Tebu	10.988,86	10.418,12	9.425,97	11.035,49	8.336,28 *	Ton

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

(*) Data Sementara

2.1.3.3 Urusan Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2021 tercatat seluas 98.297,58 Ha yang didominasi hutan rakyat dengan luasan 79.262,58 Ha dan sisanya 19.035 Ha merupakan hutan produksi,

hutan lindung, dan hutan konservasi. Wilayah hutan pada wilayah DIY sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Adapun persentase hutan konservasi yang dikelola pada tahun 2021 tercatat sebanyak 28,86%, menurun jauh dibanding tahun 2020 yang mencatatkan pengelolaan sebesar 81,18%. Berikut adalah data luas lahan kehutanan di DIY tahun 2018-2021.

Tabel 2-151 Luas Hutan di DIY tahun 2017-2021 (Ha)

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Hutan yang dikelola Provinsi	19.133,95	19.133,95	19.133,95	19.133,95	19.035,09
Luas Hutan Negara					
Hutan Produksi	13.519,47	13.519,47	13.519,47	13.439,19	13.421,00
Hutan Lindung	2.297,61	2.297,61	2.297,61	2.294,93	2.160,00
Hutan Konservasi	3.316,87	3.316,87	3.316,87	3.359,96	3.454,09
Hutan Rakyat	78.400	78.400,27	78.400,27	79.262,58	79.262,58*
Persentase hutan konservasi dikelola	75,21	75,21	80,13	81,18	76,97

Keterangan: *) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pengelolaan hutan produksi di DIY dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD DLHK DIY). Selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil kehutanan yang potensial di DIY. Hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Data mengenai hasil hutan di DIY tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-152 Hasil Hutan di DIY Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Volume				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produksi kayu bulat (m ³)	121.049,11	120.692,85	154.210,60	71.335,54	97.986,34
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	681,61	457,45	1.103,90	2.249,84	2.566,26
b.	Kayu Bakar Hutan Negara	-	-	37,38	165,53	0,00
c.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	120.367,50	120.235,40	153.069,32	69.085,70	95.420,08
2.	Produksi kayu olahan (m ³)	5.668,80	2.050,60	24.090,41	26.715,31	10.488,1
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m ³)	2.834,40	1.025,30	6.171,34	3.931,62	2.982,38
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m ³)	2.834,40	1.025,30	1.065,10	4.956,46	1.812,20
c.	<i>Veneer</i> (m ³)			1.065,12	1.211,98	
d.	<i>Barecore</i> (m ³)			15.788,85	16.493,30	5.290,19
e.	<i>Blockboard</i> (m ³)			0	121,95	403,33
3.	Jasa Lingkungan (Rp)	1.962.831,125	2.282.917,750	2.454.374.875	409.761.125	1.043.337.375
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	1.962.831,125	2.282.917,750	2.411.134.750	403.917.625	1.037.791.000
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	n/a	n/a	21.874.375	1.580.750	580.625
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	n/a	n/a	21.365.750	4.262.750	4.849.500
d.	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal	n/a	n/a	n/a	n/a	116.250
4.	Produksi hasil hutan non kayu					
a.	Minyak kayu putih (liter)	44.297	n/a	39.323	40.353	42.317
b.	Bambu (batang)	n/a	n/a	127.330	477.493	477.493*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Kerusakan hutan terjadi akibat adanya kebakaran hutan, bencana alam dan pencurian kayu. Jumlah kerusakan hutan di DIY dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Kasus pencurian kayu

tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 70 kasus. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2017-2021 terjadi pada tahun 2018 yaitu seluas 246,28 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain. Data kerusakan hutan di DIY selama kurun waktu 2017-2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2-153 Kerusakan Hutan di DIY Tahun 2017-2021

Kerusakan Hutan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kebakaran Hutan					
Luas Areal Hutan yang Terbakar (Ha)	96,20	246,28	215,80	33,50	1,00
Jumlah Korban Jiwa (jiwa)	0	0	0	n/a	0
Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan (lokasi)	9,00	4,00	12,00	3,00	1,00
Deforestasi (penggundulan hutan)	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Selain kerusakan hutan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sumber daya alam yang berupa tanah adalah terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses-proses biologis yang berupa dekomposisi biomasa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup. Data mengenai lahan kritis di DIY disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-154 Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di DIY (Ha)

Kategori	2011	2013	2018
Kritis	33.088	25.272	78.333
Sangat Kritis	471	845	790
Jumlah	33.559	26.117	79.123

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi sumberdaya mineral (ESDM) merupakan urusan pilihan dan terbagi menjadi 5 sub urusan, yaitu; geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan.

2.1.3.3.4.1 Sub Urusan Geologi

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa dalam sub urusan geologi, pemerintah daerah provinsi mempunyai ketugasan :

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, terdapat 3 Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di DIY yakni CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates, dan CAT Wonosari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan Pemda DIY adalah terhadap cekungan air tanah yang berada dalam provinsi saja, meliputi CAT Yogyakarta-Sleman yang mempunyai luasan 916 km² dan liputannya meliputi Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, dan

Kab. Kulon Progo serta CAT Wates dengan luasan 150 km² yang berlokasi di Kab. Kulon Progo.

Pelaksanaan sub urusan geologi di DIY terkait dengan air tanah dimaksudkan untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah yang diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah < 20% terhadap tebal rata-rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi muka air tanah pada musim hujan terbasah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 7,28 meter atau 7,28% terhadap rata-rata tebal akuifer dan pada musim kemarau terkering sebesar 9,35 meter atau 9,35% terhadap rata-rata tebal akuifer. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,81 meter (6,81% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 6,46% pada musim hujan terbasah dan sebesar 9,22 meter (9,22% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 1,39% pada musim kemarau terkering. Dengan melihat kondisi muka air tanah pada musim kemarau dan musim hujan di tersebut di atas, rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta - Sleman tahun 2015 masih < 20% terhadap tebal rata-rata akuifer sesuai target tahun 2015. Kondisi ini juga dapat dipertahankan hingga tahun 2018, di mana penurunan muka air tanah < 20% terhadap tebal rata-rata akuifer.

Pada tahun 2018 dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20%, melalui kegiatan:

- Pembangunan 160 unit sumur resapan untuk imbuhan air tanah;
- Pembangunan 5 unit sarana pemantauan air tanah dalam;

- Pemeliharaan/perbaiki AWLR dan sumur pantau air tanah dalam;
- Pengaturan Pelaksanaan dewatering sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman;
- Penyusunan Zona Perlindungan Sumber Air Tanah di CAT Yogyakarta – Sleman.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air (daerah rawan kekeringan) Pemda DIY melakukan pembangunan sumur bor. Kegiatan ini mendukung capaian target indikator RPJMD DIY 2017-2022 yaitu cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air. Pada tahun 2019 telah dibangun 5 sumur bor di Kabupaten Gunungkidul dan 4 sumur bor di Kabupaten Bantul. Hingga tahun 2018 Pemda DIY telah membangun sumur bor di 75 dusun dari 245 dusun yang merupakan daerah rawan kekeringan.

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan air tanah dan geologi yang telah diterbitkan oleh KP2TSP berupa Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah dan Surat Izin Pengeboran Air Tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan akan dikenakan berupa pemberian sanksi administratif.

2.1.3.3.4.2 Sub Urusan Mineral dan Batubara

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah mineral dan batuan dengan mewajibkan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan. Hal ini diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB DIY. Tertib ijin dan pelaksanaan ijin pertambangan merupakan salah satu hal yang dilakukan Pemda DIY untuk mengeliminir persoalan lingkungan dan tata ruang sebagai dampak dari aktivitas pertambangan.

Wilayah DIY secara potensi alam tidak banyak memiliki potensi tambang yang besar, sebagian besar potensi yang dimanfaatkan adalah mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, batu, kerikil dan lainnya. Dalam pelaksanaan tertib perijinan, dapat terlihat bahwa sebanyak 268 dari 733 pemohon WIUP sudah mendapatkan ijin, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi persyaratan perijinan yang dibutuhkan.

Tabel 2-155 Data Status Permohonan WIUP

No	Lokasi Kegiatan	Jumlah Permohonan	WIUP
			SK Persetujuan WIUP
1	Kabupaten Kulon Progo	470	154
2	Kabupaten Gunungkidul	105	44
3	Kabupaten Sleman	193	48
4	Kabupaten Bantul	85	26
5	Lintas Kabupaten	22	24
TOTAL		875	296

sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2020

Berdasarkan data yang ada sampai dengan Desember 2019, terdapat 212 Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi yang telah diterbitkan oleh Pemda DIY, sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi telah dikeluarkan sebanyak 70 ijin.

Tabel 2-156 IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi

IUP EKSPLORESI (Provinsi)		IUP EKSPLORESI PRODUKSI Kab:4 Provinsi: 114	
Darat	Sungai	Darat	Sungai
154	142	52	66
296		118	

sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2020

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (Permen ESDM No 26 Tahun 2018), dengan tujuan Peningkatan Perizinan Pengusahaan Pertambangan yaitu IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Untuk penjualan, IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.1.3.3.4.3 Rasio Elektrifikasi

Sasaran pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga berakses listrik dan indikator capaian program Penduduk berakses energi dan Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan di masyarakat dapat dipenuhi melalui penyediaan listrik serta pemenuhan akan bahan bakar minyak dan gas di masyarakat.

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik. Rumah Tangga berakses listrik adalah rumah tangga yang telah menikmati listrik baik dari PLN (yang ber KWH meter) maupun *non*PLN. Sumber listrik *non*PLN bisa dari menyalur,

PLTS dan sumber lainnya. Peningkatan Rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dicapai dengan memperhatikan 3 aspek keselamatan ketenagalistrikan, yaitu aman, andal dan ramah lingkungan. Pada tahun 2021 sebanyak 1.205.437 Rumah Tangga memiliki akses listrik PLN, sementara 154.534 Rumah Tangga menggunakan listrik *non*PLN.

Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau menyalur dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan berupa pemasangan instalasi listrik 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA.

Peraturan Pemerintah melalui PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Selain itu, mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Dalam rangka melaksanakan penghematan energi dan pelaksanaan konservasi maka, Pemda DIY melakukan konservasi energi melalui kegiatan audit energi. Kegiatan audit energi ini dimaksudkan untuk mendorong organisasai pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penerapan konservasi energi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan energi dengan menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dan berbagai inovasi pada skala ekonomis. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik.

Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,99%

tahun 2021 dibarengi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2021, rasio elektrifikasi naik menjadi 99,99%. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100% pada tahun 2022.

Tabel 2-157 Jangkauan Pelayanan Energi Listrik di DIY Tahun 2018-2021

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sumber Energi Listrik				
PLTS				
Jumlah	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00 *
Kapasitas	272,00	272,00	272,00	272,00 *
PLTMH				
Jumlah	7,00	7,00	7,00	7,00 *
Kapasitas	710,00	710,00	710,00	710,00 *
Jangkauan Pelayanan Energi Listrik				
Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	1.109.438,00	1.152.414,00	1.201.160,00	1.205.437,00 *
Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	92.802,00	164.338,00	108.673,00	154.534,00 *
Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Rasio Elektrifikasi	99,99	99,99	99,99	99,99*

*) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.3.3.4.4 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kebijakan diversifikasi energi atau penganeekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY yang dilakukan pada tahun 2015 hingga saat ini melalui optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY.

Tabel 2-158 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018-2021

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
PLTS						
Potensi						
Kapasitas	10	10	10	10	10	MWp
TOE	301	301	301	301	301	
Terpasang						
Kapasitas	0,258	0,258	0,258	0,584	0,584	MWp
TOE	0,41	0,41	0,41	0,41	668,51	
PLTBayu						
Potensi						
kapasitas	100	100	100	100	100	MWp
TOE	165,92	165,92	165,92	165,92	165,92	
Terpasang						
Kapasitas	131	131	131	131	131	MWp
TOE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	
PLTBagasse						

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Potensi						
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	MWp
TOE	873	873	873	873	873	
Terpasang						
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	MWp
TOE	873	873	873	873	873	
PLTSampah						
Potensi						
kapasitas	30	30	30	30	30	MWp
TOE	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040	
Terpasang						
kapasitas	5	5	5	5	5	KWp
TOE	2	2	2	2	2	
Bioethanol						
Potensi						
kapasitas	36	36	36	36	36	Juta Liter
TOE	-	18.060	18.060	18.060	18.060	-
Terpasang						
kapasitas	5	5	5	n/a	n/a	Juta Liter
TOE	2.508	2.508	2.508	n/a	n/a	
Biogas Ternak						
Potensi						
kapasitas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Unit
TOE	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	
Terpasang						
kapasitas	2.425	2.979	3.179	3.379	3.379	Unit
TOE	530,27	651,41	680,56	709,72	709,72	

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

2.1.3.3.5 Urusan Perdagangan

DIY sebagai pusat kegiatan pariwisata dan pendidikan mendorong munculnya permintaan atas layanan sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil. Tercatat dalam sensus ekonomi 2016, sektor usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi jumlah Usaha Mikro dan Kecil dengan persentase mencapai 35,4%. Secara makro,

sektor perdagangan menempati urutan ke tujuh dalam struktur PDRB DIY dan tumbuh secara positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY tercatat sebesar 8,15%

Perkembangan sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peningkatan jumlah SIUP maupun TDP ini menunjukkan dua hal yaitu perkembangan unit usaha dan kepedulian pelaku usaha untuk mencatatkan kegiatannya dalam perijinan formal. Tercatat pada tahun 2017-2021 jumlah SIUP yang terdaftar di DIY cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY pada periode 2017-2021 masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil. Sementara itu, sejak perijinan menggunakan OSS (*Online Single Submission*) terbitan SIUP menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. Data perkembangan jumlah UKM berdasarkan SIUP di DIY pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-159 Perkembangan Jumlah UKM berdasarkan SIUP di DIY berdasarkan Tahun 2017 - 2021

No	Golongan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengusaha Besar	1.119	1.125	1.145	1.158	1.165
2	Pengusaha Menengah	3.107	3.235	7.199	9.531	11.101
3	Pengusaha Kecil	43.684	44.404	44.627	45.155	45.468
4	Pengusaha Mikro	3.140	3.435	5.317	6.652	8.585
Jumlah SIUP diterbitkan		48.224	52.199	58.288	62.496	66.319

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya pasar sebagai sarana perdagangan. Keberadaan pasar baik toko modern maupun tradisional mempunyai tiga fungsi utama dalam perdagangan yaitu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan sarana promosi. Jumlah toko modern hingga tahun 2021 sejumlah 704 unit, sementara jumlah pasar tradisional

sebanyak 344 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya. Oleh karena itu, kedepannya upaya revitalisasi pasar harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat atau pasar tradisional yang dinilai memiliki fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Program revitalisasi pasar dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni fisik dan *nonfisik*. Secara fisik, pengelolaan pasar perlu didorong dalam hal kebersihan, kenyamanan, penataan los hingga keamanan. Sementara itu, secara *nonfisik* perlu didorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pedagang. Pedagang diharapkan memahami cara pengelolaan keuangan untuk meningkatkan transaksi hingga mendapatkan permodalan dari perbankan.

Tabel 2-160 Perkembangan Jumlah Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2017 - 2021

Jenis Toko	2017	2018	2019	2020	2021
Toko Modern	818	825	704	704	704
Pasar Tradisional	349	349	344	344	344
Jumlah	1.167	1.174	1.048	1.048	1.048

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Sektor perdagangan merupakan salah satu pendukung berjalannya roda perekonomian di DIY. Perdagangan di DIY tidak hanya mencakup perdagangan di dalam negeri namun juga mencakup perdagangan luar negeri/ekspor. Dalam kurun waktu lima tahun, nilai perdagangan luar negeri DIY mampu menunjukkan kenaikan positif. Pada tahun 2020 nilai perdagangan luar negeri DIY tercatat sebesar 417,12 juta US\$, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 539,96 juta US\$. Salah satu aspek yang mempengaruhi

peningkatan nilai ekspor adalah volume ekspor pada tahun 2021 yang berada di angka 132,51 (Juta kg). Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 103,51 (Juta kg). Dalam hal komoditas ekspor, justru terjadi penurunan dimana pada tahun 2020 terdapat 104 komoditas, menjadi 75 komoditas di tahun 2021. Disamping adanya peningkatan nilai ekspor DIY, terjadi pula penurunan di beberapa aspek dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Negara tujuan ekspor DIY pada tahun 2020 tercatat sebanyak 111 negara, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 110 negara tujuan ekspor. Jumlah eksportir juga turut berkurang dimana pada tahun 2020 tercatat ada 373 eksportir sedangkan pada tahun 2021 berkurang menjadi 330 eksportir.

Produk tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (STK), stik sintetis, papan kemas, wigs (rambut palsu), kerajinan kertas, dan kerajinan kayu adalah komoditas utama ekspor DIY yang diekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis, China, dan Belgia. Tabel di bawah ini adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2-161 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2018-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Volume (Juta kg)	59,24	53,57	64,17	103,51	132,51
Nilai (Juta US \$)	296,61	338,02	370,22	417,12	539,96
Komoditi	78	88	94	104	75
Negara	112	114	113	111	110
Eksportir	314	360	400	373	330

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2022

Tabel 2-162 Nilai Komoditas Ekspor di DIY Tahun 2017-2021 (dalam Juta US \$)

Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021
Pakaian Jadi Tekstil	67,17	87,77	117,43	95,81	123,44

Mebel Kayu	59,07	65,54	71,03	64,22	83,74
Sarung Tangan Kulit	42,63	36,03	34,00	44,26	48,58
STK Sintetis	10,33	12,79	15,66	11,56	11,81
Kerajinan Kulit	0,93	0,00	0,00	3,17	2,90
Minyak Kenanga	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a
Kerajinan Kayu	8,39	5,32	8,80	11,54	12,92
Kerajinan Kertas	9,15	5,77	9,48	3,94	11,53
Kerajinan Batu	6,14	5,32	5,51	5,55	5,02
Papan Kemas	7,67	3,66	11,06	12,22	28,25
Atsiri Daun Cengkeh	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a
Teh Hijau / Hitam	2,58	3,32	3,25	2,82	1,63
Kerajinan Perak	1,12	2,16	1,58	n/a	n/a
Produk Tekstil Lainnya	8,54	6,85	2,08	n/a	n/a
Kerajinan Bambu	0,63	0,58	0,20	n/a	n/a
Kulit Disamak	3,72	3,83	4,82	4,16	5,78
Arang Briket	1,53	1,65	0,00	n/a	n/a
Kerajinan Tanah Liat	1,07	0,92	0,67	n/a	n/a
Lampu	0,04	0,00	0,00	n/a	n/a
STK Kombinasi Puliurethan	0,06	0,04	0,06	n/a	n/a
Kerajinan Kain	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a
Komoditi Lainnya	65,84	94,92	51,60	16,16	9,98

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Meskipun ekspor DIY tumbuh secara positif, namun jika dibandingkan dengan angka ekspor nasional, nilai ekspor DIY masih relatif kecil. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi nilai ekspor DIY terhadap total ekspor *nonmigas* nasional hanya 0.25%. Nilai tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. DIY menempati urutan ke 27. Sebagai perbandingan, capaian tersebut masih lebih

rendah jika dibandingkan dengan kontribusi Jawa Timur yang mencapai 9,82% atau Jawa Tengah yang mencapai 4,68%.

Tabel 2-163 Persentase Kontribusi Ekspor *non* Migas berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Peran.(%) 2021
1	Jawa Barat	15.35
2	Kalimantan Timur	10.36
3	Jawa Timur	9.82
4	Riau	8.30
5	Banten	6.16
6	Kepulauan Riau	5.65
7	Sumatera Utara	5.32
8	D K I Jakarta	5.13
9	Sulawesi Tengah	5.09
10	Jawa Tengah	4.68
11	Kalimantan Selatan	4.14
12	Sumatera Selatan	2.37
13	Lampung	2.21
14	Papua	2.05
15	Sulawesi Tenggara	2.02
16	Maluku Utara	1.87
17	Kalimantan Tengah	1.41
18	Sumatera Barat	1.40
19	Bangka Belitung	1.22
20	Kalimantan Barat	1.03
21	Sulawesi Selatan	0.85
22	Kalimantan Utara	0.80
23	Jambi	0.54
24	Nusa Tenggara Barat	0.52
25	Sulawesi Utara	0.51
26	Sulawesi Barat	0.30
27	D.I. Yogyakarta	0.25
28	Bali	0.23

29	Nangroe Aceh Darusalam	0.23
30	Bengkulu	0.11
31	Maluku	0.02
32	Papua Barat	0.02
33	Nusa Tenggara Timur	0.02
34	Gorontalo	0.02

Sumber: Kementerian Perdagangan, Tahun 2022

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2017-2021 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY cenderung mengalami penurunan setelah tahun 2018. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2019 sebanyak 12.792 SIUP, menurun cukup drastis apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun 2018 yang tercatat sejumlah 52.199 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY pada periode 2017-2021 masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil. Sementara itu, sejak perijinan menggunakan OSS (Online Single Submission) terbitan SIUP menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. Data perkembangan jumlah SIUP berdasarkan golongan usaha di DIY pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-164 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2017-2021

No	Golongan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengusaha Besar	1.119	1.125	270	270	270*
2	Pengusaha Menengah	3.107	3.235	1.221	1.221	1.221*
3	Pengusaha Kecil	43.684	44.404	8.678	8.678	8.678*
4	Pengusaha Mikro	3.140	3.435	2.893	2.893	2.893*
Jumlah		51.050	52.199	12.792	12.792	12.792*

Keterangan: *) Data Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Jumlah toko modern hingga tahun 2021 sejumlah 704 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 344 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.

Tabel 2-165 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2017-2021

Jenis Toko	2017	2018	2019	2020	2021
Toko Modern	825	825	704	704	704
Pasar Tradisional	349	349	344	344	344

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

2.1.3.3.6 Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan sektor terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB DIY. Pada tahun 2021, kontribusi industri pengolahan mencapai 12,36%. Namun demikian, peran sektor ini mulai mengalami perlambatan terutama karena perekonomian DIY sudah bergerak ke arah sektor-sektor tersier yaitu jasa-jasa. Tahun 2021 sektor industri pengolahan tumbuh positif pada angka 0,37% atau lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai sebesar 2,82%.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penopang utama sektor industri di DIY. Jumlah IKM DIY yang terdiri dari industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta industri kerajinan berdasarkan data sangat sementara tahun 2021 adalah sebanyak 96.957 unit usaha atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 97.013 unit usaha. IKM DIY didominasi oleh

industri pangan dan industri kerajinan. Secara keseluruhan IKM DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu sebanyak 355.319 tenaga kerja pada tahun 2021. Data mengenai perkembangan IKM di DIY tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-166 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM	91.214	94.840	97.013	96.597	96.597*
Jumlah Unit Usaha	91.214	94.840	97.013	96.597	96.597*
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	330.508	351.425	360.242	355.319	355.319*
Nilai Investasi (Rp ribu)	1.208.563.798	1.949.721.275	2.084.560.293	1.992.422.000	1.992.422.000*
Nilai Produksi (Rp ribu)	12.463.257.536	12.749.270.525	13.041.847.616	12.465.398.000	12.465.398.000*
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp ribu)	8.620.133.355	7.335.019.754	7.537.466.747	7.204.311.000	7.204.311.000*

Keterangan: *) Data Sangat Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Industri-industri berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 244 sentra IKM yang tersebar di kabupaten/kota wilayah DIY dengan jumlah unit usaha sebanyak 12.992 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 33.207 orang. Jumlah sentra terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Bantul dengan persentase sebesar 30,74%. Diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul (29,1%), Kabupaten Sleman (18,44%), Kabupaten Kulon Progo (13,52%) dan persentase terkecil dimiliki oleh Kota Yogyakarta (8,2%). Berdasarkan kapasitas produksinya, Kabupaten Sleman merupakan yang tertinggi yakni sebesar 60.894.890 unit

dengan nilai investasi sebesar 36.360.016 ribu rupiah. Hal tersebut menandakan sentra IKM di Kabupaten Sleman lebih maju apabila dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lain. Kedepannya Kabupaten/Kota lainnya agar dapat mengikuti jejak Kabupaten Sleman dengan peningkatan investasinya akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru.

Tabel 2-167 Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Sentra	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Kapasitas Produksi (Unit)	Nilai Produksi (000)	Nilai BB/BP (000)
1	Kota Yogyakarta	20	340	1.884	22.367.922	3.924.900	190.982.597	91.942.189
2	Sleman	45	2.631	5.221	36.360.016	60.894.890	143.269.925	72.381.210
3	Bantul	75	5.152	13.256	27.333.455	9.051.953	72.314.951	36.247.480
4	Kulon Progo	33	2.430	4.578	21.643.522	9.656.699	120.216.329	60.697.647
5	Gunungkidul	71	2.439	8.268	40.827.067	23.894.230	171.733.630	85.337.815
	Jumlah	244	12.992	33.207	148.531.982	107.422.672	698.517.432	346.606.341

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2022

Industri pengolahan di DIY didominasi oleh industri makanan dan kerajinan. Namun demikian, setiap kabupaten/kota memiliki karakter potensi industri masing-masing. Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 golongan usaha industri yang cukup dominan di Bantul adalah industri makanan, industri barang dari kayu, industri pakaian jadi, industri gerabah, dan industri tekstil. Pada umumnya, industri yang berkembang di Bantul merupakan industri kerajinan lokal yang menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat tapi memiliki daya saing yang cukup tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh industri berbasis pertanian (agroindustri) dan industri makanan. Usaha industri yang cukup strategis bagi Gunungkidul adalah pengolahan barang dari kayu, anyaman bambu, dan lainnya.

Jenis usaha industri yang paling banyak di Kabupaten Kulon Progo adalah industri gula kelapa/gula jawa/gula merah/gula semut. Usaha industri ini menggunakan bahan baku utama dari nira/aren kelapa lokal yang banyak diusahakan di wilayah Kulon Progo. Sentra jenis usaha ini banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Kokap dan kecamatan lain seperti Girimulyo, Lendah, dan Kalibawang. Meskipun seringnya adalah usaha sampingan, permintaan ekspor komoditas ini cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan jenis industri makanan. Selanjutnya, untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, perekonomian sudah didominasi oleh sektor jasa seperti penyediaan jasa akomodasi, transportasi dan perdagangan. Namun demikian, beberapa industri makanan masih cukup banyak ditemui di kawasan perkotaan seperti industri bakpia di kawasan Pathuk.

2.1.3.3.7 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi semestinya memberikan manfaat bagi dua daerah yang terlibat. Bagi daerah tujuan, dengan adanya transmigrasi maka potensi lahan yang sebelumnya belum tergarap dapat bernilai tambah oleh aktivitas pertanian atau perkebunan yang dilakukan oleh para transmigran. Sementara itu, bagi DIY penyelenggaraan transmigrasi menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kesempatan kerja atau keterbatasan lahan untuk dibudidayakan. Secara nasional kegiatan transmigrasi juga berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana, sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan

permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran juga telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui mekanisme KSAD (Kerjasama Antar Daerah). Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih 167 KK terdiri dari 519 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2018 hingga 2021 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 53 KK, sedangkan jumlah terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 25 KK. Berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY selama 2017-2021.

Tabel 2-168 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	n/a	n/a	10	30	10	30	0	0	5	16
Sleman	n/a	n/a	23	72	13	43	0	0	0	0
Bantul	n/a	n/a	28	95	20	54	0	0	5	16
Kulon Progo	n/a	n/a	16	44	7	24	0	0	0	0
Gunungkidul	n/a	n/a	10	28	15	50	0	0	5	17
Jumlah	48	144	87	269	65	201	0	0	15	49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2022

Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sulawesi Barat menjadi tujuan utama transmigran asal DIY pada tahun 2021 (66,67%) diikuti dengan Provinsi Kalimantan Tengah (33,33%) . Sebelumnya pada tahun 2019, jumlah transmigran paling banyak

ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebesar 50,77%. Adapun pada tahun 2020 diketahui bahwa DIY tidak melakukan pemberangkatan transmigran akibat adanya Pandemi Covid-19. Data perkembangan dan distribusi transmigran asal DIY menurut provinsi tujuan tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-169 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2017 - 2021

Daerah Tujuan	2017		2018		2019		2020		2021	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Aceh			10	11.49%	2	3.08%	Tidak ada pemberangkatan Transmigran akibat pandemi Covid-19			
Sumatera Utara										
Sumatera Barat			10	11.49%						
Sumatera Selatan	18	37.50%								
Bengkulu										
Kalimantan Utara			27	31.03%	33	50.77%				
Kalimantan Barat			8	9.20%						
Kalimantan Tengah									5	33.33%
Kalimantan Timur			10	11.49%						
Kalimantan Selatan										
Sulawesi Utara										
Sulawesi Barat			5	5.75%	15	23.08%			10	66.67%
Gorontalo	9	18.75%	8	9.20%						
Sulawesi Tengah	9	18.75%	4	4.60%						
Sulawesi Selatan										
Sulawesi Tenggara	12	25.00%	5	5.75%	15	23.08%				

JUMLAH	48	100%	87	100%	65	100%		15	100%
--------	----	------	----	------	----	------	--	----	------

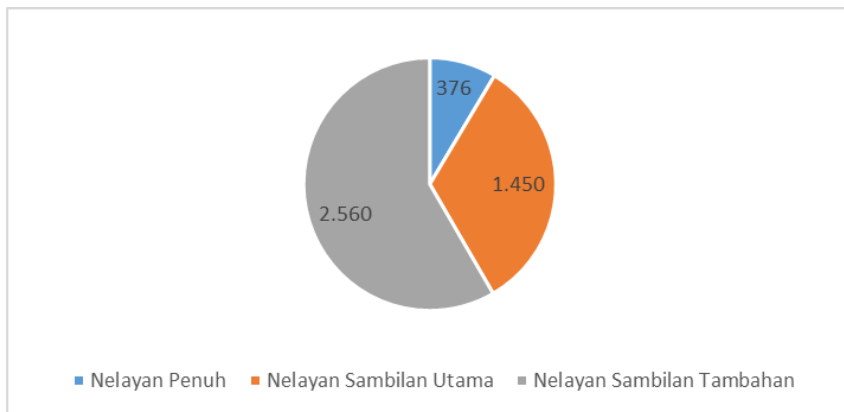
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2022

2.1.3.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan ikan serta usaha di bidang perikanan di DIY sangat dipengaruhi oleh kondisi alam DIY di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Panjang pantai di DIY sepanjang 113 Km terbentang dari ujung barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah di ujung timur. Pantai di DIY berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo 25 km, Kabupaten Bantul 17 km, dan Kabupaten Gunungkidul 71 km. Dengan kondisi alam yang dimiliki tersebut, DIY mempunyai potensi perikanan tangkap laut yang besar. Potensi perikanan tangkap lestari di laut di selatan DIY mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan potensi yang lebih luas di Samudera Hindia mencapai 906.340 ton per tahun.

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sangat berperan terhadap perikanan tangkap laut di DIY, antara lain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul dan 18 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya. Kondisi cuaca dan perairan laut yang berubah-ubah setiap tahunnya berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap laut. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta yang belum beroperasi, diproyeksikan sebagai sentra perikanan tangkap juga berpengaruh pada belum optimalnya produksi perikanan tangkap DIY. Belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarta disebabkan oleh belum terbangunnya breakwater sepanjang kurang lebih 400 meter, saat ini sedang dalam usulan penyelesaian pembangunan melalui mekanisme KPBU, selain itu juga telah diusulkan dalam Major Project Musrenbangnas 2022, namun masih menunggu hasil kajian sedimentasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, agar menjadi program prioritas di Kementerian PUPR di tahun 2022.

Hal yang cukup berpengaruh pada sektor perikanan di DIY adalah sumberdaya manusia, yaitu nelayan. Terdapat tiga tipe nelayan di DIY yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan penuh merupakan nelayan yang dijadikan sebagai profesi dan tidak memiliki keahlian lain. nelayan sambilan utama adalah Orang yang pekerjaan utama sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Nelayan sambilan tambahan merupakan orang yang memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan. Di DIY, nelayan sambilan tambahan mendominasi dengan jumlah 2.560 orang. Hal ini berarti walaupun sebagian besar pendapatannya diperoleh dari hasil penangkapan ikan di laut, namun masih memiliki pekerjaan lain selain nelayan, seperti bertani.

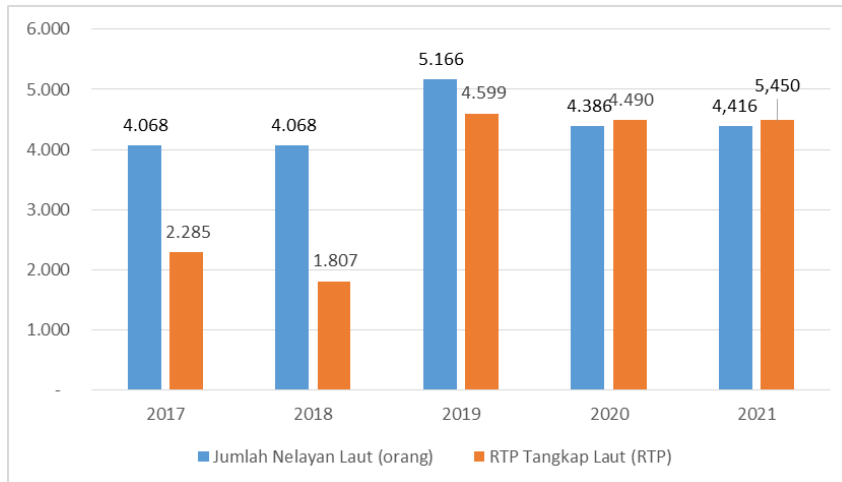


Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-67 Grafik Proporsi Nelayan DIY Tahun 2021 (orang)

Jumlah nelayan DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sempat menurun dari 5.504 orang pada tahun 2016 menjadi 4.068 pada tahun 2017 dan 2018, jumlah nelayan DIY kembali meningkat pada tahun berikutnya. Jumlah nelayan DIY pada tahun 2019 tercatat sejumlah 5.166 orang dan kembali menurun menjadi 4.386 orang pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah nelayan laut di DIY kembali meningkat menjadi 4.416

orang. Sementara itu, Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap Laut menunjukkan adanya penurunan dari 2.285 RTP pada tahun 2017 menjadi 1.807 RTP di tahun 2018. Peningkatan cukup tajam terjadi pada tahun 2019 dengan 4.599 RTP, dan kembali turun menjadi 4.490 RTP pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga perikanan laut di DIY kembali meningkat menjadi 5.450 RTP.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-68 Perkembangan Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut DIY Tahun 2017 - 2021

Tabel 2-170 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2016-2020

Jumlah Nelayan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Nelayan Laut	5.504	4.068	4.068	5.166	4.386
Nelayan Penuh (orang)	1.256	870	870	376	376
Nelayan Sambilan Utama (orang)	3.525	2.654	2.654	1.459	1.450
Nelayan Sambilan Tambahan (orang)	723	544	544	3.331	2.560
Jumlah Nelayan Perairan Umum					

Jumlah Nelayan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Daratan					
Nelayan Sambilan Utama (orang)	-	-	2.302	3.164	3.319
Rumah Tangga Perikanan	4.663	3.959	4.109	14.822	14.572
Perikanan Laut (RTP)	2.285	2.285	1.807	4.599	4.490
Perairan Umum (RTP)	2.378	1.674	2.302	10.223	10.082

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Jumlah kapal penangkap ikan di laut DIY pada tahun 2021 tercatat sejumlah 553 unit. Jumlah ini berkurang 33 unit dibanding tahun 2019. Armada kapal penangkapan ikan DIY didominasi oleh perahu motor tempel. Perahu motor tempel pada tahun 2021 tercatat sejumlah 495 unit. Penggunaan armada berupa perahu tanpa motor di DIY menurun tajam pada tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari faktor keamanan dan keefektifan penggunaan armada tersebut. Sementara itu, jumlah kapal motor di DIY tercatat sebanyak 58 unit. Jumlah kapal penangkap ikan inkamina yang berkapasitas kurang dari 30 GT (Gross Ton) tahun 2021 sebanyak 50 (lima puluh) kapal yang beroperasi sedangkan yang berkapasitas lebih dari 30 GT (Gross Ton) tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) kapal yang beroperasi.

Tabel 2-171 Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2016-2021

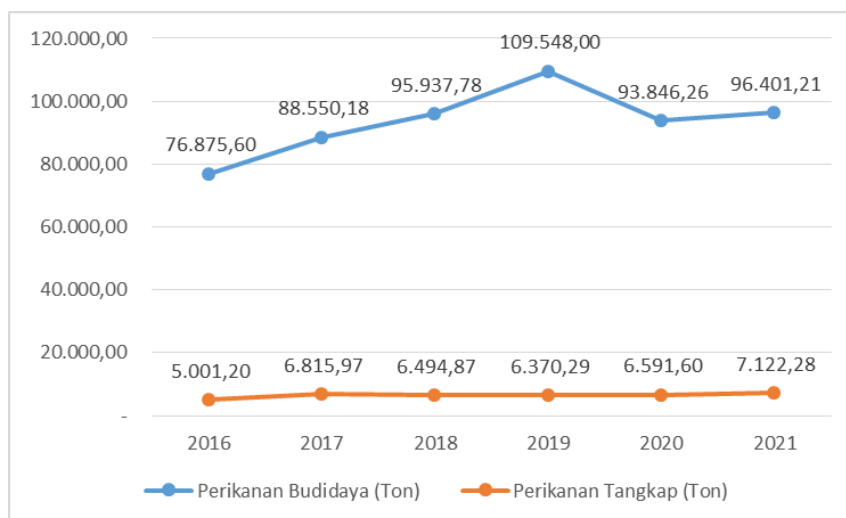
Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran (Unit)	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perahu Tanpa Motor (Jukung)	5,00	414,00	20,00	20,00	n/a	n/a
Perahu Motor Tempel	427,00	366,00	427,00	495,00	495,00	495,00
Kapal Motor	58,00	48,00	52,00	86,00	58,00	58,00

Kapal Motor <5GT	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
Kapal Motor 5-10 GT	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
Kapal Motor 11-20 GT	-	-	38,00	38,00	38,00	38,00
Kapal Motor 21-30 GT	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
Kapal Motor 31-40 GT	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00
Jumlah	490,00	828,00	485,00	586,00	553,00	553,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Selain perikanan tangkap di laut, produksi perikanan tangkap DIY juga didukung oleh produksi perikanan tangkap perairan umum di telaga, sungai, dan waduk. Di DIY hampir mencapai 95% penangkapan ikan di sungai mendominasi produksi perairan umum, komoditas yang banyak ditangkap adalah nila dan lele.

Pola perkembangan produksi perikanan tangkap laut DIY cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir hal ini juga terjadi pada produksi perikanan tangkap perairan umum. Hal ini dikarenakan produksi perikanan tangkap laut mendominasi sumbangan terhadap produksi perikanan tangkap secara keseluruhan. Perkembangan produksi perikanan DIY disajikan dalam grafik di bawah ini



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

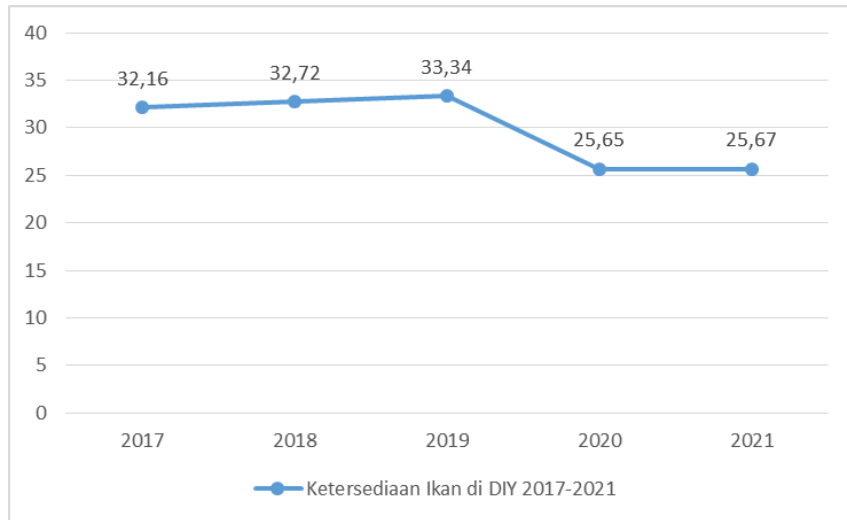
Gambar 2-69 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2016-2021

DIY juga memiliki luas daratan yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan perikanan darat, baik air tawar maupun air payau. Budidaya perikanan air tawar didominasi oleh budidaya sistem kolam, baik kolam permanen atau kolam terpal yang mencapai lebih dari 96% kontribusi produksi perikanan budidaya. budidaya perikanan air tawar juga memanfaatkan sawah dengan sistem tumpangsari atau dikenal dengan minapadi dan udang galah padi (ugadi) selain di kolam. Sementara itu, budidaya di air payau dilakukan di tambak yang merupakan kontributor terbesar kedua produksi perikanan budidaya DIY.

Lele merupakan komoditas yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pembudidayaannya yang relatif lebih mudah serta permintaan untuk konsumsi yang tinggi sehingga harganya stabil. Selain lele, komoditas nila dan gurami juga penyumbang terbesar produksi perikanan budidaya di kolam. Sementara itu, komoditas udang vaname merupakan hasil produksi budidaya air payau di tambak.

Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 14,33%, sedangkan perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 2,7%. Penurunan perikanan budidaya tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda di awal tahun 2020 menyebabkan penurunan permintaan dari konsumen yang berimbas pada turunnya produksi perikanan. Sedangkan pada tahun 2021, perikanan budidaya tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,72% dibanding tahun sebelumnya. Hal serupa juga dialami oleh perikanan tangkap yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,05% dibanding tahun 2020. Perbandingan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di tahun 2020 adalah 1:14. Hal ini dikarenakan produksi tangkap hanya mengandalkan PPP Sadeng yang mempunyai kapal kapal besar, sedangkan PPI yang lainnya hanya menggunakan kapal jukung untuk armada kapalnya. Harapannya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta bisa segera beroperasi dan juga pembangunan Pelabuhan Perikanan Gesing Gunungkidul dapat segera terwujud sehingga mampu mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY.

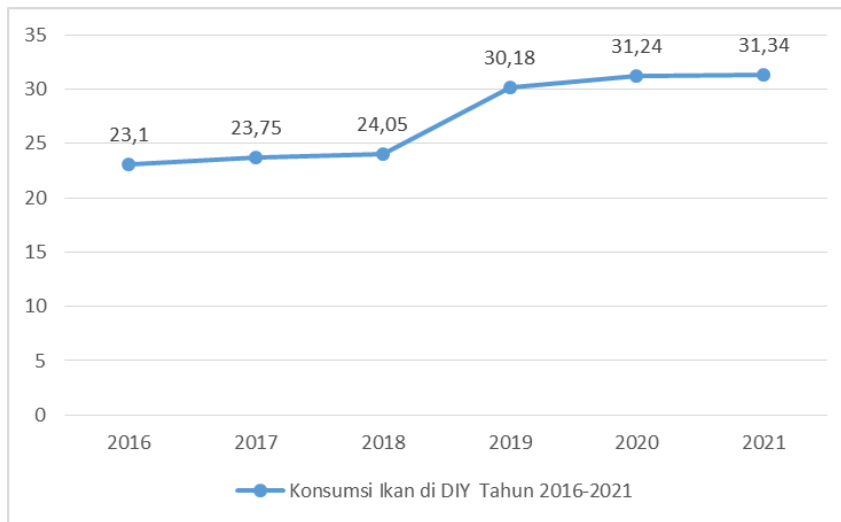
Ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami peningkatan sejak 2017-2019, namun kemudian menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun 2019-2021. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-70 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2017-2021

Penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diinisiasi Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan ikan. Peningkatan konsumsi ikan sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-71 Tingkat Konsumsi Ikan di DIY Tahun 2016 - 2021 (Kg/Kapita/Tahun)

2.1.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah DIY bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a) perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b) perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas Paniradya Kaistimewaan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan Badan Penghubung Daerah;
- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- e) penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri atas:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, terdiri atas: 1. Biro Tata Pemerintahan; 2. Biro Hukum; 3. Biro Organisasi; dan 4. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol.
- c) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 2. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.
- d) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, terdiri atas: 1. Biro Bina Mental Spiritual; dan 2. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Jabatan fungsional.

2.1.3.4.1.1 Jumlah Produk Hukum Daerah

Selama kurun waktu lima tahun sejak 2017, ratusan produk hukum telah dihasilkan oleh Sekretariat Daerah DIY sebagai bentuk pelaksanaan ketugasannya. Data mengenai jumlah produk hukum daerah DIY yang dihasilkan selama 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-172 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2021*

No	Produk Hukum	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perda Keistimewaan	3	1	0	0	0
2	Perda yang sudah diterbitkan	9	15	14	12	8
3	Peraturan Gubernur	83	138	82	123	129*
4	Keputusan Gubernur	288	328	321	399	469*
5	Keputusan Gubernur	118	153	176	123	284*

No	Produk Hukum	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	tentang Pembentukan Tim					
6	Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia	18	23	22	18	13
7	Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin	71	70	27	113	44
8	Instruksi Gubernur	2	3	4	7	39
9	Surat Edaran Gubernur	18	13	12	12	42
10	Keputusan Sekretaris Daerah	42	22	42	71	94
11	Perjanjian Gubernur	10	18	4	11	11
12	Perjanjian Sekda	40	52	23	51	39
13	Keputusan Wagub	0	0	0	0	0
14	Keputusan Asisten	0	1	0	0	0
	Jumlah	702	836	727	940	1.172*

*) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.3.4.1.2 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berperan sebagai Lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI. Penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup 9 variabel dan 19 indikator. Adapun 9 variabel tersebut, yaitu: Standar Pelayanan Publik; maklumat layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Sarana dan Prasarana, Fasilitas; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian Kinerja; Visi, Misi dan Moto Pelayanan; dan Atribut. Nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah 100 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 0-50 merupakan tingkat kepatuhan rendah (zona merah); 51-80 merupakan tingkat kepatuhan sedang (zona kuning); dan 81-100 merupakan tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).

Selama 2016-2021, DIY memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. Pada Tahun 2016, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY adalah sebesar 43,57 pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi 71,15 pada tingkat kepatuhan sedang pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2018 dan 2021, DIY mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut-turut sebesar 95,65 dan 97,05

Tabel 2-173 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY, 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	43,57 (Rendah)	71,15 (Sedang)	95,65 (Tinggi)	n/a	n/a	97,05 (Tinggi)

Sumber: ORI, 2016-2021

2.1.3.4.1.3 Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan untuk mendapat gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam SKM terdapat 4 kategori nilai, yaitu: 1) Nilai interval 25,00-64,99 termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan D; 2) Nilai interval 65,00-76,60 termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan C; 3) Nilai interval 76,61-88,30 termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan B; dan 4) Nilai Interval 88,31-100,00 termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan A.

Perkembangan selama 2016-2021 menunjukkan bahwa nilai SKM Pemda DIY cenderung meningkat dari sebesar 78,26 pada Tahun 2016 naik menjadi 84,73 pada Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat total 95 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) telah melakukan SKM yang mana 17 UPP (18%) memperoleh mutu pelayanan Sangat Baik (A) dan 78 UPP (82%) memperoleh mutu pelayanan Baik (B).

Tabel 2-174 Survei Kepuasan Masyarakat, 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,26	77,97	79,61	82,69	83,64	84,73

Sumber : Biro Organisasi Setda DIY, 2021

2.1.3.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD melakukan penjangkangan aspirasi masyarakat.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda, mengajukan usul rancangan perda, dan menyusun program pembentukan perda bersama gubernur. Program pembentukan perda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berikutnya, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur. Fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD, membahas rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Selanjutnya, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan gubernur, pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan

tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara kelembagaan, DPRD DIY periode 2019-2024 terdiri dari 55 orang anggota yang merupakan utusan dari 10 partai politik yang terbagi dalam 7 fraksi, 4 komisi, dan 4 badan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD DIY dibantu oleh Sekretariat DPRD DIY sebagai unsur pelayanan dan pemberian dukungan. Sekretariat DPRD DIY memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan untuk menunjang program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY. Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD DIY dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD DIY dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD DIY, Sekretariat DPRD DIY menyediakan kebutuhan sarana, diantaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya. Berdasarkan telaah dan kajian yang telah dilakukan, gedung DPRD yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta sudah tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD DIY dan tidak dimungkinkan untuk direhabilitasi sesuai kebutuhan karena merupakan bangunan *heritage*.

2.1.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* process. Hal ini berarti perencanaan daerah tidak hanya memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, melainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Saat ini pemerintah telah menggunakan pendekatan *money follow program* yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran ini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik, yaitu penanganan secara

menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan c.) spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

2.1.3.5.2 Urusan Keuangan

Transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

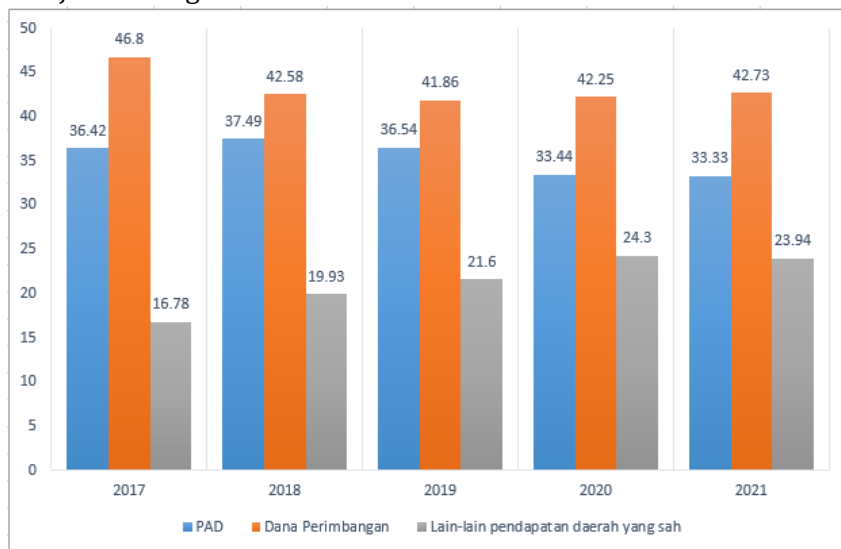
Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hingga tahun 2021, Pemda

DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menyambut baik hal tersebut dengan menyusun peraturan peta jalan ETPD yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 81/KEP/2022 Tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah DIY.. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi belanja daerah..

Terkait pendapatan daerah, hingga kini Dana Perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. Proporsi Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY setidaknya selama kurun waktu 2016-2020 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap Pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY. Sementara itu, PAD DIY terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2020. Adapun PAD DIY berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berbeda dengan PAD DIY, pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat terus meningkat sepanjang 2016-2020. Pendapatan ini antara lain berasal dari hibah serta dana

penyesuaian dan otonomi khusus. Gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen di DIY tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.



Sumber: BPKA DIY, 2016-2021, diolah

Gambar 2-72 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY (%), 2016-2021

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sistem tersebut dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah. Pembentukan BLUD diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemda DIY diatur dalam Peraturan

Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2021, Pemda DIY memiliki 9 (sembilan) BLUD, yakni SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, SMKN 3 Wonosari, Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), RSJ Grhasia, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY, Balai Laboratorium dan Kalibrasi Kesehatan (BLKK) DIY, Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos) , dan RS Khusus Paru Respira. Jumlah BLUD tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya BLUD yang berasal dari SMK Negeri karena terdapat beberapa SMK yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan BLUD, baik persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Total jumlah aset mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 276.447 barang atau 8,5%. Pada tahun 2020 jumlah barang yang merupakan aset DIY sebanyak 3.248.384 yang terdiri dari aset pengguna 3.245.216 barang (dengan nilai perolehan Rp. 11.637.502.126.897,00) dan aset pengelola 3.168 barang (dengan nilai perolehan Rp. 974.055.947.161,00). Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.524.831 barang yang terdiri atas aset pengguna 3.521.730 barang (nilai perolehan Rp13.245.163.989.328,40) dan aset pengelola 3.101 barang (nilai perolehan Rp775.180.466.494,00). Data mengenai jumlah aset DIY disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-175 Jumlah Aset di Pengguna dan Pengelola

Tahun	Pemda DIY*		Pengguna		Pengelola	
	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
2021	3.524.831	14.020.344.455.822,40	3.521.730	13.245.163.989.328,40	3.101	775.180.466.494
2020	3.248.384	12.611.558.074.058,10	3.245.216	11.637.502.126.897	3.168	974.055.947.161
2019	3.021.082	11.741.545.913.238,00	3.019.419	10.743.032.279.959	1.663	998.513.633.279

sumber : BPKA, 2022

Aset tersebut kemudian dioptimalkan melalui kemitraan yang terdiri dari pinjam pakai dan sewa. Pada tahun 2021 terdapat 185 barang yang dimitrakan dengan perolehan Rp139.223.912.185,00.

Tabel 2-176 Jumlah Aset yang Dioptimalkan

Tahun	Kemitraan	
	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
2021	185	139.223.912.185,00
2020	243	248.152.811.375,00
2019	255	308.784.539.571,00

sumber : BPKA, 2022

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari laba BUMD yaitu PT Tarumartani, PT AMI, PT Bank BPD DIY, dan ASKRIDA, BUKP, dan Perumda Tirtatama. Persentase deviden masing-masing BUMD terhadap penyetaraan modal bervariasi. Pada tahun 2021, persentase deviden terhadap penyertaan modal terbesar terdapat pada BUKP sebesar 31,93% dan terkecil terdapat pada PT. AMI sebesar 3,35%.

Tabel 2-177 Persentase Deviden BUMD terhadap Penyetaraan Modal, 2017 - 2021

BUMD	2018	2019	2020	2021
PT TARUMARTANI	0%	5,84%	0,94%	7,68%
BPD DIY	15,53%	14,77%	13,54%	10,68%
PT AMI	3,50%	3,91%	3,81%	3,35%
ASKRIDA	32,56%	37,69%	15,05%	14,76%
BUKP	26,70%	30,16%	30,13%	31,93%
PERUMDA TIRTATAMA	n/a	n/a	n/a	n/a

sumber : BPKA DIY, 2022

2.1.3.5.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.1.3.5.3.1 Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara

(ASN) sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu berkegas menjadi pionir dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Tabel 2-178 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021

No.	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	44	47	3
2.	Jabatan Administrator	215	225	10
3.	Jabatan Pengawas	640	676	36
4.	Jabatan Pelaksana	3.139	7.165	4.026
5.	Jabatan Fungsional	5.728	8.091	2.363
6.	CPNS	738	0	0
	Jumlah	10.504	16.204	6.438

Sumber: BKD DIY, 2022

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified system*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang

dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

a. Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memerhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggung jawab, hak, syarat-syarat dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban yang kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekrutmen digunakan sistem CAT (*computer assessment test*) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

b. Pengembalian Pegawai

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan tugas belajar, ijin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

c. Promosi

Promosi yang dilakukan disini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang

dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilaksanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggungjawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

e. Disiplin

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penialain pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir.

Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

f. Pensiun

Sumber daya manusia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal yang penting diperhatikan sebagai bentuk antisipatif agar tidak menjadi permasalahan yang mendalam adalah kebutuhan pengadaan ASN karena diindikasikan terdapat gap antara jumlah ASN yang ada

terhadap kebutuhan. Kesenjangan antara jumlah ASN terhadap kebutuhan pegawai selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 2-179 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1.	2017	12.712	24.330	-11.618	52,25
2.	2018	11.387	16.204	-4.817	70,27
3.	2019	11.347	16.204	-4.857	70,02
4.	2020	10.558	16.204	-5.646	65,16
5.	2021	10.504	16.204	-5.700	64,48

Sumber: BKD DIY, 2022

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menandai momentum peningkatan profesionalisme birokrasi. UU ASN mengamanatkan pengembangan ASN melalui pendekatan merit system. Problem saat ini, Pemda belum memiliki prosedur sistematis (pola karir) yang mampu menyesuaikan kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam manajemen ASN secara terencana dan sistematis adalah manajemen talenta atau talent management.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di DIY pada tahun 2018 mendapatkan skor 324,5 termasuk dalam kategori “III” dengan predikat “baik”. Pada tahun 2019 skor sedikit turun menjadi 313,5 dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori III dengan predikat “baik”. Adapun pada tahun 2020 capaian skor sistem merit meningkat menjadi “342”, capaian ini termasuk dalam kategori “IV” dengan predikat “sangat baik”. Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di DIY masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel 2-180 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2020

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2018	324.5	III	Baik

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2019	313.5	III	Baik
2020	342	IV	Sangat Baik
2021	Tidak dilakukan penilaian		

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Pemda DIY merumuskan kebijakan Manajemen Talenta sebagai bagian dari Kebijakan Strategis untuk Sektor Aparatur. Dalam manajemen talenta. Pemda DIY menyiapkan database potensi dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, dan Pengawas melalui penilaian Potensi dan Kompetensi (*talent pool*). Penilaian potensi dan kompetensi PNS melalui *Assessment Center* bukan hanya sekedar untuk promosi jabatan. melainkan berfungsi untuk mengetahui profil individual *competence* serta standar kompetensi jabatan dari masing-masing PNS. Adanya database profil potensi dan kompetensi masing-masing PNS ini akan memudahkan untuk rencana-rencana pengembangan SDM kedepan serta rentetan panjang seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang kosong tidak lagi diperlukan.

Permasalahan utama yang terdeteksi yaitu masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme serta belum sesuainya kebutuhan atau penempatan dalam jabatan, kinerja/produktivitas yang belum optimal, integritas PNS, serta sistem remunerasi yang belum layak dan belum berbasis penilaian kinerja. Manajemen ASN dengan PNS sebagai unsur utamanya merupakan lokomotif untuk menggerakkan reformasi birokrasi. Karena itu, prasyarat reformasi birokrasi adalah adanya pengelolaan PNS yang efektif dan efisien. Salah satunya dengan menciptakan pengelolaan kepegawaian yang berbasis merit. Dengan adanya reformasi birokrasi maka diharapkan akan mampu tercipta tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan profesionalitas PNS, UU ASN telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen ASN. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang berintegritas dan profesional.

Salah satu upaya pembinaan profesionalitas PNS adalah melalui pengukuran yang jelas tentang aspek-aspek kemampuan kerja PNS sesuai dengan kebutuhan dalam setiap jabatan yang diembannya. Jika merujuk pada tugas dan fungsi organisasi, masih banyak perilaku kompetensi pekerjaan di lingkungan PNS yang belum terstandardisasi. Pemetaan ASN yang meliputi informasi ASN yang berbasis pada aspek potensi dan kompetensi serta ukuran objektif diperlukan untuk mempermudah pemerintah dalam pendayagunaan pegawai ASN. Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan semakin luas maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan SDM aparatur tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (*competency based human resource development*) tapi lebih mengarah kepada pengembangan *talent pool* atau *talent based human resource development* yang akan mampu menghasilkan tidak hanya birokrat yang profesional tapi juga birokrat yang memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana tuntutan masyarakat dan amanat peraturan perundangan, maka dibutuhkan berbagai upaya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi yang efektif antar pengambil kebijakan dan antar pelaksana diklat aparatur sehingga program-program diklat lebih terintegrasi dan dijamin mutu pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Dengan demikian ASN akan menjadi sumber daya utama pembangunan daerah serta dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang terumuskan di dalam RPJPD dan RPJMD.

2.1.3.5.3.2 Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2021-2024

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2024). Berdasar Data dari BKD DIY (Januari 2022), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut.

Tabel 2-181 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024

Eselon	Formasi	Pensiun s/d 2021	Pensiun s/d 2022	Pensiun s/d 2023	Pensiun s/d 2024	Total Pensiun s/d 2024
I		0	0	1	0	1
II		3	2	3	5	13
III		31	34	28	17	110
IV		79	55	47	52	233
V		0	0	0	0	0
Jumlah		113	91	79	74	357

Sumber: BKD DIY, 2022

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukanali, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui *assessment* atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

2.1.3.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif dan valid. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah, sebuah kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. DIY melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya.

Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kelitbangannya di DIY untuk

berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas entitas kelitbangan di DIY yang terdiri ASN Jabatan Fungsional Peneliti baik dari Pemda DIY maupun instansi vertikal, Dunia Akademisi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kelitbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Upaya mewujudkan sinergisitas tersebut telah diinisiasi oleh Pemda DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya rakor kelitbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kelitbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan DIY.

2.1.3.5.5 Urusan (Unsur) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat Kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 Kapanewon dan 48 kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah

menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 Kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerjasama daerah.

2.1.3.5.6 Urusan (Unsur) Penghubung

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, Badan Penghubung Daerah DIY (Banhubda DIY) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Banhubda DIY mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Badan;
- b) penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c) pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta;
- d) pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta;
- e) pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah;

- f) penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
- g) penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- h) penyelenggaraan keprotokolan;
- i) penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- k) pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Jumlah orang dilayani oleh Banhubda DIY pada tahun 2021 tercatat sejumlah 390 orang dan 360 orang diantaranya ingin dilayani kembali sehingga tercapai indeks 92,31. Pelayanan Banhubda DIY meliputi pelayanan penginapan di Griya Jogja (berlokasi di Menteng Jakarta Pusat) dan Wisma Jogja (berlokasi di Pedati Jakarta Timur) serta pelayanan kendaraan bagi aparatur Pemda DIY yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat Pemda DIY. Penginapan dapat diakses oleh semua masyarakat dengan tarif sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Banhubda DIY menyediakan dukungan SDM pengelolaan penginapan, dari tenaga administrasi, kebersihan, dan tenaga keamanan. Selain itu, Banhubda DIY juga menyediakan sarana prasarana pendukung seperti terpeliharanya bangunan, ketersediaan amenities (sabun, shampoo, dan sandal kamar), dan sarapan pagi. Di masa Pandemi Covid-19, Banhubda DIY menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer, pemeriksaan suhu bagi tamu serta himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang dipasang di tempat-tempat strategis. Kepada pengunjung juga diberikan kuesioner tambahan yang berfungsi sebagai *screening* dan juga sebagai antisipasi *tracing* apabila ada petugas Banhubda DIY yang terpapar Covid-19.

Kuesioner dapat dipilih berupa fisik atau virtual dengan mengisi *link* dan *scan barcode*.

2.1.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan

peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas publik dan pemantapan implementasi sistem merit, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan kegiatan pengawasan yang secara khusus menyorot aspek atau isu-isu tertentu, diantaranya adalah penilaian mandiri reformasi birokrasi untuk mengukur ketercapaian indikator reformasi birokrasi. Terkait sistem merit, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan pengawasan terhadap reviu atas rotasi, promosi, mutasi ASN yang merupakan salah satu indikator dinilai dalam Manajemen ASN.

Dalam rangka mendukung sasaran daerah, Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, secara reguler dilakukan pengawasan komprehensif meliputi 5 aspek, yaitu: tugas dan fungsi, keuangan,

sarana dan prasarana, dan sistem pengawasan intern. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa tata kelola pemerintahan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Daerah DIY, melalui Inspektorat DIY menetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dengan indikator kinerja Persentase tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK dan Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK.

Sampai dengan bulan Desember 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler serta pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021 terhadap 38 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2021 telah diberikan sejumlah 1.212 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 1.039 (85,73%). Pada bulan Desember 2021 diterbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang menambah jumlah rekomendasi yang diberikan sehingga mempengaruhi pada jumlah perhitungan prosentase penyelesaian. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tindak lanjut pemeriksaan paling lama 60 hari setelah hasil pengawasan atau pemeriksaan diserahkan, sehingga untuk LHP yang terbit bulan Desember belum ditindaklanjuti secara keseluruhan.

Tabel 2-182 Hasil dan Tindaklanjuti atas Temuan Inspektorat DIY

No.	Uraian	INSPEKTORAT				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LHP Terbit	163	154	175	208	150
2	Temuan	269	378	518	725	566
3	Rekomendasi	671	958	1284	1942	1319
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut						
1	Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%	99,90%	100%	96,4%
2	Dalam Proses Ditindaklanjuti	-	-	0,10%	-	1,4%

No.	Uraian	INSPEKTORAT				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Belum Ditindaklanjuti	-	-	-	-	2,2%

Sumber: Inspektorat DIY, 2022

Tabel 2-183 Hasil dan Tindaklanjutan atas Temuan BPK RI

No.	Uraian (akumulasi tahun sebelumnya)	BPK RI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LHP Terbit	41	43	45	50	54
2	Temuan	454	477	503	527	551
3	Rekomendasi	858	933	998	1055	1115
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut						
1	Selesai Ditindaklanjuti	72,35%	77,43%	80,12%	86,37%	92,41%
2	Dalam Proses Ditindaklanjuti	19,29%	22,06%	16,29%	13,27%	7,50%
3	Belum Ditindaklanjuti	8,36%	0,43%	5,57%	0,27%	
4	Tidak Bisa Ditindaklanjuti	-	0,11%	0,09%	0,09%	0,09%

Sumber: Inspektorat DIY, 2022

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021 antara lain adalah:

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Kegiatan pengusutan.
- d. Melakukan evaluasi LAKIP.
- e. Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- f. Review atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY.
- g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

- i. Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :
- j. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- k. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Pencermatan RKA SKPD.
- m. *Consulting dan Quality Assurance*.
- n. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- o. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Selain ketugasan yang telah dipaparkan di atas, Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis khususnya terkait ketugasan mandatory seperti pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan Covid-19, vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional;
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis;
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat

Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

- e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
- f. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- g. Mengkoodinasikan pemenuhan capaian indikator area intervensi pencegahan korupsi KPK yang meliputi : Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
- h. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- i. Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- j. Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- k. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- l. Monev Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Pemerintah

Daerah DIY terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan *outcome*.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap obyek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

2.1.3.7 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia
2. Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
3. Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai

wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini karena karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai wakil gubernur.

Undang-Undang Keistimewaan No 13 Tahun 2012 menyebutkan terdapat lima kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY yang meliputi: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman

dan kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan.

Tabel 2-184 Capaian Kinerja Urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2021

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022
	IKU KEISTIMEWAAN										
1	Sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,04
2	Sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	54,44
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Urusan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	92,31	91,30
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	7.919	7.928	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877

Sumber: Bappeda, 2022

2.1.3.7.1 Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara khusus menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY adalah warga negara Republik Indonesia yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

Program dan kegiatan dana keistimewaan untuk urusan ini dilaksanakan kembali pada tahun 2022. Pada urusan keistimewaan tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki 1 program (Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur), 1 kegiatan (Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan 4 subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, dan Sekretariat DPRD DIY.

2.1.3.7.2 Urusan Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diatur dalam Peraturan

Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda ini mengaktualisasikan keistimewaan dalam kelembagaan Pemerintah DIY. Seluruh kewenangan baik yang merupakan amanah Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun amanah dari Undang-Undang keistimewaan diwadahi dalam bentuk organisasi dan perangkat daerah.

Penataan kelembagaan asli daerah dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan lalu diperbaharui dengan Peraturan Gubernur DIY No. 13 Tahun 2022 yang mengatur Penugasan Urusan Keistimewaan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan keistimewaan di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Kalurahan. Selain itu juga terdapat Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Hal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya Perda dan Perbup/Perwal di kabupaten/kota DIY pada tahun yang sama tentang SOTK Kelembagaan dan Kalurahan.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. Tindak lanjut di kabupaten/kota yaitu dengan membuat Peraturan Kalurahan dan pengukuhan lurah. Kabupaten yang sudah melaksanakan pengukuhan yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Januari 2020, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Juni 2020, Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Desember 2020.

2.1.3.7.3 Urusan Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat empat indikator capaian sasaran yakni:

1. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan
2. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum
3. Peningkatan penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi nasional, internasional di Taman Budaya
4. Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, islam dan asing baik Eropa maupun Asia, pengelolaan cagar budaya/budaya benda merupakan hal yang sangat penting bagi DIY. Dalam hal ini indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dipandang mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-185 Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Jumlah
1	Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya	14
2	Benda Cagar Budaya	373
3	Bangunan Cagar Budaya	376
	Jumlah	763

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

DIY merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah museum yang cukup banyak. Sedangkan terkait dengan kesejarahan, DIY merupakan wilayah yang sangat kaya karena peradaban di wilayah DIY sudah ada sejak dulu ditandai dengan artefak-artefak yang sekarang. DIY juga merupakan wilayah yang sangat erat dengan perjuangan. Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum yang sudah dilakukan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-186 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan / Rehabilitasi Museum	1
2	Registrasi Museum	5
3	Peristiwa Sejarah	10
4	<i>Event</i> Museum	13
5	<i>Event</i> Bahasa	20
6	Komunitas Sejarah	3
7	Naskah Kuno Dan Karya Bahasa	8
	Jumlah	60

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

Taman Budaya Yogyakarta sebagai salah satu pelaku pemajuan seni di DIY diukur peran sertanya melalui indikator penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya, yang merepresentasikan wajah DIY. Penyelenggaraan *event* Taman Budaya DIY pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-187 Penyelenggaraan event Taman Budaya DIY pada Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Internasional	2
2	Nasional	7
3	Provinsi	17
	Jumlah	26

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

Kinerja pengembangan seni di DIY diukur dengan menghitung berbagai aktivitas terkait dengan Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan yang ada dan hidup di DIY. Pengembangan seni di DIY pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-188 Pengembangan seni di DIY pada Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	61
2	Upacara Tradisi	6
3	Lembaga Budaya	4
4	Organisasi Seni Pertunjukan	235
5	Organisasi Perfilman	13
6	Organisasi Kepercayaan	34
	Jumlah	353

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

Pengembangan potensi wilayah pedesaan terus dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Berbagai model pemberdayaan desa dikembangkan dengan substansi tujuan yang hampir sama, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam rangka pembangunan desa/kalurahan telah banyak dilakukan melalui berbagai intervensi. Namun demikian, Proses pembangunan desa, menghadapi permasalahan klasik ego-sektoral yang membuat perkembangan ekonomi, sosial, budaya, menjadi tidak sehat, tidak efisien, tidak adil, dari sudut pandang kawasan. Ego sektoral juga menghambatterjadinya integrasi dan kohesi sosial-ekonomi yang menjadi satu tahapan penting dalam membangun suatu kawasan.

Desa mandiri budaya merupakan model pembangunan desa di DIY dengan sinergi kolaborasi model-model pembangunan desa yang telah ada yaitu Desa/kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur, dan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima) untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dan juga tujuan-tujuan keistimewaan DIY. Keberadaan Desa Mandiri Budaya diatur melalui Peraturan Gubernur nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Adapun tujuan Desa Mandiri Budaya yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan kebudayaan, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan pengembangan pangan.

2. memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global.
3. memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, wirausaha dan wisata.
4. memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi dan pemasaran desa. memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi tingkat desa, dari sisi intelektual maupun keterampilan.
5. memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan salah satu prioritas pembangunan DIY yang termuat dalam RPJMD 2017-2022 dimana secara kumulatif tercapai 5 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019, 10 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020, 18 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Penetapan Desa/kalurahan Mandiri Budaya diatur melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya sebagai berikut.

Tabel 2-189 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2020

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Kategori Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
1	Bejiharjo	Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kulon Progo	Utama
3	Putat	Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Sleman	Utama
5	Girikerto	Sleman	Utama
6	Wedomartani	Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kulon Progo	Madya

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Kategori Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
9	Margodadi	Sleman	Madya
10	Bangunkerto	Sleman	Madya

Sedangkan untuk tahun 2021, penetapan Desa Mandiri Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 2-190 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Kategori Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
1	Tuksono	Kulon Progo	Utama
2	Banjarharjo	Kulon Progo	Madya
3	Jerukwudel	Gunungkidul	Madya
4	Tanjungharjo	Kulon Progo	Madya
5	Hargomulyo	Kulon Progo	Madya
6	Bangunjiwo	Bantul	Madya
7	Giring	Gunungkidul	Madya
8	Glagah	Kulon Progo	Madya

2.1.3.7.4 Urusan Pertanahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancangan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan bulan Desember 2021 tiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 2-191 Rekapitulasi Realisasi Data Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Hasil Inventarisasi sampai dengan Bulan Desember 2021			Didaftarkan ke BPN	Terbit Sertifikat	Belum Terbit Sertifikat	Persentase Terbit Sertifikat
		SG Bidang	PAG Bidang	Jumlah Bidang				
1	Yogyakarta	438	68	506	631	440	191	69,73%
2	Bantul	3.432	0	3.432	3.547	2.286	1.261	64,45%
3	Kulon Progo	1.286	288	1.574	2.182	993	1.189	45,51%
4	Gunungkidul	4.046	0	4.046	2.939	1.860	1.079	63,29%
5	Sleman	4.486	0	4.486	3.091	1.635	1.456	52,90%
Jumlah		13.688	356	14.044	12.390	7.214	5.176	59,17%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2022

Tabel 2-192 Rekapitulasi Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Kabupaten	Telah disahkan	Belum Disahkan				Belum menyusun	Jumlah
		Kembali Ke Kalurahan Untuk ditetapkan	Review DIY	Review Kab	Draft Tk kalurahan		
Bantul	75	0	0	0	0	0	75

Kabupaten	Telah disahkan	Belum Disahkan				Belum menyusun	Jumlah
		Kembali Ke Kalurahan Untuk ditetapkan	Review DIY	Review Kab	Draft Tk kalurahan		
Kulon Progo	87	0	0	0	0	0	87
Gunungkidul	144	0	0	0	0	0	144
Sleman	86	0	0	0	0	0	86
J U M L A H	392	0	0	0	0	0	392

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2021 (data per 1 Desember 2021)

Tabel 2-193 Progres Pendaftaran Tanah Desa Bersertifikat dan Perubahan Data Sertifikat Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Pemberkasan Peta Bidang Tanah Desa Belum Bersertifikat ke BPN	Penyesuaian Data Sertifikat Tanah Desa ke BPN
1	Bantul	15.743	2.117	13.626	1.000	184
2	Kulon Progo	4.156	3.649	507	300	0
3	Gunungkidul	10.882	3.295	7.587	500	544
4	Sleman	19.498	7.007	12.491	800	794
	Jumlah	50.279	16.068	34.211	2.600	1.522

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2021 (data per 1 Desember 2021)

2.1.3.7.5 Urusan Tata Ruang

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Fokus Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2019–2039 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas

pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan penduduknya).

Adapun Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon meliputi: 1) Keraton, 2) Makam raja-raja Mataram di Imogiri, 3) Sumbu Filosofi dan Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, 4) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, 5) Masjid Pathok Nagoro, 6) Gunung Merapi, dan 7) Pantai Samas-Parangtritis. Sedangkan Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon meliputi: 1) Kerto – Pleret, 2) Kota Baru, 3) Candi Prambanan – Candi Ijo, 4) Sukoliman, 5) Perbukitan Menoreh, 6) Karst Gunungsewu, dan 7) Pantai Selatan Gunungkidul.

Sementara itu, Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon meliputi: 1) Puro Pakualaman, dan 2) Makam Girigondo. Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon meliputi 1) Pusat Kota Wates dan 2) Pantai Selatan Kulon Progo.

Target kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan diukur dengan indikator yang meliputi: 1.) Jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mempunyai dokumen perencanaan, 2.) Jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mewujudkan tata ruang sesuai dengan dokumen rencana kawasan strategis keistimewaan, dan 3.) Jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Dari tahun ke tahun, capaian untuk sasaran ini terus menunjukkan adanya peningkatan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Indikator aspek daya saing yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan

kriminalitas. Perkembangan lima tahun terakhir terhadap indikator indikator tersebut adalah fluktuatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat DIY termasuk diatas rata rata angka nasional. Nilai tukar petani cenderung menurun dan berada dibawah rata rata nasional, ini merupakan indikasi perlunya perbaikan di sektor pertanian. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan di DIY adalah yang tertinggi di antara Provinsi yang lain. Indikator rasio ekspor impor yang selalu diatas nilai satu menunjukkan DIY memiliki daya saing dalam perdagangan Internasional. Indikator kriminalitas menunjukkan penurunan jumlah kejahatan terlapor namun ada peningkatan jumlah pelaku kejahatan untuk kategori anak. Indikator rasio ketergantungan di DIY relatif stabil di angka 44-45.

2.1.4.1 Distribusi dan Produksi Energi

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Umum Energi Daerah yang akan digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan energi di tingkat daerah. Pemda DIY pada tahun 2020 dapat menyelesaikan penyusunan sekaligus penetapan Rencana Umum Energi Daerah DIY yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2050.

Pasokan energi bahan bakar diperkirakan mencapai 1,38 MTOE pada tahun 2025, dengan porsi terbesar adalah minyak bumi, yaitu sebesar 0,97 MTOE (74%), diikuti oleh gas bumi sebesar 0,22 MTOE (17%), dan EBT BBN sebesar 0,11 MTOE (9%). Termasuk dalam sisi pasokan energi bahan bakar adalah cadangan operasional energi sebesar 0,10 MTOE. Cadangan operasional mengacu pada besaran energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi (BBM dan BBG) hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan untuk menjamin kontinuitas pasokan energi daerah. Pasokan energi listrik diperkirakan akan mencapai 0,51 MTOE pada tahun 2025, yang didominasi oleh suplai listrik dari sistem Jawa Madura Bali sebesar 0,50 MTOE (97,48%). Listrik EBT Lokal diperkirakan berkontribusi sebesar 0,01 MTOE (2,52%). Pasokan

energi listrik tersebut mencakup besaran energy losses atau susut energi berupa rugi-rugi listrik sebesar 0,06 MTOE.

Kebutuhan tenaga listrik di DIY dipasok dari Perusahaan Listrik Negara Sistem Jawa Madura Bali. Kebutuhan tenaga listrik di DIY diperkirakan mencapai 5,722 GWh pada tahun 2025 dan untuk melayani kebutuhan tersebut, PLN telah merencanakan pengembangan 2 (dua) Gardu Induk baru dengan kapasitas 240 MVA dalam rangka memenuhi target penyediaan sebesar 660 MVA.

Rasio elektrifikasi di DIY pada tahun 2020 tercatat sebesar 99,99%. Pada tahun 2021 dalam rangka mencapai target KEN dan RUEN yakni rasio elektrifikasi sebesar 100% telah dilakukan upaya penyediaan listrik berupa pembangunan jaringan listrik perdesaan dan bantuan sambungan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

DIY merupakan pengimpor energi karena tidak memiliki sumber daya energi berbasis fosil. DIY mendapatkan suplai dari luar provinsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi akhirnya (listrik, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas). Kelistrikan di DIY tergabung dari sistem distribusi Jawa Tengah dimana DIY mendapat pasokan dari subsistem Pedan di Jawa Tengah. Wilayah pelayanan DIY dibagi menjadi 7 (tujuh) rayon yaitu Rayon Wates, Sedayu, Sleman, Kalasan, Yogya Kota, Bantul dan Wonosari. Sedangkan penyediaan BBM (bensin, solar, minyak tanah dan avtur) untuk DIY dilakukan oleh Pertamina melalui Depot Rewulu yang mendapatkan pasokan dari kilang minyak di Cilacap dan kemudian didistribusikan ke SPBU DIY. Untuk memenuhi kebutuhan LPG di DIY yang semakin tahun semakin meningkat, tersedia dua stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yaitu di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Potensi energi terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY relatif terbatas. Dalam perumusan kebijakan strategi pengelolaan energinya, DIY perlu memberikan tekanan lebih pada konservasi energi yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT. Salah satu potensi sumber daya EBT di DIY untuk pembangkit listrik berupa hidro skala kecil, surya, bayu, dan biomassa, namun tidak memiliki sumber daya EBT untuk skala yang lebih besar seperti hidro untuk

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terdapat PLT Biomassa Bagasse telah beroperasi di DIY sejak 1955, yaitu untuk pembangkitan energi listrik dalam rangka proses produksi gula di PG Madukismo. PLT Bagasse tersebut merupakan wujud penanganan limbah biomassa sekaligus merupakan bentuk pemenuhan sebagian kebutuhan energi dengan menggunakan sumber daya lokal.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7 dan menurun di tahun 2017 menjadi 1,34. Elastisitas di atas 1 artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi. Dalam upaya mencapai target KEN dan RUEN yakni elastisitas energi yang mencapai 0,51 pada tahun 2025, penghematan energi harus dilakukan dan dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar, yaitu 1.466,53 GWH di tahun 2016. Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor *nonekonomi* seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi kewan dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di DIY.

2.1.4.2.1 Angka Kriminalitas

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku yang

menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Keamanan yang terjadi di suatu wilayah akan membangun suasana kondusif bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas termasuk dalam melakukan usaha ekonomi produktif. Tindak kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian di DIY selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2017 terdapat 5.194 tindak kejahatan yang dilaporkan kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 5.317. Pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 4.599 kasus namun pada tahun 2020 naik kembali menjadi 4.701 kasus dan di tahun 2021 naik kembali melebihi tahun 2017 yaitu sebesar 5.331 kasus. Jumlah kejahatan terlapor tersebut pada tahun 2021 terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 2.610 kasus dan Kabupaten Bantul sebesar 1.322 kasus. Pada perkembangan lima tahun terakhir kota Yogyakarta menunjukkan penurunan jumlah kejahatan paling signifikan yaitu sebesar 47,07%. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Bantul yang justru menunjukkan peningkatan kasus kejahatan sebesar 48,37%. Perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan di tiap Kabupaten/Kota di DIY dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-194 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	426	441	443	546	485
Bantul	891	796	937	953	1.322
Gunungkidul	273	287	271	224	281
Sleman	2.408	2.615	2.204	2.345	2.610
Yogyakarta	1.196	1.178	744	633	633
Jumlah	5.194	5.317	4.599	4.701	5.331

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa daerah Sleman dan Kota Yogyakarta secara konsisten merupakan wilayah dengan tingkat pelaporan kejahatan yang tinggi. Angka tersebut juga didukung dengan angka risiko penduduk terkena kejahatan per 1000 penduduk yaitu pada tahun 2021 tertinggi ada di Kabupaten Sleman sebesar 212 diikuti kota Yogyakarta sebesar 145. Dari

tindak kejahatan yang dilaporkan tersebut pada tahun 2021 tercatat sebesar 65,11% kasus terselesaikan, angka ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 79,66%.

Tabel 2-195 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	96	98	103	126	112
Bantul	96	85	92	93	128
Gunungkidul	36	38	36	30	38
Sleman	230	246	181	190	212
Yogyakarta	291	285	172	145	145
D.I.Yogyakarta	145	146	120	121	137

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dilihat dari jenis tindak pidana pada tahun 2021 diketahui bahwa tindak pidana DIY didominasi oleh tindak pidana konvensional, terutama pencurian, penggelapan dan aniaya ringan. Sementara itu, tindak pidana transnasional didominasi penyalahgunaan narkoba. Kasus terbanyak pidana kekayaan negara di tahun 2020 adalah kasus uang palsu. Sedangkan tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi adalah unjuk rasa.

Tabel 2-196 Jumlah Tindak Pidana berdasarkan Jenisnya Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tindak Pidana Konvensional	4.759	4.318	3.992	4.239	4.913
2	Tindak Pidana Transnasional	412	768	561	438	389
3	Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara	20	14	24	17	19
4	Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi	3	2	0	6	10
5	Tindak Pidana Pelanggaran HAM	0	0	0	0	0

Sumber: Polda DIY, 2021

Kondisi keamanan dapat dilihat dari selang waktu kejahatan. Selang waktu kejahatan merupakan interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan yang lain. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan bahwa kondisi keamanan semakin membaik. Pada tahun 2021, selang waktu tindak kejahatan di DIY adalah 1 jam 38 menit, artinya setiap 1 jam 38 menit terjadi 1 kasus tindakan kejahatan baru DIY. Kondisi ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1 jam 52 menit.

Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mencatat dalam rentang tahun 2017-2021 kasus klitih cenderung meningkat, dari 35 kasus di tahun 2017 menjadi 56 kasus di tahun 2020 lalu turun menjadi 51 kasus. Tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 193 kasus. Data kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-197 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2017-2021

No	KESATUAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	-	1	1
2	POLRESTA YOGYAKARTA	7	9	13	12	10	51
3	POLRES SLEMAN	16	10	6	21	16	69
4	POLRES BANTUL	12	11	-	15	21	59
5	POLRES KULON PROGO	-	2	-	6	2	10
6	POLRES GUNUNGGIDUL	-	-	-	2	1	3
JUMLAH		35	32	19	56	51	193

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2022

2.1.4.2.2 Jumlah Demonstrasi

Kejadian unjuk rasa yang berjalan dengan damai menjadikan stabilitas keamanan di suatu wilayah. Secara umum, unjuk rasa di DIY relatif berjalan lancar dan tertib dan tidak sampai menimbulkan kerugian yang berarti. Aksi unjuk rasa pada tahun 2021 sebanyak 137 dan semuanya berlangsung tanpa ada tindakan anarkis. Kelompok yang melakukan unjuk rasa ini diantaranya adalah mahasiswa, Ormas/LSM, buruh, parpol dan masyarakat umum bertempat di kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor DPRD, Gedung Agung, Rumah Dinas Bupati, dll. Selain tempat-tempat tersebut, unjuk rasa juga sering dilakukan di jalan umum seperti bundaran UGM, titik nol kilometer, simpang tiga UIN, Tugu Jogja, dll. Tuntutan yang diajukan sebagian besar adalah kebijakan-kebijakan yang dirasa belum tepat. Unjuk rasa dengan massa yang banyak seringkali harus penutupan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan di beberapa titik lokasi unjuk rasa tersebut.

Tabel 2-198 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2017	207
2018	155
2019	88
2020	150
2021	137

Sumber: Dataku 2022

2.1.4.2.3 Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Secara umum, investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung pada daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi salah satunya bergantung pada kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Membangun iklim usaha tidak hanya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga diperlukan peran dari DPRD. Peran DPRD disini dari mempromosikan, merumuskan

dan menetapkan kebijakan yang pro terhadap usaha. Kebijakan yang pro usaha adalah kebijakan yang mendukung percepatan proses investasi yang sehat di daerah baik yang dari masyarakat daerah, luar daerah, maupun luar negeri. Disinilah peran DPRD dituntut lebih punya kepekaan dalam melaksanakan fungsi legislasi melalui pembuatan perda yang dapat mendukung iklim usaha.

Kebijakan di DIY yang mendukung iklim usaha diantaranya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan *non*Perizinan Terpadu Satu Pintu yang pada intinya memberikan layanan kepada pelaku usaha bahwa pelayanan perizinan dari proses permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan terpadu satu pintu di satu tempat saja. Sementara itu Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan menarik minat investasi dengan memberikan insentif pajak atau retribusi daerah serta pemberian fasilitas kemudahan lainnya. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak daerah. Perda tersebut saat ini sedang dalam proses pembahasan perubahan, terutama terkait dengan jenis usaha yang diberikan insentif dan kemudahan, serta bentuk insentif yang diusulkan untuk ditambahkan berupa bantuan riset, fasilitas pelatihan, dan bunga pinjaman rendah bagi UMKM.

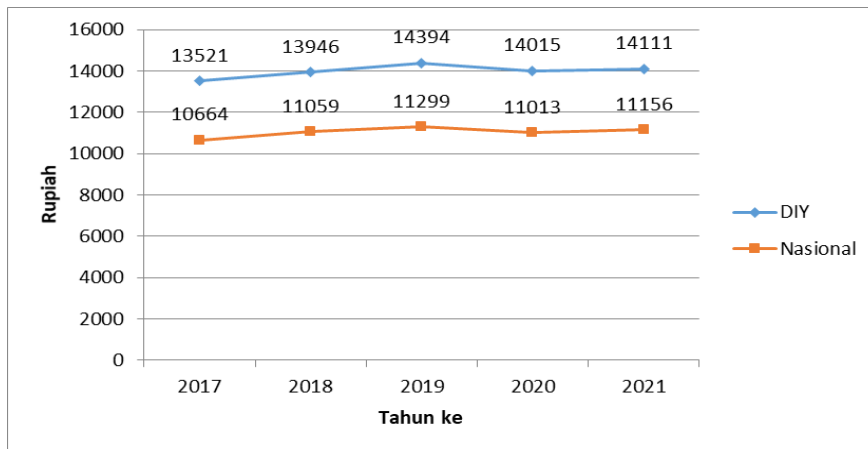
Selain itu juga telah diterbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil yang secara umum bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di daerah yang meliputi aspek akses pendanaan, perizinan usaha, dukungan kelembagan dan bantuan sarana prasarana.

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan dan menciptakan wirausaha yang inovatif yang meliputi Rencana Induk Kewirausahaan, pembangunan sumber daya kewirausahaan,

pemberdayaan, sistem informasi kewirausahaan daerah, pembinaan dan pendanaan.

2.1.4.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

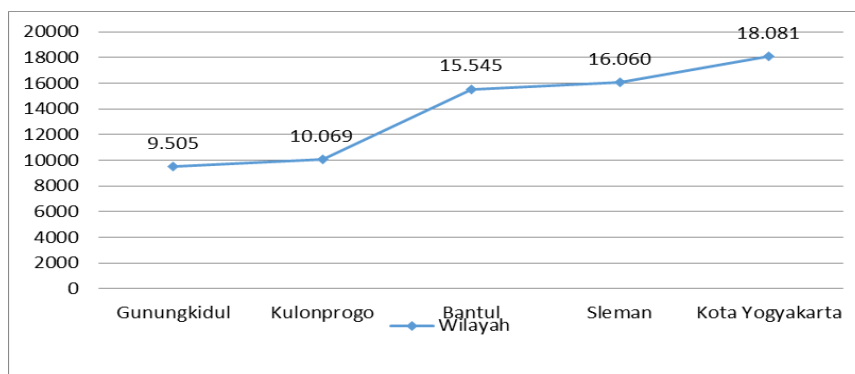
Daya saing daerah dapat dilihat dari daya beli masyarakat. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indikator yang digunakan untuk melihat daya beli adalah rata rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Masyarakat dengan nilai rata rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY cenderung meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp13.521.000 menjadi Rp14.111.000 di tahun 2021. Pada nilai tersebut DIY berada diatas nilai rata rata nilai nasional yang sebesar Rp11.156.000 dan di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta yang sebesar Rp18.520.000 dan Kepulauan Riau sebesar Rp14.122.000 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Perkembangan lima tahun terakhir (Tahun 2017-2021) pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-73 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2017-2021 (dalam ribu)

Berdasarkan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, kota Yogyakarta berada di peringkat tertinggi sedangkan Kabupaten Gunungkidul di posisi terbawah. Nilai pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah.



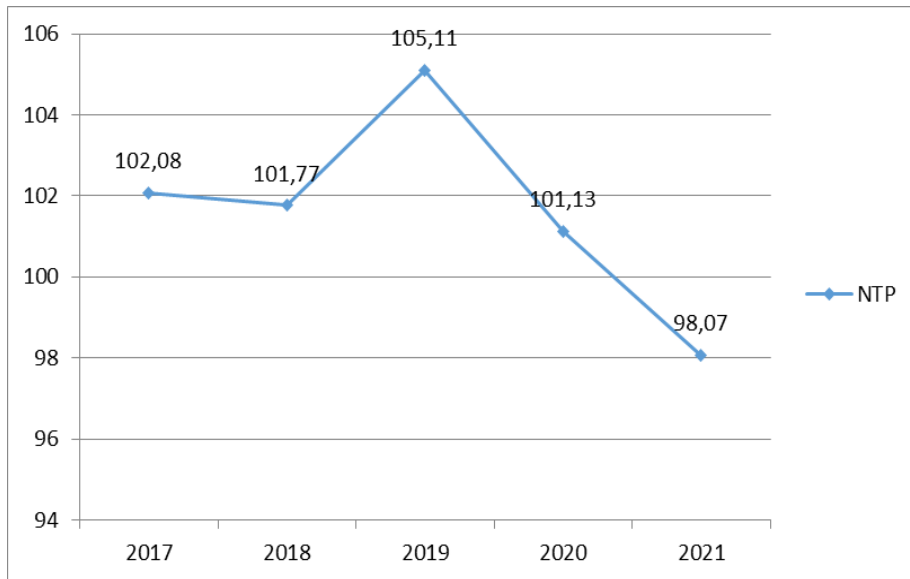
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-74 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan)

2.1.4.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani. Nilai NTP yang tinggi dapat menjadi indikator daya saing sektor pertanian sebab menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP kurang dari 100 artinya petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. NTP DIY cenderung menurun yaitu dari tahun 2017 sebesar 102,08 menjadi 98,07 di tahun 2021. NTP DIY tersebut berada dibawah NTP nasional yaitu 108,34 atau peringkat tiga terbawah diantara provinsi yang lain. Perkembangan NTP DIY

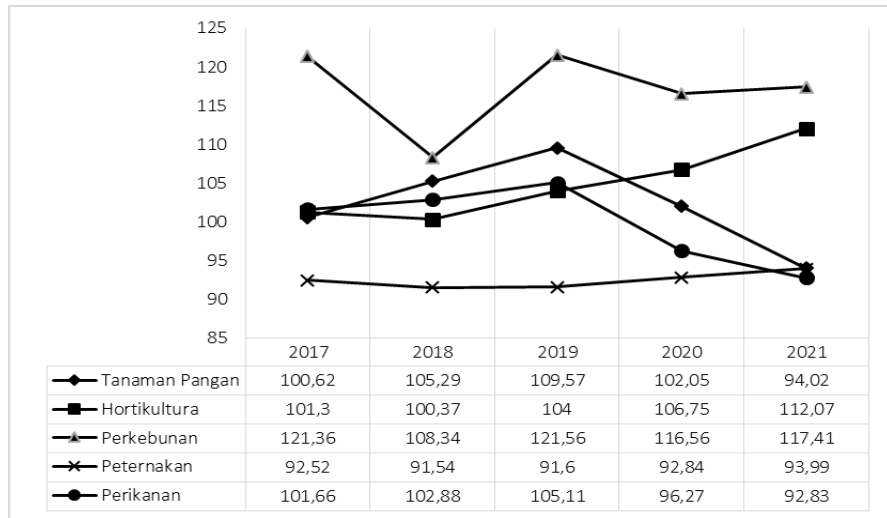
selama tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Gambar 2-75 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2017-2021

Pada grafik perkembangan NTP subsektor tahun 2017-2021 terlihat peternakan selalu dibawah nilai 100. NTP subsektor yang konsisten diatas angka 100 adalah perkebunan dan hortikultura. NTP subsektor yang menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir adalah hortikultura. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat tiga subsektor yang nilai NTP nya dibawah 100 yaitu perikanan, peternakan dan tanaman pangan. Data perkembangan NTP per bubsektor DIY Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-76 NTP Per Subsektor Tahun 2017-2021

2.1.4.5 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Konsumsi Bukan Makanan)

Hukum Engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari 50%. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan). Persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan DIY selama tahun 2017-2020 adalah fluktuatif dari tahun 2017 sebesar 57% meningkat menjadi 59,39% di Tahun 2018 lalu menurun kembali di tahun 2019 dan 2020 sebesar 59,21% dan 58,97%. Kabupaten yang memiliki persentase dibawah 50% adalah Gunungkidul. Persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan perkotaan dan pedesaan tersebut berada diatas

rata rata nasional yaitu 53,95% sekaligus merupakan tertinggi di antara provinsi yang lain.

Tabel 2-199 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Perkotaan dan Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta

Kabupaten \ Tahun	2017	2018	2019	2020
Gunungkidul	44,52	47,75	46,61	48,14
Kulon Progo	49,80	51,59	53,12	54,78
Bantul	56,94	60,60	58,65	57,53
Yogyakarta	59,24	63,47	60,68	62,54
Sleman	61,35	62,02	63,82	62,61
D.I Yogyakarta	57,00	59,39	59,21	58,97

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun 2017- 2020 berturut-turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa; barang tahan lama; pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. Persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-200 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Tahun 2017-2020 (dalam persen)

Kelompok Bukan Makanan	2017	2018	2019	2020
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	23,90	24,61	25,75	24,88
Aneka Barang dan Jasa	16,00	16,40	16,70	16,67
Barang tahan lama	8,92	10,26	7,95	8,76
Pajak, pungutan, asuransi	3,81	3,52	3,50	3,70
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,67	2,58	2,62	2,84
Keperluan pesta dan upacara	1,70	2,03	2,69	2,12

Kelompok Bukan Makanan	2017	2018	2019	2020
Total	57,00	59,39	59,21	58,97

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

2.1.4.6 Rasio Ekspor-Import

Rasio Ekspor Impor di suatu daerah dapat menjadi indikator daya saing di sektor perdagangan luar negeri. Daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor impornya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Rasio Ekspor Impor DIY selama Tahun 2016-2020 selalu di atas satu, hal ini menunjukkan DIY memiliki daya saing di perdagangan Internasional. BPS Provinsi DIY pada tahun 2021 mencatat sepuluh komoditi ekspor terbesar DIY adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot penerang rumah, barang-barang rajutan, barang-barang dari kulit, jerami atau bahan anyaman, kayu, barang dari kayu, minyak atsiri, kosmetik, wewangian, kertas atau karton, plastik dan barang dari plastik dan bulu unggas. Adapun 10 negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika, Jerman, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Belgia, Tiongkok, dan Spanyol. Tiga terbesar Pelabuhan Muat untuk produk ekspor tersebut adalah Tanjung Emas, Tanjung Priok, dan Soekarno-Hatta.

Tabel 2-201 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2017-2020 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2017	2018	2019	2020	2021*
Ekspor (nilai FOB)	390,71	424,71	403,70	398,80	437,20
Impor (nilai CIF)	109,82	101,97	95,40	124,50	124,60
Rasio E/I	3,56	4,16	4,23	3,2	3,51

*) sangat sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.4.7 Tingkat Ketergantungan /Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapat menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Daya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. Perkembangan rasio ketergantungan di DIY selama tahun 2016-2020 relatif stabil di angka 44-45. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 44-45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio beban tanggungan penduduk DIY tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-202 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY tahun 2016-2020

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
2016	21,48	69,33	9,19	100	44
2017	21,57	69,12	9,31	100	44
2018	21,72	68,93	9,34	100	45
2019	21,40	69,02	9,57	100	45
2020	20,41	68,78	10,81	100	45

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

2.1.4.8 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dalam data SAKERNAS. Data bulan Agustus 2021 berikut menunjukkan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di DIY hanya 3,53%. Mayoritas penduduk tentu masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. Dalam RPJMN RI, ditargetkan tahun 2024 rasio kewirausahaan secara nasional

mencapai angka 4 persen. Jika dilihat pada data berikut, rasio kewirausahaan di DIY tahun 2018 dan 2019 telah mencapai angka di atas 4 persen. Namun demikian, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dampak Covid-19 terhadap kondisi bisnis dan keuangan diduga berpengaruh terhadap penurunan ini.

Tabel 2-203 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2021

Status Pekerjaan	Persentase (%)
Buruh/karyawan/pegawai	41,12
Berusaha sendiri	19,17
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	16,05
Pekerja keluarga	13,39
Pekerja bebas di non pertanian	5,41
Pekerja bebas di pertanian	1,33
Berusaha dibantu buruh tetap	3,53

Sumber: Sakernas BPS, 2021

Tabel 2-204 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Berusaha dibantu buruh tetap	3,48	3,51	3,51	4,24	4,08	3,81	3,53

Sumber: Sakernas BPS

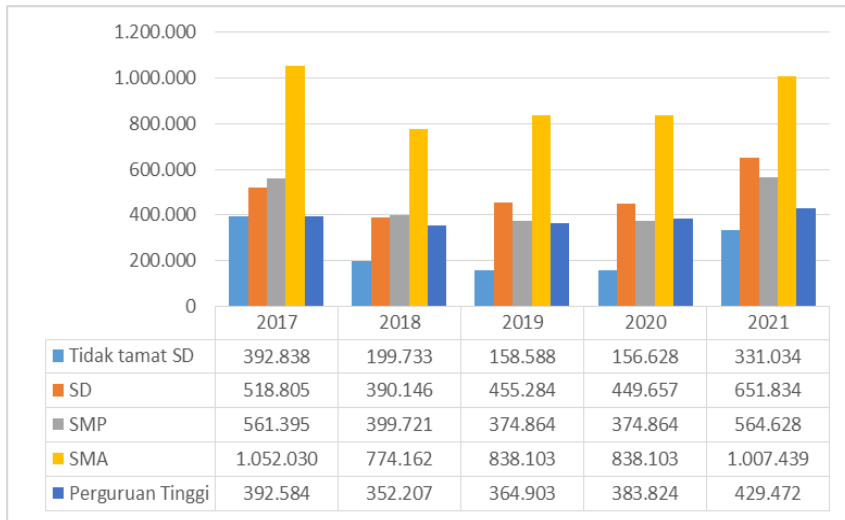
2.1.4.9 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik maupun mental menjadi modal suatu daerah dalam memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset pembangunan yang sangat penting dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat. SDM yang terampil, inovatif, kompetitif bisa menaikkan daya saing daerah.

2.1.4.9.1 Pendidikan

Daya saing suatu daerah tidak bisa dipisahkan dari kualitas SDM yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan serta ketrampilan/keahlian yang tinggi. Output atau bukti sah untuk mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan ditunjukkan dengan keberadaan ijazah. Ijazah merupakan salah satu syarat formal untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan atau memilih jenis-jenis pekerjaan yang lebih baik. Ini akan berimplikasi pada perbaikan dan peningkatan penghasilan sehingga berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Dari grafik dibawah dalam periode lima tahun terakhir proporsi terbesar penduduk DIY merupakan tamatan SMA dengan jumlah tamatan perguruan tinggi terus meningkat.



Sumber: Dataku Bappeda 2022

Gambar 2-77 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

2.1.4.9.2 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021 penduduk DIY yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 2.228.523 orang. Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 18,22% dan di sektor non pertanian 71,78%. Status pekerjaan terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 916.300 orang atau 41,11%. Proporsi berikutnya adalah berusaha sendiri sebanyak 427.300 orang atau 19,17% dan status berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 357.600 atau 16,05% serta status pekerja keluarga atau tidak dibayar sebanyak 298.520 orang atau 13,39%.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu

waktu dalam periode survei. Pada tahun 2021 TPAK DIY sebesar 73,52% yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 71,12%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja masih perlu ditingkatkan untuk menekan tingkat laju pengangguran. TPT DIY pada tahun 2021 mencapai 4,56% yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,02%. Hal ini tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Indikator ketenagakerjaan DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2-205 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
	persen	persen	persen	persen	persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,52	73,12	72,72	71,12	73,52

Sumber: Dataku Bappeda 2022

2.1.4.9.3 Rasio Ketergantungan

Untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif dapat digunakan Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Penduduk berusia produktif adalah penduduk angkatan kerja yakni penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun, penduduk ini secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga merupakan kelompok penduduk dengan usia tidak produktif, hal ini dikarenakan sudah melewati masa pensiun dan sudah tidak bekerja lagi.

Selama lima tahun terakhir, angka *dependency ratio* di DIY belum mengalami perubahan yang begitu signifikan. Tahun 2016, angka rasio ketergantungan DIY berada pada nilai 45,02% mengalami kecenderungan meningkat hingga tahun 2020 menjadi 45,44% yang artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak produktif. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan penduduk usia lanjut namun kecepatan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak secepat usia produktif. Keadaan ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama dalam pemenuhan layanan bagi lansia secara komprehensif untuk menciptakan lansia yang sehat dan produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berkenaan

Dalam proses perencanaan, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Evaluasi berperan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan- program pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai input perencanaan ditahap/periode selanjutnya. Demikian juga dalam penyusunan

RKPD 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, maka evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya menjadi bagian penting agar ditemukan disain kebijakan dan perencanaan yang tepat.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, yang prosesnya dilakukan pada Tahun 2022, maka data capaian paling *updated* yang tersedia adalah data Tahun 2021. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2021 bermuara pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan DIY yang dapat terkonfirmasi dari ketercapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di setiap jenjangnya.

Prinsip ini sesuai dengan *cascading* kinerja Pemda DIY yang telah mengakomodir *performance based budgeting* di mana evaluasi atas capaian kinerja pembangunan Pemda DIY dilakukan secara berjenjang mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran Pemda, Program Pemda, Sasaran OPD, Program OPD hingga ke sub kegiatan OPD.

Pada tahun 2021, RKPD DIY 2021 memiliki tema pembangunan “Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY.” Tema tersebut dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut (1) Pembangunan Manusia unggul; (2) Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan; (3) Penguatan Infrastruktur Strategis; (4) Pendukung Prioritas Pembangunan;

Berikut disampaikan capaian pembangunan tahun 2021.

2.2.1 Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Pemda DIY Tahun 2021

Sesuai dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 terdapat 8 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY. Pada tahun 2021, capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-206 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target RKPDP 2021	Target RPJMD 2021	Realisasi 2021	% Capaian RKPDP 2021	% Capaian RPJMD 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	79,97	80,93	81,40	80,22	99,12	98,55
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	73,59	70,19	70,22	74,73	106,47	106,27
3	Indeks Gini	Angka Indeks	0,437	0,4335 - 0,4188	0,3705	0,436	99,42	83,00
4	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	12,80	12,86 - 10,84	8,07	11,91	107,39	40,64
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	Persen	11,97	11,99	11,99	12,22	101,92	101,92
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	- 2,69	4,08 - 6,86	5,31	5,53	135,54	104,14
7	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka indeks	61,60	64,18	64,18	60,53	94,31	94,31
8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	78,95	79,50	81,00	81,04	101,94	100,05
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	40,69	49,03	49,03	51,81	105,67	105,67
10	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,453	0,464 - 0,455	0,4506	0,4504	102,93	97,03
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100,00
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	A	A	A	AA	150	150,00
13	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	Persen	84,62	82,61	82,61	92,31	111,74	111,74

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target RKPDP 2021	Target RPJMD 2021	Realisasi 2021	% Capaian RKPDP 2021	% Capaian RPJMD 2021
14	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	Bidang	12.437	15.188	17.619	15.335	100,97	87,04

Sumber: Bappeda DIY, 2022 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat capaian IKU Pemda DIY tahun 2021 jika dibandingkan dengan target RKPDP Perubahan (RKPDP) 2021 terdapat 10 indikator yang memiliki persentase capaian >100%, terdapat satu indikator dengan capaian sesuai target 100%, dan 3 indikator dengan capaian <100%, dari total 14 indikator yang ada. Secara umum kriteria penilaian realisasi kinerja pada kinerja sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$). Adapun 3 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RKPDP 2021, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada dalam RPJMD, terdapat 7 indikator yang memiliki persentase capaian >100% (kinerja sangat tinggi), satu indikator dengan capaian sesuai target 100% (kinerja sangat tinggi), dan 6 indikator dengan capaian <100% dari total 14 indikator. Dari 6 indikator dengan capaian di bawah 100% tersebut, 3 indikator memiliki realisasi sangat tinggi, 2 indikator dengan kategori tinggi, dan 1 indikator sangat rendah. Selanjutnya, 6 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021, yaitu IPM, Indeks Gini, Persentase Angka Kemiskinan, IKLH, Indeks Williamson, dan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan. Dampak pandemi COVID-19 masih berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran pemda tersebut.

2.2.1.1 Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

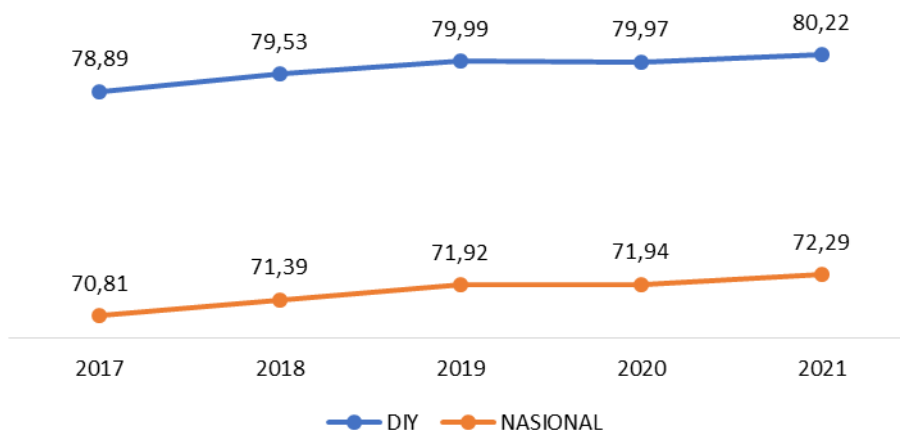
RPJMD DIY tahun 2017-2022 memuat visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dijabarkan ke dalam dua misi yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban serta Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Salah satu sasaran yang ingin dicapai pada misi Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban yaitu Meningkatkan Derajat Kualitas SDM salah satunya diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan

direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Angka IPM DIY beserta komponen-komponennya cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Capaian IPM sempat turun di tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID-19, namun meningkat kembali di tahun 2021. Capaian IPM DIY sampai tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Posisi IPM DIY pada tahun 2021 berada dalam kategori “sangat tinggi” (berdasarkan kriteria dari *United Nations Development Programme* (UNDP)).



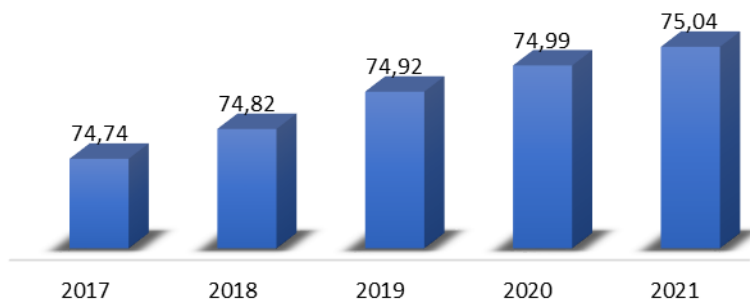
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Gambar 2-78 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2021 berada pada level 80,22. Secara umum, capaian ini terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM DIY meningkat dari 78,89 pada tahun 2017 menjadi 80,22 pada tahun 2021. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode

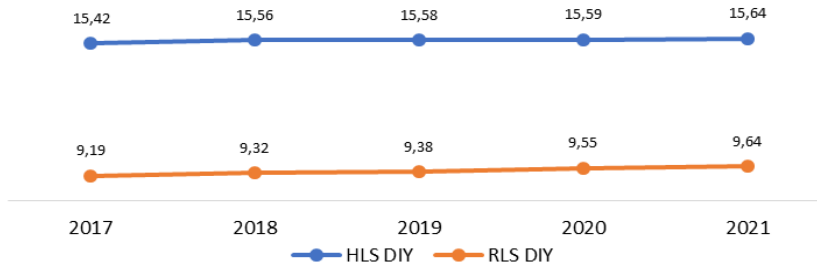
2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Gambar 2-79 Perkembangan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Gambar 2-80 Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2017-2021

Ditinjau dari capaian IPM kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selalu mempunyai nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

Tabel 2-207 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Kabupaten Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00
Kabupaten Gunungkidul	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16
Kabupaten Kulon Progo	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71
Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18
DIY	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2021 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus tinggi dan sangat tinggi. Capaian IPM menurut wilayah sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antar wilayah di DIY masih timpang. Level IPM

tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun telah menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”.

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2021, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator UHH) tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 12,98 tahun, Kulon Progo sebesar 14,27 tahun, dan Bantul sebesar 15,38 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,74 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,60 tahun) sudah di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,30 tahun berada di Gunungkidul, Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 11,72 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp9,50 juta per tahun di Gunungkidul.

Tabel 2-208 IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen 2021

Komponen		UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten	Kulon Progo	75,27	14,27	9,02	10.069
Kabupaten	Bantul	73,89	15,38	9,57	15.545
Kabupaten	Gunungkidul	74,19	12,98	7,30	9.505

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Sleman	74,92	16,74	10,92	16.060
Kota Yogyakarta	74,76	17,60	11,72	18.801
DIY	75,04	15,64	9,64	14.111

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

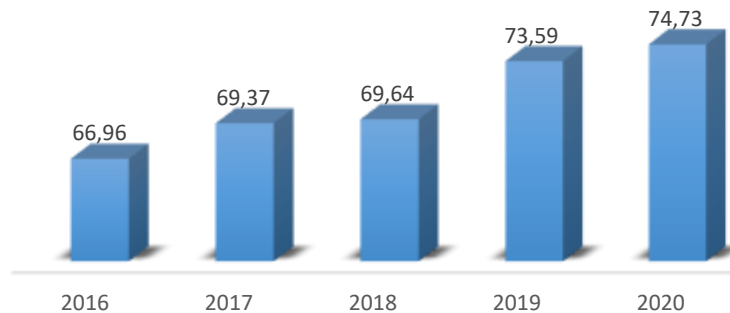
Dari capaian indikator kinerja IPM pada tahun 2021 yang sebesar 80,22, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 99,12%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 98,55%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD.

2.2.1.2 Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam meraihnya. Salah satu aksi yang terus diupayakan di DIY adalah meningkatkan partisipasi perempuan khususnya pada jabatan strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Peran aktif perempuan pada jabatan tersebut diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif gender sehingga diharapkan mampu membawa peluang perubahan terwujudnya kesetaraan gender di DIY.

Dalam menilai sejauh mana keberhasilan pemberdayaan gender, digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dari capaian indikator kinerja IDG pada tahun 2021 yang sebesar 74,73, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 106,47%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 106,27%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD.



Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

Gambar 2-81 Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di DIY Tahun 2016-2020

Sejak tahun 2017 Pemberdayaan Gender di Yogyakarta selalu mengalami peningkatan meskipun belum menunjukkan tren yang maksimal karena dibandingkan IDG Nasional ternyata posisi DIY masih dibawah rata-rata angka nasional. Tabel di atas menunjukkan bahwa IDG DIY pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,14% dari 73,59 di tahun 2019 menjadi 74,73. Meski terjadi peningkatan, IDG DIY masih berada dibawah rata-rata nasional yang juga mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 75,57. Peningkatan IDG diharapkan berkontribusi pada semakin menguatnya dukungan pada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan, program dan pembangunan yang responsif gender.

Apabila dilihat dari perbandingan antar wilayah kabupaten di DIY dalam IDG DIY Tahun 2020 terlihat adanya perbedaan antar wilayah yang signifikan. Capaian IDG tahun 2020 tertinggi ada di Sleman yakni sebesar 81,25; sedangkan capaian IDG terendah

terjadi pada Kabupaten Bantul yakni sebesar 64,78. Adapun perbandingan IDG antar kabupaten/kota dibandingkan dengan provinsi dan angka nasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2-209 IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020

Kab/Kota	2018	2019	2020
Kulon Progo	63,36	71,68	71,74
Bantul	61,01	65,29	64,78
Gunungkidul	67,45	75,34	75,53
Sleman	78,47	80,40	81,25
Kota Yogyakarta	80,65	71,06	71,05
DI. Yogyakarta	69,64	73,59	74,73
Nasional	72,10	75,24	75,57

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada tahun 2020 tampak bahwa Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya wilayah di DIY dengan nilai capaian IDG di atas rata-rata nasional. Sementara, semua kabupaten dan kota lainnya berada di bawah rata-rata nasional. Untuk memahami permasalahan terkait dengan partisipasi perempuan yang menyebabkan IDG DIY berada di bawah rata-rata nasional, dapat kita bedah Indeks ini kedalam indikator penyusunnya yaitu: 1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen; 2) Perempuan Sebagai Tenaga Profesional; dan 3) Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Tabel 2-210 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020

Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)			Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kulon Progo	17,50	20,00	20,00	56,95	51,28	52,13	33,91	34,15	34,09
Bantul	6,67	8,89	8,89	40,46	51,39	55,37	38,75	38,76	38,75
Gunungkidul	13,33	22,22	22,22	55,74	44,52	46,13	39,66	39,74	39,90
Sleman	24,00	26,00	28,00	45,51	48,41	52,12	38,44	38,52	38,46
Kota Yogyakarta	25,00	12,50	12,82	55,79	52,34	53,67	44,19	44,65	44,63
DI.	12,73	16,36	18,18	47,70	49,65	53,69	40,78	40,85	40,82

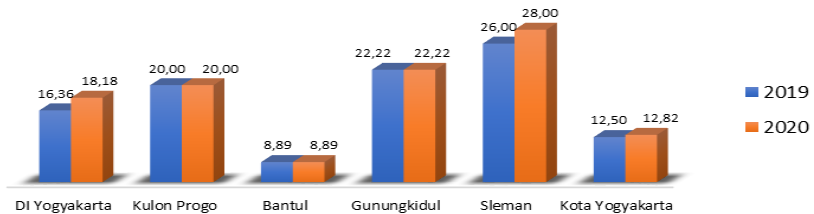
Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)			Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Yogyakarta Nasional	17,32	20,52	20,52	47,02	47,46	48,76	36,70	37,10	37,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dalam tabel di atas terlihat bahwa dalam indikator Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan DIY berada di atas rata-rata nasional. Walaupun apabila dicermati lebih dalam Gunungkidul berada di bawah rata-rata nasional dalam Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Kulon Progo dalam Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Indikator Penyusun IDG DIY yang capaiannya di bawah rata-rata nasional adalah Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Walaupun di Sleman dan Gunungkidul angkanya sudah di atas rata-rata nasional namun belum dapat mengangkat keseluruhan DIY.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen ini penting diperhatikan karena berisiko pada pemenuhan hak-hak perempuan, juga kebijakan terkait dengan peran-peran yang selama ini diampu oleh perempuan tidak cukup kuat diperjuangkan di parlemen. Hal ini sangat mungkin bila terjadi pengambilan suara secara *voting*, jumlah perempuan yang sedikit memungkinkan mereka tidak bisa memenangkan pengambilan suara.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-82 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2019-2020

Perempuan di parlemen di semua kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi persentasenya masih dibawah kuota afirmasi yang diharapkan yaitu setidaknya 30%. Kabupaten Sleman memperlihatkan kondisi paling baik dimana tahun 2020 mencapai 28%, disusul Kabupaten Gunungkidul diangka 22%. Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan keterwakilan paling rendah, hanya 8,89%. Memang, jumlah saja tidak cukup, yang tidak kalah penting adalah keberpihakan perempuan pada agenda pemenuhan hak perempuan yang menjadi pra syarat bagi peningkatan kualitas hidup perempuan.

Meski berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen, namun dalam kenyataannya masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai batas psikologis afirmasi 30%.

Kendala yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas Perempuan. Hal ini khususnya terkait dengan kemampuan sosial, pengambilan keputusan serta kontrol terhadap modal dan sumber daya untuk dapat mendukung pencalonannya. Dari sisi kapasitas dan kapabilitas sebenarnya banyak perempuan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota parlemen. Berbagai upaya meningkatkan kapasitas seperti sekolah (politik) perempuan dan pendampingan dilakukan, namun itu saja tidak cukup. Persoalannya bukan hanya ada di sisi internal perempuan, namun faktor relasi interpersonal, relasi sosial menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan dukungan publik. Di sisi internal perempuan, soal akses dan kontrol atas sumber daya kapital perempuan relatif rendah. Kemampuan berbicara di depan umum, keterampilan membangun argumen juga masih harus terus diasah untuk bisa meyakinkan publik sehingga dalam pemilihan anggota parlemen mampu mendulang suara.

Strategi yang telah dilakukan selama ini adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan para perempuan potensial untuk mulai masuk dalam dunia politik. Berawal dari meningkatkan peran perempuan di lembaga perwakilan terendah

yaitu di Badan Permusyawaratan Kelurahan (Basmusykal) hingga untuk aktif di partai politik. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan maupun sekolah politik perempuan hingga memfasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DPD DIY untuk bersama membangun kemampuan perempuan potensial di DIY.

Ke depan pengembangan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menggarap sektor komitmen dan dukungan partai politik yang memang memerlukan peran serta dari banyak sektor untuk membuka kesadaran dan akhirnya menumbuhkan komitmen partai politik di DIY untuk dapat mendukung perempuan menjadi wakil di parlemen.

Upaya peningkatan pemahaman gender terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya wakil perempuan di parlemen juga menjadi agenda penting yang perlu di tingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi ke masyarakat atau melalui pendidikan yang menasar pada pemilih pemula. Literasi politik masyarakat juga perlu di kuatkan agar praktik politik uang dan praktik lain yang merugikan tidak terjadi. Hal ini perlu dilakukan secara lintas sektor dan didukung oleh semua elemen di DIY.

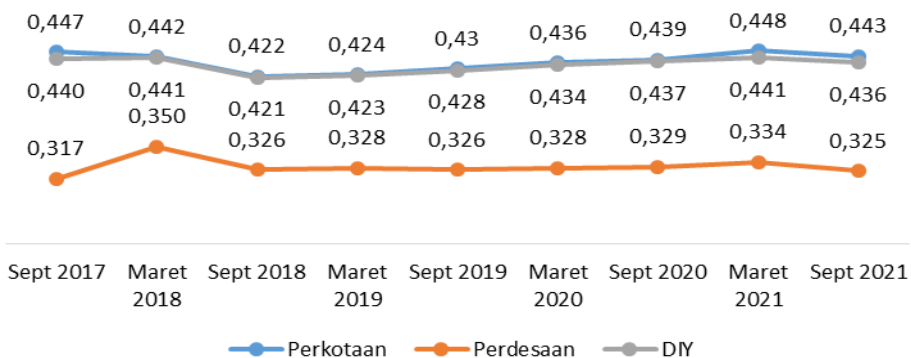
2.2.1.3 Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat - Indeks Gini

Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka *Gini Ratio* berkisar antara 0 hingga 1. Angka *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. *Gini Ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya

sementara orang lainnya tidak memiliki. *Gini Ratio* diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Capaian indikator kinerja Indeks Gini DIY pada tahun 2021 yang sebesar 0,436, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 99,42%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 83,00%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada Maret 2021. Angka Gini Ratio DIY pada September 2021 tercatat sebesar 0,436 atau turun 0,005 poin dibandingkan Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,441. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,98 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Lebih lanjut perkembangan Gini Ratio menurut daerah tempat tinggal di DIY bulan September 2017-September 2021 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Gambar 2-83 Perkembangan *Gini Ratio* Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2017 – September 2021

Dari gambar di atas, tampak bahwa angka *Gini Ratio* pada periode bulan September 2017 – September 2020 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Selama periode September 2017 – September 2021, ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY tertinggi tercatat pada Maret 2018 dan Maret 2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka *Gini Ratio* sebesar 0,441. Sejak September 2018, angka *Gini Ratio* DIY mengalami peningkatan secara berturut dan mencapai puncaknya pada Maret 2021, namun pada September 2021 mengalami penurunan pada angka 0,436.

Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, angka *Gini Ratio* menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Di perkotaan, angka *Gini Ratio* per September 2021 tercatat sebesar 0,443. Sedangkan angka *Gini Ratio* di perdesaan per September 2021 tercatat sebesar 0,325. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah di mana wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi akan menyebabkan distribusi pendapatan yang kurang merata antar penduduk dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Lebih lanjut mengenai *Gini Ratio* di wilayah perkotaan dan perdesaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-211 *Gini Ratio* DIY dan Indonesia Periode September 2020 – September 2021

Daerah	Periode	Kriteria Bank Dunia			<i>Gini Ratio</i>
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	September 2020	14,90	34,41	50,69	0,439
	Maret 2021	14,87	33,49	51,64	0,448
	September 2021	15,41	33,16	51,42	0,443
Perdesaan	September 2020	20,91	36,66	42,43	0,329
	Maret 2021	19,86	38,79	41,35	0,334
	September 2021	21,00	37,38	41,62	0,325

Daerah	Periode	Kriteria Bank Dunia			Gini Ratio
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas	
Perkotaan dan	September 2020	15,66	33,39	50,94	0,437
	Maret 2021	15,44	33,17	51,39	0,441
Perdesaan	September 2021	15,98	32,53	51,49	0,436

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di DIY, tingkat ketimpangan dalam periode satu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di daerah perkotaan, pada September 2020 angka *Gini Ratio* sebesar 0,439. Selanjutnya, pada Maret 2021, angka rasio gini meningkat menjadi 0,441. Demikian juga di daerah perdesaan, dimana tingkat ketimpangan juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun dengan laju yang lebih rendah. Pada September 2020, angka *Gini Ratio* perdesaan adalah 0,329. Kemudian pada Maret 2021, angka *Gini Ratio* naik menjadi 0,334. Lebih rendahnya angka *Gini Ratio* dan laju perubahannya di perdesaan dibandingkan di perkotaan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di perdesaan lebih baik daripada di perkotaan.

Pada September 2021, DIY tercatat sebagai daerah dengan gini ratio tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 0,436. Sementara *Gini Ratio* terendah tercatat di Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,247. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,381, terdapat tujuh provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu DIY (0,436), DKI Jakarta (0,411), Gorontalo (0,409), Jawa Barat (0,406), Papua (0,396), Sulawesi Tenggara (0,394), dan Nusa Tenggara Timur (0,339).

Masih tingginya *Gini Ratio* di DIY terutama dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok. Golongan ekonomi atas, saat ini masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY yaitu sebesar 51,49 persen. Kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menyumbang 15,98 persen dari total pengeluaran penduduk di DIY. Adapun untuk kelompok menengah

juga mengalami penurunan konsumsi selama tahun 2021, yang diduga sebagai respon terhadap kondisi yang ada.

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama dua tahun berdampak besar pada berbagai sektor di DIY. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak pandemi COVID-19 seperti industri dan perdagangan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. COVID-19 juga berdampak besar pada sektor pariwisata dan pendidikan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil yang terhambat maupun berhenti akibat menurunnya permintaan, kesulitan bahan baku maupun keterbatasan modal. Dengan demikian upaya awal yang dilakukan Pemda adalah optimalisasi program kerja gugus tugas ekonomi selama penanganan pandemi COVID-19 untuk melakukan pemulihan ekonomi di DIY serta mengupayakan situasi yang kondusif untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan potensial, antara lain jasa (informasi dan komunikasi; kesehatan), pertanian, wisata, dan industri kreatif.

Salah satu upaya yang dapat membangkitkan ekonomi di DIY adalah pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif menjadi potensi unggulan yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi DIY. Predikat DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata menjadikan DIY memiliki modal sosial dan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya upaya yang terus dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan adalah membuka peluang akses produktif bagi kelompok berpendapatan terendah dan mendorong penumbuhan lapangan usaha yang digeluti agar kelompok tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Upaya tersebut antara lain dengan terus melakukan pembinaan UMKM dalam berbagai aspek usaha agar dapat naik kelas, peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sektor yang digeluti mayoritas kelompok dengan

pendapatan rendah, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa. Upaya kolaborasi dan sinergi juga diperkuat antara pemerintah dan swasta untuk mengoptimalkan penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta penyediaan infrastruktur dasar.

2.2.1.4 Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat - Persentase Angka Kemiskinan

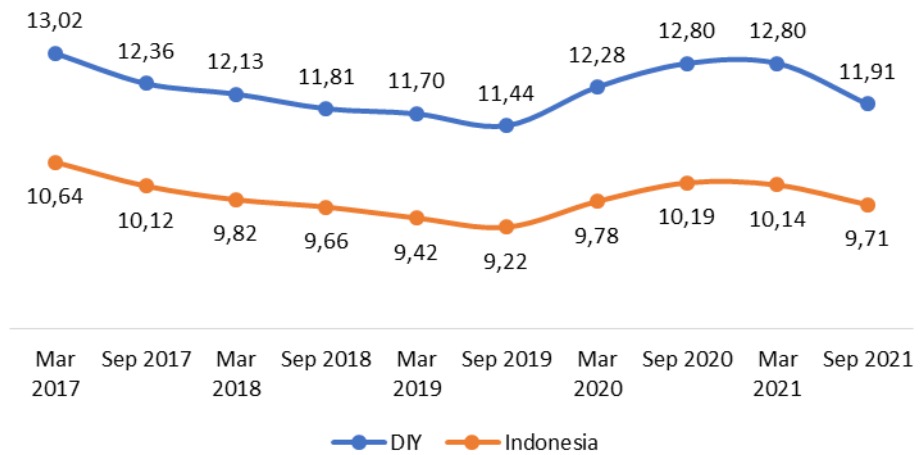
DIY masih menghadapi salah satu masalah kesejahteraan yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Capaian indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan pada tahun 2021 yang sebesar 11,91%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentasenya sebesar 107,39%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 40,64%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021, namun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dokumen RPJMD.

Tingkat kemiskinan DIY senantiasa di atas rata-rata nasional, meskipun demikian tingkat penurunan rata-rata DIY lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama periode Maret 2017 sampai dengan September 2021, persentase penduduk miskin di DIY berkurang 1,11 poin dari 13,02% menjadi 11,91%. Selama periode 2017 sampai 2019, persentase penduduk miskin di DIY cenderung turun secara berangsur-angsur. Penurunan kemiskinan di DIY pada periode tersebut mempunyai kaitan dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomian di DIY.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan akibat dampak pandemi yaitu menjadi 12,28% (Maret) dan 12,80% (September). Kenaikan persentase penduduk miskin disebabkan oleh terkontraksinya

perekonomian DIY yang mengalami pertumbuhan -2,69%. Hal tersebut menyebabkan pendapatan penduduk mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin selanjutnya menurun di tahun 2021. Penurunan tersebut didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian yang mendorong ekonomi DIY tumbuh positif dan meningkatkan pendapatan penduduk.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-84 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021

Tabel 2-212 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 (%)

Kabupaten/Kota	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2018	Maret 2019	Maret 2020
Kulon Progo	20,30	20,03	18,30	17,39	18,01
Bantul	14,55	14,07	13,43	12,92	13,5
Gunungkidul	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07
Sleman	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12
Kota Yogyakarta	7,70	7,64	6,98	6,84	7,27

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan variasi dan cenderung menurun selama periode 2016-2019. Tingkat kemiskinan meningkat di semua wilayah di tahun 2020 akibat dampak pandemi. Selama tahun 2016 sampai 2020, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 adalah 18,01% dan Gunungkidul 17,07%. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2016-2020. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 7,27% di tahun 2020.

2.2.1.5 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan - Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda Yang Diapresiasi

Budaya benda adalah segala sesuatu wujud hasil karya budaya berupa benda yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu dan sudah langka serta berusia lebih dari 50 tahun. Budaya benda meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. DIY memiliki keragaman dan kekayaan budaya benda yang terbentang sejak jaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam hingga masa kolonial. Sebagai salah satu pusat peradaban di Indonesia, tentu saja seluruh potensi budaya benda yang ada perlu dipelihara dan dikembangkan.

Dari capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi pada tahun 2021 yang sebesar 12,22%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentasenya sebesar 101,92%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

Tabel 2-213 Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 - 2021

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	16	-	16
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
7	2016	1	-	1
8	2018	2	-	2
9	2019	6	-	6
10	2020	16	-	16
11	2021	-	-	-
Jumlah		166		166

Sumber: Disbud DIY, 2022

Budaya benda kekayaan DIY yang ditetapkan di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2020 meliputi Rumah Sakit Bethesda, SMA Negeri 3 Yogyakarta, Jembatan Mbeling (Jembatan Kereta Api di Sungai Progo (BH No. 2034 Sisi Utara), Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Goa Braholo, Gedung Agung, Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Pulas, Gedung Pusat UGM, Hotel Garuda, nDalem Joyodipuran (kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY), Korem 072 Pamungkas, Rumah Jenderal Sudirman Bintaran (Museum Sudirman), Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta, Rumah Sakit Panti Rapih dan Jembatan Bantar. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada penetapan cagar budaya DIY di tingkat nasional.

Budaya tak benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan – ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan

yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.

Tabel 2-214 Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 - 2021

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1	-	1
2	2014	5	-	5
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14	-	14
9	2021	26	-	26
Jumlah		134	-	134

Sumber: Kemendikbud RI, 2022

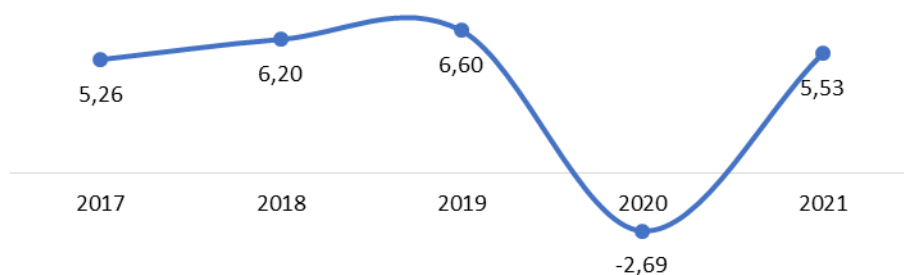
Sejak tahun 2013 -2021 sudah 134 Warisan Budaya Tak benda kekayaan DIY yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar 26 warisan budaya tak benda, yaitu Kerajinan Perak Kotagede, Jemparingan Yogyakarta, Thiwul, Lemper, Gudeg Manggar, Tradisi Wiwitan Panen Padi, Sengkalan Yogyakarta, Motif Batik Yogyakarta, Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara, Beksan Inum, Langen Toyo, Incling, Beksan Lawung Alit, Trengganon, Bedhaya Angron Akung, Upacara Bersih Desa Mbah Bregas, Upacara Adat Gumbregan, Upacara Adat Tuk Si Bedug, Nyadran Agung Makam Sewu, Upacara Adat Luwaran Tuksono, Upacara Tradisi Babad Dalan, Upacara Adat Tarapan, Upacara Adat Gondhangho, Labuhan Merapi, Ngalangi, dan Upacara Bathok Bolu.

Realisasi Kinerja Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan berdasarkan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi pada tahun 2021 adalah sebesar

12,22% dengan target 11,99%. Pencapaian ini diukur dari peningkatan Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi nasional dan internasional. Sedangkan capaian terhadap target akhir pencapaian RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 12,04% telah terealisasi sebesar 101,50% sehingga dengan besaran pencapaian tersebut, target akhir RPJMD optimis dapat dicapai.

2.2.1.6 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Pertumbuhan Ekonomi

Kapasitas perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Perekonomian DIY selanjutnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -2,69%, kemudian mengalami rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,53%. Capaian tersebut melebihi target RKPDP 2021 dengan persentase capaiannya sebesar 135,54%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 104,14%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-85 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2021 (%)

Pada tahun 2021, hanya dua lapangan usaha yang mengalami tumbuh negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kondisi ekspansif di sektor lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 5,53% seiring dengan gencarnya vaksinasi dan perbaikan kondisi aktivitas masyarakat terutama di bulan-bulan terakhir 2021. Sektor yang tumbuh paling tinggi adalah Informasi dan Komunikasi dengan tingkat pertumbuhan 16,69%.

Tabel 2-215 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	2,16	1,02	4,19	0,61
2	Pertambangan dan Penggalian	3,39	10,59	3,04	-8,84	-3,11
3	Industri Pengolahan	5,74	5,12	5,73	-4,38	0,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,96	5,31	5,43	-0,38	2,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,46	5,13	8,90	0,51	6,82
6	Konstruksi	6,94	13,1	14,39	-	10,82
					15,64	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	5,54	5,16	-4,52	1,51
8	Transportasi dan Pergudangan	4,74	6,6	3,55	-	1,93
					20,21	
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,21	6,77	8,89	-	7,55
					16,91	
10	Informasi dan Komunikasi	6,14	6,48	7,45	19,70	16,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	6,14	8,62	-1,09	1,45
12	Real Estat	4,94	5,54	5,93	1,27	0,57
13	Jasa Perusahaan	5,86	5,51	6,75	-	8,09
					14,89	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,51	4,06	3,30	-2,22	-0,39
15	Jasa Pendidikan	5,56	6,01	6,57	4,47	5,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,84	6,05	6,61	19,18	4,47
17	Jasa lainnya	5,76	6,06	6,25	-	21,53
					15,74	
PDRB		5,05	5,26	6,20	-2,69	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar pada tahun 2021 adalah Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 21,68%. Pada tahun 2020, jenis pengeluaran ini tumbuh negatif sebesar 12,90%. Net Ekspor antar daerah mengalami kontraksi yaitu sebesar 148,78%. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh cukup tinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 8,20% dan Perubahan Inventori tumbuh 8,63%.

Tabel 2-216 Nilai dan Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,22	3,95	3,81	-2,75	1,77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,61	2,63	9,58	-6,56	0,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,20	3,74	3,12	-0,93	0,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,97	10,17	9,74	-13,41	8,20
5	Perubahan Inventori	2,02	3,54	3,04	6,24	8,63
6	Ekspor Luar Negeri	9,26	12,82	-0,22	-12,90	21,68
7	Impor Luar Negeri	9,19	6,22	-9,16	-14,87	7,30
8	Net Ekspor Antar-Daerah	-6,16	-3,14	-9,95	-74,74	-148,78
	PDRB	5,05	5,26	6,20	-2,69	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Periode tahun 2017 - 2019, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,97%, 10,62% dan 13,49% yang didukung oleh beberapa proyek mega termasuk pembangunan YIA. Pada tahun 2020, semua wilayah tumbuh negatif dengan kontraksi terbesar dialami oleh Kabupaten Kulon Progo dengan pertumbuhan -4,06%. Semua Kabupaten dan Kota kemudian tumbuh positif seiring dengan meningkatnya kembali dinamika aktivitas perekonomian daerah. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sekitar 6,00%.

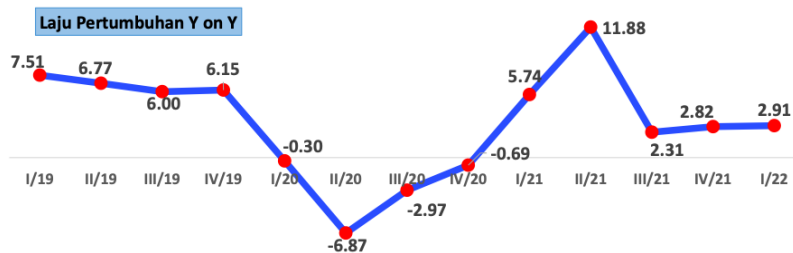
Tabel 2-217 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
Kulon Progo	5,97	10,84	13,49	-4,06	5,00
Bantul	5,10	5,47	5,53	-1,66	5,20
Gunungkidul	5,01	5,16	5,33	-0,68	5,15
Sleman	5,34	6,42	6,49	-3,91	5,90
Yogyakarta	5,24	5,49	5,96	-2,42	6,00
DIY	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53

Keterangan: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Merujuk pada data BPS DIY, perekonomian DIY pada triwulan I Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,91 persen (*year on year; y o y*) dibanding triwulan I, 2021. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha jasa lainnya yang mencapai 24,30 persen diikuti transportasi sebesar 17,80 persen dan pertanian sebesar 10,82 persen. Pertumbuhan tersebut didukung sektor pariwisata DIY menggeliat pada kuartal akhir tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022 ini. Terlebih dengan terbitnya Surat Edaran Satgas COVID-19 No.11/2022, masyarakat dimudahkan melakukan aktivitas perjalanan pariwisata. Puluhan destinasi wisata telah dibuka dengan memenuhi syarat prokes yang ketat, dan ruas-ruas jalan terlihat padat pada waktu tertentu, serta pusat-pusat perbelanjaan mulai dipadati pengunjung. Berikut dapat digambarkan pertumbuhan ekonomi *y on y* sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (9 Mei 2022)

Gambar 2-86 Pertumbuhan Ekonomi DIY 2019-2022

2.2.1.7 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap hasil pembangunan yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga terus naik, maka diperlukan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa terjadi keseimbangan antar dimensi pembangunan. Salah satu instrument yang bisa digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dengan demikian maka status lingkungan hidup di suatu daerah akan tergambar secara kuantitatif. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan maka DIY juga menetapkan IKLH menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD 2017-2022.

Capaian indikator kinerja IKLH pada tahun 2021 sebesar 60,53, apabila dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun target tahun 2021 pada dokumen RPJMD persentase capaiannya sebesar 94,31%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD.

Perhitungan IKLH dilakukan dengan mengagregasi tiga (3) indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Nilai IKA diperoleh dengan pengukuran yang dilakukan terhadap tujuh parameter kualitas air sungai, yaitu parameter BOD, DO, TSS, COD, Fosfat, bakteri Coli Tinja, dan bakteri Coli Total. Sedangkan pengukuran parameter SO₂ dan NO₂ terhadap udara ambien dengan metode passive sampler pada kawasan-kawasan transportasi, permukiman, komersial, dan industri akan menghasilkan angka IKU. Untuk IKTL dilakukan pengukuran

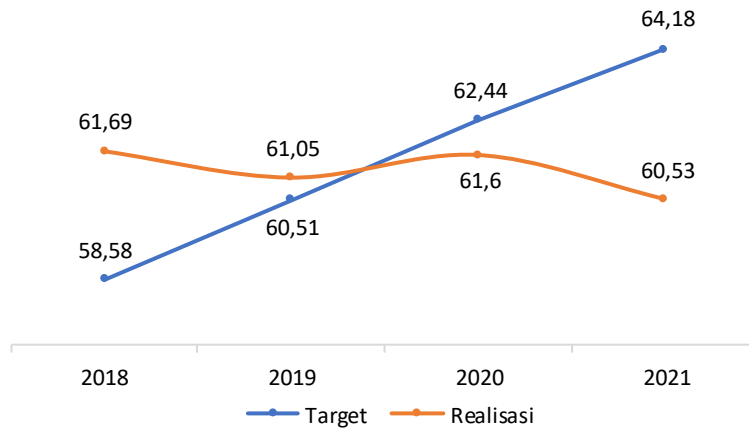
dengan cara menghitung tutupan lahan di DIY berdasarkan interpretasi citra satelit dan penetapan kawasan hutan berdasarkan SK. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKA untuk DIY adalah sebesar 35,42, nilai IKU sebesar 88,57, dan nilai IKTL adalah sebesar 58,34. Berdasarkan rumus tersebut di atas maka nilai IKLH di DIY berada pada angka 66,15 Sehingga kualitas IKLH di DIY masuk dalam kategori cukup baik, walaupun tidak mencapai target RPJMD (64,18). Sedangkan untuk kategori predikatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-218 Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat baik	$IKLH > 80$
2	Baik	$70 < IKLH \leq 80$
3	Cukup Baik	$60 < IKLH \leq 70$
4	Kurang Baik	$50 \leq IKLH \leq 60$
5	Sangat kurang baik	$40 \leq IKLH < 50$
6	Waspada	$30 \leq IKLH < 40$

Sumber: Kementerian LHK RI, 2022

Adapun tren realisasi IKLH tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: DLHK DIY, 2022

Gambar 2-87 Target dan Realisasi IKLH tahun 2018 - 2021

Berdasarkan tabel dan grafik memperlihatkan bahwa tren nilai IKLH cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena nilai IKA dan IKU yang cenderung menurun, sedangkan untuk IKTL relatif tetap setiap tahunnya, perubahan data IKTL terjadi karena adanya perubahan penggunaan sumber data, koreksi data dan penyesuaian penggunaan lahan hutan berdasarkan SK. Penurunan nilai IKA dan IKU menunjukkan bahwa di DIY terjadi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terutama air dan udara.

2.2.1.8 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Target kinerja untuk sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dan mencapai target. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar 81,04%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 98,23% dari target kinerja akhir RPJMD

sebanyak 82,5%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 100,05%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021. Selain, itu capaian indikator IKLH apabila dibandingkan target pada RKPDP 2021 persentase capaian IKLH sebesar 101,94%.

Capaian tersebut menjadikan Indikator Kinerja Utama kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 masuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Permen ATR Nomor 21 Tahun 2021 capaian indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Rincian perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan membandingkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses superimpose antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2021.

Tabel 2-219 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
A	Perwujudan Kawasan Lindung						
1	Kawasan	612,68	99.59%	0.00	0.00%	2.50	0.41%

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
	Taman Hutan Raya						
2	Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	1865,29	99.99%	0.00	0.00%	0.16	0.01%
3	Kawasan Taman Wisata Alam	0,99	95.44%	0.00	0.00%	0.05	4.56%
4	Kawasan Cagar Alam	11,82	99.54%	0.00	0.00%	0.06	0.46%
5	Kawasan Suaka Margasatwa	608,01	98.13%	0.00	0.00%	11.58	1.87%
6	Kawasan Hutan Penelitian	101,46	99.82%	0.00	0.00%	0.18	0.18%
7	Kawasan Cagar Alam Geologi	145,18	100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	Kawasan Sempadan Waduk	72,19	99.99%	0.00	0.00%	0.01	0.01%
9	Kawasan Sempadan Pantai	1059,37	80.80%	0.00	0.00%	251.74	19.20%
10	Kawasan Sempadan Sungai	4036,45	73.99%	0.00	0.00%	1418.95	26.01%
11	Kawasan Rawan Bencana Geologi	2628,09	78.31%	0.00	0.00%	727.77	21.69%
12	Kawasan Hutan Lindung	2282,42	99.45%	0.00	0.00%	12.51	0.55%
13	Sungai	2307,55	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	Danau/ Waduk	151,19	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total		15882,69	86,75%	0.00	0.00%	2425,51	13,25%
B	Perwujudan Kawasan Budidaya						
1	Kawasan	12124,178	89,73%	1271,180	9,41%	115,740	0,86%

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
	Peruntukan Hutan Produksi						
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	14426,471	75,36%	2759,255	14,41%	1957,106	10,22%
3	Kawasan peruntukan Industri	100,339	1,80%	3539,733	63,32%	1949,723	34,88%
4	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	56753,180	85,74%	9256,353	13,98%	183,769	0,28%
5	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	16010,647	76,08%	5010,431	23,81%	23,107	0,11%
6	Kawasan Peruntukan Perkebunan	15094,020	70,31%	3685,791	17,17%	2687,469	12,52%
7	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi	41754,476	82,15%	5332,725	10,49%	3741,662	7,36%
8	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	84297,843	83,91%	11173,042	11,12%	4992,156	4,97%
9	Kawasan Peruntukan Bandar Udara	827,379	92,61%	65,973	7,38%	0,043	0,00%
10	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	14,255	61,78%	8,818	38,22%	0,000	0,00%
11	Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi	22,198	85,53%	0,000	0,00%	3,757	14,47%
	Total	241424,98	80,69%	42103.30	14.07%	15654.53	5.23%
	Rekap	257307,68	81,04%	42103.30	13.26%	18080.03	5.69%

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
Kesesuaian Keseluruhan							

Sumber: DPTR DIY, 2022

Berdasarkan tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat diketahui bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,75% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,25%. Ketidaksesuaian pada kawasan lindung diantaranya adanya aktivitas budidaya pada kawasan sempadan sungai, Kawasan rawan bencana geologi dan Kawasan sempadan pantai. Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 80,69%, belum terwujud sebesar 14,07% dan tidak sesuai sebesar 5,23%. Persentase dukungan belum terwujudnya kawasan budidaya adalah pada kawasan peruntukan industri yang belum terwujud sebesar 34,88% dan Kawasan riset dan Pendidikan tinggi sebesar 14,47%.

Perhitungan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW diperoleh dari total luas kesesuaian kawasan lindung ditambah total luas kesesuaian kawasan budidaya, dibagi total luas kawasan lindung ditambah total luas kawasan budidaya, menghasilkan angka 81,04%.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW tahun 2021 sebesar 81,04% melebihi target capaian 2021 sebesar 81% atau 100,05% dari target capaian. Meskipun melebihi target namun masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan belum terwujud. Ketidaksesuaian pada Kawasan lindung paling tinggi yaitu Kawasan sempadan sungai sebesar 26,01% dan Kawasan budidaya paling tinggi pada Kawasan peruntukan industri sebesar 34,88%. Pemanfaatan ruang yang belum terwujud yaitu pada Kawasan peruntukan industri sebesar 63,33%.

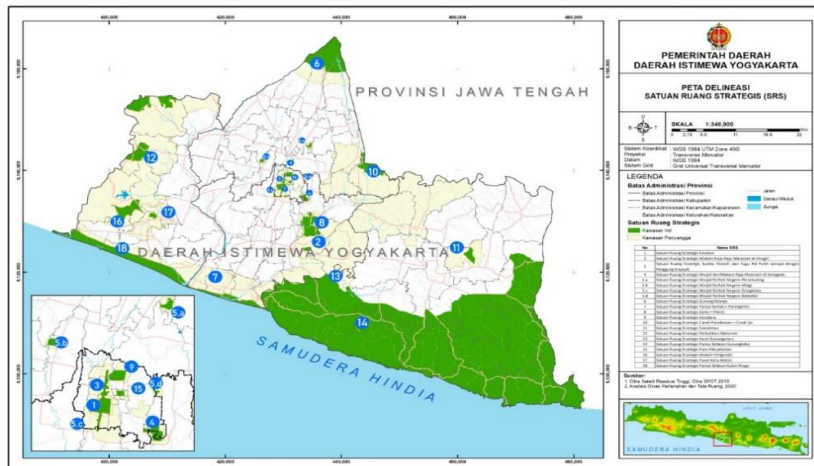
Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa kendala yakni keterlibatan pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang masih sangat terbatas. serta dinamika kebijakan penataan ruang setelah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi proses penyelenggaraan penataan ruang di DIY. Kendala-kendala tersebut diatasi dengan sosialisasi dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya unsur masyarakat, serta upaya penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, mendorong percepatan rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten sebagai bagian dalam upaya perwujudan kesesuaian kegiatan yang memanfaatkan ruang.

2.2.1.9 Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan - Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Peraturan Daerah Istimewa merupakan implementasi untuk mewujudkan salah satu kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penataan Ruang keistimewaan DIY diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*Hamemayu hayuning bawana*), asas spiritual-transenden (Sangkan paraning dumadi), humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*Manunggaling Kawula lan Gusti*), asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi), ketaatan historis (sumbu

filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak), asas filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*) dan asas delineasi spasial (*pathok negara*).



Sumber: DPTR DIY, 2022

Gambar 2-88 Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis

Penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY yang dicapai melalui beberapa komponen meliputi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
 - 1) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
 - 2) Penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*)
 - 3) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pengendalian Pemanfaatan ruang

Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan pada tahun 2021 yang sebesar 51,81%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun target tahun 2021 pada dokumen RPJMD persentasenya sebesar 105,67%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

Capaian kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,12% dari tahun 2020. Capaian persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 51,81% dari target yang ditetapkan sebesar 49,03% atau sebesar 105,67%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 54,44%, capaian tahun 2021 ini mencapai 95,17%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci tata ruang, rencana induk dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

Realisasi capaian kinerja tersebut merupakan penjumlahan dari capaian beberapa aspek diantaranya jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL sebesar 23,47%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan sebesar 13,89% dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 14,44%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun ini mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL meningkat sebesar 8,61%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan meningkat sebesar 1,39%, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis meningkat sebesar 1,11%. Berikut ini daftar satuan ruang strategis yang sudah mempunyai dokumen perencanaan, didorong untuk melakukan perwujudan ruang sesuai dokumen rencana dan satuan ruang strategis yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian sebagai berikut :

Tabel 2-220 Daftar Dokumen Perencanaan Tata Ruang di 18 Satuan Ruang Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
1	Karaton	2015	2014	2018 (1)
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014	2015	2021

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
		2015 2020		
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	2014	2015	2018(2)
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015 2019		2018 (3)
5	Masjid Pathok Nagoro	2015	2018	2018 (6) 2019 (Validasi KLHS)
6	Gunung Merapi		2015 2018	2021
7	Pantai Samas – Parangtritis	2015 2019 2021	2014	2019 (10)
8	Kerto – Pleret	2015 2020		2021
9	Kotabaru	2015	2015	2018 (4)
10	Candi Prambanan - Candi Ijo		2016	2020
11	Sokoliman	2016	2018	2021
12	Perbukitan Menoreh	2015 2018	2015 2020	2018 (7) 2019 (Validasi KLHS)
13	Karst Gunungsewu	2014	2015 2018	2019 (9)
14	Pantai Selatan Gunungkidul	2016	2019	2018 (8)
15	Puro Pakualaman	2015	2014	2018 (5)
16	Makam Girigondo	2015		2021
17	Pusat Kota Wates			2020
18	Pantai Selatan Kulon Progo			2021

Sumber: DPTR DIY, 2022

Beberapa kendala yang dihadapi pada Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, yaitu: 1)Dinamika kebijakan penataan ruang setelah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus produk hukum Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; 2) Dokumen Perencanaan Tata Ruang pada satuan ruang strategis berupa Rencana induk masih belum ditetapkan menjadi peraturan Gubernur; serta 3) Keterlibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan.

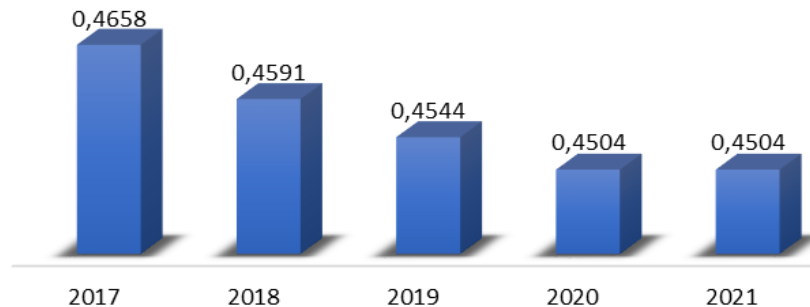
Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu: 1) Penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah dan Peraturan Gubernur Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya; serta 2) Pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat terutama dalam hal Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar terwujud pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2.2.1.10 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah - Indeks Williamson

Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar kab/kota yang ada di DIY dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis.

Capaian indikator kinerja Indeks Williamson DIY pada tahun 2021 yang sebesar 0,4504, apabila dibandingkan dengan target pada RKPD 2021 persentase capaiannya sebesar 102,93%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 97,03%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPD 2021,

namun belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021 pada dokumen RPJMD. Nilai indeks Williamson di DIY saat ini ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Keterangan: 2017-2018 Proyeksi SP2010, 2019-2021 Proyeksi Supas2015

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-89 Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di DIY tidak terlampau besar karena masih di bawah 0,5000. Ketimpangan menurun pada periode 2017 sampai 2020 yaitu dari Indeks Williamson 0,4658 (2017) yang turun menjadi 0,4504 (2020). Selanjutnya ketimpangan tidak mengalami perubahan pada periode selanjutnya dengan Indeks Williamson sebesar 0,4504 di tahun 2021.

2.2.1.11 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Opini BPK

Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan

bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di dalamnya memuat Opini BPK atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2021, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/04/2021, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/04/2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ke-11 kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010. Capaian WTP tersebut apabila dibandingkan dengan target RKPD 2021 maupun RPJMD persentase capaiannya sebesar 100%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPD 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Komitmen dan dukungan semua stakeholder laporan keuangan.
- b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil-hasil tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti.
- d. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

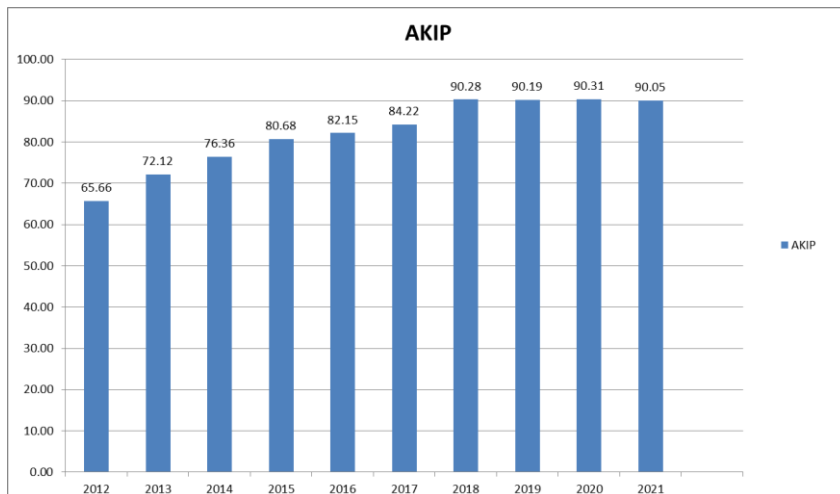
2.2.1.12 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Nilai AKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang handal, efektif dan efisien, mampu mewujudkan *Good Government and Clean Governance*. Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, tetap berkomitmen untuk terus berproses melakukan Reformasi Birokrasi.

Dari capaian indikator kinerja Nilai AKIP pada tahun 2021 yang merupakan penilaian di tahun 2020, telah mendapatkan nilai AA. Jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentase capaiannya sebesar 150%. Artinya capaian tersebut

telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

Pada tahun 2021, hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI) diperoleh predikat AA dengan nilai akhir sebesar 90,05. Nilai tersebut turun dari perolehan tahun 2020 sebesar 90,31. Sampai dengan Penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



Sumber: Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-90 Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2021

Tabel 2-221 Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2019-2021

Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun		
		2019	2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	27,65	27,66	27,72

Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun		
		2019	2020	2021
b. Pengukuran Kinerja	25	21,74	21,80	21,95
c. Pelaporan Kinerja	15	13,58	13,62	13,67
d. Evaluasi Internal	10	9,85	9,85	9,85
e. Capaian Kinerja	20	17,37	17,38	16,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	90,19	90,31	90,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA	AA

Sumber: KemenPAN RB RI, 2022

Pada Tahun 2021, nilai AKIP DIY mengalami penurunan sebesar 0,26 poin jika dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2020. Dari 5 komponen penilaian AKIP, terdapat 3 komponen mengalami kenaikan nilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Sedangkan pada Komponen penilaian Evaluasi Internal, nilai capaiannya tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,85 poin selama 3 tahun terakhir. Komponen yang mengalami penurunan cukup besar adalah capaian kinerja sebesar 0,52 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek ini menjadi *highlight* dari Kemenpan RB karena capaian kinerja yang kurang menggembirakan karena 8 indikator kinerja dari 14 indikator kinerja (57,14%) tidak tercapai. Selain itu terdapat 5 indikator kinerja yang realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dua indikator menjadi penekanan Kemenpan RB yakni angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah rerata nasional. Capaian yang kurang menggembirakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, terutama pada indikator pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang terdisrupsi selama pandemi. Atas evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, Kemenpan RB merekomendasikan Pemerintah Daerah DIY untuk mereviu kembali strategi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sedemikian rupa sehingga seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai 100% atau lebih.

Namun demikian, secara umum Pemda DIY berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas penerapan SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah sudah menunjukkan kondisi yang membaik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada *integrated development plan* serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY. Selain itu Pemda DIY sudah berupaya menerapkan *performance based organization*, sehingga korelasi antara kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD dengan penentuan organisasi perangkat daerah sangat jelas.

Nilai AKIP “AA” Pemda DIY tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemda DIY sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

2.2.1.13 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan - Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan

DIY memiliki status istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY pada Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keistimewaan harus mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan

Penyaluran Dana Keistimewaan, dan Peraturan Gubernur DIY No. 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang sudah direvisi melalui Pergub DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Program-program keistimewaan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok:

- a. Program untuk menghubungkan satuan-satuan ruang strategis keistimewaan di DIY;
- b. Program yang memusatkan peran desa sebagai lumbung budaya, lumbung ekonomi, dan lumbung peradaban;
- c. Program yang menggerakkan organisasi-organisasi dan lembaga budaya yang tersebar di perdesaan dan perkotaan;
- d. Program untuk meningkatkan industri kreatif;
- e. Program untuk melestarikan simbol-simbol kejayaan Yogyakarta pada masa lalu;
- f. Program untuk menjamin status kepemilikan tanah penduduk dan desa;
- g. Program untuk penataan kelembagaan asli berciri khas keistimewaan Yogyakarta.

Sejalan dengan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh DIY, pengelolaan keistimewaan DIY masuk ke dalam unsur tata kelola Pemerintahan Daerah DIY yang harus diperhatikan. Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan" mendukung tujuan Pemda DIY kedua "Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)".

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan diukur dengan indikator persentase capaian program urusan keistimewaan. Meta indikator untuk menghitung persentase capaian program urusan keistimewaan adalah jumlah program urusan keistimewaan yang targetnya tercapai dibagi jumlah seluruh program urusan keistimewaan dikali 100%.

Program urusan keistimewaan terdiri dari 26 program. Pada tahun 2021 dilaksanakan pembaruan pemetaan Program/ Kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga 26 program tersebut berubah menjadi kegiatan dan masuk ke dalam 1 program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Dari total 26 program, terdapat 24 program yang tercapai dan 2 program yang tidak tercapai, sehingga capaian program adalah sebesar 92,31%.

Dari capaian indikator kinerja Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan pada tahun 2021 yang sebesar 92,31%. Jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentase capaiannya sebesar 111,74%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

2.2.1.14 Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa - Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan

Sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2012, telah ditetapkan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menjabarkan ruang lingkup Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran.

Bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi sejumlah 14.044 bidang. Sesuai dengan tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, telah dilakukan inventarisasi, identifikasi,

verifikasi, dan pemetaan. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pendaftaran sertipikat terhadap bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Pada tahun 2021 ditargetkan bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 17.619 bidang.

Capaian indikator kinerja Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan pada tahun 2021 sebesar 15.335 bidang, jika dibandingkan dengan target pada RKPD 2021 persentase capaiannya sebesar 100,97%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 87,04%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPD 2021, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dari target 17.619 bidang terealisasi sejumlah 15.335 bidang dengan persentase terhadap target tahun 2021 mencapai 87,04%. Secara kumulatif pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2021 telah direalisasikan sebanyak 13.710 bidang dari target 13.877 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022, sedangkan untuk pendaftaran Tanah Desa telah direalisasikan sebanyak 1.625 bidang dari target 8.000 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022.

Tabel 2-222 Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JML
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	673
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	2335
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	3939

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran									JML
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	0	3091
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1423	13710

Sumber: DPTR DIY, 2022

Adapun data capaian pendaftaran Tanah Desa pada masing-masing kabupaten/kota sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2-223 Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi s.d. 2021	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat s.d. 2021
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	1,889	228	287
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0	0
3	Gunungkidul	10,882	3,295	7,599	3,295	0	544
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	0	794
	Jumlah	50,279	16,068	34,223	15,840	228	1,625

Sumber: DPTR DIY, 2022

Beberapa kendala yang dihadapi pada capaian kinerja tersebut, yaitu: 1) Belum dapat dilaksanakannya pendaftaran terhadap Tanah Desa yang belum bersertipikat karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2) Terdapat bidang Tanah Desa yang masih bermasalah. Masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga serta, sehingga belum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan; serta 3) Kantor Pertanahan belum dapat memproses pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah: 1) Mendorong percepatan penyelesaian penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang mulai diinisiasi pada tahun 2021; 2) Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga yang dilaksanakan sebelum tahun 1985 dan perlu diusulkan pengaturan lebih lanjut dalam revisi Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta 3) Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

2.2.2 Capaian Kinerja Program Pemda

Berdasarkan *cascading* RPJMD 2017-2022, pencapaian IKU Pemda DIY didukung oleh beberapa program Pemda. Berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja program Pemda DIY sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-224 Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
I. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan							
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	14,32	12,59	14,35	113,98	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,59	15,97	15,64	97,93	Tidak Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
3	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Orang	238	215	257	119,53	Tercapai
4	Presentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	persen	25,14	8,22	48,83	594,04	Tercapai
II. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup							
5	Angka Harapan Hidup	tahun	74,99	75,41	75,04	99,51	Tidak Tercapai
III. Program Pembangunan Sosial Masyarakat							
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Kab/Kota	2	5	2	40,00	Tidak Tercapai
7	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	persen	24,92	21,62	30,16	139,50	Tercapai
8	<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	1,80	2,10	1,90	109,52	Tercapai
9	Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	48,00	54,00	54,00	100,00	Tercapai
10	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk	persen	12,10	8,39	13,73	36,35	Tidak Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
	(Crime Rate)						
IV. Program Penanggulangan Kemiskinan							
11	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	persen	0,40	0,40	0,49	122,50	Tercapai
12	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	503.140	309.021	474.490	46,45	Tidak Tercapai
13	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Angka	16.943	14.333	17.014	118,71	Tercapai
V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda							
14	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	persen	13,27	14,18	14,22	100,28	Tercapai
15	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen	36,60	16,82	16,89	100,42	Tercapai
VI. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)							
16	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan	persen	40,27	45,00	39,39	87,53	Tidak Tercapai
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,57	2,24	4,56	49,12	Tidak Tercapai
18	Jumlah Desa Mandiri Budaya	desa	10,00	15,00	18,00	120,00	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
	(Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)						
VII. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana							
19	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	38,43	40,80	35,42	86,81	Tidak Tercapai
20	Indeks Kualitas Udara	Angka Indeks	89,14	89,07	88,57	99,44	Tidak Tercapai
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,32	63,05	58,34	92,53	Tidak Tercapai
22	Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125,15	135,00	124,15	108,04	Tercapai
VIII. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang							
23	Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	persen	66,26	77,20	78,66	101,89	Tercapai
IX. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan							
24	Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,09	40,25	40,08	99,58	Tidak Tercapai
25	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi	persen	81,46	78,00	81,45	104,42	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
	Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi						
X Program Sinergis Tata Kelola Pemerintah Daerah							
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100,00	Tercapai
27	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Rupiah	9016510 978	9.237.59 1.665	13.406.4 69.567	145,13	Tercapai
28	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	persen	8,95	8,75	8,95	102,29	Tercapai
29	Nilai internal integritas organisasi	persen	8,60	4,50	8,60	191,11	Tercapai
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	persen	9,33	5,90	9,33	158,14	Tercapai
XI. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah							
31	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdas Kelembagaan	persen	100	100	100	100,00	Tercapai
XII. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa							
32	Presentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	persen	61,25	73,16	74,11	101,30	Tercapai

Sumber: Bappeda DIY, 2022 (diolah)

Berdasar tabel di atas, capaian kinerja program Pemda DIY tahun 2021 dari 32 indikator kinerja, terdapat 11 indikator yang tidak

mencapai target atau realisasi masih di bawah 100%. Selanjutnya, terdapat 3 indikator yang mencapai target dengan realisasi 100%. Kemudian terdapat 18 indikator telah mencapai target dengan realisasi lebih dari 100%.

2.2.2.1 Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:

2.2.2.1.1 Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara. Dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dibutuhkan kriteria minimal pedoman penyelenggaraan pendidikan yang harus dipenuhi penyelenggara pendidikan. Kriteria minimal tersebut mencakup delapan aspek, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian capaian kedelapan standar tersebut akan menunjukkan nilai rapor mutu satuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Perhitungan capaian SNP diperoleh dari persentase jumlah SMA, SMK, dan SLB dengan nilai SNP lebih dari 90 pada tahun n-1 sampai dengan tahun n dibagi jumlah seluruh SMA, SMK dan SLB (Negeri dan Swasta) dikali 100%. Berikut adalah pencapaian SNP di DIY pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2-225 Rincian Jumlah Sekolah yang Memenuhi SNP>90

Sekolah	Sekolah dengan pencapaian SNP >90		Jumlah Sekolah Total di DIY
	2020	2021	
SMA	2	26	168
SMK	4	21	213
SLB	1	12	79
Jumlah	7	59	460
Persentase: $(7+59)/460 \times 100\% = 14,35\%$			

Sumber: BAN-P DIY, 2022

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2021 diperoleh capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi SNP adalah sebesar 14,35%. Berikut adalah perbandingan capaian tahun 2020 dengan target tahun 2021 dan target akhir RPJMD:

Tabel 2-226 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	14,32	12,59	14,35	113,98	13,20	108,71

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

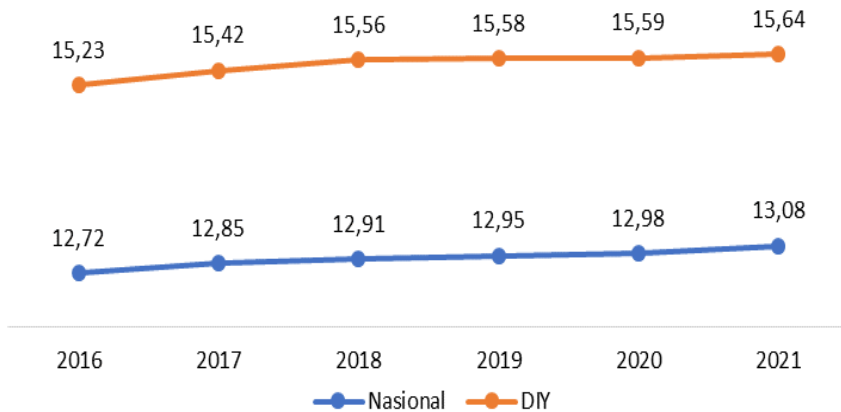
Capaian SNP pada tahun 2021 sebesar 14,35% telah melampaui target tahun 2021 maupun target akhir RPJMD sebesar 13,20%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 14,32%, terdapat peningkatan capaian di tahun 2021 sebesar 0,03%.

Capaian SNP pada jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY dilakukan melalui pemberian bantuan operasional sekolah bagi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta. Pemberian bantuan operasional pada tahun 2021 difokuskan pada dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas pada akhir 2021. Diharapkan pemberian bantuan operasional ini dapat turut menjaga kualitas satuan pendidikan di tengah upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran siswa akibat pemberlakuan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.

2.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sesuai definisi Badan Pusat Statistik (BPS), diukur dari lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan Angka HLS berlaku bagi penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sesuai data BPS, nilai capaian HLS DIY pada tahun 2020 adalah 15,59 tahun dan pada tahun 2021 sebesar 15,64 tahun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat peningkatan HLS sebesar 0,05 tahun pada tahun 2021.

Angka HLS DIY mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2021. Capaian angka HLS DIY juga melampaui capaian HLS nasional seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

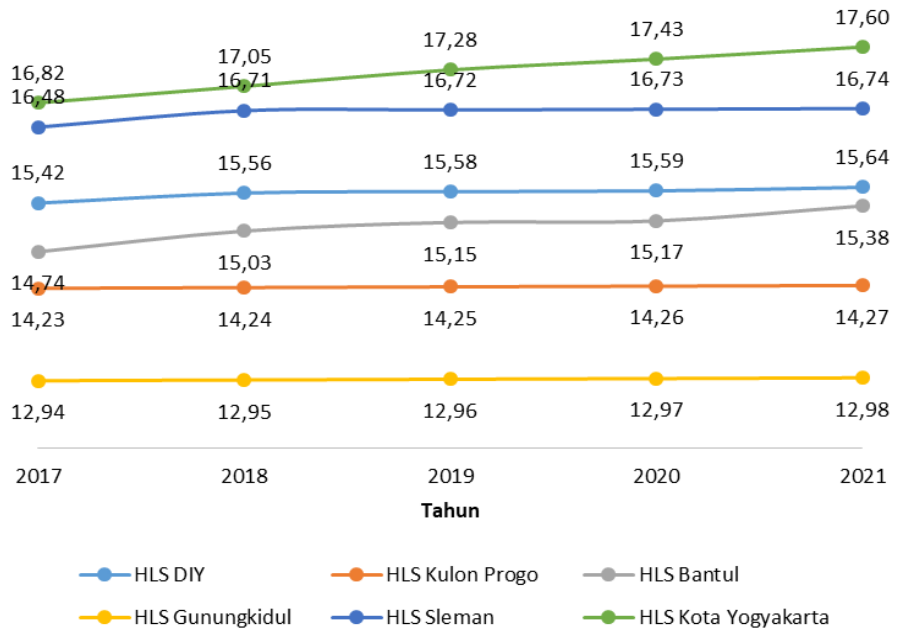
Gambar 2-91 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2021

Tabel 2-227 Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,59	15,97	15,64	97,93	16,12	97,02

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target HLS pada RPJMD tahun 2021 sebesar 15,97 tahun baru tercapai pada angka 15,64 tahun. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan angka HLS antar kabupaten/kota di DIY.



Sumber: BPPSD DIY, 2022 (data diolah)

Gambar 2-92 Capaian HLS Kabupaten/Kota dan DIY 2017-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa ada 3 kabupaten yang capaian HLS nya di bawah rata-rata DIY yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Solusi yang dilakukan adalah dengan

mengoptimalkan pemanfaatan bantuan operasional bagi satuan pendidikan maupun beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu guna memastikan seluruh penduduk usia sekolah memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu dukungan sektor lain untuk peningkatan akses penunjang pendidikan, seperti transportasi, jaringan internet, perpustakaan, dan pemberdayaan masyarakat khususnya di 3 kabupaten yang HLS nya masih di bawah rata-rata DIY.

2.2.2.1.3 Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional mutlak diperlukan demi membangun masyarakat di lingkungannya. Guna mendukung peran aktif tersebut, dibutuhkan pendidikan kepemudaan untuk membentuk mental pemuda yang tangguh dan berwawasan luas. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Potensi pemuda DIY yang sangat besar memberikan kesempatan luas bagi penyelenggaraan pendidikan kepemudaan yang dapat memicu kreatifitas, inovasi, dan kemandirian pemuda.

Peningkatan jumlah pemuda kader aktif dihitung dari selisih jumlah pemuda kader aktif pada tahun n dengan jumlah pemuda kader aktif pada tahun n-1. Berikut adalah rincian perhitungan jumlah kader pemuda aktif pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2-228 Jumlah Pemuda Kader Aktif 2020-2021 di DIY

	Tahun 2020	Tahun 2021
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (Kwarda) dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi kepemudaan	1.268	1.295

	Tahun 2020	Tahun 2021
Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (alumni pelatihan pemasaran <i>online</i> dan pelatihan kewirausahaan tahun sebelumnya, pelatihan pemasaran <i>online</i> , pelatihan kewirausahaan pemuda di kantong kemiskinan, sosialisasi kewirausahaan; partisipan Sentra Kewirausahaan Pemuda 2021)	2.823	3.014
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (alumni Paskibraka, seleksi dan pembinaan Paskibraka, pemilihan Duta Pancasila, sosialisasi kepemudaan)	3.176	3.215
Jumlah	7.267	7.524
Selisih jumlah pemuda kader aktif tahun 2020 dan 2021:	7.524-7.267 = 257	

Sumber: BPO DIY, 2022

Capaian indikator peningkatan jumlah pemuda kader aktif pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-229 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	orang	238	215	257	119,53	220	116,82

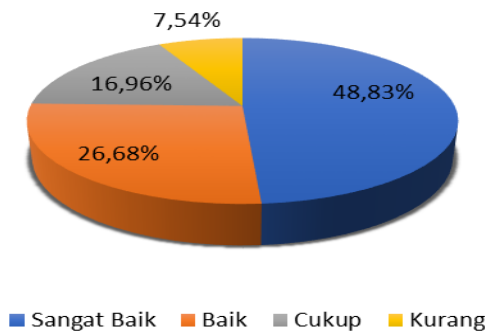
Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pemuda kader aktif sebesar 257 orang. Jumlah ini melampaui target tahun 2021 sebesar 215 orang dan juga melampaui target akhir RPJMD sebesar 220 orang. Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan partisipasi yang menunjukkan antusiasme pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan. Pemda DIY pada tahun 2021 berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda, khususnya pemuda di kantong-kantong kemiskinan, melalui pelatihan kewirausahaan. Para pemuda tersebut diharapkan dapat menginisiasi usaha berbasis potensi lokal dengan tujuan akhir

meningkatkan produktifitas masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

2.2.2.1.4 Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju

Sekolah yang telah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju diartikan sebagai sekolah yang telah dapat memenuhi seluruh standar implementasi pendidikan berbasis budaya secara maksimal. Pemenuhan ini mencakup ketersediaan sarana prasarana pembelajaran budaya, implementasi ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah, serta kapasitas yang memadai dari pendidik dan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta. Hasil evaluasi pendidikan berbasis budaya disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Gambar 2-93 Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya

Pada grafik di atas sekolah yang telah melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju mendapatkan predikat sangat baik dalam penilaian evaluasi, yaitu sebesar 48,83% dari seluruh sekolah jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus yang menjadi sasaran evaluasi. Rincian realisasi Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-230 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	%	25,14	8,22	48,83	594,04	8,98	543,76

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2021 sebesar 48,83% telah melampaui target 2021 maupun target akhir RPJMD sebesar 8,98%. Dengan penerapan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun 2021, Pemda DIY tetap memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya melalui *workshop* internalisasi nilai-nilai budaya Jawa kepada para pendidik, penyempurnaan kurikulum bahasa Jawa, serta pelaksanaan pentas seni tradisional siswa. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan optimal dengan sistem bauran demi mengikuti ketentuan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi.

2.2.2.2 Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Selain itu, AHH juga mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

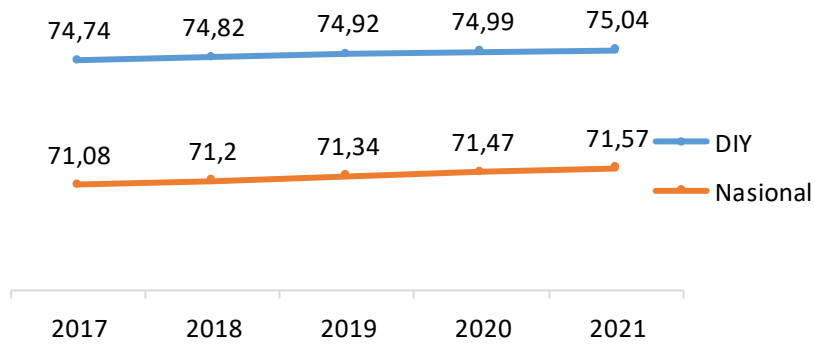
AHH menjadi parameter bagaimana pembangunan kesehatan dilaksanakan di DIY. Beberapa faktor yang berpengaruh pada AHH diantaranya adalah pendidikan, inflasi, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi. Dalam hal ini bidang kesehatan memegang peranan penting.

Tabel 2-231 Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,99	75,41	75,04	99,51	75,49	99,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Tingginya AHH DIY didorong oleh perbaikan kualitas kesehatan penduduk, terutama pada kelompok bayi, balita, dan wanita berusia subur. Selama masa pandemi perbaikan kualitas kesehatan ini ditandai oleh tingkat kemudahan penduduk dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka kesakitan (*morbiditas*).



Sumber: BPS Indonesia, 2022

Gambar 2-94 Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2017-2021

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk DIY saat lahir pada tahun 2021 sebesar 75,04 yang merupakan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75,41 maka tingkat ketercapaiannya sebesar 99,51%. AHH penduduk DIY pada saat lahir setiap tahun secara konsisten mengalami peningkatan dan berada di atas capaian nasional.

Pada sisi lain, prevalensi penyakit tidak menular relatif masih tinggi dan beberapa diantaranya (hipertensi, diabetes melitus, kanker, jantung) menjadi komorbid (penyakit penyerta) yang berisiko mengalami kondisi berat ketika individu terinfeksi COVID-19. Selain itu, penyakit menular seperti HIV dan belum optimalnya penemuan kasus tuberculosis tetap menjadi perhatian. Masalah kesehatan lainnya yang menonjol dimasa pandemi adalah tingginya angka kematian ibu. Jumlah kematian ibu di tahun 2020 sebanyak 40 kasus, dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 menjadi 131 kasus.

Upaya promotif dan preventif terus dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik secara virtual maupun pertemuan terbatas untuk penyebarluasan informasi untuk program kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, lansia, dan gizi. Demikian juga untuk pembinaan pendampingan bumil dan balita oleh kader bekerja sama dengan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Pendampingan permasalahan kematian ibu dan anak pada masa pandemi, bekerjasama dengan institusi pendidikan.

Upaya untuk menekan angka penyakit tidak menular yang cenderung terus mengalami peningkatan adalah dengan meningkatkan keberadaan dan keterlibatan Pos Binaan Terpadu (Posbindu), baik di lingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun desa di DIY. Upaya lain adalah meningkatkan kualitas 96% Desa di DIY yang telah memiliki dengan peningkatan kapasitas petugas dan penyediaan alat yang dibutuhkan serta memperbanyak kawasan tanpa rokok.

Kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat melalui 7 gerakan: 1) melakukan aktivitas fisik, 2) budaya konsumsi buah dan sayur, 3) tidak merokok di dalam rumah, 4) tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, 5) melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, 6) menjaga kebersihan lingkungan dan 7) menggunakan jamban. Upaya lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini khususnya IVA Test dan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS), menggalakkan Posbindu yang melibatkan komitmen lintas sektor untuk bekerjasama, dan peningkatan SDM di puskesmas untuk menjadi Pelayanan Ante Natal Care Terpadu menuju Triple Eliminasi (PANDU TEMAN).

Untuk meningkatkan penemuan kasus TB, akan dilaksanakan Revitalisasi *District Public Private Mix* (DPPM), membangun jejaring dengan lintas sektor serta menggalakkan upaya promotif dan preventif ke masyarakat. Juga akan meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan *feedback* bagi semua fasyankes termasuk klinik dan dokter praktek mandiri, meningkatkan akses layanan TB yang bermutu (sarana prasarana dan fasyankes untuk diagnostik maupun pengobatan TB). Selama masih masa pandemi COVID-19, pelayanan pasien TB masih menyesuaikan dengan edaran Kementerian Kesehatan No. PM.01.02/1/840/2020 mengenai Keberlangsungan Pelayanan TBC selama masa Pandemi COVID-19 yaitu pengambilan obat bagi pasien TB sensitif obat yang biasanya dilakukan seminggu sekali, berubah menjadi 1 bulan sekali. Untuk pasien TB resistan obat, yang biasanya melakukan kunjungan ke puskesmas untuk minum obat setiap hari, dilakukan pengawasan minum obat dirumah dengan menggunakan *video call* untuk tetap memastikan bahwa pasien meminum obatnya. Seiring dengan terbitnya Perpres No.67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TB, akan dibentuk Tim Percepatan Eliminasi TB DIY yang melibatkan Lintas Sektor (semua Organisasi Perangkat Daerah/ OPD DIY) untuk mempercepat penemuan kasus TBC, meningkatkan keberhasilan pengobatan TB, dan meningkatkan pemberian pengobatan pencegahan TB (TPT).

Memasyarakatkan gerakan hidup sehat (Germas) dengan menitikberatkan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Upaya tanpa henti adalah terus mensosialisasikan dan melakukan monitoring evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan selama dengan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak selama pandemi COVID-19.

2.2.2.3 Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan indikator:

2.2.2.3.1 Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen antara sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program maupun kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak serta perlindungan anak. Agregasi dari pencapaian Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) menjadikan DIY Layak Anak.

KLA meliputi 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak yang pelaksanaannya melibatkan berbagai OPD sesuai kluster dan indikator KLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.

Tabel 2-232 Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Kabupaten/	Kab/	2	5	2	40	5	40

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas.	Kota						

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Pada tahun 2021 Kota Yogyakarta mendapatkan kenaikan kategori dari Nindya menjadi Utama, sedangkan 4 kabupaten lainnya tetap tidak mengalami perubahan kategori. Kabupaten Sleman tetap di kategori Nindya, sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tetap di kategori Madya. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemda DIY untuk mendorong ketiga kabupaten tersebut maupun kabupaten kota yang lain dengan: 1) Melakukan advokasi dan pembinaan kepada Gugus Tugas Provila dan Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak, 2) Mendampingi Kabupaten/Kota dalam evaluasi KLA, 3) Penyusunan Juknis Sekolah Ramah Anak (SRA)/Madrasah Ramah Anak (MRA) guna percepatan mewujudkan SRA/MRA, 4) Membuka telekonseling TESAGA melalui wa, telepon, medsos, Surat Kabar, dan Radio, 5) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi melalui medsos, dan 6) Pelatihan Perlindungan Anak baik luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).

Atas upayanya, pada tahun 2018 Pemda DIY mendapatkan penghargaan sebagai Pendorong kabupaten/kota layak anak dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan kategori menjadi Pelopor Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

2.2.2.3.2 Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, antara lain di lembaga eksekutif; legislatif; dan yudikatif.

Keterwakilan perempuan dilembaga-lembaga strategis menjadi salah satu indikator SDGs yang tercantum pada target 5.5 yaitu “Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat”.

Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai Indikator Kinerja Program Pemda di sini dihitung dari jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi jumlah seluruh pejabat pengambil keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikali 100%.

Capaian DIY pada tahun 2021 sebesar 30,16%, telah melampaui target (21,62%), atau memiliki capaian 139,50%. Capaian DIY tersebut menunjukkan tren kenaikan meskipun belum bisa mencapai komposisi 50:50 sebagaimana kampanye yang digaungkan oleh PBB yaitu *Gender Equality Planet 50:50* yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tren kenaikan yang dicapai oleh DIY diharapkan selalu meningkat sehingga komposisi tersebut dapat terwujud.

Tabel 2-233 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan	%	24,92	21,62	30,16	139,50	21,62	139,50

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
yudikatif.							

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

2.2.2.3.3 Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduksinya, yaitu umur 15 - 49 tahun. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, 2012 dan 2017 TFR di DIY cenderung mengalami peningkatan dari 1,8 menjadi 2,1 dan meningkat lagi menjadi 2,2.

Karena SDKI dilaksanakan setiap lima tahunan, maka capaian TFR tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Publik (SKAP) BKKBN yang dikeluarkan setiap tahun.

Tabel 2-234 Target dan Capaian Indikator Program Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Total Fertility Rate	angka	1,8	2,1	1,9	109,52	2,1	109,52

Sumber: BKKBN, 2022

Berdasarkan SKAP yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2021, TFR di DIY menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 yaitu di angka 1,8 menjadi 1,9. Dengan demikian, target TFR tahun 2021 sudah tercapai. Keberhasilan pencapaian target TFR tersebut disebabkan karena meningkatnya minat masyarakat terhadap program Keluarga Berencana.

2.2.2.3.4 Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

Sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, evaluasi perkembangan desa dan kalurahan memiliki 4 ruang lingkup, yaitu: evaluasi perkembangan desa dan kalurahan, perlombaan desa dan kalurahan, pekan inovasi perkembangan desa dan kalurahan, serta penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kalurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kalurahan dimaksudkan untuk mengevaluasi, mendorong serta memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kalurahan/Kelurahan beserta masyarakatnya untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kalurahan. Untuk Tahun 2021 Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-235 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/Kelurahan	48	54	54	100	60	90

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2022

Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan melakukan analisis dan validasi secara berjenjang terhadap hasil penilaian dan

pemeringkatan perkembangan desa dan kalurahan. Analisis, validasi dan pengujian kesesuaian data akan menghasilkan pemeringkatan desa dan kalurahan pada kategori cepat berkembang, berkembang maupun kurang berkembang. Desa dan kalurahan cepat berkembang hasil penilaian perlombaan desa dan kalurahan tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Desa/Kelurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
- 2) Desa/Kelurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo
- 3) Desa/Kelurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
- 4) Desa Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman
- 5) Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta
- 6) Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo

Dengan demikian secara kumulatif sampai dengan tahun 2021 terdapat 54 desa/kelurahan cepat berkembang di DIY, memenuhi target tahun 2021 yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 54 desa, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.2.2.3.5 Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan.

Angka *crime rate* menggambarkan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk di wilayah tertentu pada satuan waktu tertentu. Penghitungan angka ini setidaknya mengacu pada angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Daerah DIY dan jumlah penduduk DIY.

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

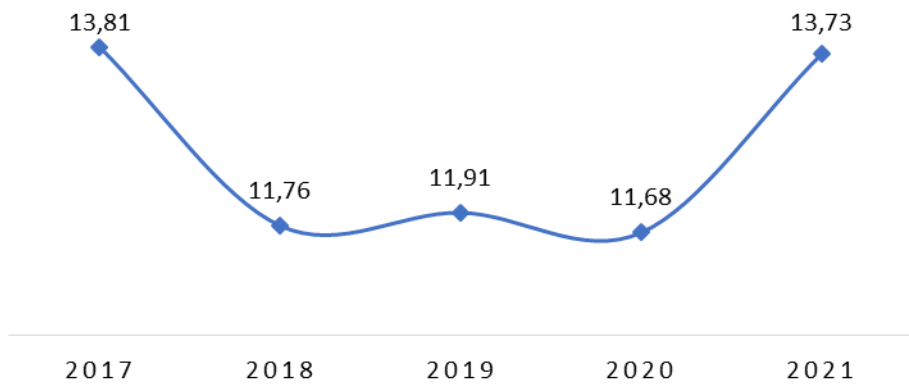
Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2020-2021 di wilayah hukum Polda DIY mengalami tren kenaikan kasus pada beberapa jenis tindak pidana dan penurunan kasus pada jenis jenis tindak pidana yang lain. Kasus tindak kriminal tahun 2020 dan 2021 didominasi tindak pidana Narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana KDRT, dan pencurian dengan kekerasan. Jenis kasus lain yang tetap eksis dalam jumlah kecil antara lain tindakan kekerasan seperti pengancaman, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jenis tindak kriminal terhadap kekayaan negara meliputi *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan uang palsu terlapor sangat minim terjadi.

Jumlah kejahatan terlapor atau *crime total* yang diterima oleh Polda DIY tahun 2020 tercatat 745 kasus, sedangkan untuk gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY adalah 4.353 kasus. Data berkenaan pada tahun 2021 adalah 609 kasus di Polda DIY dan 4.886 kasus untuk angka gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY. Berdasarkan Jumlah total penduduk DIY semester 1 tahun 2021 dari rilis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3.675.662 jiwa, maka Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) sesuai rumus di atas berada pada angka 132.93. Jika dalam penghitungan *crime rate* menggunakan jumlah kasus terlapor hanya di Polda DIY saja yaitu 609 kasus per tahun 2021 maka angka *crime rate* tahun 2021 adalah 16,56. Perlu dicatat disini bahwa terdapat perbedaan definisi *crime rate* dengan rilis Polda DIY yang menyatakan bahwa *crime rate* merupakan Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 10.000 penduduk. Rilis data Polda DIY untuk angka *crime rate* tahun 2020 adalah 11.68 dan meningkat menjadi 13,73 pada tahun 2021.

Tabel 2-236 Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2021

Elemen Data Kriminal	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tindak Kejahatan Terlapor dari Polres kabupaten/ Kota dan Polda DIY (gabungan)	5.194	4.471	4.576	4.353	4886
Jumlah Penduduk	3.587.921	3.631.015	3.656.108	3.671.189	3.675.662
Angka Kejahatan per 10.000 penduduk	13,81	11,76	11,91	11,68	13,73

Sumber: BPPSD DIY, 2022,: https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=12075 diakses 3 februari 2022, diolah



Sumber: https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=12075 diakses 3 februari 2022

Gambar 2-95 Crime Rate Tahun 2017-2021

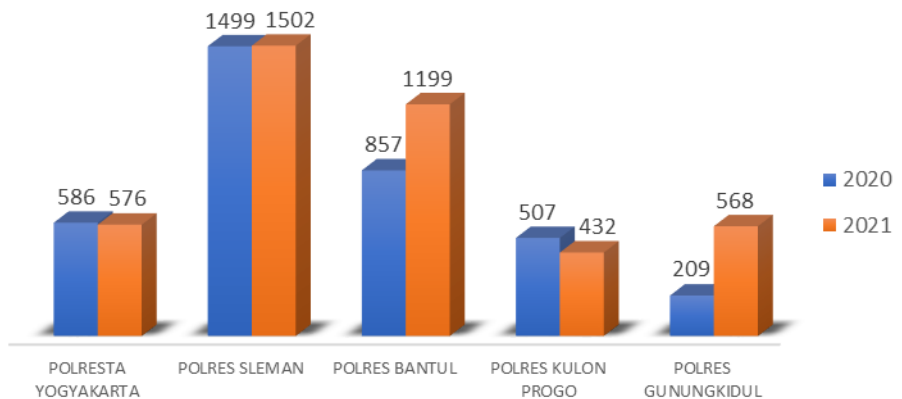
Berdasarkan data tersebut, target dan capaian indikator angka *crime rate* DIY (kejahatan per 100.000 penduduk) sesuai data *crime rate* di Aplikasi Jogjadatuku yang diakses bulan Februari 2022.

Tabel 2-237 Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan (Crime Rate) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Kejahatan per 10.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	angka	12,10	8,39	13,73	36,35	7,33	12,69

Sumber: BPPSD DIY, 2022 (data diolah)

Memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Aktivitas usaha ekonomi produktif akan tumbuh pada wilayah yang memiliki iklim investasi yang ramah. Salah satu faktor dominan pembentuk iklim investasi yang ramah adalah rasa aman dan suasana kondusif.



Sumber: https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=12075 diakses 3 februari 2022

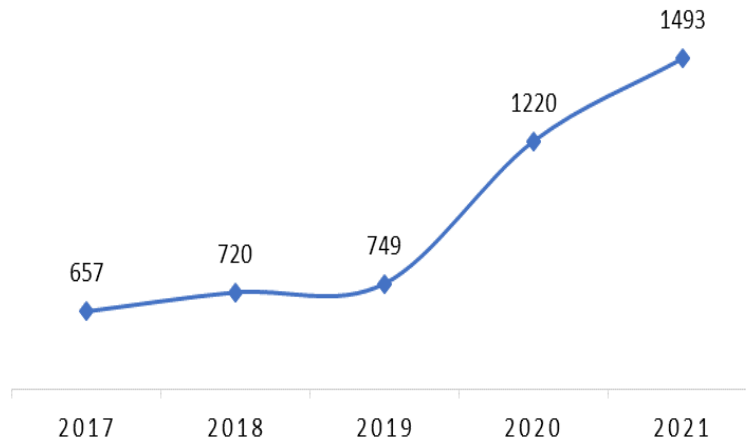
Gambar 2-96 Crime Total per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2021

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki kerawanan tindak kejahatan tertinggi dengan angka *crime total* tahun 2020 sebanyak 1.449 kasus dan meningkat menjadi 1.502 kasus di tahun 2021 atau meningkat 3,65%. Kabupaten Bantul menempati peringkat 2 dengan angka *crime total* tahun 2020 sebanyak 857 kasus meningkat menjadi 1.199 kasus di tahun 2021 atau meningkat 39,9%. Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan tertinggi diantara kabupaten yang lain, yaitu dari 209 di tahun 2020 menjadi 568 kasus di tahun 2021 atau meningkat 171%. Sementara di Kota Yogyakarta angka *crime total* justru mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 586 kasus menjadi 576 kasus di tahun 2021 atau menurun 1,7%. Kabupaten Kulon Progo juga mengalami penurunan kasus, dari 507 kasus ditahun 2020 menjadi 432 kasus di tahun 2021 atau menurun 14,79%. Pada sumber data yang diakses tidak disebutkan tentang jenis kejahatan yang mengalami peningkatan dan penurunan.

2.2.2.4 Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator:

2.2.2.4.1 Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Dampak pandemi COVID-19 memberi kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah wirausaha baru di DIY. Hal ini disebabkan adanya pergeseran dari masyarakat pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja yang beralih menjadi wirausaha. Namun agar wirausaha baru ini dapat terus berkelanjutan perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas, produktifitas dan daya saing. Peningkatan jumlah wirausaha baru selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

Gambar 2-97 Perkembangan WUB Tahun 2017-2021

Tabel 2-238 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	0,4	0,4	0,49	122,50	0,4	122,50

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

Persentase Peningkatan Penumbuhan WUB tahun 2021 dapat tercapai atas dukungan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pembinaan dan pendampingan lintas sektoral, peningkatan pemasaran melalui Galeri YIA dan SMESCO serta optimalisasi pemasaran melalui Sibakul markethub, Gelaran Ngombe Jamu,

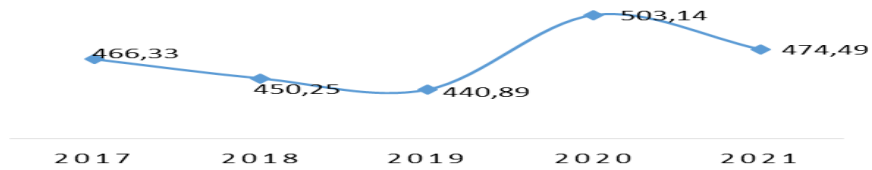
Pameran Semarak SiBakul, Pameran Virtual serta pendampingan melalui pelatihan, coaching, mentoring, pendamping PLUT dan kolaborasi Pentahelix. Perluasan pasar dengan tindak lanjut PP Nomor 7 Tahun 2021 dengan on boarding pengadaan barang dan jasa, adanya fasilitasi dan sertifikasi produk seperti halal, PIRT, MD, Nilai gizi dan TKDN di laksanakan untuk meningkatkan nilai produk UMKM di pasaran.

Selain itu, Pemda DIY juga berupaya mendukung tumbuhnya WUB melalui penumbuhan semangat kewirausahaan di desa-desa preneur dengan skema G2R, K45PAK, Blangkon dan Giriloji. Perda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Perda tentang Kewirausahaan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha bagi WUB. Perda tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penumbuhan semangat berusaha terutama pada WUB yang berada di lokasi desa wisata maupun wisata minat khusus yang tumbuh pesat di DIY.

2.2.2.4.2 Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n))

Kemiskinan telah menjadi permasalahan daerah yang mendesak dan membutuhkan berbagai intervensi penanganan yang dikombinasikan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh.

Hasil pendataan Susenas September 2021 menunjukkan bahwa besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp 496.904,00 per kapita per bulan atau naik 6,76% jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada September 2020 yang besarnya Rp465.428,00. Sementara itu jumlah penduduk miskin pada September 2021 di DIY sebanyak 474.490 ribu orang atau 11,91% terhadap total penduduknya. Penduduk miskin pada periode September 2020 adalah 503.140 ribu orang atau 12,80% dari penduduk DIY. Data perkembangan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-98 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2017 - 2021 (Ribu Orang)

Tabel 2-239 Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	503.140	309.021	474.490	46,45	278.509	29,63

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin, Pemda DIY melaksanakan beberapa intervensi pada tahun 2021 melalui program penanggulangan kemiskinan. Upaya ini juga dilaksanakan bersama dengan perbaikan *data base* kelompok sasaran serta diselaraskan dengan penganggulangan dampak akibat pandemi COVID-19.

2.2.2.4.3 Pengeluaran per Kapita Masyarakat

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan

berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita per tahun adalah Rp17.014.440,00 lebih besar daripada target yang telah ditentukan sebesar Rp14.333.000,00 atau tingkat pencapaian targetnya adalah 118,71%. Pengeluaran per kapita per tahun mengalami peningkatan sebesar 0,42% dibandingkan tahun 2020 sebagai indikasi adanya proses *economic recovery* usai pandemi COVID-19. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017 hingga 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-240 Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran per kapita per bulan	1.140.167	1.302.661	1.339.726	1.411.972	1.417.870
Pengeluaran Per Kapita per tahun	13.682.004	15.631.932	16.076.712	16.943.664	17.014.440

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Untuk target dan capaian angka pengeluaran per kapita masyarakat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-241 Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemd	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Ribu Rp /tahun	16.943	14.333	17.014	118,71	14.593	116,59

Sumber: BPPSD DIY, 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.417.870,00 per kapita per bulan yang terdiri dari pengeluaran non makanan sebesar Rp823.248,00 (41,94%) dan makanan sebesar Rp594.622,00 (58,06%). Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan tahun 2020 yaitu Rp832.693,00 per kapita per bulan. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 rata-rata pengeluaran non makanan turun sebesar 1,13% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan proporsi rata-rata pengeluaran makanan tahun 2020 yaitu Rp579.279,00 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran makanan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,65% dibanding tahun sebelumnya.

2.2.2.5 Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda, dengan indikator:

2.2.2.5.1 Persentase Peningkatan Budaya Benda yang Dilestarikan

Prioritas pelestarian budaya benda pada tahun 2021 masih melanjutkan prioritas di tahun 2020, diarahkan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Berbagai kegiatan pengelolaan dan pelestarian dilakukan di sekitar Sumbu Filosofi dan Kota Yogyakarta, antara lain Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton Yogyakarta, Rehabilitasi Bangunan Kraton, kegiatan

pemeliharaan aset Kraton dan Pura Pakualaman, pembenahan fasad di sepanjang Malioboro, Penataan Kotabaru, pemeliharaan Jagang Benteng Vredeburg, Rehabilitasi Bioskop Permata, Penataan Pekapalan, dan lain sebagainya. Selain itu, pelestarian budaya benda juga didukung oleh pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan museum yang ada di DIY.

Tabel 2-242 Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Penda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	13,27	14,18	14,22	100,28	15,17	93,74

Sumber: Disbud DIY, 2022

Pencapaian Indikator sasaran Jumlah budaya benda yang dilestarikan dari target 14,18% terealisasi 14,22% pada tahun 2021. Bila diukur dari pencapaian target akhir RPJMD sebesar 15,17%, mempunyai andil sebesar 93,74% sehingga target pada tahun 2022 diproyeksikan akan tercapai. Pencapaian kinerja ini didukung dengan program kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah dan masyarakat. Realisasi budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2021 terdiri dari 763 budaya benda, dengan rincian dari 1 struktur, 11 Situs, 373 Benda Cagar Budaya, 376 Bangunan Cagar Budaya dan 2 Kawasan Cagar Budaya.

2.2.2.5.2 Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Budaya tak benda merupakan budaya yang tidak berwujud fisik barang. Warisan budaya tak benda antara lain meliputi nilai, bahasa, adat dan tradisi, dan kesenian. Bahasa menjadi penting untuk menumbuhkan jati diri dan mengembangkan kepribadian.

Peningkatan budaya tak benda berupa bahasa dilakukan dengan diselenggarakannya Kongres Aksara Jawa yang merupakan kongres bertaraf nasional, Kompetisi Bahasa dan Sastra (10 kategori), macapatan di 22 lokasi di DIY, Pergelaran karya Bahasa dan Sastra dalam bentuk webinar, temu karya sastra pelajar, Digitalisasi Aksara Jawa, pemberdayaan pelaku seni budaya secara daring melalui aplikasi sistem pembayaran digital QRIS, webinar Ksatria Winaya, penerbitan majalah Sempulur dan Tabloid Carakita setiap triwulan, sandiwara radio berbahasa Jawa sebanyak 25 kali, pengembangan kethoprak kekinian, dan pengembangan naskah kuno.

Keistimewaan DIY bukan hanya membawa budaya DIY ke even nasional dan internasional juga menarik even nasional dan internasional ke DIY. Budaya DIY hadir melalui finalisasi penyelenggaraan kongres kebudayaan Jawa di Surabaya, even kebudayaan berupa muhibah budaya di Bandung, dan misi kebudayaan di Dubai, UEA. Pemda DIY bekerjasama dengan berbagai organisasi seni dan budaya ternama seperti Padepokan Bagong Kusudiharjo, PBBi Sekar Jagad, aliansi mahasiswa nusantara, Retno Aji Mataram. Pemda DIY telah menyelenggarakan *workshop*, pementasan dan lomba seni Lukis DIY-Kyoto bagi pelaku seni dan budaya DIY.

Budaya tak benda berupa kesenian menurut jenisnya dibagi menjadi seni musik, seni tari, dan seni drama. Salah satu bentuk budaya tak benda yang perlu dilestarikan adalah upacara adat. Upacara adat merupakan wahana interaksi sosial serta media pewarisan tata nilai. Upacara adat biasanya terkait dengan religi, peristiwa tertentu, tokoh tertentu dan situs tertentu. Sejauh ini, DIY telah memfasilitasi 56 upacara adat dan festival upacara adat di 438 desa/kelurahan.

Desa/Kelurahan Budaya menjadi bagian penting dari pemerataan pemajuan kebudayaan kepada desa dan masyarakat secara langsung. Desa Budaya awalnya ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No. 325/KPTS/1995 tentang Desa Budaya, yang berisi

penetapan 32 Desa Budaya dan selanjutnya diatur dengan Pergub DIY No. 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya. Selanjutnya dilakukan penetapan Desa Budaya melalui SK Gubernur DIY No. 262/KEP/2016 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Pada tahun 2021 dilakukan pengiriman 112 pendamping ke 56 Desa/Kelurahan Budaya, pemberian bantuan 8 gamelan perunggu sebagai penunjang sarana dan prasarana Desa Budaya, pentas seni di bandara YIA oleh Desa Budaya, gelar potensi, pembuatan profil, bantuan pakaian adat.

Sesuai amanat UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY melakukan upaya pembinaan terhadap kebudayaan lain yang berkembang di DIY. Hal ini dilakukan dengan Program Selendang Sutera yang di dalamnya mencakup Seminar Budaya, Jelajah Budaya sebanyak 3 kali, dan Gelar Budaya Etnis.

Peran serta masyarakat penting dalam memajukan kebudayaan. Guna meningkatkan peran serta masyarakat, telah dilakukan dengan penyerahan bantuan 65 gamelan dan fasilitasi 235 organisasi seni pertunjukan. Peran serta seniman juga mendapat perhatian dan penghargaan dari Pemda DIY. Pada tahun 2021 Pemda DIY memberikan penghargaan Anugerah Budaya berupa pemberian penghargaan bagi 24 Pelestari dan/atau Pelaku WBCB, Adat, Seni, dan Budayawan.

Tabel 2-243 Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya tak benda yang	%	36,60	16,82	16,89	100,42	20,00	84,45

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
dilestarikan							

Sumber: Disbud DIY, 2022

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan mampu mendukung pencapaian Kinerja Program Pemda. Pencapaian kinerja Peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun 2021 melampaui angka yang ditargetkan yaitu 16,89%. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 84,45% dari target 20%.

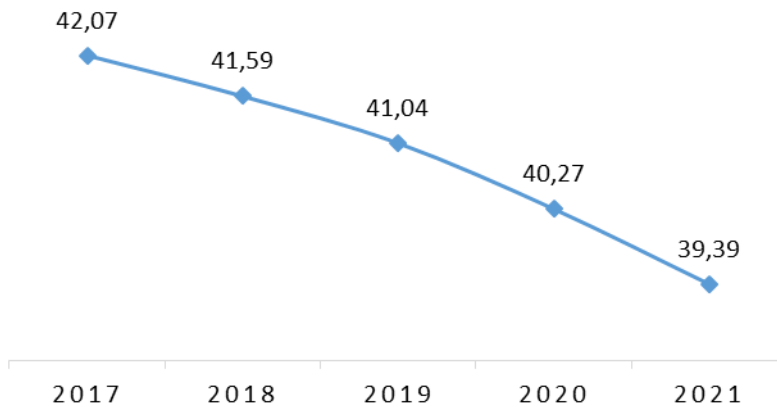
Realisasi budaya tak benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2021 terdiri dari 353 budaya tak benda, dengan rincian: 61 upacara adat, 6 upacara tradisi, 235 organisasi seni pertunjukan, 13 organisasi perfilman, 4 lembaga budaya, dan 34 organisasi kepercayaan.

2.2.2.6 Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa), dengan indikator:

2.2.2.6.1 Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan dalam PDRB DIY

Empat sektor atau lapangan usaha yang relatif mendominasi kontribusi terhadap total PDRB DIY yaitu pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan merupakan empat sektor penyumbang selama beberapa tahun terakhir. Secara rerata pada periode 2017 sampai 2021, sumbangan lapangan industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha paling dominan di kelompok empat lapangan usaha tersebut yaitu 12,83%. Sementara itu kontribusi lapangan usaha lainnya adalah akomodasi dan makan minum 9,78%, pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,82% dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor adalah 8,44%.

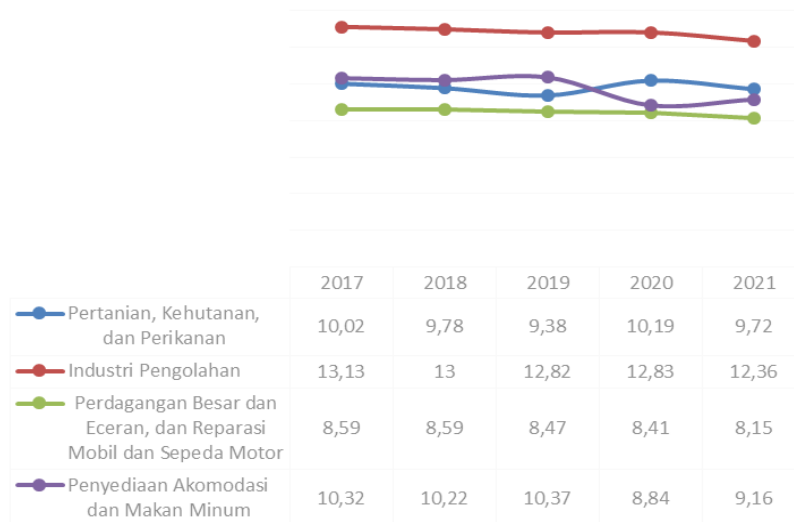
Selama periode tahun 2017 dan 2021, tren sumbangan empat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian DIY cenderung menurun. Pada tahun 2020, sumbangan gabungan empat lapangan usaha tersebut adalah 40,27% dan kemudian menurun menjadi 39,39% di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Gambar 2-99 Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2017 - 2021

Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing sektor disajikan pada gambar berikut ini. Perkembangan kontribusi tiap lapangan usaha menunjukkan kecenderungan menurun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-100 Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor

Tabel 2-244 Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi Sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	%	40,27	45,00	39,39	87,53	46	85,63

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Capaian kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan di tahun 2021 adalah 39,39% yang mencapai sekitar 87,53% dari target sebesar 45,00%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh penurunan kontribusi kumulatif empat lapangan usaha tersebut selama beberapa tahun terakhir. Penurunan kontribusi empat lapangan usaha tersebut dipengaruhi oleh penurunan sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dari waktu ke waktu sejak tahun 2017 dan penurunan kontribusi lapangan usaha industri manufaktur sejak tahun 2017. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tren nya terus menurun dari 10,02% di tahun 2015 menjadi 9,72% di tahun 2021.

2.2.2.6.1.1 Sektor Pertanian

Cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah terlihat pada indikator nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari setiap perkembangan periode waktu. Di masa sulit seperti pandemi sekarang ini, sektor pertanian telah memberikan kontribusi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup signifikan.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB DIY tersusun atas kategori (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan (3) Perikanan. Kategori pertama terdiri dari sub kategori Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor pertanian yang akan dilaporkan adalah sub kategori Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Pertanian sebagai salah satu penyumbang utama dalam perekonomian DIY pada kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan dan di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 menyerang kontribusinya terhadap PDRB DIY justru mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021 ini kontribusinya kembali menurun karena turunnya produksi tanaman pangan dan populasi peternakan dibanding tahun sebelumnya. Walaupun kontribusinya menurun pada tahun 2021 pertanian masih menjadi penyumbang terbesar keempat dalam PDRB DIY.



Keterangan: *) Data capaian untuk Indonesia Tahun 2021 belum dirilis

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-101 Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2017-2021

Dinamika kontribusi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejalan dengan kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Dari tahun 2017-2019 secara berturut-turut mengalami penurunan dan di tahun 2020 mengalami peningkatan, untuk DIY naik cukup signifikan sebesar 0,84%. Pada tahun 2021 kontribusinya kembali menurun sebesar 0,45%. Capaian DIY berada di bawah capaian Nasional, dipengaruhi terbatasnya lahan pertanian yang merupakan salah satu faktor utama produksi. Ketangguhan sektor pertanian di masa pandemi telah membuktikan bahwa pertanian dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat khususnya petani sehingga ke depan diperlukan terobosan program/kegiatan yang mampu mempertahankan eksistensi sektor pertanian, serta peningkatan proporsi anggaran yang lebih tinggi.

2.2.2.6.1.2 Penyediaan Akomodasi dan Makan

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Pada masa pandemi COVID-19 mobilitas masyarakat sangat dibatasi,

sehingga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke DIY. Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan yang berkunjung ke DIY menurun sebesar 72%, atau berkurang sebesar 4.700.833 orang bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 adalah masa awal pandemi COVID-19, pembatasan mobilitas masyarakat dilaksanakan cukup ketat pada tahun 2020, sehingga aktivitas pariwisata sangat menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Pemerintah Pusat telah memulai kegiatan vaksinasi secara nasional, yang bertahap dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Awal tahun 2021 Pemda DIY juga mengeksekusi kegiatan vaksinasi secara masif dengan harapan dapat memulihkan kegiatan perekonomian di masyarakat yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata DIY pada tahun 2021 juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi yang ditujukan kepada para pelaku pariwisata se-DIY. Tahun 2021 COVID-19 varian Delta telah masuk ke Indonesia dan menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 yang sangat signifikan dan hal tersebut terjadi di DIY. COVID-19 varian Delta menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata yang cukup tajam.

Tabel 2-245 Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2,15	1,99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	6.427	2,24	1,41

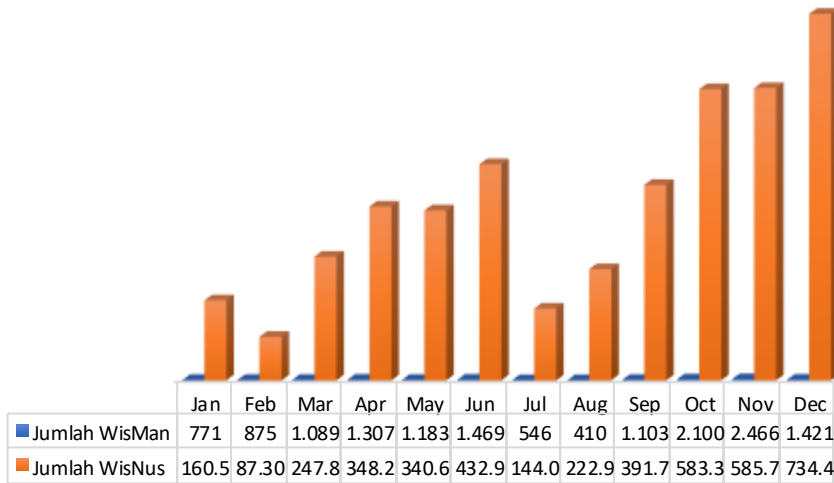
Sumber: Dispar DIY, 2021 (data diolah)

Wisatawan yang datang ke DIY masih didominasi oleh Wisatawan Nusantara (Wisnus), sedangkan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang ke DIY bila dibandingkan dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan. Penurunan jumlah wisman yang berkunjung ke DIY disebabkan oleh kasus COVID-19 dengan varian

Delta dan varian Omicron pada tahun 2021 telah meningkat kasusnya di luar negeri. COVID-19 di luar negeri masih memperlihatkan adanya peningkatan kasus COVID-19 per harinya di tahun 2021 sehingga berdampak kepada menurunnya jumlah kunjungan wisman ke DIY.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, pada bulan Agustus menerbitkan Surat Edaran nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, diberlakukan berbagai pembatasan bagi orang yang akan masuk di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang bertujuan untuk memproteksi masyarakat dari varian baru, yaitu varian Alpha, varian Beta, varian Delta dan varian Gamma. Kondisi peningkatan persebaran varian Delta di luar negeri pada pertengahan hingga akhir tahun 2021 cukup mengkhawatirkan.

Pada tahun 2021, titik terendah kunjungan wisatawan terjadi pada bulan Februari, hal itu dikarenakan terdapat lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Januari dan Februari, sebagai dampak dari mobilitas orang dari luar DIY masuk ke dalam DIY pada saat akhir tahun 2020 sampai pada bulan Januari tahun 2021. Jumlah wisatawan kembali mengalami penurunan kembali pada bulan Juli dan Agustus dikarenakan COVID-19 varian Delta telah masuk ke DIY dan mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tinggi. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di DIY, namun terjadi di seluruh daerah di pulau Jawa dan Bali. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Pusat menerbitkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung selama dua bulan (Juli dan Agustus).



Sumber: Dispar DIY, 2022

Gambar 2-102 Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2021

Untuk lama tinggal wisatawan, baik wisman maupun wisnus diuraikan sebagai berikut. Tahun 2021 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai 2,24 hari. Penerapan protokol kesehatan dalam bentuk sertifikasi CHSE (*Cleanliness Health Safety and Environment Sustainability*) di hotel-hotel di DIY menjadi jaminan bagi para wisatawan yang menginap, bahwa hotel yang sudah bersertifikasi CHSE telah sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun 2021 hotel di DIY yang sudah bersertifikasi CHSE sebanyak 173 hotel.

Lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dari tahun 2020. Peningkatan jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2021 terutama di Tri Wulan IV tidak mempengaruhi peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara. Anomali tersebut disebabkan karena masih ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat untuk menginap di hotel meskipun banyak hotel sudah menerapkan protokol CHSE. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menggeser libur panjang dan menghapus cuti bersama menyebabkan wisatawan yang berkunjung tidak memiliki waktu lebih lama untuk menginap di

DIY. Rata-rata wisatawan yang datang dari luar kota hanya berkunjung satu hari lalu kembali ke daerah masing-masing.

2.2.2.6.1.3 Industri Pengolahan dan Perdagangan

Industri pengolahan masih menjadi salah satu penopang utama PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 12,36% ditahun 2021 atau sebesar Rp12.670.357 juta meningkat 0,37% dari tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan, namun belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 92,70%. Pembangunan sektor industri memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah pusat, perguruan tinggi, swasta dan lain-lain.

Selain industri, sektor perdagangan dengan sasaran meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri juga berkontribusi cukup besar pada struktur PDRB DIY sebesar 8,15%. Sasaran ini memiliki indikator kinerja nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan target di tahun 2021 sebesar Rp9.403.163 Juta dengan realisasi Rp8.379.070 Juta atau meningkat sebesar 1,51% dibandingkan tahun sebelumnya walaupun peningkatannya di bawah PDB di sektor yang sama.

Peningkatan PDRB sektor ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor. Berbagai program dari pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemulihan ekonomi tentu berkontribusi pada pertumbuhan PDRB sektor ini. Namun demikian pertumbuhan PDRB sektor ini terhambat karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga target yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

2.2.2.6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, jumlah tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan kegiatan ekonomi. TPT pada tahun 2021 sebesar 4,56% mengalami penurunan 0,01% poin jika dibanding dengan TPT tahun 2020

sebesar 4,57%, dengan kata lain terdapat 4 sampai 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di DIY.

Tabel 2-246 Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	2,24	4,56	49,12	2,07	45,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertumbuhan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT. Sesuai hasil Sakernas Agustus 2021 BPS, jumlah angkatan kerja DIY sebanyak 2.334.955 orang bertambah 106.793 orang dibanding agustus 2020 sebanyak 2.228.162 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 4,79%. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, kondisi 2021 penduduk yang bekerja 2.228.523 orang dan pengangguran 106.432 orang. Jumlah penganggur bertambah sebesar 4.586 orang dibandingkan tahun 2020 sebanyak 101.846 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja bertambah 48.396 orang dibanding tahun 2020 sebanyak 2.126.316 orang. Meskipun penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, tetapi masih diperlukan kebijakan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

TPT di DIY dalam kurun waktu 2017 - 2021 mengalami fluktuasi, TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,57% naik 1,39 poin dibanding tahun 2019 sebesar 3,18%, namun tetap berada di bawah TPT nasional. Pada Agustus 2021 TPT Nasional sebesar 6,49% turun 0,58 poin dibanding Agustus 2020 sebesar 7,07%. Perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-103 Perkembangan TPT DIY dan Indonesia tahun 2017 - 2021

Realisasi TPT pada tahun 2021 sebesar 4,56% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,24% atau capaian realisasi sebesar 49,12%. Tidak tercapainya target TPT ini sangat dipengaruhi adanya pandemi COVID-19, yang pada tahun 2021 DIY mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19. Sektor ketenagakerjaan yang terdampak tidak hanya pengangguran tetapi juga penduduk usia kerja. Diperlukan optimalisasi seluruh sektor untuk bersama-sama mengupayakan terciptanya kesempatan kerja serta menjaga kondusifitas iklim dunia usaha di DIY.

Sesuai data terbaru BPS, Februari 2022, TPT DIY turun menjadi 3,73 persen (turun 0,83 persen poin) dibanding Agustus 2021 dan mengalami penurunan 0,55 persen poin dibanding Februari 2021 (4,28 persen). Sampai dengan Februari 2021, terdapat penambahan jumlah penduduk bekerja DIY bertambah 102,21 ribu orang serta total penduduk bekerja sebanyak 2,23 juta orang. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas sektor-sektor perekonomian dalam upaya pemulihan pandemi Covid-19 berdampak positif pada ketenagakerjaan saat ini. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Perdagangan (0,95 persen poin), Industri Pengolahan (0,68 persen poin), dan Konstruksi (0,51 persen poin).

2.2.2.6.3 Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 memiliki visi Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dan misi meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban serta mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Terdapat berbagai rencana kebijakan, program, dan sasaran yang ditujukan pada pemenuhan target dan capaian sesuai dengan visi dan misi RPJMD DIY tersebut. Salah satu nya adalah terwujudnya Desa/ Kelurahan Mandiri Budaya.

Kelurahan mandiri budaya adalah kelurahan yang secara otonom mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumber daya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa/Kelurahan Mandiri Budaya adalah Desa yang mempunyai serangkaian atribut desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima. Program Desa/Kelurahan Mandiri Budaya merupakan program yang telah dicanangkan dalam Perda DIY Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. Hal tersebut tertuang pada Program Pembangunan Daerah dengan berdasar pada arah kebijakan dan program strategis, dimana Desa/Kelurahan Mandiri Budaya merupakan prioritas pembangunan DIY dengan target pada capaian kinerja program terdapat 5 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019, 10 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020, 15 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2021, dan tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya.

Pada tahun 2020, Pemda DIY telah mengeluarkan regulasi berupa Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan Kepgub DIY Nomor 129/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Selain itu melalui Kepgub DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/Kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya yaitu:

Tabel 2-247 Desa Mandiri Budaya 2020

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Desa/Kel Budaya
1	Bejiharjo	Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kulon Progo	Utama
3	Putat	Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Sleman	Utama
5	Girikerto	Sleman	Utama
6	Wedomartani	Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kulon Progo	Madya
9	Margodadi	Sleman	Madya
10	Bangunkerto	Sleman	Madya

Sumber: Disbud DIY, 2022

Sedangkan untuk tahun 2021, dilakukan penilaian dan pengusulan terhadap calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang kemudian ditetapkan dengan Kepgub P/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2-248 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang Diusulkan Pada Tahun 2021

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Desa/Kel Budaya
1	Tuksono	Kulon Progo	Utama
2	Banjarharjo	Kulon Progo	Madya
3	Jerukwudel	Gunungkidul	Madya
4	Tanjungharjo	Kulon Progo	Madya
5	Hargomulyo	Kulon Progo	Madya
6	Bangunjiwo	Bantul	Madya
7	Giring	Gunungkidul	Madya
8	Glagah	Kulon Progo	Madya

Sumber: Disbud DIY, 2022

Tabel 2-249 Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Desa mandiri budaya	Desa/Kelurahan	10	15	18	120	20	90

Sumber: Disbud DIY, 2022

Sampai tahun 2021 terdapat 18 Desa Mandiri Budaya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Terdapat 8 Desa Mandiri Budaya dengan klasifikasi Utama yaitu Bejiharjo Gunungkidul, Pagerharjo Kulon Progo, Putat Gunungkidul, Pandowoharjo Sleman, Girikerto Sleman, Wedomartani Sleman, Sabdodadi Bantul dan Tuksono Kulon Progo. Di samping itu, terdapat 10 Desa Mandiri Budaya dengan peringkat Madya yaitu Jatimulyo Kulon Progo, Margodadi Sleman, Bangunkerto Sleman, Banjarharjo Kulon Progo, Jerukwudel Gunungkidul, Tanjungharjo Kulon Progo, Hargomulyo Kulon Progo, Bangunjiwo Bantul, Giring Gunungkidul, Glagah Kulon Progo.

2.2.2.7 Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator:

2.2.2.7.1 Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kualitas air sungai ditetapkan menjadi indikator penilaian kualitas air di suatu daerah. Penilaian kualitas air sungai ini diasumsikan telah mewakili kondisi kualitas air secara umum dalam bentuk Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kualitas Air yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik di suatu wilayah. IKA dihitung dari hasil analisis

beberapa parameter kualitas air sungai pada periode dan titik-titik pemantauan tertentu.

IKA pada tahun 2021 ini menggunakan konsep perhitungan dari KLHK tahun 2019, yang menggunakan Indeks Pencemar (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah. Nilai IP diperoleh berdasarkan perhitungan tujuh parameter kualitas air sungai hasil pemantauan kualitas air sungai pada sepuluh sungai yang menjadi kewenangan DIY. Tolok ukur parameter menggunakan Baku Mutu air berdasarkan Pergub DIY No. 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuh parameter kualitas air sungai yang dihitung adalah *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)*, *Phosphat (PO₄)*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*. Sedangkan 10 sungai sasaran pemantauan yang menjadi kewenangan DIY adalah Sungai Winongo, Gajahwong, Code, Bedog, Konteng, Kuning, Tambakbayan, Oyo, Belik, dan Bulus, dengan titik pemantauan sebanyak 50 titik. Periode pemantauan pada tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu bulan Juni, Agustus dan Oktober yang masing-masing mewakili musim hujan, kemarau dan peralihan musim hujan dan kemarau. Penentuan titik pantau berdasarkan pada wilayah administratif, letak geografis, sumber pencemar, outlet DAS, titik *intake* pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia. Validitas data kualitas air sungai didukung oleh analisis laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan pengambilan sampel dilakukan oleh personil yang tersertifikasi sebagai pengambil contoh uji.

Adapun hasil perhitungan nilai IKA pada sepuluh sungai di DIY tahun 2018 - 2021 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Realisasi IKA dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-250 Hasil Perhitungan Agregasi IKA DIY dan Kabupaten/Kota tahun 2018 - 2021

No.	Sungai	Nilai IKA			
		2018	2019	2020	2021
1	Winongo	37,50	43,33	32,5	35,9
2	Code	41,67	42,5	38,75	32,07
3	Gajahwong	38,33	30	42,5	29,64
4	Kuning	35,00	38,33	37,5	40,93
5	Konteng	36,67	30	20,00	27,67
6	Bedog	43,33	40,67	28,00	42,36
7	Belik	43,33	36,67	40,00	33,33
8	Bulus	43,33	40	40,00	33,33
9	Oyo	50,00	41,67	37,5	47,96
10	Tambakbayan	33,33	43,33	35,00	33,33
	Rata-Rata IKA	40,25	38,65	35,18	35,42

Sumber: DLHK DIY, 2022

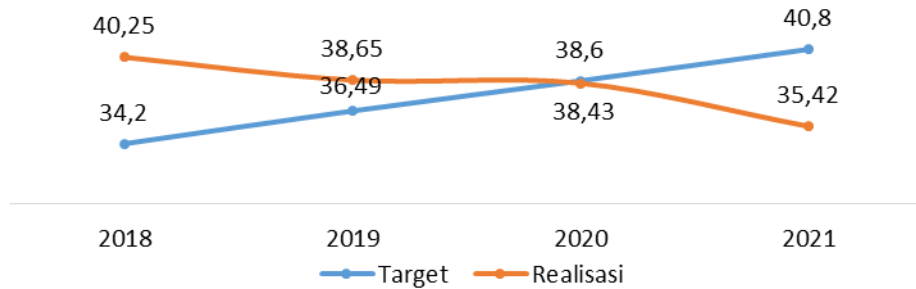
Target IKA tahun 2021 sebesar 40,80, sedangkan realisasi IKA sebesar 35,42, sehingga target IKA belum tercapai.

Tabel 2-251 Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka Indeks	38,43	40,80	35,42	86,81	42,45	83,44

Sumber: DLHK DIY, 2022

Tren penurunan nilai IKA dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DLHK DIY, 2022

Gambar 2-104 Tren Indeks Kualitas Air di DIY tahun 2018 - 2021

Penurunan nilai IKA menunjukkan bahwa kualitas air sungai di DIY semakin buruk yang salah satunya karena pencemaran air sungai. Berdasarkan laporan pemantauan kualitas air sungai di DIY pada tahun 2021, kondisi sungai di DIY rata-rata tercemar ringan sampai berat. Sungai-sungai yang tercemar berat adalah sungai Gajahwong, Code dan Winongo terutama pada penggal tengah, yaitu sungai yang melintas di daerah perkotaan Kota Yogyakarta. Pencemar dominan adalah Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Total Coliform yang melebihi bakumutu air sungai. Adanya bakteri Coli menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi dengan limbah manusia dan hewan berdarah panas yang mengandung bakteri atau virus patogen. Selain pencemaran sungai, buruknya kualitas air sungai juga disebabkan karena terjadinya sedimentasi sungai dan hilangnya beberapa mata air yang menyebabkan debit sungai kecil. Tidak tercukupinya debit air menyebabkan proses netralisasi alami tidak berjalan dan konsentrasi kadar pencemar sungai menjadi tinggi.

Upaya dalam pengendalian pencemaran air sungai yang telah dilakukan DLHK adalah upaya pembinaan, pengawasan lingkungan dan koordinasi dengan instansi terkait di DIY dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan terhadap usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah berdasarkan peraturan, dan sanksi akan diberlakukan jika terdapat pelanggaran.

Koordinasi dengan instansi dan lembaga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilakukan agar upaya pengendalian pencemaran air sungai dapat dilakukan secara terpadu. Sedangkan upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemberian rekomendasi terhadap ijin lingkungan yang akan diberikan terhadap usaha/kegiatan.

2.2.2.7.2 Indeks Kualitas Udara

Sumber pencemar udara di perkotaan antara lain disebabkan dari aktivitas transportasi, permukiman, persampahan dan industri. Pencemaran udara di DIY disebabkan sebagian besar dari aktivitas transportasi yang berkorelasi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dilaporkan sebesar 1,01% per tahun (DIKPLHD DIY, 2021). Hal ini mengingat DIY sebagai tujuan pendidikan dan wisata, dimana setiap tahunnya akan bertambah jumlah kendaraan dari pelajar dan kebutuhan mobilitas wisatawan.

Untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah, KLHK telah menetapkan instrumen berupa Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU ini berlaku secara Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. IKU dihitung berdasarkan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) parameter, yaitu Nitrogen dioksida (NO₂) dan Sulfur dioksida (SO₂). Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari agregasi data pemantauan kualitas udara secara passive sampler DIY dan Kabupaten/Kota. Jumlah titik pantau di DIY sebanyak 20 lokasi mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien adalah: a. daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; b. daerah atau kawasan industri; c. pemukiman padat penduduk; dan d. kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.

Rumus IKU:
$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

IKU mengadopsi metode dari EU (*European Union*) yang merupakan metode pengukuran kualitas udara di Eropa. Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen.

Berdasarkan perhitungan IKU di DIY diperoleh data kualitas udara sebagai berikut:

Tabel 2-252 Data IKU DIY tahun 2021

No.	Lokasi	Rerata NO ₂	Rerata SO ₂	I _{eu}	IKU
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	Indeks	Indeks
1.	Kulon Progo	9,11	5,15	0,24253	92,08
2.	Bantul	14,92	8,58	0,40103	83,28
3.	Gunungkidul	10,93	3,46	0,22332	93,15
4.	Sleman	11,87	9,75	0,39209	83,77
5.	Kota Yogyakarta	11,07	5,26	0,26974	90,57
IKU Rata-rata					88,57

Sumber: Analisis data kualitas udara DLHK DIY 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rerata IKU Kabupaten/Kota diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara DIY sebesar 88,57, sehingga belum memenuhi target RPJMD (89,07). Walaupun belum memenuhi target IKU RPJMD tahun 2021, tetapi berdasarkan kriteria kualitas udara nasional, nilai IKU 88,57 tergolong Baik.

Tabel 2-253 Kategori IKU

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat kurang	0 ≤ x < 25

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH

Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2020 sebesar 89,14, maka pada tahun 2021 ini, nilai IKU mengalami penurunan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2-254 Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemd	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka Indeks	89,14	89,07	88,57	99,44	89,74	98,70

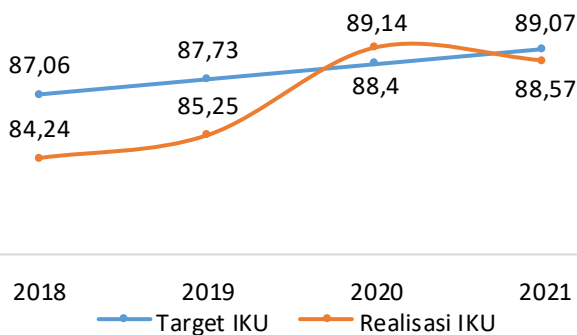
Sumber: DLHK DIY, 2022

Nilai IKU tahun 2018 - 2021 fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, kemudian turun pada tahun 2021. Tren nilai IKU dapat dilihat dalam tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2-255 Tren Nilai IKU Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021

No.	Lokasi	Nilai IKU			
		2018	2019	2020	2021
1	Kulon Progo	85,54	93,26	92,91	92,08
2	Bantul	80,51	90,90	85,18	83,28
3	Gunungkidul	94,01	79,46	93,96	93,15
4	Sleman	78,74	78,63	86,66	83,77
5	Kota Yogyakarta	82,40	84,02	86,97	90,57
	Rerata IKU DIY	84,24	85,25	89,14	88,57

Sumber: DLHK DIY, 2022



Sumber: DLHK DIY, 2022

Gambar 2-105 Tren Nilai Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2018 - 2021

Faktor yang mempengaruhi nilai IKU terutama berasal dari emisi transportasi dan industri, tetapi emisi dari sektor transportasi lebih tinggi daripada industri. Hal ini ditunjukkan dari kadar NO₂ yang berasal dari emisi kendaraan bermotor lebih tinggi daripada kadar SO₂ yang merupakan emisi dari industri. Emisi kendaraan bergantung dari kualitas bahan bakar yang digunakan, sehingga penggunaan bahan bakar ramah lingkungan telah menjadi kebutuhan. Selain itu, kondisi mesin kendaraan juga memberikan andil terhadap kualitas emisi yang dihasilkan, dimana pemeliharaan perlu dilakukan agar kualitas mesin tetap terjaga. Penggunaan mesin-mesin motor untuk transportasi umum perlu pengawasan dan/atau pembatasan agar kualitas udara tidak semakin memburuk. Adanya peningkatan moda transportasi udara juga berpengaruh terhadap turunnya nilai IKU, yang ditunjukkan dari data IKU Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 sebesar 92,91 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 92,08.

Upaya yang dilakukan DLHK DIY dalam pengendalian pencemaran udara di antara lain melalui pembinaan, pengawasan dan pencegahan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap usaha/kegiatan industri. Adanya insentif pemberian penghargaan memberikan motivasi pada pelaku usaha/kegiatan, dan sebaliknya disinsentif berupa sanksi akan memberikan efek jera. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan usaha/kegiatan, yang diharapkan dapat membatasi munculnya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Selain upaya penanggulangan pencemaran udara dari sumber emisi, adanya ruang terbuka hijau (RTH) yang mencukupi sangat penting dalam purifikasi udara di daerah perkotaan. Oleh karenanya, Pemda DIY mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mempunyai kewenangan dalam pembangunan RTH, untuk mengoptimalkan pembangunan RTH publik.

2.2.2.7.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dijadikan salah satu indikator dalam IKLH yang dapat merepresentasikan eksistensi tutupan lahan bervegetasi yang masih bisa menjalankan fungsi ekologi.

Rumus perhitungan IKTL beberapa kali telah mengalami penyesuaian untuk validitas hasil. Pada tahun 2021, perhitungan IKTL berdasarkan metode perhitungan tahun 2019. Penyempurnaan metode perhitungan IKTL dilakukan dengan penambahan parameter, yang awalnya hanya tutupan hutan menjadi tutupan vegetasi yang terdiri dari tutupan hutan, tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, tutupan belukar dan belukar rawa pada penggunaan lain yang berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai), tutupan vegetasi berupa RTH (hutan kota dan taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Rumus perhitungan IKTL sebagai berikut

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : persentase tutupan hutan tertinggi di Papua
 TH : Tutupan Hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)
 50 dan 54,3 : konstanta

Dalam rumus perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa, daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50.

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah data campuran berdasarkan SK penetapan untuk lahan tutupan hutan negara dan data *shapefile* penggunaan lahan yang berasal dari olah data citra satelit KLHK. Data citra KLHK Tahun 2018 yang di-

overlay-kan terhadap shapefile kemiringan lahan dari DLHK DIY Tahun 2021 dan hasil kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018. Adapun SK penetapan kawasan hutan sebagai berikut :1) SK Nomor 122/MENLHK/Setjen/PLA.073/2018 Tanggal 5 Maret 2018 terkait dengan penetapan kawasan hutan produksi dan hutan lindung; 2) KPHK Tahura Bunder SK Nomor 351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 Tanggal 21 Mei 2019 terkait dengan penetapan kawasan TAHURA; 3) SM Paliyan Gunungkidul SK 1870/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 Maret 2014 terkait dengan penetapan kawasan suaka margasatwa Paliyan; 4) CA Imogiri Bantul SK.1869/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 Maret 2014 terkait dengan penetapan kawasan Cagar alam; 5) TWA Gunung Gamping SK.758/Kpts-II/1989 Tgl 16 Desember 1989 terkait dengan penetapan kawasan taman wisata alam; 6) TN Merapi SK.3627/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 6 Mei 2014 terkait dengan penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; 7) SM Sermo SK. 3112/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 April 2014 terkait dengan penetapan kawasan suaka margasatwa Sermo. Hasil perhitungan luas dan konversi penggunaan lahannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2-256 Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi
1	Hutan Produksi	13.421,000	1	13.421,000
2	Hutan Lindung	2.160,000	1	2.160,000
3	Hutan Rakyat	79.249,990	1	79.249,990
4	Cagar Alam Geologi	145,179	1	145,179
5	Cagar Alam	11,820	1	11,820
6	Taman Wisata Alam	1,080	1	1,080
7	Taman Hutan Raya	771,320	1	771,320
8	Taman Nasional	2.050,040	1	2.050,040
9	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10	Suaka Marga Satwa	619,820	1	619,820
11	Rawan Bencana Alam Geologi	3.355,859	1	3.355,859
12	Perkebunan	21.002,973	0,4	8.401,189
13	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	40.594,840	0,1	4.059,484
14	Sempadan Pantai	1.311,106	0,6	786,664
15	Sempadan Sungai	5.498,068	0,6	3.298,841
16	RTH	9.818,780	0,6	5.891,268
	TOTAL			124.325,198

**) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY*

Sumber data: Olah data citra satelit KLHK yang dioverlaykan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2021

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus di atas, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Luas Administrasi Provinsi DIY} &= 318.600 \text{ hektar} \\
 \text{TH} &= \text{Total Hasil Konversi} / \text{Luas Admin DIY} \\
 &= 124.325,198 / 318.600 = 0,39 \\
 \text{IKTL} &= 100 - [(84,3 - (0,39 \times 100)) \times 50 / 54,3] \\
 &= 100 - (45,3 \times 0,92) \\
 &= 58,34
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diperoleh realisasi IKTL tahun 2021 adalah 58,34 yang termasuk dalam kategori sedang. Adapun target IKTL dalam RPJMD tahun 2021 adalah 63,05 sehingga realisasi IKTL belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2020 sebesar 58,32, realisasi IKTL tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan berasal dari penyesuaian data luas hutan di dalam kawasan yang semula menggunakan data citra, pada tahun 2021 menggunakan luasan berdasarkan penetapan SK. Data shapefile berasal dari citra satelit KLHK yang di-overlay-kan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2021. Data shapefile olahan citra tahun 2021 juga telah terupdate dari tahun sebelumnya. Kenaikkan data IKTL dari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-257 Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,32	63,05	58,34	92,53	66,20	88,13

Sumber: DLHK DIY, 2022

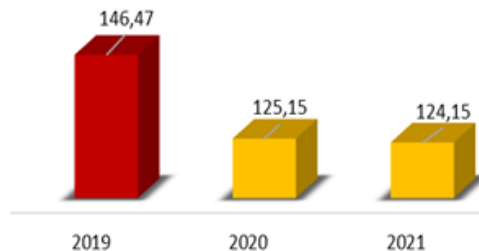
Tutupan lahan berupa hutan rakyat masih menjadi tutupan lahan terbesar dari penggunaan lainnya, sementara Hutan rakyat bisa beralih fungsi sewaktu-waktu karena hak dan kewenangan penggunaannya menjadi hak pemilik lahan. Untuk itu perlu upaya mempertahankan eksistensi hutan rakyat, antara lain dengan :

- 1) Memberikan fasilitasi akses pasar penjualan kayu, fasilitasi sertifikasi kayu dan dukungan untuk pengadaan bibit.
- 2) Pendampingan dan Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi tabungan masa depan dan fungsi ekologi, serta pembinaan tentang pengelolaan hutan secara lestari, misalnya dengan pola *argoforestry*.

Penggunaan lahan berupa RTH menjadi kewenangan Kabupaten/Kota karena lahan yang digunakan adalah milik pemerintah Kabupaten/Kota atau privat. Perlu peningkatan kualitas data RTH dari Kabupaten/Kota dan upaya penambahan tutupan vegetasinya.

2.2.2.7.4 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan hasil perhitungan indeks risiko bencana di DIY Tahun 2021 dengan 7 ancaman, mendapatkan hasil bahwa indeks risiko bencana di DIY turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 125,15 “**Sedang**” pada Tahun 2020 menjadi 124,15 “**Sedang**” pada tahun 2021. Berikut ini grafik tren penurunan indeks risiko bencana di DIY Tahun 2019 – 2021:



Sumber: BPBD DIY, 2022

Gambar 2-106 Tren Indeks Risiko Bencana di DIY Tahun 2019 – 2021

Risiko Bencana di DIY Tahun 2021

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, penduduk terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Berdasarkan kajian indeks risiko bencana di DIY Tahun 2021 dengan *mapping unit* analisis kapanewon/kemantren mendapatkan data jumlah dari 78 kapanewon/kemantren keseluruhan di DIY yaitu Tingkat Risiko Bencana Sedang berjumlah 29 Kapanewon/Kemantren dan 49 Kapanewon/Kemantren dengan Risiko bencana Tinggi, berikut ini data jumlah Kapanewon/Kemantren dengan Tingkat Risiko di DIY.

Tabel 2-258 Jumlah Kapanewon/Kemantren Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kapanewon/Kemantren Tingkat Risiko Bencana			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Bantul	0	2	15	17
2	Gunungkidul	0	18	0	18
3	Kulon Progo	0	8	4	12
4	Sleman	0	1	16	17
5	Kota Yogyakarta	0	0	14	14
	D.I. Yogyakarta	0	29	49	78

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana Indonesia (diolah), 2022

Indeks risiko bencana didapatkan dari nilai bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Tabel 2-259 Target dan Capaian Indikator Program Indeks Risiko Bencana Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125,15	135	124,15	108,04	125	112,98

Sumber: Kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2022

Data untuk perhitungan IRBI yang dilakukan BPBD DIY berbasis data Kabupaten dengan 7 (tujuh) ancaman bencana. Nilai IRBI pada Tahun 2021 sebesar 124,15. Pemda DIY berupaya untuk menurunkan indeks tersebut dengan melakukan berbagai hal untuk meminimalisir dampak terhadap bencana, diantaranya dengan melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi dan penguatan kelembagaan bencana di masyarakat antara lain melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 nilai IRBI turun 21,32 dari tahun 2019 yaitu sebesar 146,47 menjadi 125,15. Upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana terus dilakukan sehingga pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,00 menjadi 124,15.

2.2.2.8 Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Upaya menyelaraskan indikasi program utama perwujudan rencana tata ruang (struktur ruang dan pola ruang) dengan program sektoral dan kewilayahan dengan penilaian persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang terus dilakukan oleh Pemda DIY. Hal tersebut sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD pada tahun 2021.

Tabel 2-260 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase dukungan program	66,26	77,20	78,66	101,89	78,70	99,95

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang						

Sumber: DPTR DIY, 2022

Pada tahun 2021 penilaian indikator persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang mengalami kenaikan yaitu dari 66,26% (2020) menjadi 78,66%. Berdasar pada angka tersebut indikator Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang sudah mencapai target capaian sebesar 101,89% dari target capaian dalam RPJMD yaitu 77,20%. Hasil penilaian keterpaduan program dan lokasi pemanfaatan ruang untuk Program utama dalam Struktur Ruang berdasarkan tabel Indikasi Program Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program yang dilaksanakan OPD terkait tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2-261 Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2021

ARAHAN RTRW 2021	Nilai Keterpaduan Indikasi Program Tahun 2021	
	Program (%)	Klasifikasi
NILAI TOTAL KESESUAIAN INDIKASI PROGRAM	78,66	Kurang Berkualitas
KESESUAIAN STRUKTUR RUANG PROVINSI	66,99	Kurang Berkualitas
Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan	68,42	Kurang Berkualitas
Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	100,00	Berkualitas
Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	100,00	Berkualitas

ARAHAN RTRW 2021	Nilai Keterpaduan Indikasi Program Tahun 2021	
	Program (%)	Klasifikasi
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	57,14	Kurang Berkualitas
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	66,67	Kurang Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan Transportasi	65,79	Kurang Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan energi	83,33	Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	83,33	Berkualitas
Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air	40,00	Kurang Berkualitas
Perwujudan Jaringan Irigasi	100,00	Berkualitas
Perwujudan sistem penyediaan air minum	100,00	Berkualitas
Perwujudan sistem pengelolaan air limbah	40,00	Tidak Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan persampahan	100,00	Berkualitas
Perwujudan sistem pengelolaan drainase	50,00	Kurang Berkualitas
Perwujudan sistem jalur evakuasi bencana	100,00	Berkualitas
KESESUAIAN POLA RUANG	88,72	Berkualitas
Perwujudan Kawasan Lindung	90,74	Berkualitas
Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	85,71	Berkualitas
Program kawasan perlindungan setempat	90,91	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Konservasi	100,00	Berkualitas
Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	100,00	Berkualitas
Perwujudan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	100,00	Berkualitas
Perwujudan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam	85,00	Berkualitas
Kawasan Cagar Budaya	100,00	Berkualitas
Perwujudan Kawasan Budidaya	87,34	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan hutan Produksi	100,00	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	100,00	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan	86,67	Berkualitas

ARAHAN RTRW 2021	Nilai Keterpaduan Indikasi Program Tahun 2021	
	Program (%)	Klasifikasi
Peruntukan Pertanian		
Program Perwujudan Kawasan Perikanan	87,50	Berkualitas
Program perwujudan Kawasan Pertambangan	100,00	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Industri	60,00	Kurang Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan peruntukan Pariwisata	95,83	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	100,00	Berkualitas
Program perwujudan Kawasan Hankam	0,00	Tidak Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya	60,00	Kurang Berkualitas
KESESUAIAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	70,59	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	75,00	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi	71,43	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	60,00	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi	100,00	Berkualitas

Sumber: DPTR DIY, 2022

Nilai keterwujudan indikasi program RTRW DIY pada tahun 2021 secara keseluruhan 78,66% dengan klasifikasi Kurang Berkualitas. Arahkan RTRW 2021 dalam keterwujudan struktur ruang dengan nilai terendah yaitu perwujudan sistem jaringan sumber daya air dengan nilai kesesuaian 40%. Pada arahan keterwujudan Pola Ruang, program dengan nilai terendah yaitu Program Perwujudan Kawasan hamkam dengan nilai kesesuaian 0%. Nilai terendah pada kesesuaian terhadap program keterwujudan Pola Ruang yaitu Program Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan dengan nilai 60%.

Permasalahan yang mendapat perhatian untuk meningkatkan dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang di DIY adalah: (1) Sinkronisasi Indikasi Program Utama dengan Program Perencanaan Pembangunan terhadap aspek fungsi, lokasi, waktu dan pendanaan perlu ditingkatkan; dan (2) Keterpaduan program dalam perwujudan struktur ruang berupa pengembangan pusat kegiatan mempunyai nilai yang rendah sehingga memerlukan perhatian agar program pemerintah dapat lebih terfokus dan terstruktur dalam perwujudan pengembangan pusat kegiatan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) Menyusun dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 Tahunan dengan menyelaraskan indikasi program utama Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang; dan (2) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi Tata Ruang ke Kepada Daerah, OPD, dan pejabat terkait agar keterpaduan program yang dilakukan oleh OPD dapat lebih terpadu sehingga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah bisa menjadi *mainstreaming* kebijakan.

2.2.2.9 Program Pengembangan Pusat Petumbuhan, dengan indikator:

2.2.2.9.1 Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)

Salah satu permasalahan pembangunan suatu daerah adalah ketimpangan perkembangan perekonomian antar sub daerah di bawah daerah bersangkutan. DIY masih menghadapi ketimpangan perkembangan pembangunan ekonomi antarkabupaten dan kota. Penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ketimpangan wilayah menjadi salah satu isu strategis

dan harus ditangani dengan pemerataan pembangunan. Semangat untuk mengurangi ketimpangan wilayah diamanatkan di dalam RPJMD DIY 2017 – 2022 dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif bagi semua orang.

Terjadinya ketimpangan wilayah di DIY karena kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selama ini nilai PDRB ADHK kedua wilayah ini menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY. Di lain pihak, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,22% dari keseluruhan *output* DIY selama periode 2017 - 2020. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta mempunyai sektor industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar di DIY, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya.

Tabel 2-262 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Penda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	%	40,09	40,25	40,08	99,58	40,26	99,52

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 meningkat menjadi 5,53% setelah pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya mengalami minus sebesar 2,69%. Demikian juga pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2021 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2021 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 40,08%, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,92%. Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-263 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2021

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB ADHK (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kulon Progo	8.874.558,20	8,26	5,00
Bantul	19.933.714,34	18,56	5,20
Gunungkidul	14.231.297,15	13,25	5,15
Sleman	35.708.089,52	33,25	5,90
Yogyakarta	28.640.895,79	26,67	6,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (Data diolah)

2.2.2.9.2 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi

Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. Rencana struktur wilayah ruang DIY terdiri dari sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana, yang terdiri dari sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi tersebut dapat terwujud melalui beberapa pengembangan sistem transportasi yang meliputi pengembangan:

- 1) Sistem jaringan jalan
- 2) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Sistem jaringan kereta api

Perwujudan dari ketiga sistem tersebut menjadi faktor kunci dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi darat di wilayah DIY. Sistem jaringan jalan di wilayah DIY didukung oleh kontribusi penyediaan prasarana Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/kota serta Jalan Lingkungan. Total Panjang jalan Provinsi di DIY adalah 760.45 km. Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman sepanjang 116,32 km, Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 km, Kabupaten Kulon Progo sepanjang 175,14 km, Kabupaten Gunungkidul sepanjang 306,84 Km sedangkan untuk wilayah Kota Yogyakarta tidak dilalui Jalan Provinsi.

Perwujudan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di DIY didukung dengan adanya penyediaan simpul transportasi seperti terminal angkutan antar kota, antar provinsi, serta terminal angkutan intermodal. Berdasarkan tingkat kewenangannya, maka layanan angkutan umum dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

- 1) Angkutan Dalam Trayek yaitu Angkutan Perkotaan dan Angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP).
- 2) Angkutan Tidak Dalam Trayek: angkutan taksi dan angkutan sewa (umum dan khusus).

Penyediaan layanan angkutan perkotaan Trans Jogja yang merupakan Angkutan Perkotaan berbasis subsidi melayani beberapa cakupan wilayah pelayanan. Cakupan wilayah pelayanan tersebut meliputi seluruh Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, dan sebagian Kabupaten Bantul dengan jumlah kecamatan yang telah dilayani pada tahun 2021 yakni sebanyak 25 kecamatan. Jumlah trayek angkutan perkotaan Trans Jogja terdiri atas 14 trayek (Trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14). Tiga trayek terakhir merupakan perwujudan subsidi program dari Kementerian Perhubungan, melalui Program *Buy the Service*.

Tabel 2-264 Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Penda	Satu-an	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	%	81,46	78	81,45	104,42	83	98,13

Sumber: Dishub DIY dan DPUPESDM DIY, 2022 (data diolah)

Capaian indikator penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi pada tahun 2021 berada di atas target yakni dengan nilai 81,45%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai target yang ada, yakni sebesar 78% (sehingga persentase realisasi mencapai 104,42%). Nilai capaian tersebut sebesar 98,13% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 83%. Capaian realisasi sebesar 81,45% tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata dua variabel, yang meliputi:

- 1) Persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY sebesar 92,38% diperoleh dari rata-rata variabel:
 - a) Cakupan pelayanan Angkutan Dalam Trayek adalah sebesar 84,76%. Nilai tersebut diperoleh dari besarnya cakupan pelayanan AKDP ditambah dengan cakupan Angkutan Perkotaan. Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dihitung dengan meta indikator yakni nilai rata-rata cakupan pelayanan Angkutan Perkotaan dan Angkutan AKDP. Target

layanan angkutan perkotaan yakni melayani 24 kecamatan dari 25 kecamatan di kawasan Perkotaan Yogyakarta aatau sebesar 96%, sedangkan Angkutan AKDP yang semula 17 trayek, ditargetkan bertambah 1 trayek rute Bandara YIA sehingga mencapai (66,48%). Angkutan Perkotaan sejak tahun 2020 telah melayani 25 kecamatan dari 25 kecamatan di kawasan Perkotaan Yogyakarta sehingga telah mencapai 100%, sedangkan Angkutan AKDP yang semula 17 trayek, pada saat ini telah bertambah sebanyak 5 trayek DAMRI sehingga secara keseluruhan terdapat 14 trayek beroperasi dari 22 trayek yang ada atau sebesar 63,63%. Sehingga persentase rata-rata cakupan angkutan dalam trayek perkotaan dan AKDP adalah sebesar 81,81%. Capaian tersebut selanjutnya ditambah dengan adanya studi angkutan AKDP ke BIY, sosialisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan Pasar Belut Godean dan Terminal Pakem sebagai Park and Ride. Sehingga hasil akhir perhitungan nilai indikatornya telah mencapai 84,76%. Dengan telah beroperasinya angkutan DAMRI yakni sebanyak 5 trayek sehingga terjadi penambahan jumlah trayek dari 17 trayek menjadi 22 trayek (rute Bandara YIA) menjadi faktor eksternal yang berkontribusi pada capaian kinerja tersebut.

- b) Cakupan pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek telah tercapai 100%. Nilai ini melonjak dari tahun-tahun sebelumnya karena terjadi perubahan regulasi pada moda angkutan sewa khusus yang memudahkan para operator untuk mendapatkan dokumen legalitas perizinan. Peraturan semula yaitu KM.35 Tahun 2003, diubah beberapa kali yaitu dengan PM.32 Tahun 2014, PM.26 tahun 2016, dan PM.108 Tahun 2017, kemudian

terakhir diubah dengan PM.118 tahun 2018. Sejak perubahan terakhir ini, permohonan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus meningkat drastis. Semula ditargetkan hanya sejumlah 100 armada pada tahun 2022, karena tahun 2017 hanya berjumlah 15 armada yang memiliki izin. Pada tahun 2021 ditargetkan 92% kendaraan tertib izin yang terdiri atas taksi sebanyak 1.025 armada, angkutan pariwisata sebanyak 766 armada serta angkutan sewa khusus sebanyak 80 armada. Nilai rata-rata persentase tertib perijinan taksi, angkutan pariwisata dan angkutan sewa khusus, pada tahun 2021 yang telah tertib izin sebanyak 1.025 armada taksi dari 1025 kendaraan yang ada atau sebesar 100%, angkutan pariwisata 766 armada dari 805 armada atau sebesar 95% serta angkutan sewa khusus sebanyak 80 armada dari 100 armada atau sebesar 80%. Sehingga realisasi tertib perizinan tahun 2021 untuk taksi adalah sebanyak 400 armada atau sebesar 39%; angkutan pariwisata 550 armada atau sebesar 68%; serta angkutan sewa khusus 496 armada atau sebesar 496%. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 201%, nilai tersebut tetap diasumsikan tercapai 100% dalam perhitungan.

- 2) Persentase kondisi mantap di jalan provinsi sebesar 70,523%, yang dihitung berdasarkan data kondisi jalan berkategori baik dan sedang, sepanjang 536,295 km terhadap total panjang jalan provinsi sepanjang 760,45 km. Dapat lihat pada gambar dibawah untuk kondisi Provinsi per kabupaten/ kota yang berada di wilayah DIY.

Tabel 2-265 Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	536,295	70,523	Baik	341,440	44,900
				Sedang	194,855	25,624
2	Tidak Mantap	224,155	29,477	Rusak Ringan	156,935	20,637
				Rusak Berat	67,22	8,840
Jumlah		760,45	100	Jumlah	760,450	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 target capaian kinerja Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan indikator persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi telah tercapai.

2.2.2.10 Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan indikator:

2.2.2.10.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Permendagri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang dan rendah.

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- 2) Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- 3) Di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Hasil analisis atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Pemda DIY pada posisi sedang dengan nilai sebesar Rp1.823.021.441.344,32.

Tabel 2-266 Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tingkat kemampuan keuangan daerah pada posisi sedang tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Tingkat kemampuan keuangan daerah tetap pada kategori sedang walaupun adanya penurunan penerimaan PAD pada tahun 2020 sebesar 9,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 atau sebesar Rp-206.088.505.079,79 karena ada peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil sebesar 103,85% atau sebesar Rp58.216.760.875,00. Penurunan PAD tahun 2020 disebabkan:

- 1) Pajak yang berasal dari BBN-KB mengalami penurunan sebesar Rp158.060.749.800,00 dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang membuat menurunnya minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
- 2) Pajak Rokok mengalami penurunan karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat sebesar 37.5% dari penerimaan yang seharusnya Pemda DIY terima terkait peran Pemda DIY dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 3) Pendapatan dari Denda Pajak mengalami penurunan karena adanya kebijakan Pemda DIY untuk pembebasan denda pajak sebagai dampak terjadinya Pandemi COVID-19.
- 4) Retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Diklat mengalami penurunan karena pada masa Pandemi COVID-19 tidak ada yang menggunakan jasa layanan pendidikan.
- 5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung Daerah mengalami penurunan karena penggunaan pendopo sebagian besar merupakan kegiatan internal Pemda DIY sehingga tidak dipungut retribusi.
- 6) Retribusi tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa mengalami penurunan karena berkurangnya masyarakat yang memanfaatkan penginapan/pesanggrahan/villa akibat Pandemi COVID-19.
- 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga mengalami penurunan karena berkurangnya masyarakat yang memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olah Raga akibat Pandemi COVID-19.
- 8) Penurunan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikarenakan adanya penurunan pada Hasil penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan.

- 9) Penurunan dan pengelolaan BLUD dikarenakan penurunan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebagai dampak Pandemi COVID-19.

2.2.2.10.2 Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Optimalisasi aset dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan nilai guna secara ekonomis dari Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah DIY, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah. Optimalisasi atau pendayagunaan barang milik daerah selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatusahaan Barang Milik Daerah bersama sama dengan OPD Pemda DIY selaku Pengguna Barang Milik Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2021 mengakibatkan beberapa kendala terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah terutama yang dimanfaatkan melalui sewa. Beberapa penyewa yang terdampak secara ekonomi, kemudian mengembalikan barang milik daerah dan ada yang mengajukan keringanan sewa. Target dan realisasi indikator kinerja Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2-267 Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi	Rupia	9.016.	9.237	13.406	145,1	9.626	139,26

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
i aset-aset pemda DIY	h	510.978	.591.665	.469.567	3	.994.395	

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan Pemda DIY dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah) dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp13.406.469.567,00. Rincian penerimaan pendapatan dari optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp13.406.469.567,00 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-268 Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2021

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.406.119.001,00	5.746.160.687,00	130,41
2.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	227.210.000,00	340.880.000,00	150,03
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	93.290.000,00	98.709.200,00	105,81
4.	Retribusi Terminal	366.514.000,00	670.109.000,00	182,83
5.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.588.814.600,00	6.550.610.680,00	117,21
	Jumlah	10.681.947.601.00	13.406.469.567.00	125,51

Sumber: BPKA DIY, 2022

Optimalisasi aset-aset yang dilakukan Pemda DIY yaitu dengan: (1) Reviu/penyesuaian atas nilai *appraisal*/penilaian berdasarkan kondisi perekonomian (khususnya berdasar dampak Pandemi COVID-19); (2) *Appraisal* atau penilaian dalam rangka pemanfaatan

terhadap aset - aset yang belum dilaksanakan penilaian; (3) Penilaian *High Best Use* (HBU) untuk melihat potensi dan peruntukan yang dapat dioptimalkan atas aset - aset Pemda DIY; (4) Penawaran kerja sama sewa/pemanfaatan kepada pihak ketiga; dan (5) Pemasangan papan penawaran sewa atas aset-aset *idle* di Pemda DIY.

2.2.2.10.3 Nilai Eksternal pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran pemda meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat lima indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir yaitu nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi dan dipublikasikan oleh KemenPAN-RB.

Tabel 2-269 Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,75	8,95	102,29	8,80	101,70
2.	Nilai internal Integritas organisasi	Nilai	8,60	4,50	8,60	191,11	4,60	186,96
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	9,33	5,90	9,33	158,14	6,00	155,50

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi merupakan Nilai Komponen Hasil dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Ketiga nilai tersebut termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) yang diterbitkan Kementerian PAN dan RB. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) Tahun 2020 dirilis oleh Kementerian Pan dan RB RI pada 31 Maret 2021, sehingga data yang tersaji pada Tahun 2020 merupakan data capaian dalam LHE RB Tahun 2019.
- 2) Capaian Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi Tahun 2021 masih menggunakan angka sementara yaitu capaian Tahun 2020 berdasarkan LHE RB Tahun 2020 karena sampai Laporan ini disusun Kementerian PAN dan RB RI belum merilis Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) Tahun 2021.
- 3) Sejak Tahun 2020, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan penilaian Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.
- 4) Secara umum capaian indikator Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan nilai indikator tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021. Optimisme kenaikan Indeks

reformasi birokrasi juga didasarkan atas berbagai capaian prestasi nasional sebagai berikut:

- a) Terdapat satu inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1024 tahun 2021 Tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu RAJUTAN SIBAKUL JOGJA (Cara Jitu Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha) – Dinas Koperasi dan UKM DIY.
- b) Tahun 2021 terdapat tambahan 4 (empat) unit kerja yang mendapatkan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 (satu) unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perkembangan unit kerja pelayanan yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai berikut:

Tabel 2-270 Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2016 dan 2021
2	RS paru Respira Dinas Kesehatan DIY	WBK	2017
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
4	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
6	Badan Kepegawain Daerah DIY	WBK	2021
7	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
9	Balai Layanan Perpustakaan Dinas erpustakaan dan Arsip DIY	WBK	2021

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

2.2.2.11 Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan.

Pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa sesuai dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY telah ditindaklanjuti dengan (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman

Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan. Sehingga semua urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan telah terwadahi dalam Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Dengan demikian capaian kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2-271 Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Terwujudnya Pelaksanaan urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Capaian tersebut ditandai dengan telah ditetapkannya Pergub yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yakni:

- a) Tahun 2021: telah ditetapkan 9 Pergub DIY tentang Perubahan atas Pergub DIY yang mengatur tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah dan UPT.
- b) Untuk menindaklanjuti kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, pada Tahun 2021 juga telah ditetapkan 24 Pergub DIY yang

mengatur Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah

2.2.2.12 Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa

Sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ruang lingkup Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Adapun Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan terhadap Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau *Dede Keprabon*.

Dalam menjalankan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah;
- b. Pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah kadipaten yang menyalahi Serat kekancingan;
- d. Penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- e. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan

- f. Kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa di urusan pertanahan dapat diukur melalui: (1) Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan formulasi perhitungan capaian kinerja berupa persentase jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan, perawatan dokumen tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa; (2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan formulasi perhitungan capaian kinerja berupa Pendaftaran Tanah Desa, jumlah desa yang mempunyai perdes, dan pengajuan permohonan kekancingan yang diajukan dan ditindaklanjuti. Data capaian kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2-272 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	%	61,25	73,16	74,11	101,30	88,67	83,58

Sumber: DPTR DIY, 2022

Perhitungan capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa untuk tahun 2021 melampaui target. Dari target 73,16% realisasi capaian

program 74,11% atau terealisasi sebesar 101,30%. Dibandingkan dengan capaian 2020 capaian tersebut meningkat sebesar 12,86%. Formulasi indikatornya meliputi persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, perawatan dokumen Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten, pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa serta fasilitasi Tanah Desa yang meliputi pendaftaran Tanah Desa, permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft raperdes. Meta indikator dan pembobotannya adalah Capaian pengelolaan (60%) ditambah capaian pemanfaatan (40%).

Angka capaian terhadap persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan merupakan hasil perhitungan realisasi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.710 bidang dan 1.625 bidang Tanah Desa dari target keseluruhan 21.877 bidang. Berikut ini disampaikan data pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing kabupaten/kota:

Tabel 2-273 Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten /Kota	Pendaftaran									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jml
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	673
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	2335
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	0	3091
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1423	13710

Sumber: DPTR DIY, 2022

Hasil capaian pendaftaran Tanah Desa sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 2-274 Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi s.d. 2021	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat s.d. 2021
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	1,889	228	287

No	Kabupaten	Jumlah bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi s.d. 2021	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat s.d. 2021
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0	0
3	Gunung-kidul	10,882	3,295	7,599	3,295	0	544
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	0	794
	Jumlah	50,279	16,068	34,223	15,840	228	1,625

Sumber: DPTR DIY, 2022

Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing kabupaten sebagai berikut:

Tabel 2-275 Capaian Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Sudah Disahkan
1	Bantul	75	75
2	Gunungkidul	144	144
3	Kulon Progo	87	87
4	Sleman	86	86
	JUMLAH	392	392

Sumber: DPTR DIY, 2022

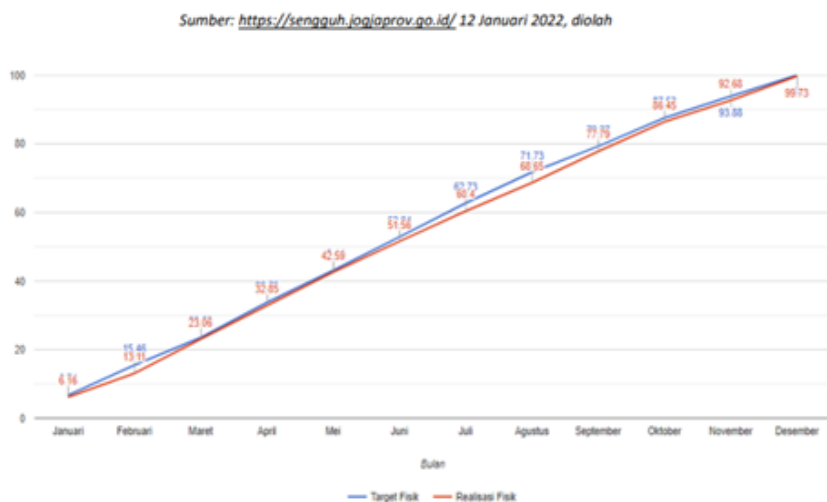
Terkait pemanfaatan tanah desa, masih perlu adanya regulasi khusus sebagai payung hukum terhadap pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan tanah Desa, serta belum semua dokumen pertanahan pada satu desa dilakukan pemeliharaan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017, terhadap Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten perlu dilakukan penatausahaan pertanahan yang meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Berkenaan dengan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, termasuk didalamnya Tanah Desa yang asal-usulnya dari hak anggaduh Kasultanan/Kadipaten, dalam implementasinya tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur pendaftaran tanah secara umum. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dengan Badan Pertanahan Nasional serta mendorong percepatan penyelesaian penyusunan regulasi khusus yang mengatur pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Selain itu,

perlu adanya pemahaman mengenai urgensi memelihara dokumen pertanahan agar sejarah asal-usul tanah di desa/kalurahan tetap terjaga guna mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Pemerintah Desa/Kalurahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan melalui pelaksanaan inventarisasi terhadap seluruh dokumen pertanahan yang dimiliki. Harapannya dalam satu tahun anggaran dapat diselesaikan pemeliharaan seluruh dokumen pertanahan di tiap desa. Jika tidak dimungkinkan, maka Pemerintah Desa/Kalurahan dapat mengidentifikasi dokumen yang akan diprioritaskan untuk dilakukan perawatan dokumen terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi keterbatasan kuota layanan pemeliharaan dokumen dari ANRI.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2021

Kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan (Belanja Langsung) Pemerintah Daerah DIY sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 memiliki kinerja fisik dengan capaian sebesar 99,68% dari target 100% sehingga terdapat deviasi fisik sebesar 0,32%. Berikut adalah gambaran kinerja fisik dan keuangan pada tahun 2021.



Gambar 2-107 Kinerja Fisik



Sumber: <https://sengajuh.ingiprov.go.id/>, 12 Januari 2022, diolah

Gambar 2-108 Kinerja Keuangan

Deviasi fisik pada triwulan sebelumnya sebesar 1,14%. Sedangkan pada kinerja keuangan, memiliki capaian sebesar 91,47 dari target keuangan 100% sehingga terdapat deviasi sebesar 8,53% (*un-audited*). Adapun deviasi pada triwulan sebelumnya cenderung lebih tinggi sebesar 11,61%. Sesuai data yang tersedia, pada Triwulan IV, 2021 capaian kinerja fisik Pemerintah Daerah DIY tercatat lebih tinggi daripada capaian Triwulan III Tahun 2020 yaitu sebesar 75,31%. Selain itu, capaian keuangan Triwulan IV 2021 juga lebih tinggi dari capaian Triwulan III yaitu sebesar 61,97%.

Setahun lebih setelah pandemi COVID-19 di DIY, Pemerintah Daerah DIY beserta OPD lebih antisipatif dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan terutama dalam menyikapi adanya adaptasi/*redesign* pelaksanaan dan menindaklanjuti *refocussing* untuk mendukung penanganan wabah COVID-19 sesuai instruksi Pemerintah. APBD DIY Tahun 2021 telah diubah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk merespon kebutuhan perubahan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 dan perubahan-perubahan kebutuhan seperti perubahan target keluaran karena berubahnya pelaksanaan/ penghentian

pelaksanaan sub kegiatan, serta terjadinya efisiensi anggaran sub kegiatan. Penjabaran atas Perubahan APBD tersebut terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Deviasi fisik realisasi sub kegiatan disebabkan oleh:

1. Kendala pengadaan barang/ jasa misalnya terjadi gagal proses tender, pemutusan kontrak pengadaan barang/ jasa – terutama pada kontrak-kontrak pengadaan dengan nilai di bawah 80% dari harga perkiraan sendiri (HPS).
2. Pelaksanaan DAK Fisik terkendala keterlambatan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan (juknis/ juklak) sebagai dasar pelaksanaan, dan kendala pada penyelesaian kontrak pengadaan barang/ jasa karena keterbatasan waktu akibat keterlambatan juknis / juklak tersebut.
3. Tidak tersedianya E-Catalogue Pengadaan Barang/ Jasa terdapat beberapa barang yang tidak tampil atau tidak tersedia.

Deviasi keuangan pada triwulan IV, 2021 pada posisi lebih kecil 10% (<10%) disebabkan karena pembatasan kegiatan selama PPKM yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan dan serapan anggaran (terkait pembatasan kerumunan, pembatasan pelayanan pasien), beberapa sub kegiatan tidak dapat optimal karena terjadi hambatan pada proses penyelesaian pengadaan barang jasa gagal tender dan putus kontrak pelaksanaan pengadaan, beberapa sub kegiatan mengalami keterlambatan/tidak selesai karena terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan misalnya terdampak keterlambatan terbitnya juknis/ juklak pelaksanaan DAK, dan kegiatan hibah / bansos yang tidak dapat diselesaikan karena penerima sasaran tidak memenuhi syarat.

Adapun dari sisi indikator Sasaran Perangkat Daerah, terdapat 87 indikator kinerja pada tahun 2021. Capaian indikator-indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2-276 Capaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85	80	94.12
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58.3	N/A	N/A
3	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMA	58.16	N/A	N/A
4	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98.39	98.41	100.02
5	Capaian APK pendidikan Menengah	persen	99.05	108.22	109.26
6	Capaian APK pendidikan khusus	persen	84.93	84.97	100.05
7	Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	juta rupiah	328,611	345,870	100
8	Peningkatan status kawasan konservasi	%	80	80	100
9	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	2,100	2,136	101.71
10	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	kasus	40	51	127.5
11	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	70.99	75.19	105.92
13	Persentase Pemenuhan Standar	%	70	81.39	116.27

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
	Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa				
14	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	78.9	78.9	100
15	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	Juta rupiah	11,073,149	9,131,091	82.46
16	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	rupiah	8,498,797	2,206,566	25.96
17	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0.46	0.52	86.96
18	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	%	98.1	97.23	99.11
19	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	76	87	114.47
20	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	81.5	94.8	116.3
21	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100
22	Optimalisasi Aset-aset Pengelola BMD	Rp	6,704,805,116	5,239,098,025	78.14
23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.82	94.7	104.27
24	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	39.19	40,83*	95.82

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
25	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun (Sumber BPS)	Juta Rupiah	7,255,205	7.496.829**	103.33
26	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	93.36	96.18	103.02
27	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	92.3	92.92	100.67
28	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	85.5	85.74	100.28
29	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	98.22	98.87	100.66
30	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	85.86	98.82	115.09
31	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	79.42	89.17	112.28
32	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	40.42	43.64	107.97
33	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta	756,975	994.779*	131.42
34	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	100	100	100
35	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	%	73.16	74.11	101.3

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
36	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	96.83	97.75	100.95
37	Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	83	90.95	109.85
38	Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/ angka	92	91	98.91
39	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	97.02	91.51	94.32
40	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99.7	99.99	100.29
41	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	93	93	100
42	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan	%	100	121.5	121.5
43	Rerata Desa / Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa / Kelurahan	350	350	100
44	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	Angka	3.05	2.48	81.31

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
45	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
46	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik	%	100	100	100
47	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	95	100	105.26
48	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	92	97.5	105.98
49	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	81.5	81.5	100
50	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit	23	95	413.04
51	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang	%	80	80.77	100.96

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
	ditindaklanjuti				
52	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	%	88	93.5	106.25
53	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah	Skor indeks	86	88.83	103.28
54	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	%	89	92.31	103.72
55	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	77	79	102.5
56	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	87.17	98.99	113.55
57	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	43.08	40.91	94.96

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
58	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51.59	69.64	134.99
59	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun n (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	9,403,163	8,379,070	89.11
60	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	88	94.35	107.2
61	Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	4	4	100
62	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Lembaga	4	4	100
63	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	%	90	94.03	104.48

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
64	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun (Atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	13,668,856	12,670,357	92.7
65	Jumlah kesempatan kerja	orang	2,104,824	2,228,523	105.88
66	Umur Menikah Pertama Perempuan	umur	24.4	25.35	103.89
67	Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	%	98	105.61	107.77
68	a. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%); dan	%	87	87.9	101.03
69	b. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%).				
70	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96.5	131.96	136.74
71	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	46.17	50.17	108.66
72	Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	peringkat	5	10	50
73	Omzet Koperasi	Rp. Juta	4,224,308	4,272,358	101.14
74	Omzet UKM	Rp. Miliar	11,124	11,152	100.25
75	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	%	0.4	0.49	122.5
76	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta rupiah	42,664,788	49,021,449	114.9

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
77	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	87.54	102.99
78	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	%	11.5	11.58	100.7
79	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	Peringkat 2 POPWIL	N/A	N/A
80	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan Pembangunan daerah	%	100	100	100
81	Tingkat Kepuasan pelanggan	%	71	84.77	119.39
82	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	buah	718	763	106.27
83	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	6.89	6.94	100.73
84	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	%	10.29	10.36	100.68
85	Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	4.6	5.18	112.61
86	Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	26	26.25	100.96
87	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	Berkas	7,300	7,589	103.96

Secara umum, ringkasan kinerja capaian indikator pada sasaran perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut; 69 indikator tercapai, 14 indikator tidak tercapai, dan 3 indikator tidak diketahui tingkat ketercapaiannya disebabkan tidak ada data realisasinya.

2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Pemerintahan Wajib																				
Pendidikan																				
		SEMULA	Program Pendidikan Menengah	persentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A (%)	83,00	3.734.994.321.000			83%		1	99,75%	47,16%	80,10%	542.319.666.013	96,51%	14,52	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45,00				0%		-	135%		54,00		120,00				
				Angka Putus Sekolah (%)	0,17				0,17%		0	200%		0,10%		199,41				
			1	Penyediaan BOS/BOSDA								100%								
			2	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA								100%								
			3	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK								100%								
			4	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Manenah								100%								
			5	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)								100%								
			6	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)																
			7	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Yoekakarta																
			8	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Yoekakarta*																
			9	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Yoekakarta*																
			10	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 4 Yoekakarta*																
			11	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 5 Yoekakarta*																
			12	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 6 Yoekakarta*																
			13	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 7 Yoekakarta*																
			14	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 8 Yoekakarta*																
			15	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 9 Yoekakarta*																
			16	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 10 Yoekakarta*																
			17	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 11 Yoekakarta*																
			18	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bambanglipuro*																
			19	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantutapan*																
			20	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Bantutapan*																
			21	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantul*																
			22	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Bantul*																
			23	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Bantul*																
			24	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Dlinggo*																
			25	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Imogiri*																
			26	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Jetis*																
			27	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kaxihan*																
			28	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kratak*																
			29	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Paingan*																
			30	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Piyungan*																
			31	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pleret*																
			32	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pundone*																
			33	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sandi*																
			34	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sedayu*																
			35	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sewon*																
			36	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Srandakan*																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			37	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Galuh*																		
			38	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Girimulyo*																		
			39	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalibawane*																		
			40	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kolad*																		
			41	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Lendah*																		
			42	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Peneasih*																		
			43	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Samiriluh*																		
			44	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sentolo*																		
			45	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Temon*																		
			46	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wates*																		
			47	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wates*																		
			48	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Karangmojo*																		
			49	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Panggarane*																		
			50	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Patuk*																		
			51	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Plaven*																		
			52	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Plaven*																		
			53	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ronkean*																		
			54	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semanu*																		
			55	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semin*																		
			56	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tanjungsalim*																		
			57	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wonosari*																		
			58	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wonosari*																		
			59	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Cangkringan*																		
			60	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Depok*																		
			61	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Garminas*																		
			62	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Godrean*																		
			63	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalasan*																		
			64	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Minegir*																		
			65	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Mlati*																		
			66	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngablak*																		
			67	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Ngablak*																		
			68	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Nempalak*																		
			69	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pakem*																		
			70	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Prambanan*																		
			71	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sewidan*																		
			72	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sleman*																		
			73	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Sleman*																		
			74	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tempel*																		
			75	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Turu*																		
			76	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Yogyakarta*																		
			77	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Yogyakarta*																		
			78	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Yogyakarta*																		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			121	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Godaan*																
			122	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kalasan*																
			123	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Seveggan*																
			124	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tempele*																
			125	Pembinaan Siswa SMA									100%							
			126	Pembinaan Siswa SMK									100%							
			127	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah									100%							
			Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A, B, dan C	65,38	102.550.043.500	82,28						157%	72,85%	84,80	56.823.784.746	129,71	55,41	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
				Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional	13,00		19						58%		19,00		146,15			
			1	Pengembangan Layanan Khusus Autis									100%							
			2	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK- di v									100%							
			3	Bantuan Operasional Sekolah SLB									100%							
			4	Pembudayaan Pendidikan Inklusif									100%							
			5	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta									100%							
			6	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta									100%							
			7	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina									100%							
			8	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul									100%							
			9	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul									100%							
			10	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman									100%							
			11	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul									100%							
			12	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul									100%							
			13	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo									100%							
			14	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta																
			15	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta																
			16	Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina																
			17	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul																
			18	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul																
			19	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman																
			20	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul																
			21	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul																
			22	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo																
			23	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)									100%							
			24	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas																
			25	Pengiriman Lomba PNF Tingkat Nasional																
			26	Pengembangan Model PAUD																
			27	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan																
			28	Penyelenggaraan Ujian																
			29	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan																
			30	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
			31	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				32	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa															
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A (%)	83,00%	3.734.994.321.000	81,89%	399.826.874.364	83%	161399845024	1	71029988373	98,66%	44,01%	81,89%	1.013.176.528.750	98,66%	27,13%	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45,00		49		0%			-	#DIV/0!		49,00		108,89%			
				Angka Putus Sekolah (%)	0,17%		0,11%		0,17%			0	64,71%		0,11%		135,29%			
				Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A (%)	65,38%	102.550.043.500	82,28%	399.826.874.364	65,38			82,28	125,85%	48,37%	82,28%	456.650.659.110	125,85	445,30%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
				Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan internasional khusus (%)	13,00		19		0%			-	173%	48,37%	19,00		146,15%			
				1 Penambahan Ruang Kelas Baru**			100%	99.006.245					115,10%	0,00%						tidak ada di 2022
				2 Pembangunan Ruang Guru/Konata Sekolah/TTI**			100%	714.572.247	26,76%	25,00		0	0,00%	115,10%	0,00%					
				3 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi**			100%	820.714.056	30,93%	3,08%		0	0,00%	96,99%	0,00%					
				4 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika**			100%	1.186.140.841	25,31%	3,08%		0	0,00%	98,78%	0,00%					
				5 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia**			100%	394.667.422	25,17%	3,08%		0	0,00%	99,32%	0,00%					
				6 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa**			100%	1.058.702.354	30,87%	3,08%		0	0,00%	97,18%	0,00%					
				7 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			100%	679.202.704	30,58%	3,08%		0	0,00%	98,10%	0,00%					
				8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100%	364.551.309	30,08%	3,08%		0	0,00%	99,73%	0,00%					
				9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			100%	1.152.050.078	30,41%	3,08%		0	0,00%	98,65%	0,00%					
				10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TTI**			100%	1.425.571.465	31,39%	3,08%		0	0,00%	95,57%	0,00%					
				11 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika**			100%	354.419.785	25,31%	3,08%		0	0,00%	98,78%	0,00%					
				12 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer**			100%	124.339.023	30,88%	3,08%		0	0,00%	97,15%	0,00%					
				13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa**			100%	129.032.131	30,87%	3,08%		0	0,00%	97,18%	0,00%					
				14 Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah**			100%	308.543.601	30,74%	3,08%		0	0,00%	97,59%	0,00%					
				15 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100%	1.195.339.125	30,08%	3,08%		0	0,00%	99,73%	0,00%					
				16 Pengadaan Mebel Sekolah**			100%	291.203.000	30,08%	3,08%		0	0,00%	99,73%	0,00%					
				17 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik**			100%	1.114.291.000	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	0,00%					
				18 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			100%	36.807.241.200	2,82%	2,82%		0	0,00%	77,30%	0,00%					
				19 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			100%	298.280.000	12,59%	12,59%		0	2,49%	98,97%	19,78%					
				20 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			100%	40.130.000	31,72%	31,72%		0	29,69%	98,39%	93,60%					
				21 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			100%	445.536.000	98,10%	98,10%		1	41,33%	99,06%	42,13%					
				22 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**			100%	505.195.475.668	40,40%	40,40%		0	24,04%	104,23%	59,50%					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
23			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			100%	20.769.700	73,49%	73,49%	1	64,60%	97,78%	87,90%								
24			Pembangunan Ruang Praktik Siswa**			100%	11.765.405.408	30,80%	30,80%	29,78%	0	0,00%	0,00%								
25			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100%	451.183.382	30,82%	30,55%	0	0,00%	9,99%	0,00%								
26			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**			100%	1.052.548.539	25,66%	25,00%	0	0,00%	12,00%	0,00%								
27			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa**			100%	277.875.093	30,45%	30,00%	0	0,00%	10,11%	0,00%								
28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium**			100%	205.093.841	30,33%	30,00%	0	0,00%	10,15%	0,00%								
29			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			100%	92.463.920	31,23%	30,00%	0	0,00%	9,86%	0,00%								
30			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100%	447.060.318	100,00%	100,00%	0	0,00%	3,08%	0,00%								
31			Pengadaan Mebel Sekolah**			100%	1.737.512.100	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%								
32			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik**			72,02%	29.885.571.751	21,12%	20,32%	0	0,00%	14,58%	0,00%								
33			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			100%	96.467.000	14,66%	13,57%	0	0,00%	100%	0,00%								
34			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan**			100%	139.276.402.843	47,43%	46,82%	0	25,21%	100%	53,84%								
35			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			100%	33.229.500	82,59%	79,32%	1	71,37%	100%	89,98%								
36			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**			100%	1.105.358.881	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%								
37			Rehabilitasi Ruang Guru/Kensala Sekolah/TK**			100%	368.975.325	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%								
38			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100%	397.284.614	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%								
39			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			100%	4.796.973.000	0,33%	0,37%	0	0,34%	100,00%	91,89%								
40			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			100%	6.337.793.362	37,63%	36,39%	0	13,10%	100,00%	36,00%								
41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			100%	865.593.000	5,38%	5,12%	0	1,54%	100,00%	30,08%								
42			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			100%	8.513.994.000	31,72%	31,21%	0	29,69%	100,00%	95,13%								
43			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			100%	664.137.500	44,10%	43,60%	0	13,02%	100,00%	29,86%								
44			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus**			100%	21.033.838.049	61,36%	62,95%	1	27,77%	100,00%	44,11%								
45			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			100%	8.897.000	91,15%	90,07%	1	81,63%	100,00%	90,63%								
		SEMULA	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA SMK dan SLB (%)	99,62	95.617.411.500	99,95	32.647.186.186					100,33%	34,14%	99,95	14.755.696.686	100,33	15,43	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Realisasi tahun 2018 menggunakan data tahun 2017 karena data terbaru belum tersedia	
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satu medali)	65,00								0,00		24,67		37,95				
			1	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas									NA								
			2	Pengiriman Lomba PNFJ Tingkat Nasional									NA								
			3	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFJ									100,00%								
			4	Pengembangan Model PAUD									NA								
			5	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan									100,00%								
			6	Penyelenggaraan Ujian									100,00%								

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				7	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan									100,00%							
				8	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik Pendidik dan Tenaga Kependidikan									0,00%							kegiatan mengalami refokusing
				9	Pengembangan Model Usahawan Muda Benuadiditan									100,00%							
				10	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa									NA							
				11	Pembelajaran Daring									100,00%							
		MENJADI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Angka Kelulusan jenjang SMA SMK dan SLB (%) Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	99,62% 65,00	95.617.411.500	99,97% 31	140.861.610.000	0,00	4210898142.86	1	3.598.874.770,78	100,00%	85,47%	99,97%	176708461444.78	99,97%	184,81	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100%		34,54%	32,44%	0	10,68%	100,00%	33%							
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%		72,59%	68,70%	1	46,00%	100,00%	67%							
			3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%		44,41%	43,57%	0	37,34%	100,00%	86%							
			4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100%		34,56%	34,05%	0	31,08%	100,00%	91%							
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100%		4,43%	3,91%	0	1,32%	100,00%	34%							
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			100%		36,20%	35,87%	0	15,15%	100,00%	42%							
			7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100%														di tahun 2022 tidak ada
			8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%		51,12%	50,79%	1	50,79%	100,00%	100%							
			9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%		63,78%	62,72%	1	60,56%	100,00%	97%							
			10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100%		49,82%	48,98%	0	48,98%	100,00%	100%							
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Pensewaan			100%		34,15%	32,69%	0	25,28%	100,00%	77%							
			12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100%		26,95%	25,00%	0	22,61%	100,00%	90%							
			13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%		41,92%	40,90%	-	24,18%	0,00%	59%							
			14	Penyediaan Jasa Surat Mensurat			100%		50,52%	50,00%	1	40,25%	100,00%	81%							
			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%		43,13%	41,67%	0	25,61%	100,00%	61%							
			16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%		46,99%	46,07%	0	17,44%	100,00%	38%							
			17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100%		43,85%	43,03%	0	14,88%	100,00%	35%							
			18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100%		34,19%	33,33%	0	0,00%	100,00%	0%							
			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100%		40,37%	38,67%	0	4,61%	100,00%	12%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
		SEMULA	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	87,68	132.229.328.000							100,21	96,96	87,72	94.576.781.570	100,05%	71,52	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Realisasi tahun 2018 menggunakan data tahun 2017 karena data terbaru belum tersedia	
			1 Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SLB										NA								
			2 Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMA										NA								
			3 Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMK										NA								
			4 Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan										NA								
			5 Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Pemeliharaan Insentif										100,00								kegiatan di sengguh 2020
			6 Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan										100,00								kegiatan di sengguh 2020
			7 Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan										100,00								kegiatan di sengguh 2020
		MENJADI	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	87,68%	132.229.328.000	87,74%	310.157.000	87,68%	77.007.000,00	1	48.792.000,00	100,07%	63,36%	87,74%	94.935.730.570	100,07	71,80%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				100,00%	310.157.000	100,00%	100,00%	1	11,60%	100,00%	11,60%							
		SEMULA	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	95,00%	17.028.065.241									81,87	9.054.468.663	86,18	53,17%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1 Produksi Media Pembelajaran										100,00								
			2 Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK										100,00								
		MENJADI	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	95,00%	17.028.065.241	94%	1.311.947.400	95,00%		0		36,73%	98,12%	93,76%	10.366.416.063	98,69	60,88	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Balai Tekomdik	nama indikator: Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sekolah menengah dan	
			1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				100,00														tidak ada di e-monev
			2 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				100,00														tidak ada di e-monev
		SEMULA	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar (siswa)	2148,00	29.615.733.000									511,00	19.352.608.404	23,79	65,35	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1 Peningkatan Kompetensi Peserta Didik SMK										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			2 Penanganan Covid-19										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			3 Pemeliharaan Bengkel Rutin/ Berkala Peralatan Bengkel										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			4 Pengadaan Peralatan Bengkel										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			5 Sikronisasi dan Pengembangan Silabi Diklat										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			6 Penyusunan Program dan Penataan Anggaran										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			7 Kegiatan SMM ISO 9001:2015										100,00								sub kegiatan BLUD BLPT

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			8	Penyusunan IKM									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			9	Roadshow dan Sosialisasi Program BLPT									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			10	Administrasi Perkantoran									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			12	DED Asrama									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			14	Kegiatan Pelayanan BLUD (Pendaftaran 2020)									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
			15	Kegiatan Pelayanan BLUD (Pengurusan SIPA)									100,00								sub kegiatan BLUD BLPT
				Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta (ach)	91,03	6.011.875.000								81,43	36.745.464.627	89,45	611,21%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta									100,00								
				Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Bantul (%)	84,97	6.661.214.000						99,45	99,94	80,23	46.238.881.301	94,42	694,15%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul									100,00								
				Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Gunungkidul (%)	87,41	7.187.090.000						98,16	91,03	81,69	34.417.385.343	93,46	478,88	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul									100,00								
				Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo (ach)	81,67	5.309.776.000						97,25	91,93	73,59	23.448.207.772	90,11%	441,60	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo									100,00								
				Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Sleman (%)	88,33	7.187.052.000						95,66	80,77	81,31	36.332.201.090	92,05	505,52	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman									100,00								
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar (siswa)	2148	29.615.733.000	2.127	3.356.628.962	150	161.399.845.024,00	960	71.029.988.373,00	640,00%	44,01%	2127,00	93.739.225.739	99,02%	316,52	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Balai Latihan Pendidikan Teknik		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta (%)	91,03%	6.011.875.000	88,57%	16.242.630.502	91,03%		1		97,30%		88,57%	52.988.095.129	97,30%	881,39	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Pendidikan KOTA	Realisasi capaian sebesar 88,57% berasal dari rumus perhitungan: jumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kota Yogyakarta yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kota Yogyakarta dikali 100%. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMA negeri dan swasta Kota Yogyakarta adalah 40 sekolah dengan jumlah SMA terakreditasi A sebanyak 37 sekolah. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMK negeri dan swasta Kota Yogyakarta adalah 30 sekolah dengan jumlah SMK terakreditasi A sebanyak 25 sekolah. Dengan demikian perhitungan
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab, Bantul (%)	84,97%	6.661.214.000	81,18%	20.571.799.003	84,97%		1		95,54%		81,18%	66.810.680.304	95,54%	1002,98	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Pendidikan BANTUL	Realisasi capaian sebesar 81,18% berasal dari rumus perhitungan: jumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul dikali 100%. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMA negeri dan swasta Kabupaten Bantul adalah 37 sekolah dengan jumlah SMA terakreditasi A sebanyak 35 sekolah. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMK negeri dan swasta Kabupaten Bantul adalah 48 sekolah dengan jumlah SMK terakreditasi A sebanyak 34 sekolah. Dengan demikian perhitungan

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Gunungkidul (%)	87,41%	7.187.090.000	83,33%	13.823.255.033	87,41%		1		95,33%		83,33%	48.632.829.776	95,33%	676,67	Dinas Pendidikan dan Olahraga - Pendidikan GK	Realisasi capaian sebesar 83,33% berasal dari rumus perhitungan: jumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Gunungkidul yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Gunungkidul dikali 100%. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMA negeri dan swasta Kabupaten Gunungkidul adalah 25 sekolah dengan jumlah SMA terakreditasi A sebanyak 22 sekolah. Pada triwulan 1 tahun 2021 terdapat jumlah SMK negeri dan swasta Kabupaten Gunungkidul adalah 47 sekolah dengan jumlah SMK terakreditasi A sebanyak 38 sekolah.
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo (%)	81,67%	5.309.776.000	83,67%	8.545.668.181	81,61%		1		98,51%		72,81%	31.993.875.953	89,15%	602,55	Dinas Pendidikan dan Olahraga - Pendidikan KP	Realisasi capaian sebesar 83,67% berasal dari rumus perhitungan: jumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Kulon Progo yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Kulon Progo dikali 100%. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMA negeri dan swasta Kabupaten Kulon Progo adalah 17 sekolah dengan jumlah SMA terakreditasi A sebanyak 16 sekolah. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMK negeri dan swasta Kabupaten Kulon Progo adalah 32 sekolah dengan jumlah SMK terakreditasi A sebanyak 25 sekolah. Dengan demikian

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab, Sleman (%)	88,33%	7.187.052.000	86,24%	15.500.866.957	88,33%		1		97,63%		86,24%	51.833.068.047	97,63%	721,20	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Pendidikan Sleman	Realisasi capaian sebesar 86,24% berasal dari rumus perhitungan: jumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Sleman yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Sleman nilai 100%. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMA negeri dan swasta Kabupaten Sleman adalah 52 sekolah dengan jumlah SMA terakreditasi A sebanyak 46 sekolah. Pada triwulan 4 tahun 2021 terdapat jumlah SMK negeri dan swasta Kabupaten Sleman adalah 57 sekolah dengan jumlah SMK terakreditasi A sebanyak 48 sekolah. Dengan demikian tidak ada sub kegiatan di 2022
				1 Penambahan Ruang Kelas Baru**			100,00%	99.006.245												
				2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TL**			100,00%	714.572.247	26,76%	25,00	0 0,00%	115,10%	0,00%							
				3 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi**			100,00%	820.714.056	30,93%	3,08%	0 0,00%	96,99%	0,00%							
				4 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika**			100,00%	1.186.140.841	25,31%	3,08%	0 0,00%	98,78%	0,00%							
				5 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia**			100,00%	394.667.422	25,17%	3,08%	0 0,00%	99,32%	0,00%							
				6 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa**			100,00%	1.058.702.354	30,87%	3,08%	0 0,00%	97,18%	0,00%							
				7 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			100,00%	679.202.704	30,58%	3,08%	0 0,00%	98,10%	0,00%							
				8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100,00%	364.551.309	30,08%	3,08%	0 0,00%	99,73%	0,00%							
				9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			100,00%	1.152.050.078	30,41%	3,08%	0 0,00%	98,65%	0,00%							
				10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TL**			100,00%	1.425.571.465	31,39%	3,08%	0 0,00%	95,57%	0,00%							
				11 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika**			100,00%	354.419.785	25,31%	3,08%	0 0,00%	98,78%	0,00%							
				12 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia**			100,00%	124.339.023	30,88%	3,08%	0 0,00%	97,15%	0,00%							
				13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa**			100,00%	129.032.131	30,87%	3,08%	0 0,00%	97,18%	0,00%							
				14 Rehabilitasi Sedang/Berat Berwujud Sekolah**			100,00%	308.543.601	30,74%	3,08%	0 0,00%	97,59%	0,00%							
				15 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			100,00%	1.195.339.125	30,08%	3,08%	0 0,00%	99,73%	0,00%							
				16 Pengadaan Mebel Sekolah**			100,00%	291.203.000	30,08%	3,08%	0 0,00%	99,73%	0,00%							
				17 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik**			100,00%	2.114.291.000	0,00%	0,00%	- 0,00%	0,00%	0,00%							
				18 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			100,00%	36.807.241.200	2,82%	2,82%	0 0,00%	77,30%	0,00%							
				19 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			100,00%	298.280.000	12,59%	12,59%	0 2,49%	98,97%	19,78%							
				20 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			100,00%	40.130.000	31,72%	31,72%	0 29,69%	98,39%	93,60%							
				21 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			100,00%	445.536.000	98,10%	98,10%	1 41,33%	99,06%	42,13%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
22			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**		100,00%	505.195.475.668	40,40%	40,40%		0	24,04%	104,23%	59,50%									
23			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		100,00%	20.769.700	73,49%	73,49%		1	64,60%	97,78%	87,90%									
24			Pembangunan Ruang Praktik Siswa**		100,00%	11.765.405.408	30,80%	30,80%		29,78%	0	0,00%	0,00%									
25			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**		100,00%	451.183.382	30,82%	30,55%		0	0,00%	9,99%	0,00%									
26			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**		100,00%	1.052.548.539	25,66%	25,00%		0	0,00%	12,00%	0,00%									
27			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa**		100,00%	277.875.093	30,45%	30,00%		0	0,00%	10,11%	0,00%									
28			Rehabilitasi Ruang Laboratorium**		100,00%	205.093.841	30,33%	30,00%		0	0,00%	10,15%	0,00%									
29			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah**		100,00%	92.463.920	31,23%	30,00%		0	0,00%	9,86%	0,00%									
30			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**		100,00%	447.060.318	100,00%	100,00%		0	0,00%	3,08%	0,00%									
31			Pengadaan Mebel Sekolah**		100,00%	1.737.512.100	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	0,00%									
32			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**		72,02%	29.885.571.751	21,12%	20,32%		0	0,00%	14,58%	0,00%									
33			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		100,00%	96.467.000	14,66%	13,57%		0	0,00%	100,00%	0,00%									
34			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan**		100,00%	139.276.402.843	47,43%	46,82%		0	25,21%	100,00%	53,84%									
35			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		100,00%	33.229.500	82,59%	79,32%		1	71,37%	100,00%	89,98%									
36			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**		100,00%	1.105.358.881	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	0,00%									
37			Rehabilitasi Ruang Sains/Sekolah (ZIS)***		100,00%	368.975.325	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	0,00%									
38			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**		100,00%	397.284.614	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	0,00%									
39			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		100,00%	4.796.973.000	0,33%	0,37%		0	0,34%	100,00%	91,89%									
40			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		100,00%	6.337.793.362	37,63%	36,39%		0	13,10%	100,00%	36,00%									
41			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		100,00%	865.593.000	5,38%	5,12%		0	1,54%	100,00%	30,08%									
42			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		100,00%	8.513.994.000	31,72%	31,21%		0	29,69%	100,00%	95,13%									
43			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		100,00%	664.137.500	44,10%	43,60%		0	13,02%	100,00%	29,86%									
44			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus**		100,00%	21.033.838.049	61,36%	62,95%		1	27,77%	100,00%	44,11%									
45			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		100,00%	8.897.000	91,15%	90,07%		1	81,63%	100,00%	90,63%									
Urusan Pemerintahan Wajib																						
Kesehatan																						
1	2	SEMULA	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat (%)	41,22%	14.418.205.000	538	637.386.076				1358,60	15.098.988.212	101,40		85	329598,01	105	Dinas Kesehatan			
				Persentase Desa Sehat Mandiri (%)	58,21%			79,27%					228,94		140,32		39329,53					
			1	Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat											NA							
			2	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga											100							
			3	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (RASK)											100							
			4	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat											100							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			5 Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (RASK)												100					
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular (%)	62,84%	15.581.850.000	61,78%					0,61			100,34	91	97,77	-	Dinas Kesehatan	
			1 Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial												100					
			2 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular												100					
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer kesehatan rujukan dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan (%) tahun 2020: Terwujudnya pelayanan kesehatan primer kesehatan rujukan dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang bermutu (%)	54,85%	613.142.637.000						0,43	6.057.552.098	92,49	99	77,64	1	Dinas Kesehatan		
			1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain												100					
			2 Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain												100					
			3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain (RASK Non-Fisik)											NA						
		MENJADI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Sehat (%)	41,22%	14.418.205.000	39,80%	35.644.036.498	0,0687	24.929.285.000	0	11.415.122.747	0,40	61.520.761.381	94,03	46	96,56	427	Dinas Kesehatan	
				Persentase Desa Sehat Mandiri (%)	58,21%		79,20%		0,7097		1		0,79		100,14		136,06			
				Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular (%)	62,84%	15.581.850.000	61,78%		0,6126		1		0,62		100,85		98,31			
				Persentase pelayanan kesehatan primer kesehatan rujukan dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan (%) tahun 2020: Terwujudnya pelayanan kesehatan primer kesehatan rujukan dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang bermutu (%)	54,85%	613.142.637.000	46,07%		0,4582		0		0,46		100		83,99			
			1 Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				2,622		0,2352	0	0	17,23%		100		75				

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			3.192		0,4221		0	0	17,71%			100		42			
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			967		0,5058		0	1	13,59%			100		27			
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			7.924		0,389		0	0	31,43%			99,82005141		81			
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			50		0,9446		1	1	93,26%			100		99			
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			552		0,5814		1	1	47,04%			100		81			
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**			27		0,0345		0	0	2,67%			100		79			
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			100		0,1603		0	0	16,03%			100		100			
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.151		0,61		1	1	48,97%			8151		80			
			10	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**			5.145		0,1969		0	0	18,22%			5145		95			
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			8.246		0,5061		1	1	59,73%			8246		99			
			12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**			0		0		-	-	0,00%			0		-			
			13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.945		0,6212		1	1	14,54%			100		23			
			14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			5.731		0,584		1	1	42,75%			100		73			
			15	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			8.911		0,2262		0	0	0,84%			100		4			
			16	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			100		1		1	1	100,00%			100		100			
			17	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**			996		1		1	1	83,33%			100		83			
			18	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			792		0,3993		0	0	26,02%			100		66			
			19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga**					0,4124		0	0	0,00%			100		-			sub kegiatan pada tahun 2022
			20	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya**			792		0		-	-	0,00%			0		-			sub kegiatan pada tahun 2022
		SEMULA	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDM dan Pembiayaan (%)	80,19%	4.209.442.600	74,64%						0,75	1.862.523.504	100		97	1,20	44	Dinas Kesehatan	program tahun 2020
				Persentase kefarmasian perbekes dan makanan sesuai standar (%)	86,48%		76,19%						0,76		96,24		88,10				
			Program Peningkatan Sumber Daya																		
			1	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan												100					program tahun 2018
			2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)												100					kedua kegiatan diampu 2 program berbeda di tahun berbeda
			3	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)												100					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			MENJADI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan (%)	80,19%	4.209.442.600	74,64%	1.585.853.482	0,7464	37.508.000	1	27.460.250	0,76	3.475.837.236	101,29	73	94,28	83	Dinas Kesehatan	
					Persentase kefarmasian perbekes dan makanan sesuai standar (%)	86,48%		76,19%		0,7729		1		0,77	-	100,06		89,43			
			1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			9.495	237.194.825	0,5129	0	0	0	51,29%		73,21		107				
			2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			5.225	1.348.658.657													Subkegiatan 2021
			SEMULA	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat (layanan)	15	17.688.960.000							11	29.732.643.992	100	83	73,33	168	Balapkes Kalibrasi	
			1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran											100						sub kegiatan
			2	Penyediaan Bahan Reagensia Alat Lab, Kesehatan dan Kalibrasi											90,09						sub kegiatan
			3	Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Laboratorium											100						sub kegiatan
			4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Covid-19											100						sub kegiatan
			5	Penguatan Laboratorium Daerah Tingkat Provinsi											100						sub kegiatan
			MENJADI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat (layanan)	15	17.688.960.000	14	948.172.899	14	423.700.000	14	50.106.500	0,40	30.730.923.391	100	12	2,65	174	Balapkes Kalibrasi	
			1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				14	0,1426	0	0	0	0,22%		75,04		5				
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**"II				2.533	0,2094	0	0	0	0,84%		100		17				
			SEMULA	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya (%)	68,00%	20.215.954.000	84,50%						0,85	27.010.937.886	138,69	42	124,26	134	Bapelkes	
			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur											100						sub kegiatan
			2	Pengendalian Mutu dan Pengembangan Metode Pelatihan											100						sub kegiatan
			3	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat											100						sub kegiatan
			4	Pendidikan dan Pelatihan dari Jasa Layanan RI/ID											100						sub kegiatan
			MENJADI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya (%)	68,00%	20.215.954.000	84,50%	818.495.523	0,68	37.508.000	1	27.460.250	0,88	27.856.893.659	129,90	73	129,90	138	Bapelkes	
			1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.357	0,8003	1	1	1	51,15%		100		67				

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
		SEMULA	Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (%) tahun 2020: persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan (%) Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan (Rp/tah)	100,00%	174.257.719.000	100,00%	2.740.114.049					67	98.247.919.252	100		59	67	56	Bapeljamkessos		
			1 Administrasi Kantor											100							sub kegiatan	
			2 Pembiayaan Klaim											100							sub kegiatan	
			3 Pengembangan Mutu Bapel Jamkessos											100							sub kegiatan	
			4 Pelayanan Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan											100							sub kegiatan	
			5 Pengembangan Pelayanan Jaminan Kesehatan											100							sub kegiatan	
		MENJADI	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (%) tahun 2020: persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan (%) Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan (Rp/tah)	100,00%	174.257.719.000	100,00%	21.393.636.724	1	37.508.000			1	27.460.250	1	119.669.016.226	100		73	100	69	Bapeljamkessos
			1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					6.342		0,357		0		-	22,38%				74			
		SEMULA	Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSI Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living) (%) Angka Pasien Cidera karena Fiksasi (%) Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi s 30 menit (%) Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun (%) Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa s 60 menit (%) Tingkat Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate (BOR) (%) Penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan (%) tahun 2020: Penyelesaian Berkas (%) Penyusunan laporan tahunan rumah sakit (%) Pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja (%) Kesesuaian inventaris barang rumah sakit (%)	90,00%	104.824.381.000	96,30%						0,96	58.950.443.690	101,20		68	1,08	56	RSJ GRHASIA	angka ambil dr Rapor TW IV 2020	
													0,01	200		100						
													0,88	93,84		97,78						
													2696,92	101,83		337115,15						
													2169,57	104,20		289276,40						
													3267,82	76,58		502742,30						
													51,59	100		6449,17						
													55,94	100		6581,57						
													3130,62	98,86		347847,04						
													50,3	100		5030						
			1 Pengelolaan Keuangan BLUD (2020)											100							sub kegiatan	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			2	2											100						sub kegiatan
			3	3											100						sub kegiatan
			4	4											100						sub kegiatan
			5	5											100						sub kegiatan
			6	6											100						sub kegiatan
			7	7											100						sub kegiatan
			8	8											100						sub kegiatan
			9	9											100						sub kegiatan
			10	10											100						sub kegiatan
			11	11											100						sub kegiatan
			12	12											100						sub kegiatan
			13	13											100						sub kegiatan
			14	14											100						sub kegiatan
			15	15											100						sub kegiatan
			16	16										9441							sub kegiatan
			17	17										100							sub kegiatan
			18	18										100							sub kegiatan
			19	19										100							sub kegiatan
			20	20										100							sub kegiatan
			21	21										100							sub kegiatan
			22	22										100							sub kegiatan
			23	23										100							sub kegiatan
			24	24										100							sub kegiatan
			25	25										100							sub kegiatan
		MENIADI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living) (%)	90,00%	104.824.381.000	96,30%	-	0,9	311.210.050	1	-	0,99	63.076.646.582	110	-	110	60	RSJ GRHASIA		
				Angka Pasien Cidera Jangka Ekstasi (%)	1,00%		-		0,01		0		0,01		100		100				
				Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit (%)	90,00%		88,00%		0,9		1		0,88		93,12		97,78				
				Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun (%)	80,00%		25,00%		0,15		0		0,25		108		31,25				
				Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa ≤ 60 menit (%)	75,00%		97,28%		0,75		1		0,9728		118,89		129,71				

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
				Tingkat Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	65,00%		34,50%		0,65		0		0,345		53,08		53,08				
				Penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan (%)	80,00%		79,00%		0,8		1		0,8		100		100				
				tahun 2020: Penyelesaian Berkas																	
				Penyusunan laporan tahunan rumah sakit (%)	85,00%		84,00%		0,6		0		0,84		33,33		98,82				
				Pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja (%)	90,00%		87,00%		0,9		1		0,87		96,67		96,67				
				Kesesuaian inventaris barang rumah sakit (%)	100,00%		95,00%		1		1		1		100		100				
			1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2		0,02		0	0		100		-					
			2	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan**			6		0		-			0		-					
			3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			-		0		-			0		-					
			4	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.593		0,64		0	1	0		100		-				
		SEMULA	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TR	86,00%	15.776.634.000	86,20%						2856,63	48.020.845.113	107,14	63	332166,67	304	RS Paru Respira		
				Angka kematian Pasien > 48 Jam (%)	1,00%		2,49%						27,67		128,67		- 276.502				
				Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari (rawan)	80		84,84						89,19		61,95		111,48				
				Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	60,00%		22,43%						2731,73		30,75		455.288				
				Length of stay (LOS) (hari)	5		3,93						194,27		143,6		-3685,47				
			1	Penyusunan Program dan Kegiatan Pengembangan SIMRS dan Pengelola Anestesi RS										100							sub kegiatan
			2	Pengelolaan SDM Administrasi Perkantoran dan Rumah Tancep RS										100							sub kegiatan
			3	Pengelolaan Pelayanan Medis Mutu dan Keselamatan Pasien										100							sub kegiatan
			4	Pengelolaan Pelayanan Kenerawatan										100							sub kegiatan
			5	Pengelolaan Pelayanan Penunjang Medis Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan										100							sub kegiatan
			6	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernafasan (DAK)										100							kegiatan DAK
		MENJADI	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TR	86,00%	64.391.186.000	86,20%	4.066.085.116	0,86	3.579.100.000	1	1.247.227.435	0,97	52.086.930.229	112,28	-	112,28	81	RS Paru Respira		
				Angka kematian Pasien > 48 Jam (%)	1,00%		2,49%		0,01		0		0,01		96		96				
				Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari (rawan)	80		84,84		0,8		1		1,03		128,25		1,28				
				Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	60,00%		22,43%		0,6		0		0,22		34,83		37,38				
				Length of stay (LOS) (hari)	5		3,93		0,05		0		0,03		60,4		0,60				
			1	Pengembangan Rumah Sakit**			2987		0,17		0	0	0,03%	0,1679		100					
			2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			166		1		1	1	50,76%	1		100					
			3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			5437		0,45		0	0	8,96%	0,45		100					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			4	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			5437		0,38		0	0	15,49%	0,38		100					
			Urusan Pemerintahan Wajib																		
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
3		SEMULA	Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	persentase nilai adat tradisi dan seni yang sudah diratifikasi		2.849	183.994.000	-						100,00%	100,00%	2.849	183.994.000				DPU ESDM
			1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat		100								100,00%		100					DPU ESDM
			MENJADI	NA	indikator hanya ada pada 2020 (urusan keiklimawasan)				0		-	-	-	0,00%	0,00						
		SEMULA	Program Pengelolaan Persampahan Air Minum dan Air Limbah Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional (ton/hari) ketersediaan air curah yang dikelola (SR)	NA	24.420.975.000	NA	NA						NA	NA	569,00	9.566.108.840	NA	39,17		DPU ESDM
				Layanan sistem air limbah yang terpusat yang dikelola (SR)	NA	6.214.811.000	NA	NA						NA	NA	23821,00	2.061.192.960	NA	33,17		DPU ESDM
			MENJADI	NA	indikator hanya ada pada 2018				0		-	-	-	0,00%	0,00						
		SEMULA	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan air minum/air curah (l/detik)	NA	61.100.000.000	NA	NA						NA	NA	2123,00	49.880.985.589	NA	81,64		DPU ESDM
				Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (lokasi)	NA	17.000.000.000	NA	NA						NA	NA	5,00	15.866.847.250	NA	93,33		DPU ESDM
				Peningkatan kinerja pengembangan sistem air limbah terpusat (SR)	NA	-	NA	NA						NA	NA	9392,00	194.638.000	NA	0,00		DPU ESDM
			1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		100,00															
			2	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi (KSD)																	
			3	Penataan Bangunan Dan Lingkungan																	
			4	Pengembangan Sarana Prasarana Air Limbah																	
			MENJADI	NA	indikator hanya ada di 2018				0		-	-	-	0,00%	0,00						
		SEMULA	Program Pengembangan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi (%)	NA	15.878.450.000	NA	NA						NA	NA	1609,00	843.121.400	NA	5,31		DPU ESDM
				Penambahan kapasitas air baku (l/tr/dtk)	NA	-	NA	NA						NA	NA	719,00	2.158.826.500	NA	0,00		DPU ESDM
				Penanganan titik penangan (lokasi)	NA	6.650.000.000	NA	NA						NA	NA	2,00	5.436.520.500	NA	81,75		DPU ESDM
			1	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi																	
			2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan																	
			3	Peningkatan Jaringan Irigasi																	
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku																	
			5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase																	
			6	Pengembangan Jaringan Irigasi (N.A.K)																	
			MENJADI	NA	indikator hanya ada di 2018				0		-	-	-	0,00%	0,00						
		SEMULA	Program Pengelolaan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan sistem kinerja irigasi (%)	NA	23.661.550.000	NA	NA						NA	NA	665,00	15.326.179.841	NA	64,77		DPU ESDM
				Pemenuhan ketersediaan air baku (l/det)	NA	14.439.000.000	NA	NA						NA	NA	4105,00	14.553.203.800	NA	100,79		DPU ESDM
			MENJADI	NA																	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
		SEMULA	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional (ton/hari)	780	91.727.500.000	562	12.850.741.900					562	20.558.041.600	72,05%				DPU ESDM	
				Penanganan lokasi penneanan (lokasi)	6	50.288.000.000	-						-		66,67%				DPU ESDM	
				Layanan sistem air limbah terpusat (SR)	27.400	31.727.500.000	25.294,00						25.294		92,31				DPU ESDM	Adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19
			1	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Samnah			100						100						DPU ESDM	
			2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase			100						100						DPU ESDM	
		MENJADI	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penanganan sampah sistem regional (ton/hari)	780,00	91.727.500.000	562	12.850.741.900	720	14.448.265.000,00	699	2.898.027.850,00	97,12%	20,06%	699,29	23.456.069.450	89,65%	25,57%		
				Layanan sistem air limbah terpusat (SR)	27400,00	31.727.500.000	25.294,00		26.300		26.050		99,05%		26050,00		95,07%			
			1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan					100		100									
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penanganan lokasi genangan (lokasi)	6	50.288.000.000	-	12.850.741.900	1	951.598.500,00	1	848.458.250,00	100,00%	89,16%	4,00	26.843.020.350	66,67%	53,38%		pada TA 2021, Penanganan lokasi genangan di daerah area bandara YIA (sekitar Temon) Faktor Pendorong : Infrastruktur drainase yang relatif masih cukup baik, ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM Faktor Penghambat : Penanganan lokasi genangan dilakukan
			1	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Perdesakumhwa					100		100									
		SEMULA	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan air curah pada SPAM regional (L/det)	1150,00	264.700.000.000	750	3.608.663.088					100,00%	87,82%	750,00	7.015.594.088	65,22	2,65%	DPU ESDM	
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional (m)	110.074,00		91.447,00						100,30%		91447,00		83,08		DPU ESDM	
			1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			100,00					100,00%		100,00					DPU ESDM	
		MENJADI	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan air curah pada SPAM regional (L/det)	1150,00	264.700.000.000	750,00	3.608.663.088	1.100	4.149.500.000,00	750	3.181.759.060,00	68,18%	76,68	750,00	10.197.353.148	65,22%	3,85%		
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional (m)	110.074,00		91447,00		92.374		91.447		99,00%		91447,00		83,08%			
			1	Peningkatan SPAM Jaringan Permukiman																
			2	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota																
			3	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota																
		SEMULA	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan air baku (L/det)	348,00	105.111.800.000	20	2.810.020.278					10,26%	97,62%	20	2.810.020.278	5,75	2,67	DPU ESDM	
				Pengelolaan Air baku (L/det)	84,00	91.205.875.200	611						97,92%		611		727,38	0,00	DPU ESDM	
			1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku			100,00					100,00%		100,00					DPU ESDM	
			2	Pengelolaan Air Baku			100,00					100,00%		100,00					DPU ESDM	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penyediaan air baku (L/det)	348,00	105.111.800.000	20,00	2.810.020.278	19,50	58.459.816.500,00	57	47.469.764.297	290,05%	81,20%						
				Pengelolaan Air baku (L/det)	84,00	91.205.875.200	61,10		73,20		566		773,36%							
			1	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya																
			2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																
			3	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			4	Operasi dan Pemeliharaan Embunne Air Baku																
			5	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi																
			6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi																
			7	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																
			8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**																
			9	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																
		SEMULA	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	77,20	125.219.406.250	72,32	11.013.827.944					72,32	30.355.773.972	93,68	12,54%			DPU ESDM	
				Rerata hasil penilaian kinerja daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	87,00	116.947.631.250	73					73,00		83,91					DPU ESDM	
			1	Pengembangan Jaringan Irigasi			100												DPU ESDM	
			2	Pengelolaan Jaringan Irigasi			100												DPU ESDM	
			3	Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK)			100												DPU ESDM	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	77,20	125.219.406.250	72,32	11.013.827.944	75,85	58.459.816.500,00	75	47.469.764.297	98,83%	81,20%	72,32	77.825.538.269	94%	32%	DPU ESDM	Keterangan : Dari rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY dari 41 D.I tercapai 74,96% dari target 75,85 %. Faktor Pendorong : dana DAK untuk peningkatan jaringan irigasi Faktor Penghambat : Kerusakan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemda DIY lebih cepat dari pada yang diperkirakan sebelumnya, yang disebabkan oleh faktor cuaca yang ekstrim

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
				Rerata hasil penilaian kinerja daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	87,00	116.947.631.250	73		82,41		79		96,00%		73,00		84%		DPU ESDM	eterangan : Realisasi sesuai capaian akhir Tahun 2021. Dari rerata hasil penilaian Kinerja Daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY dengan target 82,41% tercapai 79,11%. Faktor Pendorong : 1. dana DAK untuk peningkatan jaringan irigasi 2. Proses Pengadaan sesuai rencana Ankas 3. Kerjasama dengan masyarakat terutama P3A yang baik, memperlancar pelaksanaan pekerjaan 4. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi sesuai rencana Faktor Penghambat : Kerusakan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemda DIY lebih cepat	
			1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														DPU ESDM			
			2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														DPU ESDM			
			3	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya														DPU ESDM			
			4	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku														DPU ESDM			
			5	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi														DPU ESDM			
			6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi														DPU ESDM			
			7	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														DPU ESDM			
			8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**														DPU ESDM			
			9	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														DPU ESDM			
		SEMULA	Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	75,26	67.567.008.474.422	71,56	27.297.956.452					71,56	259.335.770.162	95,08	0,38%		DPU ESDM			
				Penambahan jaringan jalan baru (%)	100,00	212.500.000.000	48,08						48,08		48,08			DPU ESDM			
			1	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			100,00											DPU ESDM			
			2	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan			100,00											DPU ESDM			
			3	Peningkatan Jalan (DAK)			-											DPU ESDM			
			4	Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi			89											DPU ESDM			

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
		MENJADI	Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	75,26	675.670.084.744	72	27.297.956.452	74,66	114.500.797.334,00	71	110.201.832.530	94,45%	96,25%	71	369.537.602.692	94%	42%	DPU ESDM	Tahun 2021 ini seharusnya diperlukan peningkatan ruas jalan sepanjang 48,35 km agar jalan provinsi tetap dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dengan perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 338.450.000.000,00. Namun karena keterbatasan anggaran, di tahun 2021 ini hanya dapat didukung 10 paket peningkatan ruas jalan provinsi sepanjang 11,85 km (yang terdiri dari 8 paket APBD sepanjang 7,7 km dan 2 paket DAK sepanjang 4,15 km) dan dukungan dari kegiatan pemeliharaan rutin yang tadinya bertujuan agar kondisi jalan tidak mengalami penurunan lebih dari 3%, namun
				Penambahan jaringan jalan baru (%)	100,00	212.500.000.000	48		69,11		70		101,78%		70		70%	DPU ESDM		
				1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan															DPU ESDM	
				2 Pelebaran Jalan Menuju Standar															DPU ESDM	
				3 Rekonstruksi Jalan**															DPU ESDM	
				4 Pemeliharaan Rutin Jalan															DPU ESDM	
				5 Penggantian Jembatan															DPU ESDM	
				6 Pemeliharaan Rutin Jembatan															DPU ESDM	
		SEMULA	Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi (%)	NA	2.766.649.543	NA	918.304.380							63,26	6.877.816.901	63,26	50,15	DPU ESDM	
				Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (%)	99,14	8.360.262.000	71								71,00			71,62%	DPU ESDM	
				Peningkatan pelayanan jasa pengujian laboratorium (%)	NA	2.587.097.200	NA								NA			NA	DPU ESDM	
				Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan (1 H11)	5544,00	18.916.233.823	765								4411,00			79,56%	DPU ESDM	
				1 Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi				100,00											DPU ESDM	
				2 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi				100,00											DPU ESDM	
		MENJADI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kinerja jasa konstruksi (%)	NA	27.666.495	NA	918.304.380	NA	1.260.160.798,00	NA	1.182.214.794,00	NA	93,81%	NA	6.968.356.611	NA	26%	DPU ESDM	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
				Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (%)	99,14	8.360.262.000	71,00		86,15		83		96,32%		82,98		84%		DPU ESDM	terdapat deviasi sebesar 3,17 % disebabkan Target sertifikasi Tenaga Ahli sebanyak 150 orang hanya tercapai 92 orang sampai akhir tahun 2021 karena : a. berdasarkan SE Menteri No. No. 02/SE/M/2021 Biaya Sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PTK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN); b. Jumlah tersertifikasi hingga akhir tahun 2021 sebanyak 92 orang dari 150 orang yang telah mengikuti pelatihan, sedangkan 58 orang masih menunggu jadwal pelaksanaan sertifikasi Tenaga ahli Konstruksi. c. Asosiasi Profesi	
				Peningkatan pelayanan jasa pengujian laboratorium (SL)	NA	2.587.097.200	NA		NA		NA		NA		NA		NA		DPU ESDM		
				Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan (f/h/u)	5544,00	18.916.233.823	765,00		800,00		1.045		130,63%		5456,00		98%		DPU ESDM		
			1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi															DPU ESDM		
			2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi															DPU ESDM		
			3	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi															DPU ESDM		
			4	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi															DPU ESDM		
		SEMULA	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan Tata Ruang (%)	N/A	3.100.000.000	N/A	N/A						6377,00	317.356.856	N/A	10,24%		Dinas PTR		
				Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang	9899,00	2.700.000.000	75,63	282.100.500						66,35	1.057.714.945	67,02%	39,17%				
			1	Pembinaan Penataan Ruang			100						100,00%								
			Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang (%)	N/A	N/A	NA	N/A					NA	N/A	27,85	279.129.732	N/A	N/A		Dinas PTR	
				Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	89,98	7.380.000.000	78,61	242.564.376						78,61	1.958.045.477	87,36%	26,53%				
			1	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang			100						100,00%								
			2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			100						100,00%								

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
		MENJADI	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pelaksanaan dan	98,99	2.700.000.000	75,63	282.100.500	90,09	2.779.013.900,00	92	2.622.241.650,00	101,75%	94,36%	91,67	5.638.002.072	92,61%	55,93%	DPTR		
				Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan	89,98	7.380.000.000	78,61	242.564.376	86,38		88		101,30%		87,50		97,24%	97,24%	Dinas PTR		
			1	Penetapan Kebijakan dalam Rangka pelaksanaan penataan ruang																	
			2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTW dan RTRR Kabupaten/Kota																	
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah																	
			4	Sistem Informasi Penataan Ruang																	
			5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang																	
			6	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
			Urusan Pemerintahan Wajib																		
4			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN																		
		SEMULA	Program pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Pengurangan RTLH (%)	NA	64.353.632.000	NA	NA							14,73	29.103.238.541	NA	45,22	DPU ESDM		
				Penyediaan kawasan pengembangan perumahan (%)	NA	800.000.000	NA	NA							22,22	1.193.455.090	NA	149,18	DPU ESDM		
				Penanganan Kawasan Kumuh (%)	NA	35.553.632.000	NA	NA							46,13	27.493.705.345	NA	77,33	DPU ESDM		
				Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (%)	NA	16.000.000.000	NA	NA							20,00	17.882.356.700	NA	111,76	DPU ESDM		
		MENJADI	MENJADI	NA			0	-	0,00												
		SEMULA	Program penyelenggaraan perumahan	Penanganan RTLH (%)	53,78	298.229.500.000	48,86	8.206.345.723							48,86	61.907.186.593	90,85	127,62500000	DPU ESDM		
				Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTW (%)	20,00	127.627.500.000	10,74								10,74		53,70				
				Cakupan penanganan kawasan kumuh 9%	100,00	NA	69,11								69,11		69,11				
			1	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh									0,00%							DPU ESDM	
			2	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni			100,00						100,00%		100,00					DPU ESDM	
			3	Pengembangan Perumahan			100,00						100,00%		100,00					DPU ESDM	
		MENJADI	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penanganan RTLH (%)	53,78	298.229.500.000	49,00	8.206.345.723	43,10	21.516.185.000,00	56	16.446.360.633,00	130,21%	76,44%	56,12	78.353.547.226	104%	26%	DPU ESDM		
				Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTW (%)	20,00	127.627.500.000	11,00		16,00		45	284,31%			45,49		227%				
			1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Relokasi					100		100										
			2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Relokasi					100		100										
		SEMULA	Program Penyelenggara Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (strik)	212	79.500.000.000	0	1.184.519.250							-	44.108.629.384	0,00	29,70%			
				Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (strik)	128	69.000.000.000	0								-		0,00				
			1	Penyelenggaraan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan			100,00													DPU ESDM	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			2	Penyenggaraan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis			100,00												DPU ESDM		
		MENJADI	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (titik)	212	79.500.000.000	0	1.184.519.250	48,00	52.840.000.000,00	278	40.435.693.275	579,17%	76,52%	547,00	84.544.322.659,00	258%	106%	DPU ESDM	Keterangan : Penanganan Belanja Bahan Bangunan Konstruksi PSU Pada Kawasan Perumahan sampai dengan TW IV sebanyak 278 Titik, yaitu : Kab. Kulon Progo : 28 Titik, Kota Yogyakarta : 2 Titik, Kab. Gunungkidul : 81 titik, dan Kab. Bantul : 65 titik, dan Kab. Sleman 102 titik. Faktor Pendorong : ketersediaan anggaran dan koordinasi yang baik dengan pihak pihak terkait Faktor Penghambat : Adanya kendala Lokasi yang medanya sulit di jangkau sehingga mengalami keterlambatan dalam pengedropan bahan bangunan.	
				Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (titik)	128	69.000.000.000	0		32		-		0,00%		52			41%			
			1	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Respon dan Pemulihan					100		100										
Urusan Pemerintahan Wajib																					
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN																					
5	5																				
1		SEMULA	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana (Desal)	301,00	14.327.854.520									243	12.936.777.742	81%	90%	BPBD	angka baseline: 188. Angka capaian memperhitungkan angka baseline	
				Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana (kolah)	181,00										134			74%		angka baseline: 71. Angka capaian memperhitungkan angka baseline	
			1	Pengelolaan Pencegahan Bencana															BPBD		
			2	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana															BPBD		
			Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana (menit)	10,00	30.038.025.190									14,00	19.937.025.700	60%	66%	BPBD		
			1	Pengelolaan Kedaruratan Bencana															BPBD		
			2	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana															BPBD		
			3	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana															BPBD		
			4	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana															BPBD		
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca bencana	85,00	13.585.050.273												88%	528%	BPBD	
			1	Pengelolaan Rehabilitasi Pasca Bencana															BPBD		
			2	Pengelolaan Rekonstruksi Pasca Bencana															BPBD		
			3	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana															BPBD		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1			4	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana																	
		MENJADI	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana (Desa)... Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana (sekolah) rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana (meeti) Indeks pemulihan pasca-bencana	301	14.327.854.520	25	18.262.495.473	7	5.991.314.869	7	1.945.334.424	100,00	32,47	275,00	124.857.239.045	91,36%	21,55%		BPBD	
					181		35		14		14	100,00		153		84,53%				BPBD	
					10	30.038.025.190	12		10		10	100,00		10,00		100%				BPBD	
					85	13.585.050.273	95		85		85	100,00		95,00		111,76%				BPBD	
				1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	100,00	100,00		52		52										
				2	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	100,00	100,00		16		16										
				3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	100,00	100,00														
				4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100,00	100,00		100		100										
				5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100,00	100,00		46		46										
				6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	100,00	100,00		79		79										
				7	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100,00	100,00		80		80										
				8	Penanganan Pascabencana Provinsi	100,00	100,00		16		16										
				9	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	100,00	100,00		73		73										
				10	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100,00	100,00		61		61										
				11	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	100,00		21		21										
				12	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	100,00		100		100										
				13	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	100,00	100,00														
				14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100,00	100,00		39		39										
2		SEMULA	Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,92	15.164.174.165							3,05	9.068.591.450	104%	60%			Bakesbangpol		
				1	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Sosial Seni Budaya Agama dan Masyarakat																Bakesbangpol
				2	Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat																Bakesbangpol
				3	Pembinaan Organisasi Masyarakat																Bakesbangpol
				4	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																Bakesbangpol
				5	Pengelolaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PAGUN)																Bakesbangpol
				6	Pembinaan Kewaspadaan Nasional																Bakesbangpol
				7	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional																Bakesbangpol

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		MENJADI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penanganan Konflik	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional <i>Catra Ideologi</i>	2,92	15.164.174.165	2,85	2.686.328.000	2,90	1.265.920.000	3	1.227.695.974	98,28	96,98	2,85	12.982.615.424	97,60%	85,61%	Bakesbangpol	
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah,		100,00		100,00		42		42									
			2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah,		100,00		100,00		32		32									
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional <i>Catra Ideologi</i>	2,92	15.164.174.165	2,85	1.702.810.864	2,90	35.571.000	3	29.369.339	98,28	82,57	2,85	10.800.771.653	97,60%	71,23%	Bakesbangpol	
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,		100,00		100,00		20		20									
			2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,		100,00		100,00													
3		SEMULA	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional <i>Catra Politik</i>	336,00	16.771.911.057									336,00	1.662.785.200	100%	10%	Bakesbangpol	
			1 Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat																	Bakesbangpol
			2 Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah																	Bakesbangpol
			3 Pembinaan Organisasi Masyarakat																	Bakesbangpol
		MENJADI	Program Pemberdayaan Dan Penguasaan Organisasi Masyarakat	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional <i>Catra Politik</i>	3,36	16.771.911.057	1,82	285.068.600	3,35	306.708.000	2	300.420.975	54,33	97,95	1,82	2.248.274.775	54,17%	13,41%	Bakesbangpol	
			1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di		100,00		100,00													
			2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di						35		35									
			3 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di						64		64									

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1			4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di					32			32										
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,36	16.771.911.057	1,82	2.809.698.500	3,35	2.938.392.250	2	2.921.876.468	54,33	99,44		1,82	7.394.360.168	54,17%	44,09%	Bakesbangpol		
			1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah,		100,00	100		88			88										
			2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah,		100,00	100					34										
4		SEMULA	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	29,00	1.437.665.000												30,60%	63%	Bakesbangpol	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul	
			1	Pembinaan Ketahanan Ekonomi														100%		Bakesbangpol	Pada Tahun 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Ketahanan Ekonomi dengan realisasi 100%	
			2	Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya														100%		Bakesbangpol	Pada Tahun 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dengan realisasi 100%	
		MENJADI	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya,	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2,90	1.437.665.000	2,62	707.414.500	2,89	539.578.500	3	503.293.500	90,66	93,28		2,62	2.121.903.090	90,34%	148%	Bakesbangpol	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul	
			1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di		100,00	100,00		43			43										
			2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di		100,00	100,00		29			29										
			3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di		100,00	100,00		51			51										

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		SEMULA	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani (%)	75,00	6.374.066.000							100,60%	95,21%	41,20	4.076.658.903	54,93%	63,96%	Satpol PP	
			Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah Masyarakat dan Aset																	
			Pembinaan Kapasitas Aparatur Thumtranmas																	
			Pengelolaan Kerjasama Transhumlinmas																	
			1 Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
			2 Pengamanan Aset Pemda DIY																	
			3 Pengamanan dan Pengawasan Gubernur Wagub dan Tamu Daerah																	
			4 Pengamanan Objek Vital Pemda DIY																	
			5 Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)																	
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (%)	55,00	12.253.219.800							159,07%	98,04%	39,19	8.812.636.680	71,26%	71,92%	Satpol PP	
			1 Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas																	
			2 Pembinaan SAR Linmas																	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaat ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten									100,00	99,08						Satpol PP
			1 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
			Program Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda Perdis dan Perkada yang tertangani (%)	80,00	2.975.391.255									75,03	3.307.225.680	93,79%	111,15%	Satpol PP	
			Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkara																	
			Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkara																	
			Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkara																	
			1 Pengembangan dan Penguatan PPHNS																	
			2 Operasi Yustisi dan Non Yustisi bagi Pelanggar Perda/Perkara																	
		MENJADI	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani (%)	75	6.374.066.000	70,87	4.968.063.923	0	1.468.132.000	-	1.452.523.000	#DIV/0!	98,94	70,87	22.617.108.186	94,49%	104,70%	Satpol PP	
				Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (%)	55	12.253.219.800	40,65		0		-		#DIV/0!		40,65		73,91%		Satpol PP	
				Pelanggaran Perda Perdis dan Perkada yang tertangani (%)	80	2.975.391.255	78,37		0		-		#DIV/0!		78,37		97,96%		Satpol PP	
			1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan,		100		100		45,02		45									
			2 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi,		100		100													
			3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum,		100		100		37,22		37									

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia,	100		100		69,42		69										
			5	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan,	100		100		40,66		41										
			6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat,	100		100														
			7	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,	100		100		56,45		56										
			8	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,	100		100		46,36	46,36											
Urusan Pemerintahan Wajib																					
SOSIAL																					
6		SEMULA	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar Anak Berhadapan Hukum Anak Jalanan Anak dengan Kedisabilitasan Penyandang Disabilitas Gelandangan Pengemis Pemulung Orang Dengan HIV/AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh bimbingan keterampilan mandiri dan mampu berinteraksi dengan	6,70	17.852.212.525									1,35	12.697.781.974	20%	71%	Dinas Sosial		
			1	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial																	
			2	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang																	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak yang Berhadapan Hukum Anak Jalanan Anak dengan Kedisabilitas Penyandang Disabilitas Gelandangan Pengemis Pemulung Orang Dengan HW AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh bimbingan keterampilan mandiri dan mampu berinteraksi dengan masyarakat	6,70	17.852.212.525	11,26	6.287.698.376	3,02	12.350.270.104	4	11.376.140.833	132,12	92,11%	11,26	30.361.621.183	168,06%	170,07%	Dinas Sosial	
			1	Penyediaan Permakanan			100,00		51,21	51,21	51	46,12	100,31%	90,06%					Dinas Sosial	
			2	Penyediaan Sandang			100,00		68,15	68,15	68	66,26	100,00%	97,23%					Dinas Sosial	
			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			100,00		60,00	60,00	60	60,00	100,00%	100,00%					Dinas Sosial	
			4	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			100,00		62,71	62,71	63	62,39	100,00%	99,49%					Dinas Sosial	
			5	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100,00		100,00	100,00	100	99,23	100,00%	99,23%					Dinas Sosial	
			6	Penyediaan Makanan			100,00		82,22	82,22	82	81,86	99,98%	99,56%					Dinas Sosial	
			7	Penyediaan Sandang			100,00		100,00	100,00	100	99,26	100,00%	99,26%					Dinas Sosial	
			8	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			100,00		74,30	74,30	74	74,31	100,01%	100,01%					Dinas Sosial	
			9	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			100,00		61,58	61,58	62	61,63	100,00%	100,08%					Dinas Sosial	
			10	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100,00		100,00	100,00	100	99,60	100,00%	99,60%					Dinas Sosial	
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			100,00		30,00	30,00	30	30,00	100,00%	100,00%					Dinas Sosial	
			12	Pemberian Pelayanan Sanitasi Keluarga			100,00		34,36	34,36	34	16,30	100,00%	47,44%					Dinas Sosial	
			13	Penyediaan Permakanan			100,00		82,22	82,22	82	81,86	99,98%	99,56%					Dinas Sosial	
			14	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			100,00		74,30	74,30	74	74,31	100,01%	100,01%					Dinas Sosial	
			15	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial			100,00		61,58	61,58	62	61,63	100,00%	100,08%					Dinas Sosial	
			16	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			100,00		77,55	77,55	78	66,83	100,00%	86,18%					Dinas Sosial	
			17	Penyediaan Permakanan			100,00		82,22	82,22	82	81,86	99,98%	99,56%					Dinas Sosial	
			18	Penyediaan Sandang			100,00		100,00	100,00	100	99,26	100,00%	99,26%					Dinas Sosial	
			19	Penyediaan Asrama/ Wisma yang mudah Diakses			100,00						#DIV/0!	#DIV/0!					Dinas Sosial	
			20	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			100,00		74,30	74,30	74	74,31	100,01%	100,01%					Dinas Sosial	
			21	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial			100,00		61,58	61,58	62	61,63	100,00%	100,08%					Dinas Sosial	
			22	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			100,00		77,55	77,55	78	66,83	100,00%	86,18%					Dinas Sosial	
			23	Pemulangan ke Daerah Asal			100,00		46,03	46,03	46	46,01	99,96%	99,96%					Dinas Sosial	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak yang Berhadapan Hukum Anak Jalanan Anak dengan Kedisabilitas Penyandang Disabilitas Gelandangan Pengemis Pemulung Orang Dengan HW AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh bimbingan keterampilan mandiri dan mampu berinteraksi dengan	6,70	17.852.212.525	11,26	6.287.698.376	3,02	12.350.270.104	4	11.376.140.833	132,12%	92,11%	11,26	30.361.621.183	168,06%	170,07%	Dinas Sosial		
			1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					93,22	93,22	93	80,00								Dinas Sosial		
		SEMULA	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	50,85	11.157.545.500									69,62	3.718.606.753	136,91	33,33	Dinas Sosial		
				Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat	NA	NA									23,00		NA				
			1 Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar Serta Keluarga Rentan dan Miskin										100,00								
			2 Penguatan Kesiapsiagaan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemakanan Orang Terlantar										100,00								
			3 Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH										NA								
		MENJADI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Lanjut Usia Terlantar Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	50,85	11.157.545.500	68,00	1.383.330.900	6,47	3.190.204.000,00	11	1.860.394.600,00	170,02%	58,32%	68,00	5.101.937.653	133,73%	45,73%	Dinas Sosial		
			1 Penyediaan Permakanan			100		34,85	34,85	35	33,28	100,00%	95,49%						Dinas Sosial		
			2 Penyediaan Sandang			100		100,00	100,00	100	96,28	100,00%	96,28%						Dinas Sosial		
			3 Penyediaan Tempat Penampungan Sementara			100		48,11	48,11	47	20,79	98,09%	43,21%						Dinas Sosial		
			4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			100		39,95	39,95	40	13,80	100,00%	34,54%						Dinas Sosial		
			5 Pelayanan Dukungan Psikososial			100		49,90	49,90	50	41,46	100,00%	83,09%						Dinas Sosial		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		SEMULA	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat (%)	1,01	16.372.612.000									0,63	6.454.421.250	62,38	39,42	Dinas Sosial	Tahun 2020 Realisasi s.d Triwulan IV tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa indikator di Program Penanganan Fakir Miskin (Triwulan IV) realisasinya tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan menyesuaikan SE Nomor: I/SE/H/2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19 di DIY.	
			1 Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PPH								100,00										
			2 Penyuluhan Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PMSK								100,00										
		MENJADI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	1,01	16.372.612.000	1,67	6.367.513.300	-	1.805.785.000	-	1.764.341.500,00	0,00%	97,70%	1,67	14.586.276.050	165,35%	89,09%	Dinas Sosial		
			1 Pengangkatan Anak antar WNI			100		35,07	35,07	35	28,44	100,00%	81,09%						Dinas Sosial		
			2 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunjail			100		-	-	-	-	0,00%	0,00%						Dinas Sosial		
			3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			78,26		-	-	-	-	0,00%	0,00%								
			4 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100		46,01	46,01	46	46,33	100,74%	100,70%						Dinas Sosial		
		SEMULA	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (%)	27,65	6.897.466.177									25,88	3.076.143.495	93,60	44,60	Dinas Sosial		
			1 Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Dinas Sosial																		
		MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (%)	27,65	6.897.466.177	27,06	2.505.164.065	8,24	1.595.298.585	8	1.462.799.900	100,00%	91,69%	27,06	7.044.107.460	97,87%	102,13%	BRTPD		
			1 Penyediaan Perumahan			100,00		40,30	40,30	26	20,10	65,26%	49,88%						BRTPD		
			2 Penyediaan Sandang			100		100,00	100,00	100	98,66	100,00%	98,66%						BRTPD		
			3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100		100,00	100,00	100	97,34	100,00%	97,34%						BRTPD		
			4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			100		47,63	47,63	48	45,86	99,94%	96,28%						BRTPD		
			5 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			100		50,39	50,39	50	48,61	99,80%	96,47%						BRTPD		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				6	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			100		50,39	50,39	50	48,61	99,80%	96,47%					BRTPD	
				7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100		39,37	39,37	39	39,37	100,00%	100,00%					BRTPD	
				8	Pemberian Pelayanan dan/atau Bantuan Keluarga			100		-	-	-	-	0,00%	0,00%					BRTPD	
				9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			100		40,00	40,00	40	40,00	100,00%	100,00%					BRTPD	
		SEMULA	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (%)	48,33	3.748.589.269			-							0,00	2.406.123.373	0,00	64,19	Dinas Sosial	Realisasi pada Triwulan IV tidak tercapai dikarenakan ada sub indikator Prosentase Warga binaan balai perempuan penyandang masalah sosial yang memiliki
			1	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai																	
		MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (%)	48,33	3.748.589.269	45,00	1.082.261.213	-	803.051.950,00	-	756.867.352,00	0,00%	94,25%	45,00	3.488.384.586	93,11%	93,06%	BPRSW		
			1	Penyediaan Permakanan			100,00		27,64	27,64	28	22,87	99,96%	82,74%					BPRSW		
			2	Penyediaan Sandang			100,00		65,27	65,27	65	63,68	100,02%	97,56%					BPRSW		
			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantili			100,00		48,04	48,04	48	39,67	99,77%	82,58%					BPRSW		
			4	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			100,00		43,67	43,67	44	43,16	99,89%	98,83%					BPRSW		
			5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			100,00		43,34	43,34	43	42,95	99,98%	99,10%					BPRSW		
			6	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			100,00		27,00	27,00	27	26,39	100,00%	97,74%					BPRSW		
			7	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran Surat Nikah dan/atau Identitas Anak			100,00						0,00%	0,00%					BPRSW	tidak ada sub kegiatan ini pada 2022	
			8	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100,00		41,69	41,69	42	41,67	99,95%	99,95%					BPRSW		
			9	Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA			100,00						0,00%	0,00%					BPRSW	tidak ada sub kegiatan ini pada 2022	
		SEMULA	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan Pengemis Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/ masyarakat (%)	14,80	3.203.392.111									17,60	3.852.676.170	118,92	120,27	Dinas Sosial		
			1	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan Pemulung Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai																	
		MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/ masyarakat (%)	14,80	3.203.392.111	18,20	4.197.073.310	4,20	2.047.127.339	11	1.962.144.516	252,38%	95,85%	18,20	8.049.749.480	122,97%	251,29%	BRSBKL		
			1	Penyediaan Permakanan			100,00		26,75	26,75	27	26,55	99,25%	99,25%					BRSBKL		
			2	Penyediaan Sandang			100,00		51,39	51,39	51	51,23	100,00%	99,69%					BRSBKL		
			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantili			100,00		55,85	55,85	56	47,77	100,00%	85,53%					BRSBKL		
			4	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			100,00		45,18	45,18	42	42,23	100,00%	93,47%					BRSBKL		
			5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			100,00		44,90	44,90	45	40,46	100,00%	90,11%					BRSBKL		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
6			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		100,00		41,72	41,72	41	41,46	100,00%	99,38%							BRBSKL		
7			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100,00		38,05	38,05	38	38,01	100,00%	99,89%							BRBSKL		
8			Pemulangan ke Daerah Asal		100,00		46,03	46,03	46	46,01	100,00%	99,96%							BRBSKL		
		SEMULA	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (%)	85,00	3.206.432.081						131,25	90,42	91,25	1.862.387.550	107,35	58,08		Dinas Sosial		
1			Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai								100,00										
		MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (%)	85,00	3.206.432.081	80	1.316.749.230	16	1.179.626.500	18	654.733.800	107,69%	55,50%	80,00	3.833.870.580	94,12%	119,57%		BPRSR	
1			Penyediaan Perumahan		100		40,31	40,31	40	14,88	100,00%	36,91%							BPRSR		
2			Penyediaan Sandang		100		100,00	100,00	100	29,39	100,00%	29,39%							BPRSR		
3			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		100		40,94	40,94	41	34,51	100,00%	84,29%							BPRSR		
4			Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		100		44,56	44,56	45	40,68	100,02%	91,29%							BPRSR		
5			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		100		100,00	100,00	100	93,56	100,00%	93,56%							BPRSR		
6			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		100		56,53	56,53	57	26,74	100,00%	47,30%							BPRSR		
7			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100		41,66	41,66	42	41,67	100,02%	100,02%							BPRSR		
		SEMULA	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (%)	4733,00	4.935.484.106						40,42	89,49	2521,50	3.704.468.428	53,27	75,06		Dinas Sosial		
1			Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai								100,00										
		MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (%)	47,33	4.935.484.106	12,36	1.738.763.312	-	1.117.407.500	4	1.033.386.645	NDIV/01	92,48%	12,36	5.443.231.740	26,11%	110,29%		BRSPA	
1			Pengasuhan		100		35,59	35,59	36	35,34	100,00%	99,30%							BRSPA		
2			Penyediaan Makanan		100		26,30	26,30	26	22,64	100,00%	86,08%							BRSPA		
3			Penyediaan Sandang		100		100,00	100,00	100	96,75	100,00%	96,75%							BRSPA		
4			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		100		80,77	80,77	81	78,23	100,00%	96,86%							BRSPA		
5			Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		100		43,95	43,95	44	43,95	100,00%	100,00%							BRSPA		
6			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100		41,35	41,35	41	37,25	100,00%	90,08%							BRSPA		
7			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		100		35,71	35,71	36	35,71	100,00%	100,00%							BRSPA		
8			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		100		21,62	21,62	22	21,62	100,00%	100,00%							BRSPA		
9			Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti		100		57,58	57,58	58	57,58	100,00%	100,00%							BRSPA		
		SEMULA	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak- haknya (%)	100,00	2.852.991.662						10467,00	98,44	5287,24	1.588.130.400	5287,24	55,67		Dinas Sosial		
1			Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai								100,00										

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
			MENJADI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya (%)	100,00	2.852.991.662	104,67	2.650.188.935	100,00	1.249.027.950	107	1.244.261.950	106,54%	99,62%	106,65	4.238.319.335	106,65%	148,56%	BPSTW				
				1	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas															BPSTW	sub kegiatan ini di triwulan II sudah tidak ada			
				2	Penyediaan Permukiman			100,00		26,57	26,57	26	26,46	99,59%	99,59%						BPSTW			
				3	Penyediaan Sandang			100,00		49,18	49,18	50	50,08	101,83%	101,83%							BPSTW		
				4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			100,00		47,51	47,51	47	47,40	99,77%	99,77%							BPSTW		
				5	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			100,00		40,91	40,91	41	40,87	99,90%	99,90%								BPSTW	
				6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			100,00		48,90	48,90	49	48,94	100,16%	100,08%								BPSTW	
				7	Pemberian Pelayanan Pemuliharaan Keluarga			100,00		41,73	41,73	42	41,67	99,86%	99,86%								BPSTW	
				8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			100,00		33,42	33,42	33	33,33	99,73%	99,73%								BPSTW	
				9	Pemulasaraan			100,00		42,85	42,85	43	40,12	99,81%	93,63%								BPSTW	
			SEMULA	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (%)	51,60	20.163.021.500									45,20	12.927.407.557	87,60	64,11	Dinas Sosial				
				1	Penguatan Partisipasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial									NA										
				2	Pemeliharaan TMPN/TMP MPP MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan									100,00										
				3	Penyuluhan Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS									NA										
				4	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)									100,00										
			MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWANI	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (%)	51,60	20.163.021.500	69,64	379.779.690	26,56	1.292.202.250	27	1.262.319.550	134,99%	99,56%	45,20	13.307.187.247	87,60%	66,00%	Dinas Sosial				
				1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			100,00						100,00%							Dinas Sosial	Tidak ada sub kegiatan ini pada tahun 2022		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (%)	51,60	20.163.021.500	69,64	3.915.038.200	26,56	1.292.202.250	27	1.262.319.550	101,77%	97,69%	45,20	18.104.765.307	87,60%	89,79%	Dinas Sosial				
				1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Berusaha			100,00		37,95	37,95	37	36,58	98,50%	96,39%								Dinas Sosial	
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			100,00		65,80	65,80	64	62,10	96,75%	94,38%								Dinas Sosial	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Bawean			100,00												Dinas Sosial	Tidak ada sub kegiatan ini pada tahun 2022	
Urusan Pemerintahan Wajib																					
KETENAGAKERJAAN																					
	7		Semula	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial (perusahaan)	1688	2.724.586.800									1470	Rp 1.762.332.235	87%	6468%	Disnakertrans	
			1	Pembinaan Hubungan Industrial																	
			2	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja																	
			Menjadi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial (perusahaan)	1688	2.724.586.800	1562	681.722.000	1470	Rp 196.674.000	1.562	Rp 194.626.672	106%	99%	1562	Rp 2.960.291.907	93%	109%	Disnakertrans	
			1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)			100		38,7	38,7		37	36,66								
			2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					3	2,24		3	2,03								
			3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi			100		39	37,96		39	37,31								
			4	Penetapan Upah Minimum Provinsi (LUMP)			100		44,88	44,88		43	41,82								
			5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			100		35,8	33,44		36	33,88								
			6	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi					100	100		100	100								
			Semula	Program Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja (%)	64	2.130.749.000									64,61	Rp 1.885.685.675	101%	88%	Disnakertrans	
			1	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja																	
			2	Pengawasan Norma Kerja																	
			Menjadi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja (%)	64	2.130.749.000	64,8	1.116.091.200	68,48	Rp 654.180.600	68	Rp 382.620.099	103%	92%	68,48	Rp 3.384.396.974	107%	159%	Disnakertrans	
			1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			100		41,2	39,5		41	38,97								
			2	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			100		76	72,54		76	32,26							Balai Keselamatan Kesehatan Kerja	
			Semula	Program Pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (perusahaan)	533	3.122.356.000					100%	8913%		443	Rp 2.298.578.573	8311%	7362%	Disnakertrans		
			1	Pengujian Lingkungan Kerja								100%									
			2	Pemeriksaan Kesehatan Kerja Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja								96%									
			Menjadi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (perusahaan)	533	3.122.356.000	488	1.116.091.200			100%	92%	488	Rp 4.071.448.237	92%	130%	Disnakertrans			
			1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			100														

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			2	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Semburan			100												Balai Keselamatan Kesehatan Kerja	
		Semula	Program Pembinaan pelatihan standarisasi dan pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan (<i>orang</i>) Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (<i>lembaga</i>)	2000 90	5.491.977.000									963 81	Rp 3.465.605.600	48% 9000%	6310%	Disnakertrans	
			1	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja								100%								
			2	Pemagangan Tenaga Kerja								100%								
			3	Pembinaan Lembaga Pelatihan								100%								
		Menjadi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (<i>lembaga</i>)	2000 90	5.491.977.000	336 90	6.602.728.304 6.602.728.304	25 81	Rp 3.098.659.200	97 86	Rp 600.073.258	79% 103%	84% 84%	1299 90	Rp 10.877.287.662 6.602.728.304	65% 100%	198% 120%	Disnakertrans	
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			100		26,90	25,85	27	3,36							BLKPP	
			2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					47,00	45,89	47	37,98							Disnakertrans	
			3	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja			100		95,00	93,78	95	83,37							Disnakertrans	
			4	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					58,00	55,22	58	33,14								
		Semula	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%) Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%) Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%)	9,52	25.176.543.000							6795% 6818% 6667%	4549% 0,15 0,06	3,88	Rp 6.838.076.155	4076% 2716%			
			1	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional									100%							
			2	Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja									100%							
			3	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan									100%							
		Menjadi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%)	9,52	25.176.543.000	7,89	6.602.728.304	7,89	Rp 248.586.000	8	Rp 207.517.299	100%	83%	7,89	Rp 20.225.590.758	83% 80%		BLKPP	
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			100		26,90	25,85	27	3,36							BLKPP	
			2	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja			100		47,00	45,89	47	37,98								
			3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			100		95,00	93,78	95	83,37								
			4	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					58,00	55,22	58	33,14								
Urusan Pemerintahan Wajib																				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
1	8	Semula	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	70,00	1.430.583.000	NA	NA					71,42	1.277.847.025	NA	NA	102,03	89,32	DP3AP2	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			1	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak											NA	NA					
			2	Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak											NA	NA					
			3	Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak											NA	NA					
				Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	85,00	4.591.206.000					83,89	1.402.502.373					98,69	30,55	DP3AP2	
			1	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan																	
			2	Pemenuhan Hak-Hak Anak																	
		MENJADI		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	85,00	4.591.206.000	85,03	1.038.475.000	85	789.921.000	43	788.947.400	85,03	3.229.924.773	50,87%	99,88%	100,04%	70,35%	DP3AP2	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi**			100		98,05	98,05		98	98,05		100%	100%					
			2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			100		40,56	38,93		39	38,93		96%	100%				DP3AP2	
			3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah			100		99,54	99,54		100	99,54		100%	100%					DP3AP2
			4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi**			100		31,39	31,36		31	31,39		100%	100%					
			5	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah			100		36,69	36,69		37	36,01		100%	98%					DP3AP2
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	85,00	4.591.206.000	85,03	100.949.000	85	149.285.000	43	116.265.399	85,03	1.619.716.772	50,87%	77,88%	100,04%	35,28%	DP3AP2	
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			100		26,45	26,45		26	18,64		100,00%	70,47%					DP3AP2
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			100		100	100		100	99,78		100,00%	99,78%					DP3AP2
			3	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			100		100	100,00		100	99,93		100,00%	99,93%					DP3AP2
			4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			100		100	100		100	66		100,00%	65,82%					DP3AP2

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			5	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100		59,37	59,37	59	50,97							DP3AP2	
		SEMULA	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	persentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,25	920.631.000							35,08	1.854.208.950			102%	201,41	BPPM	
			1	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi																
			2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak																
			Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	persentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,45	5.685.871.000							35,91	4.131.249.375	104,48	95,10	104,24	72,66	DP3AP2	
			1	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah										100,00						
			2	Pembinaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan										100,00						
			3	Pengelolaan Data Gender dan Anak										100,00						
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,45	5.685.871.000	39,43	152.121.250	34,45	13.241.000	39	12.843.000	39,43	4.296.213.625	114,46%	96,99%	114,46%	75,56%	DP3AP2	
			1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi					9,12	9,12	9	8,92							DP3AP2	
			2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi					4,30	4,30	4	3,98							DP3AP2	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,45	5.685.871.000	39,43	1.292.950.353	34,45	529.279.000	39	469.738.132	39,43	5.893.937.860	114,56%	92,75%	114,46%	103,66%	DP3AP2	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			100,00		38,11	38,11	38	37,65		100,08%	98,79%				DP3AP2	
			2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			100,00		45,93	45,93	46	43,63		99,98%	94,99%				DP3AP2	
			3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			100,00		3,37	3,37	4	4,11		130,27%	121,96%				DP3AP2	
			4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			100,00		72,05	72,05	72	63,98		99,99%	88,80%				DP3AP2	
			5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			100,00		47,10	47,10	47	40,79		100,00%	86,60%				DP3AP2	
			6	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			100,00		28,22	28,22	28	9,22		100,00%	32,67%				DP3AP2	
9			Urusan Pemerintahan Wajib																	
	9		Pangan																	
			Indikator hanya ada pada tahun	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	Cadangan Pangan (ton)	537	1.368.175.000						NA	NA			100,00%	93,65	BKPP	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2018	1 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan																		
			2 Distribusi Pangan Masyarakat																		
			3 Penyelenggaraan Joga Benih																		
			4 Penyediaan Cadangan Pangan																		
			5 Pembinaan dan Peningkatan Penjualan																		
		Indikator hanya ada pada tahun 2018	Program Keekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (rer/kapita/tahun)	32	250.000.000					NA	NA			150,00	332,88			BKPP		
				Konsumsi Sayur Meningkat (rer/kapita/tahun)	234						NA	NA			97,44						
			1 Penanganan Keamanan Pangan																		
			2 Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman																		
		SEMULA	Program Peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi pangan	Persentase peningkatan dan konsumsi energi (%)	0,4	9.200.000.000					-1462,50%	96,07%			-292,50	33,20			DPKP		
			1 Penyediaan Cadangan Pangan								100,00%										
			2 Distribusi Pangan Masyarakat								100,00%										
			3 Penyelenggaraan Joga Benih								100,00%										
			4 Pengawasan Keamanan Pangan								100,00%										
			5 Gerakan Pengankaragaman Pangan								100,00%										
		MENJADI	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi energi (%)	0,4	9.200.000.000	0,00	516.250.250	0,08	609.328.000	-	430675500	0,00%	70,68%	-	430.675.500	100,00%	43,49		DPKP	Angka realisasi menggunakan data ketersediaan energi sebesar 3.735 kkal/kapita/hari sama dibanding tahun sebelumnya sebesar 2.735 kkal/kapita/hari (meningkat 0%) dan menggunakan data konsumsi energi tetap sebesar 2.147 kkal/kapita/hari sama dibanding tahun sebelumnya sebesar 2.147 kkal/kapita/hari. Pada konsumsi energi sesuai dengan tujuan pembangunan pangan, yaitu untuk mencapai angka konsumsi energi sesuai standar/anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 sebesar 2.100 kkal/kapita/hari karena jika diatas angka itu dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif Sumber data: DPKP DIY
			1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					36,29	36,49	36	34,96			36	35						
			2 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					35,29	35,27	35	34,76			35	35						
			3 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					2022 tidak ada													
			4 Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					63,84	63,84	64	41,29			64	41						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi energi (%)	0,4	9.200.000.000	0,00	309.490.500	2022 tidak ada		100,00%	99,96%			100%	3,36%			DPKP		
			1 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan																		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi energi (%)	0,4	9.200.000.000	0,00	131.545.750			100,00%	95,58%			100%	1,43%					
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar provinsi					100,00													
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					100,00													
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					100,00													
		SEMULA	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	0	4.700.000.000															
			1 Penanganan Desa Rawan Pangan																		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					6		7		8		9		10		11		12					
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				2	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
		MENJADI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa rawan pangan (desa)	0	4.700.000.000	0	319.467.500	0	28.725.500			24.369.035	#DIV/0!	85%		24.369.035	400%	19,74	DPKP	Hasil analisa desa rawan pangan tahun 2021 telah selesai dilaksanakan dengan hasil desa rawan pangan berjumlah 0 (nol). Desa rawan pangan yaitu Desa Kallirejo, Kokap, Kulon Progo, Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo ; Desa Banjarsari, Samigaluh Kulon Progo ; Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	
			1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				22,5	22,21			23	21,47				23	21		438 desa dan kelurahan Se DIY-->analisis		
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				37	36,69			37	29,34				37	29		6 lokasi desa mandiri pangan, 2 desa baru penumbuhan dan 4 desa lama pengembangan/ke mandirian, penerima manfaat adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas/kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif di desa rawan pangan; 3 Lembaga Akses Pangan Masyarakat		
Urusan Pemerintahan Wajib																						
10	10		Pertanahan																			
1		SEMULA	Program tertib administrasi pertanahan	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100	2.700.000.000						100			422.130.600	100	422.130.600	100	15,63%	Dinas PTR		
		1	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kenetninan UImum																			
		MENJADI	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pengajuan permohonan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan	100	2.700.000.000	100	34.400.000	100,00	13.255.000	100	13.012.000,00	100		469.542.600	100	469.542.600	100	17%	Dinas PTR		
		1	Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				100		38,53	13.255.000		38	13.012.000,00									
Urusan Pemerintahan Wajib																						
11	11		Lingkungan Hidup																			
1		SEMULA	Pogram pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	NA	1.979.332.000											1	3.074.848.635	NA	155,35	BLH	
		1	Pengkajian Lingkungan Hidup																			
		2	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu																			
		MENJADI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100,00	1.979.332.000	100	375.133.750	18,75	5.765.000,00	25	3.975.497,00	133,33%	68,96%		100	3.761.774.382	100%	190,05	DLHK		
		1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menyebabkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				100		4,22	5.765.000,00	3	3.975.497,00	68,96%	68,96%								

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		SEMULA	Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	56,25	11.000.000.000									30	1.231.918.560	53,33	11,20	DLHK	
				Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk	100,00										194		193,75			
			1 Pengkajian Lingkungan Hidup																	
			2 Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu																	
		MENJADI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	56,25	11.000.000.000	45	175.213.500	5,00	40.452.000,00	5	35.016.702,00	100,00%	86,56%	45	1.442.148.762	0,80	0,13	DLHK	
			1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin			100	30.468.000	5,86	10.542.000,00	4	7.045.982,00	66,89%	66,84%							
			2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			100	38.540.000	29,11	21.771.000,00	28	21.095.500,00	96,91%	96,90%							
			3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana			100	7.209.000	32,97	8.139.000,00	28	6.875.220,00	84,47%	84,47%							
3		SEMULA	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kadar 7 parameter tercemar air (TSS BOD COD Fosfat DO Coli Total Koli) dan dua kadar parameter pencemaran udara SO2 dan NO2	NA	2.350.000.000							NA	NA		2.777.031.996	NA	1,18	BLH	
			1 Pengendalian Perusakan Lingkungan																	
			2 Pengendalian Pencemaran Air Udara dan Tanah																	
		MENJADI	NA										NA	NA			NA		DLHK	
4		SEMULA	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	237,00	14.700.000.000									150	3.012.873.896	63,29	20%	DLHK	
				Jumlah Sumber Pencemaran Air Sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	120,00										20		16,67			
				Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota	80,00										70		87,50			
			1 Pengendalian Pencemaran Air Udara dan Kerusakan Lingkungan Maritim																	
			2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3										100,00%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1			MENJADI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	237,00	14.700.000.000	246	1.072.962.150	48,00	910.247.490,00	48	497.689.344,00	100,00%	33,23%	246	3.841.260.294	104%	26,13	DLHK	
				Jumlah Sumber Pencemaran Air Sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	120,00		125		40,00		125		312,50%		125			104,17%			
				Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kota/kabupaten	80,00		89		48,00		48		100,00%		89			111,25%			
				1 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan			100		23,67	206.526.250,00	19	163.394.825,00	79,13%	79,12%							
				2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi**			67		59,89	703.721.240,00	28	334.294.519,00	47,50%	47,50%							
				3 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada			100		NA	NA	NA	NA									Sub keg NA
5			SEMULA	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	3,00	1.870.668.000								2	5.052.492.504	NA	270%	BLH		
				1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup																	
				2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan																	
				3 Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan																	
			MENJADI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	3,00	1.870.668.000	10	387.584.250	3,00	100.434.000,00	10	91.953.231,00	333,33%	91,56%	10	5.532.029.985	333,33%	295,72%	DLHK	
				1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			100		22,76	100.434.000,00	21	91.953.231,00	100,00%	91,56%							
4				Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penhargaan)	3,00	10.650.000.000							0,00%	379,28%	-	2.196.999.141	0,00	20,63	DLHK	
				Sudah ada diatas																	
			SEMULA	Program Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	NA	725.000.000						NA	NA	61	4.848.586.832	NA	668,77	DLHK		
				1 Peningkatan Tutupan Vegetasi									NA	NA							
5			MENJADI	NA																	
			SEMULA	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175,00	24.248.033.708							45,45%	83,91%	75	9.948.531.968	42,86	41,03	DLHK	
				Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	5,00									800,00%		8		160,00			
				1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan										100,00%							
				2 Konservasi Sumber Daya Alam										100,00%							
				3 Perlindungan dan Pengamanan Hutan										100,00%							
				4 Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)										0,00%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	Peningkatan Tutupan Vegetasi									NA	NA						
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175,00	24.248.033.709	272	1.504.721.300	11,00	462.879.000,00	30	403.834.715,00	272,73%	87,24%	272	11.857.087.983	155,43%	48,90%	DLHK		
				Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	0,50		2,15		0,10		1		11,11%		2		430%			Pada tahun 2020 kerusakan hutan yang terjadi seluas 34,17 ha yang diakibatkan dari pencurian pohon, bencana alam dan kebakaran hutan. Sampai dengan TW III tahun 2021, terjadi kerusakan hutan yang disebabkan oleh pencurian sebanyak 78 pohon dan bencana alam 125 pohon sehingga berjumlah 203 pohon, dikonversi dalam hektar menjadi 0,254 Ha (1 Ha = 800 pohon). Penurunan Kerusakan hutan tahun 2021 sebesar : 34,17 Ha - 0,254 Ha = 33,916 Ha. 1% setara dengan 15,72 Ha, sehingga 33,916 ha setara dengan 2,15 %. Dari target 0,1 % tercapai 2,15 %	
				1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		89,05		11,88	13.410.000,00	12	13.289.100,00	100,93%	99,10%							
				2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		86,20		67,67	449.469.000,00	59	390.545.615,00	115,09%	86,89%							
				3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Belum ada realisasi	
6		SEMULA	Program Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA P3uansan	780,00	42.000.000.000									580	16.567.590.665	74%	39%	DLHK		
				1	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah																
				2	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah								99,95%								
		MENJADI	Program Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Sampah yang Dikelola di TPA P3uansan	780	42.000.000.000	794,09	15.395.256.410	680,00	4.208.926.243,00	765	3.091.002.745,00	112,50%	73,44%	794	35.053.849.820	101,81%	83,46%	DLHK		
				1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		100		56,48	111.130.000,00	2	3.552.900,00	3,20%	3,20%							
				2	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		100		14,52	3.933.861.243,00	11	3.087.449.845,00	78,44%	78,48%							
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		100,00		163.935.000,00			-	-	0,00%	0,00%						
				Urusan Pemerintahan Wajib																	
				Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																	
12	12	SEMULA	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el Akta kelahiran Anak Akta Kematian) (%)	87,97	3.525.450.000									100	5.064.789.977	1,14	14366,00	Biro Tata Pemerintahan		
				1	Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan										100					Biro Tata Pemerintahan	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			2	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data										100					Biro Tata Pemerintahan		
			3	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)										100					Biro Tata Pemerintahan		
			4	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil															Biro Tata Pemerintahan		
12	12	MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el Akta kelahiran Anak Akta Kematian) (%)	87,97	3.525.450.000	98,99	159.484.974	30,70	96.955.000	99	52.619.224	323,84	0,54	99,42	4.957.924.227	113,02	140,63	Biro Tata Pemerintahan		
			1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			100		82,30	82,65	82	44,28	100,00	53,58							
			2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Usulan			100		2,29	2,49	2	2,49	100,00	100,00							
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el Akta kelahiran Anak Akta Kematian) (%)	87,97		98,99	202.604.000	30,70	63.396.000	99	50.694.000	3,24	0,80	99,42	253.298.000	113,02	53,63	Biro Tata Pemerintahan		
			1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100		20,16	20,17	27	14,18	135,42	70,30							
			2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			100		80,20	80,57	80	64,92	100,00	80,58							
			3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100		31,21	30,19	31	29,03	100,00	96,16							
			4	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100		42,81	42,89	43	42,89	100,00	100,00							
			5	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan**			100		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00							
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el Akta kelahiran Anak Akta Kematian) (%)	87,97		98,52	44.128.000	30,70	28.918.000	99	24.218.000	3,24	0,89	99,42	68.346.000	113,02	69,01	Biro Tata Pemerintahan		
			1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi			100		60,15	59,79	60	57,17	100,00	95,62							
			2	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			100		56,80	57,00	57	40,57	100,00	71,18							
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el Akta kelahiran Anak Akta Kematian) (%)	87,97		98,52	105.430.000	30,70	115.570.000	99	105.430.000	3,24	0,91	99,42	210.860.000	113,02	63,54	Biro Tata Pemerintahan		
			1	Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			100		83,12	83,06	60	75,77	72,33	91,22							
			Usuran Pemerintah Pilihan																		
			Penunjang Usuran																		
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Semula	Program Pengelolaan Rekeyasa Sosial Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong (Masa/Bekurban)	8	2.906.900.000									8	136.372.000	10000%	469%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
			1 Pembinaan Gotong Royong Kelompoek MasvarakatII																	
			Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolan kebijakan Penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	16	4.332.254.000									5	981.105.300	3125%	2265%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	pada tahun 2020 target kinerja program adalah 4 kebijakan yaitu kajian pemenuhan hak anak, Rapergub pengarusutamaan gender, dan 2 kebijakan sektor sosial . dari target ini hanya dapat dilaksanakan penyesunan rapergub pengarusutamaan gender karena adanya refocusing anggaran akbat pandemi covid 19
			1 Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat									100%								
			2 Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat									100%								
		Menjadi	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rumusan Bahan Pengelolan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (dokumen)	16	4.332.254.000	4	461.975.500	-	41.775.500	-	36275500	0	86,83%	4	1.479.356.300	25%	34%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
			1 Fasilitas Perumusan Kebijakan Telmte Pembangunan Daerah				100		24	7	24	6,44	100%	86,91%						
2		Semula	Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan (lembaga)	4,00	5.887.778.000							100%	99,28%	4	1.398.860.000	10000%	2376%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
			1 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan										100%							
			2 Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan										100%							
		Menjadi	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah pembinaan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan (kegiatan)	4	5.887.778.000	4	3.416.212.000	3	1.800.308.500	3	1.724.998.500,00	100%	95,82%	4	6.540.070.500	100%	111%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
			1 Fasilitas Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				100		23	24	23	22,55	100%	95,84%						
3		Semula	Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Implementasi model global gotong royong (Desa)	8,00										6	213.216.000	75%		Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
			1 Pengembangan Kewirausahaan Desa										100%	61,73%	6	574.291.000	75%	1976%		pada tahun 2022 TW I Program ini belum ada
		Menjadi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA JURISAN KEBUDAYAAN	Jumlah desa global gotong royong (Desa)	8,00	2.906.900.000	6	224.703.000					100%							
			1 Pengembangan Kewirausahaan Desa*				100		30	27	30	26,39	100%	98,65%						
			Urusan Pemerintahan Wajib																	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
14	14	SEMULA	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	250.210.000							NA	NA	1,05	237.922.200	89,74	95,09	BPPM	
			1 Peningkatan Kesehatan Reroduksi										NA	NA						
			Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Rasio)	1,17	808.386.000							101,71	98,50	1,15	924.813.850	102,14	114,40	DP3AP2	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			1	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian <i>Sanitasi</i>								100,00								
			2	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi								100,00								
		MENJADI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Rasio)	1,17	808.386.000	1,12	111.033.750	1,17	112.269.750	1	29.043.500	104,62%	81,00%	1,12	1.035.847.600	1,05	1,28	DP3AP2	
			1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)			100		100		66	64,12	100,00						DP3AP2	
			2	Advokasi dan Sosialisasi GDPK			100		100		40	35,76	100,00						DP3AP2	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Rasio)	1,17	808.386.000	1,12	62.542.876	1,17	77.213.250	1	30.821.547,00	104,62%	81%	1,12	987.356.726	104,62	1,22	DP3AP2	
			1	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja			100		100		13	13	100,00						DP3AP2	
			2	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100		100		-	0	100,00						DP3AP2	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	13,00	251.486.000						NA	NA	13	1.157.645.300	100,00	460,32	BPPM		
			1	Peningkatan Ketahanan Keluarga																
		SEMULA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	13,00	3.820.420.000						192,31	78,48	5	3.139.590.806	161,54	271,20	DP3AP2		
			1	Pembinaan Ketahanan Keluarga								100,00								
			2	Pengelolaan Bina Keluarga Kesehatan								100,00								
		MENJADI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,0013	3.820.420.000	0,00052	776.864.250	0,0013	819.493.750	0	341.823.408	160,00%	94,80%	0,00	3.916.455.056	160%	103%	DP3AP2	
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			100		100		60	59,59	100,00						DP3AP2	
			2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			100		100		72	70,70	100,00						DP3AP2	
			3	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100		100		37	38,87	100,00						DP3AP2	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,0013	3.820.420.000	0,00052	402.339.450	0,0013	432.194.500	0	144.265.500,00	160,00%	93,09%	0,00	3.541.930.256	160,00%	92,71%	DP3AP2	
			1	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100		100		96	95,89	100,00						DP3AP2	
			2	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			100		100		-	-	100,00						DP3AP2	
			3	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)			100		100		100	98,26	100,00						DP3AP2	
			4	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Media Promosi Alat Permainan Edukatif Remaja dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan			100		100		5	5,45	100,00						DP3AP2	
			Urusan Pemerintahan Wajib																	
			Perhubungan																	
15	15																			

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
		SEMULA	Program Pengembangan keselamatan transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A	39.746.444.075												N/A	4 674 449 235	Dishub	
				Penurunan rasio jumlah kecelakaan	9,00	35.525.000.000												16.333	-		
			1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan																	
			2	Pengakuan Hukum Lalu Lintas																	
			3	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Anekdota Jalan																	
			4	Pengakuan Hukum Angkutan Jalan																	
		MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A	39.746.444.075	1,47	42.762.034.300	0,90	30.763.653.636	2	28.784.921.411	198,89%	93,57%	1	83.775.612.052	1,47	210,78%	Dishub	Target Kinerja Akhir periode RPJMD N/A	
			1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan II/A Provinsi					0,46	1.530.000	0	1.503.217	97,83%	98,25%							
			2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					0,95	43.295.000	0	2.041.796	4,21%	4,72%							
			3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					14,61	125.268.300	15	125.067.800	99,86%	99,84%							
			4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					29,68	592.370.000	22	435.936.545	73,58%	73,59%							
			5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					5,92	28.481.000	6	28.160.745	98,82%	98,88%							
			6	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					10,98	263.913.170	15	351.728.547	133,24%	133,27%							
			7	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					29,34	198.572.000	28	191.610.999	96,52%	96,49%							
			8	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					66,69	355.730.000	61	326.445.050	91,77%	91,77%							
			9	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					17,98	4.411.000	16	4.019.550	91,10%	91,13%							
			10	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin					29,52	5.661.000	29	5.648.818	99,76%	99,78%							
			11	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					50,10	120.460.000	47	112.564.600	93,45%	93,45%							
			12	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal					55,38	83.259.000	55	82.287.027	98,83%	98,83%							
			13	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi					3,60	944.000	3	771.450	81,67%	81,72%							
			14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					35,82	28.508.133.000	34	26.786.331.908	93,97%	93,96%							
			15	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					27,55	430.926.166	21	330.103.359	76,59%	76,60%							
			16	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi					0,25	700.000	0	700.000	100,00%	100,00%							
		SEMULA	Program peningkatan pelayanan angkutan	Penyediaan sarana transportasi	70,00	134.200.000.000												N/A		Dishub	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (%)	82,41												10.035,00	-	Dishub	
					Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (%)	100,00												314,00			
			1	Penyelenggaraan Angkutan Orane dalam Trayek																	
			2	Penyelenggaraan Angkutan Orane Tidak Dalam Trayek																	
			3	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian																	
		MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (%)	82,41	134.200.000.000	82,70	88.689.889.794	82,41	30.763.653.636	85	28.784.921.411	102,85%	93,57%	83	121.367.267.864	100,35%	90,44%			
				Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (%)	100,00		314,00		100		201										
			1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					0,46	1.530.000	0	1.503.217	97,83%	98,25%							
			2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					0,95	43.295.000	0	2.041.796	4,21%	4,72%							
			3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					14,61	125.268.300	15	125.067.800	99,86%	99,84%							
			4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					29,68	592.370.000	22	435.936.545	73,58%	73,59%							
			5	Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					5,92	28.481.000	6	28.160.745	98,82%	98,88%							
			6	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					10,98	263.913.170	15	351.728.547	133,24%	133,27%							
			7	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					29,34	198.572.000	28	191.610.999	96,52%	96,49%							
			8	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					66,69	355.730.000	61	326.445.050	91,77%	91,77%							
			9	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					17,98	4.411.000	16	4.019.550	91,10%	91,13%							
			10	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin					29,52	5.661.000	29	5.648.818	99,76%	99,78%							
			11	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					50,10	120.460.000	47	112.564.600	93,45%	93,45%							
			12	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal					55,38	83.259.000	55	82.287.027	98,83%	98,83%							
			13	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi					3,60	944.000	3	771.450	81,67%	81,72%							
			14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					35,82	28.508.133.000	34	26.786.331.908	93,97%	93,96%							
			15	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					27,55	430.926.166	21	330.103.359	76,59%	76,60%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			16	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi					0,25	700.000	0	700.000	100,00%	100,00%							
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian(persen)	70,00	134.200.000.000	70	8.200.000	70	8.343.000	75	6.765.455	107,14%	81,09%	70	3.913.422.114	100%	148%			
			1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			70		2,81	8.343.000	2	6.765.455	81,14%								
C		SEMULA	Program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas (persen)	41,00	22.700.000.000												100,00	4.104,00	Dishub	
				Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yk(persen)	62,71													100,00		Dishub	
				Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yk(persen)	67,00													791,00	-	Dishub	
			1	Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas														#DIV/0!			
			2	Penerapan Rekayasa Lalu lintas																	
		MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas (persen)	41,00	22.700.000.000	76	24.066.000	67	30.763.653.636	80	28.784.921.411	119,40%	93,57%	76	34.446.749.861	185,37%	151,75%			
				Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yk(persen)	67,00		53		80		53		66,25%								Data Tidak ada di form tw2
			1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			2.382	936.000	0,46	1.530.000	0	1.503.217	97,83%	98,25%							
			2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi			37	1.341.872.990	0,95	43.295.000	0	2.041.796	4,21%	4,72%							
			3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			63	123.338.500	14,61	125.268.300	15	125.067.800	99,86%	99,84%							
			4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan			70	401.583.000	29,68	592.370.000	22	435.936.545	73,58%	73,59%							
			5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			19	24.066.000	5,92	28.481.000	6	28.160.745	98,82%	98,88%							
			6	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			26	223.142.940	10,98	263.913.170	15	351.728.547	133,24%	133,27%							
			7	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			27	48.454.000	29,34	198.572.000	28	191.610.999	96,52%	96,49%							
			8	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			60	231.045.000	66,69	355.730.000	61	326.445.050	91,77%	91,77%							
			9	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			35	6.909.000	17,98	4.411.000	16	4.019.550	91,10%	91,13%							
			10	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			52	48.556.000	29,52	5.661.000	29	5.648.818	99,76%	99,78%							
			11	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			84	292.846.000	50,10	120.460.000	47	112.564.600	93,45%	93,45%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			12	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal			79	80.842.750	55,38	83.259.000	55	82.287.027	98,83%	98,83%						
			13	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			1	-	3,60	944.000	3	771.450	81,67%	81,72%						
			14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			52	32.154.588.150	35,82	28.508.133.000	34	26.786.331.908	93,97%	93,96%						
			15	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			48	54.229.500	27,55	430.926.166	21	330.103.359	76,59%	76,60%						
			16	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			21	2.321.500	0,25	700.000	0	700.000	100,00%	100,00%						
D		SEMULA	Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran(penumpang per hari)	N/A	1.673.816.000											N/A	8.953	Dishub	
				Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir(SRP)																
			1	Pengelolaan Terminal Park and Ride dan Perparkiran																
			2	Pengembangan Terminal Park and Ride dan Perparkiran																
E		MENJADI SEMULA	SUDAH ADA DIBAWAH PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 2944%																
				Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 2944%																
			1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Elingsarif																
			2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																
			3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																
			4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo																
			5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1			MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 2944%		41,67	2.897.949.700	21,67	1.132.232.200	28	769.249.910	128,20%	67,94%	42	6.918.798.916	#DIV/0!	#DIV/0!			
					Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 2944%																
			1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filenoflex*			5,055		34,00	1.129.461.200	23	766.511.800	67,88%	67,87%							
			2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selataan*					0,12	2.771.000	0	2.738.110	100,00%	98,81%							
			3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!							
			SEMULA	Program pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan parkir	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan parkir	4.700	8.900.000.000										14.036	1.868	Dishub		
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir (SRP)	830											1.253,00		Dishub		
			1	Pengelolaan Terminal Park and Ride dan Parkir																	
			2	Pengembangan Terminal Park and Ride dan Parkir																	
			MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan parkir	4.700	8.900.000.000	9429	834.227.000	4.700	306.404.000	9.489	107.080.797	201,89%	34,95%	9.429	986.334.796	200,62%	11,08%	Balai Parkir	
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir (SRP)	830		860		830		860		103,61%						Balai Parkir	
			1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Bus			11	4.948.000	0,83	3.210.000	1	3.180.909	100,00%	99,09%							
			2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			25	4.499.000	24,07	303.194.000	8	103.899.888	34,28%	34,27%							
			3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B			28	116.890.000	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	#VALUE!							
				Urusan Pemerintahan Wajib																	
				Komunikasi dan Informatika																	
1			1	SEMULA	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (%)	80,00	11.035.916.171							63,83	7.297.873.983	79,78	66,13	Dinas Kominfo		
			1	Pembinaan Kelembagaan KPID																	
			2	Pembinaan Kelembagaan KIP																	
			3	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik																	
			4	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik																	
			5	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi																	
2			MENJADI	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (%)	80,00	11.035.916.171	88,14	3.520.259.800	80,00	687.947.050	91	687.947.050	113,50	1,00	90,80	11.506.080.833	113,50	104,26	Dinas Kominfo	
			1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		100,00		100,00		68,52	66,83	69	60,73	100,00	0,91						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Bisnis	100,00		100,00		27,20	25,00	27	24,93	100,00	1,00							
			3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100,00		100,00		85,27	85,27	84	67,59	98,26	0,79							
			4	Pelayanan Informasi Publik	100,00		100,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00							Tahun 2022 tidak ada Sub Kegiatan ini
			5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100,00		100,00		38,90	43,87	39	43,87	100,00	1,00							
			6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100,00		100,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00							Tahun 2022 tidak ada Sub Kegiatan ini
			7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah					37,52	37,17	38	36,82	100,00	99,06							
			8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	100,00		100,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00							Tahun 2022 tidak ada Sub Kegiatan ini
3		2	SEMULA	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	62,50	9.088.119.400							43,87		25,00	8.222.002.158	40	90,47	Dinas Kominfo	Nama Program Tahun 2018: PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA Nama Program Tahun 2019: PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
			1	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi																	
			2	Pengembangan Jogja Satu Data																	
			3	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
			4	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY																	
			5	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah																	
			6	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
			7	Pengelolaan Persandian																	
				Program Layanan Teknologi Informasi	90,50	45.235.414.180									83,23	15.367.286.104	91,97	33,97	Dinas Kominfo		
			1	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah																	
			2	Pengembangan dan Penyelenggaraan JTV																	
			MENJADI	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	62,5	9.088.119.400	50,00	1.091.868.600	0,00	129.738.900	-	128.262.350	0	0,99	50,00	24.809.419.212	80	45,67	Dinas Kominfo	Nama Program Tahun 2018: Program Pengembangan Aplikasi Informatika Nama Program Tahun 2019 dan 2020: Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	
				Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK (sk)	90,5	45.235.414.180	98,85		90,50		99	1,09		98,90		109,28			Dinas Kominfo		
			1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100		100,00		27,38	25,00	27	24,94	99,34	1,00							
			2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis	100		100,00		78,00	75,70	78	73,57	100	0,97							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	100		100,00		6,00	3,71		6	2,86	100	0,77					
			4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	100		100,00		0,00	0,00		-	0,00	0	0					Tahun 2022 tidak ada Sub Kegiatan ini
			5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100		100,00		5,60	1,56		6	1,12	100	0,72					
			Urusan Pemerintahan Wajib																	
			Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																	
17	17																			
1		Semula	Program Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp. Ribul)	96.487	8.355.000.000							388,53	90,91	140.174	17.435.480.607	145278,09	208,68	Dinas Koperasi	
			1	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru									NA							Dinas Koperasi
			2	Peningkatan Kapasitas UKM (DAK)									NA							Dinas Koperasi
			3	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM									100							Dinas Koperasi
			4	Pemasaran Produk UKM									100							Dinas Koperasi
			5	Pelatihan Kapasitas UKM (DAK)									100							Dinas Koperasi
		Menjadi	Program Pengembangan UMKM	Nilai Omzet UKM Tahun n	96.487	8.355.000.000	92.177	7.599.136.922				93.717	199.253.800	1,00	0,54	93.717	7.798.390.722	97,13%	93,34%	
			1	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi					93.648	372.293.000		0	15,70%							
2		Semula	Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	1.295	6.550.000.000			30,84%	29,34%			135,71	96,96	985	2.538.648.500	76,02	38,76	Dinas Koperasi	
			1	Pelatihan Kewirausahaan									100							Dinas Koperasi
			2	Layanan Usaha Wirausaha Baru									100							Dinas Koperasi
		Menjadi	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah Wirausaha Baru	1.295	6.550.000.000	1.493	3.102.537.121			1.518	500.253.200	1,34	0,85	1.518	6.141.438.821	117,22%	93,76%		
			1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan					1.133	586.397.000		0	38,87%							
3		Semula	Program Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n (Rp. Ribul)	NA	550.000.000			47,79%	45,56%			NA	NA	2.473.645	2.360.347.504	NA			Dinas Koperasi
			1	Pembinaan Perkooperasian																
			2	Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK)																
			Program Pengembangan Perkooperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp luta)	2.066.336	6.000.000.000							402,43	96,64	5.275.919	4.935.823.827	255,33	82,26	Dinas Koperasi	
			1	Pengawasan dan Penilaian Koperasi									100							Dinas Koperasi
			2	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi									100							Dinas Koperasi
			3	Pemasaran Perkooperasian									100							Dinas Koperasi
			4	Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK)									100							Dinas Koperasi
		Menjadi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp luta)	2.066.336	6.000.000.000	2.448.743	611.452.600			2.601.053	13.460.000	5,20	0,19	5.049.796	5.547.276.427	244,38%	92,45%		
			1	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesyambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat					500.000	69.520.000		23	5,84							
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp luta)	2.066.336	6.000.000.000	2.448.743	841.173.650	31,41	30,17	2.601.053	344.958.700,00	5,20	0,92	2.448.743	6.121.956.177	119,09%	102,03%		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1				1 Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penatam Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha					500.000	373.290.000,00	47	43,49									
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp juta)	2.066.336	6.000.000.000	2.448.743	19.182.000	48,33	47,06	2.601.053	29.444.000,00	5,20	0,00	2.448.743	4.971.849.827	118,51%	82,86%		
				1 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi					500.000	13.300.000	1	53,17%									
				Program Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp juta)	2.066.336	6.000.000.000	2.448.743	3.569.404.715	70,42%	68,91%	2.601.053	898.828.971,00	5,20	0,88	2.448.743	5.835.252.798	118,51%	97,25%		
				1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					500.000	1.027.118.000,00	25	21,54									
				2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM					31,22	28,33	27	24,23									
4			Semula	Program Peningkatan Akses Pembiayaan	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan	18,82	200.000.000			26,57	25,67			NA	NA	20	275.879.500	103,77	100	Dinas Koperasi	
				Program Peningkatan Akses Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	24136286250	14.050.000.000									18 300 000 000	716.695.888	100,27%		Dinas Koperasi	
				1 Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan																	
				2 Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan																	
			Menjadi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	24136286250	14.050.000.000	21 000 000 000	7 599.136.922			21.650.000.000	199.253.800,00	1,00	1,00	21 650 000 000	8.515.086.610	89,70%	60,61%		
				1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				100	21 627 257 250	372.293.000,00											
			Semula	Program Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal (%)	22,16	250.000.000							NA	NA	22	240.873.100	100	100	Dinas Koperasi	
				1 Pengawasan dan Penilaian Koperasi																	
				Urusan Pemerintahan Wajib																	
18	18			Penanaman Modal																	
1			SEMULA	Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1 790 824	5.850.000.000									10 518 868	1.472.589.189	587%	25%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
				1 Promosi Investasi																	
				2 Penanganan Kerjasama Luar Negeri																	
				Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	719.692	750.000.000									1.947.611	734.174.693	271%	98%	BKPM	
			MENJADI	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi tahun n yang tercatat dalam Ijin prinsip (Rp juta)	1 790 824	5.850.000.000	7 090 053,11	612.512.730	400000	228.023.000	65.604.031	Rp 219.892.000	164,01	0,96	7.090.053	2.304.993.919	396%	39%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
				1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				100,00	28,60	26,43	29	26,43									
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi					49,10	47,04	49	45,30									sub kegiatan 2022
2			SEMULA	Program Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp Juta)	918.963	4.954.000.000									2.602.036	1.118.266.613	283%	23%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			1	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal																	
			2	Percepatan Realisasi Investasi																	
			3	Penyiapan Potensi Investasi																	
			Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi		nilai realisasi investasi PMA & PMDN (RpJuta)	719.692	750.000.000						NA	NA	6.652.446	1.013.693.946	924%	115%	BKPM		
			1	Penyiapan Potensi Investasi																	
			2	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri																	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp juta)	918.963	4.954.000.000	918.963	456.098.440	250.000	83.439.500	3.078.892	Rp 71.264.500	12,32	0,85	6.078.792	1.645.629.553	661%	33%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			100,00			tdk ada											
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			100,00		19,1	14,86		19	12,69								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**			100,00		25,2	25,09		23	16,07								
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp juta)	918.963	4.954.000.000	2.450.396,5	447.443.000	250.000	83.439.500	3.078.892	Rp 71.264.500	12,32	0,85	9.102.843	1.532.401.446	991%	31%	DPPM	
			1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			100		55,5	30,48		53	7,22								
4		Program ada di tahun 2018	Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi		Persentase permasalahan investasi yang diselesaikan	55	1.000.000.000								77	92.380.000	141%	9%	BKPM		
			1	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal									NA								
5		SEMULA	Program Pelayanan Perijinan		Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)	100	8.650.000.000								97	1.467.105.155	97%	17%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		
			1	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra																	
			2	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur																	
			Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)	100	8.650.000.000	99,28	635.737.500	99	Rp 233.602.500	99	Rp 224.701.000	1,00	0,96	99	2.327.543.655	99%	27%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
			1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			100,00		47,94	47,93		48	46,6							Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
			2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			100,00		47,94	47,93		48	46,6							Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
			3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			100,00		35,5	35,11		36	32,88								Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
			Program Pelayanan Perijinan		Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)	100	8.650.000.000	99,28	635.737.500					1,00	0,91	99	2.327.543.655	99%	27%	Kantor PPTSP	Nama Program tidak ada di 2022
			1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
6		SEMULA	Program Peningkatan Kemudahan Berusaha	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	1	9.300.000.000									4	1.033.769.368	-200%	4454100%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal			
			1 Percepatan Perizinan Berusaha																			
			2 Pelayanan Pengaduan Perizinan																			
		MENJADI	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	1	9.300.000.000	2	314.536.500	2	123.680.000	2	13.455.000	1,00	0,11	2	1.361.760.868	50%	15%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal			
			1 Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100		64	51,59		60	5,61						Dinas Perijinan dan Penanaman Modal			
Urusan Pemerintahan Wajib																						
Kepemudaan dan Olahraga																						
1		SEMULA	Program Pembinaan Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (%)	30,00	29.791.565.000	28,42	3.987.423.717					101,50	85,95		25,70	13.834.209.558	85,67	46,44	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
				Sentra pemuda yang mendapatkan pembinaan (sentra)	NA	NA							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
			1 Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan										100,00									
			2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan										100,00									
			3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan										100,00									
			4 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda										100,00									
		MENJADI	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (%)	30,00	29.791.565.000	28,42	3.987.423.717	30	457.237.500	28	292.873.250	94,73	64,05		25,70	14.127.082.808	85,67	47,42	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi				100		97	97		91	15	93,96	15,71%							
			2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi				100		3	3		0	0	12	11,33%							
			3 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				100		25	25		9	9	35,32	34,08%							
			4 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				100		42	42		33	32,71	77,90	77,88%							
			5 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				100		95	95		-	0	0	0							
		SEMULA	Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (medali)	7,00	203.273.672.000	0	36.415.357.000					0,00	88,36		10,00	84.489.900.864	142,86	41,56	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
				Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARENAS (medali)	13,00		0	36.415.357.000					258,33			20,67		158,97				
			1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga										100									
			2 Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional										100									

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1			MENJADI	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (medali)	7,00	203.273.672.000	0	36.415.357.000	0	20.971.169.000	-	19.569.758.632	0,00	93,32	10,00	104.059.659.496	142,86	51,19	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
					Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARENAS (medali)	13,00		0	36.415.357.000	0	20.971.169.000	-	19.569.758.632	0,00		20,67		158,97			
			1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Remaja/astasi Remaja				100		44,00	44,00	39,91	24	90,70	0,54						
			2	Pengembangan Organisasi Keolahraean				100		96,30	96,30	100,00	100	103,84	1,04						
Urusan Pemerintahan Wajib																					
Statistik																					
20	20		SEMULA	Program Pengembangan statistik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan pembangunan daerah	100,00	7.703.131.293	100	872.497.800					100,00%	99,00%	100	3.354.184.410	100,00	43,54	BAPPEDA (BSD)	
					Tingkat kepuasan pelanangan	72,00		83,31						119,01%		83		115,71			
			1	Penyediaan Data Dan Statistik Daerah				100						100,00%							
			2	Penyajian Dan Informasi Data Statistik				100						100,00%							
			MENJADI	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100	7.703.131.293	100	872.497.800	100	442.382.000,00	100	431.661.645,00	100,00%	197,23%	100	7.692.908.194	100%	99,87%	BPPSD	
					Tingkat Kepuasan Pelanangan	72		83,31		71,00		84,77		117,34%		83		116%			
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik				100		100		100									
2			SEMULA	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelibngan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah																
			MENJADI	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelibngan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah				90,00	378.811.770,00	72,02	75.422.200,00	80,02%	19,91%						BPPSD	
			1	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan					100		25,00	7.191.300,00	100,00%	6,92%							
			2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial					100		35,00	9.346.200,00	100,00%	21,43%							
			3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					100		36,50	13.909.000,00	100,00%	30,89%							
			4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibngan					100		52,75	44.975.700,00	100,00%	24,15%							
Urusan Pemerintahan Wajib																					
Persandian																					
			SEMULA	Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100,00	2.463.365.000									n/a				Dinas Kominfo	Pada Tahun 2018 ada di Biro Umum Pada Tahun 2019: PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN
				Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100,00	707.679.500					NA	NA	100,00		456.606.150	100,00	64,52	Biro Umum dan Protokol		
			1	Pengembangan Sistem dan Penelolan Naskah Dinas																	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			2	Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi																	
		MENJADI	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Kecepatan Informasi Sandi Kepada Pimpinan dan Informasi Persuratan di Lingkungan Pemda DIY,	100	2.463.365.000	100	1.648.792.862	100,00	487.625.000	100	228.877.990	100,00	46,94	100,00	3.048.611.936	100	124%	Dinas Kominfo	Tahun 2019 dan 2020, nomenklaturnya: PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN, namun untuk anggaran hanya ada di Kegiatan Pengelolaan Persandian	
			1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100		100		26,00	25,01	26,00	24,98	100,00	99,88					Dinas Kominfo		
			2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100		100		11,70	8,93	11,70	8,06	100,00	90,26					Dinas Kominfo		
			3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100		100		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					Dinas Kominfo	Pada Tahun 2022 tidak ada Sub Kegiatan ini	
			4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100		100		34,80	33,71	34,80	13,72	100,00	40,70					Dinas Kominfo		
			5	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100		100		77,00	76,86	75,00	30,88	97,40	40,18					Dinas Kominfo		
			Urusan Pemerintahan Wajib																		
		22	Kebudayaan																		
		SEMULA	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	22.310.873.000							100,00	87,67	100	5.332.983.776	100,00	23,90	Dinas Kebudayaan	realisasi dan nama indikator kinerja th 2020 di esakip tidak ada	
			1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Berkantoran									100,00								
			2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran									100,00								
			3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi									100,00								
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00	4.232.594.000							100,00	77,36	100	1.333.416.547	100,00	31,50	Dinas Kebudayaan	realisasi dan nama indikator kinerja th 2020 di esakip tidak ada	
			1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor									100,00								
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan									100,00								
			3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Umum									100,00								
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	1.746.713.000							100,00	91,73	100	483.695.360	100,00	27,69	Dinas Kebudayaan	realisasi dan nama indikator kinerja th 2020 di esakip tidak ada	
			1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD									100,00								
			2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD									100,00								
			3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi									100,00								
			4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD									100,00								

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			MENJADI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	22.310.873.000	25%		25%	11.142.638.407	25,00	10.524.005.574	100,00	87,67	100	5.332.983.776	100,00	23,90	Dinas Kebudayaan	realisasi dan nama indikator kinerja th 2020 di esakip tidak ada
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			25%		25%		0		100,00							
					Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25%		25%		0		100,00							
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100%	0,97	39,41%	39,41%	0,39	0%	100,00	0,00						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,95											
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,98											
					2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			100%	0,95	40,63%	40,43%	0,41	18,53%	100,00	45,83						
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0,98											
					3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	0,98	46,46%	46,17%	0,46	16,64%	100,00	36,04						
					4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	0,99	47,81%	42,23%	0,48	40,16%	100,00	95,10						
					5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100%	0,84	25,00%	25,00%	0,25	9,23%	100,00	36,92						
					6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100%	1,00	40,54%	42,44%	0,41	0,00%	100,00	0,00						
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1,00											
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,97											
					7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100%	1,00	51,45%	46,29%	0,51	36,13%	100,00	78,05						
					Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Bemeriksaan					1,00											
					8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			100%	1,00	69,53%	69,53%	0,70	15,01%	100,00	21,59						
					9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%	0,89	25,00%	25,00%	0,25	25,00%	100,00	100,00						
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,97											
					10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%	1,00	69,96%	69,96%	0,70	69,96%	100,00	100,00						
					11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	1,00	55,08%	55,03%	0,55	54,93%	100,00	99,82						
					12 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Bahan/Material			100%	1,00	33,64%	33,62%	0,34	33,62%	100,00	100,00						
					13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%	1,00	44,02%	43,88%	-	29,58%	0,00	67,41						
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1,00											
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0,17											

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
14			Penyediaan Jasa Surat Menegur			100%	1,00	50,00%	50,00%	0,50	50,00%	100,00	100,00								
15			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	0,78	41,75%	41,67%	-	33,73%	0,00	80,95								
16			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	0,94	38,92%	38,55%	-	38,50%	0,00	99,87								
17			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100%	0,65	44,55%	44,42%	-	34,61%	0,00	77,92								
18			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	0,94	41,21%	40,98%	-	40,96%	0,00	99,95								
19			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100%	1,00	44,27%	44,09%	-	19,83%	0,00	44,98								
Urusan Pemerintahan Wajib																					
23			Perpustakaan																		
		SEMULA	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang terstandar	69	616.228.658.193							100,00	95,40	49,00	5.806.682.025	71%	94%	DPAD		
			1. Pembinaan Perpustakaan*										100,00								
			2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca*										NA								
			3. Pemasarakatan Perpustakaan dan Minat Baca										100,00								
		MENJADI	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang terstandar (unit)	69	6.162.286.582	59	2.125.264.000	59	3.155.801.750	59	2.368.015.594	100,00%	75,04%	59,00	#NAME?	86%	#NAME?	DPAD		
			1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				100												DPAD	sub kegiatan diampu oleh balai layanan perpustakaan (cek baris bawah)	
			2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional				100	32,41	32,42	32	25,97	100%	80,10%					DPAD			
			3. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi				100	39,00	35,37	39	12,15	100%	34,35%					DPAD			
			4. Pengembangan Perpustakaan Deposit				100	31,32	31,59	31	31,23	100%	98,86%					DPAD			
			5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				100	62,66	62,53	61	22,49	97%	35,97%					DPAD			
			6. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan				100	46,00	44,43	46	43,18	100%	97,19%					DPAD			
			7. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0	0,00	0,00	-	0,00	0%	0,00%					DPAD			
		SEMULA	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (excl)	50.870	1.022.821.834.319							33,05	93,73	7.903,67	5.155.116.442	16%	50%	DPAD		
			1. Pelestarian Bahan Pustaka										100,00								
			2. Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi										100,00								
			3. DAK Pengembangan Sarana TIK Perpustakaan										0,00								
		MENJADI	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNDO	Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (excl)	50.870	10.228.218.343	10.673	397.257.950	500	353.844.000	1.324	147.201.448	264,80%	41,60%	10.673	5.699.575.840	21%	56%	DPAD		
			1. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				100	21,30	21,06	21,30	21,06	100%	100,00%					DPAD			
			2. Penerbitan Katalog Induk Daerah				100	17,84	17,65	17,84	17,56	100%	99,49%					DPAD			
			3. Penerbitan Bibliografi Daerah				100	50,66	50,55	50,66	50,08	100%	99,07%					DPAD			

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			100		34,30	33,96	34,30	6,75	100%	19,88%					DPAD		
				5	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			100		17,95	17,75	17,95	9,40	100%	52,96%					DPAD		
				6	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			100		29,98	29,81	29,92	26,02	100%	87,29%					DPAD		
		SEMULA	Program Layanan Perpustakaan	Jumlah anggota baru Perpustakaan (orang)	30.000	2.008.453.742.793								74,30	98,02	5.826,33	9.740.148.929	1942%	48%	DPAD		
				Meningkatnya Kualitas Layanan IIA	8									100,00		4,67						
			1	Layanan Perpustakaan										NA								
			2	Layanan Perpustakaan Menetan										100,00								
			3	Layanan Perpustakaan Ekstensi										100,00								
		MENJADI	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota baru Perpustakaan (orang)	30.000	20.084.537.428	8.033	3.107.897.000	500	1.544.695.900	577	1.042.523.221	115,40%	89,95%	8.033,00	13.890.569.150	27%	69%	Balai Yampus			
				Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) yang menindaklanjuti kerjasama	8		7		8		8		100,00%		7,00		88%					
			1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			100		40,26	45,66	40	30,82	100%	67,50%					Balai Yampus			
			2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100		52,25	52,25	52	41,07	100%	78,60%					Balai Yampus			
			Urusan Pemerintahan Wajib Kearsipan																			
		SEMULA	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	4.000	987.354.000								NA	NA	4000,00	945.595.550	100,00	95,77	DPAD	Tahun 2019 program ini menjadi Program Pelestarian dan Layanan Arsip	
			1	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip										NA	NA						program dais tahun 2021 masuk sheet urusan penunjang	
			2	Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip										NA	NA							
			Program Pelestarian dan Layanan Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	32.000	347.997.449.585								104,71	99,32	8188,50	1.198.337.250	25,59	0,34	DPAD		
			1	Pelestarian Arsip										100,00								
			2	Layanan Kearsipan										100,00								
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	32.000	3.479.974.496	8.000	668.021.992	500	548.056.000,00	800	502.148.751,00	160%	92%	24.377	2.368.507.993	76,18	68,06	DPAD			
			1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			100		32,20	32,91	32	31,66	100%	96,20%					DPAD			
			2	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis			100		63,50	63,00	64	57,27	100%	90,90%					DPAD			
			3	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis			100		30,25	30,06	30	29,98	100%	99,73%					DPAD			
			4	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui BANI			100		21,75	21,87	22	21,86	100%	99,95%					DPAD			
			5	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			100		55,80	54,34	56	38,74	100%	71,29%					DPAD			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan/Program Pengelolaan Arsip (2022)	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar (OPD/UPTD)	130	369.647.990.849			130		91		101,11	97,43	70,33	1.917.056.649	54,10	0,52	DPAD	Pada tahun 2022, nama programnya adalah program pengelolaan arsip		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1	Penilaian dan Penyusutan Arsip									NA	NA						Tidak ada Sub kegiatan di 2022.	
			2	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan									NA	NA						Tidak ada Sub kegiatan di 2022.	
			3	Pengelolaan Arsip									100,00							Tidak ada Sub kegiatan di 2022.	
			4	Pembinaan Kearsipan									100,00							Tidak ada Sub kegiatan di 2022.	
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
			Kelautan dan Perikanan																		
			1																		
		SEMULA	PROGRAM Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																		
			1	Pengembangan Budaya Babari																	
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya																		
			1	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	89.700	13.850.000.000									89.556	Rp 7.986.973.120	99,84%	57,67	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya																	
			3	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya																	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			produksi perikanan budidaya (ton)	89.700	13.850.000.000	98.389	7.236.705.625	17.940	Rp 2.463.341.480	18.050	Rp 2.214.323.400	100,61%	111,25%	98.389	Rp 17.438.002.145	110%	126%	Dinas Kelautan dan Perikanan
			1	Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100		33,50	Rp 694.673.000		34	Rp 615.488.925	100,00%	112,87%				Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100		88,01	Rp 314.550.000		88	Rp 210.660.295	100,00%	149,32%				Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah				100			Sub kegiatan tidak ada di 2022									BPTP	
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				100		52,93	Rp 1.270.829.080		53	Rp 1.205.695.330	100,00%	105,40%				BPTP	
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100		91,06	Rp 183.289.400		91	Rp 182.478.850	100,00%	1,00				BPTP	
		SEMULA	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			produksi perikanan tangkap (ton)	7063,00	13.260.700.000													
			1	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap																	
			2	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap																	
			3	Pengembangan perikanan tangkap																	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			produksi perikanan tangkap (ton)	7063,00	13.260.700.000	7.123	2.853.109.793	1.766	Rp 42.299.000	1.770	Rp 41.399.000	99,77%	97,87%	7123	Rp 5.766.243.063	101%	43%	Dinas Kelautan dan Perikanan
			1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				100			Tidak ada di 2022									Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				100			Tidak ada di 2023									Dinas Kelautan dan Perikanan	
			3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				100			Tidak ada di 2024									Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100		44,86	Rp 11.105.000	45	Rp 8.902.000	100,00%	80%					Dinas Kelautan dan Perikanan	
			5	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100		98,00	Rp 27.817.000	98	Rp 22.760.700	100,00%	82%					Dinas Kelautan dan Perikanan	
			6	Benyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan**			100		Tidak ada di 2024										Pelabuhan Perikanan Pantai	
			7	Belaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			100		45,20	Rp 42.299.000	45	Rp 41.399.000							Pelabuhan Perikanan Pantai	
		SEMULA	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	8201,00	886.800.000							#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#VALUE!	0,00	#VALUE!	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1	Pengolahan dan pemasaran produk perikanan									NA							
			Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/ta hun) Produksi	2605,00	8.700.000.000							122,61%	89,51%	3124,00	Rp 5.601.656.642	119,92	64,39	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1	Pengolahan hasil perikanan									100,00%							
			2	Pemasaran hasil perikanan									100,00%							
			3	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (RHS)									100,00%							
		MENUADI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/ta hun) Produksi	26,05	8.700.000.000	31,34	2.048.430.630	26,05	Rp 840.495.800	32	Rp 809.208.350	124,72%	96,28%	32,49	Rp 8.459.295.622	125%	97%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		53,42	51,34	53	48,56								
			2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100,00		63,04	60,41	63	58,43								
			3	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing			100,00		47,50	48,75	48	47,51								
			4	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		0,00	0,00	-	0,00								
			Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	313,00	2.650.000.000							NA	NA	NA	NA	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tercapai di 2018
		SEMULA	Program Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang berdistribusi 45%	90,00	14.300.000.000							102,33%	99,97%	88,00	Rp 5.419.863.043	97,78	37,90	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan									100,00%							
			2	Perbanyak Induk Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya									100,00%							
			3	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan									100,00%							
			4	Perbanyak Induk Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya									100,00%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang beredar/budidaya (%)	90,00	14.300.000.000	88,20	7.236.705.625	90,00	Rp 2.463.341.480	90	Rp 2.214.323.400	100,00%	89,89%	90,00	Rp 14.870.892.068	100%	104%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1 Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100	33,50%	31,19%	0	27,82%								Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100	88,10%	86,17%	1	58,07%								Dinas Kelautan dan Perikanan	
			3 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah				100	tidak ada sub kegiatan ini di 2022											bptpb	
			4 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				100	52,93%	50,83%	1	48,23%								bptpb	
			5 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100	50,83%	91,06%	0	91,06%								bptpb	
			6 Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100	33,50%	31,39%	0	27,82%								Dinas Kelautan dan Perikanan	
		SEMULA	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	70,00	7.250.000.000									4343,00	Rp 2.361.080.698	6204,29	32,57	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	50,00										10,00		20,00		Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										100,00%							
			2 Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan										100,00%							
			3 Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										100,00%							
			4 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi										100,00%							
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan(%)	70,00	7.250.000.000	30	1.137.229.314	14	Rp -	14	Rp -	100,00%	0,00%	1916,43	Rp 3.498.310.012	27,38	0,48	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100	tidak ada sub kegiatan ini di 2022												

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		
			2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			100		1,30	Rp		1	Rp									
			3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100		tidak ada sub kegiatan ini di 2022													
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan(%)	50,00	7.250.000.000	10	244.023.196	10,00	Rp 69.693.400	10	Rp 67.901.200	100,00%	97,43%	40,00	Rp 311.924.396	80%	4%	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		51,90	51,55	100		51,90	51,55	51,90	47,56									
			2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya		58,90	57,85	100		tidak ada sub kegiatan ini di 2022												
			3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		31,90	30,69	100		tidak ada sub kegiatan ini di 2022												
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PMWAKMAWAS)					30,17	29,06		30,17	29,00									
		SEMULA	Program Pengelolaan Pelabuhan		Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	3.673,00	2.950.000.000									5.822,00	Rp 404.401.744	158,51	13,71	Dinas Kelautan dan Perikanan	Target kinerja akhir periode RPJMD telah terlampaui di 2018 dengan anggaran hanya 5% dari plafon 2022	
			1	Pelayanan Pelabuhan Perikanan																		
			2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan																		
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	36,73	2.950.000.000	59,20	2.853.109.793	5,00	Rp 38.922.000	10	Rp 31.662.700	195,40%	81,35%	59,20	Rp 3.289.174.237	161%	111%	Dinas Kelautan dan Perikanan	Target kinerja akhir periode RPJMD telah terlampaui di 2018 dengan anggaran hanya 5% dari plafon 2022	
			1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			100			Tidak ada di 2022												
			2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			100			Tidak ada di 2023												
			3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			100			Tidak ada di 2024												
			4	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100			44,86		43	44,86	34,75								
			5	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100			98,00		97	98,00	79,61								
			6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan**			100			Tidak ada di 2024											Pelabuhan Perikanan Pantai	
			7	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			100			45,20		45	45,20	44,06								Pelabuhan Perikanan Pantai
			Urusan Pemerintah Pilihan Pariwisata																			
	2																					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semula	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	8377099,00	16.350.000.000									1848.548	7.675.208.576	22%	46,94	Dinas Pariwisata	Pemberlakuan PPKM selama pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis
			1 Promosi Pariwisata																	
			2 Pelayanan Informasi Pariwisata																	
			3 Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata																	
		Menjadi	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	8.377.099,00	16.350.000.000	96.458	382.768.000	1.256.565	379959750	1.265.799	96.568.150	100,73%	25,42%	96.458	8.154.544.726	1,15%	49,87%	Dinas Pariwisata	Pemberlakuan PPKM selama pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis
			1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					38,27	35,05	38,27	13,70								Dinas Pariwisata	
			2 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					56,09	51,80	20,00	0,11								Dinas Pariwisata	
			3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri					13,86	4,93	13,00	2,29								Dinas Pariwisata	
			4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					1,60	0,49	1,60	0,18								Dinas Pariwisata	
		Semula	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250,00	4.620.000.000	NA	NA					NA	NA	186	1.576.037.600	74%	34,11%	Dinas Pariwisata	
			1 Pengawasan Industri Pariwisata																	
			2 Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata																	
			3 Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata																	
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	2,45	77.000.000.000									1,8	4.199.137.552	16,8	5,45	Dinas Pariwisata	
			1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata																	
			2 Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata																	
			3 Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)																	
		Menjadi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250,00	4.620.000.000	190	574.018.800	195	270.141.000	211	32.112.000	108,21%	11,89%	190	846.593.800	74,40%	17,63%	Dinas Pariwisata	Pandemi covid-19 berdampak pada aktivitas pariwisata DIY, termasuk di bidang Usaha Jasa Pariwisata. Akibat pandemi ini tidak banyak UIP yang melakukan sertifikasi mandiri
				LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	2,45	77.000.000.000	1,5		0,59		1		227,12%		1,5	4.773.156.350	73,47%	6,20%	Dinas Pariwisata	
			1 Pengembangan Daya Tarik Wisata Ulindean Provinsi				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%						Dinas Pariwisata	
			2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				26,14	305.403.800	50,86	9,57	50,00	0,09	26,14%	17,10%					Dinas Pariwisata	
			3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				31,50	6.272.000	tidak ada				31,50%	13,74%					Dinas Pariwisata	
			4 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				43,91	136.941.000	22,72	20,38	22,72	10,41	43,91%	39,04%					Dinas Pariwisata	
			5 Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata				69,00	125.402.000	25,53	20,48	25,50	0,58	69,00%	38,16%					Dinas Pariwisata	
		Semula	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23.04	10.200.000.000	NA	NA					50,99%	58,66%	10,00	6.285.137.775	58,91	61,62	Dinas Pariwisata	
			1 Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata										100,00%							
			2 Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata										100,00%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			3	Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata																	
		Menjadi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23,04	10.200.000.000	10	697.258.000	23,04	984.695.000	7,90	694.632.300,00	34,29%	70,54%	10,00	7.677.028.075	43,40%	68,45%	Dinas Pariwisata	Angka realisasi merupakan data capaian tahun 2020. Untuk Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata pada tahun 2020 ini minus, maka tidak bisa dihitung. Sedangkan untuk jumlah desa wisata yang naik kelas pada tahun 2020 sebanyak 30 desa	
			1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				55,31	54,56	55,00	33,97								Dinas Pariwisata		
			2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				72,10	69,84	72,00	56,71								Dinas Pariwisata		
			3	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				69,22	63,79	68,00	63,78								Dinas Pariwisata		
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
3	3	SEMULA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0,15	166.170.928.000									0,1%	1.345.105.350	0,007	1%		Indikator program ada di dinas kebudayaan, capaian yang tercantum adalah capaian dari program yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2.209.769	50.853.760.800						NA	NA	2.210.046,00	1.390.799.400	100,01%	3%	Dinas Pertanian			
			1	Budidaya tanaman pangan																	
			2	Pengelolaan sumberdaya air																	
			3	Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan																	
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2.313.500	26.932.000.000								2.332.607	6.117.435.168	101%	23%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
			1	Budidaya tanaman pangan																	
			2	Standarisasi mutu produk pertanian dan pemasaran hasil tanaman pangan																	
			3	Pertanian terpadu joga agro techno park																	
		MENJADI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman pangan (ton)	2.313.500	26.932.000.000	2.314.312	13.310.164.900	1.329.735	20.857.784.000	1.225.532	3.745.331.246	92,16%	17,96%	2.314.312,00	23.172.931.314	100,04	86,04	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
			1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Akarant, dan Sarana Pendukung Pertanian			100		89	87	84	71	94,51%	81,36%							
			2	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan			100		83	83	10	1	12,05%	0,61%							
		SEMULA 2018	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	396.375	2.885.902.200							NA	NA	396.406,00	2.866.875.860	100,01	99,34	Dinas Pertanian		
			1	Budidaya tanaman hortikultura																	
		SEMULA	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	402.750	12.692.000.000							100,12%	99,90%	400.026,00	4.612.121.100	99,32	36,34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
			1	Budidaya Tanaman Hortikultura									100,00%								
			2	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura																	
		MENJADI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi hortikultura (ton)	402.750	12.692.000.000	402.259	6.461.338.750	165.207	1.497.017.500	156.970	1.379.493.645	95,01%	92,15%	402.259,00	12.452.953.495	99,88	98,12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
			1	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian			100														
			2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian			100		42	38	42	35	100,00%	91,17%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			100													
			4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			100		12	11		12	11	100,00%	99,38%					
		SEMULA 2018	Program Peningkatan Populasi Ternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	620.869	450.000.000								NA	NA	620.881,00	739.297.125	100,00	5,82	Dinas Pertanian
			1	Budidaya itik turi																
			2	Budidaya peternakan																
		SEMULA	Program Peningkatan Populasi Ternakan/ternak	Populasi ternak (Animal Unit)	628.870	13.600.000.000								97,11%	98,85%	606.784,00	3.637.292.175	96,49	26,74	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1	Budidaya peternakan										100,00%						
			2	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan										100,00%						
			3	Pengamanan produk pangan asal hewan										100,00%						
		MENJADI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi peternakan (Animal Unit)	628.870	13.600.000.000	631.093	13.310.164.900	627.127	20.857.784.000	634.942	3.745.331.246	101,25%	17,96%	631.093,00	20.692.788.321	100,35	152,15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			1	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian			100		89	87		84	71	94,51%	0,81					
			2	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan			100		83	83		10	1	12,05%	0,01					
		SEMULA	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	68.740	2.605.490.000								NA	NA	66.507,50	2.478.159.390	96,75	95,11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	69.290	9.713.000.000								91,15%	97,55%	62.907,00	4.229.876.205	90,79	43,55	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1	Kelembagaan petani tembakau (cukai)										100,00%						
			2	Budidaya Tanaman Perkebunan										100,00%						
			3	Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan										100,00%						
			4	Budidaya tanaman tembakau (cukai)										100,00%						
		MENJADI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi perkebunan (ton)	69.290	9.713.000.000	69.181	6.181.008.059	20.785	1.497.017.500	22.359	1.379.493.645	107,57%	92,15%	69.181,13	11.790.377.909	99,84	121,39	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			1	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian					42	38		42	35	100,00%	0,91					
			2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian																
			3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																
			4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani					11,6	11,33		12	11,26	1,00	0,99					
		SEMULA 2018	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)	300	450.000.000								NA	NA	300,00	438.332.200	100%	97,41	Dinas Pertanian
			1	Pembinaan SDM Peternakan										NA						
			2	Pembinaan SDM Tanaman Pangan										NA						
			3	Pembinaan SDM Holtikultura										NA						
		SEMULA	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	76	4.400.000.000										73,20	774.927.230	96,32	17,61	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				2	Pelatihan SDM Pertanian																
		MENJADI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	76	4.400.000.000	75	3.126.183.422	76,00	1.530.868.469	76,00	1.354.867.341	100,00%	88,50%	73,00	5.694.310.193	96,05	129,42	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
			1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			100		33,85	34	33,85	33	100,00%	96,90%							
			2	Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian			100		45,45	45	45,45	40	100,00%	87,58%							
			3	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			100		39,05	37	39,05	36	100,00%	97,78%							
		SEMULA	Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang bersertifikat yang bersertifikat yang	91	7.694.000.000							10090,80%	0,00	8.779,00	3.383.566.801	9647,25	43,98	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
			Program Pengembangan										0,00								
			1	Produksi Benih Tanaman Pangan									100,00%								
			2	Produksi Benih Tanaman Hortikultura									100,00%								
			3	Produksi Benih Tanaman Perkebunan									100,00%								
		MENJADI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang bersertifikat yang bersertifikat yang	91	7.694.000.000	89,08	13.310.164.900	33	20.857.784.000	44	3.745.331.246	134,12%	17,96%	87,79	20.439.062.947	96,47	265,65	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
			1	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian			100		89	87	84	71	94,51%	0,81							
			2	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan			100		83	83	10	1	12,05%	0,01							
		SEMULA	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (hektar)	500	200.000.000							NA	NA	502,44	170.818.252	100,49	85,41	Dinas Pertanian		
			1	Sertifikasi perbenihan tanaman pangan																	
			2	Sertifikasi perbenihan hortikultura																	
		MENJADI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (hektar)	900	2.150.000.000	802	18.012.388.501	554	20.857.784.000,00	615,9	3.745.331.246,00	111,17%	17,96%	802,3	21.947.493.249	89,14	1021%	Dinas Pertanian		
			1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			100		89,27	86,71	84	70,55	0,95	0,81							
			2	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan			100		83	83,00	10	0,51	0,12	0,01							
			3	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			100													BPTDK	
			4	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			100													BP3MBTP	
			5	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			100													BP3MBTP	
			6	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			100													BP3MBTP	
			7	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			100													BP3MBTP	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (buktas)	900	2.150.000.000						#DIV/0!	#DIV/0!	707,00	563.659.902	78,56	26,22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				1 Sertifikasi perbenihan tanaman pertanian									#DIV/0!	#DIV/0!							
		SEMULA		Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase PerTanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	265.000.000						NA	NA	99,91	264.604.700	105,17	99,85	Dinas Pertanian		
				1 Pengendalian OPT Tanaman Pangan																	
				2 Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura																	
				Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase PerTanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	2.070.000.000						101,65%	99,85%	96,57	940.162.300	101,65	45,42	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				1 Pengendalian OPT tanaman pertanian									100,00%								
				2 Penyediaan data dan informasi perlindungan tanaman pertanian									100,00%								
			MENJADI	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase PerTanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	2.070.000.000	96,42	688.638.275	95	50.700.000	98	50.314.000	102,96%	99,24%	96,57	1.414.509.875	101,65	68,33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan				100		85	85	85	84	100,00%	99,24%						
		SEMULA		Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Keahwanaan	Produksi bibit ternak (ekor)	50	3.776.455.000						NA	NA	52,00	3.882.084.447	104,00	102,80	Dinas Pertanian		
				Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Keahwanaan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	98	18.900.000.000						119,15%	99,64%	112,00	11.327.556.934	114,29	59,93	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				1 Produksi Bibit Ternak									100,00								
				2 Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan									100,00								
			MENJADI	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	98	18.900.000.000	100	1.701.841.550	98,00	369.047.000,00	100	358.520.688,00	102,04%	97,15%	100,00	13.387.919.172	102,04	70,84	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				1 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				100		92	92	92	86	100,00%	94,34%						
				2 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				100		4	4	4	4	100,00%	97,41%						
				3 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				100		48	47	48	46	100,00%	97,83%						
				4 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				100		69	69	69	68	100,00%	98,62%						
				5 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat				100						#DIV/0!	#DIV/0!					BPPTDK	
				Urusan Pemerintah Pilihan																	
		4		Kehutanan																	
				Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan		9232,00	4.165.000.000								4401,50	704.239.720	47,68	16,91	DLHK		
				Kehutanan tahun 2018		8,00								0,00		0,00					
				Program Perencanaan Dan Bina Kehutanan																	
				Penataan hutan																	
				Penatausahaan Produksi Hasil Hutan																	
				Pengelolaan Perhutanan Sosial																	
		SEMULA		Program Perencanaan Dan Bina Usaha Kehutanan (2020)	Persentase kawasan hutan tertata (%) Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat (%)								9847,00%	9807,00%	8803,00	273.779.200			DLHK		
													0,00		0,00	273.779.200					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				1	Penataan hutan																
				2	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan																
				3	Pengelolaan Perhutanan Sosial																
				4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	866,00	280.000.000													
						Persentase kawasan hutan tertata(%)	92,32	4.165.000.000	91,04	1.679.626.563	92,32	563.211.750	91	461.402.493,00	98,61%	81,92%	91,04	2.414.808.256	98,61%	58,0%	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
						Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat(%)	8,00		4,00	2,00	4		4	200,00%		4,00		50%			
				1	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan "Nezara"			100	95,76	51.001.000	95	50.743.867	99,49%	99,50%							
				2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			100	71.905.000	58,77	126.694.000	24	51.208.385	40,41%	40,42%						
				3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			100,00	3,04	2.043.000	3	1.850.338	90,46%	90,57%							
				4	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			100,00	20.009.000	16,15	14.579.000	16	14.517.828	99,57%	99,58%						
				5	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan**			100,00	0	0	-	0	0,00%	0,00%							
				6	Sertifikasi Sumber Benih			100,00	7.532.200	39,77	23.332.000	40	23.289.261	99,80%	99,81%						
				7	Sertifikasi Mutu Bibit			100,00	2.655.600	57,51	9.303.000	56	9.065.322	97,44%	97,45%						
				8	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit			100,00	292.239.500	77,1	336.259.750	71	310.728.492	92,40%	92,41%						
					SEMULA Program Pemanfaatan Potensi																
					Penataan hutan																
					Penatausahaan produksi hasil hutan																
					Pengelolaan perhutanan sosial																
					Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif																
					NA																
					2019																
					2020																
																				DLHK	
					SEMULA Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	1,00	5.453.670.000								465,00	5.469.588.911	46500,00	100,29	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
					2018																
					2019																
					2020																
																				DLHK	
					MENJADI NA																
					Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan hutan sumber daya	86,66	30.008.000.000	86,68	86,65	87		100,03%	0,00	86,67	8.156.505.336	100,01	27,18	DLHK		
					2018																
					Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (2019)																
					Perencanaan pengelolaan sumber daya hutan																
					Perlindungan hutan																
					rehabilitasi hutan																
					SEMULA Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (2020)	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan							10002%	8833,00%	8666,00	6.159.702.574			Balai KPH / DLHK		
					1 Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan								100,00								
					2 Pemanfaatan sumber daya hutan								9898,00%								
					MENJADI Program Pengelolaan Hutan (2022) Balai KPH	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	86,60	280.000.000	86,68	8.685.374.874	86,65	1.712.413.500	87	950.662.832,00	100,03%	55,52%	86,68	9.636.037.706	100,09%	3441%	Balai KPH, DLHK

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Mekar Brakasi			100		8,51	89.989.000	5	56.379.953,00	62,63%	62,65%						
			2	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH					22,17	1.094.078.500	13	664.222.596,00	60,71%	60,71%						
			3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			100		56,01	518.366.000	24	222.229.131	42,87%	42,87%						
			4	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					0,61	9.980.000	0	7.831.152	78,69%	78,47%						
			5	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati (2022-NA)			100													
			5	Pembinan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (2022-NA)			100													
		MENJADI	Program Pengelolaan Hutan (2022) Dinas LHK	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	86,60	280.000.000	86,68	1.679.626.563	86,65	563.211.750	87	461.402.493,00	100,03%	81,92%	86,68	2.141.029.056	100,1%	765%	DLHK	sudah digabung dengan program yng sama Balai KPH
			1	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara*			100		95,76	51.001.000	95	50.743.867	99,49%	99,50%						
			2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			100		58,77	126.694.000	24	51.208.385	40,41%	40,42%						
			3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			100		3,04	2.043.000	3	1.850.338	90,46%	90,57%						
			4	Pembinan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			100		16,15	14.579.000	16	14.517.828	99,57%	99,58%						
			5	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan**			100		0	0	0	0	0,00%	0,00%						
			6	Sertifikasi Sumber Benih			100		39,77	23.332.000	40	23.288.261	99,80%	99,81%						
			7	Sertifikasi Mutu Bibit			100		57,51	9.303.000	56	9.065.322	97,44%	97,45%						
			8	Pengawasan Peredaran Benih dan atau Bibit			100		77,1	336.259.750	71	310.728.492	92,40%	92,41%						
				Konservasi dan perlindungan Hutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	1,00	2.336.241.100	215					2150,00%	NA	14,00	4.012.970.830	1400,00	171,77	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
				2018																
				2019																
				2020																
				Pengelolaan Hutan Konservasi	Persentase hutan konservasi terkelola(%)	7709,00	3.642.872.000						4789,00	9893,00	0,00	1.380.266.900	0,00	37,89	DLHK	
				2018																
				Program Pengelolaan Hutan																
				Operasional teknis pengelolaan tahura bundar																
				Pengembangan pelayanan pemanfaatan tahura																
		SEMULA	Program Pengelolaan Hutan Konservasi (2020)	persentase hutan konservasi terkelola								10007,00%	9893,00%	7667,00	260.546.500			DLHK		
			1	Pengelolaan tahura bundar								100,00								
			2	pengembangan pelayanan pemanfaatan tahura								100,00								
			3	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH Tahura akses kelola hutan sosial (DAK)								100,00								
		MENJADI	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	persentase hutan konservasi terkelola	77,09	3.642.872.000	76,97	366.731.700	77,09	119.845.500	40	112.104.177,00	51,47%	93,54%	76,97	739.382.377	99,84%	20,30%		
			1	Pencegahan Penangulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			100	72.715.000	59,83	62.724.000	53	55.427.227	88,37%	88,37%						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi			100	68.477.500	39	57.121.500	39	56.676.950	99,23%	99,22%						
				Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1665000,00	3.368.673.000							978,00	0,00	772.237.600	0,00	22,92	DLHK	
				2019																
				Program pengembangan																
				Pengembangan perbenihan tanaman kehutanan																
				Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih/bibit/tanaman kehutanan																
			SEMULA	Program pengembangan pembibitan kehutanan (2020)	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)								13412,00%	978,00%	442600,00	393.089.550			DLHK	
				1 Pengembangan perbenihan tanaman kehutanan									100,00							
				2 Sertifikasi benih dan bibit tanaman kehutanan									100,00							
			MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (2022) Dinas LHK	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1665000	3.368.673.000	357280	1.679.626.563	35.000,00	563.211.750	6.500	461.402.493,00	18,57%	85,81%	357280	2.534.118.606	21,46%	75,23%	DLHK
				1 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara* (2021), Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (2022)			100		95,76	51.001.000	95	50.743.867	99,49%	99,50%						
				2 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			100		58,77	126.694.000	24	51.208.385	40,41%	40,42%						
				3 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			100		3,04	2.043.000	3	1.850.338	90,46%	90,57%						
				4 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			100		16,15	14.579.000	16	14.517.828	99,57%	99,58%						
				5 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan** (2022-NA)			100		0	0	-	0	0,00%	0,00%						
				6 Sertifikasi Sumber Benih			100		39,77	23.332.000	40	23.288.261	99,80%	99,81%						
				7 Sertifikasi Mutu Bibit			100		52,51	9.303.000	56	9.066.322	97,44%	97,45%						
				8 Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit			100		77,1	336.259.750	71	310.728.492	92,40%	92,41%						
				Urusan Pemerintah Pilihan																
				Energi dan Sumber Daya Alam																
	5		SEMULA	Program pengaturan dan pengembangan energi air tanah geologi dan pertambangan	Penduduk berakses energi listrik	N/A	40.255.370.000	N/A	N/A				N/A	N/A	9995	23.698.874.818	NA	58,87	Dinas PUPESDM	
					Penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	N/A		N/A					N/A		75		N/A			
					rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (m)	N/A		N/A					N/A		20		N/A			
					Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral (litin)	N/A		N/A					N/A		5		N/A			
					Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan (RT)	N/A		N/A					N/A		6577		N/A			
				Program pengaturan dan																
				Pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan																
				Pengaturan dan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan																
				Pendayagunaan air tanah dan geologi																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengaturan dan pengusahaan air tanah dan geologi																
				Pengaturan dan pengusahaan pertambangan																
				Peningkatan usaha pertambangan																
				Pengembangan energi skala kecil (DAKL Tahun 2019 Tahun 2020																
				MENJADI NA																
				SEMULA Program penyelenggaraan Energi dan kelistrikan	Penambahan jumlah rumah yang menikmati listrik (RT)	13848	56.953.964.800	10.011	2.756.363.350	0	-	-	-	0,00	0,00	10011	2.756.363.350	72,29	4,84	Dinas PUPESDM
					bangunan/ gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi (unit)	92		62						86,11%		62		67,39		Dinas PUPESDM
					penambahan jnin ketenaga listrikan sesuai ketentuan (jnin)	75		26						100,00%		26		34,67		Dinas PUPESDM
				1	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan				100,00					100,00%		100				DPU ESDM
				2	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan				100,00					100,00%		100				DPU ESDM
				3	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan Tahun 2018				100,00					100,00%		100				DPU ESDM
					Program penyelenggaraan energi															
					Pengawasan energi dan ketenagalistrikan															
					Pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan															
					Pengaturan dan pembinaan energi dan ketenagalistrikan															
					Pengembangan energi skala kecil (DAKL)															
					Program penyelenggaraan energi															
					Pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan															
					Pengaturan dan pembinaan energi dan ketenagalistrikan															
					Pengawasan energi dan ketenagalistrikan															
				MENJADI PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGA LISTRIKAN (2021)	Penambahan jumlah rumah yang menikmati listrik (RT)	13848	48.282.800.000	10011	2.756.363.350	11848	3.648.615.000,00	11.955	1.940.965.332,00	100,90%	53,20%	11955	12.185.127.746,00	86%	25%	DPU PUPESDM
					penambahan jnin ketenaga listrikan sesuai ketentuan (jnin)	75	6.371.164.800	26		60		39		65,00%						
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan				95,63		100									
					Pengendalian dan Pengawasan				98,64		100									
					Pembangunan Sarana Pemediaan				49,3		100									
				MENJADI PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	bangunan/ gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi (unit)	92	2.300.000.000	62		82	627.105.000,00	62	586.498.000,00	75,61%	94%	62	586.498.000,00	67%	25%	DPU PUP ESDM
				1	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				100		100									
				SEMULA Program pengelolaan air tanah dan geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah suilt air (dusun)	82	55.918.053.000	98	11.269.968.850					128,95%	86,73%	98	11.269.968.850	119,51	20,15	Dinas PUPESDM
					rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (Rn)	20			20					100,00%		20		100,00		Dinas PUPESDM

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
				penambahan jumlah ijin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (ijin)	75		21					110,53%		21		28,00			Dinas PUPESDM		
			1	Pendayagunaan Air Tanah			954					954		954					DPU ESDM		
			2	Pengawasan Air Tanah dan Geologi			100,00					100,00%		100					DPU ESDM		
			3	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi Tahun 2018			100,00					100,00%		100					DPU ESDM		
				Program pengelolaan air tanah dan pengawasan air tanah dan geologi																	
				Peningkatan perlindungan air tanah dan geologi																	
				Pendayagunaan air tanah																	
				Program pengelolaan air tanah dan pengawasan air tanah dan geologi																	
				peningkatan perlindungan air tanah dan geologi																	
				MENJADI PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN																	
				Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	82	33.864.021.000	98	11.269.968.850	79	1.364.019.000,00	112	1.291.373.324,00	141,77%	94,67%	112	21.154.285.518,00	137%	62%	DPU ESDM		
				rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (m)	< 20	15.672.657.000	20		20			100,00%									
				penambahan jumlah ijin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (ijin)	75	6.381.375.000	21		60			60,00%									
			1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Kawasan Air Tanah					100			100									
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran Pengaliran Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah					100			100									
				SEMULA Program Pengelolaan pertambangan																	
				Penambahan jumlah ijin usaha pertambangan yang baik atau benar (ijin)	40	12.747.140.000	11	823.306.100				100,00%	91,48%	11	823.306.100	27,50	6,46		Dinas PUPESDM		
				Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan (%)	78		7.686					10113,16%		7686		9853,85			Dinas PUPESDM		
			1	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan			100,00					100,00%		100					DPU ESDM		
			2	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan			9.759					9759,00%		9759					DPU ESDM		
				Program pengaturan dan pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan																	
				Pengaturan dan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan																	
				Pendayagunaan air tanah dan geologi																	
				Pengaturan dan pengusahaan air tanah dan geologi																	
				Pengaturan dan pengusahaan pertambangan																	
				Peningkatan usaha pertambangan																	
				Pengembangan energi skala kecil (DAK)																	
				Program pengelolaan pertambangan																	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			Pengawasan dan pengendalian perusahaan pertambangan																	
			Pengaturan dan pembinaan perusahaan pertambangan																	
			Program pengelolaan pertambangan																	
			Pengaturan dan pembinaan perusahaan pertambangan																	
			Pengawasan dan pengendalian perusahaan pertambangan																	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penambahan jumlah ijin usaha pertambangan yang baik dan benar (ijin)	40	8.147.140.000	11	823.306.100	33	1.552.777.000,00	14	1.467.879.629,00	42,42%	94,53%	33,0	5.120.583.243,00	83%	63%		
				Persentase perusahaan kawasan peruntukan pertambangan (%)	7,8	4.600.000.000	8		7,7		8		101,04%		7,8					
			1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat					100		100									
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan					100		100									
		SEMULA	program pengawasan dan pengendalian energi geologi air tanah dan pertambangan	Tertib ijin usaha pertambangan (ijin)	12	3.898.000.000	N/A	N/A					N/A	N/A	12	2.780.127.232	100,00	71,32		Dinas PUPESDM
				Tertib ijin perusahaan air tanah (ijin)	15		N/A						N/A		15		100,00			Dinas PUPESDM
				Tertib ijin ketenagalistrikan (ijin)	15		N/A						N/A		15		100,00			Dinas PUPESDM
			Program pengawasan dan pengendalian pertambangan			100														
			Pengawasan dan pengendalian air tanah dan energi			100														
			Pengawasan dan pengendalian energi dan ketenagalistrikan Tahun 2019			100														
			Tahun 2020																	
		MENJADI	NA					0	-	-	-	0,00	0,00							
	6	SEMULA	Urusan Pemerintah Pilihan Perdagangan																	
			Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	327,48	12.300.000.000							130,28%	99,39%	410,06	3.516.904.939	125,22	28,59		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor									100,00%								
		2	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri									100,00%								
		3	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor																	
		4	Kerjasama dan pemasaran produk ekspor																	
3	30	2	MENJADI	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	327,48	12.300.000.000	521,04	122.429.000	81,87	17.706.000	147	12.093.000	178,97%	68,30%	521,04	3.651.426.939	159,11%	28,68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			100		63,80	62,71	64	42,83									
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	327,48	12.300.000.000	521,04	654.264.500	81,87	75.580.000,00	147	193.146.000,00	178,97%	255,55%	521,04	4.171.169.439	159,11%	28,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			1	Pameran Dagang Internasional/Regional			100,00														
			2	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Inovasi			100		100,00	0,00	95	87,93									
			3	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			100		59,00	57,69	59	31,61									
			SEMULA	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Bn. Miliar)	2,50	58.100.000.000						66,15%	99,98%	1,29	5.346.579.526	51,60	9,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			1	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri			10						100,00%								
			2	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri									100,00%								
			3	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (2018)																	
			4	Penguatan perdagangan dalam negeri																	
			5	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (2019)																	
			6	Pemasaran perdagangan dalam negeri									n/a								
			7	Pelatihan dan kemitraan perdagangan dalam negeri									n/a								
			MENJADI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Bn. Miliar)	2,50	58.100.000.000	2,475	653.709.650	0,63	0,00	0	129.266.500,00	21,59%	#DIV/0!	2,48	6.129.555.676	99%	10,55%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			95		39,42	0,00	39	10,71									
			2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			100		2022 tidak ada												
			SEMULA	Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (Sk)	5,46	4.300.000.000								1,93	1.534.336.848	164,65%	36%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			1	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok																	
			2	Perlindungan Konsumen																	
			MENJADI	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (Sk)	5,46	4.300.000.000	1,125	249.576.000	5,46	215.749.000,00	2	201.409.845,00	35,53%	93,35%	1,125	1.985.322.693	179,40%	46,17%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			100		68,17	67,26	68	61,79									
			2	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			100		1,12	0		1	1,05								
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
			Perindustrian																		
1		7	SEMULA	Peningkatan Teknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	18,00	900.000.000						NA	NA	18	876864138	100	97,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				Program Peningkatan Teknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna(ATG) yang dimanfaatkan	30,00	4.350.000.000								42	2135854279	140%	49%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			1	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna									100%								
			2	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit									100%								

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					6		7		8		9		10		11		12					
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1			Menjadi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna(ATGT) yang dimanfaatkan	30,00	4.350.000.000	39,00	8.103.893.400			15	443.746.280	187,50%	24,88%	39	10683493959	130%	246%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			100,00		8	1.783.338.500	56	48,22									
				2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			100,00		56,31	0	45	8,33									
				3.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			100,00		55,85	53,9	59	51,61								BPTTG	
2			Semula	Program Pembiayaan Industri Logam Mesin Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	2.632.754,00	300.000.000			59,93	54,8			NA	NA	2637845,34	295717200	100,19	98,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				1	Pengembangan dan pembinaan industri kecil menengah logam mesin elektronika dan telematika																	
					Pembiayaan Industri Agro Tekstil Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	10091.909	2.975.000.000							NA	NA	9684.292,77	3489031000	96%	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				1	Pengembangan dan pembinaan industri kecil menengah agro tekstil kimia dan aneka																	
				2	Pengelolaan hak kekayaan intelektual																	
					Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	13.773.585,00	13.500.000.000							94,89%	82,97%	12.561.595,48	5927529554	91%	44%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				1.1	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro																	
				2.1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																	
				3.1	Kemitraan IKM Agro																	
				4.1	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam Sandang dan Aneka																	
				5.1	Kemitraan IKM Logam Sandang dan Aneka																	
			Menjadi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	13.773.585,00	13.500.000.000	13.503.514,00	8.103.893.400			15430428	443.746.280	100,00%	96,14%	13.503.514,00	14475169234	98%	107%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				1.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			100		1543042	1.783.338.500	56	48,22									
				2.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			100		56,31	0	45	8,33									
				3.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			100		55,85	53,9	59	51,61								bpptg	
3			Semula	Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra yang dibina	180,00	1.650.000.000	NA	NA	59,93	54,8			2,31	92,39%	754	628600801	418,89	38,1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				1.1	Edukasi dan Advokasi HKI									100,00%								
				2.1	Pelayanan Pendaftaran HKI									100,00%								
			Menjadi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra yang dibina	180,00	1.650.000.000	367	8.103.893.400			50	443.746.280								Disperindag	
				3.1	Kemitraan IKM Agro			100		45	1.783.338.500											
				4.1	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam Sandang dan Aneka			100		2022 tdk ada												
				5.1	Kemitraan IKM Logam Sandang dan Aneka			100		2022 tdk ada												
					Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					2022 tdk ada			59	51,61							BPPTG	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
4		Semula	Program Pengembangan Kearifan	1.1 Pengembangan Industri Kreatif					59,93	54,8											
		Menjadi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	Prosentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan		5,82	14.345.234.497					34,60%	9,08%							Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			1.1 Pengembangan Industri Kreatif			9,4						29,11%									
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
			Transmigrasi																		
		Semula	Program Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran		53.950	22.154.357.800							35.033,00	10.322.241.570	64,94%	46,59			Disnakertrans	
				Jumlah penempatan tenaga kerja perluasan kerja dan penempatan transmigrasi (RKPd)		NA								40,00		NA					
			1 Penempatan Tenaga Kerja																		
			2 Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja																		
			3 Pembentukan Kesempatan Kerja																		
			4 Penyelenggaraan Transmigrasi																		
			5 Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia																		
			6 Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus																		
			7 Pemantauan Lembaga Penempatan																		
			8 Pengurangan pengangguran melalui padat karya																		
			9 Pemberdayaan penyandang disabilitas																		
			10 Pembentukan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas																		
			11 Pembinaan lembaga penempatan																		
		Menjadi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi		53.950	22.154.357.800	13.755	143.220.000	500	148.064.500	606	145.738.569	82,51%	98,43%	48.788,00	10.611.200.139	90,43%	48%		Disnakertrans
			1 Perluasan Kesempatan Kerja					100		2	0,29		2	0,24							
			2 Pengawasan dan Penendalian LPTKS					100			tidak ada di 2022										
			3 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					100		37,00	35,00	37	34,48								
			4 Job Fair/Bursa Kerja					100			tidak ada di 2022										
			5 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					100		35,00	33,41	35	33,02								
			6 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					100		37,00	35,00	37	34,48								Blkpp
			7 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan							5,00	0,46	5	0,44								
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi		53.950,00	22.154.357.800	13755	376.317.300	500	156.264.000	606	154.308.020	121,20%	98,75%	48.788,00	10.852.866.890	90,43%	48,99		Disnakertrans
			1 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					100		36	34,68	36	34,25	100%							
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
			Penunjang Urusan																		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
					Keistimewaan																	
					Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur																	
					Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur		100,00	1.500.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Sekretariat Daerah	
					Kelembagaan Pemerintah Daerah																	
		SEMULA			Program Penataan Kelembagaan		NA	16.632.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Sekretariat Daerah / Biro	
					Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah		88,00		88,65	600.370.920			101,90	75,11	88,65		600.370.920	100,74	3609,73			
					Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota				100	100												
					Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan				100	100												
					Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				100	100												
					Program Peningkatan Budaya Pemerintahan		79,00	3.985.000.000	82,9	322.653.480			106,28	34,88	82,90		322.653.480	104,94	8,10		Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
					1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				100	100												
					2 Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah				100	100											Badan Kepegawalan Daerah	
					3 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur				100	100											Badan Pendidikan dan Pelatihan	
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		88,00	16.632.000.000	8866	600.370.920	87,50	3.031.542.400,00	88	2.614.740.260,00	100,00	86,25	87,50	2.614.740.260	99,43	15,72		Biro Organisasi
					Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY (%)		79,00	3.985.000.000	NA	NA												Biro Organisasi
					1 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah*					100												Biro Organisasi
					2 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota*					100												Biro Organisasi
					3 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan*					100												Biro Organisasi
					4 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan*					100												Biro Organisasi
					5 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*					100												Biro Organisasi
					6 Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah,					100												Badan Kepegawalan Daerah
					7 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur					100												Badan Pendidikan dan Pelatihan
					PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN		70,00	4.400.000.000	0	-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Paniradyo Kaistimewan
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		95,00	4.800.000.000	91,67	139.202.300					114,59	12,65	91,67	139.202.300	96,49	2,90		Paniradyo Kaistimewan

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				100														
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				100														
			Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	95,00	6.500.000.000	95,45	223.805.900				119,31	14,92	95,45	223.805.900	100,47	3,44			Paniradyo Kaistimewan	
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100														
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100														
			Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata	95,00	6.500.000.000	93,75	297.280.600				117,19	19,82	93,75	297.280.600	98,68	4,57			Paniradyo Kaistimewan	
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				100														
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan				100														
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				100														
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				100														
			Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100,00	15.721.412.000	100	2.330.913.675				100,00	14,83	100,00	2.330.913.675	100,00	14,83			Paniradyo Kaistimewan	
				Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi	75,00		94					136,23		94,00		125,33					
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				100														
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan				100														
			Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Presentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	60,00	2.603.588.000	NA	NA				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan teromohi	60,00	1.878.000.000	NA	NA				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
			Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	100,00	4.461.000.000	NA	NA				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah (biro Organisasi)
			Program Peningkatan Pelayanan Paramparapraja	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	78,00	10.500.000.000	87	903.718.200				117,57	43,03	87,00	903.718.200	111,54	8,61			Paniradyo Kaistimewan	
			Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan				100														
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	96,00	4.210.000.000	94,59	1.953.958.000				100,63	229,88	94,59	1.953.958.000	98,53	46,41			Paniradyo Kaistimewan	
			Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				100														

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			MENJADI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100,00	15.721.412.000	100	2.330.913.675	100,00	3.250.000.000,00	100	14.845.902.525	100,00	96,25	100,00	14.845.902.525	100,00	21,70	Paniradyo Kaistimewan	
					Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi Indeks kepuasan layanan kepada Paramanaraia	75,00	15.721.412.000	94,00	2.330.913.675	72,00	3.250.000.000,00	87		121,08		87,18		161,44		Paniradyo Kaistimewan	
					Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	78,00	10.500.000.000	87,00	903.718.200	76,00	2.300.000.000,00	91		119,61		90,90		153,34		Paniradyo Kaistimewan	
					Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata	95,00	4.800.000.000	91,67	139.202.300	90,00	1.200.000.000,00	100		111,11		100,00		116,96		Paniradyo Kaistimewan	
					Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	95,00	6.500.000.000	93,75	297.280.600	90,00	1.700.000.000,00	88		97,22		87,50		102,34		Paniradyo Kaistimewan	
					Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	95,00	6.500.000.000	95,45	223.805.900	90,00	1.700.000.000,00	95		106,06		95,45		111,64		Paniradyo Kaistimewan	
					Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95,00	4.210.000.000	94,59	1.953.958.000	95,00	900.000.000,00	95		100,00		95,00		105,26		Paniradyo Kaistimewan	
					Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	100,00	4.461.000.000	NA	NA	100,00	1.125.000.000,00	100		100,00		100,00		100,00		Paniradyo Kaistimewan	
				1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara*			100		100		100		100							
				2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara*			100		100		100		100							
				3	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan*			100		100		100		100							
				4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*			100		100		100		100							
				5	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang*			100		100		100		100							
				6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang*			100		100		100		100							
				7	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*			100		100		100		100							
				8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan s.d.Diy*			100		100		100		100							
				9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan*			100		100		100		100							
				10	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan*			100		100		100		100							
				11	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan*			100		100		100		100							
				12	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang*			100		100		100		100							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Edirevitalisasi*			100		100		100		100							
	3			Kebudayaan																
		SEBELUM	Program Sejarah Bahasa Sastra Dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah direvitalisasi (tema)	15,00	206.243.944.000	12,00	36.199.563.962				100,00	90,70	12,00	36.199.563.962	80,00	17,55			Dinas Kebudayaan
				Jumlah sumber sejarah karya bahasa sastra koleksi permuseuman yang direvitalisasi dibanding yang	NA		NA					NA		NA		NA				
				Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	15,00		9,00					100,00		9,00		60,00				
				Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,70		76,00					12666,67		76,00		10857,14				
			1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			100,00													
			2	Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra			100,00													
			3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman			100,00													
		SEMULA	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi (berkas)	2000	14.883.200.000	NA	NA				100,00	102,84	2000	2.056.894.718	100,00	13,82			Dinas Kebudayaan
			Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi (berkas)	2000	14.883.200.000	2186	3.139.088.400				109,30	109,00	2186,00	3.139.088.400	109,30	21,09			DPAD
			1	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten			100													
		MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	Jumlah Arsip dan bahan pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	2000	14.883.200.000	NA	NA	2000	3.456.000.000,00	2.000	20.306.572.066	100,00	587,57	2000	20.306.572.066	100,00	136,44		DPAD
			1	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten*					100		100		100							
			2	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya*					100		100		100							
			3	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*					100		100		100							Disnakertrans
			4	Pengembangan Industri Kreatif*					100		100		100							Disperindag
			5	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia					100		100		100							Dinas Pariwisata
			6	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya					100		100		100							Dinas Pariwisata
			7	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya					100		100		100							Dinas Pariwisata
			Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0,9	61.765.280.000	0,8	11.640.838.370				114,29	97,40	0,80	11.640.838.370	88,89	18,85			Dinas Kebudayaan
				Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh	91,27							NA		NA		NA				
			1	Pengelolaan Museum Sonobudoyo					100											Dinas Kebudayaan
			2	Pengembangan Museum Sonobudoyo					100											Dinas Kebudayaan
			Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (KCI)	15,17	450.337.309.681	29,78	183.161.315.760				225,61	236,24	29,78	183.161.315.760	196,31	40,67			Dinas Kebudayaan

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya			100													
			2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			100													
			3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			100													
			4	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			100													BPBD
				Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (%)	15,17	450.337.309.681	NA	32.426.991.803			109,80	86,28	12,32	38.606.616.594	81,21	8,57			Dinas PTR
			1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																
				Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (%)	15,17	450.337.309.681	NA	272.120.000			109,80	86,28	12,32	38.606.616.594	81,21	8,57			Dinas Koperasi
			1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																
				Program Pengelolaan Taman Budaya	Persentase even budaya tingkat Provinsi nasional internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya (NCL) Jumlah Taman Budaya di Kah/Kota	12,79	762.000.000.000	9,15	5.821.612.940			117,46	2,55	9,15	5.821.612.940	71,54	0,76			Dinas Kebudayaan
						2,00						NA	NA		NA					
			1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yayasakarta																
				Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibanding jumlah seluruh program dan kegiatan	100	40.184.640.000	99,30	1.992.745.467			100,22	25,63	99,30	1.992.745.467	99,30	4,96			Dinas Kebudayaan
					Jumlah Kerjasama yang direalisasikan dalam tahun	35		25				100,00		25,00		71,43				
			1	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan																
			2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan																
			3	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya																
				Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdasarkan nilai (NCL) Pemanfaatan lahan pekarangan (Kah/Kota)	0,15	166.170.928.000	NA	NA			NA	81,36	NA	21.800.527.060	NA	13,12			Dinas Kebudayaan
						NA		NA				NA		NA		NA				
			1	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional																
				Program Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis nilai (NCL)	48,42	173.389.280.000	NA	NA			145,19	50,39	63,00	14.090.335.651	130,11	8,13			Dinas Kebudayaan
				Program Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter (NCL)	48,42	173.389.280.000					NA	NA	NA	NA	NA	NA			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			1	Pembinaan Muatan Lokal																
			2	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yayasakarta																
		SEMULA		Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Seni	Persentase nilai adat tradisi dan seni yang sudah dimanfaatkan (NCL)	26,21	100.188.000.000	NA	NA			100,00	63,03	26,21	63.152.022.745	100,00	63,03			Dinas Kebudayaan
		SEMULA		Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	1,81	69.800.000.000	NA	NA			100,00	5,10	1,81	3.558.016.750	100,00	5,10			Dinas Kebudayaan

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	310		NA	NA					NA	NA	350,00		112,90			
				Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	NA		NA	NA					NA	NA	NA		NA			
		SEMULA	Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase nilai adat/tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	30,86	1.139.994.700.800	29,00	35.271.221.030					101,79	2444,79%	29,00	35.271.221.030	93,97	3,09	Dinas Kebudayaan	
				persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	2,06		1,98						102,59	3509,16%	1,98		96,12		Dinas Kebudayaan	
				Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	400								NA		NA		NA		Dinas Kebudayaan	
				Jumlah desa mandiri budaya (desa)	20		10						100,00		10,00		50,00		Dinas Kebudayaan	
			1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya			100													
			2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni			100													
			3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya			100													
			4	Penghargaan Seniman dan Budayawan			100													
			5	Festival Kebudayaan Yogyakarta			100													
			6	Gelar Budaya Jojela			100													
			7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah			100													
			8	Selendang Sutera			100													
			9				100													
			10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat			100													
			11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni			100													
			12	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi			100													
		MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URBISAN KEBUDAYAAN*	Persentase nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	30,86	1.139.994.700.800	29,00	35.271.221.030	29,67	198.124.864.000	30	1.618.276.931,00	100,00	0,82	29,67	1.618.276.931	96,14	0,14	BPBD	
			1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*					100,00			100	100,00							
			2	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*					100,00		67	67,00								
		SEMULA	Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	400	1.139.994.700.800	NA	NA	NA	NA	100	838.160.080,00	NA	NA	100,00	838.160.080	25,00	0,07	Bakesbangpol	
			1	Pembinaan Jaga Warga			842,00												Bakesbangpol	
			2	Gelar Seni Budaya Daerah															Badan Penghubung Daerah	
		MENJADI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan,	Terselenggaranya pembangunan ketahanan sosial budaya di DVC	400	1.139.994.700.800	NA	NA	NA	NA	100	838.160.080,00	NA	NA	100,00	838.160.080	25,00	0,07	Bakesbangpol	
			1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya					100,00		100								Bakesbangpol	
			2	Pembinaan Jagawarga					100,00		100								Satuan Polisi Pamong Praja	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana (titik)	30	75.160.160.000	20	5.047.919.345	25	17.452.800.000	25	256.621.637.367	100,00	1470,38	25	256.621.637.367	83,33	341,43	Dinas Kebudayaan	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya					100,00		100		100,00							
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya					100,00		100		100,00							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			3	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital					100,00		100		100,00							
		MENJADI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	15	206.243.944.000	12	36.199.563.962	13	47.891.520.000,00	13	256.621.637.367,00	100,00	35,00	13	256.621.637.367	86,67	5,75	Dinas Kebudayaan	
				Jumlah karya bahasa dan sastra yang difestivasi	15	206.243.944.000	NA	36.199.563.962	13		14	107,69	14				93,33			
				Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,70	206.243.944.000	76	36.199.563.962	0,65		1	123,08	1				114,29			
				Persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang difestivasi	15,17	450.337.309.681	29,78	183.161.315.760	14,18	124.921.102.765	34	239,77	34				224,13			
				Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana (Unit)	30	75.160.160.000	NA	NA	25	17.452.800.000	25	100,00	25				83,33			
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (persen)	100	40.184.640.000	99,30	1.992.745.467	99,08	9.331.200.000	100	100,93	100				100,00			
				Realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya (Kerja Sama)	35	40.184.640.000	25	1.992.745.467	30		30	100,00					85,71			
				Jumlah Desa Mandiri Budaya	20	1.139.994.700.800	10	35.271.221.030	15	100.614.400.000,00	18	120,00	18				90,00			
				persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1,81	69.800.000.000	1,98	35.271.221.030	2,00	100.614.400.000,00	2	100,00	2				110,50			
				Persentase Nilai Adat Tradisi Dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi (Persen)	30,86	1.139.994.700.800	29,00	35.271.221.030	29,67	198.124.864.000	32	106,88	32				102,75			
				Indeks kepuasan pengunjung Museum Sonobudoyo (Indeks)	0,900	61.765.280.000	0,800		0,800	14.342.400.000,00	1	112,50	1				100,00			
				Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh	91,27	61.765.280.000	NA	NA	80,16		91	113,86	91				100,00			
				persentase even budaya tingkat provinsi nasional internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	12,79	762.000.000.000	15,9	5.821.612.940	10,29	120.000.000.000,00	10	100,00	10				80,45			
			1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*					100,00		100	100,00								
			2	Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra*					100,00		100	100,00								
			3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman*					100,00		100	100,00								
			4	Penelembangan Bahasa Sastra					100,00		100	100,00								
			5	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya*					100,00		100	100,00								
			6	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya*					100,00		100	100,00								
			7	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*					100,00		100	100,00								
			8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya*					100,00		100	100,00								
			9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*					100,00		100	100,00								
			10	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan*					100,00		100	100,00								

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				11	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan*					100,00		100		100,00							
				12	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya*					100,00		100		100,00							
				13	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya*					100,00		100		100,00							
				14	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni*					100,00		100		100,00							
				15	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya*					100,00		100		100,00							
				16	Penghargaan Seniman dan Budayawan*					100,00		100		100,00							
				17	Festival Kebudayaan Yogyakarta*					100,00		100		100,00							
				18	Gelar Budaya Yogyakarta*					100,00		100		100,00							
				19	Pubikasi Seni dan Budaya Daerah*					100,00		100		100,00							
				20	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi*					100,00		100		100,00							
				21	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Alam Masyarakat*					100,00		100		100,00							
				22	Selendang Sutra*					100,00		100		100,00							
				23	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni*					100,00		100		100,00							
				24	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya*					100,00		100		100,00							
				25	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*					100,00		100		100,00							
				26	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital*					100,00		100		100,00							Dinas Kominfo
				27	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia					100,00		100		100,00							Dinas Koperasi
				28	Pengembangan Kewirausahaan Desa					100,00		100		100,00							Dinas Koperasi
				29	Pengembangan Ekonomi Perumuan*					100,00		100		100,00							Dinas Koperasi DP3AP2
				PROGRAM PENYELINGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai - nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (%)	51,60	20.163.021.500	45,20	1.683.146.500	51,59	3.124.450.000,00	70	5.549.369.197,00	134,99	177,61	69,64	5.549.369.197	134,96	27,52	Dinsos
				1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*					100,00		100									
		SEMULA	Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Implementasi model global gotong royong (dESa)		6	213.216.000							100,00	94,90	6,00	213.216.000				Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
			1	Pengembangan Kewirausahaan Desa		100															
		MENJADI	PROGRAM PENYELINGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah desa global gotong royong (Desa)	8,00	2.906.900.000	8	136.372.000	6	364.000.000,00	6	224.703.000,00	100,00	61,73	6,00	224.703.000	75,00	7,73		Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
			1	Pengembangan Kewirausahaan Desa*						100		100		100,00							
				Pertanahan																	
		SEMULA	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	13877		103.067.866.000	10863	1.967.437.637					95,13	9,37	10863	1.967.437.637	78,28	1,91		Dinas PTR
				Bidang Dokumen tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diwilayah	66			37,00						100,00		37,00		56,06			
				Penurunan Ketidaksihlokan penggunaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	40			55						100,00		55		137,50			
			1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100													

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan			100													
			3	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan			100													
			4	Pengawasan Tanah Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			100													
			5	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan			100													
			6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan			100													
			Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Peningkatan pemanfaatan tanah desa (%)	NA	NA	NA	NA			100,00	6,13	5,10	270.102.000	NA	NA	Dinas PTR		
				Bidang Tanah desa yang didaftarkan di BPN (bidang)	800	34.405.270.000	NA	NA												
				Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20,41	8.000.000.000	7,02	477.436.000			68,82	31,83	7,02	477.436.000	34,39	4,77	Dinas PTR			
				Persentase pengajuan permohonan surat kekancingan yang ditindaklanjuti	100	2.000.000.000	150				150,00		150,00		150,00					
			1	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	persentase pengajuan permohonan surat kekancingan yang ditindaklanjuti (%)			100												
			2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			1001													
			Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan		Persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100	1.367.252.000	NA	NA			100,00	107,57	100,00	1.470.763.800	100,00	107,57	Dinas PTR		
			Program Sarpras Keistimewaan Urusan Pertanahan		persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100	2.200.000.000	NA	NA			100,00	283,01	100,00	566.023.100	100,00	25,73	Dinas PTR		
		MENJADI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan		Bidang Tanah kasultanan/ kadipaten yang sudah didaftarkan (bidang)	13877	103.067.866.000	10863	1.967.437.637	12619	20.000.000.000,00	13.710	4.648.860.711,00	108,65	13,00	13710	4.648.860.711	98,80	4,10	DPTR
				Tanah kasultanan/ kadipaten yang dipelihara (dokumen)	66		37		52	1.000.000.000,00	52		100,00		52,00		78,79			
				Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan/ kadipaten (bidang)	40		55		50,00		50		100,00		50,00		125,00			
				Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20,41	8.000.000.000	7,02	477.436.000	15,31	2.500.000.000,00	653		4266,30		653,17		3200,24			
				Bidang Tanah desa yang didaftarkan di BPN (bidang)	800,00		150		5000	10.000.000.000,00	1.625		32,50		1625		203,13			
				persentase pengajuan permohonan surat kekancingan yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100	500.000.000	100		100,00		100,00		100,00			

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	100	2.200.000.000	NA	NA	100	500.000.000	100		100,00		100,00		100,00			
				persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanian																
			1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatan*					100,00		96		96,33							
			2	Pemeliharaan Dokumen Pertanian*					100,00		100		100,00							
			3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanian Kasultanan dan Kadipatan*					100,00		100		100,00							
			4	Pengawasan Tanah Kasultanan Tanah Kadipatan dan Tanah Desa*					100,00		100		100,00							
			5	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanian*					100,00		100		100,00							
			6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanian*					100,00		100		100,00							
			7	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian*					100,00		100		100,00							
			8	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggusuran Tanah Kasultanan dan Kadipatan*					100,00		100		100,00							
			9	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanian Tanah Kasultanan Tanah Kadipatan dan Tanah Desa*					100,00		100		100,00							
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian*					100,00		100		100,00							
		SEMULA	1	Penanganan Keberatan dan sengketa Pertanian Tanah Kasultanan Tanah Kadipatan dan Tanah Desa		NA	NA	100	359.413.057											Biro Hukum
			2	Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanian	Penanganan sengketa tanah kasultanan tanah kadipatan dan tanah desa : 2 putusan dari 2 putusan	NA	NA	NA	NA											Biro Hukum
		MENJADI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Perentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20,41	10.000.000.000	7,02	477.436.000	15,31	2.500.000.000,00	100	343.540.900,00	653,17	13,74	100,00	343.540.900	489,96	3,44		Biro Hukum
			1	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanian Tanah Kasultanan Tanah Kadipatan dan Tanah Desa*					100,00		100									
		5	Tata Ruang																	
		SEMULA	Program Perencanaan Tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan/ Kadipatan	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipatan	17,78	35.650.000.000	NA	NA							36,11	4.156.836.785	203,09	11,66		Dinas PTR
				Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipatan	46,11										17,78		38,56			

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			100													
			2	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruane			100													
			3	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang			100													
			Program Perencanaan Tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan/ Kadipaten				N/A	75.942.500												Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			100													
			2	Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			100													
			Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				175	412.222.671.105												Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Elonglet			100,00													
			2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangzitis			100,00													
			3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede			100,00													
			4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			100,00													
			5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Jombor			100,00													
			6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo			100,00													
			7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			100,00													
			8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo			100,00													
			9	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul			100,00													
			Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	NA	NA			165,58	1552,55	29,44	103.244.879.803	NA	NA		Dinas PTR	
					Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	21,67	3.574.442.329.719	NA	NA					29,44	103.244.879.803					
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis		Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	70,14	412.534.360			400,80	0,07	70,14	412.534.360				Dinas PTR	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	70	4.400.000.000	70,14	412.534.360			112,22	45,84	70,14	412.534.360	100,20	9,38			
				1 Pengawasan Penyelenggaraan				100												
				2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan				100												
			MENJADI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	70	4.400.000.000	70,14	412.534.360	65,00	1.000.000.000,00	70	5.200.756.176,00	107,91	61,19	70,14	5.200.756.176	100,20	13,00	DPTR
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten*	46,11	35.650.000.000		960.633.280	40	7.500.000.000	68	170,83	68,33	148,19				DPTR	
				1 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*					100		100	100								
				2 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang*					100		100	100								
				3 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang*					100		100	100								
				4 Pengawasan Penyelenggaraan					100		100	100								
				Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan/Urusan Tata Ruang	100	700.000.000	NA	NA			100,00	92,08	100,00	644.551.838	100,00	92,08		DPTR	
				Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang mencapai 100%	100	2.800.000.000	100,00	364.980.550			100,00	73,00	100,00	364.980.550	100,00	13,04		DPTR	
				1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)				100												
				Urusan Pemerintah Pilihan																
				Peningkat Urusan																
				Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang																
				Sekretariat Daerah																
			SEMULA	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100,00	3.841.253.000					100,00	8271,00	100,00	1.394.411.650	100,00	363,00	Biro Tata Pemerintahan	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul	
				1 Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan								100,00		100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan		
				2 Penanganan Kerjasama Dalam Negeri								100,00		100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan		
				Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	NA	1.330.977.900					NA	NA	100,00	863.241.100	NA	6486,00	Biro Tata Pemerintahan	Pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada program ini, Kondisi target kinerja awal RPJMD 100%	
				1 Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan																

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik (%)	100,00	2.882.486.500					100,00	7899,00	100,00	1.177.923.625	100,00	4086,00	Biro Tata Pemerintahan	Pada Tahun 2018 dengan Nama Program Pembinaan Perangkat Kecamatan Desa/Kelurahan tapi indikator kinerja program sesuai,		
			1 Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan								100,00		100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan			
			2 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan								100,00		100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan			
			Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100,00	2.508.970.000					100,00	7969,00	100,00	852.455.448	100,00	3398,00	Biro Tata Pemerintahan	Pada Tahun 2018 Nama Program Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Wilayah		
			1 Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								100,00		100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan			
			2 Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi								100,00		100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan			
			Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	NA	567.514.600					NA	NA	100,00	586.624.300	NA	10337,00	Biro Tata Pemerintahan	Target Kinerja awal rpjmd 100%, Tahun 2019 dan 2020 tidak mengampu program tersebut		
			1 Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi										100,00		100,00		Biro Tata Pemerintahan			
			2 Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah														Biro Tata Pemerintahan			
		MENJADI	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kesiapannya	100,00	3.841.253.000	100,00	774.249.500	19,07	892.436.750	60	767.933.585	314,63%	86,05%	100,00	2.936.594.735	100,00	76,45	Biro Tata Pemerintahan	
				Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik (%)	100,00	2.882.486.500	100		34,21		100		292,31%	#DIV/0!	100,00	1.177.923.625	100,00	40,86	Biro Tata Pemerintahan	
				Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100,00	2.508.970.000	225		30,00		100		333,33%	#DIV/0!	100,00	852.455.448	100,00	33,98	Biro Tata Pemerintahan	
			1 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				100		84,50	83,90	85	74,95	100,00%	89,33%		-		Biro Tata Pemerintahan		
			2 Fasilitasi Penataan Wilayah				100		51,49	52,31	51	50,20	100,00%	95,97%		-		Biro Tata Pemerintahan		
			3 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				100		45,80	40,79	46	28,55	100,00%	69,99%		-		Biro Tata Pemerintahan		
			4 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				100		88,60	88,72	89	67,77	100,00%	76,39%		-		Biro Tata Pemerintahan		
			5 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				100		92,88	92,86	93	92,85	100,00%	99,99%		-		Biro Tata Pemerintahan		
			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta																	
		SEMULA	Program Penataan Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100,00	5.059.456.540							100,00	848,00	100,00	2.501.097.184	100,00	49,43	Biro Hukum	
			1 Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Rancangan Peraturan Gubernur 30 dari 30									100,00	8531,00						
				Rancangan Peraturan Daerah 8 dari 8																
				Rancangan Keputusan Gubernur 100 dari 100																
			2 Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Dokumen Kajian Pembangunan Hukum dari 0									100,00	828,00						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Rekomendasi terhadap Produk Hukum Daerah 2 dari 2																	
		MENJADI	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100,00	5.059.456.540	100	3.575.242.065	41,50	1.667.757.700,00	45	1.647.741.922,00	107,23%	98,80%	100,00	7.724.081.171	100,00	152,67	Biro Hukum		
			1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan					100	51,00	45,59	51	45,59	100,00%	100,00%						Biro Hukum	
			2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan					100	72,00	68,30	72	68,30	100,00%	100,00%						Biro Hukum	
			3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Jaitnwa					100	59,00	42,59	59	41,95	100,00%	98,50%						Biro Hukum	
			4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					100	55,00	34,41	55	34,00	100,00%	98,81%						Biro Hukum	
			5 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					100	59,35	42,54	59	41,30	100,00%	97,09%						Biro Hukum	
			6 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM					100	54,00	46,50	54	46,16	100,00%	99,27%						Biro Hukum	
			Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan Substansi Materi dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Hukum Daerah	100,00	2.245.596.150							100,00	923,00	100,00	1.439.793.277	100,00	64,12	Biro Hukum	Nama Program di Tahun 2018 dan 2019: PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM Tahun 2021 - Tidak ada Data	
			1 Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota 25 dari 25									100,00	9255,00						Di tahun 2018 nama kegiatannya berbeda tp output kegiatannya hampir mirip	
			2 Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Nomor Register 20 nomor dari 20 nomor Keputusan Gubernur hasil evaluasi :3 keputusan dari 3 keputusan Rekomendasi Fasilitasi : 20 rekomendasi dari 20 rekomendasi									100,00	9211,00						di tahun 2018 tidak ada	
		SEMULA	Program Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Temu Publikasi	100,00	2.505.368.300							100,00	8913,00	100,00	2.005.401.429	100,00	80,04	Biro Hukum		
			1 Penyebarluasan Produk Hukum	Jumlah Buku Informasi Peraturan perundang-undangan 11000 buku dari 1100 buku									100,00	8679,00						Biro Hukum	Tahun 2008 2 kegiatan digabung menjadi 1 kegiatan yaitu penyebar luasan dan digitalisasi produk hukum
				Jumlah Buku Lembaran daerah dan berita daerah : 1100 buku dari 1100 buku																	
				Laporan legal expo bidang hukum : 0 laporan dari 0 laporan																	
			2 Digitalisasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diunggah ke dalam website jaringan dokumentasi dan informasi hukum : 260 Produk hukum dari 260 Produk Hukum									100,00	9806,00						Biro Hukum	
		MENJADI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Produk Hukum Daerah yang Temu Publikasikan	100,00	2.505.368.300	5.217	5.832.151.308	37,0	524.366.000	55	424.765.730	1,47	0,81	100,00	8.262.318.467	100,00	329,78	Biro Hukum		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100	75,00	64,93	75	61,52	100,00%	94,75%						Biro Hukum	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100		60,00	38,49		60	38,49	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100													Biro Hukum		
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			100													Biro Hukum		
			5	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			100													Biro Hukum		
			6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100		59,00	47,35		59	47,35	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100													Biro Hukum		
			8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100													Biro Hukum		
			9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			100		52,00	27,07		52	27,07	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100		100,00	100,00		100	100,00	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100		70,00	59,43		70	59,43	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100		65,00	51,18		65	50,67	100,00%	99,00%					Biro Hukum		
			13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan			100		49,00	39,38		49	39,38	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100		40,00	29,85		40	29,85	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100		78,00	74,20		78	39,90	100,00%	53,77%					Biro Hukum		
			16	Penyediaan Jasa Surat Mengurat			100		55,00	40,83		55	40,83	100,00%	100,00%					Biro Hukum		
			17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100							#DIV/0!	#DIV/0!					Biro Hukum		
			18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100		50,00	0,00		50	0,00	100,00%	#DIV/0!					Biro Hukum		
			19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100		47,00	29,19		47	26,98	100,00%	92,43%					Biro Hukum		
			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100		84,00	79,17		84	74,32	100,00%	93,87%					Biro Hukum		
			21	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					30,00	25,00		30	21,01	100,00%	84,04%							
			22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					10,00	0,00		10	0,00	100,00%	#DIV/0!							
			23	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					35,00	25,00		35	21,59	100,00%	86,36%							
			24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100,00	100,00		100	100,00	100,00%	100,00%							
			25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100,00	100,00		100	100,00	100,00%	100,00%							
			26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					50,00	41,67		50	41,67	100,00%	100,00%							
			27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					36,00	25,19		36	25,19	100,00%	100,00%							
			28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50,00	44,43		50	35,66	100,00%	80,26%							
			Program Bantuan dan layanan Hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100,00	8.426.380.600										100,00	6.736.657.290	100,00	79,95	Biro Hukum	2021 Tidak Ada Data	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				1	Layanan Hukum Masyarakat																
				2	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum																
		SEMULA	Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi	80,00	2.873.442.000							10313,16	80,14	3969,00	774.303.427	4961,25	26,95	Biro Organisasi	Tahun 2008 2 kegiatan digabung menjadi 1 kegiatan Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul	
			1	Koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi																	
			2	Perumusan kebijakan koordinasi dan monitoring akuntabilitas kinerja																	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (Inovasi)	1,00	6.563.055.500							200,00	89,02	259,67	3.011.493.058	25966,67	45,89	Biro Organisasi		
			1	Perumusan Kebijakan Standarisasi																	
			2	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum																	
		MENJADI	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi	80,00	2.873.442.000	81,00	656.302.748	0,00	273.101.000	-	98.363.150	0,00	36,02%	81,00	1.528.969.325	101,25	53,21	Biro Organisasi		
				Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (Inovasi)	1,00	6.563.055.500	1	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		2687,00	3.011.493.058	26867,00	4589,00	Biro Organisasi		
			1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100	91,5	85,21	92	7,66	0,00	8,99%						Biro Organisasi		
			2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			100	99,00	94,35	99	64,67	0,00	68,54%						Biro Organisasi		
			3	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			100	25,03	25,82	25	14,86	0,00	57,55%						Biro Organisasi		
			4	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			100	90,10	90,08	90	42,70	0,00	47,40%						Biro Organisasi		
		SEMULA	Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.856.550.500							NA	NA	81,00	3.125.435.697	100,00	109,41	Biro Umum dan Protokol		
			Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	10.852.640.000							104,82	93,40	4353,00	4.149.541.616	5121,18	38,24	Biro Umum Humas dan Protokol		
			1	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu																	
			2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu																	
			Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.575.000.000							NA	NA	81,00	2.465.499.708	100,00	95,75	Biro Umum dan Protokol		
			Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	7.181.090.000							10415,66	63,99	5785,00	6.161.834.137	6805,88	85,81	Biro Umum Humas dan Protokol		
			1	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu																	
			2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya																	
			Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	peningkatan jumlah pengakses informasi	270710,00	2.242.988.000							NA	NA	943967,00	1.628.763.276	348,70	72,62	Biro Umum dan Protokol	Pada Tahun 2018 ada di Kominfo	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
				permda	309975,00	6.887.210.000							393	97,78	958134,00	4.690.615.711	309,10	68,11	Biro Umum Humas dan Protokol	Pada Tahun 2018 Nama Program belum dimulai	
			1	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																	
			2	Pembinaan Kemitraan Media dan Bisnis																	
		MENJADI	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahantangan terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	10.852.640.000	90,86	30.444.443.829	85,00	6.862.486.560,00	91	5.840.325.434,00	107,26%	85,11%	90,86	40.434.310.879	106,89	372,58	Biro Umum Humas dan Protokol		
				Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	7.181.090.000	90,58	30.444.443.829	85,00		92		108,15%		90,58	36.606.277.966	106,56	509,76	Biro Umum Humas dan Protokol		
				peningkatan jumlah pengakses informasi nama	309,975	6.887.210.000	1.110.615	30.444.443.829	77.493,00		187,436		241,87%		1.110.615	35.135.059.540	358,29	510,15	Biro Umum Humas dan Protokol		
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah			100													Biro Umum Humas dan Protokol	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					63,5	57,64	63,50	24,38	100,00%	42,30%							
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100													Biro Umum Humas dan Protokol	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100													Biro Umum Humas dan Protokol	
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			100		54,5	51,53	54,50	7,98	100,00%	15,49%						Biro Umum Humas dan Protokol	
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			100													Biro Umum Humas dan Protokol	
			6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100		100	100	100,00	50,94	100,00%	50,94%						Biro Umum Humas dan Protokol	
			7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100														Biro Umum Humas dan Protokol
			8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100		100	100	100,00	53,50	100,00%	53,50%							Biro Umum Humas dan Protokol
			9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD			100		66,50	50,00	66,50	21,23	100,00%	42,46%							Biro Umum Humas dan Protokol
			10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100														Biro Umum Humas dan Protokol
			11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100	100	100	100	100,00	99,84	100,00%	99,84%							Biro Umum Humas dan Protokol
			12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100		69,62	65,40	69,62	43,67	100,00%	66,77%							Biro Umum Humas dan Protokol
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					69,62	65,40	69,62	43,67	100,00%	66,77%							
			13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100		55	53,1	55,00	39,75	100,00%	74,86%							Biro Umum Humas dan Protokol
			14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100		41,67	41,67	41,67	31,66	100,00%	75,98%							Biro Umum Humas dan Protokol
			15	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100														Biro Umum Humas dan Protokol
			16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100		41,91	41,67	41,91	38,80	100,00%	93,11%							Biro Umum Humas dan Protokol
			17	Penelausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100		66,34	64,88	66,34	61,10	100,00%	94,17%							Biro Umum Humas dan Protokol
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100	100	100,00	91,60	100,00%	91,60%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
18			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100															Biro Umum Humas dan Protokol	
19			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100		100	100	100,00	99,96	100,00%	99,96%								Biro Umum Humas dan Protokol	
20			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100															Biro Umum Humas dan Protokol	
21			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100		41,67	25,00	41,67	17,46	100,00%	69,84%								Biro Umum Humas dan Protokol	
22			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100		42,07	41,64	42,07	33,45	100,00%	80,33%								Biro Umum Humas dan Protokol	
23			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100		42,34	33,73	42,34	33,72	100,00%	99,97%								Biro Umum Humas dan Protokol	
24			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100		42,70	42,66	42,70	34,22	100,00%	80,22%								Biro Umum Humas dan Protokol	
25			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100		41,42	41,40	41,42	31,73	100,00%	76,64%								Biro Umum Humas dan Protokol	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48,45	35,52	48,45	33,74	100,00%	94,99%									
26			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100		37,4	34,06	37,40	32,61	100,00%	95,74%								Biro Umum Humas dan Protokol	
27			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100		14,64	14,62	14,64	14,62	100,00%	100,00%								Biro Umum Humas dan Protokol	
28			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100															Biro Umum Humas dan Protokol	
29			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100															Biro Umum Humas dan Protokol	
30			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100		49,94	49,43	49,94	49,43	100,00%	100,00%								Biro Umum Humas dan Protokol	
31			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		100		23,00	13,46	23,00	13,46	100,00%	100,00%								Biro Umum Humas dan Protokol	
32			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		100		41,73	38,34	41,73	31,9	100,00%	83,20%								Biro Umum Humas dan Protokol	
33			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		100		27,54	27,47	27,54	21,96	100,00%	79,94%								Biro Umum Humas dan Protokol	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				34,87	34,59	34,87	18,12	100,00%	52,39%									
34			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		100		45,02	45,01	45,02	18,71	100,00%	41,57%								Biro Umum Humas dan Protokol	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41,01	25	41,01	23,53	100,00%	94,12%									
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100	100	100,00	89,73	100,00%	89,73%									
			Penatausahaan Barang Milik Daerah nsda SKPD				41,67	25	41,67	15	100,00%	60,00%									
		SEMULA	Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda (%)	84,00	526.832.000						NA	NA	8589,00	571.792.120	10225,00	108,53			Kantor Perwakilan Daerah	
			Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (%)	88,00	2.429.450.000						10179,07	9349,00	8754,00	675.456.633	9947,73	27,80			Badan Penghubung Daerah	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				1	Pelayanan Pimpinan dan Tamu							100,00	9341,00								
				2	Pelayanan Informasi dan Kemitraan							100,00	100,00								
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	78,00	900.000.000					NA	NA	88,00	892.437.818	112,82	99,16	Kantor Perwakilan Daerah		
					Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (angka indeks)	88,00	3.237.880.000					1026,01	100,00	8875,00	2.177.222.293	10085,23	67,24	Badan Penghubung Daerah	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul	
				1	Perluasan Jaringan Pemecatan Potensi Daerah	(%)						100,00	6646,00%								
				2	Promosi Seni dan Budaya Daerah	(%)						100,00	100,00%								
			MENJADI		Program Pelayanan Penghubung Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (s.d)	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (s.d)	88,00	2.429.450.000	88,04	308.431.917	88	134.358.500	89,58	92.827.188	0,00%	69,09%	88,04	1.076.715.738	100,05	44,32	Badan Penghubung Daerah
						peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (angka indeks)	88,00	3.237.880.000	90,48	308.431.917	0				0,00%		90,48	1.593.216.392	102,82	49,21	Badan Penghubung Daerah
				1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			100		78,20	74,69		78	49,65	0,00%	66,47%					Badan Penghubung Daerah
				2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			100		16,10	12,19		16	12,19	0,00%	100,00%					Badan Penghubung Daerah
				3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			100							0,00%						Badan Penghubung Daerah
				4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya			100		0,21	0,21		0	0,00	0,00%	0,00%					Badan Penghubung Daerah
				5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan			100		13,20	48,12		13,20	48,12	0,00%	100,00%					Badan Penghubung Daerah
			SEMULA		Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	40,00	2.830.000.000							100,00	89,89%	35,00	865.443.580	87,50	30,58	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
				1	Pengendalian Inflasi Daerah										100,00%						
				2	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi										100,00%						
			MENJADI		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	1.460.000.000	12,50	932.188.670	5	671.292.000,00	5	663.362.000,00	100,00%	98,82%	28,33	1.104.741.292	94,44	75,67	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
				1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					29,78%	30,17%		0	29,56%	100,00%	97,98%					
				2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					27,43%	27,40%		0	27,28%	100,00%	99,56%					
				3	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan					12,69%	32,64%		0	32,50%	100,00%	99,57%					
				4	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					16,67%	16,66%		0	16,53%	100,00%	99,22%					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
		SEMULA	Program Pengelolaan Kebijakan Rekrutasi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Rumusan kebijakan rekrutasi dan pengembangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	7.638.000.000					100,00%	99,48%	28,33	3.157.109.300	94,44	41,33			Biro Administrasi dan SDA		
			1	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah							100,00%										
		SEMULA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumusan kebijakan rekrutasi dan pengembangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	7.638.000.000	7,50	932.188.670	2,5	671.292.000,00	2,50	663.362.000,00	100,00%	98,82%	28,33	3.820.471.300	94,44	50,02		Biro Administrasi dan SDA	
			1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					29,78%	30,17%	0	29,56%	100,00%	97,98%							
			2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					27,43%	27,40%	0	27,28%	100,00%	99,56%							
			3	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan					12,69%	32,64%	0	32,50%	100,00%	99,57%							
			4	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					16,67%	16,66%	0	16,53%	100,00%	99,22%							
		SEMULA	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	1.460.000.000					100,00%	100,00%	28,33	441.379.292	94,44	30,23			Biro Administrasi dan SDA		
			1	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan							100,00%										
			2	Penyusunan Kebijakan Green Economy							100,00%										
				Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia (dok)	1,00	539.010.500					NA	NA	1,00	465.956.898	100,00	86,45		Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		
				Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan penguatan kelembagaan sumberdaya manusia (dok)	1,00	98.000.000					NA	NA	1,00	123.999.211	100,00	126,53		Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		
				Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Daerah	Terlaksananya lembaga keagamaan 5 agama (layanan)	4,00	7.508.966.500					NA	NA	4,00	7.599.251.841	100,00	101,20		Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		
				Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat (dok)	1,00	150.473.000					NA	NA	1,00	143.848.729	100,00	95,60		Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		
				Program Pengelolaan Kebijakan Rekrutasi dan Pengembangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Rumusan bahan kebijakan rekrutasi dan pengembangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	1,00	448.757.500					NA	NA	2,00	486.461.700	200,00	108,40		Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					6		7		8		9		10		11		12				
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1			MENJADI	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	30,00	1.460.000.000	15,00	932.188.670	5	671.292.000,00	5	663.362.000,00	100,00%	98,82%	28,33	1.104.741.292	94,44	75,67	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	
				1	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro							0	29,56%	100,00%	97,98%						
				2	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro							0	27,28%	100,00%	99,56%						
				3	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan							0	32,50%	100,00%	99,57%						
				4	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							0	16,53%	100,00%	99,22%						
			SEMULA	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang ditindaklanjuti	8,00	65.153.381.000							200,00	29,17	3,50	7.097.836.100	43,75	10,89	Biro Bina Mental Spiritual	
					Terlanyainya lembaga keagamaan 5 agama (lembaga)	4,00								100,00		4,00		100,00			
				1	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan									100,00							
				2	Penyelenggaraan Festival Keagamaan									100,00							
				3	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama									100,00							
				Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Rumusan Bahan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan yang ditindaklanjuti	8,00	1.295.271.000	0						100,00	89,35	2,00	561.334.600	25,00	43,34	Biro Bina Mental Spiritual	
				1	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat									100,00							
				2	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan									100,00							
				Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	8,00	807.708.000	0						100,00	88,77	2,00	467.256.700	25,00	57,85	Biro Bina Mental Spiritual	
				1	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan									100,00							
				2	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia									100,00							
			MENJADI	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	8,00	807.708.000	0,00	1.631.565.273	0	16.636.555.000	-	12.398.188.268	0,00%	74,52%	2,00	14.497.010.241	25,00%	1794,83%	Biro Bina Mental Spiritual	indikator sudah sesuai cascade tapi indikator SEMULA tidak sesuai cascade (Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti)
					Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kapasitas kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	8,00	1.295.271.000	0,00		0		1		0,00%		2,00	2.192.899.873	25,00%	169,30%	Biro Bina Mental Spiritual	indikator sudah sesuai cascade tapi indikator SEMULA tidak sesuai cascade (Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang ditindaklanjuti)
					Bahan rumusan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti					0		-		0,00%							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang ditindaklanjuti	8,00	65.153.381.000	3,00								4,00	8.729.401.373	50,00%	13,40%	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (membaca)	4,00		4,00		0		3		0,00%		4,00		100,00%		Biro Bina Mental Spiritual	
				1. Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual			2.437,00	1.530.495.850	31,14	37,07	31,14	27,59	0,00%	6,95%					Biro Bina Mental Spiritual	
				2. Fasilitas Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			779,00	4.942.999	37,04	37,03	37,04	25,61	0,00%	7,79%					Biro Bina Mental Spiritual	
				3. Fasilitas Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			5.979,00	61.914.924	48,95	47,09	48,95	38,95	0,00%	20,66%					Biro Bina Mental Spiritual	
				4. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata			9.333,00	34.211.500	56,00	55,87	56,00	51,21	0,00%	24,30%					Biro Bina Mental Spiritual	
		SEMULA	Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti									100,00%	91,32%	60,00	66.814.000			Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
			1. Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah										100,00							
			2. Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah										100,00							
			Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	50,00	205.907.000	80,00	2.650.000.000					NA	NA	NA	200.425.000	100,00	9705455	Adpem	
			1. Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah										100,00%		100,00				Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
			2. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah										100,00%		100,00					
			Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	50,00	200.000.000	80,00	2.350.000.000					NA	NA	50,00	194.109.100	100,00	9705455,00	Adpem	
			1. Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan										100,00						Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
			2. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan										100,00							
		MENJADI	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti			60,00	44.192.000	65,00	55.345.000,00	71,43	47.773.050,00	109,89%	86,32%	71,43	317.667.300,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	80,00	2.650.000.000	77,78		80,00		83,33		104,16%		83,33		1,04	0,00		
				Persentase Rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	80,00	2.350.000.000	80,00		80,00		85,71		107,14%		85,71		1,07	0,00		
			1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				10,6	26.954.500					11,00%	2,00%						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			2	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			4,5	17.237.500					5,00%	3,00%							
		SEMULA	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terealisasi	100,00	2.724.890.000							100,00%	84,28%	100,00	6.372.870.746	100,00	101,97665483744	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
			1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									100,00								
			2	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa									100,00								
			3	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik									100,00								
		MENJADI	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terealisasi	100	2.724.890.000	37	19.599.000	25,00	120.372.000,00	59,48	98.072.453,00	237,92%	81,47%	196,48	421.246.153,00	1,96	0,15			
			1	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				44,73	44,25	44,73	35,57	100,00%	80,38%								
			2	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
			3	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				30,00	23,35	30,00	18,05	100,00%	77,30%								
			4	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
			5	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				18,5	17,95	18,50	16,1	100,00%	89,69%								
			6	Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																	
			Urusan Pemerintah Pilihan Penunjang Urusan																		
		2	Sekretariat DPRD											0,00							
		SEMULA 1	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	95,00	155.880.183.500							1,40	0,69	133,33	76.275.128.571	140,35	48,93	Sekretariat DPRD		
			1										1,00								
			2	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY									1,00								
			3	Penyelenggaraan Tugas Fraksi DPRD DIY									9,85								
			4	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran									1,00								
		SEMULA 2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu /sct	98,00	52.230.529.000							1,32	0,82	128,20	26.393.118.180	130,82	50,53	Sekretariat DPRD		
			1	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY									1,00								
			2	Penyelenggaraan Kinerja Penawasan DPRD									1,00								
			3	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah									1,00								
		SEMULA 3	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat/aksesibilit as informasi publik dan transparansi	90,00	84.133.375.500							1,01	0,80	85,92	46.876.238.989	95,47	55,72	Sekretariat DPRD		
			1	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD									1,00								
			2	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat									98,35								
			3	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD									1,00								
			4	Pengelolaan Data dan TI									1,00								
			Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan	96,00	3.867.600.000							NA	NA	NA	3.071.492.700	NA	79,42	Sekretariat DPRD	Pada RPJMD hanya ditargetkan tahun 2018	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					6		7		8		9		10		11		12					
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			MENJADI 1,2,3	PROGRAM DUKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan program kerja DPRD dan	95,00	155.880.183.500	144,44	35.392.037.428	26,17	30508721447,00	30,00	17028970573,00	114,64	55,82	144,44	201.965.493.741	152,04	69,11	Sekretariat DPRD		
				Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Ditelesaikan Tepat Waktu	98,00	52.230.529.000	119,48		32,14		33,12		103,05		119,48		121,92		Sekretariat DPRD			
				Persentase layanan aspirasi masyarakat aksesibilitas informasi publik dan kesantunan	90,00	84.133.375.500	87,9		90,00		88,25		98,05		87,9		97,67		Sekretariat DPRD			
			1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100		100		40,06	39,22		40,06	21,76	100	55,48							
			2	Pembahasan Rancangan Rerda	100		100		62,65	57,73		62,65	32,22	100	55,81							
			3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	100		100		23,72	19,49		23,72	14,67	100	75,27							
			4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	100		100		55,29	54,80		55,29	16,85	100	30,75							
			5	Pembahasan KUA dan PPAS	100		100		98,50	94,90		80,00	45,08	81,22	47,50							
			6	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100		100		0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00							
			7	Pembahasan APBD	100		100		0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00							
			8	Pembahasan Perubahan APBD	100		100		0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00							
			9	Pembahasan Laporan Semester	100		100		0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00							
			10	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100		100		0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00							
			11	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100		100		27,49	26,26		27,49	10,69	100	40,71							
			12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100		100		22,43	22,39		22,43	19,71	100	88,03							
			13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100		100		22,45	22,39		22,45	1,96	100	8,75							
			14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	100		100		27,83	27,75		27,83	6,08	100	21,91							
			15	Bimbingan Teknis DPRD	100		71,12		74,70	71,98		74,70	52,32	100	72,69							
			16	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100		100		57,29	57,38		57,29	40,64	100	70,83							
			17	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100		100		41,95	41,93		41,95	23,83	100	56,83							
			18	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100		100		48,22	45,42		48,22	31,89	100	70,21							
			19	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100		100		43,47	42,72		43,47	6,76	100	15,82							
			20	Penyusunan Program Kerja DPRD	100		100		23,03	21,38		23,03	11,57	100	54,12							
			21	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100		100		14,05	16,66		14,05	5,00	100	30,01							
			22	Pelaksanaan Reses	100		100		66,73	66,67		66,73	48,39	100	72,58							
			23	Pengawasan Kode Etik DPRD	100		100		27,31	27,31		27,31	13,31	100	48,74							
			24	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100		100		42,81	42,43		42,81	23,41	100	55,17							
			25	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100		100		100,00	100,00		91,66	0,00	91,66	0,00							
			26	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100		100		46,40	45,55		46,40	18,78	100	41,23							
			Urusan Pemerintah Pilihan																			
			Penunjang Urusan																			
			Inspektoral																			
3		SEMULA	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	90,00	15.111.945.701					9313,00	96,67	77,53		13.087.446.521	86,14	0,13	Inspektoral	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90,00	29.532.979.900					91,21		77,53			86,14		Inspektoral	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	90,00	29.532.979.900							91,21		77,53		86,14		Inspektorat	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul		
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana	90,00	29.532.979.900							109,56		91,60		101,78		Inspektorat	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul		
			1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala																		
			2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H																		
			3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
			4	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan																		
			5	Monitoring Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan																		
			6	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah																		
		SEMULA	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA	5.506.522.000						NA	NA	89,42		7.017.490.598	NA	127,44	Inspektorat			
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	NA							NA	NA	86,51			NA					
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA							NA	NA	89,03			NA					
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	NA							NA	NA	91,20			NA					
		MENJADI 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan Sosial Budaya Perekonomian serta Sarana dan Prasarana	90	103.710.885.401	90,20	5.162.485.600	88	2.540.110.000	96	2.243.808.989	108,60%	88,34%	95,57	27.511.231.708	106,19	26,53	Inspektorat	Pada Tahun 2018, Nomenklaturnya: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan		
			1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100		100		100	100	100	92,24	100	92,24								
			2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100		100		31,26	28,69	100	31,26	25,95	100	90,45							
			3	Revisi Laporan Kinerja	100		100		60,68	33,44	100	60,68	29,67	100	88,73							
			4	Revisi Laporan Keuangan	100		100		100	100	100	94,58	100	94,58								
			5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	100		100		4,88	0,16	100	4,88	0,16	100	100,00							
			6	Kerjasama Pengawasan Internal	100		100		97,66	97,05	100	90,66	2,75	100	92,83	2,83						
			7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ADB	100		100		40,55	39,22	100	40,55	39,2	100,00	99,95							
			8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100		100		26,93	24,06	100	26,93	24,06	100,00	100,00							
			9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100		100		55,1	49,79	100	55,10	47,56	100,00	95,52							
		MENJADI 2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi			100,00	247.935.900	11,15	193.453.000	11,15	185.279.417	100,00%	95,77%	100	433.215.317	100	38,55	Inspektorat	Program dan indikator tidak ada di cascade, Program dan indikator ini baru ada di tahun 2021		
			1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100		100		0,00	0,00		0,00	0,00									
			2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100		100		0,00	0,00		0,00	0,00									
			3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		53,01	52,85		53,01	49,45	100,00	93,57							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14			
			4	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian <i>Safemas-Biosopas</i>	100		100		100,00	100,00	12,00	59,24	12,00	59,24									
			5	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100		100		43,49	28,67	43,49	28,02	100,00	97,73									
			6	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan <i>Integritas</i>	100		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Urusan Pemerintah Pilihan																				
			Penunjang Urusan																				
			Perencanaan																				
	4	SEMULA	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100,00	13.440.795.000	9877	1.578.759.750					9877,00%	88,79%					100,00	11,75	BAPPEDA		
				Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100,00		9825						9825,00%						100,00				
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			100,00						100,00%										
			2	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah			100,00						100,00%										
			Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	92,00	11.400.608.000	90	1.355.435.500					100,00%	9982,00					100,00%	100,00	10009565237993	11,89	BAPPEDA
				Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100,00		100						100,00%						100,00			BAPPEDA	
			1	Pelaksanaan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah			100						100,00%										
			2	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah			100						100,00%										
			MENJADI	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100	13.440.795.000	9.877	1.578.759.750	100	3.813.840.500	100	3.285.277.130	100,00%	29,90%	100	3.813.840.500	398	64,74	BAPPEDA			
				Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100		9.825		100			100		100,00%		100		395					
				Persentase capaian kegiatan SKPD	92,00	11.400.608.000	90	1.355.435.500	91			98,90		108,68%	91			401	33,77	BAPPEDA			
				Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100		100		100			100		100,00%	100			400				BAPPEDA	
			1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			100		100	121.156.000	87,94	106.539.600	87,94%		100	121.156.000							
			2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			100		100	1.955.664.000	87,19	1.705.155.530	87,19%		100	1.955.664.000							
			3	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			100		100	44.672.000	52,35	23.386.000	52,35%		100	44.672.000							
			4	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100		100	1.615.823.500	85,15	1.375.912.000	85,15%		100	1.615.823.500							
			5	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			100		100	76.525.000	97,07	74.284.000	97,07%		100	76.525.000							
			SEMULA	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	93,67	8.618.452.500	6761	416.873.000				74,18%	92,23%					97460840930227	4,84	BAPPEDA		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			1	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM			100					100,00%									
			2	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra			100					100,00%									
			3	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)			100					100,00%									
			Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian		Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91,30	4.907.425.400	6739	144.957.000			77,50%	95,94%			7381,16	2,95		BAPPEDA		
			1	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan			100					100,00%									
			2	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha			100					100,00%									
			Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92,96	5.405.324.836	8939	202.961.500			9823,08%	9783,00			9615,96	3,75		BAPPEDA		
			1	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum			100					100,00%									
			2	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Pemerintahan			100					100,00%									
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88,57	6.761.523.960	51,72	77.995.950			62,42%	99,82			58,39	1,15		BAPPEDA		
			1	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan Infrastruktur Wilayah dan Kota			100					100,00%									
			2	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			100					100,00%									
		MENJADI	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	93,67	8.618.452.500	6761	416.873.000	92,41	1.155.571.700	68	1.129.950.060	73,16%	97,78%	92,41	1.155.571.700	15515,11	44,43	BAPPEDA	
					Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92,96	5.405.324.836	8939	202.961.500	91,55		89		97,64%	91,55			29755,81	34,91	BAPPEDA	
					Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88,57	6.761.523.960	5172	77.995.950	85,71		58		67,31%	85,71			22751,50	33,90	BAPPEDA	
					Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91,3	4.907.425.400	6739	144.957.000	89,13		67		75,61%	89,13			25299,01	43,58	BAPPEDA	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)					100	143.385.000	93	133.172.000	#REF!	92,88%	100	143.385.000					
			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan					100	376.360.950	98	370.409.950	92,88%	98,42%	100	376.360.950					
			3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)					100	184.564.500	99	182.565.260	98,92%	98,92%	100	184.564.500					
			4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					100	52.262.250	95	49.398.650	94,52%	94,52%	100	52.262.250					
			5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)					100	42.663.000	99	42.395.700	99,37%	99,37%	100	42.663.000					
			6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					100	14.169.000	81	11.539.000	81,44%	81,44%	100	14.169.000					
			7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)					100	42.587.000	99	1.786.500	99,33%	4,19%	100	42.587.000					
			8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					100	8.593.000	100	8.578.500	99,83%	99,83%	100	8.593.000					
			9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)					100	242.572.000	100	241.392.000	99,51%	99,51%	100	242.572.000					
			10	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					100	48.415.000	100	48.199.000	99,55%	99,55%	100	48.415.000					
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
			Penunjang Urusan																		
			Keuangan																		
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PAD lain yang sah terhadap pendapatan,	51,38	3.135.563.000							NA	NA			11109,00	8571,00	DPPKA		
				Persentase kontribusi pendapatan pajak retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PAD lain yang sah terhadap pendapatan,	60,06	15.692.710.000							98,41	94,42			91,86	50,19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
			1	Perencanaan Pendapatan Daerah															Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
			2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah															DPPKA		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					6		7		8		9		10		11		12					
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			MENJADI	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak retribusi HPKPD PAD lain yang sah terhadap pendapatan daerah	60,06	15.692.710.000	52,07	9.913.203.970	13,03	777.314.000	15	622.228.200	115,58	80,05	15,06	622.228.200	86,70	117,32			
				1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			100			31		31			31						
				2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			100			86		86			86						
				3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			100			40		40			40						
				4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			100			NA		NA			NA						
			SEMULA 1	Program Penganggaran Belanja Daerah	1, Ketepatan dalam Penyusunan APBD dan RPAPBD	100,00	3.301.283.000							NA	NA			100,00	11037,00	DPPKA		
					2, Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100,00								NA	NA			100,00				
				1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah																DPPKA	
				2	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah																	DPPKA
				3	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran																	DPPKA
			SEMULA 2	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1, Ketepatan dalam Penyusunan APBD dan RPAPBD	100,00	13.877.220.000							100,00	9295,00			100,00	7528,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
					2, Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100,00								100,00				100,00				
				1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				2	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah																	
				3	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran																	DPPKA
			MENJADI	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1, Ketepatan dalam Penyusunan APBD dan RPAPBD	100,00	13.877.220.000	100	1.317.035.001.603	14	666.180.860.419	14	333.102.848.484	100,00	50,00	14	333.102.848.484	100,00	11966,26	BPKA		
					2, Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100,00		100		14		14		100,00		14		100,00				
				1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			100		4		4				4						
				2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			100		4		4				4						
				3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			100														
				4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA, SKPD			100		71,00		71,00				71						
				5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			100		70,00		70,00				70						
				6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			100		41,75		41,75				42						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			100		73,24		73,24			73						
8				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			100													
9				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			100													
10				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			100		4,30		4,30			4						
11				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			100		72,11		72,11			72						
12				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Perhitungan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			100		50,00		50,00			50						
13				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			100		65,50		65,50			66						
14				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran			100		0,91		0,91			1						
15				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah			100		100,00		100,00			100						
16				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			100		1,80		1,80			2						
17				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap UHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			100		100,00		100,00			100						
18				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah			100		59,49		59,49			59						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket, 14
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19			Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bemerkalah Berwujud			100		49,63		49,63				50						
20			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			100		33,08		33,08				33						
21			Pengelolaan Dana Darurat dan Mandatis			100		51,40		51,40				51						
22			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			100		63,41		63,41				63						
		SEMULA	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta reports pertanggungjawaban	100,00	2.119.050.000							100,00	8724,00			100,00	9581,00	DPPKA	
1			Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
2			Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		MENJADI	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan sesuai SAB	100,00	9.549.450.000	100,00	1.317.035.001.603	4,66	666.180.860.419,00	5	333.102.848.484	100,00	50,00	4,66	333.102.848.484,00	100,00	17330,28	BPKA	
1			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			100		4,00		4,00				4						
2			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan BPAS			100		4,00		4,00				4						
3			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD			100														
4			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			100		71,00		71,00				71,00						
5			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran			100		70,00		70,00				70,00						
6			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			100		41,75		41,75				41,75						
7			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			100		73,24		73,24				73,24						
8			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			100														
9			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			100														
10			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			100		4,30		4,30				4,30						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			100		72,11		72,11			72,11						
			12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			100		50,00		50,00			50,00						
			13	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			100		65,50		65,50			65,50						
			14	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran			100		0,91		0,91			0,91						
			15	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			100		100,00		100,00			100,00						
			16	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			100		1,80		1,80			1,80						
			17	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			100		100,00		100,00			100,00						
			18	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			100		59,49		59,49			59,49						
			19	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			100		49,63		49,63			49,63						
			20	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			100		33,08		33,08			33,08						
			21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			100		51,40		51,40			51,40						
			22	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			100		63,41		63,41			63,41						
		SEMULA	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Kekuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100,00	812.000.000										100,00	10889,00		DPPKA	
			1	Pengendalian Belanja Langsung																Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			2	Pengendalian Belanja Tidak Langsung																Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			3	Pengendalian Belanja Daerah																
		MENJADI	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kekuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100,00	3.562.250.000	100	1.317.035.001.603	33,58	666.180.860.419	33,58	333.102.848.484	100,00	50,00	33,58	333.102.848.484	100,00	46381,37		BPKA
				Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD					25,00		25,00		100,00	25,00						
			1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			100		4,00		4			4						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan BDKS			100		4		4			4							
			3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			100														
			4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			100		71,00		71,00			71,00							
			5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			100		70,00		70,00			70,00							
			6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			100		41,75		41,75			41,75							
			7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			100		73,24		73,24			73,24							
			8	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			100														
			9	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			100														
			10	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			100		4		4			4							
			11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			100		72		72			72							
			12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			100		50		50			50							
			13	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			100		65,50		65,50			65,50							
			14	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran			100		0,91		0,91			0,91							
			15	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			100		100,00		100,00			100,00							

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			100		1,80		1,80		1,80		1,80						
17			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			100		100,00		100,00		100,00		100,00						
18			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah			100		59,49		59,49		59,49		59,49						
19			Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Provinsi			100		49,63		49,63		49,63		49,63						
20			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			100		33,08		33,08		33,08		33,08						
21			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			100		51,40		51,40		51,40		51,40						
22			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			100		63,41		63,41		63,41		63,41						
		SEMULA	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100,00	1.417.656.000	100,00	6.655.370.000							100,00	11733,00	100,00	6505,00	DPPKA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
1			Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
2			Bina Pengelolaan Keuangan Daerah																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
3			Bina Administrasi BUMD dan BUKP																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
4			Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota																	DPPKA
5			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah																	DPPKA
6			Pembinaan BUKP																	DPPKA
		MENJADI	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100,00	6.655.370.000	100,00	1.317.035.001.603	64,61	666.180.860.419	65	333.102.848.484	100,00	50,00	64,61	333.102.848.484	100,00	24859,13	DPPKA	BPKA
1			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			100		4,00		4,00		4,00		4,00						
2			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			100		4,00		4,00		4,00		4,00						
3			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			100														
4			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			100		71,00		71,00		71,00		71,00						
5			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Aset			100		70,00		70,00		70,00		70,00						
6			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			100		41,75		41,75		41,75		41,75						
7			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			100		73,24		73,24		73,24		73,24						

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			100													
9				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			100													
10				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			100		4		4				4					
11				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			100		72		72				72					
12				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			100		50,00		50,00				50,00					
13				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			100		65,50		65,50				65,50					
14				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran			100		0,91		0,91				0,91					
15				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			100		100,00		100,00				100,00					
16				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			100		1,80		1,80				1,80					
17				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			100		100		100				100					
18				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			100		59,49		59,49				59,49					
19				Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah			100		49,63		49,63				49,63					

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				20	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			100		33,08		33,08				33,08				
				21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			100		51,40		51,40				51,40				
				22	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			100		63,41		63,41				63,41				
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	375,00	1.793.200.000											100,00	9715,00	DPPKA	Nama Program Thn 2019: PROGRAM PENINGKATAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta																
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak																
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	129,00	2.104.038.000											100,00	9948,00	DPPKA	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul																DPPKA
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak																DPPKA
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	86,00	1.190.994.000											100,00	10249,00	DPPKA	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo																
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak																
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	38,00	1.173.918.000											100,00	9747,00	DPPKA	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul																
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak																
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	329,00	2.462.642.000											100,00	8491,00	DPPKA	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul																
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak																
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	37.158.446.429	7.111.460.000											0,00	4445,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta																Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta																Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY Di Kota Yogyakarta	37.158.446.429	7.111.460.000	7.196.341.385	3.843.762.440	1.857.922.321	736.290.000	15.785.819.500	692.619.399	849,65	94,07	15.785.819.500	692.619.399	42,48	108,24	KPPD YOGYAKARTA	
			1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			100	328.115.400	68			68			68					
			2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			100	792.545.500	60		60				60					
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	38.506.977.121	7.877.912.000							487,00	9515,00			371,00	4155,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul																Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul																Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	38.506.977.121	7.877.912.000	0	3.768.415.640	3.850.697.712	867.351.000	16.037.252.283	744.703.600	1848,99	85,86	16.037.252.283	744.703.600	41,65	98,84	KPPD BANTUL	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			100	131.212.600	59		59			59						
			2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			100	872.161.000	73		4			4						
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	12.537.252.508	4.093.032.000							0,00	9421,00			0,00	5946,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo	12.537.252.508	4.093.032.000	0	3.374.942.240	2.758.195.600	610.603.000	2.723.922.000	545.492.665	98,76	89,34	2.723.922.000	545.492.665	26,92	155,24	KPPD KULON PROGO	
			1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			100	183.640.200	45		45			45						
			2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			100	450.058.650	77		77			77						
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	12.381.553.649	3.882.815.000							5.257.259.150	9743,00			4246,00	7285,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	12.381.553.649	3.882.815.000	0	3.922.338.040	1.238.155.365	866.373.000	2.593.272.100	788.529.500	209,45	91,02	2.593.272.100	788.529.500	20,94	194,18	KPPD GUNUNGKIDUL	
			1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			100	210.315.000	66		66			66						
			2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			100	727.460.500	65		65			65						
		SEMULA	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	78.538.848.031	7.833.950.000							0,00	9186,00			0,00	5852,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		MENJADI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	78.538.848.031	7.833.950.000	0	4.655.733.770	7.853.884.800	1.336.462.400	25.514.086.350	1.029.936.078	324,86	77,06	25.514.086.350	1.029.936.078	32,49	131,10	KPPD SLEMAN	
			1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			100	332.195.515	48		48			48						
			2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			100	930.350.775	55		55			55						
		SEMULA	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	4.497.000.000							NA	NA			100,00	9947,00	DPPKA	
			1	Pengelolaan Barang Milik Daerah															DPPKA	
		SEMULA	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	8.395.490.000							100,00	9295,00			100,00	6477,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Pada Tahun 2018 Nama Program belum muncul
			1	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			2	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah															Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,	
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			3	Pengamanan Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah																Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		MENJADI	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	8.395.490.000	100	1.598.354.420	25	1.226.284.200	25	719.600.072	100,00	58,68	25	719.600.072	100,00	92,38		BPKA	
			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			100														
			2	Penilaian Barang Milik Daerah			100														
			3	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			100														
			4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			100														
		MENJADI	1	Penyusunan Standar Harga					82		82				82						
			2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					23		23				23						
			3	Penatausahaan Barang Milik Daerah					42		42				42						
			4	Pengamanan Barang Milik Daerah					33		33				33						
			5	Penilaian Barang Milik Daerah					83		83				83						
			6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					57		57				57						
		SEMULA	Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang dimanfaatkan	100,00	2.871.858.000							100,00	100,00				7143,00	6018,00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			1	Pemanfaatan Barang Milik Daerah																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			2	Penilaian Barang Milik Daerah																	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		MENJADI	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Potensi Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan	100	2.871.858.000	85,71	1.598.354.420	85,71	1.226.284.200	100	719.600.072	116,67	58,68	100	719.600.072	100	140,8971162			BPKA
			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			100														
			2	Penilaian Barang Milik Daerah			100														
			3	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			100														
			4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			100														
		Menjadi	1	Penyusunan Standar Harga					82,44		82,44				82,44						
			2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					22,74		22,74				22,74						
			3	Penatausahaan Barang Milik Daerah					42,46		42,46				42,46						
			4	Pengamanan Barang Milik Daerah					32,50		32,50				32,50						
			5	Penilaian Barang Milik Daerah					82,50		82,50				82,50						
			6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					56,50		56,50				56,50						
			Urusan Pemerintah Pilihan																		
			Penunjang Urusan																		
			Kepezawalan, Pendidikan dan Pelatihan																		
	6																				

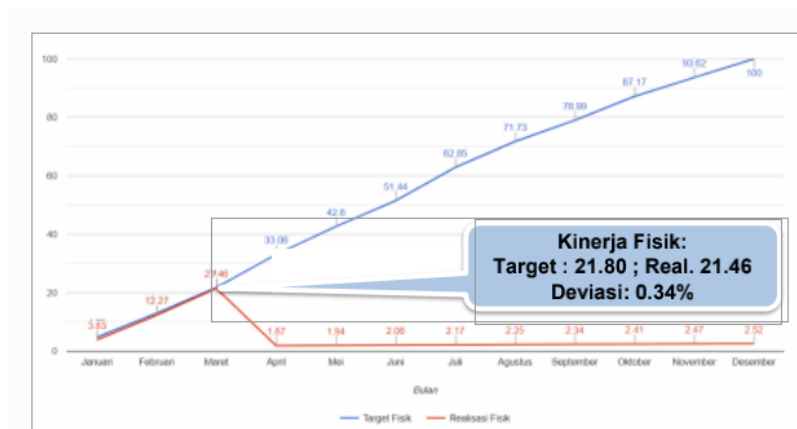
No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,		
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			SEMULA	Program Perencanaan Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1) Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezetting)	85,00	116.156.078.312					115,09	100,00	93,22	6.506.986.122	109,67	5,60	BKD				
					2) Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi Valid dan Update	92,20						100,69		91,02		98,72						
			1	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur								100,00	5412,00									
			2	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur								100,00	9944,00									
				Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier Pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85,00	192.168.432.100					100,99	91,10	82,81	15.662.214.867	97,42	8,15	BKD				
			1	Pengembangan Profesionalisme Aparatur								100,00	9135,00									
			2	Pengelolaan Jabatan dan Perindahan Aparatur								100,00	8935,00									
				Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,00	91.732.903.551					106,37	83,15	96,80	4.578.492.441	104,09	4,99	BKD				
			1	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur								99,00	9842,00									
			2	Penegakan Disiplin Aparatur								90,00	5668,00									
				Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	81,26 26)	477.416.500					109,76	92,94	86,71	1.771.203.984	1,07	371,00	BKD				
			1	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian								100,00	9962,00									
			2	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun								100,00	8751,00									
				Program Pengelolaan Pengukuran kompetensi pegawai	Persentase kompetensi individu yang termetakan	49,76	985.763.183.062					92,04	84,47	41,85	5.745.242.498	84,10	0,58	BKD				
			1	Pengukuran Kompetensi Pegawai								91,00	8.329,00									
			2	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai								100,00	996,00									
				MENJADI	Program Kepegawaian Daerah,	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezetting)	85,00	11.615.607.831	88,56	8.906.408.902	0	4.180.701.500	-	3.200.726.218	0,00%	76,56%	88,56	45.969.488.618	104,19	20,59	BKD	
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi Valid dan Update	92,20		92,85			0		-		0,00%		92,85		100,70			
					Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85,00	192.168.432.100	93,35			0		-		0,00%		93,35		109,82		BKD	
					Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,00	9.173.290.355	97,30			0		-		0,00%		97,30		104,62		BKD	
					Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian,	81,26	477.416.500	88,84			0		-		0,00%		88,84		109,33		BKD	
					Persentase kompetensi individu yang termetakan	49,76	9.857.631.831	45,09			0		-		0,00%		45,09		90,61		BKD	
			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		100,00	100			37,40	34,08		37	2,56	100,00	7,51				BKD		
			2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		100,00	100			2,50	10,31		2,50	0,91	100,00	8,83				BKD		
			3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		100,00	100			42,30	42,35		42,30	37,68	100,00	88,97				BKD		

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14
			4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00		100		12,50	11,27	12,50	7,59	100,00	67,35					BKD	
			5	Pengelolaan Data Kepegawaian	100,00		100		16,90	10,50	16,90	10,16	100,00	96,76					BKD	
			6	Pengelolaan Mutasi ASN	100,00		100		39,40	38,82	39,40	5,51	100,00	14,19					BKD	
			7	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100,00		100		61,10	61,17	61,10	31,73	100,00	51,87					BKD	
			8	Pengelolaan Promosi ASN	100,00		100		39,40	30,52	39,40	16,94	100,00	55,50					BKD	
			9	Pengelolaan Assessment Center	100,00		100		20,85	20,85	18,00	10,87	100,00	52,13					BKD	
			10	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100,00		100		28,40	28,40	14,33	12,24	100,00	43,10					BKD	
			11	Pengelolaan Pendidikan Iamitan ASN	100,00		100		55,30	48,83	55,30	48,45	100,00	99,22					BKD	
			12	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	100,00		100		47,40	43,59	47,40	36,41	100,00	83,53					BKD	
			13	Facilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	100,00		100		58,82	54,81	58,00	5,26	100,00	9,60					BKD	
			14	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100,00		100		24,60	21,53	24,60	13,53	100,00	62,84					BKD	
			15	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00		100		84,80	83,92	78,00	24,63	100,00	29,35					BKD	
			16	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100,00		100		14,00	12,91	5,00	4,13	100,00	31,99					BKD	
			17	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	100,00		100		11,00	9,65	11,00	6,84	100,00	70,88					BKD	
			18	Pembinaan Disiplin ASN	100,00		100		59,80	59,80	57,35	52,50	100,00	87,79					BKD	
			19	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00		100		61,30	59,23	61,30	57,26	100,00	96,67					BKD	
		SEMULA	Program Pendidikan Penjurangan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan (%)	20,00	29.023.672.026							68,50	60,54	58,60	14.691.811.197	293,02	50,62	Badan Diklat	
			1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II									0,00	0,00						
			2	Palatihan Dasar CPNS									0,00	0,00						
			3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III									100,00	5.027,00						
			4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV									100,00	703,00						
			Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan (%)	20,00	11.758.914.342							39,48	52,05	59,72	4.726.932.398	298,60	40,20	Badan Diklat	
			1	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis									100,00	5.296,00						
			2	Diklat Fungsional									100,00	4.532,00						
			Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kedekatan	Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama (%)	90,00	8.377.016.882							119,05	91,06	118,44	724.201.800	131,60	8,65	Badan Diklat	
			1	Promosi dan Pembinaan Kemitraan									100,00	9.714,00						
			2	Penyelenggaraan Kemitraan									100,00	8.246,00						
			Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat (Skor)	82,00	39.981.236.753							102,48	97,60	79,55	2.051.106.941	97,01	5,13	Badan Diklat	
			1	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat									100,00	9829,00						
			2	Pengelolaan Mutu Pelaksanaan Diklat									100,00	9627,00						
			3	Penelitian Kedekatan									100,00	100,00						
			4	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat									100,00	100,00						
		MENJADI	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,	Presentase ASN Peserta Diklat Penjurangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan (%)	20,00	29.023.672.026	85,83	3.121.519.267	0,00	3.924.189.750	-	2.452.841.071	0,00%	62,51%	85,83	27.768.412.674	429,15	60,87	Badan Diklat	
				Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan (%)	20,00	11.758.914.342	86,43		20,00		86,66	433,30%		86,66			433,30		Badan Diklat	

No	Kode	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket,
					K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Presentase Realisasi Kelikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama (K)	90,00	837.701.688	100		90,00		100,00		111,11%		100,00		111,11		Badan Diklat	
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat (Skor)	82,00	3.998.123.675	85,75		82,00		82,00		100,00%		85,75		104,57		Badan Diklat	
			1	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis/umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	100,00		100		16,74	16,71	16,74	3,41	100,00	20,37					Badan Diklat	
			2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	100,00		100		27,31	20,44	27,31	19,07	100,00	69,83					Badan Diklat	
			3	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan Serta jabatan Fungsional	100,00		100		16,35	16,29	16,35	15,54	100,00	95,05					Badan Diklat	
			4	Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pembang Kompetensi dan Sumber Belajar	100,00		100		19,70	13,73	19,70	13,65	100,00	69,29					Badan Diklat	
			5	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	100,00		100		75,80	72,75	75,80	41,84	100,00	55,20					Badan Diklat	
			6	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	100,00		100		41,16	34,74	41,16	20,76	100,00	50,44					Badan Diklat	

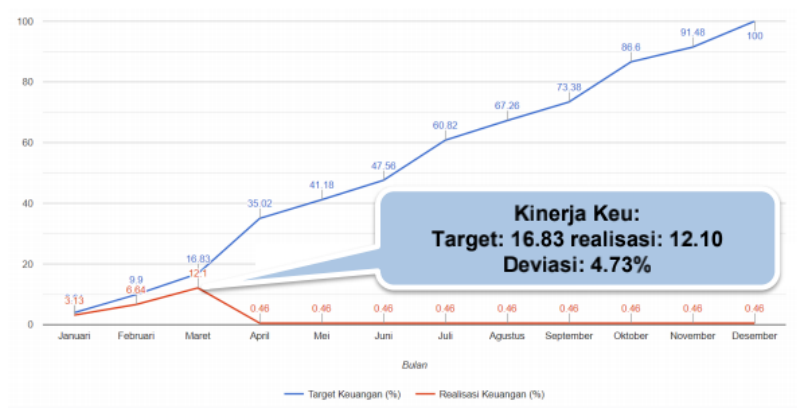
2.2.5 Ihtisar Kinerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I, Tahun 2022

Sampai dengan Triwulan, I Tahun 2022 kinerja seluruh Perangkat Daerah di DIY memiliki realisasi fisik output sebesar 21,46 persen (deviasi 0,34 persen) dan realisasi keuangan sebesar 12,10 persen (4,73 persen) dengan gambaran sebagai berikut.



Sumber: Sengguh, 2022

Gambar 2-109 Target dan Realisasi Kinerja Fisik Pemda DIY, s.d. TW I, 2022

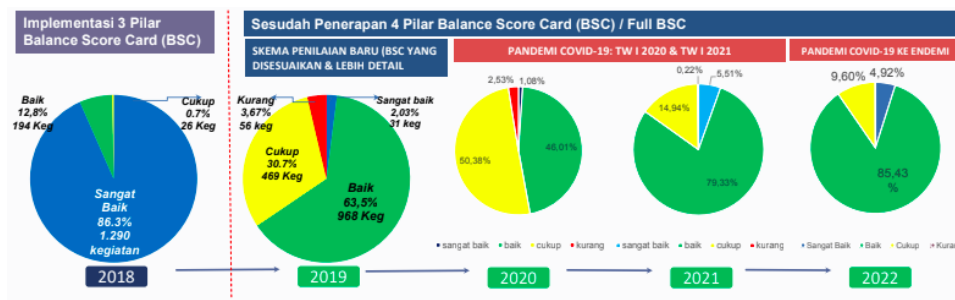


Sumber: Sengguh, 2022

Gambar 2-110 Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemda DIY, s.d. TW I, 2022

Terjadinya deviasi realisasi fisik output disebabkan karena (1) Redesain sub kegiatan; (2) Penjadwalan ulang pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka memenuhi perizinan dari lembaga eksternal (3) Belum Terealisasinya hibah karena prasyarat realisasi dari penerima hibah belum terpenuhi. Sedangkan deviasi keuangan terjadi karena: (1) terdapat proses penyelesaian SPJ OPD yang masih berjalan; dan (3) Efisiensi pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Dalam hal penilaian kinerja kegiatan instansi OPD secara umum semakin meningkat kualitasnya dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada Triwulan I, 2022 sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan OPD memiliki kualitas baik (85,43 persen), sebagian kecil memiliki kualitas sangat baik (4,92 persen) dan kualitas cukup (9,60 persen).



Sumber: Bappeda, 2022

Gambar 2-111 Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi Pemda DIY

Dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi, Pemerintah Daerah DIY telah menggunakan Balance Score Card (BSC) sejak tahun 2019. Pada masa transisi awal BSC 2019-2020 (triwulan I) terdapat nilai merah karena OPD beradaptasi dengan mekanisme penilaian yang baru terhadap parameter pilar ke-4 *learning and growth organization* antara lain *logframe*, KAK, Inovasi, dan lintas sektor.

2.2.6 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal, maka ditetapkan ukuran yakni melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penerapan SPM Pemda DIY sampai dengan Tahun 2021, berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 belum optimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Belum termuatnya perencanaan pemenuhan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, baik RPJMD, hal ini disebabkan karena RPJMD DIY 2017-2022 telah ditetapkan sebelum terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018;
2. Perencanaan dan Capaian SPM 6 Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021), didasarkan pada Target dan Rencana tahunan, dari masing-masing OPD Pengampu SPM;
3. Kemampuan APBD DIY terbatas untuk dapat memenuhi Standar Kuantitas dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Pedoman/Regulasi.
4. Masih adanya OPD Pengampu SPM yang belum mengintegrasikan SPM di dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.
5. Masih adanya kesalahan persepsi terhadap SPM yang dianggap merupakan pelaksanaan 6 bidang urusan

pelayanan dasar secara keseluruhan. Sehingga di dalam merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan indikator SPM masih belum memperhatikan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM.

6. Di dalam penganggaran untuk pemenuhan SPM, nomenklatur perencanaan pembangunan daerah untuk pemenuhan SPM belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM.
7. Terdapat nomenklatur perencanaan pembangunan daerah untuk pemenuhan SPM di dalam Aplikasi Pelaporan SPM Bangda yang tidak tercantum di dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah antara lain Penyediaan Beasiswa Miskin dan Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan, padahal sasaran SPM diprioritaskan untuk masyarakat miskin/tidak mampu.
8. Nomenklatur perencanaan pembangunan daerah pada Kegiatan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota di dalam Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dijadikan satu dalam 1 Kegiatan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tidak dirinci per Indikator sedangkan di dalam pelaporan SPM dalam Aplikasi SPM Bangda harus dirinci per Indikator SPM.
9. Untuk penganggaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat masih terkendala oleh belum sinkronnya

kelembagaan antara BPBD DIY dengan DPUP-ESDM DIY dan belum masuknya tolak ukur kinerja pemenuhan SPM di Dinas PUP-ESDM DIY. Anggaran Bidang Perumahan sebagian besar untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni secara keseluruhan bukan untuk pemenuhan indikator SPM.

10. Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang tercantum di dalam aplikasi pelaporan SPM dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan/ berbeda-beda antara kebutuhan satu daerah dengan daerah lain.
11. Belum adanya regulasi teknis (Perda/Perkada) terkait pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar misalnya pengaturan mengenai besaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada untuk pemenuhan indikator pelayanan tramtibum.
12. Masih kurangnya kemampuan keuangan daerah yang relatif belum mampu secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal.
13. Anggaran untuk pemenuhan indikator SPM tidak luput dari pemotongan akibat refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga terdapat indikator yang tidak dianggarkan pemenuhannya.

Selanjutnya evaluasi capaian standar minimal per bidang dan jenis pelayanan dasar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-277 Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal DIY 2019-2021

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	PENDIDIKAN				82%			93,50%			
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	149.880	119.834	80%	155.509	153.161	98%	151.951	120.622	79,4%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	9.394	7.931	84%	5.633	5.007	89%	8.422	7.575	89%
2	KESEHATAN				100%			100%			90,97%

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	16.426	16.426	100%	3.671.189	3.671.189	100%	40	40	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	21.586	21.586	100%	40	40	100%	2.928.242	2.928.242	100%
3	PEKERJAAN UMUM				100%			100,5%			

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	238.200	238.200	100%	1.080.000	1.080.000	100%	108.735	83.072	76,4%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	120.500	125.095	100%	125.000	126.470	101%	131.500	126.945	96,5%
4	PERUMAHAN RAKYAT				100%			100%			100%

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	59	59	100%	10	0	0%	5	5	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%	18	18	100%
5	TRANTIBUML INMAS				100%			100%			

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdatan dan perkara di Provinsi	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%
6	SOSIAL				100%			100%			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	435	435	100%	485	485	100%	555	555	100%

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	140	140	100%	280	280	100%	737	737	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	214	214	100%	1324	1324	100%	1.314	1.324	101%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	50	50	100%	415	415	100%	252	252	100%

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		dalam panti									
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%	2.832	2.832	100%	11.602	11.602	100%

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan di banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi. Demikian juga dengan Indonesia yang masih memiliki jumlah kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi terutama akibat adanya pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya kemiskinan termasuk di DIY.

Penghapusan kemiskinan menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai contoh adalah yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Setelah sebelumnya tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada September tahun 2020 tingkat kemiskinan di DIY meningkat mencapai 12,80% atau mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kondisi pada September 2019 yang sebesar 11,44%. Tingkat kemiskinan DIY selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan data BPS, pada September 2021, persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,91% sementara itu di tingkat nasional hanya sebesar 9,71%.

Peningkatan kemiskinan di DIY terlihat mulai meningkat pada September 2020 yang diduga terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,39%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 13,5%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,12% untuk Kabupaten Sleman dan 7,27% untuk Kota Yogyakarta.

Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Data pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Arahan presiden agar kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024.

Hal-hal yang masih menjadi kendala penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara
3. Belum semua daerah memiliki kelembagaan TKPKD
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Pelaksanaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi.

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan yang dilakukan. Tanpa jaminan kesehatan, maka masyarakat -khususnya yang berada pada ekonomi bawah-bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan. Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dsb). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan. Baik oleh pemerintah, maupun menyediakan jaminan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan UU Nomor 40/2004 tentang SJSN dan UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, pendanaan layanan kesehatan perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan. Sedangkan sumber dana dari Pemerintah/ Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.

Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah universal health coverage (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95 persen. Sampai dengan Maret 2021, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Yogyakarta mencapai 92,04 persen artinya pada tahun 2021 DIY tidak mencapai UHC dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Problem utama akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, di mana tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS. Padahal updating data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen

penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

2.3.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir yaitu 0,42 pada Maret 2016 dan meningkat menjadi 0,44 pada Maret 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun yaitu 0,39 pada Maret 2016 dan meningkat menjadi 0,38 pada Maret 2021. Ketika terjadi krisis ekonomi global angka Indeks Gini DIY pada tahun 2018 (0,44) menyamai tahun 2021 (0,44) dan masing-masing naik dari Indeks Gini tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 0,43 dan tahun 2020 sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa angka Indeks Gini DIY sangat dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi seperti krisis ekonomi global dan dampak pandemi Covid19 pada sektor ekonomi.

Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan DIY masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang, namun Indeks Gini DIY merupakan yang tertinggi secara nasional. Kembali meningkatnya Indeks Gini DIY sejak tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ebel & Yilmaz, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan

menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF (2015) menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah ini. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah.

Secara kewilayahan, indeks gini di perkotaan relatif lebih tinggi daripada pedesaan. Indeks gini perkotaan tahun 2021 0,44, sedangkan di pedesaan pada tahun 2021 sebesar 0,33. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di pedesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.

2.3.1.3 Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Indeks Williamson DIY pada periode tahun 2016-2020 masuk dalam kategori sedang dan terus menurun selama lima tahun terakhir dengan besar nilai indeks sebagai berikut 0,466 di tahun 2016, 0,465 di tahun 2017, 0,459 di tahun 2018, 0,454 di tahun 2019, dan 0,45 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah di DIY terus menipis. Pembangunan proyek yang banyak berlokasi di wilayah selatan DIY antara lain: Bandara Internasional Yogyakarta dan Jalur Jalan Lintas Selatan menimbulkan bangkitan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan PDRB di wilayah bersangkutan.

Masih cukup tingginya angka Indeks Williamson di DIY selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga

disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Bappeda DIY (2021) menyatakan bahwa nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di kabupaten/kota DIY. Proporsi realisasi investasi terbesar pada tahun 2020 berada di Kabupaten Kulon Progo (66%). Selanjutnya diikuti oleh Sleman (22%) dan Kota Yogyakarta (9%). Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 1%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor tersier dan sekunder.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 87,18 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,00) dan Bantul (80,28) masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 74,71 dan Gunungkidul sebesar 70,16 termasuk dalam kategori "Tinggi".

Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita Kota

Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2021 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Gunungkidul.

2.3.1.4 Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. BPS DIY dalam Statistik Lingkungan Hidup DIY (2021) menyampaikan beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DIY antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air.

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY juga tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung terus menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53.

Jika dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru mengalami perbaikan dari sebesar 84,24 pada tahun 2018 menjadi 88,57 pada tahun 2021.

Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. DLHK DIY (2021) menyampaikan bahwa secara rata-rata kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu

klas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L. Hal tersebut berada di atas nilai baku mutu klas I yang ditetapkan (10 mg/l).

Di sisi lain, pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo.

Selain itu, kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan pemutakhiran data PODES 2020 menunjukkan bahwa bencana yang paling banyak melanda wilayah kalurahan di DIY adalah bencana banjir. Bencana banjir melanda sebanyak 58 kalurahan di DIY. Selain itu, bencana yang seringkali terjadi di wilayah DIY adalah tanah longsor. Sebanyak 55 kalurahan pernah mengalami bencana ini pada tahun 2020. Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Bantul (15 kalurahan). Bencana kekeringan juga banyak ditemui di DIY. Sebanyak 55 kalurahan di wilayah ini mengalami kekeringan pada tahun 2020. Gunungkidul merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang mengalami bencana tanah longsor, yaitu 35 kalurahan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Urusan Pendidikan

2.3.2.1.1.1 Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas.

Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan di pedesaan, dan

lainnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Menurut BPS tahun 2021 HLS Indonesia sebesar 13,08 tahun. Untuk wilayah DIY, HLS rata-rata 15,64 atau berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, HLS di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY, bahkan HLS Gunungkidul sebesar 12,98 tahun merupakan yang terendah di DIY, dan masih berada di bawah rata-rata nasional. hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan di DIY.

2.3.2.1.1.2 Mutu pendidikan yang belum optimal

Keberhasilan mutu pendidikan salah satunya diukur dari nilai capaian indeks mutu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dari setiap satuan pendidikan. Kriteria minimal tersebut mencakup delapan aspek, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian. Dari SNP dikonversi pada rapor mutu dalam beberapa kategori nilai dimana sekolah disebut telah menyelenggarakan SNP pada rentang nilai 6,67 sampai dengan 7.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DIY melaporkan dalam LAKIP LPMP DIY tahun 2020 terdapat 68,2% satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SLB) yang melaksanakan SNP. Artinya 32,8% satuan pendidikan yang belum mencapai tandar mutu SNP. Sedangkan jika melihat target SDGs 2021 persentase SMA/MA dengan akreditasi minimal B baru mencapai 92,76% dari target 96,02%

2.3.2.1.1.3 Adanya disparitas tingkat pendidikan penduduk antar Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data perkembangan rata-rata lama sekolah di DIY sejak tahun 2017-2021, kabupaten/kota yang capaiannya rata-rata lama sekolah di atas DIY yaitu Kota Yogyakarta dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling tinggi disusul Sleman dan Bantul. sedangkan untuk daerah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY. Rata-rata lama sekolah

di Kota Yogyakarta yang paling tinggi di DIY pada angka 11,72 di tahun 2021, cukup jauh capaiannya dibandingkan Gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling rendah di DIY dengan nilai sebesar 7,30 tahun pada 2021. Perbedaan yang signifikan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

2.3.2.1.1.4 Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah

Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Masih banyak tenaga kerja yang pendidikan yang tidak bersekolah/belum pernah sekolah dan menamatkan pendidikan dasar dengan persentase 41,42% di tahun 2021. Tenaga kerja dengan jenjang Pendidikan menengah sebesar 40,05% dan jenjang diploma/universitas sebanyak 13,71%. Masih tingginya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan jenjang pendidikan dasar tersebut berpotensi menyebabkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah.

2.3.2.1.2 Urusan Kesehatan

2.3.2.1.2.1 Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa PTM berada di atas rata-rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke, Kanker, Asma, Penyakit Ginjal Kronis, dan termasuk gangguan jiwa.

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2020 baru mencapai 42%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Diperlukan pula peningkatan kapasitas SDM, mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, serta penguatan jejaring kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

2.3.2.1.2.2 Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular

Beberapa penyakit menular di DIY masih memerlukan perhatian karena tingginya kasus dan angka kematiannya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2020 kasus DBD di DIY sebanyak 3.623 kasus dengan kematian sebanyak 13 orang. Jumlah kasus DBD tertinggi di tahun 2020 berada di Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk HIV-AIDS sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi kasus HIV sebanyak 5.627 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 363 kasus. Penemuan kasus baru HIV lebih banyak ditemukan pada laki-laki (69,6%) dengan kasus tertinggi pada rentang usia 25-49 tahun. Sedangkan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun. Akses kesehatan, kapasitas SDM kesehatan dan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan.

2.3.2.1.2.3 Prevalensi Balita *Stunting* di DIY masih Cukup Tinggi

Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita stunting di DIY sebesar 17,3% sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita stunting di DIY tahun 2020 sebesar 11,08% dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,40%.

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi *stakeholder* dalam pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik ditujukan pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih ditujukan pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi

sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.

2.3.2.1.2.4 Distribusi Tenaga Medis yang belum Merata

Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten. Ketimpangan ini seperti terlihat dari data jumlah tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), jumlah dokter umum di Kabupaten Sleman (713 orang) dan Kota Yogyakarta (377 orang) yang sebesar 1090 orang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3 kabupaten (Kabupaten Bantul 157 orang, Kabupaten Kulon Progo 152 orang, dan Kabupaten Gunungkidul 205 orang) lain yang hanya sebesar 514 orang. Perlu diantisipasi standar dan penguatan layanan kesehatan di daerah pusat pertumbuhan di DIY.

2.3.2.1.2.5 Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan

Kasus kematian ibu bersalin di DIY masih terjadi di DIY, pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu mencapai 40 kasus dengan penyebab kematian. Pada tahun 2021 disinyalir akan terjadi kenaikan kasus karena kendala terhambatnya layanan Kesehatan Ibu dan Anak di masa pandemi Covid-19. Sampai dengan tahun 2021 untuk jumlah kasus kematian ibu melahirkan sudah mencapai 131 kasus.

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan perlu lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan inovasi dan adaptasi untuk meminimalisir resiko Covid-19.

2.3.2.1.2.6 Adanya Ancaman Wabah

Hasil kajian Indeks Resiko Bencana DIY di tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko bencana di DIY cukup tinggi. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dini dan upaya penanganan termasuk di sektor kesehatan. Selain itu perlu diwaspadai munculnya penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah akibat perubahan iklim, mobilitas penduduk, dan kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal diutamakan bahwa kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi: layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.

2.3.2.1.2.7 Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) agar seluruh penduduk memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. Sampai dengan Maret 2021, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Yogyakarta mencapai 92,04%, hal ini berarti pada tahun 2021 DIY tidak mencapai UHC atau dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permasalahan kepesertaan menjadi permasalahan utama dalam pencapaian UHC di DIY, hal ini dikarenakan belum sinkronnya data kepesertaan PBI JKN dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemda DIY bersama mitra *stakeholder* secara rutin telah melaksanakan koordinasi kepesertaan PBI JKN di DIY, namun beberapa kendala masih dihadapi dalam pendataan kepesertaan PBI JKN yaitu *updating* data yang sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh kabupaten/kota di DIY setelah diusulkan ke Kementerian Sosial RI tidak menjadi bagian dari *updating* DTKS sebagai dasar penentuan penerima program JKN KIS. Selain itu, kendala terbatasnya akses data BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program JKN di wilayah kerja menyebabkan data kepesertaan masih belum selaras dengan data yang dimiliki Pemda DIY, sehingga diperlukan sinkronisasi data kepesertaan secara lebih intensif.

Dari sisi pelayanan jaminan kesehatan, Pemda DIY melalui Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial DIY (Bapeljamkesos DIY) menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Layanan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta. Jaminan Kesehatan Semesta merupakan sistem jaminan

kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat dari layanan Jamkesta adalah Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga yang meliputi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang secara regulasi. Penerima manfaat lain adalah penyandang disabilitas miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan paket manfaat meliputi layanan kesehatan umum dan layanan alat bantu.

2.3.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.2.1.4 Sub. Urusan Sumber Daya Air dan Drainase

2.3.2.1.4.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air dan drainase

Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan penanganan sungai dengan para pihak, termasuk didalamnya kesepakatan dalam pengaturan batas sempadan sungai baik di Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat.

2.3.2.1.4.1.2 Penyediaan air baku bersumber dari lokasi di luar wilayah DIY. untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industry (RKI).

Untuk pemenuhan kebutuhan air domestik Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta serta Kawasan Industri Piyungan merupakan bagian dari DAS OPAK, sementara Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari DAS SERANG, sementara untuk pemenuhan kebutuhan Irigasi DI Sapon dan DI Pijenan serta Kawasan Industri Sentolo merupakan bagian dari DAS PROGO.

2.3.2.1.4.1.3 Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum optimal .

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil perhitungan Neraca Air 2021/2022 dari Dinas PUPESDM, dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi DIY, Daerah Irigasi yang masih kekurangan air adalah D.I Semoyo di Kabupaten Sleman, D.I Payaman dan D.I Simo di Kabupaten Gunungkidul . Selain itu kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai serta terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI (*Water District*) di musim kemarau, serta bangunan irigasi yang sudah berumur.

2.3.2.1.4.1.4 Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA

Hal ini menyebabkan konservasi SDA tidak optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

2.3.2.1.4.1.5 Pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertikal masih belum jelas.

Menurunnya kapasitas saluran drainase yang ada telah memunculkan genangan, seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase. Sesuai dengan Master Plan penanganan genangan APY 2009 terdapat sejumlah 51 titik genangan, dimana 41 titik telah mendapatkan penanganan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan 10 titik lokasi belum diupayakan penanganannya hingga tahun 2021, hal ini sejalan dengan masih belum adanya kejelasan kewenangan dalam penanganannya. Selain itu telah terdapat 30 lokasi baru titik genangan, sehingga masih terdapat 40 lokasi titik genangan yang perlu mendapat perhatian. Sementara penanganan drainase untuk mengurangi 1 titik genangan dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan holistic oleh pemda DIY agar penanganan genangan menjadi lebih efektif.

2.3.2.1.5 Sub. Urusan Jalan

2.3.2.1.5.1.1 Belum optimalnya konektivitas Jalan

Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. kondisi jalan kewenangan Provinsi belum semuanya sesuai dengan standar serta kondisi jaringan jalan belum seluruhnya dalam kondisi mantap

Total Panjang ruas Jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur No. 118/Kep/2016 sebesar 760,450 km. Kondisi jalan kewenangan Provinsi ada yang masih belum sesuai dengan standar dan kondisi kemantapannya masih di angka 70,52%. Atau 536,295 km terdiri dari kondisi baik 341,840 km dan kondisi sedang 194,455 km. Panjang jalan kondisi tidak mantap sebesar 224,155 km yaitu kondisi rusak ringan 156,935 km dan kondisi rusak berat 67,220 km.

2.3.2.1.5.1.2 Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud, utamanya di jalur jalan Pantai Selatan (Pansela)

Jalur jalan pantai selatan didukung oleh pembangunan Jalur Jalan Pantai Selatan (JJLS). Panjang JJLS keseluruhan di wilayah DIY sepanjang 116,07 km. Sampai dengan akhir 2021 lahan Jalur Jalan Pantai Selatan (JJLS) yang terbebaskan untuk 2 lajur total 116,07 km dengan konstruksi yang sudah dibangun sepanjang 72,22 km. Sementara lahan yang telah dibebaskan untuk 4 lajur baru sepanjang 74,08 km.

2.3.2.1.5.2 Sub. Urusan Cipta Karya

2.3.2.1.5.2.1 Masih terdapat penduduk yang baru terlayani akses dasar air minum, sehingga perlu ditingkatkan menjadi akses layak dan aman.

Capaian penduduk berakses air minum tahun 2021 di DIY adalah 92,92%. Penduduk DIY yang telah memiliki akses perpipaan baik yang bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota maupun SPAMDES mencapai 35,92%, sedangkan 57% merupakan capaian non perpipaan.

2.3.2.1.5.2.2 Belum seluruh penduduk terlayani akses sanitasi yang layak.

Hal ini terjadi karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2021 adalah 26.050 SR dengan kapasitas pengolahan IPAL Sewon yang sudah ditambah menjadi 75.000 SR, sehingga realisasi pelayanan air limbah sampai saat ini adalah 34,73%. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan (sampah diangkut ke TPA) dan pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan.

2.3.2.1.5.2.3 Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka.

Hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat buangan sampah, serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum dilakukan pengolahan, kemudian langsung dibuang atau dialirkan ke sungai.

2.3.2.1.5.2.4 Bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi belum seluruhnya diperiksa keandalannya.

Keandalan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

2.3.2.1.5.3 Sub. Urusan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

2.3.2.1.5.3.1 Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.

Capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat di tahun 2021 adalah 67,58% yaitu 1.626 orang dari target 2.406 orang. Dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli.

2.3.2.1.5.3.2 Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

Persentase Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tahun 2021 adalah 83,33% diperoleh dari pembobotan unsur layanan informasi yang terdiri dari profil tim pembina jasa konstruksi provinsi, potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala. Layanan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan hanya dapat menampilkan paket bersumber dari dana APBD.

2.3.2.1.5.4 Sub Penataan Ruang

2.3.2.1.5.4.1 Dokumen perencanaan penataan ruang belum tersedia lengkap dan belum sesuai dengan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau kecil terluar (RZWP3K) DIY dan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) pada 18 Satuan Ruang Startegis (SRS) DIY wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dokumen RDTR belum tersedia lengkap, dari total 25 RDTR di DIY, baru tersedia 3 (tiga) RDTR yang sudah terintegrasi OSS yaitu RDTR Kota Yogyakarta, RDTR Kawasan Sleman Timur dan RDTR BWP Siung Wediombo, serta 2 (dua) RDTR yang belum terintegrasi OSS yaitu RDTR Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kasihan dan BWP Sewon. Dokumen perencanaan tata ruang belum tersedia secara lengkap pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan, yang terdiri dari rencana rinci sudah tersedia 20% dari total 20% Rencana Rinci, Rencana Induk 18 SRS baru tersedia 1,94% dari total 7% Rencana Induk dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) baru tersedia 5,06% dari total 13% RTBL. Rencana Rinci Tata Ruang atau Strategi Pengembangan Wilayah di 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) yaitu Karaton, Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Gunung Merapi, Pantai Samas-Parangtritis, Kerto-Pleret, Kotabaru, Candi Prambanan-Candi Ijo, Sokoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu, Pantai Selatan Gunungkidul, Puro Pakualaman, Makam Girigondo, Pusat Kota Wates dan Pantai Selatan Kulon Progo belum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

2.3.2.1.5.4.2 Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal.

Hasil penilaian kesesuaian ruang pada perwujudan program dalam struktur ruang dan pola ruang hingga tahun 2021 mencapai 78,66% program. Klasifikasi nilai kesesuaian indikasi program tersebut, berdasarkan kategori penilaian sebagaimana tercantum dalam Permen ATR Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang berada pada klasifikasi kurang berkualitas (50%-80%). Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan belum optimal. Hingga tahun 2021, penyusunan DED pada 18 SRS baru tersedia sebanyak 4,17% dari total 15% DED, sedangkan pelaksanaan konstruksi pada 18 SRS sudah terlaksana sebesar 12,50% dari total 45% konstruksi. Hal ini diantaranya disebabkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap rencana tata ruang belum optimal serta Sinkronisasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang belum optimal. Hingga tahun 2021, untuk aspek pengaturan penataan ruang baru mencapai 26,40% dari total 30% pengaturan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang sebesar 29,75% dari total 40% pembinaan penataan ruang dan aspek pelaksanaan dan pengawasan tata ruang baru mencapai 26,64% dari total 30% pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.

2.3.2.1.5.4.3 Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan insentif-disinsentif dan sanksi administrasi dan pidana) belum tersedia secara lengkap. Selain itu

instrumen pengendalian yang sudah ada belum diberlakukan secara optimal untuk menindak pelanggaran pemanfaatan ruang. Hal ini ditambah dengan kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang di Pemda DIY.

2.3.2.1.6 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

2.3.2.1.6.1 Belum optimalnya penanganan RTLH.

Realisasi persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak melalui Program Penyelenggaraan Perumahan dengan capaian melalui penanganan rumah tidak layak huni berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi. Penanganan RTLH sampai dengan tahun 2021 berjumlah 36.669 unit dari total 1.228.488KK (Susenas 2020), sehingga jumlah rumah layak huni di DIY sebanyak 1.191.819 KK atau sebesar 97,02%.

Dengan baseline 65.578 unit Rumah Tidak Layak Huni, penanganan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di DIY hingga Tahun 2021 telah tertangani sebesar 55,91% atau 36.669 unit dan telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 43,10% sehingga capaian nya menjadi 129%. Namun demikian masih ada 28.909 unit RTLH yang masih perlu penanganan.

2.3.2.1.6.2 Penanganan kawasan kumuh yang belum optimal.

Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh diantaranya terkait dengan bertambahnya kawasan kumuh yang perlu ditangani dan penentuan kriteria/kawasan yang diintervensi melalui PSU secara bersama dengan kabupaten/kota dan yang diintervensi melalui program dari APBN (untuk kepastian lokasi penanganan apakah pada kawasan kumuh sesuai SK Kumuh dari kabupaten/kota dan pada Kapanewon Miskin).

2.3.2.1.6.3 Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin.

Harga perumahan yang relative semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki perumahan dan permukiman yang laka dan aman semakin sulit.

Selain itu dengan tingginya harga lahan juga menyebabkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran

pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas.

Keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan MBR yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin yang tidak bankable, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa menyicil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa, (rusunawa atau melalui skema pasar).

2.3.2.1.6.4 Pelaksanaan NSPM Bidang Perumahan belum Optimal.

Perlu adanya kejelasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Perumahan.

Merujuk pada Permen PU-Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa NSPM Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan tersebut tidak dapat dihitung menjadi capaian NSPM, karena yang seharusnya melakukan NSPM adalah Dinas yang menangani Bidang Perumahan, sehingga perlu adanya kejelasan terkait penetapan target NSPM tersebut, apakah apa yang dilakukan oleh BPBD juga bisa dimasukkan kedalam capaian target pelaksanaan NSPM Bidang Perumahan.

Selain itu masih adanya kendala dalam penyediaan lahan untuk melakukan NSPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.

2.3.2.1.7 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.3.2.1.7.1 Kasus kriminalitas, khususnya kriminalitas jalanan cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, kasus kejahatan jalanan di DIY pada Tahun 2019 hanya sejumlah 19 kasus. Namun demikian, kasus ini meningkat drastis menjadi 56 kasus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kasus sedikit menurun menjadi 51 kasus. Meskipun terdapat penurunan, secara umum kasus kejahatan jalanan di DIY masih tinggi.

Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terlebih bahwa DIY menjadi pusat dari lembaga pendidikan serta pariwisata. Masa pandemi menjadikan kehidupan ekonomi rakyat tersendat, akhir tahun 2021 menjadi momentum untuk dilakukan pemulihan, namun justru kasus kriminalitas di jalanan ini semakin marak. Melalui media sosial kabar ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dikonsumsi masyarakat luar, sehingga akan menjadi pertimbangan banyak pihak untuk masuk ke DIY. Kondisi keamanan ini hendaknya menjadi jaminan pada tiap tahunnya, sehingga menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan. Stabilitas keamanan menjadi pondasi pada kehidupan bermasyarakat selanjutnya, di berbagai sektor yang ada.

2.3.2.1.7.2 Makin maraknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pada 2 tahun masa pandemi, makin marak keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan di wilayah DIY yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pada tahun 2021 dari operasi penertiban, telah terjaring 135 orang, yang terdiri dari pengemis, gelandangan, pengamen, manusia boneka, manusia silver dan psikotik. Demikian pula pelanggaran pemasangan reklame di jalan-jalan Provinsi. Dari 8 operasi reklame dan spanduk selama tahun 2021, Satpol PP DIY telah mengamankan 698 pelanggar. Selain itu, penambahan liar juga semakin marak, terutama pada daerah aliran sungai, pegunungan dan wilayah perbatasan.

2.3.2.1.7.3 Risiko bencana di DIY masih tinggi dan kapasitas kolaboratif dalam menghadapi bencana belum optimal

Indeks resiko bencana (IRBI) di DIY berdasarkan hasil kajian pada tahun 2021 nilainya sebesar 124,15. Skor IRBI 124,15 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi. Tercatat ada 7 ancaman bencana alam dari total 12 ancaman bencana yang terdapat di DIY, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan dan tsunami. Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap resiko bencana di DIY. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek peningkatan kapasitas terpenuhi. Kolaborasi multi-aktor (pentaheliks) juga masih belum optimal.

2.3.2.1.7.4 Antisipasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024

Dinamika menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024 yang prosesnya sudah dimulai pada tahun 2022/2023, perlu diantisipasi baik kaitannya dengan upaya memaksimalkan partisipasi pemilih maupun dalam mengantisipasi

peningkatan suhu politik yang mungkin berimbas pada sektor yang lainnya.

2.3.2.1.8 Urusan Sosial

2.3.2.1.8.1 Penurunan Pendapatan Warga Miskin selama Pandemi

Merujuk pada data BPS DIY per September tahun 2021, tingkat kemiskinan di DIY pada September 2021 sebesar 11,91% turun 0,89% dibandingkan Maret 2021 (12,80%). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,71%). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIY menempati urutan ke 11 (dari yang tertinggi ke terendah) dan tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pada Maret 2021 Gini Rasio DIY sebesar 0,441 meningkat sebesar 0,007 dibandingkan Maret 2020.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan **penurunan pendapatan masyarakat**. Hal itu terjadi dikarenakan kombinasi guncangan penawaran dan permintaan, yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, penurunan rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita, pada tahap berikutnya sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan. Dalam upaya memahami dampak COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi pada wanita, keluarga dengan anak-anak, kelompok rentan, dan orang-orang dengan disabilitas, The SMERU Research Institute melalui *working paper* "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia" tahun 2020, melakukan survei rumah tangga terbesar yang tercatat di Indonesia yang diluncurkan antara Bulan Oktober dan Desember 2020 yang dilakukan melalui wawancara kualitatif, lebih dari 12.000 keluarga di 34 provinsi dan 247 kabupaten.

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengatakan pendapatannya lebih rendah dibanding Januari 2020. Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan lebih tinggi adalah rumah tangga yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (78,3%). Rumah tangga di semua kelompok pendapatan mulai dari termiskin ke terkaya melaporkan terjadinya penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi menjadi miskin atau rentan miskin. Selain penurunan pendapatan mereka juga menghadapi masalah peningkatan pengeluaran. Hampir seperempat responden (24,4%) mengatakan pengeluaran mereka juga meningkat.

Dampak Pandemi Covid-19 telah diakui dan terbukti secara luas yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, kehilangan pekerjaan dan perubahan budaya kerja. Data tentang penyintas Covid-19 tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak

langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam DTKS, oleh karena itu berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pelaksanaan Pergub dan sistem informasi Manunggal Raharja menjadi sarana keterlibatan Pemda DIY dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi Data Terpadu Kemiskinan.

2.3.2.1.8.2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian.

Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki 9 jenis yang dilihat berdasarkan jumlah terbesarnya yaitu: Fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, orang dengan HIV/AIDS, anak dengan kedisabilitas dan kelompok minoritas. Dari Sembilan jenis PPKS tersebut yang masuk dalam tiga besar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas ketiganya masuk dalam katagori kelompok rentan.

Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi DIY cukup besar, jumlah PPKS pada tahun 2018 sampai dengan 2021 (data berjalan) lebih dari 600.000 jiwa yang terdiri dari anak jalanan, eks psikotik, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantar, korban tindak kekerasan, pemulung, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 11.009 anak pada tahun 2018 dan berkurang menjadi 7.902 anak pada 2021. Penyandang disabilitas pada tahun 2018 sebesar 29.025 orang dan berkurang menjadi 26.866 orang pada 2021. Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif.

Data penyandang disabilitas tahun 2021 sebesar 26.866 orang dan anak dengan kedisabilitas sebesar 1971 anak. Sedangkan jumlah lansia terlantar menurun dari 2018 sebesar 42.417 orang menjadi 33.129 orang pada 2021. Data Kelompok Minoritas mengalami penurunan karena permasalahan data yang tidak terkumpul dari kelompok minoritas, hanya kelompok waria yang melengkapi data pada 2021. Namun dilihat dari data historis, kelompok minoritas masih cukup signifikan. Hal-hal ini harus menjadi perhatian dalam penerapan regulasi terkait Difabel dan Lanjut Usia yang harus dikawal untuk

menuju DIY yang inklusif.

Tingginya kasus anak terlantar jumlahnya pada tahun 2019 mendekati 10.000 anak dan walaupun pada tahun 2021 menurun menjadi 7.902 orang akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis dan anak-anak jalanan. Kasus anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah masih cukup tinggi. Demikian juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga masih signifikan, salah satunya terlihat dari fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan anak. Sementara itu sarana dan sarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai. Dampak lain dari pandemi adalah sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Data korban bencana alam meningkat menjadi 7.687, karena data tersebut per 2021 diambil dari data penanganan korban berbagai jenis bencana alam di DIY yang ditangani Dinas Sosial. Dari angka tersebut, yang cukup besar adalah dari kondisi kekeringan. Penanganan korban bencana adalah salah satu tugas fungsi Dinas Sosial DIY dan merupakan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, sehingga harus juga menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial DIY.

2.3.2.1.8.3 Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup di DIY.

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2021 adalah 75,04 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia, UHH yang tinggi juga diikuti dengan kenaikan jumlah lanjut usia terlantar, sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

Usia Harapan Hidup yang terus meningkat juga diikuti bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar, diantara para lanjut usia dan lanjut usia terlantar sebagian besar belum memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana untuk melayani lanjut usia terlantar dan memberikan jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan. Diperlukan pula pengembangan sumber daya manusia, sistem, prosedur, sarana dan prasarana

serta optimalisasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.3.2.1.8.4 Peningkatan Perhatian Terhadap Difabel Kurang Terpenuhi

Penyandang disabilitas PPKS di Provinsi DIY pada tahun 2021 sebesar 26.866 orang, jumlah tersebut cukup besar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMERU “Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia.” pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan.

Diperlukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah mengenai Difabel dan Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan DIY yang inklusif, dari sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain-lain.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

2.3.2.2.1.1 Peningkatan pengangguran terbuka

Dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2021, terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY. Angka TPT DIY akibat pandemi Covid-19 melonjak hingga di atas empat persen. Kenaikan TPT ini disebabkan karena usaha dan industri di DIY banyak yang terdampak oleh penurunan permintaan maupun karena pembatasan kegiatan masyarakat. Kondisi tersebut ditegaskan juga oleh data persentase tenaga kerja di sektor formal yang menurun. Pada tahun 2019, persentase tenaga kerja formal mencapai 48,36% lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 42,59 persen dan 44,64 persen untuk tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor usaha formal di DIY benar-benar terdampak oleh kondisi pandemi.

2.3.2.2.1.2 Penurunan Laju Produktivitas Tenaga Kerja

Laju produktivitas tenaga kerja DIY mengalami penurunan dari 5,44 persen pada tahun 2019 menjadi -0,47 persen pada tahun 2020. Secara sektoral, produktivitas DIY masih memiliki masalah pada sektor industri pengolahan. Sektor ini memiliki laju produktivitas yang lebih rendah dari rata-rata seluruh

sektor. Padahal, jika dilihat dari serapan tenaga kerjanya, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar setelah sektor pertanian.

2.3.2.2.1.3 Masih rendahnya daya saing tenaga kerja

Daya saing tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. Berdasarkan world talent ranking (IMD), misalnya, peringkat Indonesia masih berada di nomor 50 untuk tahun 2021. Capaian tersebut lebih rendah dari Thailand (43) atau Malaysia (28).

2.3.2.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.3.1.1 Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Trend selama 5 tahun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada di atas angka 1000 korban per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 1615 kasus dan terus melandai hingga tahun 2021 tercatat sebesar 1.169 korban telah ditangani oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY. Target RPJMD tentang menekan angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terpenuhi hingga akhir tahun 2021 (target 0,46 realisasi 0,52), ditambah dengan eksternalitas negatif dari dibukanya bandara internasional YIA menambah resiko peluang Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY.

Meskipun angka terus melandai, namun hingga tahun 2021 DIY belum berhasil memenuhi target penekanan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,46 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Pada tahun tersebut, dengan segala upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya DIY baru mampu menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada angka 0,52.

2.3.2.3.1.2 Terjadinya berbagai Praktik Buruk yang Mengancam Pemenuhan Hak-Hak Anak seperti Perkawinan Dibawah Umur dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Peningkatan kasus perkawinan usia anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjadi masalah yang penting untuk segera diupayakan solusinya di Pemda DIY. Hal ini dikarenakan praktik perkawinan usia anak pada faktanya menghasilkan banyak permasalahan turunan seperti kematian ibu, kemiskinan, perceraian, stunting, dan anak terlantar. Sementara, kenakalan anak yang kemudian menyebabkannya harus berhadapan dengan hukum pun membawa permasalahan-permasalahan baru seperti maraknya kasus kriminalitas di masyarakat, kejadian putus sekolah, serta pengangguran.

Dalam hal perkawinan usia anak, trend tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan drastis dalam hal jumlah permohonan dispensasi kawin oleh anak perempuan. Pada tahun 2019 peningkatan ini mencapai 124%, dan kembali meningkat sebesar 108% di tahun 2020. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, yaitu sama-sama di usia 19 tahun. Hal ini jauh berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni pada usia 16 tahun.

Di lain kesempatan, data persebaran ABH menunjukkan bahwa kawasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul mendominasi asal kasus ABH. Permasalahan terkait pola asuh dan komunikasi keluarga, pergaulan remaja, dan permasalahan ekonomi menjadi penyebabnya. Tak hanya itu, data tahun 2020 juga menunjukkan bahwa sistem pembelajaran sekolah yang bersifat jarak jauh karena pandemi dinilai berkontribusi terhadap kasus ABH karena minimnya pemantauan orang tua pada anak selama belajar di rumah.

2.3.2.3.1.3 Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik dan Pengambilan Keputusan

Hingga saat ini, kebijakan afirmasi kuota 30% bagi perempuan belum tercapai di DIY. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di DIY hingga tahun 2021 masih rendah dengan capaian paling tinggi hanya mencapai 25%, yakni pada tahun 2018. Beberapa kendala dalam hal pemenuhan kebijakan afirmasi ini antara lain terkait budaya patriarki serta keengganan perempuan untuk berperan lebih aktif di ruang publik karena adanya beban ganda yang ditanggungnya di ranah privat dan ranah public. Sementara pada faktanya, partisipasi aktif perempuan dalam lembaga-lembaga trias politica di DIY telah memunculkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan kelompok masyarakat marginal. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut penting untuk diupayakan.

2.3.2.3.2 Urusan Pangan

2.3.2.3.2.1 Kurangnya penerapan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2020 sudah mencapai 94,7, di atas rata-rata nasional dan hampir optimal. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa

skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, sedangkan beberapa kelompok bahan pangan lain sudah melebihi nilai anjuran, sehingga perlu diturunkan karena ada kekhawatiran dalam jangka panjang akan memicu timbulnya penyakit degeneratif. Kelompok bahan pangan yang sudah melebihi nilai anjuran sesuai data PPH tahun 2020 (DPKP DIY, 2021) meliputi padi-padian, pangan hewani (daging, susu, telur), minyak dan lemak, serta gula. Sementara itu, kelompok pangan yang masih perlu didorong untuk mencapai nilai ideal adalah umbi-umbian dan kacang-kacangan. Di sisi lain, konsumsi berbasis pangan lokal masih perlu ditingkatkan karena data menunjukkan konsumsi beras, ubi kayu, dan ubi jalar cenderung menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, namun konsumsi terigu justru meningkat dari sebesar 16,40 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi 20,30 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. Data dari BPOM Yogyakarta dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019 (Bappeda DIY, 2021) menyebutkan bahwa frekuensi keracunan pangan di DIY masih terjadi sebanyak 4 kali di tahun 2020. Berdasarkan laporan yang sama, data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga menunjukkan bahwa masih terdapat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji tidak memenuhi syarat sebesar 12,43% pada tahun 2020.

2.3.2.3.2 Kurangnya pengelolaan pangan tercecer (*food loss*)

Isu *food loss* di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil di tahapan pascapanen menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs). Data dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2020 Tetap (DPKP DIY, 2021) menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami *food loss* cukup besar antara lain: beras, jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi masing-masing sebesar 2,5%, 5%, 8,36%, 5,27%, dan 4,99% dibandingkan total pemakaian pada tahun 2020. Data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut *food waste*. Kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen di tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecer. Sementara itu, kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian.

2.3.2.3.3 Masih terdapat wilayah berstatus rentan pangan di DIY

Berdasarkan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi DIY (DPKP DIY, 2021), pada tahun 2021 di DIY sudah tidak terdapat kalurahan dalam kategori rawan pangan. Namun demikian, masih ada sejumlah 3 kalurahan (kalurahan)

yang berstatus waspada pangan. Sementara itu, berdasarkan data Food Safety and *Vulnerability Atlas* (DPKP DIY, 2021), dapat diketahui bahwa terdapat 5 Kapanewon yang berada dalam kondisi rentan. Penyebab status kalurahan waspada pangan maupun kapanewon rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan dan kesehatan.

2.3.2.3.3 Urusan Pertanian

2.3.2.3.3.1 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten belum optimal.

Hingga tahun 2021 baru tercapai 50,98% yang terdiri pendaftaran tanah 30,57%, pemeliharaan dokumen 3,74% dan pengawasan 16,67% dari total 60% Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2.3.2.3.3.2 Pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa pertanian belum optimal.

Ketersediaan data pendukung penyelesaian sengketa pertanian antara lain tukar menukar tanah kas desa dengan tanah warga, kejelasan batas kalurahan, dan sengketa status kepemilikan tanah.

2.3.2.3.3.3 Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum semuanya tersertifikasi.

Hingga tahun 2021, telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±14.044 bidang dan untuk Tanah Desa sebanyak ±50.279 bidang. Jumlah bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa tersertifikasi sebanyak 15.335 bidang dari total jumlah bidang 64.323 bidang.

2.3.2.3.3.4 Sistem Informasi Pertanian belum optimal.

Masih terdapat kelemahan dalam Sistem Informasi Pertanian dan membutuhkan pengembangan. Validasi data tanah SG, PAG dan Tanah Desa belum optimal disebabkan banyaknya dokumen pertanian yang rusak, sehingga mempersulit proses verifikasi dan validasi data terkait status tanah, belum semua bidang-bidang tanah telah terdaftar, serta masih adanya bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum terinventarisasi dan mempunyai dokumen legalitas (sertifikat).

2.3.2.3.4 Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.3.4.1 Penurunan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY tahun 2021 sebesar 60,53 berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dan klasifikasi nilai IKLH cukup baik. Pertambahan populasi dan aktivitas manusia menambah beban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat yang berasal dari peningkatan sampah dan limbah aktivitas rumah tangga, dan usaha/kegiatan di bidang pertanian, kesehatan, industri, pertambangan, transportasi, alih fungsi lahan hijau dan lainnya. Perilaku masyarakat dalam aktivitas sehari-hari belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2.3.4.2 Pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal.

Regulasi pengurangan sampah dari sumber yang sudah ada namun belum kuat dan belum optimal penegakannya, pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya.

2.3.2.3.4.3 Pembangunan belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi saat ini belum tersedia serta integrasi rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam dokumen Kebijakan Rencana dan Program (KRP) pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan wajib untuk dilakukan.

2.3.2.3.4.4 Pengawasan dan tingkat ketaatan ijin usaha/kegiatan yang diterbitkan oleh pemda DIY belum optimal.

Keterbatasan personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang saat ini hanya berjumlah 2 orang tidak sebanding dengan jumlah Ijin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur yaitu Amdal sebanyak 42 ijin, UKL UPL sebanyak 53 ijin dan IPR sebanyak 18 ijin.

2.3.2.3.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.3.5.1 Belum adanya database yang terintegrasi terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Jika warga negara tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, maka warga negara tersebut tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan warga negara tersebut untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah. Namun demikian, sampai saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada database khususnya terkait dengan jumlah-jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terintegrasi. Kewenangan Pemda DIY dalam mengkoordinasikan dan mengawasi fasilitasi terhadap kepemilikan dokumen tersebut menjadi tersendat. Apalagi Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

2.3.2.3.5.2 Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal.

Permasalahan lain terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.936 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki Kartu Identitas Anak, maka akan berpotensi menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan Kartu Keluarga yang mencantumkan identitas anak dalam keluarga.

2.3.2.3.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.3.6.1 Penurunan Pendapatan Bagi Masyarakat Miskin akibat Pandemi Covid 19 khususnya di Perkotaan

Hasil survey dari yang dilakukan oleh UNDP, UNICEF, Semeru dan Prospera menyatakan bahwa hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai di bulan Oktober hingga November 2020 mengaku berpenghasilan lebih rendah daripada di bulan Januari 2020. Proporsi rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki anak adalah 75,3% dan yang tinggal di daerah perkotaan adalah 78,3%. Rumah tangga di perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar daripada rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga di semua kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga yang terkaya mengalami penurunan pendapatan dengan persentase serupa. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin.

Berdasarkan hasil dari hasil survey sosial demografi dampak covid 19 tahun 2020 oleh BPS terhadap 87.379 responden menunjukkan bahwa 2,52% responden survei baru saja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan/tempat usaha dimana ia bekerja tutup. Sebagian besar yang mengalami PHK adalah responden laki-laki. Sedangkan 18,34% diantaranya bekerja namun sementara dirumahkan. Pada triwulan III tahun 2020 ada 67,77% UMK mengalami penurunan pendapatan, sedangkan UMB yang mengalami penurunan sebanyak 57,29%. Terdapat 3 perusahaan tertinggi yang mengalami berhenti beroperasi yaitu: Transportasi dan pergudangan sebesar 81,11%, Jasa pendidikan sebesar 90,0% Real estate sebesar 78,57% yang tentunya perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas berada di perkotaan.

2.3.2.3.6.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurang Mendapatkan Perhatian.

Terdapat tiga kabupaten di DIY, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Namun, sepertinya potensi ekonomi wilayah pesisir selatan D.I. Yogyakarta masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY sebesar 41,04% dari total PDRB DIY (BPS DIY, 2021), jauh lebih kecil dibandingkan dengan total PDRB dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun, namun produksi perikanan tangkap DIY menurut data pada tahun 2020 masih sangat rendah yakni 6.545 ton. Selain itu, faktor

yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah selatan D.I. Yogyakarta jika dibandingkan dengan wilayah utara D.I. Yogyakarta

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2021 menyatakan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana pasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Terutama daerah yang masih berstatus berkembang.

Masyarakat di wilayah pesisir DIY memiliki banyak potensi ekonomi. Potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi pariwisata dan pertanian. Potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya UMKM yang bergerak pada sektor makanan, oleh-oleh, dan permainan pendukung wisata. Ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing. Penegakan regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah DIY terkait peningkatan ekonomi kawasan Pantai Selatan (PANSELA) dan optimalisasi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY untuk memaksimalkan perekonomian di kawasan pesisir harus dilakukan selaras dengan arahan Pemerintah Pusat terkait Kemiskinan ekstrim yang salah satu fokusnya adalah warga miskin di kawasan pesisir.

2.3.2.3.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Digital Masih Kurang Berkembang.

DIY memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. Di sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk DIY. Kemajuan sektor UKM sudah mulai memasuki digital ekonomi diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. Namun DIY juga ketimpangan wilayah yang tinggi sehingga pemberdayaan masyarakat melalui UKM ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak tersentral di kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.

Revolusi industry 4.0 mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek kehidupan, terjadinya pandemic COVID-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. Usaha kecil mikro yang dapat bertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. Teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana.

Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital dengan sasaran meliputi rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hal tersebut perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

2.3.2.3.6.4 Belum optimalnya peran LPMD/K Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan di Kalurahan.

Dalam pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Oleh karena itu lurah sebagai kepala tertinggi dalam pemerintahan kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) begitu juga dengan masyarakat. Dasar hukum keberadaan LPMD adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Selain itu, di dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 94 juga disebutkan bahwa dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan desa/kalurahan, diperlukan peran optimal dari LPMD, namun masih banyak ditemui masalah baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan LPMD yang memerlukan penguatan kualitas LPMD.

Untuk itu kualitas pengelolaan LPMD harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur pendukung agar peran LPMD dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat desa. Disamping itu, belum optimalnya kepercayaan dan pelibatan LPMD/K oleh Kalurahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menjadi suatu fenomena yang terjadi dalam dinamika hubungan antara lembaga yang seharusnya dapat bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

2.3.2.3.6.5 Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa/kalurahan

Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Desa/Kalurahan merupakan salah satu permasalahan pada Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang perlu menjadi perhatian. Jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Bahkan menurut Surat yang ditandatangani Wakil Gubernur bernomor 401/0161 tahun 2022 disebutkan bahwa ada 15 Kapanewon penanggulangan kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari Kalurahan yang ada di tingkat bawahnya.

Secara spesifik masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan di Desa/Kalurahan. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY kepada Pemerintah Desa/Kalurahan di DIY. Aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa/kalurahan dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat sehingga mampu hidup mandiri dan memperbaiki tingkat kesejahteraan.

2.3.2.3.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

2.3.2.3.7.1 Meningkatnya Rasio Ketergantungan

Menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045 yang dirilis Bappenas, DIY akan segera mengalami penurunan pada piramida penduduk di usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk lanjut usia, khususnya perempuan. Hal ini selaras dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY dan banyaknya migrasi masuk ke DIY dari warga luar DIY yang berusia lanjut. Apabila dielaborasikan dengan data Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang cukup tinggi di DIY, maka Rasio Ketergantungan yang tinggi berpotensi disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai.

2.3.2.3.7.2 Tingginya Permasalahan Keluarga yang Kemudian Berefek pada Permasalahan Sosial Lanjutan di Masyarakat

Data dari Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian kawin di DIY selama pandemi, dengan rincian bahwa jumlah gugatan istri hampir 4 kali lipat gugatan suami. Faktor utama yang dijadikan alasan bercerai adalah buruknya komunikasi. Namun, data menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid 19 pun turut mendorong kejadian perceraian karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk mempengaruhi tingkat keharmonisan dan relasi dalam keluarga.

Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa warga DIY masih rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY terdapat 945 kasus KDRT terjadi di DIY. Data ini berarti 75% dari total 1.266 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama Tahun 2020. Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa KDRT yang menjadi jenis kejadian kasus kekerasan tertinggi, tidak terbatas pada konflik internal pasangan menikah saja. Bahkan, 53% kasus kekerasan terjadi pada perempuan yang belum menikah. Dengan demikian, KDRT juga terjadi pada bentuk-bentuk relasi selain suami istri yang ada dalam rumah tangga. Termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Jika dikaitkan kembali pada kondisi pandemi, resiko kekerasan seperti ini meningkat karena orang tua mengalami tekanan berlipat begitu pandemi terjadi.

2.3.2.3.8 Urusan Perhubungan

2.3.2.3.8.1 Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan potensi kemacetan.

Hal ini disebabkan peningkatan jumlah kendaraan pribadi dari penambahan kepemilikan oleh penduduk DIY maupun peningkatan dari aktivitas pendatang sektor pariwisata, pendidikan, MICE dan logistik. Penambahan kendaraan tidak sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan. Hal ini ditambah berkurangnya volume jalan karena parkir pada badan jalan (*on Street Parking*) serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyediaan *off street parking* sehingga menambah kebutuhan (*demand*) lokasi parkir, belum optimalnya penyediaan dan penggunaan angkutan umum serta angkutan barang berdimensi besar jika melewati ruas jalan yang berkapasitas rendah

2.3.2.3.8.2 Rendahnya penggunaan angkutan umum.

Hal ini disebabkan oleh pelayanan angkutan umum belum terintegrasi khususnya dari AKDP dan Angkutan Perdesaan, waktu tunggu cenderung lama,

kurangnya kepastian waktu tempuh dan adanya ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan.

2.3.2.3.8.3 Pelayanan angkutan barang belum diatur.

Hal ini karena regulasi tentang angkutan barang sedang disusun oleh Kementerian Perhubungan RI

2.3.2.3.8.4 Angka kecelakaan di DIY masih tinggi,

Dengan persentase sepeda motor yang mengalami kecelakaan paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain yaitu rata-rata 85,71% (dari tahun 2018 – 2021). Penyediaan fasilitas keselamatan perlu terus dioptimalkan.

2.3.2.3.8.5 Tingkat keamanan dan kenyamanan fasilitas pejalan kaki masih rendah.

Penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya.

2.3.2.3.8.6 Meningkatnya angkutan yang illegal,

Terdapat angkutan seperti angkutan becak motor, angkutan ojek dan taksi berbasis online yang belum memiliki ijin. Selain itu kendaraan angkutan pariwisata masih banyak yang belum mengurus izin operasional. Selain itu masih banyak kendaraan pribadi yang tidak memenuhi uji emisi kendaraan sehingga memberikan dampak pada penurunan kualitas udara.

2.3.2.3.9 Urusan Komunikasi dan Informatika

2.3.2.3.9.1 Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE masih belum lengkap.

Pemda DIY memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur TIK pada Pergub Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada Perpres 95/2018 tentang SPBE. Dalam pergub tersebut belum mengatur arsitektur keamanan, indikator tentang audit TIK sudah diatur rinci, masih bersifat umum dan belum membagi ke dalam audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Jogja Smart Province 2019-2023. Namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE. Untuk kebijakan internal manajemen data yang mengacu kepada Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan DIY masih belum mengatur arsitektur dan kualitas data. Arsitektur dan proses bisnis SPBE juga belum dibuat aturannya. Diperlukan kebijakan untuk implementasi SPBE di DIY yang komprehensif

meliputi RITIKDA (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah) hingga tata laksana administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

2.3.2.3.9.2 Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Untuk itu dibutuhkan sebuah arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini.

2.3.2.3.9.3 Tantangan dalam Transformasi Digital Penyelenggaraan Pemerintahan

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*bigdata*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan agile organization yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

2.3.2.3.9.4 Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat

Sampai akhir 2021, masih terdapat sejumlah blank spot (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar-warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks PJJ (pembelajaran jarak jauh) dalam masa pandemi, yang mensyaratkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di DIY ke depan.

2.3.2.3.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.2.3.10.1 Masih adanya koperasi pasif

Dari tahun 2018-2021 jumlah koperasi pasif terus bertambah dari 63 unit tahun 2018 bertambah menjadi 196 unit di tahun 2019, dan sedikit berkurang menjadi 180 unit di tahun 2020, bertambah cukup signifikan menjadi 271 unit di tahun 2021. Sementara jumlah koperasi aktif mengalami berkurang dari tahun 2018-2021, dari 1.926 unit di tahun 2018 berkurang menjadi 1.722 unit di tahun 2019, mengalami sedikit penambahan menjadi 1.758 unit di tahun 2020, sementara pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Peningkatan jumlah koperasi pasif dan berkurangnya koperasi aktif ini dikarenakan lemahnya pengelolaan koperasi oleh pengurus, kondisi keuangan yang tidak sehat, serta kesulitan dalam permodalan dan perputaran usaha terlebih dimasa pandemi covid 19.

2.3.2.3.10.2 Masih rendahnya daya saing koperasi dan UKM

Daya saing koperasi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai omset koperasi dengan nilai omset UKM, dimana nilai omset koperasi jauh di bawah nilai omset UKM. Pada tahun 2021 nilai omset UKM sebesar Rp11.117 Miliar sementara nilai omset koperasi hanya sebesar Rp4.012.619,00. Rendahnya daya saing koperasi ini disebabkan karena rendahnya inovasi dalam pengembangan usaha.

2.3.2.3.10.3 Partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah

Keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan data dari BPPSD DIY, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 sekitar 1.062 unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Artinya ada sebanyak 38,15% koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Sementara apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 1.436 unit, pada tahun 2019 berkurang menjadi 1.323 unit, pada tahun 2020 berkurang menjadi 1.106 unit, dan pada tahun 2021 menjadi 1.062 unit.

2.3.2.3.10.4 Masih rendahnya skala usaha ekonomi lokal

Skala usaha ekonomi lokal DIY masih didominasi oleh Usaha Mikro dimana pada tahun 2021 jumlah Usaha Mikro sebanyak 284.623 unit, sementara Usaha Kecil sebanyak 16.066 unit dan Usaha Menengah sebanyak 2.110 unit, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Usaha Mikro.

Sementara bila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah usaha kecil dan usaha menengah mengalami penurunan, sebaliknya jumlah usaha mikro justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data dari BPPSD DIY menunjukkan jumlah Usaha Menengah dari tahun 2019 sebanyak 39.581 unit dan berkurang menjadi 30.664 unit pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 turun secara signifikan menjadi 2.110 unit, dan Jumlah Usaha Kecil dari tahun 2019 sebanyak 65.533 unit berkurang menjadi 58.980 unit pada tahun 2020, dan menjadi 16.066 unit. Sementara Usaha Mikro justru mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 143.385 unit, bertambah menjadi 188.033 unit pada tahun 2020 dan bertambah secara signifikan di tahun 2021 menjadi 284.623 unit. Meskipun Usaha Mikro memberikan lapangan pekerjaan cukup besar, namun skala usaha tersebut harus ditingkatkan.

2.3.2.3.11 Urusan Penanaman Modal

2.3.2.3.11.1 Masih rendahnya kegiatan investasi di DIY

Nilai investasi di DIY baik PMDN maupun PMA, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian di wilayah lain. Menurut data dari BKPM RI, sampai dengan triwulan 3 tahun 2021, realisasi PMA di DIY mencapai 14,7 Juta US\$ dan realisasi PMDN mencapai Rp2.253 Miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, DIY menempati peringkat 31 untuk PMA dan peringkat 29 untuk PMDN.

Pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 ditargetkan rata-rata tumbuh 5,7-6,0 persen dengan investasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan tersebut dengan tumbuh 6,6-7,0 persen. Dengan kondisi tersebut, DIY diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi investasinya terlebih saat ini DIY sudah didukung dengan ketersediaan layanan bandara internasional baru yang potensial untuk mendongkrak aliran barang dan manusia.

2.3.2.3.11.2 Penanaman modal yang belum berkualitas

Kualitas investasi masih menjadi sorotan dalam RPJMN 2020-2024. Kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian Indonesia terutama karena kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menasar pasar dalam

negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Kondisi serupa juga terlihat di DIY. Investasi pada sektor sekunder seperti industri pengolahan cenderung mengalami pelambatan. Kegiatan investasi di DIY beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor tersier terutama kegiatan konstruksi. Investasi pada sektor konstruksi seperti Bandara atau Jaringan Kereta Api memang penting sebagai prasyarat konektivitas antar wilayah dan layanan logistik. Namun demikian, untuk memperkuat struktur perekonomian, investasi pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian. Melalui sektor industri manufaktur, komoditas yang dihasilkan sektor primer menjadi bernilai tambah dan bahkan memberikan peluang untuk kegiatan ekspor. Di sisi lain, saat ini sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja yang cukup signifikan besarnya.

Lebih lanjut, arahan RPJMN 2020-2024 penanaman modal juga mestinya bergeser dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

2.3.2.3.11.3 Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. Survey EoDB menempatkan Indonesia pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN.

Sementara itu Dalam laporan *tahunan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center* pada tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari posisi ke-43 menjadi posisi ke-32. Namun berdasarkan *Global Competitiveness Index (GCI)* yang dikeluarkan oleh *World Economy Forum*, posisi Indonesia menurun dari peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Dua aspek yang membuat Indonesia turun peringkat yaitu efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha yaitu masih tingginya biaya-biaya tak perlu (*redundancy cost*). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi perhatian utama yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Dalam konteks nasional, kajian Competitiveness Index (Asian Competitiveness Institute - NUS) memberikan DIY peringkat ke 6 Indeks Daya Saingnya.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, DIY masih yang terakhir. Aspek yang masih kurang di DIY menurut kajian tersebut adalah produktivitas tenaga kerja, keterbukaan perdagangan barang/jasa, infrastruktur, daya tarik investasi.

2.3.2.3.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2.3.2.3.12.1 Masih Tingginya Pemuda Korban Kejahatan dan Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan.

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda 2018, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan 8,83% berada di atas angka nasional 7,68%.

2.3.2.3.12.2 Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda

Kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda Indonesia maju pada tahun 2045. Pada Sakerna DIY Agustus 2020 diketahui bahwa 21 dari 100 pemuda DIY bekerja berstatus wirausaha. Pemuda yang berusaha sendiri mendominasi status wirausaha pemuda, yaitu mencapai 64,76 persen. Hanya sebagian kecil pemuda wirausaha yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar. Hal ini menunjukkan kewirausahaan pemuda cenderung berada dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar.

2.3.2.3.12.3 Pengangguran di Usia Muda.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada tahun 2020 sebesar 9,54% berasal dari kelompok pemuda. Selain itu, sebanyak 5,9% pemuda di DIY merupakan pengangguran, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak kepada penduduk kelompok muda sebesar 39,31 ribu orang.

2.3.2.3.12.4 Minimnya Sarana Olahraga.

Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Jumlah sarana olahraga di DIY hingga tahun 2021 baru memiliki 2 (dua) fasilitas olahraga berstandar internasional; Stadion Mandala Krida dan GOR Amongranga, serta 6 (enam) fasilitas olahraga berstandar nasional.

2.3.2.3.12.5 Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dari jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir sebesar 31,39 persen pada tahun 2018, meningkat sedikit dari 27,61 persen pada tahun 2015 (Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, BPS).

2.3.2.3.13 Urusan Statistik

2.3.2.3.13.1 Tata kelola penyelenggaraan data pembangunan belum sinkron pada setiap tingkat kewilayahan (Pusat-Provinsi-Kab/Kota)

Masih terdapat perbedaan satuan dan klasifikasi dalam pengumpulan data di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Standar Data dan Kode Referensi belum seluruhnya ditetapkan oleh Pusat, terutama untuk data sektoral.

2.3.2.3.13.2 Penyediaan data belum sinkron dengan kebutuhan data perencanaan.

Hal ini menyebabkan pemanfaatan data menjadi kurang optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya meta data dan interoperabilitas data belum semua terpenuhi karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana/infrastruktur, fragmentasi aplikasi pengolah dan desiminasi data di pemerintahan, serta ketergantungan pada pihak di luar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan.

2.3.2.3.13.3 Pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial belum optimal.

Data geospasial yang di produksi oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sebagian besar belum terstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual, simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut. Selain itu Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD (Jaringan Informasi Geospasial Daerah).

2.3.2.3.14 Urusan Kebudayaan

2.3.2.3.14.1 Terancamnya Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Oleh Proses Alamiah dan Dinamika Perkotaan.

Lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada di wilayah urban Kota Yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. Beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi, jaringan jalan, pemukiman, dan pendirian bangunan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. Sarana prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. Akan tetapi, sarana prasarana ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. Permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti Sokoliman, Ambarketawang, Ambarbinangun, justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota, tetapi cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolasi.

2.3.2.3.14.2 Kebudayaan Lokal Tidak Lagi Menjadi Pandangan Hidup Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta kaya akan nilai-nilai adi luhung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakulaman. Namun, kehidupan masyarakat yang dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya dalam masyarakat DIY. Sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. Terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. Adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

2.3.2.3.15 Urusan Perpustakaan

2.3.2.3.15.1 Tingkat Literasi Masih Rendah

BPS melalui pengukuran Nilai Budaya Literasi pada tahun 2019 rata-rata nasional 55,03 point dimana DIY berada pada urutan teratas dengan 76,27 point. meskipun posisi DIY paling tinggi namun melihat hasil survei internasional lembaga PISA pada tahun 2019 menyimpulkan Indonesia

menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. artinya masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan budaya literasi di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya

2.3.2.3.15.2 Masih Rendahnya Minat Baca Masyarakat

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan International Association for the Evaluation of Education Achievement, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tingkat DIY, indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

2.3.2.3.15.3 Masih Rendahnya Kunjungan Ke Perpustakaan

Berdasarkan hasil sensus tahu diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia baru sebesar 0,02%. Jumlah ini belum dikatakan ideal, karena idealnya berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Dari data dataku.jogjaprovo.go.id kunjungan ke perpustakaan dalam setahun pada tahun 2021 sebanyak 2.073.461 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.265.200 orang. jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,17% masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

2.3.2.3.16 Urusan Kearsipan

2.3.2.3.16.1 Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal.

Pada capaian kinerja pemerintah daerah Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan (RPJMD DIY 2017-2022) pada tahun 2021 dari target 110 institusi, baru tercapai 86 institusi.

2.3.2.3.17 Urusan Persandian

2.3.2.3.17.1 Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada tahun 2021 terdapat 13 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat proxy war. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia.

2.3.2.3.17.2 Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian.

Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Vulnerability Assessment Tool, Log Analysis, SIEM, perangkat kontra penginderaan, jammer, kendaraan operasional, dll.

2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.4.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

2.3.2.4.1.1 Masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat DIY

DIY memiliki panjang pantai 135,24 Km dan luas perairan 251.130 Ha. Dengan potensi kelautan tersebut seharusnya DIY memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan di DIY sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. Menurut data dari BPPSD DIY, pada tahun 2021 jumlah nelayan penuh di DIY 376 orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak 1.450 orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak 2.560 orang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bahari di DIY masih sangat rendah.

2.3.2.4.1.2 Pembangunan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri

Pengelolaan perikanan budidaya di DIY sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, di mana para pembudidaya tersebar di berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. Hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Begitu juga untuk perikanan tangkap, kebutuhan biaya operasional yang tinggi belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, kelembagaan nelayan yang belum optimal menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap tauke sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Hal ini juga berdampak pada daya tawar nelayan terhadap harga tangkapan ikan yang rendah karena sudah ditentukan oleh tauke. Kondisi ini juga tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan maupun nelayan yang sejak tahun 2020 berada di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera

2.3.2.4.1.3 Belum Optimalnya Pemanfaatan Kapal >30 GT

Sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan di DIY adalah kapal motor tempel (KMT), sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas, karena jangkauan KMT hanya berada di bawah 12 mil laut. Sementara kepemilikan kapal diatas 30 GT masih sedikit jumlahnya dan tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Data jumlah kepemilikan kapal 21-30 GT di DIY antara tahun 2017-2021 menunjukkan hanya ada 6 kapal yang beroperasi. Sementara jumlah KMT sebanyak 366 kapal pada tahun 2017, meningkat menjadi 427 kapal pada tahun 2018 dan menjadi 495 kapal pada tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengoperasikan kapal >30 GT, sehingga memilih menggunakan KMT yang lebih mudah dan murah dalam pengoperasionalannya.

2.3.2.4.1.4 Belum beroperasinya PPP Tanjung Adikarta

Pelabuhan Tanjung Adikarta yang belum kunjung beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi akibat dari belum tuntasnya pembangunan breakwater di pintu masuk pelabuhan mengakibatkan tidak ada kapal penangkap ikan yang mendarat di PPP Tanjung Adikarta. Hal ini menyebabkan PPP Tanjung Adikarta yang diproyeksikan sebagai kawasan perikanan tangkap dan pusat pertumbuhan ekonomi belum dapat direalisasikan

2.3.2.4.1.5 Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di DIY

Tingkat konsumsi ikan di DIY masih sangat rendah bila dibandingkan dengan

nasional. Angka konsumsi ikan nasional mencapai 56,39 Kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Sementara itu, walaupun tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2017-2020 menunjukkan trend peningkatan, tingkat konsumsi ikan DIY hanya sebesar 31,24 Kg/Kapita/tahun pada tahun 2020.

2.3.2.4.2 Urusan Pariwisata

2.3.2.4.2.1 Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan belum akan pulih alam waktu dekat. Sampai dengan November 2021, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya sebesar 1,484,884 orang. Angka tersebut menurun jauh dari tahun 2019 yang mencapai 16,106,954 orang. Pemulihan pasar wisatawan mancanegara sangat tergantung pada perkembangan situasi pandemi. Menurut data dari UNWTO, sampai dengan pertengahan tahun 2021, angka kedatangan wisatawan internasional di tingkat global masih berkontraksi hingga minus 76%. Regional asia pasifik mengalami kontraksi paling dalam hingga mencapai minus 95% dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year*).

2.3.2.4.2.2 Masih rendahnya lama tinggal wisatawan di DIY

Lama tinggal wisatawan secara keseluruhan masih relatif rendah. Pada tahun 2020, lama tinggal wisatawan untuk mancanegara maupun nusantara yang menginap di hotel bintang mencapai 1,54 hari atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 1,73 hari dan jauh lebih rendah dari capaian Bali yaitu 2,67 hari. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan di DIY masih bertumpu pada wisatawan nusantara. Pada tahun 2021, lama tinggal wisatawan nusantara masih pada angka 1,42 hari.

2.3.2.4.3 Urusan Pertanian

2.3.2.4.3.1 Alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi

Berdasarkan data BPS DIY tahun 2013-2020, luas lahan sawah mengalami penurunan dengan rata-rata 620,61 ha/tahun. Selain itu, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tataran kabupaten/kota masih belum optimal dikarenakan hingga tahun 2021 baru kabupaten Sleman yang menetapkan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.3.2.4.3.2 Tingkat kesejahteraan petani belum optimal

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data dari BPS DIY, NTP untuk subsektor tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan pada kurun waktu 2016-2021 rata-rata sebesar 104,45. Angka ini telah melampaui angka minimal kesejahteraan petani, yaitu 100. Namun kondisi tersebut tidak merata di semua subsektor, karena NTP subsektor tanaman pangan dan peternakan masih di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh usaha tani yang kurang efisien serta kurangnya penerapan prinsip agribisnis. Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 437.288 rumah tangga usaha pertanian atau sebesar 88,71% merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

2.3.2.4.3.3 Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian

Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 52,19% petani utama berusia di atas 54 tahun, sedangkan hanya sebesar 4,66% yang berusia di bawah 35 tahun. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (2021) juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2021 jumlah petani milenial/petani muda baru sebanyak 641 orang. Dari aspek pendidikan, sebesar 54,92% petani merupakan lulusan SD dan tidak/belum tamat SD. Selain itu, sebesar 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru 20,45% petani yang dapat menggunakan internet. Di sisi lain, terkait aspek kelembagaan, data dari Statistik Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani (Kementerian Pertanian, 2021) menyatakan bahwa kategori kelompok tani dengan jumlah terbesar di DIY adalah kelompok tani kelas pemula yang sebesar 33,66%.

2.3.2.4.4 Urusan Kehutanan

2.3.2.4.4.1 Pengelolaan hutan Negara dan hutan rakyat di DIY belum optimal.

Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi tahun 2011-2030 perlu *direview* menyesuaikan perkembangan kondisi terkini, nilai produksi kehutanan perlu ditingkatkan dengan memenuhi prinsip panen berkelanjutan, masih terdapat lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis yang perlu direhabilitasi, ketaatan usaha kehutanan serta pemberdayaan hutan rakyat dan perhutanan sosial harus terus ditingkatkan. Selain itu juga masih terdapat lahan kritis yang perlu direhabilitasi.

2.3.2.4.4.2 Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bunder dan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting lainnya belum optimal.

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bunder berdasarkan metode METT masih sebesar 70%. Kawasan Bernilai Ekosistem Penting berupa Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) karst, lahan basah dan habitat burung migran di DIY masih dalam proses penetapan dan ke depannya perlu pengelolaan yang berkelanjutan.

2.3.2.4.4.3 Kapasitas SDM penyuluh dan Kelompok Tani hutan belum optimal.

Kelompok tani hutan (KTH) belum semuanya terkelola dengan baik. SDM KTH perlu didampingi melalui pelatihan teknis dan kelembagaan.

2.3.2.4.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.2.4.5.1 Belum seluruh penduduk terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan.

Rasio elektrifikasi di DIY sudah mencapai 99,99% dan rasio desa berlistrik sudah 100%, namun masih ada 3.024 KK yang belum berlistrik atau masih menyalur. Selain itu masih terdapat rumah tangga berlistrik belum sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena memiliki jarak lebih dari 60 meter dari akses jaringan listrik terdekat atau disebut Gerumbul, sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru.

2.3.2.4.5.2 Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal.

Bauran energi yang telah dicapai 93,91% minyak bumi dan 6,09% energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.

2.3.2.4.5.3 Terdapat kegiatan pengambilan air tanah melalui sumur air tanah dalam yang tidak berijin.

Berdasarkan hasil pendataan pengguna air tanah belum berizin tahun 2021 di DIY masih banyak pengguna air tanah yang belum berizin yaitu 550 titik di Kota Yogyakarta, 125 titik di Kabupaten Gunungkidul, 813 titik di Kabupaten Sleman, 467 titik di Kabupaten Bantul, 101 titik di Kabupaten Kulon Progo. Pengguna air tanah belum berizin ini mayoritas menggunakan air tanah untuk keperluan usaha.

2.3.2.4.5.4 Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi.

DIY merupakan daerah yang mendapatkan pasokan energi dari sumber daerah lain sehingga konsumsi energinya harus efisien. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengukuran dalam rangka audit energi masih ada gedung/bangunan pemerintah dengan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik di antara acuan sampai batas atas dan melebihi batas atas 240 kWh/m² sehingga masuk kategori agak boros atau boros. Hal ini disebabkan karena terjadi arus netral akibat ketidakseimbangan beban pada sistem kelistrikan, serta pemborosan penggunaan energi listrik karena standar kualitas pencahayaan ruangan tidak memenuhi standar dan kurangnya pola pemahaman pengguna mengenai pengoperasian sistem tata udara yang baik dan benar.

2.3.2.4.5.5 Terdapat kegiatan usaha pertambangan yang tanpa izin dan/atau melakukan kegiatan penambangan dengan kaidah-kaidah penambangan yang tidak benar.

Berdasarkan hasil pemantauan dan identifikasi penambangan tanpa izin di DIY tahun 2021 terdapat 104 titik penambangan tanpa izin baik penambangan di sungai dan di darat. Dampak kegiatan penambangan tanpa izin yaitu perubahan topografi lahan kegiatan, kerusakan jalan, gerakan massa (batuan tidak stabil), dan penurunan kualitas udara.

2.3.2.4.6 Urusan Perdagangan

2.3.2.4.6.1 Masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan di DIY

Jika dilihat dalam Buku Profil Perdagangan Indonesia 2019 (BPS), rata-rata balas jasa dan upah pekerja di sektor perdagangan masih relatif rendah yaitu sebesar Rp26.517.455. Sementara itu, nilai rata-rata untuk tingkat nasional mencapai Rp45.048.355 per tahun. Atau jika dilihat dari omset usaha pun, capaian untuk DIY masih relatif rendah. Rata-rata omset per usaha mencapai Rp14.478.370.507 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp33.992.670.100. Pada masa pandemi Covid-19 diperkirakan nilai omset usaha atau pendapatan pekerja di sektor perdagangan tentu terdampak.

2.3.2.4.6.2 Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Tahun 2020 dan 2021 tingkat inflasi DIY relatif dapat terjaga. Hal mendasar yang menjadi penyebab rendahnya inflasi adalah penurunan dari sisi permintaan yang cenderung lesu pada masa pandemi. Namun demikian, jika dilihat secara bulanan, seiring bergeliatnya lagi kegiatan masyarakat, indeks harga konsumen mulai kembali naik. Jika pada akhir tahun 2020 IHK untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau hanya pada angka 107,42 poin, pada akhir tahun 2021 telah mencapai 111, 81 poin. Lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan di DIY. Sebagai contoh, jika dilihat dari besaran Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP), terdapat peningkatan untuk beberapa bahan pokok. MPP daging ayam ras dari 29,41 persen pada tahun 2017 menjadi 33,37 persen pada tahun 2019. Bahkan MPP Cabai Merah dari 41,16 persen pada tahun 2017 menjadi 42,48 persen pada tahun 2019. Semakin tingginya MPP menunjukkan rantai distribusi dari produsen ke konsumen belum efisien atau masih cukup panjang. Panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang.

2.3.2.4.6.3 Masih rendahnya nilai ekspor DIY

Peranan DIY dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. Tahun 2020, proporsi nilai ekspor DIY hanya 0,2% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai 398 Juta US\$, lebih rendah dari nilai ekspor provinsi Bali yang mencapai 456 Juta US\$. Sampai dengan tahun 2020, sebesar 99,71% produk dimuat melalui pelabuhan yang di luar provinsi DIY. Keberadaan Bandara YIA mestinya dapat dimanfaatkan sebagai pintu keluar produk ekspor DIY. Pada masa pandemi Covid-19 ini, kondisi ekspor DIY sebenarnya sudah mulai membaik. Tahun 2021 diperkirakan nilai ekspor sudah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.3.2.4.6.4 Masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring

Data dari buku Direktori Usaha/Perusahaan Menengah Besar Perdagangan Eceran (BPS) menunjukkan baru sebanyak 31,64% pelaku usaha perdagangan di DIY melakukan penjualan daring pada tahun 2020. Padahal, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. Kondisi pandemi pada satu sisi memaksa banyak konsumen untuk menggunakan sarana transaksi daring untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar

pelaku usaha perdagangan di DIY mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini.

2.3.2.4.7 Urusan Perindustrian

2.3.2.4.7.1 Pelambatan produktivitas sektor industri pengolahan

Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan yang diukur dari PDRB sektor industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukkan kecenderungan pelambatan. Dalam kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan hanya 0.76% atau jauh di bawah rata-rata seluruh lapangan usaha yang mencapai 5,41%. Dari sisi mikro, salah satu penyebab rendahnya angka tersebut adalah pelambatan di sisi output produksi sektor ini. Pandemi Covid-19 memperparah pelambatan tersebut. Indeks Produksi yang menunjukkan seberapa besar output sektor industri pengolahan, mengalami penurunan pada tahun 2020. Indeks produksi yang telah mencapai angka 162,63 pada tahun 2019 turun menjadi 136,75 pada tahun 2020 atau hampir sebesar kondisi tahun 2016. Hal tersebut tentu menunjukkan kemunduran bagi sektor industri pengolahan jika dilihat dari sisi output yang dihasilkan.

2.3.2.4.7.2 Industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan pemasaran, penyediaan bahan baku dan aspek kualitas produk

Survei Industri Mikro dan Kecil BPS tahun 2020 menunjukkan dari total 146.658 usaha/perusahaan IMK di DIY ada sebanyak 78,98 persen mengalami kesulitan. Jenis kesulitan yang dialami diantaranya kesulitan bahan baku sebesar 26,58 persen, kesulitan pemasaran sebesar 19,67 persen, dan kesulitan tenaga kerja sebesar 12,85 persen.

2.3.2.4.7.3 Masih belum berkembangnya industri-industri berbasis inovasi dan teknologi

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Kemenperin melalui Making Indonesia 4.0, mencoba fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman; industri tekstil dan busana; industri otomotif; industri kimia;

dan industri elektronika. Industri di DIY baik yang berskala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. Di sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. Sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar 22 persen yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya.

2.3.2.4.7.4 Masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor

Penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer di dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 119 perusahaan di DIY yang telah memiliki sertifikasi TKDN seperti PT Mega Andalan Kalasan (peralatan kesehatan) dan CV Karya Hidup Sentosa (Mesin & Peralatan Pertanian). Selain itu terdapat juga produk-produk lain seperti coklat, es krim, olahan susu, batik, aksesoris rajutan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Namun demikian, TKDN antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari 12 persen hingga 99 persen. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri di dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal.

2.3.2.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.2.5.1 Urusan Sekretariat Daerah

2.3.2.5.1.1 Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah DIY yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengoordinasian terhadap pelayanan administrative. Sekretariat Daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam mendesain kebijakan yang komprehensif, berkualitas dan memenuhi aspek timely manner (tersedia pada saat dibutuhkan). Oleh karena itu, perlu dukungan pelayanan pimpinan diantaranya dalam hal koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dan

urusan administrasi pimpinan. Namun pada saat ini, dukungan terhadap tugas tersebut masih belum optimal dikarenakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan arah kebijakan yang masih kurang efektif, dukungan sarana prasana (termasuk penggunaan sistem informasi digital) belum memadai, beberapa kendaraan dinas jabatan maupun operasional yang dari sisi usia sudah tidak ekonomis, dan kapasitas SDM yang masing kurang memenuhi kebutuhan ideal baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.3.2.5.1.2 Belum Optimalnya Kerjasama Daerah

Permasalahan pembangunan daerah membutuhkan penanganan secara kolaboratif melalui kerjasama daerah dengan daerah lain (*Government to Government/ G to G*) maupun dengan pihak ketiga (*Government to Business/G to B*) dalam kerangka percepatan penyelesaian target pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, pada tahun 2020 total terdapat 23 nota kesepakatan setingkat *Memorandum of Understanding (Mou)* yang telah ditandatangani. Namun demikian baru ditindaklanjuti dengan 13 perjanjian kerja sama/rencana kerja. Jika dilihat lebih lanjut, hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya dokumen rencana induk kerjasama daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan kerjasama daerah masih bersifat parsial. Hal ini perlu menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut.

2.3.2.5.1.3 Proses penyusunan produk hukum daerah belum komprehensif dan efektif.

Produk hukum yang berkualitas menjadi jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dinamika pada sektor hukum saat ini terdapat upaya penataan dan penyederhanaan regulasi (termasuk produk hukum daerah) yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Pada proses penyusunan produk hukum daerah, terdapat kendala sistemis yang diantaranya terkait dengan substansi rancangan produk hukum daerah yang belum terstruktur dengan baik dan besarnya peran faktor eksternal (pembahasan dengan legislatif dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat) yang kemudian berpengaruh pada proses pengharmonisasian dan pemantapan substansi rancangan produk hukum daerah. Sehingga, diperlukan perbaikan atas proses penyusunan produk hukum baik yang termasuk penyiapan materi, koordinasi pembahasan dan penyusunan produk hukum daerah, dan proses harmonisasi serta sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan efektif supaya produk hukum daerah yang disusun dapat lebih berkualitas.

2.3.2.5.1.4 Tindaklanjut kebijakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan

Implementasi untuk pengakuan dan perlindungan serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan secara adil di DIY dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada tahun 2022, DIY menyusun peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam menghadapi permasalahan hukum. Kemudian, tindaklanjut implementasi perda tersebut adalah dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara sistematis kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi di DIY. Penyelenggaraan bantuan hukum tersebut tentunya juga perlu didukung secara teknis penyelenggaraan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan dukungan alokasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

2.3.2.5.1.5 Pengelolaan dan implementasi kebijakan pembangunan wilayah belum optimal.

Penyediaan dan implementasi kebijakan di bidang pembangunan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam hal ini untuk lebih mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antar wilayah dan kualitas lingkungan hidup.

2.3.2.5.1.6 Pengelolaan dan Implementasi pembiayaan pembangunan non pemerintah belum optimal.

Kemampuan fiskal untuk pembiayaan pembangunan terbatas, penggunaan skema pembiayaan pembangunan non pemerintah masih rendah, serta belum adanya road map daftar proyek prioritas yang layak dibiayai dengan skema pembiayaan pembangunan non pemerintah.

2.3.2.5.1.7 Kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara langsung maupun elektronik belum optimal.

Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum mencapai level strategis serta kapasitas SDM pengelola PBJ belum terpenuhi secara optimal.

2.3.2.5.1.8 Sistem tata niaga pangan yang belum efisien

Kajian dari Biro Ekonomi menyatakan bahwa dari sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. Saat panen produk tersedia

di pasar dalam jumlah melimpah sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh DIY (2017) menemukan bahwa untuk pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. Pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. Sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. Dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada di tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran.

2.3.2.5.1.9 Masih kurangnya tingkat inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 (OJK, 2019), Indeks Inklusi Keuangan DIY sebesar 76,12%, masih sedikit di bawah rerata nasional yang sebesar 76,19%. Kondisi ini hanya setingkat lebih baik dibanding Jawa Tengah di regional Jawa-Bali. Kondisi ini juga didukung oleh belum meratanya akses keuangan antar kabupaten/kota di DIY. Kajian Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah (OJK DIY, 2019) menyatakan bahwa terdapat disparitas terkait dengan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam melihat kinerja lembaga keuangan dan perbankan, misalnya jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan indikator lainnya menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di DIY. Kajian yang sama juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 42% dari total industri mikro dan kecil yang ada di sektor unggulan yang belum mengakses kredit perbankan.

2.3.2.5.2 Urusan Sekretariat DPRD

2.3.2.5.2.1 Sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan ketugasan belum memadai, khususnya bangunan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro.

Berdasarkan hasil telaah Telaah Staf Sekretariat DPRD DIY Nomor 120/06700 Tanggal 14 November 2019 tentang rencana pembangunan gedung baru DPRD DIY disampaikan bahwa seiring dinamika serta perkembangan kawasan dari sisi luasan, aksesibilitas, dan kebutuhan ruang kerja, Gedung DPRD DIY yang

berlokasi di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta sudah tidak memadai untuk menampung seluruh aktivitas kedewanan. Disamping itu berdasarkan kajian terkait masterplan rencana rehabilitasi Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, rehabilitasi yang sesuai kebutuhan tidak bisa dilakukan karena gedung tersebut merupakan bangunan heritage sehingga muncul wacana pembangunan Gedung DPRD DIY diluar kawasan Malioboro. Sehingga, diperlukan tindaklanjut berupa pemenuhan sarana dan prasarana atas kegiatan kedewanan melalui pembangunan Gedung Baru DPRD DIY. Pada Tahun 2020, terdapat Kajian Kawasan Gedung Pemerintah memuat rancangan Gedung DPRD DIY baru di Kawasan Jalan Kenari Yogyakarta. Hal tersebut memerlukan tindaklanjut berupa perencanaan pembangunan gedung baru DPRD DIY secara komprehensif.

2.3.2.6 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang

2.3.2.6.1 Perencanaan

2.3.2.6.1.1 Belum optimalnya keselarasan, integrasi, keterpaduan, dan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan (Pusat-Daerah-Kalurahan) serta antar urusan, utamanya dengan urusan keistimewaan.

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar-sektor perencanaan belum optimal. Periodisasi perencanaan jangka menengah yang tidak sama antar level pemerintahan. Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu.

2.3.2.6.1.2 Belum optimalnya kolaborasi *cross-cutting* program antar sektor dan urusan.

Ego sektoral yang masih dominan serta pemahaman aktor-aktor perencana sektoral dan perangkat daerah atas pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial) serta KISS (koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi) belum optimal.

2.3.2.6.1.3 Pencapaian tujuan pembangunan daerah yang belum efektif.

Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.

2.3.2.6.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.2.6.2.1 Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Berdasar data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) BKD DIY (20/01/22), jumlah PNS Pemda DIY sebanyak 10.510 orang, terdiri dari 5.519 orang perempuan dan 4.991 orang laki-laki. Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga. Masih terdapat kesenjangan kecukupan dalam hal kuantitas dan kualitas. Tantangan ke depan pada pemenuhan dan alih generasi atas pegawai maupun pejabat yang akan memasuki masa pensiun agar tidak terjadi keguncangan dalam estafet ketugasan. Pemda DIY akan mengalami *booming* pegawai pensiun dalam masa 10 sampai 15 tahun mendatang, dan akan semakin senjang apabila kebijakan penerimaan pegawai masih dibatasi.

2.3.2.6.2.2 Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penilaian ini meliputi 8 (delapan) aspek yaitu:

1. perencanaan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pengembangan karier;
4. promosi dan mutasi;
5. manajemen kinerja;
6. penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. perlindungan dan pelayanan; dan
8. sistem informasi.

Predikat “sangat baik” pada penilaian Sistem Merit Pemda DIY Tahun 2020 diperoleh dengan nilai 342 dengan indeks 0,83, meningkat dari tahun 2019 Pemda DIY mendapat nilai 313,5 dengan indeks 0,78. Permasalahan yang masih dihadapi dalam sistem merit diantaranya masih belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil. Aspek integritas pegawai ini antara lain meliputi kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap kode etik Pegawai Negeri Sipil.

2.3.2.6.2.3 Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai

Sektor Aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikutannya. Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga Rencana Pengembangan Kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan.

2.3.2.6.2.4 Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya setiap PNS berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JPL). Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021, Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi sejumlah 640 (6,09%) dari total 10.504 ASN di Pemda DIY. Selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi juga berperan dalam mengembangkan *Corporate University* sebagai upaya percepatan terhadap hal tersebut.

2.3.2.6.2.5 Kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kepegawaian.

Bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas pelayanan adalah ketersediaan sarana dan prasarana, BKD DIY selalu berkomitmen secara konsisten untuk meningkatkan hal tersebut. Ketersediaan bangunan gedung negara yang memadai sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan ke depannya, karena bangunan yang ada sekarang meskipun secara kondisi "baik", namun sebenarnya tidak sesuai/memadai untuk memberikan pelayanan di bidang kepegawaian.

2.3.2.6.3 Urusan Keuangan

2.3.2.6.3.1 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyusunan anggaran belanja, yaitu kesepakatan bersama KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS serta evaluasi RAPBD dan perubahan RAPBD tergantung pihak eksternal.

Pelaksanaan pengajuan evaluasi RAPBD dan Perubahan RAPBD telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat prosedur evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang secara teknis masih perlu penyesuaian dalam pelaksanaan.

2.3.2.6.3.2 Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal.

Untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat, Pemda DIY masih mengandalkan dana perimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang masih dominan dibandingkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2020 tercatat 42,25% sumber pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan, diikuti 33,44% PAD dan 24,30% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketergantungan fiskal terhadap pusat harus ditekan sehingga kemandirian fiskal daerah meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan mengoptimalkan potensi PAD (terutama lain-lain PAD yang sah). Selain itu, pengelolaan piutang pajak, retribusi, dan piutang lain-lain PAD juga masih belum memadai.

2.3.2.6.3.3 Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dilaksanakan setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menindaklanjuti hal tersebut dengan memproses penyusunan peraturan peta jalan ETPD. Selain itu dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi digital, Pemda DIY masih perlu memperhatikan beberapa hal sesuai arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

2.3.2.6.3.4 Sistem manajemen Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh belum tersusunnya Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) dan kerangka kebijakan yang komprehensif terkait Pengelolaan BMD.

2.3.2.6.3.5 Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum optimal. Permasalahan lain yang juga ditemui adalah penetapan BLUD belum optimal.

Pencatatan dan penatausahaan keuangan di BLUD selama ini dilakukan secara manual sehingga dalam pelaksanaan tidak terdapat keseragaman dan pegawai di bidang keuangan sering mengalami kesulitan, terutama untuk BLUD baru. Sementara itu terkait penetapan BLUD yang belum optimal disebabkan oleh pengajuan usulan seringkali tidak disertai kesiapan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

2.3.2.6.3.6 Perlunya transformasi kelembagaan pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) untuk menguatkan permodalan.

BUKP sebagai Lembaga yang bertujuan untuk memberikan akses kredit bagi pelaku usaha mikro yang sulit mengakses kredit dari Perbankan di DIY, hingga saat ini perlu adanya penguatan permodalan. Hal tersebut tentunya perlu yang didahului dengan transformasi kelembagaan BUKP supaya lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga proses peningkatan permodalan menjadi lebih aman.

2.3.2.6.3.7 Peningkatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan program-program terkait urusan keuangan.

Sarana prasarana penunjang cukup berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja diurusan keuangan diantaranya terkait optimalisasi pendapatan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten/Kota di DIY. Dukungan

sarpras tersebut perlu ditingkatkan dengan diantaranya meningkatkan kenyamanan gedung pelayanan melalui rehabilitasi gedung KPPD di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan pembangunan gedung KPPD di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu perlu adanya sarana mobilitas dalam pelayanan dan penagihan pajak. Terkait dengan urusan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2.3.2.6.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya kolaborasi dan integrasi antar institusi kelitbang di DIY baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun lembaga litbang vertikal.
3. Belum ada mekanisme kerjasama formal dan non formal dengan institusi kelitbang di luar Pemda DIY untuk melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan masalah perencanaan pembangunan daerah DIY.
4. Bidang kepakaran fungsional peneliti di Pemda DIY masih terbatas sehingga berdampak pada hasil penelitian yang belum dapat menjawab berbagai permasalahan perencanaan pembangunan

2.3.2.6.5 Urusan Pengelolaan Perbatasan

2.3.2.6.5.1 Validitas Batas Wilayah Provinsi

Salah satu permasalahan dalam urusan pengelolaan batas daerah yang perlu perhatian lebih lanjut adalah ditemukannya beberapa segmen dalam batas wilayah provinsi yang belum valid. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk melakukan koordinasi antar wilayah dalam hal ini antar kabupaten se-DIY serta dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan penarikan titik deliniasi yang lebih detil serta sinkronisasi peta mulai dari peta desa/kalurahan sampai pada peta bumi Indonesia diharapkan akan mempertegas batas wilayah yang kemudian akan dituangkan dalam kesepakatan antar provinsi sehingga perencanaan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan dapat lebih fokus dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Mengingat banyak hal atau urusan pembangunan yang harus diselesaikan bersama antar pihak, mulai dari urusan pendidikan, sarana dan pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan banyak lagi hal lainnya.

2.3.2.6.6 Urusan Penghubung

1. Fasilitasi terhadap masyarakat DIY di Jakarta belum optimal.
2. Perlu ada parameter yang jelas terhadap diaspora jogja yang difasilitasi.
3. Tuntutan untuk merespon cepat perkembangan kondisi yang dinamis dalam penyelenggaraan layanan tamu dan pimpinan.
4. Hal ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana (kendaraan, penginapan dll) yang belum memadai.
5. Dampak pemberlakuan Undang Undang Ibu Kota Negara terhadap keberadaan, kedudukan, dan tugas fungsi penghubung pada unsur penunjang urusan pemerintahan perlu diantisipasi dan dikaji sejak awal.

2.3.2.7 Unsur Pengawasan Pemerintahan

2.3.2.7.1 Metode pengawasan eksisting yang sudah tidak efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah kini berkembang pesat dengan berbagai dinamika diantaranya perubahan tata kerja akibat dampak Pandemi Covid19, bertambahnya ketugasan *mandatory* pelaksanaan tugas pengawasan, dan transformasi sistem informasi digital dalam pemerintahan. Hal tersebut membuat metode pengawasan yang eksisting tidak lagi efektif dan efisien. Sehingga untuk mempertahankan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal, diperlukan pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memanfaatkan tata kerja baru dan perkembangan sistem informasi digital.

2.3.2.8 Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat DIY. Terakhir penyusunan *Grand Desain* Keistimewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunnya grand

desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY bisa terpecahkan. Secara umum, dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan.
3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar.
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan, sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan.
5. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran
6. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan.

Secara khusus terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY di setiap urusan yakni :

2.3.2.8.1 Urusan Kebudayaan

1. Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
2. Kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi asset budaya baik benda maupun tak benda.
3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat.
4. Berkurangnya jumlah *maestro* seni budaya di Yogyakarta.
5. Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan, vandalism.
6. Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan terhadap cagar budaya dan warisan budaya.

2.3.2.8.2 Urusan Pertanahan

1. Belum optimalnya inventarisasi, dokumentasi dan pendaftaran tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa. Hal tersebut diantaranya termasuk terbatasnya kapasitas pemeliharaan dokumen pertanahan atas

- tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dan sistem informasi pertanahan berbasis bidang-bidang tanah.
2. Beberapa bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten masih ada yang belum memiliki alas hak atau masih dalam proses , sehingga perlindungan terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten menjadi belum optimal (termasuk berpotensi terjadi sengketa dan konflik pertanahan).

2.3.2.8.3 Urusan Tata Ruang

1. Tekanan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai objek penataan ruang semakin tinggi.
2. Densifikasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin “tenggelam” di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan.
3. Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan.
4. Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat terhadap ruang beserta isinya, baik yang bersifat publik maupun private.
5. Tata ruang dan tata bangunan khususnya di perkotaan dan fenomena kota yang tertutup oleh media iklan luar ruang merupakan bukti penataan kota yang “acak-acakan” sekaligus mengindikasikan tidak digunakannya filosofi keistimewaan Yogyakarta (misalnya poros sumbu imajiner dan Golong-Gilig) dalam proses penataan ruang dan pembangunan kota.
6. Menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemacetan, pencemaran lingkungan, intensitas bencana, dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain.
7. Belum optimalnya Koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

8. Regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang dinilai masih sangat normatif menyulitkan memasukkannya nilai-nilai filosofis keistimewaan Yogyakarta dalam dokumen perencanaan ruang.
9. Sistem kelembagaan penataan ruang keistimewaan masih lemah, khususnya terkait dengan duplikasi kewenangan antar instansi, lintas kabupaten maupun antar kabupaten dengan DIY.
10. Masih terbatasnya keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang keistimewaan Yogyakarta, mengakibatkan tata ruang hanya menata wadah kegiatan manusia, tanpa memperhatikan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat.

2.3.2.8.4 Urusan Kelembagaan

1. Optimalisasi pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dapat meningkatkan kinerja urusan keistimewaan. Hal tersebut diantaranya dengan peningkatan efektifitas kelembagaan keistimewaan (melalui penataan), penguatan kapasitas pemangku urusan keistimewaan, peningkatan efektifitas proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta monitoring evaluasi urusan keistimewaan dengan semua pemangku kepentingan.
2. Penguatan kelembagaan pemangku kepentingan urusan keistimewaan, termasuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, dalam pelaksanaan urusan keistimewaan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

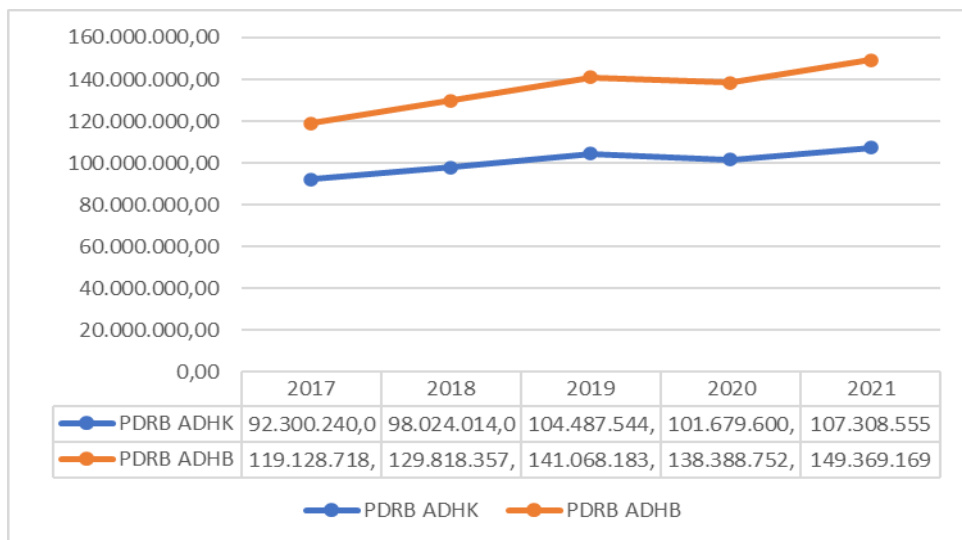
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2016-2021

3.1.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

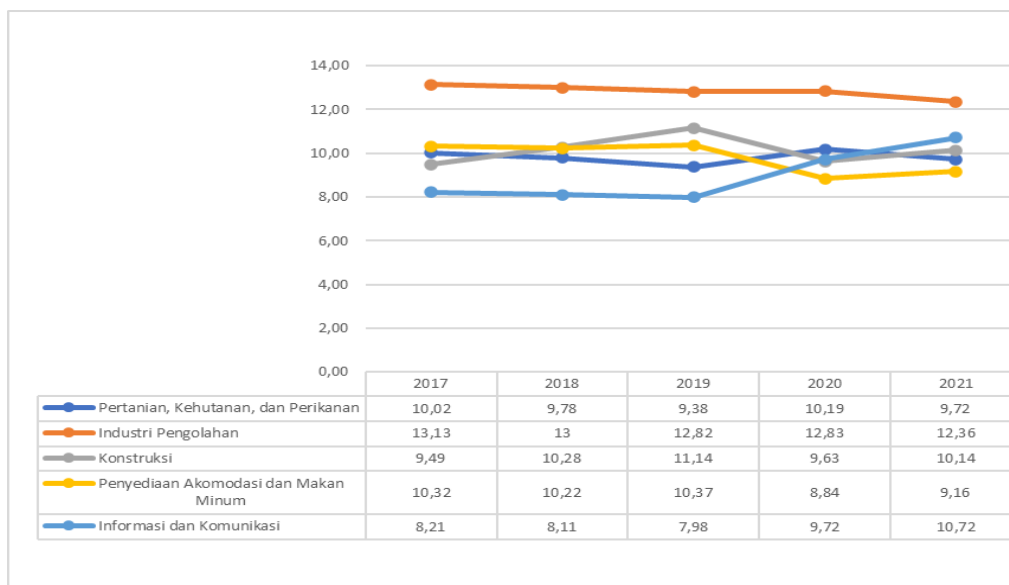
Kondisi perekonomian DIY selama periode 2017-2019 menunjukkan perkembangan yang positif, namun menurun di tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian kembali membaik dengan pertumbuhan positif di tahun 2021. Pada tahun 2017, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp92,300 trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp119,128 trilyun yang meningkat di tahun 2019 menjadi Rp104,487 trilyun (ADHK) dan Rp141,068 trilyun (ADHB). Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK dan ADHB masing-masing turun menjadi Rp. 101,679 triliun dan Rp138,388 trilyun. PDRB ADHK dan ADHB meningkat menjadi Rp107,308 trilyun dan Rp149,369 trilyun di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2017 - 2021

Selama tahun 2021, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini.



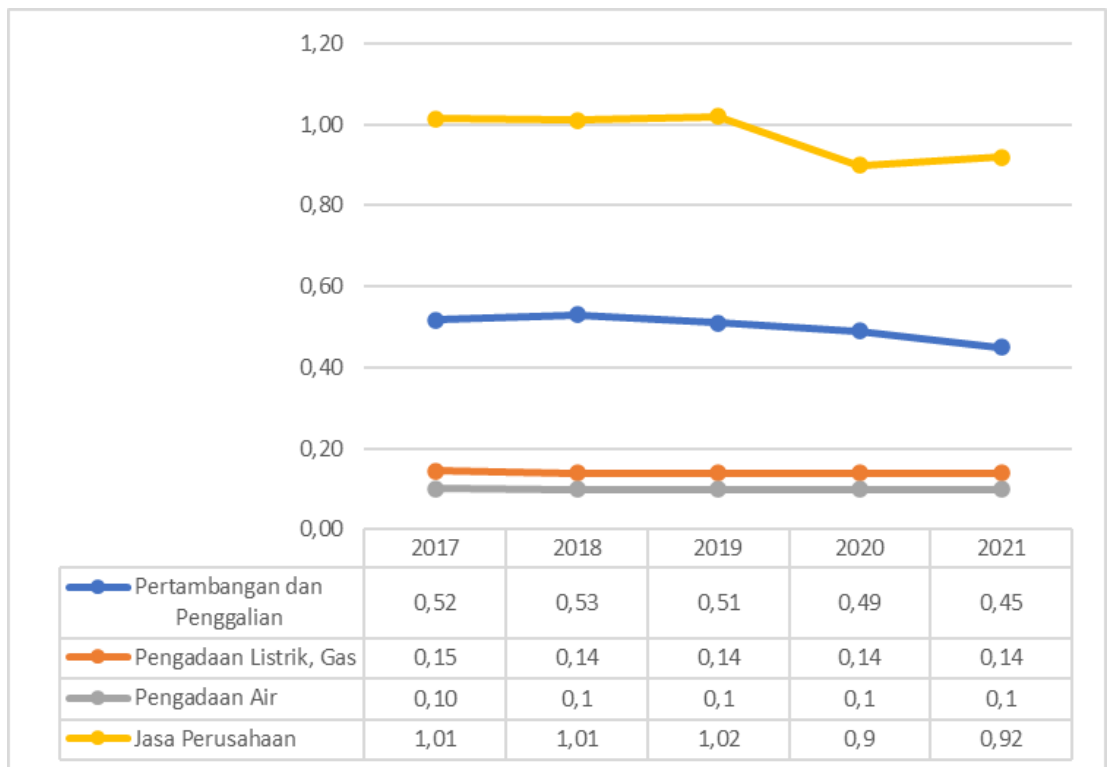
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY di Tahun 2021 (%), 2017 - 2021

Kontribusi masing-masing sektor tersebut pada tahun 2021 adalah: sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi sebesar 12,36%. Sementara itu, pangsa konstruksi sebesar 10,14%, Informasi dan Komunikasi 10,72% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,82%, serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 9,16%. Kontribusi sektor industri pengolahan

mengalami tren penurunan. Sektor yang menunjukkan tren meningkat di lima tahun terakhir adalah Informasi dan Komunikasi.

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 2%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu.



sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2016 - 2021

3.1.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2017-2019, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 semua mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Kontribusi

Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% tapi kemudian menurun menjadi 53,25%.

Selama respons dan mitigasi pandemi Covid-19 di tahun 2020, Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori meningkat. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga meningkat dari 65,53% (2019) menjadi 67,02% (2020), namun kemudian menurun menjadi 64,32% (2021). Sementara itu pada periode 2020 - 2021, Pengeluaran Pemerintah menurun dari 16,54% menjadi 15,45% sedangkan Perubahan Inventori meningkat dari 1,18% menjadi 1,20%.

Tabel 3-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017 - 2021

Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	81,335,810	86,753,197	92,459,989	92,753,542	96,073,981
Konsumsi LNPRT	3,756,395	4,095,046	4,613,732	4,378,319	4,470,000
Konsumsi Pemerintah	19,508,072	21,346,113	22,458,454	22,889,807	23,707,981
Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,111,436	43,173,678	49,519,128	44,319,423	49,031,449
Perubahan Inventori	1,368,184	1,435,491	1,501,126	1,631,021	1,793,056
Ekspor Luar Negeri	7,436,959	8,749,632	8,970,892	7,782,029	9,769,620
Impor Luar Negeri	6,540,719	7,206,068	6,934,236	5,326,062	5,864,623
Net Ekspor Antar Daerah	(24,845,137)	(28,469,631)	(31,188,901)	(30,121,245)	(28,975,296)
P D R B	119,131,000.0	129,877,458.0	141,400,183.0	138,306,833	149,369,169.0

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tabel 3-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2017 - 2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi RT	68,28	66,83	65,53	67,02	64,32
Konsumsi LNPRT	3,15	3,15	3,27	3,16	2,99
Konsumsi pemerintah	16,38	16,47	15,90	16,54	15,45
PMTB	31,15	33,27	35,14	32,03	32,83
Perubahan Inventori	1,15	1,11	1,07	1,18	1,2
Ekspor LN	6,24	6,74	6,26	5,62	6,54

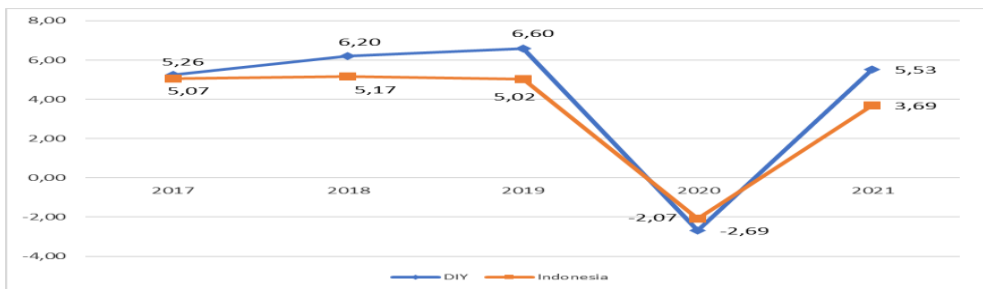
Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Impor LN	5,48	5,53	4,76	3,85	3,93
Net Ekspor Antar daerah	-20,87	-22,04	-22,42	-21,7	-19,4
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY 2022

Keterangan: *Angka proyeksi

3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

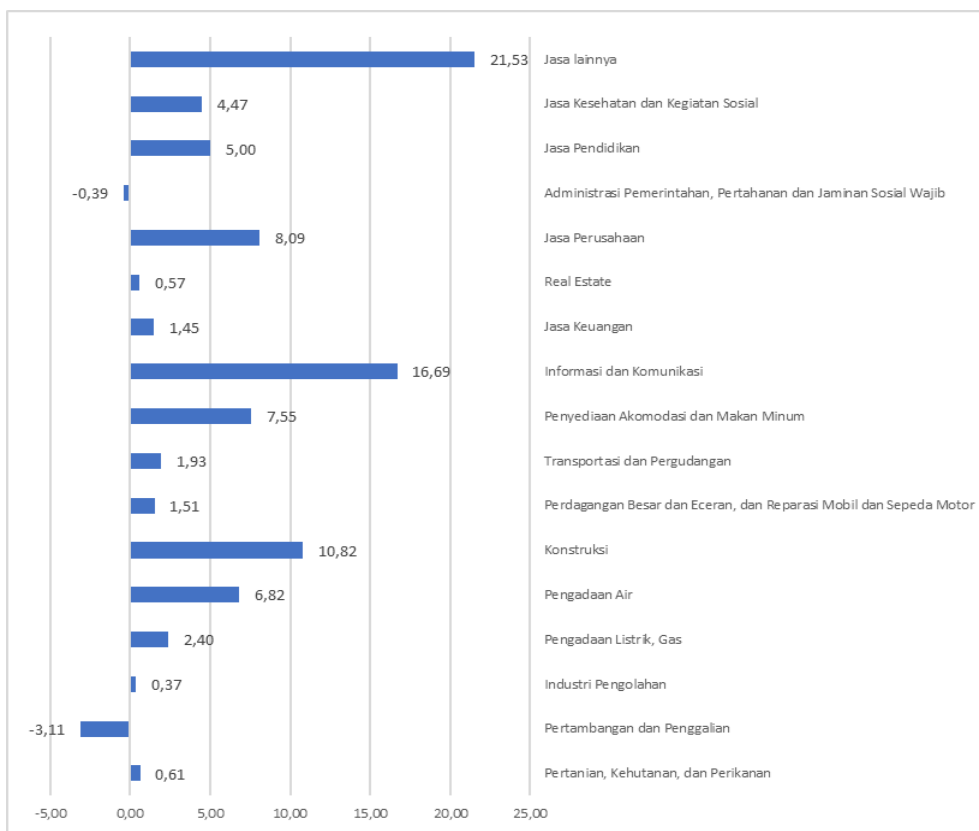
Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat, sementara itu pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Pertumbuhan kembali menunjukkan perkembangan ekspansif. Tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2016 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,6%, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 adalah -2,69%. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,53% yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 3-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2016 - 2021

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2021 di dukung pertumbuhan mayoritas lapangan usaha. Terdapat dua sektor dalam perekonomian yang tumbuh negatif yaitu Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Penambangan dan Penggalian. Pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar 21,53%.

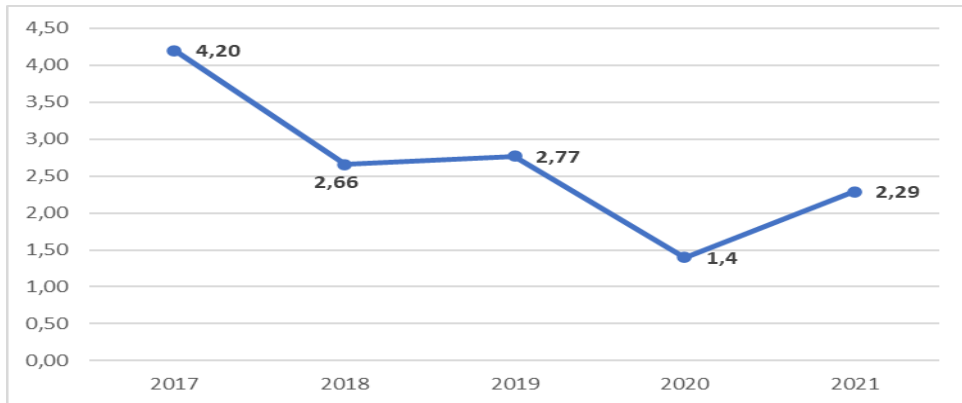


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2021

3.1.2 Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun, 2017-2021. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2020 mencapai 1,40% dan kemudian meningkat kembali menjadi 2,29%.

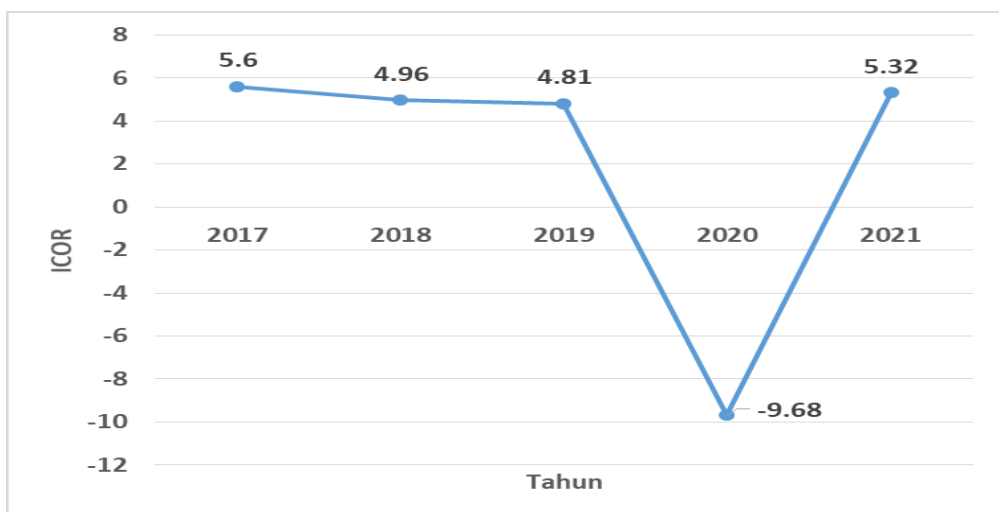


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2016 - 2021

3.1.3 ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR di tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR turun dari 5.86 di tahun 2016 menjadi 4,81 di tahun 2019 yang menunjukkan terdapat peningkatan efisiensi proses produksi selama periode 2016 - 2019. Pada tahun 2020, ICOR bernilai negatif karena perekonomian DIY mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 5,32.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 dan Bappeda DIY, 2022

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 - 2021

3.1.4 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama 2017-2021 namun sempat menurun di tahun 2019 kemudian pada masa pandemi tahun 2020-2021 jumlah pengangguran terbuka meningkat kembali.

Tabel 3-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2017 - 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.117.190	2.226.280	2.246.190	2.228.160	2.334.960
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	64.019	75.030	71.480	101.850	106.430
TPT (%)	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Angkatan kerja di tahun 2021 berjumlah 2.334.960 orang dan meningkat sebanyak 106.800 orang dari 2.228.160 orang dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 106.430 orang pada tahun 2021 dari 101.850 orang di tahun sebelumnya.

3.1.5 Kemiskinan

Dalam periode 2017-2019 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang sebanyak 25.440 penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2020 meningkat sebanyak 62.250 orang akibat pandemi dengan jumlah total orang miskin sebanyak 503.140 orang namun kemudian menurun menjadi 474.490 orang di tahun 2021.

Tabel 3-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2017 - 2021 (September)

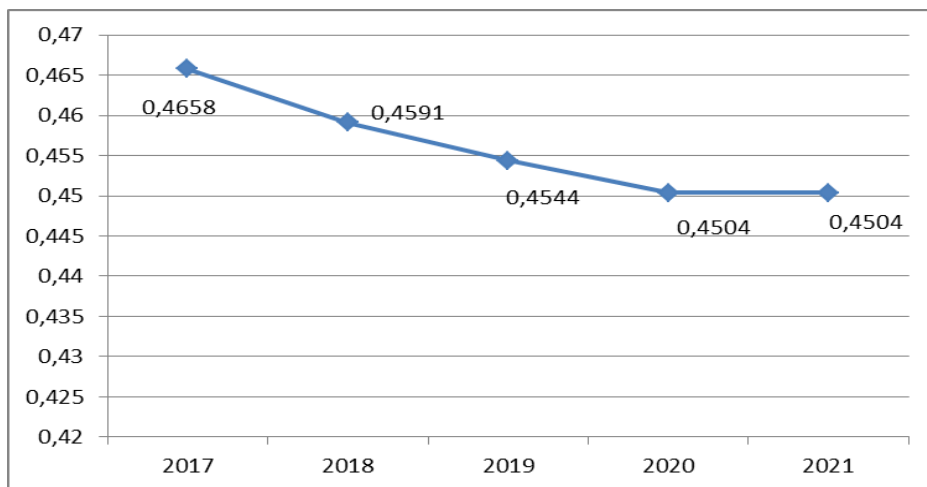
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	466,33	450,25	440,89	503,14	474,49
Tingkat Kemiskinan (%)	12,36	11,81	11,44	12,80	11,92

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,44% yang menurun terus dari 12,36% di tahun 2016. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi 12,80% di tahun 2020 dan kemudian menurun kembali menjadi 11,92% di tahun 2021.

3.1.6 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson (IW)*. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata. Pada tahun 2021, ketimpangan regional sama dengan tahun 2020 yaitu 0,4504.

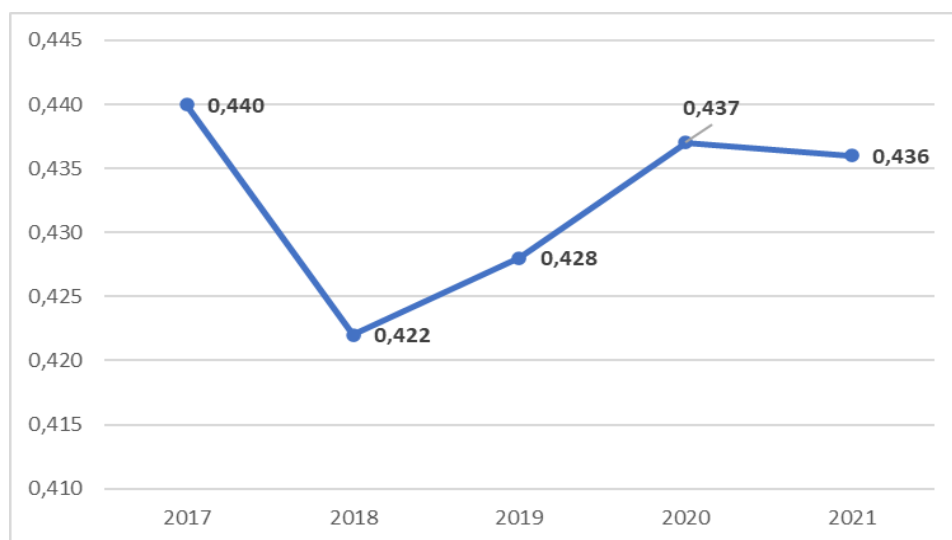


Sumber: BPS Provinsi DIY 2021, Jogja Dataku diakses 22 Februari 2022

Gambar 3-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2021

3.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Ketimpangan meningkat setelah tahun 2018 sampai tahun 2020 dari 0,422 (2018) menjadi 0,437 (2020) Pada tahun 2021, Rasio Gini kembali menurun menjadi 0,436 di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017 - 2021 (September)

3.1.8 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

Tabel 3-5 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2023

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,34 - 5,8%
Inflasi	2,51 - 2,73%
ICOR	6,27 - 5,77
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95 - 3,42%
Tingkat Kemiskinan	10,15 - 10,74%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,423 - 0,463
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441 - 0,444
Indeks Pembangunan Manusia	81,07 - 81,47

Sumber: BPPSD Bappeda DIY (2022)

3.1.8.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan terus meningkat setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 yang telah mendorong perekonomian ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir konsisten menjadi sektor yang cukup dominan melalui lapangan usaha akomodasi dan makan dan minum di perekonomian DIY terutama terkait dengan dinamika aktivitas perguruan tinggi dan pariwisata. Sektor tersebut sempat mengalami kontraksi cukup tinggi di tahun 2020 akibat pandemi yaitu tumbuh -16,91%. Aktivitas pariwisata kembali menunjukkan dinamika yang positif terutama dimulai di akhir tahun 2021 seiring dengan menurunnya penularan dan gencarnya vaksinasi serta perluasan inisiatif pariwisata yang mempraktekkan CHSE. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sector jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Semakin kondusifnya perekonomian diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi antara 5,34 dan 5,8% di tahun 2023.

3.1.8.2 Inflasi

Perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor demand-pull bagi kenaikan harga barang konsumsi. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,51 sampai 2,73%.

3.1.8.3 ICOR

Perekonomian di tahun 2023 sudah diharapkan menuju kondisi *rebound* yang semakin baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi

sebelum pandemic yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5%. Pada tahun 2023, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,77 sampai 6,27%.

3.1.8.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Tingkat pengangguran sempat mencapai tingkat tertinggi di tahun 2020 sejak tahun 2016 yaitu sebesar 4,57% akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 2,95 sampai 3,42% di tahun 2023.

3.1.8.5 Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sekitar dalam range 10,15-10,74% di tahun 2023. Rebound perekonomian selama tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan setelah terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 12,80% di tahun 2020 akibat dampak pandemi.

3.1.8.6 Indeks Gini

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,423 sampai 0,463. Selama pandemi di tahun 2020, Indeks Gini mencapai 0,441 akibat meningkatnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

3.1.8.7 Indeks Williamson

Berkurangnya dampak epidemi Covid-19 akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan memperbaiki ketimpangan wilayah. Pada tahun 2020, *rebound* nya aktivitas perekonomian lebih banyak dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terutama akibat meningkatnya aktivitas pariwisata. Berbagai pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2021 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2023, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2023 disajikan pada Tabel Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dengan proyeksi Indeks Williamson berkisar antara 0,441 – 0,444.

3.1.8.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Fakta bahwa pandemic Covid-19 di tahun 2020 tidak memburukkan kondisi unsur pendidikan dan kesehatan dalam IPM menjadi asumsi yang mendukung semakin meningkatnya tingkat pembangunan manusia di DIY. Pada tahun tersebut, komponen ekonomi yang diwakili dengan paritas daya beli yang disesuaikan turun tidak secara signifikan. Pada tahun 2021, semua unsur IPM mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut akan terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023 mengingat kondisi perekonomian dan sosial masyarakat semakin membaik. Proyeksi IPM di tahun 2023 berkisar antara 81,07 – 81,47.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah di atas proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Adanya regulasi tentang pemberian insentif bagi masyarakat dengan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 - b. Dengan adanya pemulihan ekonomi karena menurunnya angka Covid-19 sehingga menyebabkan:
 - i. Mobilitas masyarakat meningkat yang menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar;
 - ii. Peningkatan retribusi di terminal;
 - iii. Peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan penggunaan Gedung olah raga meningkat;
 - iv. Peningkatan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - v. Peningkatan daya beli masyarakat;
 - c. Perkiraan peningkatan Jumlah sampah 5% per tahun menyebabkan peningkatan retribusi sampah;
 - d. Adanya kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah melalui sarana digital maupun manual di beberapa

layanan pembayaran payment point yang ada di Mall Galeria, Samsat Desa, Bus Samsat Keliling, Mobile Banking, Mesin EDC, ATM bank BPD (ePosti), Aplikasi Signal dsb, maupun pembayaran retribusi melalui QRIS, Mesin EDC, Gopay, Tokopedia, Mobile Banking dsb, sehingga diharapkan dapat menaikkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;

- e. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Asumsi Pendapatan Transfer:
- a. Pendapatan transfer pada tahun 2023 dianggarkan sebesar anggaran tahun 2022 sambil menunggu Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Transfer ke daerah atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, kecuali Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan diasumsikan dengan anggaran moderat sesuai dengan skenario penganggaran.
 - b. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.
 - c. Penggunaan DBH CHT:
 - i. bidang kesejahteraan masyarakat. untuk: 1) program peningkatan kualitas bahan baku; 2) program pembinaan industri; dan 3) program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja serta untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan;
 - ii. bidang penegakan hukum;
 - iii. bidang kesehatan.

- d. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Asumsi Belanja:
 - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
 - f. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD;
 - g. Penganggaran kegiatan/sub kegiatan tahun jamak, kriteria:
 - i. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu)

Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; atau

- ii. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3-6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Kode	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	APBD Tahun 2021 (N-2)	Realisasi 2021	APBD Tahun 2022 (N-1)	Realisasi 2022*	Proyeksi Tahun 2023 (N)
1	2	3	4	5		5
4.	PENDAPATAN	5.727.769.666.875,00	5.703.100.309.342,23	5.364.614.634.680,00	1.766.951.726.109,3501	5.713.893.724.612,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.849.837.899.685,00	1.900.923.074.881,46	2.045.838.352.190,00	918.664.363.648,3501	2.181.767.211.192,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548,00	1.668.443.843.923,00	1.831.695.736.270,00	750.974.782.359	1.911.094.993.270,00
4.1.02	Retribusi Daerah	30.776.089.575,00	38.512.949.895,00	33.049.773.075,00	9.111.552.546	37.395.520.559,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	86.558.389.843,00	96.338.516.913,54	104.889.783.509,00	101.200.637.601,29	107.713.113.488,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.773.335.719,00	77.627.764.149,92	76.203.059.336,00	57.377.391.142,06	125.563.583.875,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.870.355.267.190,00	3.794.855.660.531,00	3.311.199.782.490,00	845.720.879.043	3.524.550.013.420,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.869.575.248.000,00	3.794.050.615.221,00	3.310.328.489.000,00	845.720.879.043	3.523.714.107.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190,00	805.045.310,00	871.293.490,00	0	835.906.420,00

RKPD DIY 2023

Kode	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	APBD Tahun 2021 (N-2)	Relisasi 2021	APBD Tahun 2022 (N-1)	Realisasi 2022*	Proyeksi Tahun 2023 (N)
1	2	3	4	5		5
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000,00	7.321.573.929,77	7.576.500.000,00	2.566.483.418	7.576.500.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	7.576.500.000,00	2.452.625.000	7.576.500.000,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan		179.943.929,77			
	JUMLAH PENDAPATAN	5.727.769.666.875,00	5.703.100.309.342,23	5.364.614.634.680,00	1.766.951.726.109,3501	5.713.893.724.612,00
5.	BELANJA	6.091.572.432.696,00	5.530.173.461.667	5.761.351.132.197,00	1.485.346.621.783	5.962.893.724.612,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.006.005.048.373,00	3.575.258.030.927,29	3.722.282.846.320,00	1.055.726.199.776	3.830.220.008.766,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.740.762.611.496,00	1.561.540.552.725,00	1.732.843.897.779,00	662.528.693.031	1.693.707.024.049,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.827.726.617,00	1.039.417.892.656,29	1.349.690.564.780,00	267.723.574.318	1.341.058.097.840,00
5.1.04	Belanja Subsidi	73.414.802.510,00	73.315.381.521,00	78.451.861.160,00	26.779.249.908	86.311.695.477,00
5.1.05	Belanja Hibah	914.269.697.750,00	878.407.044.213,00	530.131.511.051,00	96.166.561.869	688.264.691.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.730.210.000,00	22.577.159.813,00	31.165.011.550,00	2.528.120.650	20.878.500.000,00

Kode	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	APBD Tahun 2021 (N-2)	Relisasi 2021	APBD Tahun 2022 (N-1)	Realisasi 2022*	Proyeksi Tahun 2023 (N)
1	2	3	4	5		5
5.2.	BELANJA MODAL	772.603.879.305,00	654.839.728.747,39	668.953.701.335,00	127.701.111.073	682.768.120.557,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.782.452.000,00	185.263.842.550,00	124.611.548.435,00	60.531.991.760	212.070.282.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.429.608.008,00	153.066.731.565,00	148.089.677.972,00	18.246.353.469	114.322.228.950,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.700.096.260	66.855.285.344,54	218.388.060.207,00	23.910.280.142	160.505.814.607,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	258.558.283.967,00	214.309.752.467,85	162.733.333.000,00	18.640.190.353	185.359.794.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.133.439.070,00	35.344.116.820,00	15.131.081.721,00	597.231.574	3.255.285.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	7.254.715.400,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	69.073.641.335,00	53.316.587.701,00	94.764.494.559,00	5.871.069.000	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.073.641.335,00	53.316.587.701,00	94.764.494.559,00	5.871.069.000	20.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.243.889.863.683,00	1.246.759.114.291,51	1.275.350.089.983,00	296.048.241.934	1.429.905.595.289,00
5.4.01	Belanja Bagi	684.276.997.183,00	713.118.316.167,00	743.441.355.389,00	202.700.534.196	771.843.532.489,00

RKPD DIY 2023

Kode	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	APBD Tahun 2021 (N-2)	Relisasi 2021	APBD Tahun 2022 (N-1)	Realisasi 2022*	Proyeksi Tahun 2023 (N)
1	2	3	4	5		5
	Hasil					
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	559.612.866.500,00	533.640.798.124,51	531.908.734.594,00	93.347.707.738	658.062.062.800,00
	JUMLAH BELANJA	6.091.572.432.696,00	5.530.173.461.667	5.761.351.132.197,00	1.485.346.621.783	5.962.893.724.612,00
	SURPLUS/(DEFIS IT)	(363.802.765.821)	172.926.847.675,04	(396.736.497.517,00)	281.605.104.326,3501	(249.000.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN	363.802.765.821,00	381.560.546.739,46	396.736.497.517,00	-	249.000.000.000,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486.302.765.821,00	494.060.546.739,46	570.412.054.517,00	-	554.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	481.302.765.821,00	484.453.213.139,46	560.412.054.517,00	-	550.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	9.607.333.600.000	10.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	122.500.000.000,00	494.060.546.739,45	173.675.557.000,00	-	305.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000,00	112.500.000.000,00	173.675.557.000,00	-	300.000.000.000,00

Kode	Uraian (PP Nomor 12 Tahun 2019)	APBD Tahun 2021 (N-2)	Relisasi 2021	APBD Tahun 2022 (N-1)	Realisasi 2022*	Proyeksi Tahun 2023 (N)
1	2	3	4	5		5
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	112.500.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	554.487.394.414,50	0,00	281.605.104.326,3501	0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Lembaga Keuangan *non*Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
Transfer Pemerintah Pusat yang ada di Pemda DIY terdiri atas :
 - 1) Dana Perimbangan;
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Keistimewaaan; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
Transfer antar-daerah pada Pemda DIY terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari *Dealer/Main Dealer, Dealer Otomotif*, dan PT. Jasa Raharja:

3.2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;

2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui electronic commerce (*e-commerce*);
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
10. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, samsat *payment point*, samsat desa, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
 - g. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY, terutama untuk Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

3.2.2.1.2 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

3.2.2.2 Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

3.2.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol dsb) dan E-Posti;

5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui transfer di bank/lembaga keuangan, mesin tapping e-Rusunawa dan e-Ticketing Museum Sonobudoyo;
6. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal.
7. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;
12. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

3.2.2.2.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

- a) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana

Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
- d) Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

- e) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
- f) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan

dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat . Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, budaya), pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan *gap* ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjaga daya dukung lingkungan;

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil;

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sementara itu, pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat investasi berupa

penyertaan modal kepada BUMD dan pinjaman daerah kepada masyarakat berupa dana bergulir kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026

RKPD Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen RPD 2023-2026 disusun dengan ketiadaan visi misi kepala daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka Panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 4-1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Target Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,15	5,34	5,53	5,70	5,85	5,85
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	3,58	3,42	3,17	3,00	2,87	2,87
			Indeks Gini	0,436	0,426	0,423	0,419	0,415	0,411	0,411
			Indeks Williamson	0,4504	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435	0,435
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan	Indeks Pembangunan Manusia	80,22	80,63	81,07	81,52	81,96	82,40	82,40

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Target Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	11,91	11,16	10,74	10,35	9,93	9,51	9,51
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan		74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,18
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

4.2 Perumusan Tema RKPD 2023

4.2.1 Tema RKPD Tahun 2023

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023. Sampai dengan dokumen rancangan awal ini disusun, belum ada kebijakan mengenai indikasi tema pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam rancangan RKPD 2023 ini indikasi tema pembangunan sementara masih didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dalam RPD 2023-2026 dengan memperhatikan isu pembangunan yang berkembang.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu:

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”

Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bisa

mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Mendasarkan pada tema pembangunan “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan**” maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
2. Pemulihan ekonomi
3. Penurunan kemiskinan
4. Pengurangan *gap* ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan

Keenam (6) rumusan Priroutas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2023 yang tercantum dalam RPD DIY 2023-2026, sebagai berikut.

Tabel 4-2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan DIY Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target
				2022	2023
Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,34
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,42
			Indeks Gini	0,426	0,423
			Indeks Williamson	0,447	0,444
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target
				2022	2023
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80,63	81,07
			Tingkat Kemiskinan	11,16	10,74
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good government</i>)	Indikator reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA

4.2.3 Keselarasan Tema RKPD Tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

RKPD Tahun 2023 berada pada tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang tahun 2025. Posisi RKPD 2023 dalam RPJPD tersebut menjadi strategis karena menjadi salah satu tahun penentu pencapaian visi jangka panjang daerah. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah: **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.”** Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya Pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah **pendidikan, budaya, pariwisata, pembangunan sosiokultural dan sosioekonomi**. Selanjutnya Visi Misi tersebut diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terbagi dalam tahapan lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
 - a. Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah
 - b. Tersedianya sumberdaya Pendidikan yang handal
 - c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap Pendidikan
 - d. Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY
 - e. Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
 - f. Meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya
 - g. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah tinggi
2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
 - a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan
 - c. DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur
 - d. Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif
 - e. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan benda Cagar Budaya
 - f. Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata
 - g. Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkat Asia Tenggara
3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

- a. Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata
 - b. Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal
 - c. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variative baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dana tau oleh pelaku wisata
 - d. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara
 - e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.
4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
- a. Terselenggaranya pemerintahan yang professional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum
 - b. Terciptanya kelambagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap
 - c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah.
 - d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai
 - e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industry kreatif di Asia Tenggara
 - f. Terpenuhinya peningkatan keamanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama
 - g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak dan remaja
 - h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi
 - i. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Adapun penekanan pembangunan pada lima tahun keempat (2020-2025) adalah “penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi”. Rumusan tema pembangunan

2023 yaitu “Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan” telah sesuai dengan penekanan pembangunan pada lima tahun keempat RPJPD 2005-2025 tersebut. Rumusan tema pembangunan tahun 2023 tersebut juga merupakan kesinambungan dari tema-tema pembangunan sebelumnya, termasuk sasaran pokok dan arah kebijakan tahapan ketiga RPJPD 2020-2025 dengan penekanan prioritas pada “Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah”.

4.2.4 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Tujuan pembangunan dalam RPD 2023-2026 yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat dan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good Government*). Sasaran pembangunan tahun 2023-2026 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY. Sebagai upaya lebih konkrit pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah.

Tabel 4-3. Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPD 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up business</i> berbasis teknologi	1.1. Menumbuhkan dan mengembangkan gerakan kewirausahaan secara terpadu lintas sektor untuk sektor-sektor unggulan dan berbasis ekonomi kreatif dan teknologi 1.2. Menumbuhkan dan mengembangkan inkubasi bisnis 1.3. Menumbuhkan kelompok usaha berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemuda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan <i>investment project ready to offer</i> dan pemerataan investasi</p>	<p>2.1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal terutama Kawasan Selatan secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya</p> <p>2.2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara Yogyakarta International Airport (YIA)</p> <p>2.3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</p>
		<p>3. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY</p>	<p>3.1. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY dengan dukungan peningkatan produktivitas SDA, SDM melalui jalur formal dan informal, dan pemanfaatan teknologi aplikatif</p> <p>3.2. Menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumberdaya</p>
		<p>4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang</p>	<p>4.1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang melalui percepatan penyusunan RDTR, penyediaan informasi, pengawasan perijinan dan penindakan pelanggaran serta penerapan insentif dan disinsentif.</p>
		<p>5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengarusutamaan pembangunan rendah karbon</p> <p>1.2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>1.3. Meningkatkan Konservasi SDA dan rehabilitasi lahan</p> <p>1.4. Menangani permasalahan di</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kawasan kumuh
		2. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana	2.1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2.2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap bencana terutama bagi kelompok rentan
		3. Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan	3.1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 3.2. Mengembangkan kerjasama dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	1.1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 1.2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 1.3. Memperkuat ketahanan keluarga
		2. Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal	2.1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berorientasi keunggulan lokal dan global 2.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal, nonformal serta informal dengan target lulusan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang kompeten untuk melanjutkan pendidikan, masuk dunia industri atau berwirausaha
		3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	1.1 Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi olahraga dan pengembangan sarana prasarana pendukung 1.2 Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 1.3 Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 1.4 Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1.1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1.1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 1.2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 1.3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah
		2. Memperkuat manajemen ASN	1.1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 1.2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 1.3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		3. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis	3.1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja kelembagaan 3.2. Medorong penyederhanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		organisasi	birokrasi dan regulasi 3.3. Meningkatkan budaya organisasi yang mengakomodir alih ilmu pengetahuan 3.4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 3.5. Memperkuat kolaborasi stakeholders dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik
		4. Meningkatkan kemandirian fiskal	4.1. Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda.

Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2023-2026. Rumusan tema pembangunan 2023 yaitu “Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan” selaras dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam RPD 2023-2026 dengan tetap mempertimbangkan dinamika perubahan kondisi lingkungan yang terjadi pada tahun 2023.

Prioritas pembangunan tahun 2023 telah diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Daerah 2023-2026 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4-4 Penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan 2023
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Indeks gini 4. Indeks Williamson 5. Klasifikasi Nilai IKLH	1. Program pengembangan sektor unggulan 2. Program penyelenggaraan infrastruktur wilayah 3. Program penumbuhan wirausaha baru 4. Program pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur 5. Program pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan 6. Program tata kelola lingkungan hidup dan penanggulangan bencana 7. Program peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Pengurangan gap ketimpangan wilayah 2. Pemulihan ekonomi 3. Menjaga daya dukung lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan 2023
			8. Program pengurangan emisi karbon	
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Indeks pembangunan manusia 2. Tingkat kemiskinan	1. Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan 2. Program peningkatan usia harapan hidup 3. Program penanggulangan kemiskinan	1. Penurunan kemiskinan 2. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1. Indeks pembangunan kebudayaan	1. Program pelestarian budaya benda dan tak benda 2. Program pembangunan sosial masyarakat	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	1. Program sinergitas tata kelola pemerintah daerah 2. Program pengelolaan kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Peningkatan kualitas layanan publik

4.2.5 Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD DIY Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023

Tahun 2023 yang merupakan dua tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki tantangan tersendiri. Sebagaimana tahun sebelumnya, pandemi Covid-19 masih akan mewarnai pembangunan tahun 2023. Selain itu, tahun 2023 merupakan *safe-guarding* pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 dimana pada tahun 2024 merupakan tahun politik dengan agenda pemilu dan masa transisi, dan pada tahun 2023 juga perlu mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai roadmap Visi 2024. Penyusunan RKP tahun 2023 merespon terhadap isu-isu pembangunan baik isu global, isu nasional dan isu lokal. Identifikasi isu global, nasional, dan lokal dalam rancangan RKP 2023 yaitu:

1. Isu global, meliputi:
 - Varian Covid-19
 - Pasokan pangan dan energi
 - Inflasi
 - Mobilitas terbatas
 - Investasi terhambat

2. Isu nasional, meliputi:
 - Varian Covid-19
 - Defisit APBN dan investasi
 - Rantai nilai
 - Inflasi dan daya beli
3. Isu Lokal, meliputi:
 - Bencana dan daya dukung lingkungan
 - Pemantapan pemulihan ekonomi
 - Daya beli
 - Pengangguran
 - Pemerataan

Tema Pembangunan Nasional sebagaimana disampaikan dalam *Kick Off RKP Tahun 2023*, yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Peningkatan Produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Peningkatan produktivitas yang dimulai tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk Transformasi Ekonomi. Terdapat enam strategi utama sebagai *“game changer”* untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan:

1. SDM berdaya saing
2. Produktivitas sektor ekonomi
3. Ekonomi hijau
4. Transformasi digital
5. Integrasi ekonomi domestik
6. Pemandangan IKN

Arah kebijakan RKP Tahun 2023 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun Prioritas Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

1. PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Terdapat 14 *Highlight Major Project* yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2023 yaitu:

Tabel 4-5 14 *Highlight Major Project* yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2023

Prioritas Nasional		Major Project
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Major Project</i> Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 2. <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM 3. <i>Major Project</i> Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) 4. <i>Major Project</i> Destinasi Pariwisata Prioritas 5. <i>Major Project</i> Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Major Project</i> di Wilayah Papua. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay 2. <i>Major Project</i> Pembangunan Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 2. <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 3. <i>Major Project</i> Reformasi Pendidikan Keterampilan 4. <i>Major Project</i> Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
PN 5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Major Project</i> Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 2. <i>Major Project</i> Transformasi Digital
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Prioritas Nasional		Major Project
	Bencana dan Perubahan Iklim	

Melalui prioritas dan strategi pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4-6 Tabel Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator	Target Tahun 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,9
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,29 – 73,35
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0

Perumusan prioritas pembangunan DIY Tahun 2023 telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023. Kesesuaian prioritas DIY dengan prioritas nasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4-7 Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional

PN Nasional	Prioritas DIY
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	- Pemulihan ekonomi - Penurunan Kemiskinan
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan <i>gap</i> ketimpangan wilayah
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan <i>gap</i> ketimpangan wilayah
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan

PN Nasional		Prioritas DIY
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu masukan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, berisi sejumlah pemikiran-pemikiran DPRD mengenai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 sekaligus penekanan terhadap permasalahan-permasalahan penting untuk segera diselesaikan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 mengatur DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sehubungan dengan posisi RPJMD DIY 2017-2022 akan segera berakhir, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini disusun dengan mendasarkan pada target RPJPD 2005-2025.

4.3.1 Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan arahan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang dan misi pembangunan jangka pendek di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisi lain penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini juga sekaligus sebagai penguatan terhadap proses perencanaan pembangunan (proses politis). Dengan demikian proses perencanaan diharapkan lebih berkualitas dengan semakin banyaknya perspektif yang melatarbelakangi. Adapun tujuan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD meliputi:

1. Memberikan bahan masukan, arahan sekaligus usulan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2023.
2. Penguatan fungsi representasi Anggota DPRD dengan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, sambang warga, sosialisasi

- produk hukum daerah, Rapat Dengar Pendapat Umum baik audiensi maupun public hearing.
3. Penguatan arah dan fokus pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana atertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, khususnya target pada tahun 2023.
 4. Memudahkan penyusunan dokumen RKPD, sehingga akan semakin memudahkan penyusunan KUA dan PPAS, RKA SKPD dan semakin mengefektifkan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
 5. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, kesenjangan pedapatan dan ketimpangan antar wilayah.
 6. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY secara adil dan merata, sebagai muara dari proses pembangunan daerah.

4.3.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi DPRD

Pembangunan daerah DIY menunjukkan dinamika yang cukup menarik pada kurun waktu tahun 2021. Meskipun masih diliputi suasana pandemi Covid-19, namun kinerja pembangunan di DIY menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di DIY sepertinya sudah “*on the track*”. Pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka positif, dan bahkan dalam Triwulan pertama dan kedua melampaui dari capaian nasional. Demikian pula dengan ekspor DIY ke mancanegara pada kurun waktu 2020 juga menunjukkan pergerakan angka yang signifikan tidak kalah dengan tahun 2019 saat sebelum pandemi. Hal ini tentu patut untuk diapresiasi bersama sebagai sebuah capaian yang positif.

Namun sisi lain pembangunan di DIY juga menunjukkan data yang paradoksal, dimana ada beberapa capaian pembangunan yang belum mampu menembus target dalam target RPJMD 2017-2022 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pendapatan (Indeks Gini) dan persentase angka kemiskinan. Permasalahan serius ini masih ditambah pula dengan dengan ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar. Semenjak RPJMD ditetapkan, maka ketiga hal tersebut belum pernah mencapai target sebagaimana seharusnya. Capaian ini sangat timpang bila dibandingkan dengan kinerja pada Tata Kelola Pemerintahan yang mendapatkan hasil sangat memuaskan sebagaimana target. Problematika inilah yang harus terus diselesaikan dalam proses pembangunan daerah selanjutnya.

Memasuki Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2020-2025, maka pembangunan daerah diarahkan pada penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Tahap IV inilah sebagai bagian akhir dari agenda besar target dalam RPJPD 2005-2025 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Momentum ini harus mampu dimaksimalkan untuk menopang ketercapaian target lima tahun terakhir RPJPD DIY.

Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, maka dituntut kerja keras semua pemangku kepentingan untuk bisa bangkit dan melesat cepat menyesuaikan dengan pola kehidupan baru pasca pandemi. Seluruh sektor kehidupan harus bergerak cepat melakukan penyesuaian dan akselerasi langkah dalam mencapai tujuan pembangunan DIY, pembangunan yang melahirkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan berkeadaban. Pondasi terhadap langkah cepat tersebut telah kita wujudkan melalui capaian kinerja pembangunan pada kurun waktu 2021, dimana kebijakan pemulihan sosial-ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Tabel 4-8 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021

Wilayah	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2021
DIY	6,14%	11,8%	2,30%	2,82%	5,53%
Nasional	-0,71%	7,07%	3,51%	5,02%	3,69%

Sumber: BPS, 2022

Tabel 4-9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2016-2021

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42	5,09
Bantul	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97
Gunungkidul	4,88	5,01	5,16	5,33	-0,68	5,22
Kulon Progo	4,76	5,97	10,84	13,49	-4,06	4,33
Sleman	5,22	5,34	6,42	6,49	-3,91	5,56
DIY	5,09	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53
Nasional	5,02	5,07	5,17	4,96	-2,07	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di DIY pada tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian kita harus tetap realistis bahwa pemulihan ekonomi secara penuh mungkin baru terjadi pada tahun 2022 melalui kebijakan dan strategi pemerintah DIY yang tepat serta dukungan masyarakat dan dunia usaha wilayah DIY akan kembali normal ditahun tersebut. Berbagai pokok-pokok pikiran serta rekomendasi yang disampaikan dalam bagian dibawah ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemulihan (*recovery*) pasca Pandemi Covid-19. Kebijakan yang lebih progresif dalam rangka dukungan terhadap berjalannya program pembangunan secara baik dan lancar.

Kebijakan pembangunan di DIY pada tahun 2023 masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (Indeks Gini) dan kesenjangan infrastruktur pembangunan wilayah dan pemulihan peri kehidupan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesaikannya persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik lokal maupun nasional.

4.3.2.1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah pondasi langkah yang paling fundamental selain pelaksanaan program pembangunan itu sendiri. Bahkan banyak orang mengatakan, perencanaan yang baik sudah merupakan setengah dari keseluruhan langkah yang harus dijalani. Kalimat tersebut memberikan lecutan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan secermat mungkin, sehingga akan memberikan banyak kemudahan dalam pelaksanaan nantinya. Pemahaman yang menguat saat sekarang ini antara lain menyatakan bahwa perencanaan yang baik harus mendasarkan pada data yang valid (*evidence based*). Perencanaan pembangunan daerah bukanlah persoalan yang sederhana untuk disusun, mengingat perencanaan pembangunan memiliki banyak aspek yang harus dikaitkan. Hal ini mengingat Provinsi sebagai bagian dari wilayah negara tidak pernah lepas dari target pembangunan nasional secara keseluruhan. Demikian pula keberhasilan pembangunan nasional, tidak akan pernah lepas dari keberhasilan pembangunan daerah baik Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengkonsolidasikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target dalam RPJMN mutlak harus diintegrasikan dalam target pembangunan daerah, guna menopang ketercapaian target nasional. Agenda-agenda besar sebagai prioritas pembangunan seperti Pengembangan Sektor Unggulan, Pengembangan Kawasan Strategis, Pengembangan Kawasan Perkotaan, Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah tertinggal, dan Kawasan Perbatasan, Pentaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah, harus diintegrasikan dalam target pembangunan daerah. Termasuk dalam agenda besar ini adalah target pencapaian untuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka.

Pada sisi lain, perencanaan pembangunan daerah dituntut pula untuk mampu mengkonsolidasikan semua proses yang melatarbelakangi di daerah, yaitu memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas. Dengan memadukan semua pendekatan tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah ibarat pepatah “sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui”. Sekali membuat perencanaan pembangunan, maka agenda besar nasional dan daerah mampu dipadupadankan dalam sebuah perencanaan yang baik. Demikian pula dengan dukungan politis dari lembaga DPRD, akan semakin menguatkan kualitas perencanaan yang dibuat. Untuk itulah maka penting untuk seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah dan DPRD DIY mempedomani Pasal 207 UU 23/2014, “Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar”. Pola ini menuntut sinergitas antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penguatan perencanaan juga dilalui dengan langkah peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sampai pada level dibawah kelurahan, seperti pedukuhan, kampung, RW dan RT.

Tata pemerintahan saat ini mengharuskan integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal tersebut selaras dengan mandat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga Permendagri Nomor 8 dan Nomor 58 Tahun 2014 yang berkaitan dengan SIPD. Untuk itu menjadi penting kesesuaian menu program kegiatan yang ada dalam SIPD sebagai bagian dari proses perencanaan Pemerintah Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Sinergi dari proses perencanaan pembangunan ini menjadi sangat penting berkaitan dengan pendalaman sistem

dan proses perencanaan pembangunan di DIY. Perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas - bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) perlu untuk diwujudkan secara terukur dalam menindaklanjuti Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY. Selain perencanaan dan menu program, bagian lain yang tidak kalah penting ialah proses alur pemberkasan yang menjadi syarat program tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Alur pemberkasan hendaknya lebih efektif dan efisien agar tidak mengalami hambatan dalam proses perjalanan perencanaan sampai dengan penuangan dalam APBD. Salah satu pilihan misalnya dengan menggunakan sistem yang berbasis teknologi dalam mekanisme perberkasannya. Oleh karenanya pemberkasan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien bagi masyarakat di dalam mengakses program kegiatan pemerintah daerah.

Dalam kaitan efektifitas dan efisiensi akses masyarakat terhadap kebijakan publik, Pemerintah Daerah hendaknya memberikan informasi terkait dengan daftar program dan kegiatan pembangunan kepada DPRD DIY. Komunikasi ini dimaksudkan agar tersedia ruang yang cukup luas untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat. Hal ini mengingat program dan kegiatan sebagaimana menu yang tersaji dalam SIPD masih cukup terbatas. Sebagai contoh program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Secara umum kita ketahui bersama bahwa anggaran pendidikan adalah sebesar 20% dari APBD DIY. Proporsi anggaran tersebut tentu menunjukkan jumlah yang cukup besar untuk mendesain program dan kegiatan. Namun sajian menu yang muncul dalam SIPD, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui DPRD DIY hanya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Beasiswa Pendidikan bagi yang kurang mampu.

DPRD DIY juga terus mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk terus melibatkan Perguruan Tinggi, negeri maupun swasta serta masyarakat, agar dampak program kegiatan pembangunan lebih terukur dan berkelanjutan. Diperlukan alat ukur yang mampu melihat capaian target kinerja program kegiatan pembangunan daerah: *output*, *outcome* dan *impact* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menjadi tugas para akademisi maupun perguruan tinggi untuk melakukan kajian yang mendalam atas dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan/program kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Dalam pembicaraan umum, maka langkah ini dikenal dengan pendekatan audit sosial. Pemikiran lain yang perlu untuk dikembangkan pada saat sekarang ini adalah tolok ukur kinerja yang menyasar sampai dengan tingkat kalurahan. Pemikiran ini merupakan langkah terobosan, oleh karena jika berbasis pada level Kabupaten/Kota saja, maka

penilaian keberhasilan masih pada level makro. Dengan pengukuran yang semakin detail sampai dengan tingkat terbawah, maka akan memberikan jaminan keberhasilan pembangunan yang lebih besar.

4.3.2.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan

Persoalan kebijakan pembangunan di DIY masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (rasio gini) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ketiga isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesaikannya ketiga tema persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.

Perubahan tata pemerintahan yang harus menyesuaikan dengan visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2017-2022, dengan Tema Menyongsong abad samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Pengembangan tata pemerintahan hendaknya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembangunan dan perubahan kultur masyarakat terbuka dan aksesibel terhadap informasi teknologi. DIY menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri 4.0 di Indonesia, dimana tidak hanya mampu mengimplementasikan tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP- TIK) tahun 2020 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Pemda DIY mengembangkan *Jogja Smart Province* (JSP), dengan lima dimensi yaitu: *Smart Society* (kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi), *smart living* (mobilitas, pariwisata), *smart environment* (kewilayahan, lingkungan), *smart culture* (budaya), dan *smart governance* (tata kelola pemerintahan). Dalam mengukur *good governance* ada beberapa hal yang menjadi acuan, antara lain adalah Akuntabilitas dan Transparansi. Untuk akuntabilitas ada dua hal yakni keuangan dan Tata Kelola - Kinerja, sedangkan transparansi adalah fasilitasi akses informasi pembangunan ke masyarakat dan

respon Pemda atas keluhan masyarakat. Akuntabilitas Keuangan Pemda DIY telah menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Pemda DIY telah terlaksana dengan sangat baik.

Akuntabilitas Tata Kelola dan Kinerja Pemda DIY juga bisa dilihat dari banyaknya Penghargaan atas karya dan kreatifitas berupa pelayan inovatif yang telah diraih pada masa RPJMD 2017-2022, antara lain: meraih berbagai Penghargaan antara lain: Menjadi Provinsi Terbaik, *The Asian Post* Anugerahi Delapan Penghargaan Untuk DIY, Gubernur DIY dan Pemda DIY Raih Penghargaan Top IT Telco 2018, DIY menerima Penghargaan Anugerah Kearsipan dengan nilai 'sangat baik 2019, Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019, Pemda DIY Raih Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019, Pemda DIY Raih Penghargaan Atas Praktik Baik Reformasi Birokrasi 2020. Selain itu, Transparansi atau keterbukaan informasi pembangunan yang bisa diakses masyarakat dan respon Pemda atas keluhan masyarakat juga dapat kita lihat dari penghargaan yang diraih, antara lain: Pemda DIY Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Pemda DIY Raih Penghargaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019.

4.3.2.2.1 Penunjang Urusan

Identifikasi Masalah:

1. Belum maksimalnya layanan publik;
2. Kebijakan daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan daerah.

Rekomendasi Kebijakannya meliputi:

1. Meningkatkan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
3. Review Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Evaluasi organisasi perangkat daerah;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran penunjang pelayanan urusan pemerintahan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4.3.2.2.2 Administrasi dan Pencatatan Sipil

Identifikasi Masalah:

1. Database kependudukan sangat penting juga untuk pelayanan lainnya yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan, khususnya

- berkaitan dengan fungsi KTP untuk kelengkapan urusan- urusan administrasi di sektor lainnya;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;
 3. Sistem pelayanan kependudukan yang belum memadai;
 4. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
 5. Database kependudukan belum akurat.

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu memperbaiki sistem tata kelola administrasi kependudukan, khususnya membuat data tunggal yang terintegrasi dalam satu sistem informasi kependudukan. Arah kebijakan berikutnya adalah penggunaan data base kependudukan dengan model kebijakan satu data menggunakan acuan penggunaan dan pemanfaatan data berbasis E-KTP.
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Membuat data base tunggal yang terintegrasi dan akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
4. Sosialisasi data base tunggal dengan Organisasi Perangkat Daerah baik tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota.
5. Untuk payung hukum seyogyanya membuat Perda tentang data tunggal yang terintegrasi.
6. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
7. Pengembangan system informasi kependudukan tingkat kalurahan atau desa.

4.3.2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Identifikasi Masalah:

1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum optimal
3. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa
4. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa
5. Belum terencananya program pembangunan di desa secara baik

6. Kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa
7. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
8. Masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa
9. Belum tertibnya administrasi desa, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha.

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat.
2. Mendesain Rencana Induk pengembangan Desa melalui lembaga desa dan Bumdes.
3. Sinergitas Program kegiatan lintas instansi di Desa agar memudahkan dalam mengukur, menilai dan keberlanjutan.
4. Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan.
5. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa.
6. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
7. Pengawasan implementasi Undang-Undang desa secara sistematis.
8. Memperkuat pemerintahan desa dengan sistem data base terintegrasi (sistem informasi desa) secara keseluruhan pada tingkat kabupaten;
9. Pengembangan Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bergotong royong.

4.3.2.2.4 Komunikasi dan Informatika

Identifikasi Masalah:

1. Berita HOAKS
2. Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga layanan yang disediakan tidak maksimal
3. Belum ada integrasi informasi dari Kabupaten/ Kota dengan Provinsi dalam Jogja Smart Province (JSP)
4. Penggunaan teknologi informasi belum maksimal.
5. Inovasi penggunaan teknologi informasi belum maksimal

6. Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Sosialisasi tentang berita Hoaks dan aplikasi layanan masyarakat Pemda DIY.
2. Membuat aplikasi layanan masyarakat yang terintegrasi dengan Kab/Kota.
3. Membuat payung hukum terkait layanan terintegrasi dengan Kabupaten/Kota.
4. Kerjasama/ Sinergitas kegiatan dengan Kabupaten/Kota.
5. Peningkatan Jogja Smart Province/JSP.
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
7. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) e- government.
8. Membangun jejaring komunikasi dan informasi sampai ke desa, bahkan dusun.
9. Pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan produktifitas birokrasi dan masyarakat.
10. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui media Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
11. Peningkatan Jaringan Internet Gratis.
12. Pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi (internet sehat).

4.3.2.2.5 Penanganan Bencana

Identifikasi Masalah:

1. Potensi bencana alam yang tinggi.
2. Banyak wilayah berada di kawasan rawan bencana
3. Integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis belum optimal

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Melatih masyarakat Kalurahan tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana secara mandiri.
2. Membangun jaringan organisasi yang bergerak dalam kebencanaan seperti PMI, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, partai politik, secara terstruktur dan berjenjang agar

- memudahkan komunikasi dan informasi dalam penanganan bencana.
3. Peningkatan kapasitas SDM relawan.
 4. Membuat Peta Rawan bencana berbasis dusun/kampung.
 5. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung di dusun/kampung.
 6. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat desa.
 7. Fasilitasi kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar.
 8. Mendorong pengetahuan dan penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat secara luas.
 9. Peningkatan kerjasama semua pemangku kepentingan dan integrasi kegiatan.
 10. Fasilitasi Early Warning System untuk sungai, tanah longsor, gunung merapi, tsunami
 11. Fasilitasi sarana penunjang bencana alam/jalur evakuasi sampai di tingkat desa
 12. Pembuatan alat tangguh bencana yang ditujukan untuk kaum disabilitas berbasis kecamatan.

4.3.2.2.6 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi Masalah:

1. Kenakalan remaja
2. Penyalahgunaan NAPZA
3. Belum optimalnya pemahaman tentang Pancasila dan implementasinya di sebagian masyarakat
4. Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama maupun sebab lainnya;
5. Kesadaran dan budaya hukum belum optimal
6. Peningkatan ancaman penyalahgunaan narkoba
7. Penegakan hukum belum optimal
8. Mulai lunturnya semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat
9. Pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara
10. Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda (usia sekolah)

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Membangun jaringan gerakan masyarakat Sopo Aruh Bocah
2. untuk mengurangi angka kenakalan remaja.
3. Membangun jaringan gerakan masyarakat dalam mengurangi penyalahgunaan napza.
4. Pembudayaan Pancasila melalui sosialisasi dan kampanye serta Melihat langsung penerapan dimasyarakat melalui Srawung Deso.
5. Meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat.
6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.
7. Peningkatan sarana dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat tinggal masing-masing.
8. Penegakan peraturan daerah dalam mendukung kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Pendidikan mental pada generasi muda untuk pengurangan tindak kejahatan.
10. Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir tindak kejahatan.

4.3.2.3 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian

4.3.2.3.1 Urusan Pangan

Identifikasi Masalah:

1. Rendahnya perhatian aspek ketahanan pangan selama pandemi.
2. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, karena masih bertumpu pada beras dan/ terigu.
3. Masih terdapat 4 (empat) desa rawan pangan di DIY.
4. Masih rendahnya pengawasan pangan yang beredar di pasaran.
5. Belum terjadi sinergi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan di DIY.
6. Panjangnya rantai distribusi pangan di DIY.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan di DIY khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Rekomendasi Kebijakannya:

1. Pemda DIY melakukan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan sosialisasi, advokasi, dan promosi yang terus menerus, sampai ke tingkat RT dan menyasar lembaga pendidikan dasar dan menengah tentang pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan

- pelaku usaha tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan halal.
2. Pemda DIY mengoptimalkan program pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat.
 3. Pemda DIY bersungguh-sungguh dalam melakukan optimalisasi program pengentasan 4 (empat) Desa Rawan Pangan pada tahun 2023. Adanya Desa Rawan Pangan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Penyelesaian terhadap berbagai penyebab di atas harus segera dilakukan secara tuntas, dan mestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Mereka yang masih tergolong miskin dan rentan hendaknya dapat diberi perhatian khusus dengan mengalokasikan cadangan pangan yang tersedia sehingga angka kemiskinan dapat ditekan untuk tidak berada pada level di atas angka kemiskinan nasional. Selain itu, perlu mendorong dana desa untuk pengentasan desa rawan pangan yang ada di DIY.
 4. Pemda DIY perlu mengoptimalkan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dengan semakin memperluas wilayah pengawasan produksi dan peredaran pangan. Masih banyak produksi pangan yang beredar di masyarakat yang tidak terjamin mutu dan keamanannya.
 5. Perlunya sebuah peraturan yang bersifat teknis tentang keamanan pangan yang lebih luas, yaitu Pergub tentang Penyimpanan Pangan Segar Asal Tanaman yang merupakan salah satu dari mandat Perda No. 2/2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT).
 6. Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai salah satu prioritas program urusan pangan.
 7. Perlunya regulasi dalam tata kelola distribusi pangan di DIY
 8. Memperkuat sinergi antar OPD di DIY serta pemerintah kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan.
 9. Pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

4.3.2.3.2 Urusan Kelautan Perikanan

Identifikasi Masalah:

1. Rendahnya budaya bahari di masyarakat DIY karena sejatinya masyarakat DIY adalah petani bukan nelayan
2. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang karena adanya kesalahan desain pembangunan.
3. Adanya gap produksi perikanan budidaya dan perikanan ikan tangkap di DIY.
4. Keterbatasan SDM kelautan dan perikanan.
5. Tingginya biaya operasional kegiatan kelautan.
6. Belum adanya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan.

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Pemberikan insentif dan kemudahan-kemudahan kepada nelayan DIY dalam melakukan kegiatan kelautan sehingga dapat memberikan kesejahteraan nelayan yang pada akhirnya menarik minat masyarakat DIY untuk bekerja di sektor kelautan.
2. Optimalisasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pembudidaya ikan dan nelayan untuk menjadi nelayan yang modern.
3. Pelatihan pembuatan pakan ikan dengan bahan lokal lebih dioptimalkan, penyediaan bibit ikan yang bagus oleh OPD terkait
4. Kemudahan akses dan insentif bahan bakar bersubsidi bagi nelayan.
5. Menghentikan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto atau melanjutkan pembangunan dengan melakukan perencanaan objektif redesign Tanjung Adikarto agar dapat difungsikan sebagai pelabuhan untuk kapal besar.
6. Mengoptimalkan kapasitas pelabuhan perikanan Pantai Sadeng.
7. Optimalisasi potensi perikanan budidaya termasuk revitalisasi dan penambahan areal tambak udang di wilayah pesisir.
8. Pemanfaatan teknologi tangkapan ikan.
9. Perlunya regulasi dan payung hukum bagi nelayan, pembudidaya ikan agar kesejahterannya meningkat.

4.3.2.3.3 Urusan Pertanian

Identifikasi Masalah:

1. Masih tingginya alih fungsi lahan

2. Rendahnya kesejahteraan petani
3. Masih rendahnya SDM pertanian
4. Banyaknya permasalahan pengembangan ternak dari hulu ke hilir
5. Rendahnya minat generasi muda (generasi milineal) untuk terjun pada kegiatan pertanian
6. Tata kelola dan distribusi subsidi pupuk yang mengalami banyak kendala di lapangan, ang sangat merugikan petani baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pupuk
7. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk kegiatan pertanian

Rekomendasi Kebijakannya

1. Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur dan jelas target dan sasarannya, sehingga petani DIY sejahtera.
2. Perlunya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milineal perlu dirancang dengan memperhatikan target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain.
3. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan Kabupaten terkait dengan Pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.
4. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
5. Pemda DIY lebih mendorong pelatihan, fasilitasi petani untuk melakukan inovasi pada nilai tambah produk olahan hasil pertanian.
6. Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi peningkatan pengembangan populasi ternak dari hulu ke hilir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DIY.
7. Perlunya diatur tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif dan efisien.
8. Pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien.

9. Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian.

4.3.2.3.4 Urusan Kehutanan

Identifikasi Masalah:

1. Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan karena peningkatan produk kayu primer yang dihasilkan pada tahun 2020.
2. Berkurangnya area hutan konservasi.
3. Minimnya SDM pengelola hutan rakyat.
4. Belum optimalnya penggunaan dana keistimewaan untuk sektor kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kehutanan.

Rekomendasi Kebijakannya:

1. Banyak produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu disegera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).
2. Membangun dan memperluas area konservasi hutan.
3. Pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelebagaan hutan rakyat, selalu mempunyai perpektif untuk menjaga lingkungan, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.
4. Rehabilitasi lahan krisis perlu menjadi prioritas penanganan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat kehutanan di DIY.

4.3.2.3.5 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi Masalah:

1. Dalam masa Pandemi Covid-19 selama tahun 2020, 2021 sektor usaha Koperasi dan UMKM yang ikut terpengaruh karena dampak ekonomi yang berimbas pada koperasi dan UMKM di DIY. Koperasi mengalami masalah dalam sisi likuditas karena anggota mengalami kesulitan keuangan yang mempengaruhi penundaan angsuran, sementara anggota koperasi lain mengambil tabungan untuk keperluan kebutuhan dalam masa pandemic Covid-19. Untuk itu harus dilakukan usaha untuk penyelamatan dan penyehatan koperasi dan UMKM di DIY.
2. Koperasi tidak aktif, perlu dilakukan pembinaan dan peningkatkan peringkat koperasi. Pembinaan harus dilakukan meliputi aspek

kelembagaan, usaha koperasi, keuangan, permodalan dan manajemen koperasi. Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY penguatan masih harus terus dilakukan ditengah gempuran produk UMKM dari luar yang membanjiri pasaran Indonesia dan DIY, dan perkembangan revolusi industry 4.0 yang mengarah pada digitalisasi.

3. Jumlah usaha skala besar semakin sedikit dikarenakan kualitas SDM yang masih rendah, jaringan pemasaran yang kurang luas serta ketersediaan faktor produksi yang masih terbatas seperti modal dan ketersediaan bahan baku.
4. Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru (WUB) perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan WUB menjadi hal penting karena dapat mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja baru dan menaikkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun pertumbuhan WUB perlu ditingkatkan lagi karena rasionya masih sangat kecil.

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal.
2. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.
3. Para pengelola koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya agar mampu bersaing dan dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
4. Pertumbuhan Wirausaha baru harus ditingkatkan terutama dari kalangan muda harus ditingkatkan jumlahnya serta kapasitas usahanya.
5. Mendorong koperasi dan UMKM untuk bisa terlibat dalam program Industri Kreatif seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Dukungan informasi teknologi pemasaran menjadi penting untuk bisa digunakan dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
6. Peningkatan sistem pembinaan SIBAKUL bagi Koperasi dan UMKM sehingga memiliki ketepatan pembinaan, efektif dan bedaya guna.
7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada generasi muda melalui incubator bisnis.
8. Peningkat jumlah program pendampingan perijinan UMKM
9. Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif,

Koperasi, dan Usaha Kecil, agar ditingkatkan jumlah dan sasaran, dan merata se-DIY.

4.3.2.3.6 Urusan Penanaman Modal

Identifikasi Masalah

1. Belum meratanya penanaman modal di DIY
2. Perijinan yang perlu disederhanakan
3. Perlu diciptakan usaha mudah, cepat, dan nyaman di DIY
4. Ketergantungan DIY pada investor yang meningkatkan PDRB
5. Bandara YIA perlu dioptimalkan untuk daya dukung penanaman modal di DIY

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Penyusunan rencana induk penanaman modal yang berbasis pada keunggulan potensi lokal
2. Pembangunan infrastruktur penanaman modal yang merata terutama di daerah pesisir selatan.
3. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga memudahkan dan menyederhanakan perizinan, murah, serta tidak ada tumpang tindih antar instansi.
4. Peningkatan program kemudahan berusaha di DIY, agar investor merasa nyaman dan mudah investasi di DIY
5. Optimalisasi potensi NYIA dalam menarik investor ke DIY

4.3.2.3.7 Urusan Pariwisata

Identifikasi Masalah:

1. Jumlah wisatawan menurun akibat wabah Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021
2. Pengeluaran wisatawan yang masih sedang
3. Visi DIY sebagai tempat wisata terkemuka di DIY harus direalisasikan
4. Perlu penumbuhan tempat wisata baru
5. Perlu kemudahan transportasi menuju obyek wisata
6. Pengelola obyek wisata yang baru butuh pembinaan

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. Perlunya pengembangan wisata destinasi baru sebagai daya tarik wisata. Pengembangan kepariwisataan di DIY semestinya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi

baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi yang berkelas dunia untuk menciptakan keunikan dan keunggulan.

2. Wisata yang aman dimasa pandemi Covid-19 perlu menjadi promosi bagi Dinas Pariwisata dan pelaku wisata dan pengelola obyek wisata.
3. Perlunya promosi untuk mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan asing
4. Perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.
5. Penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.
6. Pengembangan pariwisata juga mengedepankan aspek pemberdayaan berbasis komunitas salah satunya adalah dengan pendekatan berbasis desa wisata. Pengembangan desa wisata disamping sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal juga diharapkan dapat mendorong pelestarian lingkungan dan tradisi budaya lokal.
7. Penggunaan Dana Keistimewaan untuk menunjang pariwisata di DIY melalui desa wisata.
8. Perlu dukungan jalur bus menuju obyek wisata yang sudah ada dan obyek wisata yang baru, dan memiliki daya tarik wisatawan.

4.3.2.3.8 Urusan Perdagangan

Identifikasi masalah:

1. Ekspor produk DIY yang masih terbatas
2. Jenis produk eksport DIY yang masih terbatas
3. Jumlah pasar modern di DIY bertambah pesat sementara pasar tradisional stagnan
4. Banyak toko jejaring di DIY
5. Pelaku UMKM yang melakukan ekspor kesulitan produksi menunggu modal dari pembayaran *buyer* luar negeri

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Peningkatan ekspor komoditas DIY harus terus ditingkatkan, pendampingan dari Pemerintah Daerah DIY terhadap pelaku ekspor

- dalam masa pandemic wabah Covid-19 dan paska pandemi harus tingkatkan.
2. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.
 3. Persaingan usaha sektor perdagangan ini sangat kompetitif apabila tidak dikelola dengan baik akan memarjinalisasi pelaku usaha kecil, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut mampu melindungi pelaku usaha kecil ini.
 4. Perkembangan toko modern dan berjejaring DIY harus dipantau jangan sampai mematikan usaha dan mematikan minat pengusaha baru dibidang perdagangan yang didominasi toko jejaring.
 5. Perlu dukungan permodalan bagi UMKM yang melakukan ekspor agar bisa produksi kembali.

4.3.2.3.9 Urusan Perindustrian

Identifikasi Masalah:

1. Industri di DIY banyak terdiri IKM kecil
2. Perlu pendampingan penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi UMKM/IKM
3. Perlu peningkatan industri pengolahan
4. Kesulitan bahan baku bagi IKM
5. Pendampingan pemodal untuk IKM
6. Pemasaran produk IKM perlu diperluas

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya.
2. Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa diharapkan dapat membuka peluang industri pengolahan berbasis keistimewaan seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY.
3. Dukungan komunitas intelektual di DIY diharapkan akan membuka peluang inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif.

4. Permasalahan bahan baku industri IKM karena keterbatasan sumber daya alam DIY harus bisa diatasi dengan fasilitasi Pemerintah Daerah DIY dengan memetakan kebutuhan dan sumber bahan baku bisa diperoleh.
5. Dukungan akses permodalan untuk penguatan IKM dan pendampingan pemasaran IKM.

4.3.2.4 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Pembangunan

4.3.2.4.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian yang cukup serius dari Pemerintah DIY. Pembangunan inklusif yang menjadi jargon pola pembangunan kekinian harus menjadi tujuan utama pembangunan di mana semua warga masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pembangunan daerah. Namun, sering kali hak-hak penyandang difabel/disabilitas belum mampu terpenuhi sebagaimana seharusnya. Permasalahan yang sering kali masih terjadi/dijumpai di lapangan antara lain:

1. Banyak fasilitas umum yang belum akses terhadap penyandang disabilitas.
2. Berdasarkan mandat Perda DIY 2/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Tahun 2022 merupakan tahun aksesibilitas fasilitas umum terhadap penyandang disabilitas.
3. Adanya pembahasan terhadap perubahan/revisi Perda DIY 2/2012.

Guna memenuhi apa yang menjadi hak bagi penyandang difabel/disabilitas, maka DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah DIY untuk:

1. Prioritas pembangunan infrastruktur di DIY harus selalu berperspektif pemenuhan hak difabel/disabilitas.
2. Mengintegrasikan pemenuhan aksesibilitas sebagaimana mandat Perda DIY Nomor 2 Tahun 2012 yang saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Perda Disabilitas tersebut.

4.3.2.4.1.1 Sanitasi

Identifikasi Masalah:

1. Walaupun pada tahun 2020 capaian akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak sudah mencapai target yang ditetapkan dan merupakan angka

tertinggi secara nasional dibandingkan provinsi yang lain namun baru mencapai angka 96,46% sehingga belum mencapai target 100% penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program pembangunan daerah.

2. Masih terdapat sumbatan pada sistem drainase di beberapa jalan dan terjadi luapan pada saat musim hujan menunjukkan lemahnya perawatan dan pemeliharaan sistem drainase sehingga tidak adanya langkah antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Sumbatan drainase dapat disebabkan oleh masuknya air limbah rumah tangga kedalam Saluran Air Hujan dan terkadang juga dapat disebabkan oleh limbah dari pedagang kaki lima
3. Tidak tercapainya nilai IKA pada tahun 2020 karena tingginya kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari limbah domestik. Hal ini menunjukkan pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Meningkatkan capaian penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak hingga ke angka 100% sehingga kedepan program pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan sanitasi dan sistem pemeliharaan yang baik.
2. Perlu ditingkatkan program edukasi melalui sosialisasi dan pendampingan yang massif ke masyarakat bahwa Sanitasi, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga, Sampah dan sistem Drainase merupakan hal penting yang sangat terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama di kawasan pemukiman yang apabila lalai dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat menyebabkan pencemaran dan penyebab wabah penyakit.
3. Perlu dilakukan evaluasi sistem drainase berikut langkah pemeliharannya secara menyeluruh dan periodik guna melakukan upaya deteksi dini potensi timbulnya dampak negatif yang lebih besar dalam penurunan kualitas lingkungan hidup.

4.3.2.4.1.2 Air Minum

Identifikasi Masalah:

1. Masih terdapat kesenjangan akses terhadap air bersih seperti misalnya masih terdapat wilayah yang kesulitan mendapatkan sumber air bersih

khususnya pada saat musim kemarau seperti di Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo.

2. Pemenuhan cadangan air baku dengan pembangunan wana desa dan embung desa belum maksimal.
3. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
4. Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan sebagai wilayah tangkapan air dan konsesrvasi air.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Perlu adanya upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih hingga mencapai 100%.
2. Pembangunan sumur bor dalam di daerah-daerah sulit air yang jauh dari sumber air dan sumur bor skala yang lebih kecil di daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan pipanisasi.
3. Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi terkait upaya untuk memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih melalui kolam penampungan dan lain sebagainya.
4. Pembangunan wanadesa dan embung desa sebagai cadangan air baku.
5. Perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan daerah reklamasi pasca tambang menjadi Embung seperti misal di Lereng Merapi untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah.
6. Percepatan operasional pengelolaan SPAM Bendungan Kamijoro oleh PDAM Tirtatama untuk mendorong kemandirian pengelolaan air minum.
7. Pembangunan taman-taman sebagai ruang terbuka hijau guna memperluas daerah tangkapan air dan konservasi air.

4.3.2.4.1.3 Irigasi

Identifikasi Masalah:

1. Beberapa areal lahan pertanian masih belum terjangkau oleh layanan irigasi. Kerusakan bangunan irigasi juga terjadi di banyak lokasi dan rehabilitasinya dinilai kurang cepat.
2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak berjalan optimal bahkan terdapat yang sudah mati suri. Banyak faktor yang diperkirakan menjadi penyebabnya diantaranya adalah kualitas SDM, finansial, kurangnya dukungan pemerintah setempat, minimnya tokoh penggerak, dan lainnya.

3. Adanya potensi konflik yang terjadi antara petani di daerah hulu dan hilir serta antara petani dengan pembudidaya ikan.
4. Saat ini tenaga operasional irigasi masih kurang dari kebutuhan. Tenaga operasional irigasi harus selalu siap setiap saat.
5. Irigasi yang merupakan pendukung utama pertanian perlu diintegrasikan dengan pendekatan kebudayaan. Karena pengelolaan pertanian berbasis tradisi masyarakat agraris sudah berjalan, dana keistimewaan bisa dialokasikan dalam penataan irigasi di DIY.

Rekomendasi kebijakannya adalah

1. Perlu upaya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.
2. Perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga operasional irigasi.
3. Perlu Penguatan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan pelibatan Pembudidaya Ikan sebagai langkahantisipasi terjadinya konflik – konflik di kalangan pengguna air yang sering terjadi terkait dengan jumlah debit yang kadang kurang mencukupi.
4. Pembangunan sistem Irigasi melalui pendekatan kebudayaan guna mengintegrasikan dengan konsepsi Keistimewaan DIY yang memiliki kesejarahan sebagai wilayah agraris dengan penopang sektor pertanian berbasis tradisi.
5. Pengalokasian Dana keistimewaan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan sistem dan infrastruktur irigasi di DIY.

4.3.2.4.1.4 Aksesibilitas Jalan

Identifikasi Masalah:

1. Dengan panjang jaringan jalan Nasional sepanjang 247,91 km dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 km (SK Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi), maka perlu dilakukan pengembangan fungsi jalan dan selalu mempertahankan status jalan provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan - Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.
2. Selain pembangunan jalan, aspek yang tak kalah penting adalah pemeliharaan fungsi jalan yang mengalami kerusakan yang dapat mengganggu akses masyarakat atas jalan tersebut yang terkadang dapat menimbulkan kecelakaan.

3. Banyak jalan tambang yang rusak karena adanya kegiatan penambangan

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Perlu menjadi perhatian masalah konektivitas antar daerah - daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif namun terkendala masalah jalan seperti daerah sentra pertanian, daerah tujuan wisata dan juga wilayah perbatasan. Dengan munculnya ikon-ikon pariwisata yang baru bermunculan masih terkendala dengan luasan dan kualitas jalan yang menimbulkan kemacetan seperti di daerah gunungkidul dan daerah lainnya.
2. Perlu diperhatikan koordinasi pembangunan atau peningkatan kualitas jalan menuju destinasi pedesaan dengan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.
3. Perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan dukungan pendanaan dengan Dana Keistimewaan bagi pembangunan dan pemeliharaan jalan menuju destinasi-destinasi wisata lokal di pedesaan terutama yang masih terkait dengan sejarah dan budaya Yogyakarta.
4. Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota perlu membuat sistem pemeliharaan jalan terpadu yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (*fast response*) dan didukung oleh teknologi informasi dan media sosial.
5. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana jalan seperti penerangan jalan umum, rambu-rambu dan marka jalan.
6. Perlunya penegakan fungsi jalan dan rumah milik jalan secara persuasif kepada masyarakat dengan cara melakukan edukasi secara terus menerus tentang fungsi jalan ruang milik jalan.
7. Adanya regulasi yang mengatur tanggungjawab perusahaan dalam kegiatan penambangan untuk tanggungjawab sosial.

4.3.2.4.1.5 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Identifikasi Masalah:

1. Pada tahun 2020 telah dilakukan sertifikasi terhadap 30 orang tenaga ahli konstruksi dari target 300 orang dikarenakan keterbatasan pertemuan saat pandemi. Adapun layanan penerapan sistem informasi jasa konstruksi telah di akses sejumlah 444.268 orang dari target 419.360 orang melalui website klinik konstruksi, dan akses informasi di media sosial youtube; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI yang tercapai 70%.

2. Sebagai konsekuensi ketentuan dari regulasi yang ada tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melibatkan Penyelenggara Jasa Konstruksi di seluruh Indonesia sehingga terkesan meminggirkan partisipasi Penyelenggara Konstruksi Lokal.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintah DIY terhadap pelaku jasa konstruksi perlu ditingkatkan dan perlu dipertimbangkan untuk melibatkan publik dalam memberikan informasi yang terverifikasi atas profesionalitas pelaku jasa konstruksi sehingga dapat meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berdampak pada peningkatan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.
2. Perlu dicarikan solusi alternatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberdayakan penyelenggara jasa konstruksi lokal dalam partisipasinya terhadap pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta

4.3.2.4.1.6 Penataan Ruang

Identifikasi Masalah:

1. Kesenjangan wilayah terutama di daerah perbatasan dan daerah semi terisolir perlu mendapat perhatian.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan zonasi belum tersosialisasi dengan baik.
3. Perlu integrasi dengan kawasan – kawasan strategis Keistimewaan dengan RTRW Daerah.
4. Penegakan perda berkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan perlu dikuatkan.
5. Masih minimnya partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang dan wilayah

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Perlu peningkatan konsistensi dalam implementasi RTRW, dan sosialisasi yang masif ke masyarakat luas tentang pentingnya RTRW Provinsi dan Penataan Ruang Strategis Keistimewaan bagi pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.
2. Perlu evaluasi secara partisipatif terhadap bangunan dan gedung sehingga dapat lebih mencerminkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah perlu meningkatkan ruang terbuka hijau.

4.3.2.4.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Identifikasi Masalah:

1. Jumlah penduduk yang menempati tempat tinggal layak mencapai 97,37% pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2023 ke depan diharapkan sudah dapat tuntas di angka 100%.
2. Penuntasan permasalahan penduduk yang masih menempati tempat tinggal tidak layak huni tersebut dapat dicapai dengan mensinergikan program dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis data yang sama.
3. Perlu dipertimbangkan untuk penataan kawasan pemukiman ditinjau dari aspek budaya yang dapat menjadi potensi objek pariwisata tersendiri.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Program Bantuan bagi masyarakat yang masih memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada pada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota disinergikan pelaksanaannya dan menggunakan basis data yang sama sehingga target penuntasan jumlah penduduk yang memiliki tempat tinggal layak dapat mencapai angka 100% dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan program tersebut.
2. Melakukan evaluasi, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Bercirikan Khas Daerah Istimewa Yogyakarta agar harapan dan cita-cita masyarakat Yogyakarta untuk Hamemayu Hayuning Bawana untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta tercermin dalam arsitektur bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan.
3. Dalam melakukan penataan kawasan pemukiman perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek selain aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal juga memperhatikan aspek estetika sehingga dapat menjadi potensi pariwisata tersendiri dengan pendekatan budaya.
4. Penataan kawasan pemukiman baru sebagai konsekuensi dari perkembangan masyarakat akibat pembangunan perlu disinergikan dengan Visi Misi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara.

4.3.2.4.3 Urusan Perhubungan

Identifikasi Masalah:

1. Saat ini di sebagian wilayah DIY telah terjadi kemacetan lalu lintas terutama di wilayah perkotaan dan akses jalan menuju objek wisata seperti Malioboro, Kaliurang, dan Gunungkidul terutama ketika pada saat hari libur.
2. Keberadaan transportasi massal hanya berada di wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya.
3. Pembangunan infrastruktur jalan dan rekayasa lalu lintas belum dapat optimal mengurai kemacetan lalu lintas.
4. Hampir di sepanjang ruas jalan, masih didapati '*on-street parking*' yang menimbulkan hambatan samping, sehingga mengakibatkan penyempitan aliran. Sementara itu upaya penambahan fasilitas '*off-street parking*', dalam bentuk kantong parkir belum optimal dikarenakan keterbatasan lahan.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Perlu dipertimbangkan potensi pembukaan jalan alternatif untuk mengakses objek wisata serta pembangunan transportasi massal menuju objek-objek wisata.
2. Restrukturisasi angkutan massal termasuk angkutan antar wilayah di DIY serta angkutan pedesaan guna mempermudah mobilitas masyarakat juga mempermudah akses masyarakat untuk jalur distribusi barang yang menjadi usaha dari masyarakat.
3. Sekolah, puskesmas, pasar, layanan administrasi penduduk dan fasilitas umum lainnya harus bisa diakses oleh kendaraan umum.
4. Sosialisasi penertiban parkir dan pembukaan kantong-kantong parkir baru di sekitar objek wisata yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal yang baik.
5. Pemerintah DIY perlu mempertimbangkan untuk menerapkan informasi ketersediaan tempat parkir melalui aplikasi di smartphone yang dapat memonitor ketersediaan tempat parkir secara *real time*.
6. Peningkatan upaya sosialisasi sejak dari perencanaan program-program Pemerintah DIY dalam melakukan rekayasa lalu lintas yang niscaya membutuhkan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan dari program tersebut.

4.3.2.4.4 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

4.3.2.4.4.1 Energi dan Kelistrikan

Identifikasi Masalah:

1. DIY adalah merupakan provinsi pengimpor energi karena tidak memiliki sumber daya energi berbasis fosil. DIY mendapatkan suplai dari luar provinsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi akhirnya (listrik, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas).
2. DIY baru berhasil membuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang sudah menjadi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah sehingga pada tataran implementasinya masih perlu ditingkatkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan urusan energi.
3. Potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY juga relatif terbatas.
4. Namun demikian, Rasio Elektrifikasi di DIY sudah mencapai 100% pada tahun 2021, yang berarti seluruh rumah tangga di DIY sudah teraliri listrik.
5. Kebutuhan listrik di DIY diperkirakan akan naik terutama untuk kebutuhan industri dan pariwisata sebagai dampak sudah beroperasinya Bandara YIA di Kulon Progo
6. Penerangan jalan masih bertumpu di jalan-jalan utama dan belum menyentuh secara optimal di daerah – daerah pedesaan, daerah semi terisolir dan daerah perbatasan.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah

1. Perlunya pemetaan kebutuhan listrik baik bagi konsumsi listrik rumah tangga baru maupun kebutuhan industri dan pariwisata.
2. Perlunya inovasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan kebutuhan listrik di DIY
3. Pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum di daerah- daerah pedesaan, daerah semi terisolir, dan perbatasan dan perlu dipertimbangkan menggunakan PJU tenaga surya yang merupakan salah satu inovasi energi baru terbarukan.

4.3.2.4.4.2 Sumber Daya Mineral

Identifikasi Masalah:

1. Kerusakan lingkungan akibat penambangan baik pasir maupun karst yang ada di Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo sudah semakin parah sehingga perlu diambil langkah-langkah tertentu.

2. Penertiban tambang pasir ilegal di lereng Merapi oleh Pemerintah DIY harus menjadi titik tolak evaluasi kondisi pertambangan di DIY berikut dengan langkah reklamasi paska tambang dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup.
3. Pemerintah telah menyediakan area-area yang diperbolehkan ditambang. Penambang juga harus mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Pemegang IUP pun harus dicek masa berlaku izinnya.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah

1. Evaluasi kondisi pertambangan di DIY berikut dengan langkah reklamasi paska tambang dan pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup.
2. Melakukan pencegahan sejak dini dengan memperketat perizinan usaha tambang termasuk pada aspek AMDAL dan Program Reklamasi Paska Tambang.
3. Dalam penegakan hukum pertambangan termasuk dalam penertiban tambang liar oleh masyarakat perlu dipertimbangkan untuk melakukan upaya persuasif dan potensi pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang, agar wilayah pertambangan tersebut selain bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur, juga bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tambang.
4. Pemerintah DIY perlu mengupayakan pelaksanaan Reklamasi Paska Tambang yang menjadi kewajiban dari Pemilik IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

4.3.2.4.5 Urusan Lingkungan Hidup

Identifikasi Masalah:

1. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor semakin membuat naiknya emisi karbon yang mengakibatkan turunnya kualitas udara di Yogyakarta.
2. Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan yang belum kunjung selesai menambah potensi bertambahnya permasalahan lingkungan hidup.
3. Tidak tercapainya nilai IKA pada tahun 2020 karena tingginya kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari limbah domestik. Hal ini menunjukkan pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah

1. Pemanfaatan transportasi massal untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan polusi udara.
2. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau secara massif.
3. Sosialisasi paradigma pengelolaan sampah secara partisipatif dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sejak dari sumber sampah (rumah tangga).
4. Segera menuntaskan solusi pengelolaan sampah di TPST Piyungan baik pembangunan lahan baru maupun pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.
5. Memperbanyak pembangunan TPS 3R skala kecil untuk memotong distribusi sampah ke TPA.
6. Pemanfaatan teknologi mutakhir untuk pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi sumber energi terbarukan dan juga pemanfaatan menjadi pupuk organik.
7. Pemerintah DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memperketat penerbitan ijin AMDAL untuk pendirian hotel, mall dan gedung-gedung lainnya yang dapat mengurangi penurunan fungsi air tanah dan mengurangi darah resapan air.

4.3.2.4.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Identifikasi Masalah:

1. Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat. Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk.
2. Masih kurangnya penerapan unsur nilai budaya dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di DIY.
3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dimaksudkan sebagai alat untuk mempermudah perencanaan pembangunan justru terkesan menambah rumit usulan program dari masyarakat karena baku dan tidak akomodatif terhadap kondisi realitas yang berkembang dalam proses perencanaan pembangunan.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat DIY.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era digital ini, perlu digunakan model-model sosialisasi yang adaptif dengan teknologi informasi dan media sosial.
3. Evaluasi pemanfaatan SIPD agar benar-benar berfungsi menjadi alat untuk mempermudah Perencanaan Pembangunan di Daerah.
4. Perlunya konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah DIY No. 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di wilayah DIY.

4.3.2.5 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Kesejahteraan

4.3.2.5.1 Urusan Pendidikan

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu ditingkatkan. Perlu upaya yang lebih keras dan tepat sasaran agar pemuda kita tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi kita. Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan dan permasalahan peningkatan kualitas urusan pendidikan di DIY sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Sekolah ramah anak;
5. Pendidikan berbasis budaya;
6. Pemantapan budaya adiluhung;
7. Antisipasi nilai-nilai budaya asing;
8. Banyak ijazah siswa yang masih ditahan sekolah terutama karena belum melunasi pembayaran sekolah terutama di sekolah SMK/SMA.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Kebijakan pembebasan penggunaan dana BOS, bagi siswa di SMA dan SMK.
2. Sinergivitas antara guru, orang tua, anak dan Lembaga Pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan jumlah beasiswa bagi warga DIY kurang mampu di sekolah dan yang kuliah di Perguruan Tinggi.

5. Meningkatkan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Pendidikan lainnya (GTT/PTT) untuk mendukung capaian kualitas peserta didik.
6. Perbaiki manajemen penerimaan peserta didik baru dengan system zonasi yang berkeadilan.
7. Fasilitasi dana pendidikan meliputi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya.
8. Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan sasaran wajib belajar 12 tahun.
9. Meningkatkan bantuan untuk pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya.
10. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah terutama sekolah
11. kejuruan untuk peningkatan akses lapangan kerja.
12. Perlu diberikan kebijakan dan solusi agar permasalahan penahanan ijazah ini selesai dan pihak sekolah tidak merasa dirugikan.
13. Pemerintah DIY harus lebih meningkatkan Program Pendidikan Inklusi dimana perlu langkah penegakkan kebijakan bahwa Sekolah Umum harus menjadi Sekolah Inklusi sebagai wujud keberpihakan pada kaum disabilitas.

4.3.2.5.2 Urusan Kesehatan

Identifikasi Masalah:

1. Belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama Rumah Sakit dan ketersediaan dokter spesialis.
2. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan dan perlunya pendampingan keluarga sehat.
3. Tantangan ke depan kebosanan melaksanakan protokol kesehatan semakin menurun
4. Mengupayakan RSUD/Puskesmas mempunyai elektronik rekam media.
5. Kondisi RSUD & Puskesmas, yang belum ramah terhadap lansia, anak-anak serta difabel/penyandang disabilitas.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Mengusulkan indikator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik indikator pembangunan, sarana dan prasarana dan tenaga medis.
2. Kapan masa pandemi akan berakhir kita belum tahu. Pelayanan melalui Protokol Kesehatan tetap dijaga, juga mempertimbangkan tenaga medis yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai hal.

3. Perlu diperhatikan tumbuh kembang, pendidikan anak di masa pandemi dan imunisasi anak serta pemberian tambahan makanan.
4. Perlu diperhatikan tumbuh kembang anak dan pendidikan anal mandiri di masa pandemi dan imunisasi anak, Pemberian makanan tambahan Meningkatkan layanan dasar kesehatan, berupa sarana Rumah Sakit dengan standard dan pemerataan tenaga medis (dokter spesialis) untuk wilayah selatan DIY dan wilayah tertinggal untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk.
5. Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori yang erat kaitannya dengan standar hidup sehat menurut WHO.
6. Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB ditahun 2030. Adanya pandemi Covid-19 ditahun 2020 harus memberi pelajaran berharga pada kita bahwa penyakit menular seperti TB dan HIV AIDS perlu ditangani secara serius agar tidak terjadi penularan.
7. Agar semua Rumah sakit memberikan gaji yang layak bagi pegawai di Rumah sakit baik negeri maupun swasta.

4.3.2.5.3 Urusan Sosial

Identifikasi Masalah:

1. Kurang akuratnya data warga terdampak pandemic Covid-19 sehingga ada indikasi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
2. Dampak Covid-19 yang melemahkan perekonomian yang dapat menyebabkan warga yang sebelumnya tidak termasuk warga miskin menjadi miskin.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Melakukan pendataan terhadap warga terdampak pandemic Covid-19 yang selama ini tidak termasuk kategori miskin sehingga belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
2. Melakukan pendataan kepada pelaku usaha/UKM.
3. Melakukan verifikasi data penduduk miskin untuk validitas data sehingga tidak terjadi salah sasaran Ketika dilakukan pemberian bantuan sosial.
4. Melakukan pengawasan terhadap PMKS terutama gepeng.
5. Melakukan fasilitasi dan bantuan bagi anggota KUBE yang terdampak pandemic Covid-19 untuk bisa pulih kembali.

6. Fasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan sosial masyarakat (sarana pemakaman umum).
7. Peningkatan layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi warga miskin, gepeng dan PMKS lainnya serta melakukan pengawasan PMKS terutama Gepeng.
8. Perbaiki data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran (inklusi/eksklusi).
9. Meningkatkan layanan pada program peningkatan PKH untuk hasil yang baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
10. Bahwa Pemerintah DIY harus meningkatkan perhatian kepada kelompok rentan pembangunan terutama kaum disabilitas tidak hanya terkait di bidang pendidikan dan afirmasi penyerapan tenaga kerja, namun juga penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas serta bantuan pembiayaan pemtransportasi dan kebutuhan lainnya..

4.3.2.5.4 Urusan Tenaga Kerja

Identifikasi Masalah:

1. DIY memiliki tingkat pengangguran berpendidikan tinggi tertinggi kedua secara nasional dengan angka 24,55%.
2. Pada tahun 2019 masih banyak aduan terkait permasalahan kontrak pekerja dan telatnya perusahaan membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Banyak pekerja yang mengalami pemutusan kerja (PHK), dirumahkan, atau dipotong gajinya akibat wabah Covid-19.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Peningkatan Tingkat Kesempatan Kerja di DIY harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga angka pengangguran terbuka di DIY bisa ditekan seminimal mungkin.
2. Perlu diprogramkan pembangunan padat karya untuk menyerap tenaga kerja akibat putus kerja akibat wabah Covid-19 padat karya bisa menjadi pilihan antara senyampang dengan upaya yang lebih terukur.
3. Peningkatan program fasilitasi pelatihan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan *skill* dan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja DIY sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Pembinaan bagi pekerja kontrak diperusahaan harus dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai upaya kepastian pemberian jaminan sosial.

5. Pada urusan ketenagakerjaan, perlu dipertimbangkan untuk lebih meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda untuk menjadi wirausaha baru bidang ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan design grafis.

4.3.2.5.5 Urusan Transmigrasi

Identifikasi Masalah:

1. Jumlah alokasi transmigrasi dari pemerintah pusat terbatas sementara itu masih banyak masyarakat yang berminat mengikuti program.
2. Pelaksanaan rekrutmen dan penempatan, pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sesuai surat pemberitahuan Pemberangkatan dari Pusat, bila ada yang mengundurkan diri OPD terkait di Kabupaten/Kota ada kesulitan dan hambatan untuk mencari Pengganti Peserta Transmigrasi.
3. Belum ada penerapan secara ketat *reward* dan *punishment* bagi daerah asal dan tujuan transmigrasi, yang melanggar kesepakatan Kerjasama Antar-Daerah (KSAD), dengan sebab itu KSAD belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Mendesak melakukan penataan ulang dan re-konseptualisasi, tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Transmigrasi;
2. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu, agar percepatan akulturasi budaya antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk secara harmonis;
3. Perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan program transmigrasi, baik dari daerah asal maupun sampai di daerah tujuan;
4. Perlu melakukan *public hearing* dan *lobbying* yang terpetakan secara baik, dengan masyarakat daerah tujuan, agar konsep KSAD dapat terlaksana, dalam rangka untuk kelancaran dan kesuksesan program transmigrasi;
5. Perlu terus menerus sosialisasi dan motivasi masyarakat, untuk melakukan perluasan lapangan kerja melalui program transmigrasi yang di inisiasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan umum transmigrasi.
6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi/kuota calon transmigran yang lebih banyak.

7. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu.
8. Pengembangan “transmigrasi lokal” untuk warga masyarakat DIY dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana dan juga program pemerataan persebaran penduduk. Lahan untuk penempatan dapat memanfaatkan *Sultan Ground* maupun *Pakualaman Ground*.
9. Pelatihan untuk calon transmigran dilakukan dengan pembekalan yang memadai sesuai dengan kebutuhan keterampilan hidup serta kondisi lahan tujuan transmigrasi.
10. Pemenuhan sarana/prasarana di lokasi transmigrasi maupun kebutuhan hidup transmigran secara baik, guna menjamin proses penyesuaian awal dan pengembangan kehidupan baru tidak terhambat.
11. Pemantauan/monitoring secara periodik terhadap kehidupan warga transmigran untuk menghindari kegagalan transmigrasi. Beberapa kasus kegagalan transmigran seyogyanya telah diantisipasi lebih awal dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi program.

4.3.2.5.6 Urusan Kebudayaan

Identifikasi Masalah:

1. Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi spirit Renaisans Yogyakarta;
2. Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan;
3. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non-fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
4. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset, untuk menarik kunjungan wisata belum optimal;
5. Kelembagaan pengelolaan kawasan budaya dan organisasi penggerak dan penggiat seni budaya, juga belum dinamika yang lebih dan optimal.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Implementasi UU Nomor 13 tahun 2012, khususnya di bidang kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti penting nilai- nilai Budaya, sebagai ruh dan basis Undang- Undang Keistimewaan dan sekaligus ikon Daerah istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional.

2. Peningkatan fasilitasi, dalam rangka perekayasaan budaya asli dalam menghadapi terpaan budaya luar yang masif- global kedalam budaya adihulung Yogyakarta.
3. Peningkatan fasilitasi pemeliharaan dan riset budaya, dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artepak budaya adihulung harus terus didukung dan galakan.
4. Perumusan, pemantapan dan sosialisasi simbol-simbol budaya, sebagai inti budaya, dan identitas keistimewaan DIY, menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan.
5. Perlu sosialisasi definisi kebudayaan yang sangat luas pada masyarakat.
6. Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta perlu di giatkan baik melalui jalur Pendidikan dalam bentuk sekolah berbasis nilai budaya maupun melalui sarana kebudayaan lainnya
7. Fasilitasi event seni dan budaya

4.3.2.5.7 Urusan Keistimewaan

Isu yang berkembang ditengah masyarakat tentang Dana Keistimewaan adalah bahwa selama ini belum banyak informasi yang diterima masyarakat tentang peruntukan Dana Keistimewaan. Kebanyakan mereka mengetahui bahwa Danais banyak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seni dan budaya seperti wayang, atraksi budaya, merti desa/dusun dan lain sebagainya. Sedikit yang mengetahui bahwa Danais juga telah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dalam urusan Tata Ruang Keistimewaan dan pengelolaan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa. Demikian juga pelaksanaan Danais untuk urusan kebudayaan yang lebih luas, antara lain: pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, pengembangan atraksi wisata budaya, upaya menuju Desa Mandiri Budaya, pembinaan kewirausahaan desa, pendidikan karakter berbasis Budaya, ekosistem kultural berbasis digital, pembangunan taman budaya, pengembangan museum, pengembangan industry kreatif, lumbung Mataraman, konservasi arsip Kraton dan Kadipaten, pengembangan ekonomi perempuan, peningkatan layanan kesehatan tradisional serta Pengembangan Event Budaya yang menjadi *icon* dan spektakuler.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Percepatan pembentukan regulasi untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta;

2. Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DI Yogyakarta;
3. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya;
4. Fasilitasi kalurahan kalurahan agar naik status keberdayaan dan kemandirian dalam keistimewaan;
5. Menjaga melestarikan adat istiadat, tradisi, lembaga budaya yang berkembang di DIY;
6. Fasilitasi sosialisasi dan edukasi keistimewaan di seluruh kalurahan/kelurahan;
7. Pembuatan basis data kebudayaan dan keistimewaan berbasiskan Teknologi.

4.3.2.5.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan

Berbagai kondisi yang ada belum memberikan ruang gerak dan kesempatan sebagaimana yang diharapkan kaum perempuan. Data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, menunjukkan angka bahwa perempuan, 30% lebih rendah kemungkinannya untuk bekerja dibandingkan laki-laki. Dari data tersebut menunjukkan bahwa peluang laki-laki untuk masuk/diterima dalam dunia kerja lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Pengembangan kapasitas perempuan guna meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) khususnya bagi perempuan. Target dalam SDG's Angka 5 menyebutkan bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu agenda penting yang harus dicapai.
2. Perlunya mendorong penguatan kapasitas perempuan untuk memasuki dunia kerja pada sektor-sektor formal.
3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbasis pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
4. Skalanya pemberdayaan perlu untuk terus diperluas bukan hanya pada individu dan kelompok-kelompok kecil, tetapi juga menysasar pada kelompok usaha yang lebih besar.

4.3.2.5.9 Urusan Perlindungan Anak

Identifikasi Masalah:

1. Masih banyak terjadi perkawinan anak yang masih berusia dibawah 19 tahun.
2. Sebagian dari anak-anak di DIY mengalami masalah dengan hukum atau disebut dengan Anak Berperkar Dengan Hukum

Rekomendasi kebijakannya adalah.

1. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) antara lain dengan menjangkan masa pendidikan bagi anak-anak. Instrumen bea siswa menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi yang tidak mampu. Lama sekolah akan menjadi salah satu pendorong pengurangan angka pernikahan dini.
2. Skema pendidikan khusus yang mengakomodir kebutuhan perempuan yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan dini.
3. Optimalisasi program sekolah ramah anak, kampung ramah anak, sopan aruh anak, sebagai bagian internalisasi nilai kebersamaan, kekeluargaan, saling menghargai dan saling menghormati antara siswa dan remaja.
4. Penerapan berbagai produk hukum yang membantu penyelesaian persoalan hukum bagi anak-anak :
 - a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.
 - b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 - c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 - d. Mendorong penyelesaian masalah hukum secara diversi, atas kebijakan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya perlindungan anak.
5. Penguatan ketahanan keluarga sebagai langkah pencegahan terhadap konflik anak maupun tindak pidana oleh anak-anak. Penguatan pola asuh anak dengan memperpanjang masa pemberian ASI.

4.3.2.5.10 Urusan Pengendalian Penduduk

Isentifikasi Masalah:

1. Distribusi penduduk DIY belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota, namun relatif terkonsentrasi di Sleman yang mencapai 30,69 persen atau sebanyak 1,1 juta orang. Selanjutnya Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di DIY

mencapai 26,87 persen atau 986 ribu orang, disusul Gunungkidul mencapai 20,37 persen atau sebanyak 747 ribu orang. Kulon Progo dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan persentase penduduk yang paling sedikit di DIY. Penduduk DIY yang berada di Kulon Progo tercatat 11,90 persen atau 436 ribu orang dan Kota Yogyakarta sebanyak 10,18 persen atau 373 ribu orang dari total penduduk DIY.

2. Kepadatan penduduk Kota perlu dikendalikan untuk menciptakan lingkungan hunian dan tumbuh kembang anak yang sehat.
3. Menurut hasil SP 2020, rasio jenis kelamin mencapai 98,27 dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,82 juta. Dari 3,67 juta penduduk DIY, sebanyak 89,64 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk berdomisili sesuai.
4. KK/KTP dan 10,36 persen atau sekitar 379,93 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Kebijakan utama dalam Urusan Pengendalian Penduduk adalah orientasi terwujudnya penduduk tumbuh seimbang. Sisi lain tujuan pengendalian penduduk adalah dalam rangka menopang pembangunan manusia yang berkualitas sebagaimana target RPJPD DIY 2005-2025 Pembangunan Sumber Daya Manusia unggul.
2. Distribusi penduduk yang tersebar secara merata di seluruh DIY. Transmigrasi lokal bisa menjadi pilihan kebijakan. Jika sudah ditetapkan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengendalian Penduduk bisa menjadi landasan kebijakan.
3. Pengendalian kelahiran dengan pendekatan insentif dan disinsentif. Bagi yang setuju dengan jumlah tertentu (pembatasan) maka diberikan insentif, sementara bagi yang tidak mengikuti kesepakatan diberlakukan disinsentif (pembatasan jaminan sosial dari Pemerintah Daerah). Pengendalian penduduk bersifat lebih lokalistik antar satu Kabupaten dengan Kabupaten yang lain.
4. Pengendalian dan pengaturan tingkat kepadatan hunian untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik maupun non- fisik.
5. Penegakan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

4.3.2.5.11 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pada urusan kepemudaan, adanya pandemi Covid-19 banyak membatasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan sehingga pembinaan pemuda lebih banyak berupa pendampingan para alumni peserta pelatihan sebelumnya. Progres para alumni dalam mengembangkan kewirausahaan diharapkan mampu menjadi pendorong tumbuhnya kewirausahaan di masyarakat, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Pada urusan olah raga, pada tahun 2020 KONI DIY fokus melaksanakan kegiatan terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang pada akhirnya ditunda pelaksanaannya tahun 2021 karena situasi pandemi covid 19 dengan kembali menggiatkan antara lain Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda), Pra-PON, dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) tentunya dengan Prokes yang ketat. Adanya pandemi Covid-19 membatasi penyelenggaraan banyak kejuaraan olahraga namun pada bulan Maret 2020 Pemda DIY masih berkesempatan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

Rekomendasi Kebijakannya adalah:

1. KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlet dan pemain dengan menaikkan bonus bagi atlet yang berprestasi.
2. KONI Fasilitasi pendampingan seluruh Cabang di DIY dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON 2023) dengan kembali menggiatkan antara lain Pemusatan Latihan Daerah (I Puslatda) , Pra PON dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) .
3. Pelatihan dan Workshop Kewirausahaan Pemuda
4. Petukaran pemuda antar negara.
5. Pengembangan olahraga rekreasi masyarakat sebagai basis upaya “mengolahragakan masyarakat”. Guna Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kebugaran Masyarakat. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk bersinergi dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) DIY didalam program pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat.
6. Perlunya pengembangan penyelenggaraan Sport Tourism dan olahraga tantangan guna memantik kunjungan wisata minat khusus
7. Pengaruh media elektronik (gadget) memunculkan kekhawatiran anak-anak terbiasa dengan gadget. Sinergi Bidang Kebudayaan, Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga, bisa kembali melekatkan Olahraga Tradisional Dolanan Anak (gobag sodor, egrang, mainan tradisional dan lain-lain)

yang terkikis oleh Gadget. Bentuk kegiatan bisa bersifat Edukasi, Film melalui Sanggar-sanggar dan Perkumpulan.

8. Perlunya pembentukan Peraturan Daerah Tentang Sistem Penyelenggaraan Olahraga Daerah yang menaungi tiga dimensi keolahragaan, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
9. Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) sebagai tindak lanjut dari rintisan Kelas Khusus Olahraga (KKO).
10. Dengan adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi pedoman untuk mengembangkan olahraga di DIY. Selanjutnya bagaimana memetakan cabang-cabang olahraga prestasi berjenjang yang akan dipertandingkan di PON, Sea Games, Asian Games dan puncaknya di Olympiade.

4.3.2.6 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Program Strategis DIY Tahun 2023

4.3.2.6.1 Pelabuhan Tanjung Adikarto

Salah satunya proyek strategis DIY yang sampai sekarang belum jelas realisasinya adalah Pelabuhan Tanjung Adikarto, yang terletak di Kulon Progo. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto sudah dimulai sejak 2001 dengan adanya studi kelayakan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya masterplan tahun 2002 dan DED tahun 2003, Kajian Amdal 2005 dan pembangunan fisik sejak 2006. Artinya sudah berjalan lebih dari 20 tahun sejak adanya kajian sampai sekarang. Namun sampai sekarang Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto belum beroperasi dengan baik bahkan telah menghabiskan anggaran lebih dari 300 miliar. Rencana KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang diinisiasi sejak 2018 sampai sekarang belum jelas tindak lanjutnya. Namun adanya wacana kelanjutan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Selain itu, permasalahan utama adalah proses sedimentasi pasir laut maupun dari sungai yang sangat tinggi sehingga tidak bisa dimasuki oleh kapal-kapal berukuran besar yang harus diatasi dengan adanya pembangunan breakwater yang sampai sekarang masih kurang 170 m di sisi timur dan 150 m di sisi barat.

Rekomendasi kebijakan:

1. Perlunya road map dan tata kala yang jelas terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto apabila akan dilanjutkan sebagai pengungkit sektor perikanan dan kelautan.

2. Apabila pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto tidak feasible untuk dilanjutkan pembangunannya perlu dilakukan alternatif alih pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Adikarto untuk kepentingan yang lain, seperti kepentingan pariwisata, sehingga tidak berlarut-larut karena anggaran yang dikeluarkan sudah sangat banyak.
3. Akselerasi implementasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto oleh pemerintah pusat melalui APBN.

4.3.2.6.2 Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Pengembangan sarana dan prasarana jalan di wilayah DIY meliputi 3 Kabupaten yaitu Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dalam hal ini dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 116,07 km. Pelaksanaan Konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara bertahap. Telah dilakukan pembebasan lahan selebar 30 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur, sebagai tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun tahun 2019, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 M² telah dapat dibebaskan seluas 2.600.374 M² (68,95%). Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan, dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 75,89 km (65,38%), dimana 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot ke arah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0,6 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan JJLS, Pemda DIY melaksanakan pembebasan lahan, sementara fisik konstruksi dilaksanakan melalui dana APBN. Pemda DIY melalui dana keistimewaan mengalokasikan anggaran 2020 untuk beberapa kegiatan.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Kebutuhan pembebasan lahan untuk JJLS sangat besar, sehingga proses pembebasan dan pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang cermat dengan tahapan yang berkelanjutan. Pembebasan lahan di Desa Kemadang dimana masih terdapat warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi dan mengajukan keberatan. Perlunya Koordinasi dan sinergitas yang baik antar Lintas sektor dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat.
2. Untuk percepatan pembangunan fisik konstruksi JJLS diharapkan Pemerintah Daerah DIY terus melakukan koordinasi dan mengusulkan kepada Pemerintah mengingat pentingnya pembangunan Jaringan Jalan

Lintas Selatan maka diperlukan langkah-langkah taktis sebagai upaya percepatan pembangunan.

3. Perlu penjabaran lebih detail mengenai rencana pembangunan JJLS, mengingat JJLS sebagai poros utama yang membentang dari ujung barat di Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan berakhir di ujung timur pada Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
4. Perlunya Koordinasi dan sinergitas yang baik antar Lintas sektor dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat sebagai penyelesaian permasalahan sertifikasi, khususnya sertifikasi Tanah JJLS.
5. Rencana pembangunan JJLS di DIY yang terkait dengan akses jalan menuju JJLS khususnya yang merupakan wewenang pemerintah Provinsi DIY saat ini yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di kab. Gunungkidul pada ruas Gading – Playen – Paliyan - Saptosari yang merupakan akses menuju JJLS.
6. Disisi lain perlu penjabaran lebih detail mengenai rencana pembangunan JJLS, mengingat JJLS sebagai poros utama yang membentang dari ujung Congot (Kab. Kulon Progo) sampai desa Duwet (Kab. Gunungkidul) yang berbatasan dengan kabupaten Wonogiri. Bagaimana terkait sarana penunjang menuju JJLS yang dapat dirasakan oleh masyarakat?

4.3.2.6.3 Jogja Smart Province (JSP)

Permasalahan yang muncul adalah minimnya dokumentasi digital, perlunya gudang data/*data warehouse*.

Rekomendasi kegiatan:

1. Membangun komunikasi dengan Kabupaten/Kota dalam pendokumentasian digital dan integrasi sistem data.
2. Membuat dokumentasi digital.
3. Fasilitasi Sarana Prasarana JSP seperti *data warehouse*.

4.3.2.6.4 Reformasi Birokrasi

Permasalahan yang muncul: Belum optimalnya layanan berbasis web 4.0, kurang optimal dalam menghadapi era global dimana birokrasi dituntut responsif, dinamis dan efisien dengan postur organisasi yang simpel, regulasi tidak berbelit, dan SDM professional

Rekomendasi kegiatan:

1. Fasilitasi pendampingan dalam pelayan publik
2. Penguatan SDM pegawai
3. Fasilitasi alat ukur yang mengukur out put dari program kegiatan agar terukur kinerja pegawai, kinerja organisasi dan kinerja program

4.3.2.6.5 Pembangunan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit Berstandar Internasional

Identifikasi masalah: belum optimalnya tata kelola RSUD dan SDM yang belum sesuai dengan standar internasional. Rekomendasi kegiatan:

1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pihak
2. Penguatan Sumber daya RSUD
3. Peningkatan kualitas SDM agar berstandar internasional

4.3.2.6.6 Pengembangan Jogja Agro Techno Park (JATP)

Identifikasi masalah: nomenklatur, hasil propduk belum bisa dijual menunggu payung hukum, keberadaan JATP belum dicantumkan dalam tata ruang kabupaten Kulon Progo. Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Komunikasi dan koordinasi dengan Bapenas terkait nomenklatur
2. Membuat payung hukum
3. Komunikasi dan Koordinasi dengan Pemkab Kulon progo terkait Tata ruang

4.3.2.6.7 Pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA)

Identifikasi Masalah:

1. *Green* desain mitigasi bencana belum jadi.
2. Jalur kereta api dari menuju bandara belum optimal, maupun pemanfaatan ruang didalam terminal penumpang dan area lainnya.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Komunikasi dan koordinasi dengan BNPB terkait *green* desain mitigasi bencana.
2. Komunikasi dan Koordinasi dengan PT KAI terkait jalur kereta api.
3. Pemenuhan sarana prasarana pendukung bandara, seperti SPAM.

4.3.2.6.8 Program Strategis DIY Penataan Kawasan Sumbu Filosofi

Identifikasi Masalah:

1. Terhambatnya lahan parkir di jalan-jalan penopang/sirip Malioboro.
2. Belum terlaksananya Malioboro sebagai kawasan pedestrian.
3. Belum adanya lembaga yang secara khusus mengelola kawasan sumbu filosofi dengan professional.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Komunikasi dan koordinasi dengan para pihak agar alih lahan bisa segera dilakukan.
2. Kajian mendalam dalam penerapan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian.
3. Perlu adanya lembaga atau badan yang mengelola kawasan Malioboro secara professional.
4. Penguatan ekonomi masyarakat di Malioboro dan daerah yang terdampak kawasan pedestrian.
5. Fasilitas sumber daya pelaku UMKM di kawasan Malioboro dan daerah yang terdampak kawasan pedestrian.

4.3.2.6.9 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan

Identifikasi Masalah:

1. Volume sampah yang cenderung terus bertambah, keluasan TPS dan TPA yang stagnan, serta untuk saat sekarang ini ditambah dengan sampah medis berupa masker.
2. Daya tampung TPA Piyungan yang terbatas seringkali membuat antrian di TPS-TPS dan penutupan sementara TPA Piyungan.
3. Pengelolaan lindi di TPA Piyungan belum optimal.
4. Drainase tidak berfungsi secara optimal sehingga perlu untuk terus dioptimalkan perawatan dan peningkatan kapasitas drainase.
5. Akses jalan untuk keluar masuk kawasan TPA Piyungan sering mengalami kerusakan.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Optimalisasi pengelolaan dengan mendasarkan pada idealisme dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Kajian pengurangan sampah dari Kabupaten/Kota dengan pembangunan tempat daur ulang atau pengolahan sampah di masing-masing Kabupaten/Kota guna mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.
3. Komunikasi dan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana pembangunan tempat daur ulang atau pengolahan sampah di masing-masing Kabupaten/Kota guna mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.
4. Sosialisasi paradigma Pengelolaan Sampah secara partisipatif dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) sejak dari sumber sampah (rumah tangga).
5. Fasilitasi pembangunan tempat daur ulang atau pengolahan sampah di masing-masing Kabupaten/Kota guna mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.
6. Komunikasi dan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemilahan sampah dan angkutan sampah yang telah dipilah, jangan sampai sampah yang dipilah tercampur dengan sampah tidak terpilah
7. Peningkatan sarana prasarana bongkar sampah agar tidak terjadi antrean yang berkepanjangan.
8. Memberikan edukasi pada masyarakat terdampak serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak TPA Piyungan.
9. Fasilitasi drainase dan fasiliatasi jalan dari dan ke TPA Piyungan, seta fasilitasi pengelolaan lindi untuk bisa dimanfaatkan lebih baik lagi.

4.3.2.6.10 Pembangunan Taman Budaya Se-DIY

Permasalahan yang muncul adalah optimalisasi fungsi taman budaya sebagai pusat penajuan budaya, belum adanya program yang menjadikan taman budaya mudah diakses oleh seniman, budayawan, masyarakat sebagai pusat pemajuan budaya

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Fasilitasi penggunaan taman budaya oleh seniman, budayawan dan masyarakat dalam upaya pemajuan budaya.
2. Fasilitasi rencana strategis pengembangan budaya melalui taman budaya.
3. Penguatan sumber daya pengelola tam,an budaya, seniman, budayawan dan masyarakat agar mampu memajukan budaya melalui taman budaya.

4.3.2.6.11 Penanggulangan Kemiskinan di DIY

Masalah:

1. Angka kemiskinan DIY belum mengarah pada target RPJMD oleh karena saat pandemi justru terjadi penambahan penduduk miskin akibat kehilangan pekerjaan.
2. Belum optimalnya intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY yang disupport dari APBD DIY.
3. Belum adanya rencana strategis yang terintegrasi dalam penanganan kemiskinan.

Rekomendasi kebijakannya adalah:

1. Perlunya pengukuran kemiskinan di DIY yang menggunakan pendekatan multidimensional bukan hanya pada satu ukuran pengeluaran per kapita. Langkah sinergis ini perlu untuk dilakukan dengan BPS.
2. Perlunya pengembangan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan elibatan masyarakat secara berkelompok. Intervensi kebijakan yang dilakukan perlu untuk difokuskan pada pemberdayaan berbasis kelompok.
3. Dalam rangka untuk meningkatkan sekaligus ketahanan keluarga, maka salah satu pilihan penanganan kemiskinan DIY bisa berbasis pada pemberdayaan perempuan. Hal ini seiring dengan peningkatan perekonomian perempuan dengan basis sektor informal.
4. Membuat rencana strategis penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan ditindak lanjuti MOU lintas sektor, lintas kewenangan, perguruan tinggi, swasta dan komunitas.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor lintas kewenangan
6. Membuat base data kemiskinan dengan basis sampai dengan tingkat paling rendah di pedukuhan atau RW.
7. Membuat aplikasi pengentasan kemiskinan yang bisa diakses oleh lintas sektor lintas kwewenangan, perguruan tinggi, swasta dan komunitas.
8. Membangun gerakan budaya mandiri.
9. Penguatan sumber daya keluarga miskin.
10. Fasilitasi keluarga miskin.
11. Pemanfaatan CSR untuk penguatan ekonomi keluarga miskin.
12. Penguatan sumberdaya pendamping keluarga miskin dan organisasi sosial masyarakat.
13. Konsistensi kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY sebagai salah satu jalan pengurangan kemiskinan.

4.3.2.6.12 Kebijakan Keuangan Daerah

4.3.2.6.12.1 Pengelolaan Pendapatan

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah terlihat bahwa tingkat kemandirian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020 masih di kisaran 30% sampai dengan 40%. Tingkat kemandirian dari 2017 ke 2018 meningkat, tetapi tahun 2019 tidak ada peningkatan, sedangkan tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang sulit bagi semua aspek kehidupan karena Pandemi Covid-19, sehingga tingkat kemandirian keuangan berkurang menjadi 33%. Diharapkan pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai minimal 40% dari kemandirian keuangan daerah.

4.3.2.6.12.2 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Perlu dilakukan evaluasi perencanaan yang baik dari aspek sasaran, program, kegiatan yang lebih baik.
2. Perlu dilakukan koordinasi dalam antar OPD dalam mengatasi angka kemiskinan, indeks gini/ratio, IPM, kesenjangan pembangunan antar wilayah.
3. Meningkatkan perencanaan yang lebih cermat, manajemen pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pengawasan internal yang lebih baik, untuk meningkatkan opini BPK yang sudah 11 kali WTP.

4.3.2.6.12.3 Pengelolaan Pembiayaan

Faktor keterbatasan kemampuan pembiayaan keuangan DIY disebabkan postur APBD DIY masih sangat mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Derajat otonomi fiskal yang menunjukkan proporsi PAD terhadap total pendapatan berada di angka 33,46% (di bawah rata-rata nasional). Ini perlu dilakukan usaha-usaha yang tepat dan cermat agar porsi Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat dan sama dengan rerata nasional porsi PAD dengan Pendapatan APBD. Beberapa kebijakan dalam Pokok- Pokok Pikiran DRPD sebagai berikut:

1. BUMD diharapkan meningkatkan kinerjanya sehingga menghasilkan laba yang signifikan.
2. Untuk BUMD Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Tama diharapkan tahun 2023 sudah menghasilkan laba bagi APBD.
3. Untuk PT BPD DIY yang penyertaan modal terbesar diharapkan bisa menghasilkan pendapatan yang signifikan dan untuk unit layanan Syariah yang ada ketentuan aturan OJK agar dilakukan kebijakan pengatan.

4.3.2.6.12.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar optimal Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Agar dilakukan perencanaan yang baik dalam pengelolaan yang lebih baik.
2. Agar dilakukan pemanfaatan lahan tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat agar bisa diperoleh nilai manfaat dan nilai ekonomis.
3. Perlu ditambah sumber daya manusia dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten dan Kota se-DIY

5.1.1 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

Tabel 5-1 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Indikator	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	2,64
Tingkat Kemiskinan (%)	16,92
Indeks Gini (%)	0,404
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,45

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2022

Pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo ditargetkan sebesar 5,60%. Target ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan berkembangnya kawasan tertentu di Kabupaten Kulon Progo akibat dampak operasionalisasi YIA. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi 0,26 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan menjadi sebesar 2,64% pada tahun 2023, lebih rendah dari TPT DIY yang ditargetkan menjadi sebesar 3,42%. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menjadi sebesar 16,92%. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,404 yang berada di bawah DIY sebesar 0,423. Sementara itu, IPM ditargetkan menjadi sebesar dari 75,45 pada tahun 2023.

5.1.2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup besar dan sebagian daerah tersebut termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Di samping itu, kabupaten ini juga termasuk daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Aglomerasi kawasan perkotaan yang terkait dengan pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5-2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul Tahun 2023

Indikator	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,37
Tingkat Kemiskinan (%)	12,90
Indeks Gini	0,350
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,09

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar 5,50% pada tahun 2023 lebih tinggi 0,16 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan menjadi sebesar 3,37% pada tahun 2023, lebih rendah 0,05 poin dari TPT DIY. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menjadi sebesar 12,90%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang menjadi 0,350. Sementara itu, IPM ditargetkan menjadi sebesar 81,09 pada tahun 2023.

5.1.3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Percepatan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul sebagai dampak prioritas pembangunan di kawasan pantai selatan Jawa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di DIY. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

Tabel 5-3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Indikator	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,00
Tingkat Kemiskinan (%)	14,00
Indeks Gini	0,321
Indeks Pembangunan Manusia	72,00

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2022

Pada tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul ditargetkan tumbuh sebesar 4,95% lebih rendah 0,39 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan menjadi sebesar 2,00% pada tahun 2023, lebih rendah dari TPT DIY yang ditargetkan menjadi sebesar 3,42%. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menjadi sebesar 14,00%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang menjadi 0,321. Sementara itu, IPM ditargetkan menjadi sebesar 72,00 pada tahun 2023.

5.1.4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang signifikan dengan dinamika bisnis cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang mendekati kondisi sebelum pandemi menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian indikator makro yang masih tetap tinggi dibandingkan tiga kabupaten sebelumnya. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

Tabel 5-4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman Tahun 2023

Indikator	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,90
Tingkat Kemiskinan (%)	7,08
Indeks Gini	0,428
Indeks Pembangunan Manusia	84,69

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2022

Kabupaten Sleman ditargetkan tumbuh sebesar 5,07% pada tahun 2023, lebih rendah 0,27 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan menjadi sebesar 4,90% pada tahun 2023, lebih tinggi dari target TPT DIY yang sebesar 3,42%.

Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menjadi sebesar 7,08% Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang menjadi 0,428. Sementara itu, IPM ditargetkan menjadi sebesar dari 84,69 pada tahun 2023.

5.1.5 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa terutama pariwisata, perdagangan dan jasa-jasa. Kondisi pasca pandemi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian indikator makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat pandemi. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 5-5 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta Tahun 2023

Indikator	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,62
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,35
Tingkat Kemiskinan (%)	6,605
Indeks Gini	0,395
Indeks Pembangunan Manusia	87,38

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar 5,62% pada tahun 2023, lebih tinggi 0,28 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan menjadi sebesar 5,35% pada tahun 2023, lebih tinggi 1,98 poin dari target TPT DIY yang sebesar 3,42%. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menjadi sebesar 6,61%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang menjadi 0,395. Sementara itu, IPM ditargetkan menjadi sebesar dari 87,38 pada tahun 2023

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD DIY 2023

Usaha perwujudan tema pembangunan RKPD DIY 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
2. Pemulihan ekonomi
3. Penurunan kemiskinan
4. Pengurangan *gap* ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan

Prioritas pembangunan di atas memiliki keterkaitan dengan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,412,367,283,216						1,585,128,130,189		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	949,003,649,063						90,03 Nilai	1,063,257,315,337	
1 01 01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	1,249,393,800						100 %	1,542,121,680	
1 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	89,960,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	6 Dokumen	143,308,440	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	68,785,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	4 Dokumen	165,159,940	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1,090,648,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	3 Laporan	1,233,653,300	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	942,148,740,623						100 %	1,054,484,544,913	
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6733 Orang/ Bulan	941,366,994,623	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	6733 Orang/ Bulan	1,053,368,601,513	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	282,594,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	5 Dokumen	475,699,400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	147,420,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	2 Laporan	190,850,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/				2 Laporan	351,732,000	Kota Yogyakarta,		Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	2 Laporan	449,394,000	DINAS PENDIDIKAN,

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	143,358,000					100 %	157,693,800		
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	143,358,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	2 Laporan	157,693,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	140,556,500					100 %	250,160,900		
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,021,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Dokumen	55,023,100	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				37 Dokumen	90,535,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	37 Dokumen	195,137,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	852,787,800					100 %	1,517,653,940		
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,881,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Paket	24,582,250	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	116,737,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	7 Paket	144,221,770	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	56,413,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	3 Paket	74,873,810	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	186,783,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Paket	251,661,850	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19,647,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Dokumen	21,612,360	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	451,325,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	2 Laporan	1,000,701,900	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	808,943,100						100 %	1,414,433,240	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	114,919,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Paket	148,699,320	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	509,040,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	34 Unit	414,742,790	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	184,983,300	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	21 Unit	203,481,630	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	2,831,804,800						100 %	2,956,255,280	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,300,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Laporan	10,230,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1,655,499,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	4 Laporan	1,662,319,560	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1,167,005,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	4 Laporan	1,283,705,720	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	828,064,440						100 %	934,451,584	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		sehingga terpelihara dan terawat													
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	330,139,640	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	37 Unit	363,153,604	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				60 Unit	8,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	60 Unit	10,160,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112 Unit	99,949,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	112 Unit	126,884,340	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	15,754,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Unit	22,830,390	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197,568,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	1 Unit	217,324,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				198 Unit	176,452,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Dikpora DIY	198 Unit	194,097,750	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai	0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	463,057,103,953						99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	521,092,069,632		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	42 medali 17.000 siswa persen	0 medali 0 siswa persen	35 medali 15 siswa 88.02 persen	145,717,277,800						35 medali 15 siswa 88.02 persen	168,632,696,292		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter													
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang 1 Ruang	460,072,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Ruang 1 Ruang	506,079,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun				1 Ruang	411,248,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	1 Ruang	452,372,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				1 Ruang	246,699,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	1 Ruang	271,368,900	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	576,318,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	2 Ruang	633,949,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	321,157,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	1 Ruang	353,272,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1,464,496,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	1 Unit	1,610,945,600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				92 Ruang	12,585,457,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	92 Ruang	13,844,002,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	1,302,447,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	8 Ruang	1,432,691,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	1,720,390,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	8 Ruang	1,892,429,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 6 Ruang	1,296,888,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Ruang 6 Ruang	1,426,576,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
1 01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 4 Ruang	555,307,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Ruang 4 Ruang	610,837,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 1 Ruang	142,359,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Ruang 1 Ruang	142,359,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 1 Ruang	155,938,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Ruang 1 Ruang	171,531,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 4 Ruang	702,902,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Ruang 4 Ruang	773,192,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				14 Unit	1,345,185,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	14 Unit	1,479,703,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				7 Paket	215,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	7 Paket	236,500,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	1,310,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	10 Paket	1,441,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta				65274 Peserta didik	22,411,995,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	65274 Peserta didik	25,959,906,390	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Didik													
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				169 Satuan Pendidikan	750,887,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	169 Satuan Pendidikan	1,342,831,712	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				285 Peserta Didik	2,106,896,700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	285 Peserta Didik	7,643,782,190	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				0 Orang 304 Orang	167,352,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	0 Orang 304 Orang	199,267,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5062 Orang	585,342,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	5062 Orang	1,374,009,780	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				169 Satuan Pendidikan	717,201,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	169 Satuan Pendidikan	944,201,280	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				161 Satuan Pendidikan	94,121,140,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	161 Satuan Pendidikan	103,533,254,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				161 Orang	44,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	161 Orang	50,490,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	23 medali 7 sekolah 44 sekolah medali sekolah		0 medali 0 sekolah 0 sekolah medali sekolah	20 medali 4 sekolah 35 sekolah 20 medali 4 sekolah	257,144,391,142						20 medali 4 sekolah 35 sekolah 20 medali 4 sekolah	289,087,860,867	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha													
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				19 Ruang	29,474,199,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	19 Ruang	32,421,618,900	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	1,500,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	3 Ruang	1,650,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	319,860,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	1 Ruang	351,846,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				6 Ruang	5,889,175,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	6 Ruang	6,478,092,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	459,738,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	2 Ruang	505,711,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi				5 Ruang	4,597,380,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	5 Ruang	5,057,118,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				3 Ruang	827,529,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	3 Ruang	910,281,900	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	102,164,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	1 Ruang	112,380,400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02 23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	156,630,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	2 Unit	172,293,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				19 Paket	2,200,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	19 Paket	2,420,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				41 Paket	56,224,978,042	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	41 Paket	61,953,411,622	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				680 Peserta didik	2,684,166,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	680 Peserta didik	3,687,114,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				219 Satuan Pendidikan	130,257,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	219 Satuan Pendidikan	143,282,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				875 Peserta Didik	4,650,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	875 Peserta Didik	9,310,166,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				216 Orang	131,660,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	216 Orang	160,006,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				89 Orang	158,105,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	89 Orang	478,598,560	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				219 Satuan Pendidikan	750,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	219 Satuan Pendidikan	1,697,884,485	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah				210 Satuan	146,830,550,000	Kota	DAK Non Fisik-		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan,	SMK, Siswa SMK, dan	210 Satuan	161,513,605,000	DINAS PENDIDIKAN,

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kejuruan	Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				Pendidikan		Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	BOS Reguler		kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Pendidikan		PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				210 Orang	58,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK, Siswa SMK, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	210 Orang	64,449,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	5,000 siswa siswa		0 siswa siswa	3,5 siswa 3,5 siswa	60,195,435,011						3,5 siswa 3,5 siswa	63,371,512,473	
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	443,438,349		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	1 Unit	487,782,184	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				3 Ruang	528,562,739	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	3 Ruang	581,419,013	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	272,583,141	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	2 Ruang	299,841,456	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	164,242,645	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	1 Ruang	180,666,910	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	283,266,778	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	1 Unit	311,593,456	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	338,438,348	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	2 Ruang	372,282,183	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	380,680,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	6 Paket	418,748,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				11152 Peserta Didik	10,047,366,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11152 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				9 Satuan Pendidikan	9,511,502,371	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya) Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya) Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	9 Satuan Pendidikan	13,285,456,737	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				365 Peserta Didik	3,286,484,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	365 Peserta Didik	4,640,390,260	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				1531 Orang	8,808,732,740	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	1531 Orang	10,771,420,154	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas N kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				207 Orang	400,337,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	207 Orang	3,394,863,340	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				79 Satuan Pendidikan	2,619,520,300	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	79 Satuan Pendidikan	3,205,740,780	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				79 Satuan Pendidikan	23,092,280,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	79 Satuan Pendidikan	25,401,508,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				79 Orang	18,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	79 Orang	19,800,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	97 %		0 %	95.88 %	248,990,200						95.88 %	297,451,220	
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus	1 tahun		0 tahun	1 tahun	248,990,200						1 tahun	297,451,220	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	248,990,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	297,451,220	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah	10 dokumen		0 dokumen	10 dokumen	57,540,000						10 dokumen	63,294,000	
1 01 05 1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah rekomendasi perizinan yg dikeluarkan dinas	10 dokumen		0 dokumen	10 dokumen	57,540,000						10 dokumen	63,294,000	
1 01 05 1.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	57,540,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	calon SMA dan SMK	1 Dokumen	63,294,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						33,395,200,000						36,734,720,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	58,83 %		0 %	51,33 %	33,395,200,000						51,33 %	36,734,720,000	
2 22 08 5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dengan kategori minimal baik	53,67 %		0 %	50 %	33,395,200,000						50 %	36,734,720,000	
2 22 08 5.10 01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				15 Laporan	28,035,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO	15 Laporan	30,838,500,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 22 08 5.10 02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan				3 Unit	1,000,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO	3 Unit	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 22 08 5.10 04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta				60 Orang	4,360,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO	60 Orang	4,796,220,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						7,333,909,280						16,626,855,168		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	6,542,900,880						90,03 Nilai	9,246,035,568	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	141,080,400						100 %	155,188,440	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	112,220,400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	6 Dokumen	123,442,440	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	28,860,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1 Dokumen	31,746,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	15,000,000						100 %	16,500,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1 Laporan	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	242,148,000						100 %	569,896,030	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,995,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1 Paket	32,505,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	80,003,900	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	4 Paket	130,993,060	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	25,959,300	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	3 Paket	45,345,190	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35,429,400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1 Paket	39,005,340	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1 Dokumen	3,734,400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1 Dokumen	4,107,840	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Undangan yang Disediakan						Bener						OLAH RAGA	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	82,026,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	2 Laporan	317,939,600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	249,082,200					100 %	552,473,790		
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	147,437,200	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	33 Unit	277,200,770	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	101,645,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	25 Unit	111,809,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	1,427,397,000					100 %	1,520,636,700		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,297,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1 Laporan	4,726,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Kommunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kommunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	400,700,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	4 Laporan	364,870,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1,022,400,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	3 Laporan	1,151,040,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	1,771,923,500					100 %	3,465,443,850		
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan				8 Unit	40,750,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	8 Unit	42,075,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perizinannya													
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 102 Unit	59,977,800	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	0 Unit 102 Unit	65,975,580	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	93,959,700	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	64 Unit	157,706,670	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	1,440,536,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	9 Unit	3,002,665,600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	136,700,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Latihan Pendidikan Teknik	7 Unit	197,021,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa		0 siswa	5.6 siswa	2,696,269,780						5.6 siswa	2,965,896,758	
1 01 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,696,269,780	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	BLPT, peserta didik dan masyarakat	1 Unit Kerja	2,965,896,758	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,12 Nilai 2,12 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	791,008,400						99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	7,380,819,600	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	44 sekolah persen		0 sekolah persen	35 sekolah 25.28 persen	791,008,400						35 sekolah 25.28 persen	7,380,819,600	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				155 Satuan Pendidikan	791,008,400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMK dan siswa SMK	155 Satuan Pendidikan	7,380,819,600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						56,406,471,840						128,819,091,106		
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	10,240,242,040						90,03 Nilai	57,486,987,569	
2 19 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	54,240,000						100 %	77,418,000	
2 19 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	54,240,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	77,418,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	16,800,000						100 %	22,440,000	
2 19 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16,800,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	22,440,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	432,379,900						100 %	837,505,790	
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70,364,500	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	1 Paket	77,400,950	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	41,851,600	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	6 Paket	46,036,760	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	135,900,800	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	7 Paket	83,835,180	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,585,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	1 Paket	23,743,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,162,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	6,778,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	156,516,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	2 Laporan	599,711,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	602,886,800						100 %	45,649,484,320	
2 19 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	180,739,100	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	2 Paket	384,692,990	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				618 Unit	293,500,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	618 Unit	1,583,455,060	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				19 Unit	128,647,700	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	19 Unit	43,681,336,270	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	6,600,850,500						100 %	7,140,920,875	
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,155,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	1,270,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	715,066,700	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	4 Laporan	676,238,695	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5,884,628,800	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	4 Laporan	6,463,411,680	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara	100 %		0 %	100 %	2,533,084,840						100 %	3,759,218,584	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan terawat													
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	60,635,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	9 Unit	58,763,760	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 156 Unit	18,000,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	0 Unit 156 Unit	19,800,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	76,213,800	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	85 Unit	83,835,180	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	2,300,371,540	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	9 Unit	3,520,408,694	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				70 Unit	77,864,500	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pemuda dan Olahraga	70 Unit	76,410,950	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	umlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha				6 kelompok							3 kelompok	12,871,517,670	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan				1 lembaga							1 lembaga	12,244,154,670	
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1690 Orang	5,253,057,300	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	pemuda	1690 Orang	6,588,700,910	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				80 Orang	1,750,000,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	pemuda	80 Orang	2,250,177,160	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				25 kelompok							15 kelompok	627,363,000	
2 19 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				2 Dokumen	350,000,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	lembaga kepemudaan	2 Dokumen	627,363,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Di Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah capaian medali pada multievent	28 medali		0 medali	22 medali	37,313,172,500						22 medali	56,510,056,517	
2 19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	2 event		0 event	2 event	9,860,991,900						2 event	13,116,176,480	
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				3 Dokumen	2,314,304,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	pelajar	3 Dokumen	3,339,758,400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				365 Orang	7,546,687,900	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	pelajar	365 Orang	9,776,418,080	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga	1490 atlet		0 atlet	370 atlet	1,907,580,600						370 atlet	13,559,568,277	
2 19 03 1.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				265 Orang	1,907,580,600	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Atlet pelajar	265 Orang	13,425,264,767	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	3 lembaga		0 lembaga	3 lembaga	25,544,600,000						3 lembaga	29,834,311,760	
2 19 03 1.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Dokumen	25,544,600,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	lembaga olahraga	3 Dokumen	28,924,060,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100 %		0 %	100 %	1,500,000,000						100 %	1,950,529,350	
2 19 04 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan	1 lembaga		0 lembaga	1 lembaga	1,500,000,000						1 lembaga	1,950,529,350	
2 19 04 1.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1,500,000,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Organisasi Pramuka	1 Organisasi	1,950,529,350	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						13,510,836,300							19,242,567,190	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	9,828,090,400						90,03 Nilai	14,974,331,790	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemerintah Daerah													
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	34,380,000						100 %	37,818,000	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	34,380,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1 Dokumen	37,818,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	11,400,000						100 %	12,540,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,400,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1 Laporan	12,540,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	217,830,900						100 %	297,095,590	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	21,655,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 Paket	23,821,490	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	36,034,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	6 Paket	39,637,620	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	23,278,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 Paket	21,645,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	27,419,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2 Paket	30,161,560	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,979,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1 Dokumen	4,377,120	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	105,464,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2 Laporan	177,452,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	2,222,833,000						100 %	4,559,385,050	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	19,125,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2 Paket	34,650,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				178 Unit	2,192,458,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	178 Unit	4,512,360,050	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11,250,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1 Unit	12,375,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	6,613,971,300						100 %	9,035,368,430	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1 Laporan	2,200,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	6,134,800,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 Laporan	8,508,280,990	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	477,170,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 Laporan	524,887,440	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	727,675,200						100 %	1,032,124,720	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	49,215,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	3 Unit	54,136,720	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang				62 Unit	134,310,000	Kota Yogyakarta,			Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi	62 Unit	164,923,000	DINAS PENDIDIKAN,

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dipelihara						Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pendidikan			PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	450,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1 Unit	709,500,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				49 Unit	94,150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	49 Unit	103,565,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai	0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	3,682,745,900							99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	4,268,235,400	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	42 medali	0 medali	35 medali	3,518,527,900							35 medali	4,058,957,760	
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			558 Satuan Pendidikan	2,912,005,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	siswa dan sekolah	558 Satuan Pendidikan	3,391,783,010	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			320 Peserta Didik	606,522,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	siswa dan sekolah	320 Peserta Didik	667,174,750	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	23 medali	0 medali	20 medali	106,972,000						20 medali	117,669,200		
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			30 Satuan Pendidikan	106,972,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	siswa dan sekolah	30 Satuan Pendidikan	117,669,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah penerima bantuan pembiayaan	5.000 siswa	0 siswa	3.5 siswa	57,246,000						3.5 siswa	91,608,440		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pendidikan yang tepat sasaran Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	siswa		siswa	3.5 siswa							3.5 siswa		
1 01 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				109 Satuan Pendidikan	57,246,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	sekolah	109 Satuan Pendidikan	91,608,440	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						37,587,894,372						53,593,640,214		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	7,192,237,400						90,03 Nilai	7,996,948,685	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	42,660,000						100 %	46,926,000	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	42,660,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	46,926,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	93,600,000						100 %	108,636,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	93,600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Laporan	108,636,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	147,661,200						100 %	254,925,550	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,906,300	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Paket	13,096,930	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	49,908,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	4 Paket	58,017,190	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	11,445,600	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	3 Paket	12,397,880	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,144,800	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Paket	26,811,510	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,256,400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	10,182,040	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	40,000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2 Laporan	134,420,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	6,242,427,100						100 %	6,876,744,820	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	5,292,700	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Paket	9,231,970	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	96,490,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	14 Unit	112,804,120	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6,134,245,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2 Unit	6,747,669,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6,399,300	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Unit	7,039,230	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	562,341,500						100 %	595,813,955	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	860,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Laporan	946,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	174,762,300	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	4 Laporan	168,420,835	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	386,719,200	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	3 Laporan	426,447,120	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	103,547,600						100 %	113,902,360	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	24,047,600	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1 Unit	26,452,360	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				29 Unit	4,200,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	29 Unit	4,620,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	6,600,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	13 Unit	7,260,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60,000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2 Unit	66,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	8,700,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	16 Unit	9,570,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	30,395,656,972						99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	45,596,691,529	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional													
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	42 medali medali		0 medali medali	35 medali 35 medali	14,437,706,972					35 medali 35 medali	22,527,829,724		
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				11 Satuan Pendidikan	14,063,500,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Satuan Pendidikan	21,613,735,444	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1710 Peserta Didik	327,891,472	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	1710 Peserta Didik	683,911,470	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				209 Satuan Pendidikan	46,315,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	209 Satuan Pendidikan	139,469,550	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	23 medali		0 medali	20 medali	15,957,950,000					20 medali	23,068,861,805		
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				5 Satuan Pendidikan	15,938,000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	5 Satuan Pendidikan	22,728,414,445	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	19,950,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	30 Satuan Pendidikan	48,757,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						49,125,123,572						70,066,429,419		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	9,086,020,100						90,03 Nilai	10,105,635,210	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	46,500,000						100 %	51,150,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dalam 1 tahun anggaran													
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	46,500,000	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1 Dokumen	51,150,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	146,700,000						100 %	161,370,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	146,700,000	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1 Laporan	161,370,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	119,355,300						100 %	193,086,630	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,666,800	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1 Paket	4,033,480	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23,918,800	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2 Paket	26,310,680	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	14,721,800	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2 Paket	16,193,980	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18,313,500	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2 Paket	20,144,850	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,734,400	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1 Dokumen	4,107,840	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	55,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2 Laporan	122,295,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	7,886,208,000						100 %	8,748,786,420	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik													
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	51,775,300	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	4 Paket	72,782,160	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	75,402,500	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	7 Unit	140,061,680	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7,726,822,200	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1 Unit	8,492,427,900	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	32,208,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	4 Unit	43,514,680	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	844,005,600						100 %	903,665,840	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1 Laporan	2,200,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	100,226,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	3 Laporan	95,656,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	741,779,600	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	5 Laporan	805,809,840	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	43,251,200						100 %	47,576,320	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	23,126,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2 Unit	25,438,600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	13,975,200	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	34 Unit	15,372,720	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	6,150,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	17 Unit	6,765,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai	0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	40,039,103,472							99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	59,960,794,209	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	42 medali	0 medali	35 medali	19,963,105,772							35 medali	31,007,655,804	
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				19 Satuan Pendidikan	19,596,500,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	19 Satuan Pendidikan	30,090,479,324	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1670 Peserta Didik	277,693,772	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	1670 Peserta Didik	568,594,180	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				134 Satuan Pendidikan	88,912,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	134 Satuan Pendidikan	153,644,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	23 medali	0 medali	20 medali	20,075,997,700							20 medali	28,953,138,405	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan				12 Satuan Pendidikan	20,049,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa	12 Satuan Pendidikan	28,628,786,795	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Ujian								Berdaya Saing		SMK			
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				48 Satuan Pendidikan	26,997,700	Kab. Bantul, Bantul, Tirienggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	48 Satuan Pendidikan	91,179,770	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						21,348,817,672						21,296,503,030		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	1,253,658,100						90,03 Nilai	1,590,990,280	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	36,240,000						100 %	39,864,000	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	36,240,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Dokumen	39,864,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	99,000,000						100 %	108,900,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	99,000,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Laporan	108,900,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	154,129,300						100 %	282,085,210	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,970,100	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	4,367,110	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33,924,200	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	3 Paket	58,164,700	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	7,638,600	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	2 Paket	8,402,460	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24,018,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Paket	40,661,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,078,400	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Dokumen	5,586,240	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	79,500,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	2 Laporan	164,903,200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	220,995,500						100 %	318,365,080	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	68,924,300	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	3 Paket	109,113,070	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	100,920,700	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	8 Unit	132,416,240	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	51,150,500	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	5 Unit	76,835,770	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	553,013,300						100 %	632,467,990	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Laporan	2,200,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	105,633,600	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	4 Laporan	121,476,960	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				4 Laporan	445,379,700	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten	4 Laporan	508,791,030	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan										Kulon Progo			
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	190,280,000						100 %	209,308,000	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	23,200,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	3 Unit	25,520,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7,100,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	10 Unit	7,810,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	156,815,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1 Unit	172,496,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3,165,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	5 Unit	3,481,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	20,095,159,572						99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	19,705,512,750	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	42 medali persen		0 medali persen	35 medali 88.02 persen	7,781,860,872						35 medali 88.02 persen	1,821,506,830	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				11 Satuan Pendidikan	7,533,000,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Satuan Pendidikan	1,133,682,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				858 Peserta Didik	227,185,872	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	858 Peserta Didik	482,386,630	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				48 Satuan Pendidikan	21,675,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	48 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	23 medali		0 medali	20 medali	12,313,298,700						20 medali	17,884,005,920		
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				8 Satuan Pendidikan	12,283,000,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	8 Satuan Pendidikan	17,490,440,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				48 Satuan Pendidikan	30,298,700	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	48 Satuan Pendidikan	137,366,570	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						30,103,936,472						44,417,070,542			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	1,909,948,100						90,03 Nilai	2,471,369,560		
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	63,720,000						100 %	70,092,000		
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	63,720,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	70,092,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	153,840,000						100 %	169,224,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	153,840,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Laporan	169,224,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	170,889,100						100 %	242,925,320	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,909,300	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	3,200,230	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	39,467,500	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	3 Paket	63,130,760	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	9,502,700	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	2 Paket	10,452,970	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29,978,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Paket	32,975,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,981,600	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	4,379,760	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85,050,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Laporan	128,785,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	615,823,900						100 %	771,479,170	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	105,100,900	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	4 Paket	119,320,850	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	269,691,800	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	21 Unit	334,899,620	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32,997,200	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	3 Unit	49,921,300	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	208,034,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	2 Unit	267,337,400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	663,654,400						100 %	719,920,300	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,100,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Laporan	1,210,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	111,616,400	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	4 Laporan	112,678,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	550,938,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	4 Laporan	606,031,800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	242,020,700						100 %	497,728,770	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	30,335,700	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Unit	33,369,270	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	5,825,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	40 Unit	6,407,500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	5,260,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Playen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	12 Unit	5,852,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 Unit	356,620,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50,600,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	3 Unit	95,480,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai	0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai		28,193,988,372						99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	41,945,700,982	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	42 medali medali	0 medali medali	35 medali 35 medali		9,362,343,872						35 medali 35 medali	14,591,015,813	
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				11 Satuan Pendidikan	9,043,000,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Satuan Pendidikan	13,750,219,585	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1122 Peserta Didik	296,073,872	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	1122 Peserta Didik	633,419,820	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				105 Satuan Pendidikan	23,270,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	105 Satuan Pendidikan	88,026,400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas,	23 medali	0 medali	20 medali		18,831,644,500						20 medali	27,354,685,169	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		perak, perunggu)													
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				12 Satuan Pendidikan	18,777,000,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	12 Satuan Pendidikan	26,760,359,789	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				47 Satuan Pendidikan	54,644,500	Kab. Gunungkidul, Playen, Playen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	47 Satuan Pendidikan	108,741,270	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						36,822,636,672						56,358,244,772		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	1,310,201,600						90,03 Nilai	1,698,486,570	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	96,300,000						100 %	105,930,000	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	96,300,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Dokumen	105,930,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	148,320,000						100 %	163,152,000	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	148,320,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Laporan	163,152,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	137,334,600						100 %	375,078,330	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,438,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Paket	5,960,460	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	37,614,700	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	5 Paket	58,951,420	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4,075,700	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2 Paket	5,687,880	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,781,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Paket	22,327,250	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,225,200	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Dokumen	4,647,720	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	73,200,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2 Laporan	277,503,600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase proses pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik	100 %		0 %	100 %	94,371,800						100 %	130,147,600	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	5,624,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Paket	24,819,960	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	88,747,800	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	16 Unit	105,327,640	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %		0 %	100 %	694,368,000						100 %	770,720,720	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Laporan	1,100,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	215,312,800	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	3 Laporan	243,760,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				3 Laporan	478,055,200	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten	3 Laporan	525,860,720	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan										Sleman			
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %		0 %	100 %	139,507,200						100 %	153,457,920	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	20,280,800	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Unit	22,308,880	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	14,396,400	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	31 Unit	15,836,040	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75,000,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1 Unit	82,500,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	29,830,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	18 Unit	32,813,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,45 Nilai 2,3 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	35,512,435,072						99 % 84.08 % 2,26 Nilai 2,11 Nilai	54,659,758,202	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	42 medali medali		0 medali medali	35 medali 35 medali	14,886,992,572						35 medali 35 medali	24,178,867,887	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				17 Satuan Pendidikan	14,573,000,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	17 Satuan Pendidikan	22,354,406,787	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2340 Peserta Didik	300,265,572	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	2340 Peserta Didik	757,407,970	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				172 Satuan Pendidikan	13,727,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	172 Satuan Pendidikan	840,134,240	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	23 medali		0 medali	20 medali	20,625,442,500						20 medali	30,480,890,315	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				8 Satuan Pendidikan	20,550,000,000	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	8 Satuan Pendidikan	29,303,998,775	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				57 Satuan Pendidikan	75,442,500	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	57 Satuan Pendidikan	780,082,380	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3,770,500,000						5,060,330,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	777,500,000						90,03 Nilai	855,250,000	
1 01 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa		0 siswa	5.6 siswa	777,500,000						5.6 siswa	855,250,000	
1 01 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	777,500,000	Kota Yogyakarta, Umluharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMKN 6 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	1 Unit Kerja	855,250,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat	100 % 87.08 % 2,12 Nilai 2,12 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	2,993,000,000						99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	4,205,080,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional													
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	7 sekolah		0 sekolah	4 sekolah	2,993,000,000						4 sekolah	4,205,080,000	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	2,993,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 6 Yogyakarta, Siswa SMKN 6 Yogyakarta	1 Satuan Pendidikan	4,205,080,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,444,300,000					3,475,449,912			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	60,300,000						90,03 Nilai	66,330,000	
1 01 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa		0 siswa	5.6 siswa	60,300,000						5.6 siswa	66,330,000	
1 01 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	60,300,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMKN 3 Wonosari, siswa dan masyarakat	1 Unit Kerja	66,330,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,12 Nilai 2,12 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	2,384,000,000						99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	3,409,119,912	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	7 sekolah		0 sekolah	4 sekolah	2,384,000,000						4 sekolah	3,409,119,912	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	2,384,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 3 Wonosari, Siswa SMKN 3 Wonosari	1 Satuan Pendidikan	3,409,119,912	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5,106,000,000					6,306,391,347			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	525,000,000						90,03 Nilai	577,500,000	
1 01 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa		0 siswa	5.6 siswa	525,000,000						5.6 siswa	577,500,000	
1 01 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	525,000,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMKN 1 Sewon, siswa dan masyarakat	1 Unit Kerja	577,500,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,12 Nilai 2,12 Nilai		0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	4,581,000,000						99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	5,728,891,347	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	7 sekolah		0 sekolah	4 sekolah	4,581,000,000						4 sekolah	5,728,891,347	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	4,581,000,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 1 Sewon, Siswa SMKN 1 Sewon	1 Satuan Pendidikan	5,728,891,347	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,859,900,000					4,065,929,780			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,28 Nilai		0 Nilai	90,03 Nilai	71,900,000						90,03 Nilai	79,090,000	
1 01 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani	5.850 siswa		0 siswa	5.6 siswa	71,900,000						5.6 siswa	79,090,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		peningkatan keahlian													
1 01 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	71,900,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SMKN 5 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	1 Unit Kerja	79,090,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK /MA/Sederajat Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 87.08 % 2,12 Nilai 2,12 Nilai	0 % 0 % 0 Nilai 0 Nilai	99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai		2,788,000,000						99 % 84.08 % 1,93 Nilai 1,93 Nilai	3,986,839,780	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	7 sekolah	0 sekolah	4 sekolah		2,788,000,000						4 sekolah	3,986,839,780	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	2,788,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 5 Yogyakarta, Siswa SMKN 5 Yogyakarta	1 Satuan Pendidikan	3,986,839,780	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
TOTAL							1,712,182,809,396							2,051,191,352,669	

DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											60,261,981,032	121,199,031,112	
1	02	01													
1	02	01													
1	02	01	1.02												
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260 Orang/ Bulan	30,544,590,251				
1	02	01	1.03												
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,000,000				
1	02	01	1.06												
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,044,000				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33,907,258				
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13,539,000				
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,580,000				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19,720,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,040,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	153,312,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Laporan	105,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan	297 Unit		0 Unit	26 Unit	97,303,900						26 Unit	55,327,624,000	
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	97,303,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	22 Unit	322,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY	20 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	1,750,418,914						3 Laporan	1,651,500,000	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Laporan	1,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	784,762,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Laporan	700,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	964,156,414	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Laporan	950,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	83 Unit		0 Unit	52 Unit	578,050,000						52 Unit	563,150,000	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	286,900,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	50 Unit	233,150,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	111,150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan	Dinas Kesehatan DIY	1 Unit	150,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Semaki		Transformasi Pelayanan Publik	budaya)				
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	180,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Unit	180,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	94.6 %		0 %	93.1 %	26,884,662,709						93.1 %	30,517,090,950	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. Penyediaan pengadaan dan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	501 Unit Paket		0 Unit Paket	61 Unit 2 Paket	2,520,641,300						61 Unit 2 Paket	2,834,911,500	
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Dokumen	245,410,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	6 Dokumen	234,911,500	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	2,275,231,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	2,600,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan Indeks Keluarga Sehat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Dokumen %		Dokumen %	45 Dokumen 100 %	24,318,839,409						45 Dokumen 100 %	27,608,496,450	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				130 Orang	16,271,884,881	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	130 Orang	1,058,305,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	628,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	407 Orang	17,270,699,050	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				6 Dokumen	543,236,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	6 Dokumen	523,100,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				5 Dokumen	70,834,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	5 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				3 Dokumen	19,901,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	3 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	3,436,706,628	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	8 Dokumen	3,650,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	87,281,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	2 Dokumen	138,905,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	98,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	4 Dokumen	152,477,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	1,660,141,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	3 Dokumen	1,325,192,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	917,490,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	10 Dokumen	1,704,681,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	23,085,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	2 Dokumen	56,726,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 1 Dokumen	147,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	252,575,400	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				5 Dokumen	96,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	5 Dokumen	576,136,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				6 Unit	310,208,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	6 Unit	561,060,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.02 30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	8,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat	0 Keluarga	8,640,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) dan rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	83 Unit		0 Unit	68 Unit	45,182,000						68 Unit	67,383,000	
1 02 02 1.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				30 Unit	14,582,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Fasilitas pelayanan kesehatan	30 Unit	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran				38 Unit	30,600,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan	Fasilitas pelayanan kesehatan	38 Unit	42,383,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan						Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing	budaya)				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %		0 %	100 %	149,813,000					100 %	300,000,000		
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan	500 Orang		0 Orang	31 Orang	149,813,000					31 Orang	270,000,000		
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				30 Orang	34,558,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Sumber Daya Manusia Kesehatan	30 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	115,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100 %		0 %	100 %	15,000,000					100 %	32,906,000		
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana produksi dan distribusi Alkes, Obat, perbekes dan makanan minuman yang menerapkan standar	43 Sarana		0 Sarana	34 Sarana	15,000,000					34 Sarana	21,859,000		
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				34 Sarana	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Sarana produksi dan distribusi Alkes, Obat, perbekes dan makanan minuman	34 Sarana	21,859,000	DINAS KESEHATAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						574,580,000						673,442,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	100 %		0 %	100 %	574,580,000					100 %	673,442,000		
2 22 08 5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas dilakukan pengembangan tradisional	5 Kab/Kota		0 Kab/Kota	5 Kab/Kota	574,580,000					5 Kab/Kota	673,442,000		
2 22 08 5.08 04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				12 Unit	574,580,000	Semua Kab/Kota,	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan	Pelayanan kesehatan tradisional	12 Unit	673,442,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			budaya)	fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						18,843,127,876							18,574,679,731	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai		0 Nilai	88,91 Nilai	7,975,363,876						88,91 Nilai	8,665,979,731	
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Paket		0 Paket	20 Paket	152,880,000						20 Paket	187,902,000	
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	152,880,000	Kota Yogyakarta, Mantriheron, Mantriheron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	1 Paket	187,902,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan	297 Unit		0 Unit	103 Unit	227,943,400						103 Unit	870,725,000	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	227,943,400	Kota Yogyakarta, Mantriheron, Mantriheron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	4 Paket	555,975,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY	20 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	1,510,338,876						20 Laporan	1,780,292,731	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	699,163,000	Kota Yogyakarta, Mantriheron, Mantriheron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	3 Laporan	718,995,600	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	811,175,876	Kota Yogyakarta, Mantriheron, Mantriheron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	3 Laporan	1,061,297,131	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	83 Unit		0 Unit	84 Unit	90,000,000						84 Unit	0	
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung				1 Unit	90,000,000	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan	Balai Laboratorium Kesehatan dan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Mantrijeron, Mantrijeron		Transformasi Pelayanan Publik	budaya)	Kalibrasi			
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya	4 Unit		0 Unit	4 Unit	5,994,201,600						4 Unit	5,772,100,000	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	5,994,201,600	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	1 Unit Kerja	5,772,100,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	94.6 %		0 %	93.1 %	10,867,764,000						93.1 %	9,908,700,000	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik.	501 Unit		0 Unit	61 Unit	10,867,764,000						61 Unit	9,908,700,000	
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				16 Unit	4,902,764,000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	16 Unit	3,049,700,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				2 Paket	5,965,000,000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	2 Paket	6,859,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						59,362,359,000							58,828,330,092	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai		0 Nilai	88,91 Nilai	1,174,792,000						88,91 Nilai	1,275,079,592	
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan	20 Paket		0 Paket	20 Paket	444,483,000						20 Paket	481,978,700	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,961,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningrat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	7,663,700	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	86,227,900	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	142,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	27,821,700	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	26,785,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85,024,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	94,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Paket	48,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	134,448,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	2 Laporan	157,850,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	65,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY	20 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	619,742,000						20 Laporan	560,585,892	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	143,718,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Laporan	109,980,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	476,023,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	1 Laporan	450,605,892	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	83 Unit		0 Unit	84 Unit	110,567,000						84 Unit	191,595,000	
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	58,459,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	7 Unit	61,425,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang				25 Unit	45,608,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos	25 Unit	50,170,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dipelihara						Cokrodingratan		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	keehatan, dan budaya)	Dinas Kesehatan DIY			
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6,500,000	Kota Yogyakarta, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY	4 Unit	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	94.6 %		0 %	93.1 %	58,187,567,000						93.1 %	57,553,250,500	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan atau Masyarakat dan Operasional Rumah Sakit	35 Dokumen		0 Dokumen	36 Dokumen	58,187,567,000						36 Dokumen	57,553,250,500	
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	58,187,567,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DI Yogyakarta	6 Dokumen	57,553,250,500	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5,498,164,600							6,811,692,422	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai		0 Nilai	88,91 Nilai	5,427,041,200						88,91 Nilai	6,140,819,392	
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan	20 Paket		0 Paket	20 Paket	122,854,500						20 Paket	195,987,000	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,528,500	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Paket	32,988,450	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,384,100	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Paket	57,966,150	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30,072,500	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Paket	54,982,400	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,040,400	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Paket	17,050,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	16,829,000	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	2 Laporan	33,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan	297 Unit		0 Unit	103 Unit	35,460,700						103 Unit	253,231,000	
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	35,460,700	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	12 Unit	253,231,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY	20 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	1,360,594,600						20 Laporan	1,437,639,292	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,500,000	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Laporan	6,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	382,067,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Laporan	361,233,400	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	972,027,600	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Laporan	1,069,905,892	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	83 Unit		0 Unit	84 Unit	258,131,400						84 Unit	584,002,100	
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	82,275,700	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	10 Unit	99,114,400	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	4,150,800	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	2 Unit	16,500,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	32,904,900	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	17 Unit	62,157,700	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,000,000	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Unit	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				52 Unit	58,800,000	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	52 Unit	76,230,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya	4 Unit		0 Unit	4 Unit	3,650,000,000						4 Unit	3,630,000,000	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,650,000,000	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Balai Pelatihan Kesehatan	1 Unit Kerja	3,630,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %		0 %	100 %	71,123,400						100 %	670,873,030	
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan	500 Orang		0 Orang	630 Orang	71,123,400						630 Orang	670,873,030	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				310 Orang	71,123,400	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	310 Orang	670,873,030	DINAS KESEHATAN
TOTAL							144,540,212,508							206,087,175,357	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02						61,421,260,194						67,932,124,450						
1	02	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	01				89,36 Nilai	0 Nilai	88,91 Nilai	61,421,260,194				88,91 Nilai	66,664,869,600					
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Laporan	26 Laporan	39,932,340,494			26 Laporan	46,064,969,600				
1	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			321 Orang/ Bulan	39,932,340,494	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	RS Jiwa Grhasia	321 Orang/ Bulan	46,064,969,600	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya	Unit		Unit	4 Unit	21,488,919,700					4 Unit	20,599,900,000	
1	02	01	1.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	21,488,919,700	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	RS Jiwa Grhasia dan masyarakat	1 Unit Kerja	20,599,900,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL											61,421,260,194						67,932,124,450		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						125,105,387,083						50,221,944,563		
1	02	01													
1	02	01													
1	02	01	1.02												
1	02	01	1.02	01											
1	02	01	1.10												
1	02	01	1.10	01											
1	02	02													
1	02	02	1.01												
1	02	02	1.01	03											
1	02	02	1.01	22											
TOTAL								125,105,387,083						50,221,944,563	

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL**

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								353,508,110,740	
1	03	01													
1	03	01													
1	03	01	1.01												
1	03	01	1.01	01											
1	03	01	1.01	04											
1	03	01	1.01	07											
1	03	01	1.02												
1	03	01	1.02	01											
1	03	01	1.02	03											
1	03	01	1.02	05											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan Laporan Keuangan bulanan Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Triwulan				2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	75,050,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	84,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	92,440,000						100 %	101,684,000	
1 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pajak PBB				1 Tahun	700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Tahun	770,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	91,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Tahun	100,914,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	893,287,300						100 %	1,053,179,930	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik				34 jenis	40,654,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	34 jenis	44,719,400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Penataan Arsip Kertas				62 jenis 22 jenis 5 jenis	127,194,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	62 jenis 22 jenis 5 jenis	139,913,950	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bed Cover Belanja pengisian tabung gas Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Desinfektan Kran Air Solar Operasional Genset TBA				26 Buah 12 Kali 8 Unit 50 Jerigen 30 Buah 1 Tahun 15 Buah	46,551,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	26 Buah 12 Kali 8 Unit 50 Jerigen 30 Buah 1 Tahun 15 Buah	119,570,770	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Penggandaan				8 jenis 148313 Lembar 16190 Lembar	85,699,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	8 jenis 148313 Lembar 16190 Lembar	96,469,780	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengandaan Penataan Arsip								Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				DAYA MINERAL	
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Buku Bacaan Perpustakaan Surat Kabar/Majalah				66 Buku 2 SKH	17,665,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	66 Buku 2 SKH	19,431,830	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Rapat Penataan Arsip Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan				180 OS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3300 OS	575,522,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	180 OS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3300 OS	633,074,200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	153,800,100						100 %	1,357,180,110	
1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Meja Rias				13 Buah	39,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	13 Buah	42,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CCTV Komputer PC Laptop Pompa Air Printer Printer A3 Scanner				1 Paket 4 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit	114,800,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Paket 4 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit	126,280,110	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	3,965,718,000						100 %	4,359,801,600	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat menyurat				1 Tahun	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Tahun	5,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, Air				1 Tahun	1,073,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Tahun	1,180,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
															DAYA MINERAL
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Jasa Laundry Jasa Pembasmi Tikus Jasa Tenaga Kearsipan Pajak Sampah dan Retribusi Sampah Retribusi Pajak Daerah				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1440 OH 1 Tahun 1 Tahun	2,887,718,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1440 OH 1 Tahun 1 Tahun	3,174,001,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	2,469,552,500						100 %	2,716,507,750	
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD				87 Unit 87 Unit	1,148,802,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	87 Unit 87 Unit	1,263,682,750	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan alat-alat berat Pemeliharaan alat-alat kantor Pemeliharaan alat-alat komunikasi Pemeliharaan perlengkapan kantor				3 jenis 3 jenis 4 jenis 2 jenis	270,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	3 jenis 3 jenis 4 jenis 2 jenis	297,825,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY Pemeliharaan Wisma Kaliurang Penataan Jaringan Internet Rehab Gedung Bina Marga				1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas PUPESDM DIY	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1,155,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	liter/detik		liter/detik	572,51 liter/detik	77,029,360,000						572,51 liter/detik	77,481,593,000	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola	liter/detik		liter/detik	572,51 liter/detik	6,120,000,000						572,51 liter/detik	27,845,000,000	
1 03 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam				1 Titik 1 Titik	625,000,000	Kab. Sleman, Kalasan, Selomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat	1 Titik 1 Titik	11,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman									Sumber Daya Air di DIY				
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga				25 Unit 25 Unit 25 Unit	3,460,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	25 Unit 25 Unit 25 Unit	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA				2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,495,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 02 1.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga	500,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya	2 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA						Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Air di DIY				
1 03 02 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY				1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	1 Dokumen 1 Dokumen	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	%	%		12.51 %	20,909,360,000						12.51 %	49,636,593,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman Pembangunan Talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman Pembangunan Talud sungai Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Duku, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Mergangsan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo				3.11 KM 0.06 KM 0.55 KM 0.48 KM 0.5 KM 0.16 KM 0.15 KM 0.2 KM 0.2 KM 0.2 KM 0.16 KM 0.2 KM	3,186,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY, dan P3A / GP3A	3.11 KM 0.06 KM 0.55 KM 0.48 KM 0.5 KM 0.16 KM 0.15 KM 0.2 KM 0.2 KM 0.2 KM 0.16 KM 0.2 KM	21,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Pra Konsultasi Regional, Sinkronisasi				0 KM 1.6 KM 1.6 KM	5,077,173,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY, dan P3A / GP3A	0 KM 1.6 KM 1.6 KM	10,077,173,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dan Harmonisasi Pemantapan Rencana Kerja (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman													
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Di Sembuh Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY				511.77 KM 511.77 KM 0.2 KM 511.77 KM 511.77 KM	10,681,059,800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY, dan P3A / GP3A	511.77 KM 511.77 KM 0.2 KM 511.77 KM 511.77 KM	14,710,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY Pemeliharaan Berkala Bendung Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY				67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung	1,523,929,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY, dan P3A / GP3A	67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung	1,188,920,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 02 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY				41 DI 41 DI	440,698,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY, dan P3A / GP3A	41 DI 41 DI	660,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	17,9 %		0 %	14,78 %	200,000,000						14,78 %	17,600,000,000	
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	%		%	14,78 %	200,000,000						14,78 %	17,600,000,000	
1 03 03 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi DaerahPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY				0 Dokumen 1 rapergub	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	0 Dokumen 1 rapergub		DINAS PEKERJAAN UMUM, 0 PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	616.076 m3		0 m3	541.212 m3	79,493,500,000						541.212 m3	52,330,000,000	
1 03 04 1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%		%	100 %	79,493,500,000						100 %	52,330,000,000	
1 03 04 1.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan				0 Rumah Tangga 1 paket 3.5 Ha 1 dokumen	64,496,000,000	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	0 Rumah Tangga 1 paket 3.5 Ha 1 dokumen	50,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 04 1.01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan Tahap II				0 Unit 1 paket	14,997,500,000	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	0 Unit 1 paket	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan (Ha)	6,11 Ha		0 Ha	3,83 Ha	460,014,300						3,83 Ha	30,900,000,000	
1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani	6.11 ha		0 ha	3.83 ha	460,014,300						3.83 ha	30,900,000,000	
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo				1 Unit 1 unit	200,000,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	1 Unit 1 unit	30,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 06 1.01 06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan				2 Unit 2 Unit	260,014,300	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	2 Unit 2 Unit	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul													
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan	100 %		0 %	100 %	348,715,600					100 %	1,000,000,000		
1 03 08 1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	348,715,600					1 Dokumen 1 Dokumen	1,000,000,000		
1 03 08 1.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan banguna gedung negara (10 Bangunan) Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota) Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi)				0 Dokumen 1 dokumen 1 Paket 1 dokumen	348,715,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	0 Dokumen 1 dokumen 1 Paket 1 dokumen	650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan jalan	70,41 %		0 %	68,61 %	40,885,648,550					68,61 %	3,000,000,000		
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahakan kondisi jalan	%		%	68.61 %	40,885,648,550					68.61 %	3,000,000,000		
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian- bagian jalan				50 dokumen	30,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Pegguna jalan	50 dokumen		DINAS PEKERJAAN UMUM, 0 PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS) Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS)				1 dokumen 1 dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat Pengguna jalan	1 dokumen 1 dokumen	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Denggung - Wonorejo Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)				0.5 km 1.35 km	13,376,695,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat Pengguna jalan	0.5 km 1.35 km		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dipertahankannya kondisi mantap jalan Provinsi di Kabupaten Bantul: 19 ruas, sepanjang 112,525 Km dari 156,525 Km (71,90%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul (1 Paket) Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 36 ruas, sepanjang 205,725 Km dari 292,615 Km (70,30%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul (1 Paket) Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 23 ruas, sepanjang 123,15 Km dari 175,14 Km (70,32%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo (1 Paket)				71.9 % 70.32 % 70.32 % 81.58 % 760450 M 760451 m	24,531,850,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat Pengguna jalan	71.9 % 70.32 % 70.32 % 81.58 % 760450 M 760451 m	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dipertahankannya kondisi mantap jalan Provinsi di Kabupaten Sleman: 15 ruas, sepanjang 94,895 Km dari 116,32 Km (81,58%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman (1 Paket) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Sec760450ara Rutin Pemeliharaan rutin jalan: terpeliharanya jalan provinsi sepanjang													
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul: 61 buah, sepanjang 1.305,91 m dari 1.674,81 m (77,97%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul (1 Paket) Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 55 buah, sepanjang 698,7 m dari 833,30 m (83,84%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul (1 Paket) Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 77 Buah, sepanjang 1.570 m dari 2.335,50 m (67%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo (1 Paket) Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Sleman: 56 buah, sepanjang 640,70 m dari 919,50 m (69,67%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di				77.97 % 83.84 % 67 % 5757.66 M	2,147,103,550	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat Pengguna jalan	77.97 % 83.84 % 67 % 5757.66 M	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kabupaten Sleman (1 Paket) Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin													
1 03 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	%	%		100 %	151,276,051,000						100 %	95,400,000,000	
1 03 13 5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tahun		Tahun	1 Tahun	151,276,051,000						1 Tahun	95,400,000,000	
1 03 13 5.02 01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Penyusunan DED, Interior dan Rencana Content Jogja Planning Gallery Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) di Jogja Planning Gallery				2 dokumen 0 Dokumen 1 Tahun 1 dokumen 1 dokumen	5,057,500,000	Dana Keistimewaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan dan Pengelola Keistimewaan DIY	2 dokumen 0 Dokumen 1 Tahun 1 dokumen 1 dokumen	60,000,000,000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 13 5.02 02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Pelaksanaan Pengadaan Tanah JLS Simpang Bundaran Planjan (Segmen Planjan - Kemandang) Pengamanan Aset Tanah JLS di Bantul Pengamanan Aset Tanah JLS di Gunungkidul Pengamanan Aset Tanah JLS di Kulon Progo Proses Pensertifikatan JLS di Kulon Progo				26412 m2 100 patok 400 patok 250 patok 1 ls	21,451,732,000	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Instansi Pemangku Kebijakan dan Pengelola Keistimewaan DIY	26412 m2 100 patok 400 patok 250 patok 1 ls		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 13 5.02 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 3 Penyediaan air bersih dari air tanah dalam Penyediaan air bersih dari air tanah dalam Penyediaan air bersih dari air tanah dalam				1.85 KM 0.98 KM 1 paket dokumen SED 15 titik sumur bor 150 titik sumur resapan	114,910,387,000	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan dan Pengelola Keistimewaan DIY	1.85 KM 0.98 KM 1 paket dokumen SED 15 titik sumur bor 150 titik sumur resapan		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 13 5.02 04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Pembangunan Jembatan Tejogan Penyediaan air bersih dari air tanah dalam Target Penyediaan air bersih dari air tanah dalam Target				3 m 10 titik sumur bor 100 titik sumur resapan	6,819,124,000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Instansi Pemangku Kebijakan dan Pengelola Keistimewaan DIY	3 m 10 titik sumur bor 100 titik sumur resapan		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 13 5.02 07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Pengelolaan Bangunan Edukasi dan RTH di Embung Langensari Rehabilitasi Gedung Edukasi dan RTH di Embung Langensari				1 tahun 1 paket	350,000,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Keistimewaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Instansi Pemangku Kebijakan dan Pengelola Keistimewaan DIY	1 tahun 1 paket	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 13 5.02 11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermowates Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah Dalam				0 Dokumen 5 titik	2,687,308,000		Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Instansi Pemangku Kebijakan dan Pengelola Keistimewaan DIY	0 Dokumen 5 titik		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					114,199,500,000							109,814,000,000	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	100 %		0 %	100 %	484,500,000						100 %	5,127,000,000	
1 04 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	%		%	20 %	135,000,000						20 %	3,675,000,000	
1 04 02 1.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen Pendataan perumahan yang terkena relokasi program pemerintah				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	1 Dokumen	2,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 04 02 1.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program				0 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	0 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Provinsi yang Terverifikasi Pengembangan Sistem Informasi Perumahan						Kelurahan		Pelayanan Dasar					
1 04 02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit		Unit	20 Unit	349,500,000					20 Unit	1,430,000,000		
1 04 02 1.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				0 Unit Rumah 3 Unit	349,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	0 Unit Rumah 3 Unit	715,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan kumuh	100 %		0 %	25 %	18,115,000,000						25 %	71,937,000,000	
1 04 03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penanganan Rumah Tidak layak Huni	%		%	58.27 %	75,000,000						58.27 %	187,000,000	
1 04 03 1.01 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP				0 Laporan 1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	0 Laporan 1 Laporan	187,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penanganan Rumah Tidak layak Huni	%		%	58.27 %	18,040,000,000						58.27 %	71,750,000,000	
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	01.Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Gunungkidul 88 unit: a.Kap.Gedangsari: 3 unit b.Kap.Karangmojo: 27 unit c.Kap.Nglipar: 3 unit d.Kap.Paliyan: 18 unit e.Kap.Panggang: 1 unit f.Kap.Patuk: 1 unit g.Kap.Playern: 5 unit h.Kap.Ponjong: 8 unit i.Kap.Rongkop: 10 unit k.Kap.Semanu: 4 unit l.Kap.Semin: 1 unit l.Kap.Tepus: 5 unit m.Kap.Wonosari: 2 unit				88 unit 165 unit 138 unit 178 unit 153 unit 2 unit 16 unit 9 unit 39 unit 6 unit 0 Unit Rumah	18,040,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	88 unit 165 unit 138 unit 178 unit 153 unit 2 unit 16 unit 9 unit 39 unit 6 unit 0 Unit Rumah	71,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		02. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Kulon Progo 165 unit: a. Kap. Galur: 10 unit b. Kap. Girimulyo: 10 unit c. Kap. Kalibawang: 8 unit d. Kap. Kokap: 33 unit e. Kap. Lendah: 12 unit f. Kap. Nanggulan: 10 unit g. Kap. Panjatan: 5 unit h. Kap. Pengasih: 46 unit i. Kap. Samigaluh: 8 unit j. Kap. Sentolo: 16 unit k. Kap. Temon: 4 unit l. Kap. Wates: 3 unit 03. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Sleman 138 unit: a. Kap. Berbah: 7 unit b. Kap. Cangkringan: 4 unit c. Kap. Depok: 4 unit d. Kap. Gamping: 28 unit e. Kap. Godean: 2 unit f. Kap. Kalasan: 15 unit g. Kap. Minggir: 6 unit h. Kap. Mlati: 3 unit i. Kap. Moyudan: 10 unit j. Kap. Ngaglik: 9 unit k. Kap. Pakem: 17 unit l. Kap. Prambanan: 8 unit m. Kap. Seyegan: 15 unit n. Kap. Sleman: 2 unit o. Kap. Turi: 8 unit 04. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Bantul 178 unit: a. Kap. Bangliwuro: 6 unit b. Kap. Bantul: 3 unit c. Kap. Imogiri: 1 unit d. Kap. Kasihan: 12 unit e. Kap. Kretek: 4 unit f. Kap. Pajangan: 26 unit g. Kap. Pandak: 35 unit h. Kap. Sanden: 40 unit i. Kap. Jetis: 3 unit j. Kap. Sedayu: 11 unit k. Kap. Sewon: 23 unit l. Kap. Srandakan: 14 unit 05. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH Kota Yogyakarta 153 unit: a. Kem. Danurejan: 9 unit b. Kem. Gedongtengen: 4 unit c. Kem. Gondokusuman:													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		18 unit d.Kem.Jetis: 15 unit e.Kem.Kotagede: 8 unit f.Kem.Mantrijeron: 16 unit g.Kem.Mergangsan: 29 unit h.Kem.Pakualaman: 1 unit i.Kem.Umbulharjo: 48 unit j.Kem.Wirobrajan: 5 unit 06.Terlaksananya Pembangunan Baru RLH Kab. Gunungkidul 2 unit: a.Kap.Purwosari: 2 unit 07.Terlaksananya Pembangunan Baru RLH Kab. Kulon Progo 16 unit: a.Kap.Galur: 1 unit b.Kap.Kokap: 2 unit c.Kap.Panjatan: 2 unit d.Kap.Pengasih: 2 unit e.Kap.Samigaluh: 1 unit f.Kap.Sentolo: 7 unit g.Kap.Wates: 1 unit 08.Terlaksananya Pembangunan Baru RLH Kab. Sleman 9 unit: a.Kap.Berbah: 3 unit b.Kap.Kalasan: 1 unit c.Kap.Mlati: 2 unit d.Kap.Ngaglik: 1 unit e.Kap.Seyegan: 1 unit f.Kap.Turi: 1 unit 09.Terlaksananya Pembangunan Baru RLH Kab. Bantul 39 unit: a.Kap.Bambanglipuro: 11 unit b.Kap.Dlingo: 1 unit c.Kap.Imogiri: 1 unit d.Kap.Kasihani: 1 unit e.Kap.Kretek: 3 unit f.Kap.Pajangan: 3 unit g.Kap.Pandak: 3 unit h.Kap.Pleret : 1 unit i.Kap.Pundong: 3 unit j.Kap.Sanden: 2 unit k.Kap.Sewon: 3 unit l.Kap.Srandakan: 7 unit 10.Terlaksananya Pembangunan Baru RLH Kota Yogyakarta 6 unit: a.Kem.Gedongtengen: 1 unit b.Kem.Kotagede: 1 unit c.Kem.Kraton: 1 unit d.Kem.Umbulharjo: 3													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		unit Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki													
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	640 Lokasi		0 Lokasi	160 Lokasi	95,600,000,000						160 Lokasi	32,750,000,000	
1 04 05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU Layak di Kawasan Permukiman	Lokasi		Lokasi	160 Lokasi	95,600,000,000						160 Lokasi	32,750,000,000	
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	DED PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	01. Bantuan PSU Kab. Sleman 181 ttk, 54 ttk lampu :a.Berbah:5 ttk,2 ttk lampu b.Cangkringan:4 ttk,2 ttk lampu c.Depok:19 ttk d.Gamping:33 ttk,5 ttk lampu e.Godean:16 ttk f.Kalasan:3 ttk ,1 ttk lampu g.Minggir:7 ttk,2 ttk lampu h.Mlati:17 ttk i.Moyudan:8 ttk ,3 ttk lampu j.Ngaglik:23 ttk,9 ttk lampu k.Ngemplak:4 ttk,2 ttk lampu l.Pakem:7 ttk m.Prambanan:4 ttk,4 ttk lampu n Seyegan:7 ttk, 2 ttk lampu o.Sleman:4 ttk lampu p.Tempel:11 ttk,2 ttk lampu q.Turi:2 ttk 02. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul 172 ttk, 13 ttk lampu :a. Gedangsari: 20 ttk b. Girisubo: 7 ttk c. Karangmojo: 12 ttk,1 ttk lampu d. Ngawen: 7 ttk e. Nglipar: 11 ttk f. Paliyan: 5 ttk g. Panggang: 1 ttk h. Patuk: 4 ttk , 1 ttk lampu i. Playen: 39 ttk,1 ttk lampu j.Ponjong: 6 ttk, 1 ttk				1 titik lampu 13 titik lampu 21 titik lampu 54 titik lampu 165 titik lampu 181 titik lampu 172 titik lampu 76 titik lampu 34 titik lampu 14 titik lampu 0 Lokasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	1 titik lampu 13 titik lampu 21 titik lampu 54 titik lampu 165 titik lampu 181 titik lampu 172 titik lampu 76 titik lampu 34 titik lampu 14 titik lampu 0 Lokasi	32,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		lampu k. Purwosari: 3 ttk l. Rongkop: 8 ttk m. Saptosari: 7 ttk n. Semanu: 7 ttk o. Semih: 13 ttk p. Tepus: 3 ttk q. Wonosari: 18 ttk r. Tanjungsari: 1 ttk 03. Bantuan PSU Kab. Bantul 76 ttk, 165 ttk a. Bambanglipuro: 1 ttk b. Banguntapan: 8 ttk c. Bantul: 4 ttk, 10 ttk d. Dlingo: 7 ttk, 10 ttk e. Imogiri: 5 ttk, 12 ttk f. Jetis: 2 ttk, 12 ttk g. Kasihan: 4 ttk, 15 ttk h. Kretek: 5 ttk, 3 ttk i. Pajangan: 3 ttk, 8 ttk j. Pandak: 3 ttk, 13 ttk k. Piyungan: 9 ttk, 7 ttk l. Pleret: 4 ttk, 11 ttk m. Pundong: 5 ttk, 16 ttk n. Sanden: 2 ttk, 8 ttk o. Sedayu: 10 ttk, 12 ttk p. Sewon: 10 ttk q. Srandakan: 4 ttk, 4 ttk 04. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo 34 ttk, 21 ttk a. Girimulyo: 5 ttk, 2 ttk b. Kalibawang: 2 ttk c. Kokap: 7 ttk, 2 ttk d. Lendah: 2 ttk, 6 ttk e. Nanggulan: 1 ttk, 1 ttk f. Panjatan: 4 ttk, 2 ttk g. Pengasih: 3 ttk, 4 ttk h. Samigaluh: 1 ttk, 1 ttk i. Sentolo: 3 ttk, 1 ttk j. Temon: 1 ttk k. Wates: 5 ttk, 2 ttk 05. Bantuan PSU Kota. Yogyakarta 14 ttk a. Gondokusuman: 4 ttk b. Jetis: 1 ttk c. Kotagede: 3 ttk d. Tegalrejo: 3 ttk e. Umbulharjo: 4 ttk Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman													
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						10,400,000,000						22,700,000,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase peningkatan Budaya	%		%	20 %	10,400,000,000					20 %	22,700,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	tak benda yang dilestarikan													
2 22 08 5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Lumbang Mataraman	Kabupaten/kota		Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	10,400,000,000						5 Kabupaten/Kota	18,900,000,000	
2 22 08 5.08 01	Pengembangan Lumbang Mataraman	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Irigasi Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbang Mataraman Peningkatan jaringan irigasi tersier Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian				1 Tahun 1 Laporan 60 Lokasi 5 Dokumen	10,400,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik	Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat	1 Tahun 1 Laporan 60 Lokasi 5 Dokumen	14,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							1,762,696,700						11,155,000,000	
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Terlaksananya upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui pengendalian rerata penurunan Muka Air Tanah <20 %	<20 %		0 %	<20 %	594,771,000						<20 %	2,505,000,000	
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terciptanya rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman	%		%	20 %	250,000,000						20 %	1,950,000,000	
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam				0 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	Pengguna air tanah di DIY	0 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Laporan	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Daerah Provinsi Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah													
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Peningkatan Pelaksanaan Pengusahaan Air Tanah yang Sesuai Ketentuan	Laporan %		Laporan %	1 Laporan 40.49 %	344,771,000					1 Laporan 40.49 %	555,000,000		
3 29 02 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY				2 laporan	101,457,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	Pengguna Air Tanah untuk Keperluan Usaha di DIY	2 laporan	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 02 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah				0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	Pengguna Air Tanah untuk Keperluan Usaha di DIY	0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY Pengelolaan Aplikasi SIPATA				2 laporan 1 aplikasi	223,313,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	Pengguna Air Tanah untuk Keperluan Usaha di DIY	2 laporan 1 aplikasi	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	% %		% %	40 % 7,84 %	640,486,500						40 % 7,84 %	4,900,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik													
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	hektar %		hektar %	20 hektar 40 %	93,737,000					20 hektar 40 %	900,000,000		
3 29 03 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY				2 laporan	93,737,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	Masyarakat Umum, Pelaku pengusahaan pertambangan, Pemerintah Daerah	2 laporan	900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Penambahan capaian luasan izin usaha pertambangan sesuai ketentuan Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	hektar %		hektar %	19 hektar 40 %	499,433,500					19 hektar 40 %	1,450,000,000		
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1				4 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menjaga daya dukung lingkungan	Masyarakat Umum, Pelaku pengusahaan pertambangan, Pemerintah Daerah	4 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	sampai dengan 12 Mil Laut	(Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah izin Usaha Pertambangan di DIY Pengelolaan Aplikasi SIPBANG				2 laporan 2 laporan 1 aplikasi	249,433,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menjaga daya dukung lingkungan	Masyarakat Umum, Pelaku pengusahaan pertambangan , Pemerintah Daerah	2 laporan 2 laporan 1 aplikasi	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	%		%	40 %	47,316,000						40 %	100,000,000	
3 29 03 1.07 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY				2 laporan 2 laporan	47,316,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menjaga daya dukung lingkungan	Masyarakat Umum, Pelaku Usaha Pertambangan , Pemerintah Daerah	2 laporan 2 laporan	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan Terpantaunya fungsi pembangkit Energi Baru Terbarukan untuk mendukung konservasi energi	52424 TOE %		0 TOE %	2000 TOE 21.80 %	119,040,000						2000 TOE 21.80 %	1,075,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan	% TOE		% TOE	21.8 % 1000 TOE	119,040,000						21.8 % 1000 TOE	1,075,000,000	
3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY				2 laporan	119,040,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	Potensi Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	2 laporan	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	SR %		SR %	14448 SR 37.73 %	408,399,200						14448 SR 37.73 %	2,675,000,000	
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 37.73 %	141,599,200						1 Dokumen 37.73 %	675,000,000	
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota				0 1 dokumen 1 dokumen	41,599,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penurunan kemiskinan	Pengguna dan Pengusaha Ketenagalistrikan di DIY	0 1 dokumen 1 dokumen	75,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota													
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitasi Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS				2 laporan 1 aplikasi	100,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penurunan kemiskinan	Pengguna dan Pengusaha Ketenagalistrikan di DIY	2 laporan 1 aplikasi	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	SR		SR	600 SR	266,800,000						600 SR	2,000,000,000	
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga di DIY)				0 Unit 116 Unit	266,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	0	0 Unit 116 Unit	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2,848,635,000						12,659,893,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,47 Nilai		0 Nilai	94,32 Nilai	1,528,635,000					94,32 Nilai	3,794,893,000		
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	31,680,000					100 %	34,584,000		
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 tahun 0 Dokumen	31,680,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	1 tahun 0 Dokumen	34,584,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	11,400,000					100 %	13,200,000		
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa Pengelola Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun 0 Laporan	11,400,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Tahun 0 Laporan	13,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	167,503,600					100 %	200,656,000		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 jenis 0 Paket	20,699,900	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	13 jenis 0 Paket	22,770,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Penataan Arsip Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49 Jenis 15 Jenis 0 Paket	31,291,200	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	49 Jenis 15 Jenis 0 Paket	34,420,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Handsanitizer Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sabun Cuci Tangan				12 kali 7 kali 75 buah 0 Paket 30 buah	9,381,400	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	12 kali 7 kali 75 buah 0 Paket 30 buah	17,785,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan				9 Jenis 0 Paket 35000 Lembar 14140 Lembar	19,968,100	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	9 Jenis 0 Paket 35000 Lembar 14140 Lembar	22,443,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengandaan Penataan Arsip													
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah				0 Dokumen 2 SKH	2,400,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembang an Jasa Konstruksi	0 Dokumen 2 SKH	2,640,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Rapat Penataan Arsip Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUPESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUPESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan Baik Makan dan Minuman Rapat				143 os 0 Laporan 1 tahun 1 tahun 500 os	83,763,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembang an Jasa Konstruksi	143 os 0 Laporan 1 tahun 1 tahun 500 os	100,598,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	36,873,400						100 %	2,116,973,000	
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Exhaust fan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Komputer Laptop Pompa Air Printer				2 unit 0 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	36,873,400	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembang an Jasa Konstruksi	2 unit 0 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	690,973,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	868,329,300						100 %	975,340,000	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Surat 0 Laporan	2,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembang an Jasa Konstruksi	1000 Surat 0 Laporan	2,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun 0 Laporan	174,342,500	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembang an Jasa Konstruksi	1 Tahun 0 Laporan	192,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Jasa Pembasmi Tikus Jasa Tenaga Kerja Kearsipan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Retribusi Sampah				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 480 OH 0 Laporan 1 Tahun	691,986,800	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 480 OH 0 Laporan 1 Tahun	780,240,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	412,848,700						100 %	454,140,000	
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional SKPD				6 unit 0 Unit 6 unit	160,071,200	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	6 unit 0 Unit 6 unit	176,079,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat-Alat Berat Pemeliharaan Perlengkapan Kantor				0 Unit 2 Jenis 4 Jenis	52,777,500	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	0 Unit 2 Jenis 4 Jenis	58,061,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				0 Unit 1 Gedung	200,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	0 Unit 1 Gedung	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	100 %		0 %	67,88 %	1,320,000,000						67,88 %	8,865,000,000	
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	Persen		Persen	100 Persen	1,070,000,000						100 Persen	7,462,500,000	
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi				0 Orang 125 orang	70,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat jasa konstruksi	0 Orang 125 orang	247,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 11 1.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Akreditasi Laboratorium: Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Kalibrasi Alat Laboratorium Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Pemeliharaan Alat Laboratorium: Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium				1 akreditasi 800 orang 0 Orang 25 jenis 1 aplikasi 15 jenis 100 jenis	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat jasa konstruksi	1 akreditasi 800 orang 0 Orang 25 jenis 1 aplikasi 15 jenis 100 jenis	6,500,000,000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	%		%	63.48 %	250,000,000					63.48 %	1,402,500,000		
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				1 dokumen 0 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 dokumen 0 Dokumen	1,292,500,000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						17,898,774,450						42,982,500,288		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,47 Nilai		0 Nilai	94,32 Nilai	5,457,174,450					94,32 Nilai	6,291,224,838		
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	43,320,000					100 %	44,580,000		
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun 12 Dokumen	43,320,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	1 Tahun 12 Dokumen	44,580,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	16,800,000					100 %	13,200,000		
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa Pengelola Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bulan 0 Laporan	16,800,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	12 bulan 0 Laporan	13,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	173,327,700					100 %	173,328,000		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 jenis 0 Paket 19 Paket	45,122,800	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	19 jenis 0 Paket 19 Paket	45,123,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor				74 jenis 2 Paket 2 Jenis	43,243,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	74 jenis 2 Paket 2 Jenis	43,243,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Serbuk Pemadam Kebakaran Hand sanitizer Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sabun antiseptic				15 unit 6 unit 7 unit 22 botol 5 Paket 33 buah	11,751,900	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	15 unit 6 unit 7 unit 22 botol 5 Paket 33 buah	11,752,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan				5 jenis 5 Paket 40843 lembar	27,366,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	5 jenis 5 Paket 40843 lembar	27,366,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah				24 Dokumen 2 SKH	2,580,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	24 Dokumen 2 SKH	2,580,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi dan koordinasi Dinas PUP&ESDM dalam Daerah Terlaksana dengan Baik Konsultasi dan koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan Baik Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan Perjalanan Dinas Tetap				0 Laporan 41 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 710 OS 27 OH	43,264,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	0 Laporan 41 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 710 OS 27 OH	43,264,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	62,844,900					100 %	108,437,000		
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 3				1 Unit 1 unit	35,000,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	1 Unit 1 unit	30,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan LCD Proyektor Mesin Pematong Rumpit Personal Computer Printer				4 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	27,844,900	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	4 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	78,437,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	% %		% %	100 % 100 %	4,480,387,200					100 % 100 %	5,471,184,838		
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Surat 12 Laporan	3,000,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	300 Surat 12 Laporan	3,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3,527,042,400	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	12 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4,635,999,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Penyediaan Jasa Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Jasa Sumber Daya Air Penyediaan Jasa Tenaga Listrik													
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kearsipan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun 1 Tahun 240 OH 12 Laporan	950,344,800	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	1 Tahun 1 Tahun 240 OH 12 Laporan	832,185,238	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	680,494,650					100 %	480,495,000		
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional SKPD				10 Unit 10 Unit 10 Unit	259,549,800	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	10 Unit 10 Unit 10 Unit	259,550,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat-alat kantor				38 Unit 4 jenis	20,944,850	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	38 Unit 4 jenis	20,945,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pagar Pengaman IPAL Sewon Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Gedung	400,000,000	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai PIALAM	0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Gedung	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	17,9 %		0 %	14,78 %	5,341,600,000					14,78 %	17,900,000,000			
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	%		%	14,78 %	5,341,600,000					14,78 %	17,900,000,000			
1 03 03 1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara Subsidi Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota				1 Unit 1 unit	5,341,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan kemiskinan	Masyarakat DIY	1 Unit 1 unit	16,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	37,39 %		0 %	35,39 %	7,100,000,000					35,39 %	18,791,275,450			
1 03 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	%		%	35,39 %	7,100,000,000					35,39 %	18,791,275,450			
1 03 05 1.01 04	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Penyusunan Dokumen AMDAL IPAL Sewon				0 Rumah Tangga 1 Paket	100,000,000		Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY	0 Rumah Tangga 1 Paket	10,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1 03 05 1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan (Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr) Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL (Kualitas Air dari Oulet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr) Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan(Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml)				0 Unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 70 unit 1 unit 2 km 324 km 1 tahun	7,000,000,000		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY	0 Unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 70 unit 1 unit 2 km 324 km 1 tahun	8,191,275,450	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform (Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100ml) Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki (Dengan standar PH berkisar 6-9) Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara (Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm) Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge (Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3) Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT (Kualitas Air Limbah Bebas B3)													
TOTAL							495,789,515,866							552,819,504,028	

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							17,227,231,708	21,298,729,000	
1	03	01													
1	03	01													
1	03	01	1.01												
1	03	01	1.01	01											
1	03	01	1.01	04											
1	03	01	1.01	07											
1	03	01	1.02												
1	03	01	1.02	01											
1	03	01	1.02	03											
1	03	01	1.02	05											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD				18 laporan	10,165,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	18 laporan	22,213,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	24,960,000						1 dokumen	27,456,000	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 laporan	24,960,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	2 laporan	27,456,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	5,520,000						1 dokumen	17,160,000	
1 03 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 dokumen	5,520,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 dokumen	17,160,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	186,282,500						5 dokumen	378,037,000	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan				1 Paket 15 jenis	15,775,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Paket 15 jenis	17,352,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	42,864,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	3 Paket	79,267,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih				1 Paket 1 Paket 12 jenis	9,034,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Paket 1 Paket 12 jenis	9,938,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				2 paket 2 Paket 12 bulan 20 jenis	34,372,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	2 paket 2 Paket 12 bulan 20 jenis	47,969,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 dokumen	9,408,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	3 dokumen	10,494,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	74,828,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	12 laporan	213,017,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	613,767,200						3 dokumen	682,678,000	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12,200,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Laporan	13,420,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	215,328,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Laporan	198,286,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				1 Laporan	386,239,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Laporan	470,972,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan													
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	543,629,750						3 dokumen	2,265,831,000	
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	265,073,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	15 Unit	291,584,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	106,207,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	10 Unit	116,897,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	172,348,750	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Unit	1,857,350,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang	dokumen		dokumen	24 dokumen	34,200,000						24 dokumen	438,681,000	
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi	dokumen		dokumen	5 dokumen	34,200,000						5 dokumen	438,681,000	
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	34,200,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab. Kota, Masyarakat	2 Dokumen	438,681,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	29 dokumen		0 dokumen	30 dokumen	6,661,193,000						30 dokumen	6,833,312,000	
1 03 13 5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten	dokumen		dokumen	10 dokumen	4,621,193,000						10 dokumen	5,083,312,000	
1 03 13 5.01 03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				2 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi		2 Dokumen	1,100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 13 5.01 05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				7 Dokumen	3,326,193,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi		7 Dokumen	3,658,812,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1 03 13 5.01 06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang				1 Laporan	295,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi		1 Laporan	324,500,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 13 5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,040,000,000						1 dokumen	1,750,000,000	
1 03 13 5.03 01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				6 Dokumen	2,040,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi	DPYR DIY, DPTK Kab/ Kota, Masyarakat	6 Dokumen	1,750,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						9,487,208,000						8,071,094,000		
2 10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	23,109,000						1 Dokumen	200,000,000	
2 10 03 1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	23,109,000						1 dokumen	200,000,000	
2 10 03 1.01 01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	23,109,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab / Kota, Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	27,315,000					1 Dokumen	100,000,000		
2 10 06 1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	27,315,000					1 dokumen	100,000,000		
2 10 06 1.01 02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	27,315,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemulihan ekonomi		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 10 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	dokumen		dokumen	38 dokumen	9,436,784,000					38 dokumen	7,771,094,000		
2 10 11 5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	dokumen		dokumen	27 dokumen	4,059,308,000					27 dokumen	3,691,094,000		
2 10 11 5.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				9 Dokumen	1,024,739,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab./ Kota, Masyarakat	9 Dokumen	850,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2 10 11 5.01 02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan				1 Dokumen	800,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab./ Kota, Masyarakat	1 Dokumen	1,034,324,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 10 11 5.01 04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, TanahKadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	212,720,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab./ Kota, Masyarakat	2 Dokumen	233,992,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2 10 11 5.01 05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				5 Dokumen	905,400,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab./ Kota, Masyarakat	5 Dokumen	502,458,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2 10 11 5.01 06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				4 Laporan	291,200,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab./ Kota, Masyarakat	4 Laporan	320,320,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2 10 11 5.01 07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan				8 Dokumen	825,249,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab./ Kota, Masyarakat	8 Dokumen	750,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 10 11 5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi	dokumen		dokumen	11 dokumen	4,577,476,000						11 dokumen	3,750,000,000	
2 10 11 5.02 01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				3 Dokumen	2,074,976,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab. /Kota, Masyarakat	3 Dokumen	2,250,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2 10 11 5.02 02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa				5 Berita Acara	2,502,500,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY, Kab. /Kota, Masyarakat	5 Berita Acara	1,500,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Menjamin Pemerataan					
2 10 11 5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	dokumen		dokumen	1 dokumen	800,000,000					1 dokumen	330,000,000		
2 10 11 5.03 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)				1 Unit	800,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan ekonomi	DPTR DIY	1 Unit	330,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
TOTAL							26,714,439,708						29,369,823,000		

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								27,981,518,209	
1	05	01											0 A	23,042,231,309	
1	05	01	1.01										100 %	71,500,000	
1	05	01	1.01	01									5 Dokumen	71,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02										100 %	19,916,705,257	
1	05	01	1.02	01									145 Orang/ Bulan	19,841,809,257	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	03									12 Dokumen	49,896,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	07									18 Laporan	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.03											12,540,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13,200,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	1 Laporan	12,540,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Peralatan Rumah Tangga; Barang Cetakan dan Penggandaan; Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis; Dukungan SPBE;	100 %		0 %	100 %	205,501,200					100 %	452,324,300		
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	25,369,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	30 Paket	30,473,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	180,132,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	12 Laporan	421,851,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		0 %	100 %	502,467,550					100 %	594,888,052		
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	151,167,550	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	4 Laporan	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	351,300,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	2 Laporan	374,888,052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi	100 %		0 %	100 %	665,257,500					100 %	1,994,273,700		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung; Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional; Pemeliharaan Mebel; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35,165,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	1 Unit	32,780,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	374,092,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	50 Unit	733,125,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	6,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	3 Unit	28,367,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	1 Unit	1,200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	%		%	75 %	3,172,051,100						75 %	4,939,286,900	
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Trantibum; Penindakan atas Gangguan Trantibum; Koordinasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Linmas; Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan Satlinmas; Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan; Pengadaan Sarpras trantibum; Penyusunan SOP Trantibum; Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda	100 %		0 %	100 %	2,423,233,800						100 %	3,755,702,300	
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui	Jumlah Kasus Gangguan				168 Kasus	2,018,988,000	Kab. Bantul, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Umum dan Pemda DIY	168 Kasus	2,503,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik					
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				895 Orang	369,996,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Singosaren Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Panggung, Girisekar Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Sleman, Gamping, Balecatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Umum dan Pemda DIY	895 Orang	1,082,502,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Sleman, Sleman, Pandowoharjo Kab. Sleman, Sleman, Trimulyo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan							
1 05 02 1.01 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				5 Dokumen	24,390,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Umum dan Pemda DIY	5 Dokumen	155,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	9,859,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Umum dan Pemda DIY	1 Laporan	14,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pergub	100 %	0 %	100 %		748,817,300					100 %	1,183,584,600		
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				38 Laporan	522,408,000	Kab. Kulon Progo, Temon, Wetan Kab. Kulon Progo, Wates, Bendungan Kab. Kulon Progo, Panjatan, Garongan Kab. Kulon Progo, Galur, Tirtorahayu Kab. Kulon Progo, Lendah, Bumirejo Kab. Kulon Progo, Sentolo, Teksono Kab. Kulon Progo, Sentolo, Salamrejo Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Jatimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Umum dan Pemda DIY	38 Laporan	639,290,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Donomulyo Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Gerbosari Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Banjaroyo Kab. Sleman, Godean, Sidoagung Kab. Sleman, Moyudan, Sumberahayu Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal Kab. Sleman, Depok, Condongcatur Kab. Sleman, Berbah, Sendangtirta Kab. Sleman, Pakem, Harjobinangun Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo,							

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun							
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				12 Laporan	226,409,300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Umum dan Pemda DIY	12 Laporan	544,294,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						15,147,362,200						15,400,000,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase nilai adat, seni dan tradisi yang sudah direvitalisasi	100 %		0 %	100 %	15,147,362,200						100 %	15,400,000,000	
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan Jagawarga	100 %		0 %	100 %	15,147,362,200						100 %	15,400,000,000	
2 22 08 5.09 16	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				4228 Orang	15,147,362,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan ekonomi	Satpol PP DIY, Pemda DIY dan Masyarakat Umum	4228 Orang	15,400,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL							34,219,939,016						43,381,518,209		

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							20,062,653,588		30,997,820,659					
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.12 Nilai		0 Nilai	86.82 Nilai	13,254,236,498			86.82 Nilai	14,342,103,159				
1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	137,340,900			100 %	235,968,600				
1	05	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	48,590,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	6 Dokumen	103,865,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	32,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD DIY	4 Dokumen	38,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	55,775,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	4 Laporan	94,103,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	10,415,938,358						12 Bulan	10,535,992,919	
1	05	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	10,362,148,758	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	110 Orang/ Bulan	10,457,388,519	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	12 Dokumen	65,100,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,374,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	1 Laporan	11,689,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan				14 Laporan	1,815,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	14 Laporan	1,815,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		/Semesteran SKPD													
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						22,500,000						0		
1 05 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						370,828,400						724,787,200		
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun						1 Tahun			
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				92 Paket	18,526,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	92 Paket	33,000,800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun						1 Tahun			
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Paket	35,984,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	75 Paket	41,078,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun						1 Tahun			
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	41,399,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	5 Paket	51,689,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun						1 Tahun			
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6,162,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	12 Dokumen	11,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun						1 Tahun			
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	268,756,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	12 Laporan	588,019,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56,557,000						205,334,900		
1 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Tahun						1 Tahun			
1 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	56,557,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	12 Unit	205,334,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY						1,555,121,000						1,620,560,400		
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY				1 Tahun						1 Tahun			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	670,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	12 Laporan	670,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	885,121,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	12 Laporan	950,560,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY 1	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	695,950,840						1 Tahun	1,019,459,140	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	331,027,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD DIY	2 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	113,482,740	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	34 Unit	592,649,440	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Jenis	251,440,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY	15 Jenis	426,809,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 %		0 %	100 %	6,721,150,090						100 %	16,568,450,500	
1 05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 %		0 %	100 %	1,667,629,000						100 %	2,087,094,000	
1 05 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				4 Dokumen	132,273,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Pentahelix	4 Dokumen	551,706,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				810 Orang	1,535,356,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Pentahelix	810 Orang	1,535,388,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %		0 %	100 %	3,388,667,090						100 %	11,297,707,200	
1 05 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi				2 Dokumen	56,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan, Pentahelix	2 Dokumen	56,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				1000 Orang	247,081,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan, Pentahelix	1000 Orang	1,767,176,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1 Dokumen	845,150,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan, Pentahelix	1 Dokumen	983,519,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana				76 Unit	1,092,546,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan, Pentahelix	76 Unit	2,727,010,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				60 Kawasan	465,623,790	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan, Pentahelix	60 Kawasan	4,979,481,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				32 Orang	682,265,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan, Pentahelix	32 Orang	784,518,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		0 %	100 %	1,188,425,500						100 %	2,271,769,400	
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana				1 Laporan	203,986,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan	1 Laporan	243,186,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				6080 Orang	984,438,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Relawan	6080 Orang	2,028,582,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %		0 %	100 %	476,428,500						100 %	911,879,900	
1 05 03 1.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	74,475,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Pentahelix	1 Dokumen	210,169,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.04 03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	92,542,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Pentahelix	1 Dokumen	392,300,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 1.04 07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	309,410,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Masyarakat, Pentahelix	2 Dokumen	309,410,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di Provinsi/Kab/Kota di DIY	100 %		0 %	100 %	87,267,000						100 %	87,267,000	
1 05 04 1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %		0 %	100 %	87,267,000						100 %	87,267,000	
1 05 04 1.02 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	87,267,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Pentahelix	1 Laporan	87,267,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KEBUDAYAAN					300,000,000						349,398,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek		0 Objek	7 Objek	300,000,000						7 Objek	349,398,000	
2 22 08 5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Warisan Budaya dan Cagar Budaya di BPBD DIY	100 %		0 %	100 %	300,000,000						100 %	349,398,000	
2 22 08 5.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				3 Objek	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BPBD DIY, Pentahelix	3 Objek	349,398,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
TOTAL							20,362,653,588							31,347,218,659	

DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						61,398,776,280						95,536,659,602		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	89,88 Nilai		0 Nilai	89,88 Nilai	46,029,790,700						89,88 Nilai	61,401,375,372	
1 06 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan	69,893,700						12 bulan	150,000,000	
1 06 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	31,693,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	2 Dokumen	85,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	2 Dokumen	30,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	22,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	2 Laporan	35,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan	40,950,787,347						12 bulan	44,979,260,172	
1 06 01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		247 Orang/ Bulan	40,832,419,347	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	247 Orang/ Bulan	44,869,520,172	DINAS SOSIAL
1 06 01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	61,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	12 Dokumen	61,440,000	DINAS SOSIAL
1 06 01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	9,669,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Laporan	12,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		12 Laporan	47,258,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	12 Laporan	36,300,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						Kelurahan							
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	22,500,000						12 bulan	22,500,000	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	22,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	6 Laporan	22,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	48,660,200						12 bulan	52,000,000	
1 06 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	48,660,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Dokumen	52,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	458,046,953						12 bulan	507,130,800	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Paket	42,350,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	61,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	4 Paket	67,875,500	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	31,413,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	3 Paket	39,494,400	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	27,954,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	6 Paket	32,450,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5,625,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	4 Dokumen	8,910,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	261,753,853	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	12 Laporan	267,265,900	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	31,094,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Dokumen	48,785,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	856,620,200						12 bulan	6,080,000,000	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	64,340,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Paket	180,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	248,919,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	45 Unit	400,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Unit	4,000,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	43,360,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	7 Unit	500,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	2,703,859,300						12 bulan	3,023,020,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	4,510,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	479,250,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	622,710,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,220,508,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	2,395,800,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	919,423,000						12 bulan	6,587,464,400	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				59 Unit	557,472,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	59 Unit	635,149,900	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				117 Unit	72,881,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	117 Unit	160,913,500	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	102,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Unit	5,577,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				190 Unit	187,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	190 Unit	214,401,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22.30 %		0 %	21.91 %	4,173,718,480						21.91 %	7,410,486,050	
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan	orang		orang	1933 orang	4,173,718,480						1933 orang	7,410,486,050	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)													
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				1598 Orang	2,303,203,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan kemiskinan	TKSK, Karang Taruna, PSM, WKSBM, Orsos/LKS, CSR LK3, Pensosmas, Pilar-Pilar Sosial	1598 Orang	1,403,625,300	DINAS SOSIAL
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				78 Orang	1,053,985,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan kemiskinan	TKSK, Karang Taruna, PSM, WKSBM, Orsos/LKS, CSR LK3, Pensosmas, Pilar-Pilar Sosial	78 Orang	1,866,348,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				15 Lembaga	816,529,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan kemiskinan	TKSK, Karang Taruna, PSM, WKSBM, Orsos/LKS, CSR LK3, Pensosmas, Pilar-Pilar Sosial	15 Lembaga	4,140,512,750	DINAS SOSIAL
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	1.19 %		0 %	1.19 %	20,000,000						1.19 %	51,700,000	
1 06 03 1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan	10 orang		0 orang	5 orang	20,000,000						5 orang	51,700,000	
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang yang menerima pendampingan dan dukungan psikososial				5 Orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang	5 Orang	51,700,000	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan,	20.99 %		0 %	21.61 %	7,129,510,800						21.61 %	16,073,539,030	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial													
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TeriAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial	orang		orang	100 orang	1,140,349,500					100 orang	3,245,828,160		
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	539,031,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	100 Orang	664,445,650	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	106,011,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	100 Orang	201,075,600	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	70,708,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	50 Orang	82,399,460	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	101,056,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	100 Orang	185,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	211,962,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	100 Orang	1,100,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	37,393,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	50 Orang	27,526,950	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	29,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	100 Orang	45,380,500	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				1 Dokumen	44,794,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas	1 Dokumen	940,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	343 orang		0 orang	343 orang	785,100,000						343 orang	2,931,674,170	
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				313 Orang	209,657,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	313 Orang	400,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				313 Orang	100,563,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	313 Orang	321,948,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				13 Orang	33,790,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	13 Orang	43,807,390	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				313 Orang	97,323,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	313 Orang	134,431,880	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				313 Orang	157,342,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	313 Orang	909,449,200	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				13 Orang	10,107,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	13 Orang	14,078,900	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				313 Orang	62,760,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	313 Orang	128,298,500	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 04 1.02 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	13 Orang	6,600,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	38,924,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	13 Orang	123,060,300	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	72,630,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, AMPK, ABH	1 Dokumen	850,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga keajaiberaan sosial	orang		orang	2575 orang	1,857,813,800						2575 orang	4,893,897,800	
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				1600 Orang	1,062,333,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Lanjut Usia terlantar	1600 Orang	2,761,774,400	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Lanjut Usia terlantar	100 Orang	33,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				75 Orang	231,190,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Lanjut Usia terlantar	75 Orang	418,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				1125 Orang	534,290,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Lanjut Usia terlantar	1125 Orang	1,411,399,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui	177 orang		0 orang	177 orang	3,346,247,500						177 orang	5,002,138,900	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.													
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				127 Orang	1,376,966,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	127 Orang	2,034,643,600	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				127 Orang	210,853,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	127 Orang	312,587,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				127 Orang	351,950,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	127 Orang	187,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				177 Orang	462,791,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	177 Orang	699,158,900	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				127 Orang	425,763,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	127 Orang	591,078,400	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				127 Orang	219,235,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	diskriminasi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	127 Orang	707,844,500	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				127 Orang	217,314,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	127 Orang	390,626,500	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Laporan Tindak Lanjut Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dokumen	81,372,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	2 Dokumen	79,200,000	DINAS SOSIAL
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak balita terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3.68 %			3.68 %	1,545,721,500						3.68 %	4,864,944,000	
1 06 05 1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.	31 orang			31 orang	153,407,600						31 orang	835,944,000	
1 06 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	137,827,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	Calon Orang Tua Asuh, LKSA	20 Orang	807,978,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 1.01 02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang				1 Orang	15,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	Calon Orang Tua Asuh, LKSA	1 Orang	27,966,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Berlaku Kewenangan Provinsi						Semua Kelurahan							
1 06 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.	1600 orang		0 orang	3315 orang	1,392,313,900					3315 orang	4,029,000,000		
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				1715 Keluarga	1,029,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Data PMKS, Fakir Miskin	1715 Keluarga	1,029,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				500 Keluarga	363,313,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Data PMKS, Fakir Miskin	500 Keluarga	3,000,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %		0 %	100 %	1,893,374,800					100 %	5,003,142,650		
1 06 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	1820 orang		0 orang	1735 orang	1,893,374,800					1735 orang	5,003,142,650		
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				250 Orang	257,477,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Relawan Sosial	250 Orang	649,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				50 Orang	65,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Relawan Sosial	50 Orang	132,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1 Unit	59,141,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Relawan Sosial	1 Unit	550,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				250 Orang	127,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Relawan Sosial	250 Orang	178,200,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1,384,400,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Relawan Sosial	1000 Orang	3,493,942,650	DINAS SOSIAL
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34.54 %		0 %	34.54 %	606,660,000						34.54 %	731,472,500	
1 06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	orang		orang	6509 orang	606,660,000						6509 orang	731,472,500	
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				21 Makam	606,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	TMPN, MPP, MPN	21 Makam	731,472,500	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3,801,474,500							4,000,000,000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	100 %		0 %	100 %	3,801,474,500						100 %	4,000,000,000	
2 22 08 5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelestarian nilai-nilai budaya serta terpeliharanya Monumen, Tetenger, Makam Pahlawan	100 %		0 %	100 %	3,801,474,500						100 %	4,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Nasional.													
2 22 08 5.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				5 Dokumen	3,801,474,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan kemiskinan	Desa wisata, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat	5 Dokumen	4,000,000,000	DINAS SOSIAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4,888,523,800						9,083,348,100		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88 Nilai		0 Nilai	89,88 Nilai	2,111,865,700						89,88 Nilai	4,626,560,200	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	18,480,000						12 bulan	21,600,000	
1 06 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	18,480,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0	48 Dokumen	21,600,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	11,400,000						12 bulan	11,400,000	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	11,400,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0	24 Laporan	11,400,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	242,586,100						12 bulan	320,485,300	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37,067,500	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	54,347,700	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29,097,400	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	2 Paket	32,959,300	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	88,980,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	2 Paket	32,143,100	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,707,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	98,173,900	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23,483,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	25,831,300	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3 Dokumen	1,861,200	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	3 Dokumen	3,920,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Undangan yang Disediakan													
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45,390,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	73,110,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	126,966,000						12 bulan	1,365,328,900	
1 06 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	126,966,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	6 Unit	661,965,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	1,491,767,600						12 bulan	1,903,674,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,300,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	1 Laporan	3,630,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	207,860,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	4 Laporan	310,790,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1,280,607,600	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Sosial DIY	4 Laporan	1,589,254,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	220,666,000						12 bulan	1,004,072,000	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	100,408,500	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	10 Unit	122,066,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				115 Unit	67,928,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0	115 Unit	85,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	13,000,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	4 Unit	477,330,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	39,329,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	6 Unit	289,676,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2,776,658,100						4,456,787,900		
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas TeriAntar di dalam Panti						2,776,658,100						4,456,787,900		
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				155 Orang	1,395,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	155 Orang	1,994,820,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				155 Orang	315,376,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	155 Orang	576,939,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang 185 Orang	49,848,500	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0 Orang 185 Orang	220,202,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah jenis alat bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				4 jenis 0 Orang	5,530,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	4 jenis 0 Orang	13,366,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				185 Orang	272,936,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	185 Orang	458,959,600	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				0 Orang 185 orang	691,882,100	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0 Orang 185 orang	1,126,364,800	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				185 Orang	13,215,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	185 Orang	14,536,500	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kewenangan Provinsi													
1 06 04 1.01 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				1 lokasi	300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	1 lokasi	600,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				185 Orang	31,800,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	185 Orang	49,800,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 lokasi	300,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	1 lokasi	600,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				1 lokasi	300,000	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	1 lokasi	600,000	DINAS SOSIAL	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3,470,979,300					6,384,427,620			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88 Nilai		0 Nilai	89,88 Nilai	1,416,523,600					89,88 Nilai	3,577,302,200		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	22,680,000					12 bulan	24,948,000		
1 06 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	22,680,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	12 Dokumen	24,948,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang perangkat daerah terlaksana dengan baik Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	% laporan		% laporan	100 % 12 laporan	9,600,000					100 % 12 laporan	10,560,000		
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9,600,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	12 Laporan	10,560,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	161,566,900					12 bulan	184,596,700		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,360,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1 Paket	20,196,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,486,600	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1 Paket	43,305,600	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	68,693,800	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1 Paket	74,567,900	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18,286,500	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1 Paket	22,173,200	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,600,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	12 Dokumen	3,960,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,140,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	12 Laporan	20,394,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	522,015,400						12 bulan	1,995,330,100	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	54,942,800	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1 Paket	230,265,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	125,104,600	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	24 Unit	343,900,300	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	305,660,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	2 Unit	1,381,226,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	36,308,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	13 Unit	39,938,800	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	570,674,000						12 bulan	627,741,400	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,580,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1 Laporan	1,738,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81,600,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	12 Laporan	89,760,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	487,494,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	12 Laporan	536,243,400	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	129,987,300						12 bulan	734,126,000	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	64,605,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	4 Unit	71,065,500	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	4,110,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	33 Unit	4,521,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	48,733,300	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	85 Unit	53,606,600	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	12,539,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	46 Unit	13,792,900	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Bermasalah Sosial,	20.99 %		0 %	21.61 %	2,054,455,700						21.61 %	2,807,125,420	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial													
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Balai dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	orang		orang	70 orang	2,054,455,700					70 orang	2,807,125,420		
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	638,750,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	843,150,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	264,212,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	313,999,400	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				70 Orang	26,720,400	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	51,349,980	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	44,255,700	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	58,516,700	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				70 Orang	414,252,600	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	720,333,240	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				70 Orang	71,476,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	84,199,500	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				70 Orang	582,669,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	719,604,600	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				70 Orang	1,200,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	2,640,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				70 Orang	2,520,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	70 Orang	2,772,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				30 Orang	6,000,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan	30 Orang	7,920,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Napza di dalam Panti			
1 06 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAFZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				12 Dokumen	2,400,000	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	12 Dokumen	2,640,000	DINAS SOSIAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7,374,143,100					16,377,725,720			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88 Nilai		0 Nilai	89,88 Nilai	2,304,329,100						89,88 Nilai	9,942,316,020	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	28,080,000						12 bulan	28,080,000	
1 06 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 bulan	28,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 bulan	28,080,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12,300,000						12 bulan	12,300,000	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium Pengelola Barang				12 bulan	12,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 bulan	12,300,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	179,105,700						12 bulan	278,576,800	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,949,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	28,181,800	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,465,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	44,204,600	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	131,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	5,317,400	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak Penyediaan Jilid Penyediaan Kartu Lebaran/Natal Penyediaan Penggandaan				5 buah 50 buah 150 buah 45000 lembar	9,890,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	5 buah 50 buah 150 buah 45000 lembar	18,554,500	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	21,960,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	1,842,810,200						12 bulan	1,713,317,220	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	195,335,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	187,210,540	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Pembayaran tagihan redistribusi sampah				12 bulan 12 bulan 2 lokasi 2 lokasi 12 bulan	1,647,475,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 bulan 12 bulan 2 lokasi 2 lokasi 12 bulan	1,523,806,680	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	242,033,200						12 bulan	5,327,931,200	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	162,725,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	15 Unit	105,511,560	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				56 Unit	79,308,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	56 Unit	309,128,600	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						5,069,814,000							6,435,409,700	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						4,087,050,700							5,231,609,900	
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				240 Orang	2,299,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		240 Orang	3,142,290,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				240 Orang	615,743,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		240 Orang	862,270,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Perengkapan Asrama dan Peralatan Kebersihan Asrama untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras				0 Orang 7 asrama	219,737,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 7 asrama	535,332,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				1 Orang	1,952,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		1 Orang	763,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				240 Orang	236,890,100	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		240 Orang	252,533,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras				240 orang	96,605,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		240 orang	266,297,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				240 Orang	530,532,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		240 Orang	68,794,900	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Fasilitasi Administrasi Kependudukan untuk PPKS Bina Laras Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				25 orang 0 Orang	1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		25 orang 0 Orang	4,800,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses Kelayakan Kesehatan Dasar untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				275 orang 0 Orang	45,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		275 orang 0 Orang	37,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.01 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan				0 Orang 94 orang	8,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		0 Orang 94 orang	20,330,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Penelusuran Keluarga untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras													
1 06 04 1.01 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Reunifikasi Keluarga untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras				0 Orang 26 orang	3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0 Orang 26 orang	3,600,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Honorarium Peserta CC Makanan dan Minuman Family Support System Makanan dan Minuman Rapat CC Makanan dan Minuman Rapat Instruktur Bimbingan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Peserta Family Support System				12 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen	27,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	12 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen	37,600,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						982,763,300						1,203,799,800		
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Permakanan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)				0 Orang 50 orang	408,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0 Orang 50 orang	591,180,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Sandang PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)				0 Orang 50 orang	99,812,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0 Orang 50 orang	171,960,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi Perlengkapan Asrama dan Peralatan Kebersihan Asrama				0 Orang 8 asrama	32,959,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	0 Orang 8 asrama	42,982,500	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Obat-obatan				0 Orang 24 Jenis	14,037,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		0 Orang 24 Jenis	18,575,300	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)				50 orang	111,733,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		50 orang	0	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari PPKS				50 orang	43,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		50 orang	30,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Bimbingan Ketrampilan Dasar PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)				50 orang	234,400,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		50 orang	293,482,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Fasilitasi Administrasi kependudukan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)				10 orang	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		10 orang	2,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar PPKS				50 orang	14,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		50 orang	9,800,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Pemulangan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)				8 orang	4,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		8 orang	18,600,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.04 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Honorarium Peserta CC Honorarium Peserta Forum Konsultasi Pelayanan Publik Honorarium Peserta Jejaring Masyarakat Honorarium Rapat Instruktur Rapat CC Rapat Forum Konsultasi Pelayanan Publik Rapat Instruktur Rapat Jejaring Masyarakat Rapat Koordinasi Pelayanan				12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen	17,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen	25,220,000	DINAS SOSIAL	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3,294,058,620							0	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,376,884,400							0	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							24,420,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 Bulan	24,420,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		12 Bulan	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11,400,000							0	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium Pengurus Barang				12 Bulan	11,400,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		12 Bulan	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	119,423,700						12 bulan	0	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Bahan Komputer Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kertas dan Cover				34 Jenis 1 Jenis 0 Paket 7 Jenis	32,093,100	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	34 Jenis 1 Jenis 0 Paket 7 Jenis	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Isi Tabung Gas LPG Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				180 Tabung 0 Paket 5 Jenis	53,710,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	180 Tabung 0 Paket 5 Jenis	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak Belanja Penggandaan Penjilidan				3 Jenis 35000 Lembar 70 Buah	12,620,600	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	3 Jenis 35000 Lembar 70 Buah	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah				0 Laporan 840 Orang 84 Orang	21,000,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	0 Laporan 840 Orang 84 Orang	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	888,576,800						12 bulan	0	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai				0 Laporan 350 Buah	3,500,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	0 Laporan 350 Buah	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik Tagihan Telepon				12 Bulan 12 Bulan	74,400,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Bulan 12 Bulan	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Retribusi Sampah Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	810,676,800	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan													
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	333,063,900						12 bulan	0	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM Pajak Kendaraan Bermotor Servis Kendaraan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	52,100,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rehab Gedung Praktek Keterampilan				0 Unit 1 Paket	237,593,300	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	0 Unit 1 Paket	0	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BBM Operasional Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				12 Bulan 0 Unit 15 Jenis	43,370,600	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Bulan 0 Unit 15 Jenis	0	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,917,174,220							0	
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						1,917,174,220							0	
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Bahan Makan Klien Honorarium Juru Masak				80 Orang 12 Bulan	761,360,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi		80 Orang 12 Bulan	0	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Perlengkapan Kebersihan PPKS Perlengkapan Pakaian PPKS				80 Orang 80 Orang	126,836,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi		80 Orang 80 Orang	0	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Perlengkapan Kebersihan Asrama				12 Bulan	61,420,100	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi		12 Bulan	0	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Perawatan & pengobatan lokal Tersedianya isi ulang oksigen Tersedianya obat- obatan P3K Tersedianya pelayanan tenaga kesehatan (dokter)				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	64,230,800	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	Tersedianya bimbingan fisik, mental, spiritual, & sosial				12 bulan	476,517,320	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	12 bulan	0	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Tersedianya perlengkapan kebersihan asrama Tersedianya perlengkapan kebersihan individu				12 bulan 12 bulan	45,360,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	12 bulan 12 bulan	0	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Tersedianya Bimbingan Keterampilan Dasar				12 bulan	370,950,000	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi	12 bulan	0	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.05 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya akses kelayanan pendidikan & kesehatan dasar				12 bulan	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	12 bulan	0	DINAS SOSIAL	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3,714,978,100						12,281,162,600		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88 Nilai	0 Nilai	89,88 Nilai		1,360,215,800					89,88 Nilai	8,991,461,000		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan		22,920,000					12 bulan	30,756,000		
1 06 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72 Dokumen	22,920,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	72 Dokumen	30,756,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9,600,000						14,520,000		
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9,600,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	12 Laporan	14,520,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan		193,024,000					12 bulan	454,958,000		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,611,300	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	1 Paket	39,430,000	DINAS SOSIAL	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				5 Paket	28,912,800	Kab. Gunungkidul,			Peningkatan kualitas layanan publik	5 Paket	61,927,000	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kantor yang Disediakan						Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	112,106,300	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	6 Paket	192,164,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24,304,800	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	41,766,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,788,800	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Dokumen	8,712,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12,300,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	92,259,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	55,823,700						12 bulan	1,646,308,000	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	48,823,700	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Unit	414,761,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	7 Unit	275,803,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan		0 bulan	12 bulan	830,526,100						12 bulan	990,941,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pemerintahan Daerah													
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	12 Laporan	1,100,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	112,648,500	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	36 Laporan	156,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	716,877,600	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	36 Laporan	833,841,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	248,322,000						12 bulan	5,853,978,000	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	196,988,800	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	11 Unit	249,421,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				44 Unit	51,333,200	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	0	44 Unit	140,772,000	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2,354,762,300							3,289,701,600	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						2,354,762,300							3,289,701,600	
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pembinaan koordinasi dan jejaring				125 anak 0 anak	9,030,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		125 anak 0 anak	90,220,900	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS dalam Balai yang mendapatkan permakanaan				0 Orang 115 anak	1,049,375,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan		0 Orang 115 anak	1,368,750,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS dalam Balai yang mendapatkan sandang				0 Orang 125 anak	245,931,400	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan		0 Orang 125 anak	315,710,800	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang terakses asrama				0 Orang 125 anak	170,282,600	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan		0 Orang 125 anak	235,151,300	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS dalam Balai yang mendapatkan obat-obatan dan pelayanan kesehatan				0 Orang 125 anak	74,800,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani					0 Orang 125 anak	84,400,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				0 Orang 120 anak	108,600,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan		0 Orang 120 anak	250,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 1.02 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				0 Orang 120 anak	29,412,800	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan		0 Orang 120 anak	63,374,100	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02 08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi administrasi kependudukan				0 Orang 5 anak	2,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan	0 Orang 5 anak	3,000,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar Jumlah PPKS yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dasar				0 Orang 125 anak 115 anak	628,010,500	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan	0 Orang 125 anak 115 anak	708,492,100	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.02 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan penelusuran keluarga				0 Orang 38 anak	4,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan	0 Orang 38 anak	37,035,400	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan reunifikasi keluarga				0 Orang 58 anak	4,800,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan	0 Orang 58 anak	18,891,800	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.02 12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti				0 Orang 6 anak	2,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani			Penurunan kemiskinan	0 Orang 6 anak	4,345,200	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 dokumen	26,520,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan kemiskinan		1 dokumen	109,830,000	DINAS SOSIAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5,064,123,700					8,797,275,195			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88 Nilai		0 Nilai	89,88 Nilai	1,987,432,200						89,88 Nilai	4,522,025,645	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	28,200,000						12 bulan	31,020,000	
1 06 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28,200,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan kemiskinan	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	12 Dokumen	31,020,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	11,400,000						12 bulan	12,540,000	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11,400,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	12 Laporan	12,540,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	222,280,400						12 bulan	299,859,360	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,765,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Paket	42,052,670	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	24,751,200	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	4 Paket	46,074,050	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	154,897,200	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Paket	162,309,400	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,977,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Paket	14,826,040	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,640,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	12 Dokumen	2,983,200	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11,250,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	12 Laporan	31,614,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	271,632,300						12 bulan	1,393,067,610	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	12,554,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan kemiskinan	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	3 Unit	103,501,420	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	259,077,800	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	11 Unit	631,317,390	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	1,134,568,800						12 bulan	1,283,892,280	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,100,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Laporan	4,290,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	140,610,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	36 Laporan	148,131,500	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	992,858,800	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	3 Laporan	1,131,470,780	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Pakembinangun							
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	319,350,700						12 bulan	1,501,646,395	
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	144,976,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	12 Unit	207,075,220	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	26,744,700	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	39 Unit	32,147,170	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	108,935,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	2 Unit	1,124,674,505	DINAS SOSIAL
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	38,695,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	6 Unit	65,595,000	DINAS SOSIAL
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	20.99 %		0 %	21.61 %	3,076,691,500						21.61 %	4,275,249,550	
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	orang		orang	228 orang	3,076,691,500						228 orang	4,275,249,550	
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				228 Orang	2,173,260,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan		228 Orang	2,430,329,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				228 Orang	365,566,800	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	680,910,670	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				228 Orang	16,746,200	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	153,919,700	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				228 Orang	28,511,500	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228 Orang	98,093,600	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				228 Orang	141,650,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	349,404,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				228 Orang	232,157,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	372,358,580	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				228 Orang	14,400,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	23,760,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				228 Orang	4,320,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	6,798,000	DINAS SOSIAL	
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				228 Orang	100,080,000	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan kemiskinan	228 Orang	159,676,000	DINAS SOSIAL	
TOTAL							93,007,057,400						152,460,598,837		

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							14,356,267,869		28,941,390,080				
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	87,82-90,01	Nilai	0 Nilai	87,82-90,01	Nilai	12,587,404,869			87,82-90,01	Nilai	20,008,905,000	
2	08	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	32 dokumen	0 dokumen	8 dokumen		67,654,300			8 dokumen		126,500,000		
2	08	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	3 Dokumen	49,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	08	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Dokumen	38,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	08	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	5 Laporan	38,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	08	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	80 laporan	0 laporan	20 laporan						20 laporan	15,088,000,000		
2	08	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			49 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2 DIY	49 Orang/ Bulan	15,000,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	08	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2 DIY	1 Dokumen	44,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	08	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2 DIY	1 Laporan	5,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	31,630,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2 DIY	18 Laporan	38,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan		0 laporan	1 laporan	13,200,000						1 laporan	16,500,000	
2 08 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13,200,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Laporan	16,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	20 laporan		0 laporan	7 laporan	526,317,750						7 laporan	591,200,000	
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,612,700	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Paket	35,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,969,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Paket	44,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	57,754,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	2 Paket	17,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,651,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Paket	50,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12,370,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	2 Dokumen	14,850,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	271,960,850	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	2 Laporan	330,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	90,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Dokumen	99,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor	4 laporan		0 laporan	1 laporan	747,349,200						1 laporan	716,500,000	
2 08 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	193,980,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	3 Paket	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	363,368,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	12 Unit	610,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				5 Unit	10,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	5 Unit	11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				45 Unit	180,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	45 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	12 laporan		0 laporan	3 laporan	1,991,290,950						3 laporan	2,075,700,000	
2 08 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,360,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Laporan	24,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	728,690,550	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Laporan	715,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Disediakan								Pelayanan Publik				ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,258,240,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Laporan	1,336,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	16 laporan		0 laporan	4 laporan	895,464,200						4 laporan	1,394,505,000	
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	69,337,900	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	1 Unit	385,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	308,127,900	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	18 Unit	358,505,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	73,898,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	45 Unit	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	380,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	2 Unit	484,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				107 Unit	64,100,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DP3AP2	107 Unit	112,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38.95 %		0 %	38.75 %	736,313,000						38.75 %	3,518,121,180	
2 08 02 1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	37 OPD		0 OPD	37 OPD	1,500,000						37 OPD	169,304,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	OPD Pemda DIY	1 Dokumen	155,208,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				37 Perangkat Daerah	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	OPD Pemda DIY	37 Perangkat Daerah	14,096,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi	16 persen		0 persen	10 persen	733,313,000						10 persen	3,018,816,680	
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	632,563,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, LSM, OPD pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa	1 Dokumen	2,010,617,730	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 02 1.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota				5 Organisasi	100,750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, LSM, OPD pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa	5 Organisasi	1,008,198,950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 02 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA	3 organisasi		0 organisasi	3 organisasi	1,500,000						3 organisasi	330,000,000	
2 08 02 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat				3 Lembaga	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, LSM, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha,	3 Lembaga	247,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Advokasi dan Pendampingan									media massa			PENDUDUK	
2 08 02 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				10 Orang	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	10 Orang	82,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani dengan baik	0 -		0 -	0 -	883,522,000					0 -	2,297,467,200		
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan yang tersusun	4 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	32,300,000					1 dokumen	89,498,000		
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	31,550,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	1 Dokumen	33,880,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				5 Perangkat Daerah	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	5 Perangkat Daerah	55,618,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 03 1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						850,472,000						2,033,869,200		
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				1 Orang	715,750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	1 Orang	1,611,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban				3 Layanan	134,722,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	3 Layanan	422,369,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kekerasan Kewenangan Provinsi							Anak			LSM			PENDUDUK
2 08 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi	3 organisasi		0 organisasi	3 organisasi	750,000						3 organisasi	174,100,000	
2 08 03 1.03 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, LSM, OPD pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, organisasi profesi, FPKK	1 Dokumen	174,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	mlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY	9 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	3,750,000						2 dokumen	1,102,934,000	
2 08 04 1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						1,500,000							451,734,000	
2 08 04 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, LSM, OPD Pemda, OPD Kab/Kota, OPD Vertikal, organisasi profesi.	34 Perangkat Daerah	83,180,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 04 1.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, LSM, OPD Pemda, OPD Kab/Kota, OPD Vertikal, organisasi profesi.	1 Dokumen	368,554,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 04 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga	4 lembaga		0 lembaga	1 lembaga	1,500,000						1 lembaga	385,000,000	
2 08 04 1.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				3 Lembaga	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Masyarakat, ormas, LSM, OPD pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, akademisi, organisasi profesi.	3 Lembaga	165,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				10 Orang	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Masyarakat, ormas, LSM, OPD pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, akademisi, organisasi profesi.	10 Orang	220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 04 1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi	1 lembaga		0 lembaga	1 lembaga	750,000						1 lembaga	266,200,000	
2 08 04 1.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Layanan	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, organisasi profesi	2 Layanan	266,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola	3 sistem		0 sistem	3 sistem	1,500,000						3 sistem	330,000,000	
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	1,500,000						2 dokumen	330,000,000	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	OPD Pemda DIY, OPD Kab/kota, LSM, OPD vertikal, layanan kesehatan	1 Dokumen	192,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 05 1.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	OPD Pemda DIY, OPD Kab/kota, LSM, OPD vertikal, kepolisian, layanan kesehatan	1 Dokumen	137,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah lembaga layanan yang dilakukan pembinaan	2824 lembaga		0 lembaga	50 lembaga	3,750,000						50 lembaga	433,892,500	
2 08 06 1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	5 Kab/kota		0 Kab/kota	5 Kab/kota	1,500,000						5 Kab/kota	363,221,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				16 Organisasi	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, OPD pemda, OPD Kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa.	16 Organisasi	331,721,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, OPD pemda, OPD Kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa.	1 Dokumen	31,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 06 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak	42 lembaga		0 lembaga	42 lembaga	2,250,000						42 lembaga	70,671,000	
2 08 06 1.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				10 Orang	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa	10 Orang	10,103,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 06 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa	1 Dokumen	34,510,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 06 1.02 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, ormas, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, dunia usaha, media massa	1 Dokumen	26,057,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah anak korban kekerasan yang di layani dengan baik dalam 1 tahun	- meningkat		0 meningkat	- meningkat	140,028,000						- meningkat	1,250,070,200	
2 08 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	4 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	45,400,000						1 dokumen	48,455,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	45,400,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	1 Dokumen	48,455,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						42,572,000						1,145,179,200		
2 08 07 1.02 01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan				1 Orang	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	1 Orang	825,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 07 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				3 Layanan	41,822,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	3 Layanan	320,179,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	4 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	52,056,000					1 dokumen	56,436,000		
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	52,056,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	1 Dokumen	56,436,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6,000,000						2,018,728,000		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CWR (Child Women Rate).	280 anak		0 anak	250 anak	1,500,000					250 anak	589,325,000		
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	1 forum		0 forum	1 forum	1,500,000					1 forum	589,325,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 02 1.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, LSM, ormas, SMA/MAN	1 Dokumen	314,325,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, LSM, ormas, SMA/MAN	1 Dokumen	275,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	0 meningkat		0 meningkat	0 meningkat	1,500,000						0 meningkat	855,250,000	
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun	4 paket		0 paket	1 paket	750,000						1 paket	539,000,000	
2 14 03 1.01 04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal	1 Dokumen	539,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 03 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 kali		0 kali	1 kali	750,000						1 kali	316,250,000	
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, LSM, OPD Kab/kota, OPD pemda, OPD vertikal, Puskesmas	5 Organisasi	316,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga	0.44 %		0 %	0.33 %	3,000,000						0.33 %	574,153,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	yang aktif													
2 14 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 jenis		0 jenis	5 jenis	3,000,000					5 jenis	574,153,000		
2 14 04 1.01 03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, BKL, BKR, BKB, PIK-R, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, LSM	1 Dokumen	330,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 04 1.01 04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				10 Orang	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, BKL, BKR, BKB, PIK-R, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, LSM	10 Orang	111,683,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 04 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				15 Organisasi	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, BKL, BKR, BKB, PIK-R, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, LSM	15 Organisasi	65,970,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 04 1.01 07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan				15 Organisasi	750,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat, BKL, BKR, BKB, PIK-R, OPD Pemda, OPD kab/kota, OPD vertikal, LSM	15 Organisasi	66,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KEBUDAYAAN					7,023,000,000							40,374,609,000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek		0 Objek	7 Objek	7,023,000,000						7 Objek	40,374,609,000	
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah hasil fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	7 objek		0 objek	7 objek	7,023,000,000						7 objek	40,374,609,000	
2 22 08 5.09 19	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya				250 Orang	7,023,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	masyarakat	250 Orang	40,374,609,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
TOTAL							21,385,267,869							71,334,727,080	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11						67,733,024,199						21,000,268,900		
2	11	01													
2	11	01													
2	11	01	1.01												
2	11	01	1.01	01											
2	11	01	1.01	04											
2	11	01	1.01	07											
2	11	01	1.02												
2	11	01	1.02	01											
2	11	01	1.02	03											
2	11	01	1.02	05											
2	11	01	1.02	07											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		/Semesteran SKPD													
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	52,800,000					100 %	0		
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	52,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	402,192,300					100 %	80,000,000		
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	43,460,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	83,471,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,030,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8,216,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	167,013,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	75,459,100					100 %	0		
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	21,210,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	20 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				KEHUTANAN	
2 11 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	54,248,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	32 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	2,276,276,400						100 %	0	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	675,319,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,598,047,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	822,301,670						100 %	19,550,000	
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	18,446,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Unit	19,550,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				94 Unit	305,945,070		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	94 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				258 Unit	192,910,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	258 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	305,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	4 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	100 %		0 %	30 %	217,268,400						30 %	570,000,000		
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH	3 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	85,000,000						2 dokumen	400,000,000		
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	400,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Penyusunan laporan validasi KLHS dan dokumen KLHS	7 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	132,268,400						1 dokumen	170,000,000		
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	30,261,200	Kota Yogyakarta, Gondokusumah, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	85,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	102,007,200	Kota Yogyakarta, Gondokusumah, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	85,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase capaian kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %		0 %	100 %	1,378,856,600						100 %	2,734,695,500		
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	28 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	1,310,266,300						7 dokumen	2,337,304,000		
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	145,516,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	4 Dokumen	361,196,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	2 Dokumen	133,308,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				2 Dokumen	1,104,749,400	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	2 Dokumen	1,842,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03 1.02	Penganggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 titik		0 titik	50 titik	68,590,300						50 titik	397,391,500	
2 11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	68,590,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	50 Titik	397,391,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase capaian kinerja fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	100 %		0 %	100 %	13,258,000						100 %	94,853,000	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	4 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	13,258,000						1 dokumen	94,853,000	
2 11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	13,258,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	1 Dokumen	94,853,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	100 %		0 %	62.5 %	160,252,200						62.5 %	520,500,000	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	120 usaha/kegiatan		0 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	160,252,200						30 usaha/kegiatan	520,500,000	
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat				1 Dokumen	85,264,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	1 Dokumen	324,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kelayakan operasi yang diberikan						Semua Kelurahan		Iklm					
2 11 06 1.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				35 Orang	14,425,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	35 Orang	86,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	60,562,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	1 Laporan	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %		0 %	21.05 %	114,742,000						21.05 %	130,000,000	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	190 entitas		0 entitas	40 entitas	114,742,000						40 entitas	130,000,000	
2 11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH				45 Lembaga	114,742,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	45 Lembaga	130,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup	100 %		0 %	100 %	112,151,700						100 %	600,000,000	
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional	12 penghargaan		0 penghargaan	3 penghargaan	112,151,700						3 penghargaan	600,000,000	
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				50 Entitas	112,151,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	50 Entitas	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	100 %		0 %	100 %	27,227,800						100 %	105,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup	100 %		0 %	100 %	27,227,800						100 %	105,000,000	
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	27,227,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	1 Dokumen	105,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	100 %		0 %	100 %	19,281,699,200						100 %	15,983,670,400	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %		0 %	100 %	19,281,699,200						100 %	15,983,670,400	
2 11 11 1.01 02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				750 Ton	9,175,747,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	750 Ton	8,850,453,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				11 Unit	10,000,000,000	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	11 Unit	6,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				750 Ton	52,652,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	750 Ton	69,224,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				6 Unit	53,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	6 Unit	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3,101,694,000						6,148,750,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Entitas		0 Entitas	7 Entitas	3,101,694,000						7 Entitas	6,148,750,000	
2 22 08 5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola	360 objek		0 objek	82 objek	98,000,000						82 objek	2,500,000,000	
2 22 08 5.01 03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	98,000,000		Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	1 Unit	2,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 08 5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100		0	100	614,444,000						100	1,200,000,000	
2 22 08 5.08 06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan				2 Objek	614,444,000		Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	2 Objek	1,200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13		0	13	2,389,250,000						13	2,448,750,000	
2 22 08 5.09 09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	2,389,250,000		Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	2,448,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
							2,174,123,686							9,457,585,100	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	100 %		0 %	69.33 %	808,053,386						69.33 %	4,695,856,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1185 ha		0 ha	275 ha	463,722,500						275 ha	3,022,270,000	
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				5 Dokumen	23,341,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	5 Dokumen	216,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				245 Ha	202,235,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	245 Ha	524,070,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar				30 Ha	70,594,000	Kab. Bantul, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup,	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH	30 Ha	508,700,000	DINAS LINGKUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kawasan Hutan Negara	Kawasan Hutan Negara						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Yogyakarta			HIDUP DAN KEHUTANAN	
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					350000	167,552,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	350000	1,615,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya penataan kawasan hutan	96.95 %		0 %	90.22 %	186,829,600						90.22 %	1,034,500,000	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				15581 Ha	173,923,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	15581 Ha	706,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	12,906,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	185,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	28 unit manajemen		0 unit manajemen	13 unit manajemen	78,429,286					13 unit manajemen	275,000,000		
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	78,429,286	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	205,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar	19 usaha		0 usaha	16 usaha	79,072,000					16 usaha	299,086,000		
3 28 03 1.09 02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	19,497,400	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Sertifikat	75,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.09 03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	10,873,800	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Sertifikat	35,100,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.09 04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				1 Sertifikat	12,653,400	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Sertifikat	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.09 05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	17,637,000	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	95,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.09 06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun				5 Ha	18,410,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	5 Ha	48,486,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		Iklm					
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	100 Nilai		0 Nilai	68,53 Nilai	402,322,500						68,53 Nilai	4,409,930,000	
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	69 %		0 %	65 %	219,293,000						65 %	1,029,930,000	
3 28 04 1.01 01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA					1	94,058,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	1	276,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				6 Ha	107,686,900	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	6 Ha	555,530,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 04 1.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				4 Desa	17,547,600	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY	4 Desa	198,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	7 lokasi		0 lokasi	3 lokasi	183,029,500						3 lokasi	3,380,000,000	
3 28 04 1.03 03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah				4 Dokumen	74,725,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	4 Dokumen	254,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				10 Ha	108,303,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	10 Ha	430,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	33.34 %		0 %	22.17 %	963,747,800						22.17 %	351,799,100	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	63 kelompok		0 kelompok	15 kelompok	963,747,800						15 kelompok	351,799,100	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				59 Orang	42,881,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	59 Orang	143,469,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				35 Kelompok	920,866,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	35 Kelompok	208,329,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1,062,812,144								0
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,99 Nilai		0 Nilai	94,24 Nilai	1,062,812,144						94,24 Nilai	0	
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	44,160,000						100 %	0	
2 11 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	44,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	15,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	99,814,200						100 %	0	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,494,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Iklim Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,494,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	38,826,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	574,484,574						100 %	0	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	770,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	166,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	407,699,574		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	329,353,370						100 %	0	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				78 Unit	308,895,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	78 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 48 Unit	20,458,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	0 Unit 48 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						5,889,893,120						56,996,250,000		
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	100 %		0 %	69.33 %	5,889,893,120						69.33 %	56,996,250,000	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan KPH	1 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	122,555,400						2 dokumen	450,000,000	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	122,555,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BKPH Yogyakarta	2 Dokumen	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan	48764754991	Rupiah	0 Rupiah	11019226825	Rupiah5,313,074,620						11019226825	Rupiah5,409,250,000	
3 28 03 1.03 06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				43 Dokumen	15,434,100	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	43 Dokumen	180,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				8 Dokumen	3,516,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	8 Dokumen	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH					1	4,701,415,620	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1	53,041,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan					1	592,708,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	DLHK DIY dan BKPH Yogyakarta	1	2,168,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya penataan kawasan hutan	96.95 %		0 %	90.22 %	454,263,100						90.22 %	1,137,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				15581 Ha	454,263,100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan	BKPH Yogyakarta	15581 Ha	1,137,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TOTAL							79,961,547,149						93,602,854,000		

DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											12,382,860,000	14,538,608,772		
1 03 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari Persentase penyediaan Fasilitas Perengkapan Jalan Presentase Pengendalian dan Pengawasan Presentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)	% % % %		% % % %	11,52 % 0 % 100 % 12,50 %	12,382,860,000					11,52 % 0 % 100 % 12,50 %	14,538,608,772		
1 03 13 5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di koridor 2	%		%	100 %	12,382,860,000					100 %	14,538,608,772		
1 03 13 5.02 01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				4 Dokumen	12,382,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	0	4 Dokumen	14,538,608,772	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											111,987,099,739	146,830,964,918		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	94,62 Nilai	17,188,464,842					94,62 Nilai	21,003,199,300		
2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	14,554,137,726					100 %	17,000,000,000		
2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/ Bulan	14,554,137,726		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	0	122 Orang/ Bulan	17,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	%		%	100 %	393,022,716					100 %	812,195,000		
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	0	18 Paket	112,195,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79 Laporan	258,022,716		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	0	79 Laporan	700,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,233,452,600						1,873,004,300		
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	504,971,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	36 Laporan	770,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	728,481,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	24 Laporan	1,103,004,300	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,007,851,800						1,318,000,000		
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	504,252,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	54 Unit	643,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	303,599,800				Pengurangan gap ketimpangan wilayah	10 Unit	214,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	1 Unit	460,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						94,798,634,897						125,827,765,618		
2 15 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						130,000,000						540,000,000		
2 15 02 1.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				2 Dokumen	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	2 Dokumen	540,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						4,847,600,000						8,946,060,585		
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				110 Unit	1,711,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	110 Unit	8,946,060,585	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				64 Unit	3,135,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	64 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						1,484,863,000						13,487,724,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 1.05 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan				164 Unit	1,302,457,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah		164 Unit	13,487,724,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				4 Laporan	182,406,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah Pengurangan gap ketimpangan wilayah Pengurangan gap ketimpangan wilayah		4 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						88,336,171,897							102,853,981,033	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				95 Unit	87,138,037,837		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah		95 Unit	101,433,705,786	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				37 Laporan	1,198,134,060		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah		37 Laporan	1,420,275,247	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						3,760,452,500							5,718,922,200	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		94,62 %	3,560,452,500						94,62 %	5,065,422,200	
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	%	%		100 %	56,005,900						100 %	63,935,000	
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	45,205,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	0	13 Paket	23,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	0	24 Laporan	40,535,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,130,826,600						4,678,487,200		
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	185,405,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	36 Laporan	269,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Laporan	154,669,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	14 Laporan	154,669,200	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	2,790,752,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	24 Laporan	4,254,318,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						373,620,000						323,000,000		
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	121,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Unit	121,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	252,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	2 Unit	202,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						200,000,000						653,500,000		
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						200,000,000						653,500,000		
2 15 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan gap ketimpangan wilayah	2 Unit	653,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
TOTAL							128,130,412,239						167,088,495,890		

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12,972,927,942	18,569,367,800						
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	92,3 Nilai		0 Nilai	92 Nilai	10,569,435,142				92 Nilai	13,263,639,300			
2	16	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	0 persen	100 persen		12,000,000				100 persen	95,000,000			
2	16	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen		12,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	10 Dokumen	45,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 persen	0 persen	100 persen		9,168,188,692					100 persen	11,321,088,300		
2	16	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/ Bulan		9,100,496,592	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	75 Orang/ Bulan	11,172,862,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen		55,192,100	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		5,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Laporan	9,527,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan			19 Laporan		7,500,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	19 Laporan	13,698,400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD													
2 16 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen		0 persen	100 persen	202,790,750						100 persen	355,449,000	
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,792,750	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Paket	6,270,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Paket	32,846,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	3 Paket	19,972,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	3 Paket	27,903,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	137,998,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Laporan	268,458,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 persen		0 persen	100 persen	10,000,000						100 persen	35,329,000	
2 16 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 jenis	10,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 jenis	19,054,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi,	100 persen		0 persen	100 persen	891,718,400						100 persen	1,077,137,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor													
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	323,200,800	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Laporan	458,890,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	568,517,600	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	2 Laporan	610,563,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 persen		0 persen	100 persen	284,737,300						100 persen	379,636,000	
2 16 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16,869,300	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Unit	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	117,868,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	15 Unit	152,508,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	1 Unit	151,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	40,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	0 Unit	50,878,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	86 %		0 %	82 %	2,283,492,800						82 %	2,923,079,000	
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	86 %		0 %	82 %	2,283,492,800						82 %	2,923,079,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	327,121,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY, Komunitas dan Badan Publik di DIY, OPD Pemda DIY, Pelaku Kreatif Digital, Netizen, Warganet, KIM	1 Dokumen	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	430,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat DIY, Komunitas dan Badan Publik di DIY, OPD Pemda DIY, Pelaku Kreatif Digital, Netizen, Warganet, KIM	1 Dokumen	47,102,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	813,208,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY, Komunitas dan Badan Publik di DIY, OPD Pemda DIY, Pelaku Kreatif Digital, Netizen, Warganet, KIM	1 Dokumen	894,528,800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	712,363,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY, Komunitas dan Badan Publik di DIY, OPD Pemda DIY, Pelaku Kreatif Digital, Netizen, Warganet, KIM	1 Dokumen	776,932,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY pada domain Kebijakan	3.3 indeks		0 indeks	3 indeks	120,000,000						3 indeks	2,382,649,500	
2 16 03 1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen		0 persen	100 persen	60,000,000						100 persen	1,248,264,000	
2 16 03 1.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				267 Unit	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Pemda DIY	267 Unit	1,248,264,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan e-government di	100 persen		0 persen	100 persen	60,000,000						100 persen	1,134,385,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Provinsi	Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi													
2 16 03 1.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pemda DIY	1 Dokumen	280,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						60,000,000							1,963,000,000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level III+ Level		0 Level	Level II Level	60,000,000						Level II Level	1,963,000,000	
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen		0 persen	100 persen	60,000,000						100 persen	1,128,000,000	
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas layanan publik	Pemda DIY, Korem Pamungkas, Kajati, Polda DIY, Pemkab dan Pemkot se DIY	1 Laporan	1,128,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						22,500,000,000							23,407,000,000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						22,500,000,000							23,407,000,000	
2 22 08 5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						22,500,000,000							23,407,000,000	
2 22 08 5.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				1 Objek	22,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik		1 Objek	23,407,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL							35,532,927,942							43,939,367,800	

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17						15,952,787,458						16,463,403,000		
2	17	01													
2	17	01													
2	17	01	1.01												
2	17	01	1.01	01											
2	17	01	1.01	04											
2	17	01	1.01	07											
2	17	01	1.02												
2	17	01	1.02	01											
2	17	01	1.02	03											
2	17	01	1.02	05											
2	17	01	1.02	07											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						Semua Kelurahan							
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	13,200,000					100 %	15,000,000		
2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	13,200,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	4 Laporan	15,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	200,947,500					100 %	424,000,000		
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 paket	11,992,600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	10 paket	45,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	20,077,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	1 paket	40,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 paket	8,449,600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	2 paket	13,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	17,677,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	2 paket	32,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 dokumen	9,710,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	6 dokumen	12,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	133,040,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	12 Laporan	180,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	507,747,800						100 %	167,000,000	
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit	484,145,800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	1 unit	80,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	23,602,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	1 unit	87,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	939,033,200						100 %	934,331,000	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan	470,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	2 laporan	1,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	300,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	3 laporan	272,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 laporan	638,563,200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	3 laporan	661,331,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	380,733,300					100 %	360,637,000		
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit	45,050,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	1 unit	50,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 unit	156,500,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	15 unit	155,637,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit	15,682,600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	5 unit	45,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	147,861,700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	1 unit	80,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	15,639,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Koperasi dan UKM DIY	3 unit	30,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kontribusi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Usaha Ijin Simpan Pinjam terhadap Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi (%)	51 %		0 %	46 %	18,917,364					46 %	57,000,000		
2 17 02 1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22 ijin usaha		0 ijin usaha	10 ijin usaha	18,917,364					10 ijin usaha	57,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 02 1.01 01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				5 Unit Usaha	18,917,364	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Koperasi	5 Unit Usaha	57,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	15 %		0 %	7 %	50,000,000						7 %	476,000,000	
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13 koperasi		0 koperasi	7 koperasi	50,000,000						7 koperasi	476,000,000	
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat				3 Dokumen	30,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Koperasi	3 Dokumen	443,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				20 Unit Usaha	20,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Koperasi	20 Unit Usaha	33,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase KSP/USP yang meningkat kesehatannya	5 %		0 %	3 %	15,000,000						3 %	27,500,000	
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatn koperasinya yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	120 koperasi		0 koperasi	90 koperasi	15,000,000						90 koperasi	27,500,000	
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan				70 koperasi	15,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Koperasi	70 koperasi	27,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDM nya	1126 KUKM		0 KUKM	847 KUKM	3,863,815,400						847 KUKM	4,000,000,000	
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	725 orang		0 orang	725 orang	1,138,000,000						725 orang	1,500,000,000	
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				725 Orang	1,138,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pemulihan ekonomi	Koperasi	725 Orang	1,500,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
2 17 05 1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM	1100 orang		0 orang	950 orang	2,725,815,400						950 orang	2,500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(satu) Daerah Provinsi														
2 17 05 1.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM				0 950 orang	2,725,815,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pemulihan ekonomi	UKM	0 950 orang	2,500,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	18 Koperasi		0 Koperasi	9 Koperasi	170,000,000						9 Koperasi	487,000,000	
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0 koperasi		0 koperasi	60 koperasi	170,000,000						60 koperasi	487,000,000	
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				0 Unit Usaha	170,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Koperasi	0 Unit Usaha	267,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 17 07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha Pemula	2153 orang		0 orang	1643 orang	1,803,335,100						1643 orang	1,101,450,000	
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	835 Wirausaha		0 Wirausaha	675 Wirausaha	1,803,335,100						675 Wirausaha	1,101,450,000	
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				0 Unit Usaha	306,480,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	UKM	0 Unit Usaha	1,029,450,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				60 Orang	1,496,855,100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	UKM	60 Orang	72,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya	1450 UMKM		0 UMKM	1150 UMKM	855,654,700						1150 UMKM	986,125,000	
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	1095 ukm		0 ukm	750 ukm	855,654,700						750 ukm	986,125,000	
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				550 Unit Usaha	855,654,700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	UKM	550 Unit Usaha	986,125,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					181,956,851,000		Semua Kelurahan					47,399,000,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Wirausaha KUKM Kuat dan Berdaya Saing	2050 Orang		0 Orang	1750 Orang	181,956,851,000						1750 Orang	47,399,000,000	
2 22 08 5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	erfasilitasinya promosi dan pameran umkm di kawasan sumbu filosofis	875 umkm		0 umkm	799 umkm	154,306,724,000						799 umkm	9,540,000,000	
2 22 08 5.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	154,306,724,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	KUKM	1 Objek	9,540,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	1800 orang		0 orang	1500 orang	27,650,127,000						1500 orang	37,859,000,000	
2 22 08 5.09 17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				4 Laporan	27,650,127,000	Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	KUKM	4 Laporan	37,859,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL							197,909,638,458						63,862,403,000		

DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18						12,087,022,029						15,822,500,000								
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	88 Persen	10,287,591,029			88 Persen	12,717,500,000					
2	18	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	dokumen		dokumen	8 dokumen	21,032,800			8 dokumen	81,000,000					
2	18	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15,144,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal DPP, Instansi Mitra	3 Dokumen	60,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2	18	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1,993,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal DPP, Instansi Mitra	2 Dokumen	5,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2	18	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3,895,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal DPP, Instansi Mitra	3 Laporan	16,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2	18	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	dokumen		dokumen	3 dokumen	8,347,683,329							3 dokumen	9,067,000,000	
2	18	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	8,294,283,529	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY, Inststitusi terkait (K/L)	50 Orang/ Bulan	9,000,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2	18	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	38,640,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY, Inststitusi terkait (K/L)	1 Dokumen	45,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2	18	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,759,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY, Inststitusi terkait (K/L)	1 Laporan	22,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2	18	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	12,502,000							1 Laporan	14,000,000	
2	18	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,502,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD	1 Laporan	14,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi perangkat daerah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	725,689,500					100 persen 100 persen	1,073,500,000		
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,677,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot, Instansi/Institusi terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Paket	27,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	86,494,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot, Instansi/Institusi terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Paket	35,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	37,950,400	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot, Instansi/Institusi terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Paket	45,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,899,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot, Instansi/Institusi terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Paket	9,500,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	94,984,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot	1 Paket	94,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											ot, Instansi/Institu si terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat				
2 18 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	9.883,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot, Instansi/Institu si terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat	5 Dokumen	13.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	478.800,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY, OPD Mitra di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot, Instansi/Institu si terkait, Pelaku Usaha, Masyarakat	1 Laporan	800.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	unit/paket		unit/paket	27 unit/paket	65.219,300						27 unit/paket	1.090.000,000	
2 18 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23.701,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY	2 Unit	110.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	41.517,700	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY	9 Unit	130.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan		Laporan	3 Laporan	752.276,400						3 Laporan	743.000,000	
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.270,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal DPPM, Instansi Mitra	1 Laporan	67.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	108.400,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal DPPM, Instansi Mitra	1 Laporan	116.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				1 Laporan	636.606,400	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan kualitas layanan publik	Internal DPPM, Instansi Mitra	1 Laporan	560.000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kantor yang Disediakan								Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	unit		unit	192 unit	363,187,700					192 unit	649,000,000		
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43,882,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Internal OPD DPPM DIY	1 Unit	40,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	142,499,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Internal OPD DPPM DIY	7 Unit	155,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				56 Unit	9,637,400	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY	56 Unit	16,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	48,537,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY	55 Unit	150,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56,250,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY	1 Unit	225,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				56 Unit	62,381,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Internal OPD DPPM DIY	56 Unit	63,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin Usaha	izin		izin	400 izin	19,999,900					400 izin	375,000,000		
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi	dokumen		dokumen	2 dokumen	19,999,900					2 dokumen	375,000,000		
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				2 Dokumen	19,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaku usaha, Insitusi/Instansi terkait	2 Dokumen	375,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi (Rp)	Triliyun		Triliyun	1,3 Triliyun	298,560,500					1,3 Triliyun	550,000,000		
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	298,560,500					2 Dokumen	550,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	298,560,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat, UMKM, Mitra Kerjasama Luar Negeri	2 Dokumen	550,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	86 Persen	421,371,100						86 Persen	675,000,000	
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	jjj	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	421,371,100						3 Dokumen	675,000,000	
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				500 Pelaku Usaha	351,550,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat, UMKM	500 Pelaku Usaha	400,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				48 Kegiatan Usaha	35,596,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat, UMKM	48 Kegiatan Usaha	125,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				1000 Orang	34,224,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan		Pelaku Usaha, Masyarakat, UMKM	1000 Orang	150,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	proyek		proyek	3900 proyek	917,700,400						3900 proyek	1,050,000,000	
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha yang dipantau, di bina, dan di awasi				30	917,700,400						30	1,050,000,000	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan				400 Pelaku Usaha	713,171,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pemulihan ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat, UMKM	400 Pelaku Usaha	800,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Penanaman Modal						Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dan Berkeadilan					
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				20 Kegiatan usaha	204,528,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat, UMKM	20 Kegiatan usaha	250,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jenis data yang tersaji	Jenis		Jenis	5 Jenis	141,799,100						5 Jenis	455,000,000	
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jenis		Jenis	5 Jenis	141,799,100						5 Jenis	455,000,000	
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	141,799,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat, OPD Pemda DIY	5 Dokumen	455,000,000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
TOTAL							12,087,022,029							15,822,500,000	

DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22						332,699,375,866						400,890,907,265		
2	22	01													
2	22	01													
2	22	01	1.01												
2	22	01	1.01	01											
2	22	01	1.01	04											
2	22	01	1.01	07											
2	22	01	1.02												
2	22	01	1.02	01											
2	22	01	1.02	03											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	16,757,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Laporan	19,250,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	19,004,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Laporan	24,805,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	36,000,000						100 persen	39,600,000	
2 22 01 1.03 06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	36,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Laporan	39,600,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan, penggandaan dan bahan/material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatusahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	persen		persen	100 persen	492,011,100						100 persen	455,239,290	
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	81,731,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	89,904,650	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	114,910,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	5 Paket	126,401,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11,920,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	13,112,220	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan				1 Paket	94,844,600	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Paket	104,266,140	DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengandaan yang Disediakan						Umbulharjo, Semaki		Transformasi Pelayanan Publik					
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,652,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Dokumen	7,318,080	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	181,952,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	2 Laporan	114,237,200	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor	persen		persen	100 persen	2,155,595,600						100 persen	2,371,155,160	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Laporan	10,450,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	618,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Laporan	679,800,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,528,095,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Laporan	1,680,905,160	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan, mesin lainnya dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	persen		persen	100 persen	587,772,490						100 persen	646,549,739	
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,430,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	1 Unit	44,473,550	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				19 Unit	368,215,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	19 Unit	405,036,720	DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	35,718,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	99 Unit	39,289,910	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	90,053,090	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	3 Unit	99,058,399	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	53,355,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	0	69 Unit	58,691,160	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						305,686,260,000							370,983,206,000	
2 22 08 5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman						20,200,000,000							23,870,000,000	
2 22 08 5.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	BKK Desa Kesejarahan Kajian Sejarah Kompetisi Kesejarahan Lawatan Sejarah Pembinaan Komunitas Sejarah Peringatan Peristiwa Bersejarah Publikasi dan Promosi Sejarah Lokal				1 kalurahan 3 dokumen 1 event 5 event 4 komunitas 5 event 3 event	4,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		1 kalurahan 3 dokumen 1 event 5 event 4 komunitas 5 event 3 event	6,050,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.01 02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						6,500,000,000							7,150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.01 03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						9,700,000,000							10,670,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						32,155,759,000							37,021,334,900	
2 22 08 5.04 01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				15 Objek	21,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		15 Objek	23,100,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.04 02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				8 Objek	4,500,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		8 Objek	6,600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				16 Objek	6,655,759,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		16 Objek	7,321,334,900	DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 08 5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						13,800,000,000						15,180,000,000		
2 22 08 5.06 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				0 Unit 15 Unit	1,800,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		0 Unit 15 Unit	1,980,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.06 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				89 Unit	12,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		89 Unit	13,200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan						7,647,102,000						8,411,812,200		
2 22 08 5.07 01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengkomodir Urusan Kebudayaan				1 Dokumen	1,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		1 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.07 02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****)				4 Laporan	600,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		4 Laporan	660,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.07 03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya				14 Dokumen	6,047,102,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		14 Dokumen	6,651,812,200	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						231,883,399,000						286,500,058,900		
2 22 08 5.09 01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				76 Desa	20,067,960,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		76 Desa	51,853,076,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.09 02	Pembinaan Lembaga Pegiat Seni	Jumlah Lembaga Pegiat Seni yang Dibina				9 Lembaga	4,961,798,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		9 Lembaga	5,457,977,800	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.09 03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				4 Laporan	5,230,972,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		4 Laporan	5,754,069,200	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.09 04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				36 Orang	2,500,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		36 Orang	2,750,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.09 05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				1 Laporan	5,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		1 Laporan	5,500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.09 06	Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	8,307,230,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)		1 Laporan	9,137,953,000	DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 08 5.09 07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				8 Dokumen	6,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	8 Dokumen	6,600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 08 5.09 08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				340 Orang	2,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	340 Orang	2,200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 08 5.09 09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				5 Laporan	8,397,139,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	5 Laporan	10,886,852,900	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 08 5.09 10	Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera				1 Laporan	1,500,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	1 Laporan	1,650,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 08 5.09 11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	6,918,300,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	2 Laporan	7,610,130,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 08 5.09 14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya				2 Laporan	157,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	2 Laporan	172,700,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 08 5.09 15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				8 Laporan	4,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	8 Laporan	4,400,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						28,775,492,450						35,651,259,521		
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 nilai		0 nilai	87,79 nilai	4,159,242,450					87,79 nilai	5,048,126,796		
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyediaan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	%		%	100 %	42,960,000					100 %	47,256,000		
2 22 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42,960,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	12 Dokumen	47,256,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	20,400,000					100 %	22,440,000		
2 22 01 1.03 06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20,400,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Laporan	22,440,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyediaan komponen	%		%	100 %	266,213,000					100 %	460,630,830		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		instalasi listrik/ penerangan bangunan, peralatan, perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga barang cetakan, penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.													
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,252,700	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Paket	210,070,190	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	58,550,900	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	5 Paket	93,852,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	27,391,700	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	4 Paket	30,130,870	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,648,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Paket	30,412,800	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,351,300	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Paket	22,297,330	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,734,400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Dokumen	4,107,840	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	115,284,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	7 Laporan	69,759,800	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor	%		%	100 %	3,681,997,450						100 %	4,344,635,766	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Laporan	2,750,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1,480,055,050	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Laporan	1,628,060,555	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,200,442,400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	1 Laporan	2,713,825,211	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan, mesin lainnya dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	%		%	100 %	147,672,000						100 %	173,164,200	
2 22 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	44,172,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	4 Unit	48,589,200	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	35,000,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	25 Unit	38,500,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	8,800,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	30 Unit	25,300,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	59,700,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Museum Negeri Sonobudoyo	4 Unit	60,775,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek		0 Objek	7 Objek	24,616,250,000						7 Objek	30,603,132,725	
2 22 08 5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	persen		persen	100 persen	24,616,250,000						100 persen	30,603,132,725	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 08 5.03 01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola				1 Unit	10,204,779,750	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelaku seni budaya	1 Unit	11,225,257,725	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08 5.03 02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan				1 Unit	14,411,470,250	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pelaku seni budaya	1 Unit	19,377,875,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						19,293,312,500						87,79 nilai	21,131,314,270	
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 nilai		0 nilai	87,79 nilai	2,293,312,500						87,79 nilai	2,431,314,270	
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyediaan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	%		%	100 %	37,800,000						100 %	41,580,000	
2 22 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	37,800,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	12 Dokumen	41,580,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	20,400,000						100 %	22,440,000	
2 22 01 1.03 06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20,400,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Laporan	22,440,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, peralatan, perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga barang cetakan, penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.	%		%	100 %	213,493,000						100 %	143,512,820	
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48,817,400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Paket	53,699,140	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				5 Paket	34,392,300	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	5 Paket	37,831,530	DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kantor yang Disediakan						Gondomanan, Ngupasan		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
2 22 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,614,400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Paket	2,875,840	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,734,500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Paket	23,658,470	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,734,400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Dokumen	4,107,840	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	102,200,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	2 Laporan	21,340,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor	%		%	100 %	1,836,771,600						100 %	2,020,448,760	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Laporan	2,200,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	422,585,200	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Laporan	464,843,720	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,412,186,400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	1 Laporan	1,553,405,040	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan, mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	%		%	100 %	184,847,900						100 %	203,332,690	
2 22 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau				3 Unit	58,027,900	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	3 Unit	63,830,690	DINAS KEBUDAYAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Gondomanan, Ngupasan		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				223 Unit	55,210,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	223 Unit	60,731,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	71,610,000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Taman Budaya Yogyakarta	5 Unit	78,771,000	DINAS KEBUDAYAAN
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek		0 Objek	7 Objek	17,000,000,000						7 Objek	18,700,000,000	
2 22 08 5.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun	16 Event		0 Event	13 Event	17,000,000,000						13 Event	18,700,000,000	
2 22 08 5.05 01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	17,000,000,000		Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Pelaku seni, budayawan, dan masyarakat	1 Objek	18,700,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
TOTAL							380,768,180,816							457,673,481,056	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22						7,729,000,000						7,729,000,000						
2	22	08				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	3000 Dokumen	0 Dokumen	3000 Dokumen	7,729,000,000			3000 Dokumen	7,729,000,000				
2	22	08	5.02			Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi	jenis	jenis	2 jenis	7,729,000,000			2 jenis	7,729,000,000				
2	22	08	5.02	02		Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten			12000 Dokumen	3,750,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Dana Keistimewaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	12000 Dokumen	3,750,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	22	08	5.02	03		Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya			72510 Unit	3,979,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Dana Keistimewaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	72510 Unit	3,979,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								41,169,499,145					
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 Nilai	0 Nilai	90 Nilai	24,802,075,589						90 Nilai	31,101,971,355	
2	23	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	dokumen	dokumen	7 dokumen	67,460,000						7 dokumen	90,296,000	
2	23	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	12,470,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	3 Dokumen	14,047,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			5 Dokumen	40,248,700	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	5 Dokumen	43,908,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	14,740,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Laporan	32,341,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	laporan	laporan	14 laporan	16,162,050,089						14 laporan	17,312,826,135	
2	23	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 Orang/ Bulan	16,099,317,589	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	100 Orang/ Bulan	17,169,271,135	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	01	1.02	03		Pelaksanaan Penausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	44,940,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	12 Dokumen	48,660,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Laporan	7,648,000	Kab. Bantul, Banguntapan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Laporan	11,550,000	DINAS PERPUSTAKAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Banguntapan		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	10,144,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	12 Laporan	16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	laporan		laporan	4 laporan	22,500,000						4 laporan	24,750,000	
2 23 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	22,500,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Laporan	24,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	dokumen		dokumen	4 dokumen	25,069,600						4 dokumen	49,665,000	
2 23 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	25,069,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Dokumen	49,665,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	jenis		jenis	5 jenis	424,622,300						5 jenis	1,314,906,720	
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	46,436,900	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	3 Paket	50,659,620	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	48,686,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Paket	66,225,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	17,572,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Paket	73,539,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44,625,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Paket	197,594,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	267,302,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Laporan	917,153,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	13 unit	1,274,674,300						13 unit	4,190,000,000	
2 23 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	976,318,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Paket	2,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	298,355,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	5 Unit	1,200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis		jenis	3 jenis	5,753,156,000						3 jenis	6,296,840,000	
2 23 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Laporan	4,840,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1,434,150,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Laporan	1,540,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4,317,006,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Laporan	4,752,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	16 unit	1,072,543,300						16 unit	1,822,687,500	
2 23 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	394,514,300	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	16 Unit	385,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	76,300,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	6 Unit	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Unit	220,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	401,729,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	8 Unit	1,067,687,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	0 Perpustakaan	15 Perpustakaan		6,508,079,400						15 Perpustakaan	7,992,225,340	
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	perpustakaan	15 perpustakaan		176,168,000						15 perpustakaan	2,716,984,710	
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	114,797,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	1 Perpustakaan	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				50 Orang	61,371,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	50 Orang	70,026,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	jumlah sosialisasi budaya baca	kali		kali	48 kali	6,331,911,400						48 kali	5,275,240,630	
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				149 Lokus 23 Lokus	6,271,134,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	149 Lokus 23 Lokus	5,207,377,780	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02 1.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				10 Orang	60,776,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	10 Orang	67,862,850	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	2550 Eksemplar	0 Eksemplar	2550 Eksemplar		563,040,800						2550 Eksemplar	2,075,302,450	
2 23 03 1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah	jumlah karya cetak dan karya rekam baru	eksemplar	eksemplar	2500 eksemplar		368,130,000						2500 eksemplar	792,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Provinsi														
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				2500 Eksemplar	368,130,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	2500 Eksemplar	792,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 03 1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	terbitan		terbitan	5 terbitan	79,626,600						5 terbitan	136,400,000	
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				2500 Entry	44,645,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	2500 Entry	92,400,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				5 Naskah	34,981,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	5 Naskah	44,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan	eksemplar		eksemplar	50 eksemplar	115,284,200						50 eksemplar	1,046,902,450	
2 23 03 1.03 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				100 Orang	115,284,200	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	100 Orang	587,407,150	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KEARSIPAN					764,389,000							1,951,443,450	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi	8000 Arsip		0 Arsip	8000 Arsip	764,389,000						8000 Arsip	1,951,443,450	
2 24 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Institusi yang terbina dan dikelola kearsipannya	Institusi		Institusi	90 Institusi	397,586,900						90 Institusi	736,301,390	
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				10000 Berkas	251,419,800	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	10000 Berkas	395,276,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 24 02 1.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				2 Laporan	146,167,100	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Laporan	341,025,190	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang dikelola	arsip		arsip	10000 arsip	190,206,100						10000 arsip	440,371,030	
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses				10000 Arsip	190,206,100	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	10000 Arsip	440,371,030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 24 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Entri data Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	data		data	4000 data	176,596,000						4000 data	774,771,030	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				750 Pengguna	110,615,700	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	750 Pengguna	440,371,030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				3 Laporan	65,980,300	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	3 Laporan	334,400,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3,871,628,400					14,069,789,200			
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 Nilai		0 Nilai	90 Nilai	2,443,318,400						90 Nilai	7,996,309,200	
2 23 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	laporan		laporan	14 laporan	30,600,000						14 laporan	32,000,000	
2 23 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	30,600,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Dokumen	32,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	laporan		laporan	2 laporan	15,000,000						2 laporan	17,000,000	
2 23 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Laporan	17,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	jenis		jenis	5 jenis	116,010,000						5 jenis	388,019,200	
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28,130,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Paket	136,963,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	11,245,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Paket	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	7,685,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	3 Paket	36,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,830,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Paket	20,058,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	61,120,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	2 Laporan	159,997,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	1 unit	3,000,000						1 unit	1,525,000,000	
2 23 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Unit	1,025,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis		jenis	3 jenis	1,401,110,000						3 jenis	1,543,451,000	
2 23 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	450,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Laporan	2,525,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1,397,660,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Laporan	1,537,426,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	1 Laporan	3,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	16 unit	877,598,400						16 unit	4,490,839,000	
2 23 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	201,032,300	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	11 Unit	120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				73 Unit	13,250,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	73 Unit	157,839,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	99,642,300	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	8 Unit	600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	274,336,900	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	4 Unit	2,700,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	289,336,900	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DPAD DIY	13 Unit	913,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan		0 Perpustakaan	15 Perpustakaan	1,428,310,000						15 Perpustakaan	6,073,480,000	
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan		perpustakaan	15 perpustakaan	1,428,310,000						15 perpustakaan	6,073,480,000	
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO 20000 (ITSM : Information Technology Service				1 Perpustakaan	210,830,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	1 Perpustakaan	385,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	516,480,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	1 Perpustakaan	516,480,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 23 02 1.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				5 Layanan	701,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	DPAD DIY	5 Layanan	5,171,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
TOTAL							44,238,213,189							64,919,731,795	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								3,504,850,000		
3	25	01														
3	25	01														
3	25	01	1.02													
3	25	01														
3	25	01	1.02	03												
3	25	01	1.02	05												
3	25	01	1.02	07												
3	25	01	1.03													
3	25	01	1.03	01												
3	25	01	1.03	02												
3	25	01	1.03	05												
3	25	01	1.03	06												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	121,605,300						100 %	0	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	10,889,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	8 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	27,715,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	39 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	22,059,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	26 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,556,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18,589,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	3 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	39,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	28 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	20,000,000						100 %	32,000,000	
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	8 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,345,531,825						100 %	0	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	2 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	581,560,225	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	36 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	762,231,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	36 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	190,024,100						100 %	0	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	164,858,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	19 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	17,665,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	22 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	10 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	90 %		0 %	90 %	2,750,000,000						90 %	3,472,550,000	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100,000,000						100 %	402,550,000	
3 25 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji				100 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota,			Pemulihan ekonomi	Kelompok pembudidaya	100 Dokumen	402,550,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sehat						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ikan			
3 25 04 1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	2,650,000,000						5 kab/kota	3,070,000,000	
3 25 04 1.06 01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	2,650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	7 Unit	3,070,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,585,589,200						150,000,000		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,20 Nilai		0 Nilai	88,80 Nilai	2,535,589,200						88,80 Nilai	0	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	35,219,500						100 %	0	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	29,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Disalurkan DIY	12 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	2 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	4,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	18 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	22,708,500						100 %	0	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4,710,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	1 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,997,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	12 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	106,503,100						100 %	0	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,980,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	12 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	27,806,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	30 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	9,978,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	15 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	7,789,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	3 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	41,049,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	28 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	2,221,626,800						100 %	0	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	1 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	705,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	12 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	1,513,126,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	24 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	149,531,300						100 %	0	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	43,232,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	5 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	12,850,000	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	17 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	1 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	18,449,000	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	13 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan	82.5 skor		0 skor	81 skor	50,000,000						81 skor	150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Tefasilitasinya Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan	2 lokasi		0 lokasi	2 lokasi	50,000,000						2 lokasi	150,000,000	
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				12 Layanan	50,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	12 Layanan	150,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						39,234,704,000							19,574,900,000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	25 %		0 %	25 %	39,234,704,000						25 %	19,574,900,000	
2 22 08 5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100 %		0 %	100 %	39,234,704,000						100 %	19,574,900,000	
2 22 08 5.08 05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				1 Objek	39,234,704,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	1 Objek	19,574,900,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						31,978,912,575							30,930,279,000	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,20 Nilai		0 Nilai	88,80 Nilai	20,876,870,375						88,80 Nilai	22,682,500,000	
3 25 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	90,000,000						100 %	162,500,000	
3 25 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Disalurkan DIY	3 Dokumen	95,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dislautkan DIY	4 Dokumen	22,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dislautkan DIY	1 Laporan	45,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	17,922,709,475						100 %	22,220,000,000	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/ Bulan	17,840,629,475	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dislautkan DIY	152 Orang/ Bulan	22,220,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dislautkan DIY	12 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN Dislautkan DIY	2 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD				18 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan kualitas layanan publik		ASN Dislautkan DIY	18 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	13,200,000						100 %	0	
3 25 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	12 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	372,238,600						100 %	0	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi				10 Paket	17,936,900	Semua Kab/Kota,			Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	10 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	42,464,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	44 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	46,237,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	20 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,567,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	37,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	3 Paket	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	10,720,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	8 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	207,699,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	28 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	6,972,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Dokumen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	755,900,000						100 %	300,000,000	
3 25 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	755,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	2 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,031,392,400						100 %	0	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5,388,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	2 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	418,799,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	36 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	607,204,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	36 Laporan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	691,429,900						100 %	0	
3 25 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	66,518,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	2 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	436,736,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	35 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	43,875,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	28 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	1 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	64,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Dislautkan DIY	33 Unit	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan	100 %		0 %	33 %	46,733,200						33 %	467,489,000	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi	2 lokasi		0 lokasi	1 lokasi	29,999,900						1 lokasi	410,289,000	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				3248 Ha	29,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Pesisir DIY	3248 Ha	353,089,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 rekomendasi		0 rekomendasi	1 rekomendasi	16,733,300						1 rekomendasi	57,200,000	
3 25 02 1.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	16,733,300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat Pesisir DIY	1 Rekomendasi	57,200,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	29876 ton		0 ton	7188 ton	115,240,200						7188 ton	965,700,000	
3 25 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 rekomendasi		0 rekomendasi	10 rekomendasi	57,748,200						10 rekomendasi	100,000,000	
3 25 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	57,748,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	10 Rekomendasi	100,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 25 03 1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8 Kapal		0 Kapal	2 Kapal	57,492,000					2 Kapal	75,000,000		
3 25 03 1.09 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	57,492,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	2 Rekomendasi	75,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	395572 ton		0 ton	97446 ton	4,841,127,500					97446 ton	3,383,988,000		
3 25 04 1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0 %		0 %	100 %	152,290,100					100 %	438,988,000		
3 25 04 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				12 Rekomendasi	152,290,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	12 Rekomendasi	438,988,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 04 1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	4,688,837,400					5 kab/kota	2,945,000,000		
3 25 04 1.06 02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah				173 Unit	4,688,837,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	173 Unit	2,945,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kabupaten/Kota													
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	10 %		0 %	10 %	230,946,700					10 %	355,000,000		
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	1 tahun		0 tahun	1 tahun	168,370,900					1 tahun	205,000,000		
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				4 Dokumen	106,371,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	4 Dokumen	120,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				33 Kelompok	61,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	33 Kelompok	85,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 05 1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya"	1 tahun		0 tahun	1 tahun	62,575,800					1 tahun	150,000,000		
3 25 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				20 Dokumen	22,652,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	20 Dokumen	75,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil				20 Dokumen	39,923,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	20 Dokumen	75,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						Semua Kelurahan		dan Berkeadilan					
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	34.36 kg/Kapita /tahun		0 kg/Kapita /tahun	32.70 kg/Kapita /tahun	5,867,994,600					32.70 kg/Kapita /tahun	3,075,602,000		
3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun		0 tahun	1 tahun	56,568,800					1 tahun	336,953,000		
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5 Rekomendasi	27,762,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	5 Rekomendasi	86,086,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	28,806,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	1 Dokumen	250,867,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	12 laporan		0 laporan	3 laporan	5,693,776,900					3 laporan	2,119,549,000		
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala				202 Unit Usaha	2,288,372,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	202 Unit Usaha	1,269,299,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Usaha dan Risiko													
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Dibenikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				394 Unit Usaha	3,405,404,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	394 Unit Usaha	850,250,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 tahun		0 tahun	1 tahun	117,648,900						1 tahun	619,100,000	
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Dibenikan Insentif dan Fasilitasi				35 Unit Usaha	101,232,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	35 Unit Usaha	534,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 06 1.03 03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir				1 Dokumen	16,416,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	1 Dokumen	84,600,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TOTAL							78,282,580,000							54,160,029,000	

DINAS PARIWISATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22						23,655,120,000						40,900,000,000		
2	22	08													
2	22	08													
2	22	08	08												
2	22	08	5.04												
2	22	08	5.04	03											
2	22	08	5.06												
2	22	08	5.06	01											
2	22	08	5.08												
2	22	08	5.08	02											
2	22	08	5.09												
2	22	08	5.09	18											
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26						11,432,253,059						16,683,450,000		
3	26	01													
3	26	01													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	73,000,000						100 %	165,000,000	
3 26 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	48,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	4 Dokumen	73,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	10,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	4 Dokumen	30,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	15,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	4 Laporan	62,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	8,682,362,009						100 %	8,955,100,000	
3 26 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	8,629,362,009	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	73 Orang/ Bulan	8,900,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	37,500,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	39,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Laporan	2,100,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	13,500,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	18 Laporan	14,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	28,800,000						100 %	29,200,000	
3 26 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata DIY	1 Dokumen	12,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16,800,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata DIY	1 Laporan	17,200,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	238,438,100						100 %	636,200,000	
3 26 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	9,992,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	7 Paket	11,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,355,100	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Paket	13,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Paket	6,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25,005,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	2 Paket	39,600,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6,012,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	3 Dokumen	6,600,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	120,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	2 Laporan	530,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30,750,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	30,119,000						100 %	229,250,000	
3 26 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	14,119,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	3 Unit	179,250,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				2 Unit	16,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	2 Unit	50,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Lainnya yang Disediakan													
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	691,959,050						100 %	720,000,000	
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	10,001,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	3 Laporan	38,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	215,501,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	3 Laporan	220,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	466,456,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	2 Laporan	462,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	271,075,600						100 %	518,200,000	
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,271,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Unit	33,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	181,698,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	12 Unit	194,900,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	13,855,500	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	29 Unit	66,300,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Unit	154,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,250,000	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	Dinas Pariwisata	1 Unit	70,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n	UJP orang		UJP orang	275 UJP 13900000 orang	149,999,900						275 UJP 13900000 orang	855,500,000	
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Jumlah Dokumen laporan monitoring	lokasi dokumen		lokasi dokumen	17 lokasi 2 dokumen	99,999,900						17 lokasi 2 dokumen	455,500,000	
3 26 02 1.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	1 Dokumen	455,500,000	DINAS PARIWISATA
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50,000,000							400,000,000	
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				2 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi		2 Laporan	400,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun ke n	8500000 orang		0 orang	5500000 orang	419,999,600						5500000 orang	3,500,000,000	
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen pemasaran yang dihasilkan (dokumen)	169 dokumen		0 dokumen	33 dokumen	419,999,600						33 dokumen	3,500,000,000	
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	2 Dokumen	1,700,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	99,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	1 Dokumen	600,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	produk		produk	5 produk	34,999,800					5 produk	115,000,000		
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan		Laporan	3 Laporan	19,999,900					3 Laporan	55,000,000		
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	19,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	1 Laporan	55,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 04 1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						14,999,900						60,000,000		
3 26 04 1.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	14,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi		1 Dokumen	60,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Desa Wisata yang naik kelas / Jumlah objek yang difasilitasi oleh Kemitraan Jumlah SDM yang sudah tersertifikasi	lokasi orang		lokasi orang	5 lokasi 3566 orang	811,500,000					5 lokasi 3566 orang	960,000,000		
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang di latih dan sertifikasi	Orang		Orang	465 Orang	811,500,000					465 Orang	960,000,000		
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				30 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	30 Orang	250,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan				240 Orang	435,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait, Masyarakat, Wisman, Wisnus	240 Orang	110,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi				99 Orang	346,500,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pemulihan ekonomi	Dinas Pariwisata, Stakeholder terkait,	99 Orang	600,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						Kecamatan, Semua Kelurahan		dan Berkeadilan		Masyarakat, Wisman, Wisnus			
TOTAL							35,087,373,059							57,583,450,000	

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											842,120,000		975,000,000	
1	03	13														
1	03	13	5.02													
1	03	13	5.02	03												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											856,750,000		2,827,500,000	
2	09	03														
2	09	03	1.01													
2	09	03	1.01	01												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 09 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	385,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Tim penyusun data ketersediaan pangan, pengelola CPPD, PUPM, enumerator, Aspartan, TTIC, masyarakat	3 Laporan	970,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian	kg/kapita /tahun		kg/kapita /tahun	8.8 kg/kapita /tahun	120,000,000						8.8 kg/kapita /tahun	880,000,000	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	84,850,100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat di 5 Kabupaten/Ko ta, petugas analisis kualitas konsumsi pangan	1 Dokumen	440,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	35,149,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat di 5 Kabupaten/Ko ta, petugas analisis kualitas konsumsi pangan	1 Laporan	440,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian	96,59 %		0 %	93,18 %	112,750,000						93,18 %	531,000,000	
2 09 04 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	5 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	37,750,000						5 dokumen	71,000,000	
2 09 04 1.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				5 Dokumen	37,750,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Desa rentan/rawan pangan	5 Dokumen	71,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	75,000,000						5 kab/kota	460,000,000	
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	438 Kelurahan	1 Dokumen	460,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	%		%	88.2 %	119,000,000						88.2 %	210,000,000	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	119,000,000						5 kab/kota	210,000,000	
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang				1 Dokumen	36,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pemulihan ekonomi	Pelaku usaha, konsumen pangan segar, pasar modern	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dibina						Semaki		dan Berkeadilan		dan tradisional, guru, petugas DIY dan Kabupaten/Kota, OKKP - D DIY			
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	48,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	5 Sertifikat	90,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2 09 05 1.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KEBUDAYAAN					3,000,000,000							10,013,500,000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan	ton		ton	370 ton	3,000,000,000						370 ton	10,013,500,000	
2 22 08 5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	234 kelompok		0 kelompok	46 kelompok	3,000,000,000						46 kelompok	10,013,500,000	
2 22 08 5.08 01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				14 Laporan	3,000,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Kelompok Lumbung, Masyarakat	14 Laporan	10,013,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERTANIAN					80,859,035,652							100,090,797,811	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Nilai		0 Nilai	88,35 Nilai	54,182,327,490						88,35 Nilai	60,336,282,811	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %		0 %	100 %	73,998,700						100 %	112,050,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	29,578,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY	4 Dokumen	56,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	18,595,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY	4 Dokumen	22,650,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	25,825,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY	3 Laporan	33,400,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	49,907,557,890						100 %	52,786,028,811	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				402 orang	49,813,902,890	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP, UPTD BP3MBTP, UPTD BPPTDK	402 orang	52,660,338,811	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	80,460,000	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP, UPTD BP3MBTP, UPTD BPPTDK	1 Dokumen	111,210,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	13,195,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP, UPTD BP3MBTP, UPTD BPPTDK	1 Laporan	14,480,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	63,600,000						100 %	69,960,000	
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	63,600,000	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPTP, UPTD BPSDMP	1 Laporan	69,960,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki							
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	33,822,000						100 %	35,516,000	
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	33,822,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY	5 Dokumen	35,516,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	179,989,900						100 %	333,735,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,201,900	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	1 Paket	15,622,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						58,012,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31,552,500	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	1 Paket	34,322,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7,992,000	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	1 Dokumen	8,791,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	68,231,000	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	1 Laporan	275,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki							
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	3,004,885,700					100 %	3,136,009,000		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	400,000	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTP BPTP	1 Laporan	64,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	735,683,300	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTP BPTP	1 Laporan	847,009,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,268,802,400	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTP BPTP	1 Laporan	2,225,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %		0 %	100 %	918,473,300					100 %	2,025,814,000		
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	68,570,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	2 Unit	61,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				136 Unit	648,312,900	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	136 Unit	715,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Umbulharjo, Semaki							
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	76,060,000	Kab. Bantul, Pandak, Wjirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	20 Unit	38,126,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	50,000,000	Kab. Bantul, Pandak, Wjirejo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	5 Unit	1,161,055,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit 79 Unit	75,530,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DPKP DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPTP	0 Unit 79 Unit	50,633,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik	97,8 skor		0 skor	97,5 skor	20,314,183,450						97,5 skor	24,500,000,000	
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	4 kab		0 kab	4 kab	3,884,110,750						4 kab	7,500,000,000	
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				7 Dokumen	3,884,110,750	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Pemulihan ekonomi	Kelompok tani, KWT, gapoktan, masyarakat	7 Dokumen	7,500,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat	280 ekor		0 ekor	65 ekor	16,430,072,700						65 ekor	17,000,000,000	
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	16,430,072,700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemulihan ekonomi	Gapoktan, kelompok ternak, kelompok tani, KWT, kelompok masyarakat	1 Dokumen	17,000,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks prasarana pertanian yang dibangun	0,021 skor		0 skor	0,018 skor	2,327,269,600						0,018 skor	2,750,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 kab		0 kab	4 kab	2,327,269,600						4 kab	2,750,000,000	
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan				3 Dokumen	2,327,269,600	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,		Pemulihan ekonomi	Gapoktan, kelompok tani, KWT, P3A,	3 Dokumen	2,750,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Irigasi di Tingkat Usaha Tani						Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki			kelompok masyarakat				
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/PHMS	100 %	0 %	100 %	885,304,300						100 %	1,144,515,000		
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	5 kab/kota	0 kab/kota	5 kab/kota	165,820,000						5 kab/kota	340,000,000		
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			1 Laporan	165,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	5 Kabupaten/Ko ta se-DIY	1 Laporan	340,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 27 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	710,000,000						5 kab/kota	729,000,000	
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				1 Laporan	80,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	5 Kabupaten/Kota se-DIY, Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	1 Laporan	84,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 04 1.02 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				1 Laporan	630,000,000	Kab. Gunungkidul, Pongjone, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Ngemplak, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Tempel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	5 Kabupaten/Kota se-DIY, Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	1 Laporan	645,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 04 1.05	Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	9,484,300						5 kab/kota	75,515,000	
3 27 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	9,484,300	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Unit usaha/kelompok pengolah hasil peternakan	2 Sertifikat	75,515,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pertanian aman dari serangan OPT dan DPI	95 %		0 %	95 %	60,000,000						95 %	1,345,000,000	
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terwujudnya pertanian aman dari serangan OPT dan DPI:	3 subsektor		0 subsektor	3 subsektor	60,000,000						3 subsektor	1,345,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Provinsi	komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan													
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Layanan laboratorium LPMPP Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian				67 Kecamatan 0 Ha 1 Tahun 1 Dokumen 40 Rekomendasi	60,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Area pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di 5 Kabupaten/Kota	67 Kecamatan 0 Ha 1 Tahun 1 Dokumen 40 Rekomendasi	1,345,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	66 %	0 %	60 %	3,089,950,812						60 %	10,015,000,000		
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	5 kab/kota	0 kab/kota	5 kab/kota	191,958,200						5 kab/kota	790,000,000		
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan			300 Orang	191,958,200	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya/swasta	300 Orang	615,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 kab/kota	0 kab/kota	5 kab/kota	2,897,992,612						5 kab/kota	8,875,000,000		
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			1 Dokumen	2,763,484,112	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok tani, KWT, gapoktan, penyuluh, Jogja Agro Park (JAP)	1 Dokumen	8,000,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				58 Kelompok	134,508,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kelompok tani, KWT, gapoktan, penyuluh, Jogja Agro Park (JAP)	58 Kelompok	875,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3,373,707,350						3,622,841,650		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Nilai		0 Nilai	88,35 Nilai	1,739,474,500						88,35 Nilai	1,628,321,980	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	30,600,000						100 %	33,660,000	
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	30,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	1 Dokumen	33,660,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	10,320,000						100 %	11,352,000	
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD BP3MBTP	1 Laporan	11,352,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	80,419,600						100 %	106,523,680	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	6,796,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	1 Paket	8,315,890	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Disediakan													
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,821,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	1 Paket	28,400,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,538,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	1 Paket	12,056,990	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	1 Paket	24,200,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,115,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UPTD BP3MBTP	1 Dokumen	2,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16,148,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UPTD BP3MBTP	1 Laporan	31,050,800	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %		0 %	100 %	406,202,900						100 %	140,470,900	
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	358,761,000	Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	2 Unit		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	47,441,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	2 Unit	52,186,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	752,470,300						100 %	856,900,400	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD BP3MBTP	1 Laporan	28,251,400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	170,506,500	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD BP3MBTP	1 Laporan	203,649,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki							
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	580,963,800	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	1 Laporan	625,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %		0 %	100 %	459,461,700					100 %	479,415,000		
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				32 Unit	192,962,700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	32 Unit	215,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	9,220,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD BP3MBTP	22 Unit	10,142,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	246,121,600	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD BP3MBTP	4 Unit	242,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	11,157,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BP3MBTP	18 Unit	12,273,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	91,3 %		0 %	91 %	1,634,232,850						91 %	1,994,519,670	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	Terlaksananya Pengawasan Mutu,	5 kab/kota		0 kab/kota	5 kab/kota	1,634,232,850						5 kab/kota	1,994,519,670	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Peredaran Benih Tanaman	Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman													
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				135 Sertifikat	81,010,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	135 Sertifikat	148,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				2 Laporan	474,777,350	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	555,004,780	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				2 Dokumen	996,458,500	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo Kab. Sleman, Berbah, Tegaltirto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	1,189,650,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				2 Laporan	81,986,200	Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	2 Laporan	101,364,890	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9,150,000						10,945,000		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Nilai		0 Nilai	88,35 Nilai	9,150,000						88,35 Nilai	10,945,000	
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %		0 %	100 %	9,150,000						100 %	10,945,000	
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	9,150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	23 Unit	10,945,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4,559,853,875						6,978,607,500		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Nilai		0 Nilai	88,35 Nilai	616,881,875						88,35 Nilai	1,407,207,500	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	23,760,000						100 %	31,680,000	
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	23,760,000	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Dokumen	31,680,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	13,200,000						100 %	17,600,000	
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13,200,000	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Laporan	17,600,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	92,028,100						100 %	199,920,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,365,700	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Paket	7,590,500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,314,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Paket	19,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,999,500	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Paket	6,820,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,332,400	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Paket	22,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,021,600	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Dokumen	4,700,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semaki							
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	39,994,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Laporan	139,810,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	278,921,675						100 %	307,959,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Laporan	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	158,839,675	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung, Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun, Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Laporan	169,701,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	119,082,000	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung, Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun, Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	1 Laporan	118,258,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %		0 %	100 %	208,972,100						100 %	591,048,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	202,382,100	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung, Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun, Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	40 Unit	213,548,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki							
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	6,590,000	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD BPPTDK	20 Unit	6,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	100 %		0 %	100 %	3,392,972,000					100 %	4,355,000,000		
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat	280 ekor		0 ekor	65 ekor	3,392,972,000					65 ekor	4,355,000,000		
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	3,392,972,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemulihan ekonomi	UPTD BPPTDK, peternak, dan pelaku usaha peternakan	1 Laporan	4,355,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						550,000,000						1,216,400,000		
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						550,000,000						1,216,400,000		
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan				1 Dokumen	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemulihan ekonomi		1 Dokumen	1,216,400,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner						Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL							93,500,616,877							124,519,191,961	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22						19,999,486,000						35,282,000,000							
2	22	08				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	7,5 Rp Trilyun		0 Rp Trilyun	6,8 Rp Trilyun	19,999,486,000			6,8 Rp Trilyun	35,282,000,000				
2	22	08	5.08			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	19,999,486,000			1 Kegiatan	35,282,000,000				
2	22	08	5.08	03		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				3000 Unit	19,999,486,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Eksportir DIY	3000 Unit	35,282,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2,343,221,900		3,025,293,640					
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	605 perusahaan		0 perusahaan	515 perusahaan	29,788,700				515 perusahaan	78,563,000			
3	30	02	1.04			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	98 %		0 %	92 %	29,788,700				92 %	78,563,000			
3	30	02	1.04	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				24900 Dokumen	29,788,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku usaha ekspor	24900 Dokumen	78,563,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi pangan bergejolak	2,18 %		0 %	2,21 %	224,883,900				2,21 %	204,000,000			
3	30	04	1.02			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan	%		%	100 %	224,883,900				100 %	204,000,000			
3	30	04	1.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	52,613,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	1 Laporan	82,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	172,270,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat DIY	1 Laporan	122,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20 %		0 %	17 %	80,213,000						17 %	1,315,730,640	
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Nilai ekspor industri kreatif	381 Juta Rupiah		0 Juta Rupiah	286 Juta Rupiah	80,213,000						286 Juta Rupiah	1,315,730,640	
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				90 Pelaku Usaha	80,213,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Eksportir DIY	90 Pelaku Usaha	180,639,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,18 %		0 %	2,21 %	233,336,300						2,21 %	227,000,000	
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%		%	91 %	211,334,300						91 %	200,000,000	
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				35 Pengaduan	211,334,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Konsumen	35 Pengaduan	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang yang diawasi	Unit		Unit	970 Unit	22,002,000						970 Unit	27,000,000	
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	22,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Konsumen	1 Laporan	27,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (Rp. Milyar)	3,04 Rp Milyar		0 Rp Milyar	2,63 Rp Milyar	1,775,000,000						2,63 Rp Milyar	1,200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Omset UKM yang mengikuti pameran	Juta Rp		Juta Rp	409,5 Juta Rp	1,775,000,000						409,5 Juta Rp	1,200,000,000	
3 30 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				1090 UMKM	1,775,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku usaha sektor perdagangan DIY	1090 UMKM	1,200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						27,574,271,450						34,595,725,063		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Disperindag)	100 Nilai		0 Nilai	100 Nilai	18,153,014,950						100 Nilai	27,382,358,563	
3 31 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100 %		0 %	100 %	60,540,500						100 %	166,050,000	
3 31 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30,098,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	4 Dokumen	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	11,940,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	4 Dokumen	15,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	18,502,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	3 Laporan	40,800,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	16,365,973,434						100 %	22,894,730,563	
3 31 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah				110 Orang/ 9 Orang	16,289,634,434	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	110 Orang/ 9 Orang	22,802,141,563	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	52,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	11,764,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Laporan	11,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Keuangan Akhir Tahun SKPD													
3 31 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	11,774,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	18 Laporan	11,589,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %		32,795,000						100 %	41,615,000	
3 31 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	32,795,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N DIY	1 Laporan	41,615,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %		294,043,766						100 %	1,049,737,000	
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	19,385,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	16 Paket	35,487,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	21,702,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	52 Paket	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	20,006,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	26 Paket	70,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Paket	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	23,536,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	21 Paket	88,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,734,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150,254,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Laporan	600,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 31 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	51,224,866	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Dokumen	125,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0 %	100 %		63,291,500						100 %	1,494,476,000	
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	63,291,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	5 Unit	225,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	100 %		978,552,000						100 %	1,075,750,000	
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	373,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Laporan	410,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	604,752,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	3 Laporan	665,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	100 %		357,818,750						100 %	660,000,000	
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27,526,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	1 Unit	35,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	238,152,250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	14 Unit	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	20,200,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	8 Unit	70,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	47,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	2 Unit	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	24,940,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Disperindag DIY	6 Unit	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	415630 orang		0 orang	412630 orang	9,376,772,900						412630 orang	7,015,366,500	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Industri Kecil Mengengah	2.8 %		0 %	2.2 %	9,376,772,900						2.2 %	7,015,366,500	
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku IKM DIY	1 Dokumen	558,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	9,326,772,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku IKM DIY	1 Dokumen	6,457,366,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	440 perusahaan		0 perusahaan	365 perusahaan	44,483,600						365 perusahaan	198,000,000	
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pelaku usaha peserta sosialisasi yang meningkatkan pengetahuannya	400 orang		0 orang	400 orang	44,483,600						400 orang	198,000,000	
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	44,483,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Perusahaan industri	1 Dokumen	198,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,817,416,600						2,627,408,300		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Disperindag)	100 Nilai		0 Nilai	100 Nilai	1,361,459,000						100 Nilai	1,627,408,300	
3 31 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	18,180,000						100 %	19,360,000	
3 31 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi				12 Dokumen	18,180,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	12 Dokumen	19,360,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Keuangan SKPD	Keuangan SKPD						Muja Muju			Yang Berkualitas dan Berkeadilan				PERDAGANGAN
3 31 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	10,320,000						100 %	11,650,000	
3 31 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	12 Laporan	11,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	61,704,500						100 %	65,213,300	
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,293,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	1 Paket	8,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,474,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	1 Paket	17,260,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,603,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	1 Paket	13,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,003,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	3 Paket	3,303,300	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	11,121,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	15 Paket	10,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,734,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	2 Dokumen	3,050,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,475,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	1 Laporan	9,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	54,519,800						100 %	244,530,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	54,519,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	8 Unit	202,070,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,132,004,200						100 %	1,127,000,000	
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	523,765,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	2 Laporan	527,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	608,239,200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	1 Laporan	600,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	84,730,500						100 %	159,655,000	
3 31 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	70,086,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	12 Unit	85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	5,644,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	11 Unit	6,655,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	9,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	BPTTG DIY	13 Unit	68,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	415630 orang		0 orang	412630 orang	455,957,600						412630 orang	1,000,000,000	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Industri Kecil Mengengah	2.8 %		0 %	2.2 %	455,957,600						2.2 %	1,000,000,000	
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	455,957,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Pelaku IKM DIY	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TOTAL						51,734,395,950							75,530,427,003		

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07						33,543,137,532						65,900,502,200		
2	07	01													
2	07	01													
2	07	01	1.01												
2	07	01	1.01	01											
2	07	01	1.01	04											
2	07	01	1.01	07											
2	07	01	1.02												
2	07	01	1.02	01											
2	07	01	1.02	03											
2	07	01	1.02	05											
2	07	01	1.02	07											
2	07	01	1.03												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		perangkat daerah													
2 07 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	19,800,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	6 Laporan	46,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	15,682,000						1 dokumen	17,250,000	
2 07 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	15,682,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	6 Dokumen	17,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun		0 tahun	1 tahun	385,803,833						1 tahun	746,434,500	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23,982,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Paket	51,540,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	64,413,500	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Paket	59,448,400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	14,987,300	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	3 Paket	10,682,100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	27,175,033	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Paket	27,920,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5,258,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Dokumen	8,844,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	149,988,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Laporan	458,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Dokumen	130,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	100,170,000						12 bulan	0	
2 07 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	100,170,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	9 Unit	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa enunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	1,918,572,000						12 bulan	1,479,589,300	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6,340,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	4 Laporan	14,589,300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	653,900,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	4 Laporan	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1,258,332,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	6 Laporan	1,465,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	744,008,200						12 bulan	996,775,900	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29,091,400	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Unit	23,379,400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	466,590,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	40 Unit	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				80 Unit	9,791,500	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	80 Unit	37,537,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	49,735,300	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	79 Unit	173,782,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	150,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	3 Unit	707,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	38,800,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	59 Unit	55,077,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang kompeten	2362 orang		0 orang	1415 orang	83,225,300						1415 orang	572,545,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sampai dengan tahun n	1600 orang		0 orang	1510 orang	53,396,800						1510 orang	532,545,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				30 Orang	53,396,800	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	30 Orang	532,545,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi sampai dengan tahun n	127 lembaga		0 lembaga	103 lembaga	29,828,500						103 lembaga	40,000,000	
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				20 LPK	29,828,500	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	20 LPK	40,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	8060 orang		0 orang	6380 orang	225,329,000						6380 orang	25,635,000,000	
2 07 04 1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD,AKL dan ULD	360 orang		0 orang	150 orang	163,589,800						150 orang	25,505,000,000	
2 07 04 1.01 02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				50 Orang	99,837,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	50 Orang	240,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				150 Orang	43,755,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	150 Orang	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 1.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				6330 Orang	19,997,400	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	6330 Orang	25,200,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	61,739,200						1 dokumen	130,000,000	
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				540 Orang	61,739,200	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	540 Orang	130,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana Hubungan Industrial dan kebijakan pengupahan	2235 perusahaan		0 perusahaan	2121 perusahaan	239,504,700						2121 perusahaan	613,540,500	
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perselisihan yang dicegah	400 perkara		0 perkara	330 perkara	139,505,700						330 perkara	373,977,500	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				210 perkara	50,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	210 perkara	234,190,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 1.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				8 Perkara	10,225,200	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	8 Perkara	10,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	50,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	1 Lembaga	115,104,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 1.02 05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				60 Perusahaan	29,280,500	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	60 Perusahaan	14,183,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	Jumlah penetapan UMP	1 SK		0 SK	1 SK	99,999,000						1 SK	239,563,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)														
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	50,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	masyarakat,pe rusahaan	1 Surat Keputusan	114,658,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 1.03 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				160 Orang	49,999,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	masyarakat,pe rusahaan	160 Orang	124,905,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	298 perusahaan		0 perusahaan	262 perusahaan	300,021,300						262 perusahaan	471,304,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 di Perusahaan (termasuk perusahaan yang mempekerjakan TKA)	300 perusahaan		0 perusahaan	300 perusahaan	300,021,300						300 perusahaan	471,304,000	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				232 Perusahaan	300,021,300	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	masyarakat/pe rusahaan	232 Perusahaan	471,304,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						8,820,000,000							40,800,000,000	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	22090 Orang		0 Orang	15275 Orang	8,820,000,000						15275 Orang	40,800,000,000	
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pembangunan ketahanan sosial budaya	0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	8,820,000,000						1 dokumen	40,800,000,000	
2 22 08 5.09 21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				1 Dokumen	8,820,000,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	1 Dokumen	40,800,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						319,572,000							528,000,000	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	80 %		0 %	80 %	319,572,000						80 %	528,000,000	
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah	Jumlah catrans yang dilatih	50 KK		0 KK	50 KK	319,572,000						50 KK	528,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	119,637,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat	2 Laporan	198,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 03 1.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				25 Kepala Keluarga	199,935,000	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	Masyarakat	25 Kepala Keluarga	330,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						15,476,967,050							17,289,430,780	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi)	90 Nilai		0 Nilai	88,0 Nilai	1,995,613,800						88,0 Nilai	1,871,975,780	
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	32,640,000						1 kegiatan	33,594,000	
2 07 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32,640,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	12 Dokumen	33,594,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	13,200,000						1 kegiatan	14,520,000	
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	13,200,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	14 Laporan	14,520,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun		0 tahun	1 tahun	98,723,600						1 tahun	198,376,000	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Paket	15,824,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	26,840,600	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	5 Paket	29,373,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	12,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	3 Paket	17,804,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Paket	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,774,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Dokumen	6,204,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30,109,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	12 Laporan	104,171,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa enunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	1,564,872,200						12 bulan	1,294,509,280	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,764,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	12 Laporan	1,927,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	269,960,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	12 Laporan	250,798,800	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,293,148,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	12 Laporan	1,041,783,480	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	286,178,000						12 bulan	330,976,500	
2 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	124,894,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	12 Unit	130,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Paket	29,982,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	18 Paket	60,453,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	86,500,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Unit	120,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				53 Unit	44,801,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	53 Unit	20,523,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang kompeten	2362 orang		0 orang	1415 orang	13,481,353,250						1415 orang	15,417,455,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sampai dengan tahun n	1600 orang		0 orang	1510 orang	13,381,443,450						1510 orang	14,917,455,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				1240 Orang	13,381,443,450	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pencari kerja	1240 Orang	14,917,455,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	20 dokumen		0 dokumen	20 dokumen	99,909,800						20 dokumen	500,000,000	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				5 Dokumen	99,909,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	pekerja	5 Dokumen	500,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2,289,721,320							2,149,021,696	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi)	90 Nilai		0 Nilai	88,0 Nilai	1,206,975,520						88,0 Nilai	949,021,696	
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	25,080,000						1 kegiatan	25,080,000	
2 07 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	25,080,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	6 Dokumen	25,080,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	9,600,000						1 kegiatan	9,600,000	
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9,600,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	2 Laporan	9,600,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	1 tahun		0 tahun	1 tahun	117,707,000						1 tahun	187,335,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		perangkat daerah													
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	10 Paket	13,061,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 Paket	10,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	29 Paket	15,615,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	9,548,400	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	13 Paket	6,870,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan				1 Paket	9,000,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Paket	14,084,400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,427,600	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	1 Dokumen	2,427,600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	76,731,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	16 Laporan	135,277,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa enunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	800,210,220						12 bulan	430,847,896	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	2,173,800	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	3 Laporan	2,173,800	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	141,728,420	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	5 Laporan	121,025,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	656,308,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	8 Laporan	307,648,196	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	254,378,300						12 bulan	296,158,800	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	174,054,700	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	13 Unit	174,058,800	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	55,250,000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	3 Unit	100,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25,073,600	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD	3 Unit	21,850,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	298 perusahaan		0 perusahaan	262 perusahaan	1,082,745,800						262 perusahaan	1,200,000,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 di Perusahaan (termasuk perusahaan yang mempekerjakan TKA)	300 perusahaan		0 perusahaan	300 perusahaan	1,082,745,800						300 perusahaan	1,200,000,000	
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				85 Perusahaan	1,082,745,800	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan ekonomi	masyarakat	85 Perusahaan	1,200,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TOTAL							60,449,397,902							126,666,954,676	

SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10						150,000,000						450,000,000		
2	10	11					150,000,000					0	450,000,000		
2	10	11	5.01				150,000,000					100 %	450,000,000		
2	10	11	5.01	01			150,000,000	1 Dokumen	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	1 Dokumen	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
2	12						224,999,800						841,587,000		
2	12	02					59,208,000					100 %	238,587,000		
2	12	02	1.01				24,474,000					100 %	126,335,000		
2	12	02	1.01	02			24,474,000	80 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	80 Dokumen	59,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	12	02	1.02				34,734,000					100 %	112,252,000		
2	12	02	1.02	01			19,234,000	1 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	1 Laporan	46,552,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	12	02	1.02	02			15,500,000	1 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	1 Laporan	65,700,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	12	03					90,792,000					100 %	248,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 03 1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	41,622,200						100 %	215,000,000	
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	41,622,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	1 Laporan	215,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2 12 03 1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	%		%	100 %	49,169,800						100 %	18,000,000	
2 12 03 1.02 01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	44,753,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
2 12 03 1.02 04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	4,416,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di DIY	3 Dokumen	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY	100 %		0 %	100 %	33,373,800						100 %	275,000,000	
2 12 04 1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%		%	100 %	33,373,800						100 %	230,000,000	
2 12 04 1.02 01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				2 Laporan	32,331,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	2 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2 12 04 1.02 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				5 Dokumen	1,042,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	5 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY	100 %		0 %	100 %	41,626,000						100 %	80,000,000	
2 12 05 1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	%		%	100 %	41,626,000						100 %	80,000,000	
2 12 05 1.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain				1 Dokumen	41,626,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat di DIY	1 Dokumen	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							50,000,000						2,310,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						50,000,000						2,310,000,000		
2 13 04 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						50,000,000						2,310,000,000		
2 13 04 1.01 02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	15,306,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	310,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
2 13 04 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1 Dokumen	18,088,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		1 Dokumen	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
2 13 04 1.01 05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	16,604,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						187,000,000						0		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						187,000,000						0		
2 22 08 5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						187,000,000						0		
2 22 08 5.06 03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan				1 kalurahan	187,000,000		Dana Keistimewaan DIY	Peningkatan kualitas layanan publik		1 kalurahan	0	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						3,124,237,700						5,211,500,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						565,783,400						1,591,500,000		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21,719,900						60,000,000		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	11,247,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Dokumen	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10,472,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43,724,600						48,000,000		
4 01 01 1.02 03	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	31,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,644,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	7,520,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	8,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11,400,000						18,000,000		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,400,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						317,969,900						1,050,000,000		
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,531,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	9,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	32,203,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,984,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	9,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21,489,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	32,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	11,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	228,601,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	890,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,000,000						3,500,000		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	3,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168,969,000						222,000,000		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17,744,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	114,142,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Unit	140,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37,082,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						365,699,300						1,360,000,000		
4 01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						99,999,900						575,000,000		
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	58,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				5 Dokumen	41,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Dokumen	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	%		%	100 %	75,000,000					100 %	415,000,000		
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemda DIY, stakeholder terkait, kabupaten/kot a di DIY	2 Laporan	315,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						190,699,400						370,000,000		
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	190,699,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						2,192,755,000						2,260,000,000		
4 01 10 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan						2,192,755,000						2,260,000,000		
4 01 10 5.01 10	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				3 Dokumen	2,192,755,000		Dana Keistimewaan DIY			3 Dokumen	2,260,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Dibina													
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						436,516,000						529,786,400		
2 10 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan (Biro Hukum)	100 %		0 %	100 %	436,516,000						100 %	529,786,400	
2 10 11 5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %		0 %	100 %	436,516,000						100 %	529,786,400	
2 10 11 5.02 02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	436,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Berita Acara	529,786,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						3,660,073,480						7,044,860,248		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Hukum)	88.7 Nilai		0 Nilai	88.7 Nilai	648,559,900						88.7 Nilai	1,547,220,450	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	15,900,400						100 % 100 %	20,000,000	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5,023,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	6 Dokumen	6,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6,637,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	6 Dokumen	6,100,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	4,239,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	3 Dokumen	7,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	34,780,300						100 % 100 %	55,810,000	
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28,680,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	12 Dokumen	49,440,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,187,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Laporan	1,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Dokumen	4,912,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	12 Dokumen	5,170,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	10,320,000						100 % 100 %	15,600,000	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	10,320,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	4 Laporan	15,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %		0 %	100 %	6,261,400						100 %	8,500,000	
4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				1 Dokumen	6,261,400	Kota Yogyakarta, Danurejan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Dokumen	8,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pegawai						Suryatmajan		Transformasi Pelayanan Publik					
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	280,248,100					100 % 100 %	845,966,200		
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,130,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Paket	5,734,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	55,762,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	2 Paket	8,875,200	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,716,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Paket	16,572,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36,539,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Paket	39,085,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Paket	2,738,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	2 Paket	11,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	174,362,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Laporan	764,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 % 1 Tahun 100 %		0 % 0 Tahun 0 %	100 % 1 Tahun 100 %	102,113,900					100 % 1 Tahun 100 %	108,275,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Bina Mental Spiritual) Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Biro Organisasi) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro PIWP2) Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Biro APSDA) Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 % 100 % 100 %	0 % 0 % 0 %	100 % 100 % 100 %						100 % 100 % 100 %				
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	87,896,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	7 Unit	82,275,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14,217,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	2 Unit	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 100 %	0 % 0 %	100 % 100 %		5,720,000						100 % 100 %	57,668,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,120,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Laporan	3,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Laporan	13,068,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun 100 % 100 %		0 Tahun 0 % 0 %	1 Tahun 100 % 100 %	193,215,800						1 Tahun 100 % 100 %	435,401,250	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28,712,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	1 Unit	28,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	80,692,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	6 Unit	99,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	33,410,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	7 Unit	41,412,250	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50,400,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Hukum Setda DIY	2 Unit	241,989,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rerata capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan	100 %		0 %	100 %	2,211,513,580						100 %	4,550,279,798	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum													
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota	100 %		0 %	100 %	510,597,100						100 %	1,654,683,870	
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				36 Dokumen	79,196,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	36 Dokumen	385,451,550	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				70 Dokumen	16,386,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	70 Dokumen	33,628,320	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				3 Dokumen	199,434,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	3 Dokumen	682,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				110 Dokumen	215,580,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	110 Dokumen	553,104,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100 %		0 %	100 %	1,700,916,480						100 %	2,895,595,928	
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	283,430,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	1 Kasus	1,198,121,900	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				100 Kasus	1,417,485,580	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	100 Kasus	1,697,474,028	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	%		%	73.33 %	800,000,000						73.33 %	947,360,000	
4 01 10 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah dengan tingkat	%		%	73.33 %	800,000,000						73.33 %	947,360,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Urusan Keistimewaan	kedatangan tinggi													
4 01 10 5.01 07	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi				35 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten Kota	35 Dokumen	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 10 5.01 09	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun				15 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten Kota	15 Dokumen	297,360,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						33,068,392,900					38,116,600,000			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Bna Mental Spiritual)	91.03 Nilai	0 Nilai	90.36 Nilai	746,290,300							90.36 Nilai	2,314,600,000	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Bina Mental Spiritual)	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	71,165,100							1 Tahun	200,200,000	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	55,830,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	2 Dokumen	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	5,871,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	4 Dokumen	78,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9,464,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	4 Laporan	52,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Bina Mental Spiritual)	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	59,540,300							1 Tahun	211,200,000	
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	46,378,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	12 Dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,748,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Laporan	7,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	6,414,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	12 Laporan	24,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Bina Mental)	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	14,280,600						1 Tahun	25,200,000	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	14,280,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	4 Laporan	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Bina Mental Spiritual)	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	361,396,800						1 Tahun	1,105,200,000	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,408,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Paket	13,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Paket	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,996,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Paket	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	2 Paket	39,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11,241,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	12 Dokumen	36,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	199,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Laporan	720,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan							
4 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	99,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Dokumen	216,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Bina Mental Spiritual)	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	46,961,300						1 Tahun	415,000,000	
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	13,100,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Paket	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	24,676,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	8 Unit	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				20 Unit	2,076,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	20 Unit	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7,108,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Unit	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	24,730,000						100 %	53,200,000	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Laporan	13,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	0 Laporan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	13,230,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	0 Laporan	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	168,216,200					1 Tahun	271,000,000		
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	111,570,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	6 Unit	156,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				22 Unit	6,551,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	22 Unit	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	31,794,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	85 Unit	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	18,300,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	0 Unit	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rumusan bahan pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat	16 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	32,322,102,600					4 Dokumen	35,802,000,000		
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan (Biro Bina Mental)	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	31,597,074,700					1 Tahun	33,636,000,000		
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1121 Lembaga	31,597,074,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SKPD DIY, Kab/Kota, Instansi terkait, Lembaga Keagamaan, Kontigen Festival Keagamaan	1121 Lembaga	33,636,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Biro Bina Mental)	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	258,841,400					1 Tahun	1,740,000,000		
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	33,841,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	SKPD DIY, Kabupaten/Kota, Instansi terkait	2 Dokumen	906,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi,				5 Dokumen	225,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan,	SKPD DIY, Kabupaten/Ko	5 Dokumen	834,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			keehatan, dan budaya)	ta, Instansi terkait			
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Biro Bina Mental)	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	466,186,500						1 Tahun	426,000,000	
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				5 Dokumen	466,186,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Kelurahan, Kalurahan/Desa, Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	426,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						297,151,000						330,000,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pendukung perekonomian (Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam)	100 %		0 %	100 %	297,151,000						100 %	330,000,000	
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Budaya	100 %		0 %	100 %	297,151,000						100 %	330,000,000	
2 22 08 5.09 01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				20 Desa	297,151,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Pemulihan ekonomi	Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan OPD Terkait di Wilayah DIY dan Kab/Kota dan pemangku kepentingan	20 Desa	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,118,780,900						3,069,012,500		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Perekonomian dan SDA)	90.80 Nilai		0 Nilai	90.50 Nilai	418,556,000						90.50 Nilai	662,000,000	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro APSDA)	100 %		0 %	100 %	18,326,100						100 %	44,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10,429,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	3 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2,732,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	4 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5,165,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	3 Laporan	7,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Biro APSDA)	100 %		0 %	100 %	39,314,100						100 %	46,500,000	
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	32,760,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Dokumen	37,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,500,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Laporan	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	4,053,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	3 Laporan	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %		0 %	100 %	9,600,000						100 %	18,000,000	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Laporan	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		0 %	100 %	188,710,700						100 %	336,000,000	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,332,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Paket	3,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21,722,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	21 Paket	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	7,443,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	15 Paket	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	23,278,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	3 Paket	26,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	8,750,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	5 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	101,184,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Laporan	230,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	24,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Dokumen	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100 %		0 %	100 %	39,850,200						100 %	80,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jabatan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Biro APSDA)													
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	39,850,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	3 Unit	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Biro APSDA)	100 %		0 %	100 %	6,990,000						100 %	8,500,000	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,390,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Laporan	4,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Laporan	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		0 %	100 %	115,764,900						100 %	129,000,000	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25,552,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan			Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1 Unit	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	71,345,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	5 Unit	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	13,987,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	20 Unit	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	4,880,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	8 Unit	7,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %		0 %	100 %	700,224,900						100 %	2,407,012,500	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	100 %		0 %	100 %	617,153,700						100 %	1,657,012,500	
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	542,176,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	OPD dan stakeholder terkait	4 Dokumen	1,452,544,500	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				3 Dokumen	74,977,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	OPD dan stakeholder terkait	3 Dokumen	204,468,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100 %		0 %	100 %	43,658,400						100 %	550,000,000	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				3 Dokumen	43,658,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	OPD dan stakeholder terkait	3 Dokumen	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	100 %		0 %	100 %	39,412,800						100 %	200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah													
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	18,380,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kodya Yogyakarta	1 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	21,032,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan ekonomi	Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kodya Yogyakarta	1 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,000,000,000						1,680,000,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan)	100 %		0 %	100 %	1,000,000,000						100 %	1,680,000,000	
2 22 08 5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100 %		0 %	100 %	1,000,000,000						100 %	1,680,000,000	
2 22 08 5.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Fasilitasi Badan Pengelola Geopark Kajian Rencana Tapak Geosite-Geopark Lanjutan Proses Pengusulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi(Forum Warisan Geologi DIY) Pelaksanaan Kegiatan Centre Of Excellence (Pusat Unggulan) Penelitian dan Pendidikan Kebumian Review Rencana Induk (Management Plan) Geopark Talkshow Geoheritage dan Geopark				1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan 1 dokumen 2 kegiatan 1 paket 3 kali	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	DIY	1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan 1 dokumen 2 kegiatan 1 paket 3 kali	1,680,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						538,733,300						3,735,381,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro PIWP2)	94,74 nilai		0 nilai	94,71 nilai	203,928,000					94,71 nilai	982,481,000		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	8,080,100					100 %	23,055,000		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3,356,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	4 Dokumen	9,150,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1,646,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	4 Dokumen	4,455,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3,076,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	3 Laporan	9,450,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro PIWP2)	100 %		0 %	100 %	35,704,000					100 %	50,395,000		
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34,020,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	12 Dokumen	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	690,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 Laporan	5,995,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	993,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	18 Laporan	9,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro PIWP2)	100 %		0 %	100 %	11,989,000					100 %	17,292,000		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11,989,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 Laporan	17,292,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro PIWP2)	100 %		0 %	100 %	68,410,000						100 %	722,786,000	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,197,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	1 Paket	9,315,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,113,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	1 Paket	41,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	525,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	1 Paket	3,886,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,923,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	1 Paket	18,335,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	54,650,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	3 Laporan	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro PIWP2)	100 %		0 %	100 %	79,744,900						100 %	168,953,000	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19,364,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	1 Unit	29,848,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	52,433,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	6 Unit	110,380,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 jenis	3,897,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	0 Unit 3 jenis	15,450,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				2 jenis	4,050,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 jenis	13,275,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dipelihara/Direhabilitasi													
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan)	73.49 %		0 %	58.99 %	120,200,500					58.99 %	592,900,000		
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas	90 %		0 %	84 %	87,805,500					84 %	363,000,000		
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	87,805,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 Laporan	363,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						3,522,200						121,000,000		
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				2 Laporan	3,522,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 Laporan	121,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						28,872,800						108,900,000		
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	28,872,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	3 Dokumen	108,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan	%		%	21,50 %	214,604,800					21,50 %	2,160,000,000		
4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan yang dievaluasi	100 %		0 %	25 %	136,953,700					25 %	885,000,000		
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Laporan Fasilitas KPBU				0 Laporan 3 Laporan 1 dokumen	136,953,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	DIY	0 Laporan 3 Laporan 1 dokumen	885,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	100 %		0 %	18 %	77,651,100						18 %	1,275,000,000	
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				2 Dokumen	77,651,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	DIY	2 Dokumen	1,275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						4,344,406,800						1,000,000,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% %		% %	88,23 % 88,23 %	473,748,700						88,23 % 88,23 %	0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	88,23 %	11,712,000						88,23 %	0	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5,715,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	5 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2,468,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3,529,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	88,23 %	40,805,100						88,23 %	0	
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	34,020,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	3,887,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SKPD													
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	2,898,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		88.23 %	11,347,000						88.23 %	0	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	11,347,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		88.23 %	261,765,800						88.23 %	0	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	666,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,479,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,865,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,376,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	243,878,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Organisasi Setda DIY	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,000,000							0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				1 Laporan	13,500,000	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Danurejan, Suryatmajan							
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	88,23 %	134,118,800					88,23 %	0		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	31,600,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	84,100,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	7 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	18,417,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Organisasi Setda DIY	8 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Unit Pelayanan Publik pada Kategori B Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi kategori "sangat baik" (A)	unit %		unit %	2 unit 75 %	323,658,100					2 unit 75 %	0		
4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Unit Pelayanan Publik pada kategori B	unit		unit	2 unit	323,658,100					2 unit	0		
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	84,405,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	14,378,700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				3 Dokumen	82,213,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	142,661,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan		Pelayanan Publik					
4 01 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perangkat daerah dengan kematangan tinggi % Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi %	% %	% %	73,33 % 73,33 %	3,547,000,000						73,33 % 73,33 %	1,000,000,000		
4 01 10 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi %	%	%	73,33 %	2,897,000,000						73,33 %	0		
4 01 10 5.01 01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan			17 Dokumen	750,000,000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten Kota	17 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 10 5.01 04	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	500,000,000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten Kota	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 10 5.01 06	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan				3 Dokumen	650,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten Kota	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 10 5.01 08	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				4 Dokumen	997,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten Kota	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 10 5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	%		%	73.33 %	650,000,000						73.33 %	1,000,000,000	
4 01 10 5.02 01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				4 Dokumen	650,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah DIY dan Kabupaten kota	4 Dokumen	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							4,886,162,000						500,000,000	
1 03 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	%		%	100 %	4,886,162,000						100 %	500,000,000	
1 03 13 5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	%		%	100 %	4,886,162,000						100 %	500,000,000	
1 03 13 5.02 01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				4 Dokumen	4,886,162,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	4 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						21,177,759,917						25,790,172,359		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	87.85 %	21,177,759,917					87.85 %	25,790,172,359		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	11,343,000					100 %	9,300,000		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7,175,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	3 Dokumen	7,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,168,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	2 Dokumen	1,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 Laporan	1,050,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	%		%	100 %	48,888,000					100 %	49,025,000		
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	47,040,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Dokumen	47,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	519,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 Laporan	550,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				13 Laporan	1,329,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	13 Laporan	1,375,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD													
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	70,000,000					100 %	60,500,000		
4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	60,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	4 Laporan	60,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%		%	100 %	1,748,020,170						100 %	2,118,100,000	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	124,752,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 Paket	118,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	163,149,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	4 Paket	174,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	245,573,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	6 Paket	285,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	146,890,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	2 Paket	160,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				3 Dokumen	55,645,200	Kota Yogyakarta, Danurejan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda	3 Dokumen	56,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Undangan yang Disediakan						Suryatmajan				DIY			
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	766,865,070	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	24 Laporan	910,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	245,144,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	2 Dokumen	415,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%		%	100 %	1,163,800,700						100 %	849,490,000	
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	750,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 Unit	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	215,300,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	33 Unit	202,740,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				97 Unit	198,500,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	97 Unit	196,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%		%	100 %	4,949,664,550						100 %	5,607,388,436	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8,850,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 Laporan	9,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Laporan	2,734,384,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	4 Laporan	2,972,735,220	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang Disediakan													
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	133,050,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Laporan	219,978,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,073,380,550	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Laporan	2,405,675,216	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%		%	100 %	3,380,864,700						100 %	4,046,564,300	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	490,023,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Unit	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61 Unit	1,111,082,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	61 Unit	1,250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	274,827,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Unit	484,140,200	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1,313,331,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	10 Unit	1,644,664,100	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung				7 Unit	191,600,000	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda	7 Unit	67,760,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Danurejan, Suryatmajan			DIY				
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%		%	100 %	3,199,359,097					100 %	3,358,555,485		
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	3,199,359,097	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	2 Orang/ Bulan	3,358,555,485	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan	%		%	100 %	1,090,621,000					100 %	1,654,043,100		
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	56,218,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	4 Laporan	142,143,100	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				7 Laporan	1,034,403,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	7 Laporan	1,511,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara ,Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	%		%	100 %	5,515,198,700					100 %	8,037,206,038		
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				25 Laporan	3,215,002,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	25 Laporan	3,681,426,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	1,381,996,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Laporan	2,003,080,038	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	918,200,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	12 Laporan	2,352,700,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						920,000,000						930,000,000		
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Implementasi Desa /Kalurahan model Global Gotong Royong (Biro Pemberdayaan Masyarakat)	8 Desa/kalurahan		0 Desa/kalurahan	4 Desa/kalurahan	920,000,000					4 Desa/kalurahan	930,000,000		
2 22 08 5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pelestarian budaya dengan implementasi global gotong royong	100 %		0 %	100 %	920,000,000					100 %	930,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan													
2 22 08 5.09 17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	350,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Kokap, Kalirejo Kab. Sleman, Tempel, Sumberrejo	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Desa/Kalurahan sasaran kegiatan G2R, Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga lain yang ada didesa	1 Laporan	360,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2 22 08 5.09 20	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa				1 Laporan	570,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Desa/Kalurahan sasaran kegiatan G2R, Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga lain yang ada didesa	1 Laporan	570,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						3,962,788,900							15,882,952,868	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Pemberdayaan Masyarakat	88.6 Nilai		0 Nilai	88.3 Nilai	404,361,000						88.3 Nilai	8,093,003,458	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	11,149,700						100 %	85,703,400	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4,545,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	62,294,400	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	6,604,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	14 Laporan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Da	%		%	100 %	36,473,400						100 %	51,121,435	
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32,520,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	43,121,435	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	3,953,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	14 Laporan	8,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	7,200,000						100 %	18,000,000	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Dearah				6 Laporan	7,200,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	6 Laporan	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Dearah	%		%	100 %	246,944,100						100 %	7,157,892,623	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	49,031,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	5 Paket	85,366,800	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	197,913,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	497,525,823	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	27,991,200						100 %	648,645,000	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	27,991,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	4 Unit	160,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	3,600,000					100 %	6,000,000		
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	71,002,600					100 %	125,641,000		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19,540,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	1 Unit	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	51,462,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	5 Unit	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Implementasi Kelurahan Model Gotong Royong Segoro Amarto	kelurahan		kelurahan	6 kelurahan	3,558,427,900					6 kelurahan	7,789,949,410		
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %		0 %	100 %	207,037,600					100 %	556,974,740		
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	207,037,600	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Masyarakat DIY	4 Dokumen	556,974,740	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 %		0 %	100 %	3,351,390,300					100 %	7,232,974,670		
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				14 Dokumen	3,351,390,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Masyarakat DIY	14 Dokumen	7,232,974,670	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						65,815,816,457						68,666,948,405		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						65,815,816,457						68,666,948,405		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,700,100						5,300,000		
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Biro Organisasi Tahun 2024				1 Dokumen 1 Dokumen	1,700,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		1 Dokumen 1 Dokumen	1,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		1 Laporan	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						62,741,798,295						65,282,626,401		
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				389 Orang/ Bulan	62,714,120,395	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		389 Orang/ Bulan	65,260,766,401	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20,280,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik		12 Dokumen	14,460,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	1 Laporan	1,200,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	6,197,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	13 Laporan	6,200,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,639,071,000						1,700,000,000		
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,639,071,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	12 Laporan	1,700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						445,883,962						457,898,504		
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	238,383,962	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	2 Orang/Bulan	227,898,504	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	157,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	2 Paket	170,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	2 Orang	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumaha tanggaan Sekretariat Daerah						983,363,100						1,221,123,500		
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	776,526,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	6 Paket	923,000,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	142,958,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	4 Paket	234,223,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat				2 Paket	63,877,600	Kota Yogyakarta, Danurejan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	2 Paket	63,900,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Daerah yang Disediakan						Suryatmajan							
TOTAL							144,962,819,154						176,088,800,780		

SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02						132,228,098,764						325,362,206,000		
4	02	01													
4	02	01													
4	02	01	1.01												
4	02	01	1.01	01											
4	02	01	1.01	04											
4	02	01	1.01	07											
4	02	01	1.02												
4	02	01	1.02	01											
4	02	01	1.02	03											
4	02	01	1.02	05											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Danurejan, Suryatmajan		Transformasi Pelayanan Publik		DPRD			
4 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	59,809,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur / pegawai Sekretariat DPRD	13 Laporan	62,201,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 %		0 %	100 %	27,103,000						100 %	21,216,000	
4 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	27,103,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik Daerah yang menjadi aset pada Sekretariat DPRD DIY	14 Laporan	21,216,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %		0 %	100 %	370,457,600						100 %	302,647,000	
4 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	17,912,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Sekretariat DPRD DIY	16 Dokumen	18,629,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	352,545,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Sekretariat DPRD DIY	22 Orang	284,018,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,	100 %		0 %	100 %	1,436,157,100						100 %	1,443,739,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitas kunjungan tamu, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	33,577,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur Perangkat Daerah	8 Paket	35,018,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	162,290,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur Perangkat Daerah	4 Paket	127,217,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	28,356,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur Perangkat Daerah	5 Paket	11,898,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	146,699,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur Perangkat Daerah	2 Paket	147,713,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	1,065,234,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur Perangkat Daerah	24 Laporan	1,121,893,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pengadaan mebel, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		0 %	100 %	1,385,264,400						100 %	169,227,547,000	
4 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	79,913,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD DIY	2 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya				98 Unit	507,360,700	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik Daerah pada Sekretariat	98 Unit	1,027,547,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang Disediakan						Danurejan, Suryatmajan		Transformasi Pelayanan Publik		DPRD DIY			
4 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	797,989,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD DIY	1 Unit	168,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		0 %	100 %	3,289,139,600						100 %	3,147,090,000	
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	1,168,163,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur perangkat daerah	60 Laporan	1,200,160,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	2,120,976,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	aparatur perangkat daerah	60 Laporan	1,946,930,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		0 %	100 %	2,034,362,858						100 %	2,121,816,000	
4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	388,937,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik daerah pada Sekretariat DPRD DIY	5 Unit	421,443,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau				29 Unit	677,331,300	Kota Yogyakarta,		Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik daerah pada	29 Unit	643,505,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD DIY			
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				254 Unit	250,710,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik daerah pada Sekretariat DPRD DIY	254 Unit	325,146,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	717,383,458	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Barang Milik daerah pada Sekretariat DPRD DIY	3 Unit	731,722,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100 %		0 %	100 %	41,727,443,990						100 %	47,482,524,000	
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	40,965,600,990	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	55 Orang/ Bulan	46,690,416,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				305 Paket	486,401,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	305 Paket	505,857,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	275,441,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	286,251,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 %		0 %	100 %	4,478,213,100						100 %	4,420,503,000	
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				196 Laporan	2,838,549,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	196 Laporan	2,689,558,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				14 Laporan	1,639,663,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	14 Laporan	1,730,945,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %		0 %	95,5 %	67,201,202,386						95,5 %	85,815,015,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	96.5 %		0 %	95.5 %	13,923,634,400						95.5 %	14,891,072,000	
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	2,861,020,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Biro Hukum, Kemendagri, Kemenkumham, OPD pengusul Raperda	10 Dokumen	2,981,069,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	6,399,735,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Biro Hukum, Kemendagri, Kemenkumham, OPD pengusul Raperda	12 Dokumen	7,704,333,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	1,294,723,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Biro Hukum, Kemendagri, Kemenkumham, OPD pengusul Raperda	8 Dokumen	1,019,363,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				158 Dokumen	3,368,154,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Biro Hukum, Kemendagri, Kemenkumham, OPD pengusul Raperda	158 Dokumen	3,186,307,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan	96.5 %		0 %	95.5 %	2,191,293,900						95.5 %	2,412,348,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD													
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	466,777,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	501,624,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	105,397,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	120,289,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	589,299,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	649,304,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	431,248,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	484,314,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	43,171,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	49,958,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	555,400,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi	1 Dokumen	606,859,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											Perangkat Daerah				
4 02 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96.5 %		0 %	95.5 %	1,161,773,600					95.5 %	1,096,884,000		
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				7 Laporan	485,410,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Eksekutif mitra kerja Komisi,	7 Laporan	274,221,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	225,454,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Eksekutif mitra kerja Komisi,	5 Laporan	274,221,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	225,454,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Eksekutif mitra kerja Komisi,	5 Laporan	274,221,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	225,454,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Eksekutif mitra kerja Komisi,	5 Laporan	274,221,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96.5 %		0 %	95.5 %	17,003,959,300					95.5 %	26,886,065,000		
4 02 02 1.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2,364,946,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Penyelenggara Bimbingan teknis	4 Dokumen	3,930,060,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				8 Dokumen	6,926,012,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Penyelenggara Bimbingan teknis	8 Dokumen	14,514,018,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	1,598,326,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Penyelenggara Bimbingan teknis	18 Orang	1,662,259,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	813,262,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Penyelenggara Bimbingan teknis	7 Orang	822,809,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				32 Dokumen	5,301,411,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Penyelenggara Bimbingan teknis	32 Dokumen	5,956,919,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	96.5 %		0 %	95.5 %	7,677,617,800						95.5 %	10,848,139,000	
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	289,581,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Masyarakat DIY, TAPD DIY, OPD pengampu	1 Dokumen	225,816,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	7,388,036,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, Masyarakat DIY, TAPD DIY, OPD pengampu	3 Dokumen	10,622,323,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 02 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD	96.5 %		0 %	95.5 %	394,807,900						95.5 %	429,462,000	
4 02 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	394,807,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	3 Laporan	429,462,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96.5 %		0 %	95.5 %	24,848,115,486						95.5 %	29,251,045,000	
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				33 Dokumen	17,784,645,886	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY,	33 Dokumen	22,164,181,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	30,207,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY,	1 Laporan	31,493,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	1,868,019,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY,	14 Dokumen	1,947,822,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				13 Dokumen	5,165,243,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan kualitas layanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY,	13 Dokumen	5,107,549,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pelayanan Publik					
TOTAL							132,228,098,764						325,362,206,000		

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01						22,182,206,313						15,616,436,279						
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.85 Nilai		0 Nilai	95.35 Nilai	19,323,211,013		95.35 Nilai	4,834,415,670				
5	01	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118 dokumen/laporan		0 dokumen/laporan	30 dokumen/laporan	76,845,300		30 dokumen/laporan	98,461,000				
5	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25,781,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	4 Dokumen	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	19,685,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	4 Dokumen	15,851,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	31,378,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	22 Laporan	35,090,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16,958,019,933						105,829,000	
5	01	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/ Bulan	16,883,129,833	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	109 Orang/ Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	41,990,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Dokumen	70,829,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8,976,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	2 Laporan	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	23,924,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	13 Laporan	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 laporan		0 laporan	12 laporan	12,540,000						12 laporan	18,594,000	
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	12,540,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	6 Laporan	18,594,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	52 dokumen		0 dokumen	13 dokumen	133,188,200						13 dokumen	135,386,020	
5 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	133,188,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	13 Dokumen	135,386,020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	114 dokumen/laporan		0 dokumen/laporan	29 dokumen/laporan	769,342,600						29 dokumen/laporan	1,329,444,300	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,980,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Paket	16,480,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	46,999,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	2 Paket	61,050,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	36,547,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	2 Paket	52,965,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	36,475,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	2 Paket	60,170,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7,408,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	4 Dokumen	9,350,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	568,371,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	3 Laporan	1,038,929,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	58,559,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin	323 unit/paket		0 unit/paket	97 unit/paket	354,281,200						97 unit/paket	464,109,600	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	141,408,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Paket	11,809,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	132,495,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	11 Unit	350,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	80,377,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	5 Unit	102,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	jenis		jenis	32 jenis	404,072,400						32 jenis	578,417,730	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Laporan	8,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50,914,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Laporan	49,588,704	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48,549,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Laporan	64,468,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	297,108,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	2 Laporan	456,110,226	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan	945 unit		0 unit	225 unit	614,921,380						225 unit	2,104,174,020	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.													
5 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34,415,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Unit	37,532,990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	227,896,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	10 Unit	271,602,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	10,150,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Unit	11,720,940	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				56 Unit	10,880,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	56 Unit	17,659,950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	51,020,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	42 Unit	68,458,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	254,847,880	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	1 Unit	1,652,890,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	25,711,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Bappeda DIY	28 Unit	44,308,990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %		0 %	100 %	2,199,999,900						100 %	6,778,409,164	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan	19 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	1,199,999,900						5 dokumen	4,346,800,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)													
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	92,300,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 Dokumen	251,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)				3 Dokumen	1,107,699,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	3 Dokumen	4,095,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	109 dokumen		0 dokumen	28 dokumen	1,000,000,000						28 dokumen	2,431,609,164	
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				20 Laporan	992,668,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	20 Laporan	2,327,125,664	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				3 Dokumen	7,331,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	3 Dokumen	104,483,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	93 %		0 %	90 %	658,995,400						90 %	4,003,611,445	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	462,895,500						4 dokumen	2,621,261,445	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	100,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD Bidang Mitra di DIY dan Kab/kota	2 Dokumen	552,985,345	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	362,895,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD Bidang Mitra di DIY dan Kab/kota	4 Dokumen	2,068,276,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	99,999,900						3 dokumen	482,350,000	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	99,999,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DIY	2 Dokumen	482,350,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	96,100,000						2 dokumen	900,000,000	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	96,100,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	DIY	2 Dokumen	900,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						950,307,150						3,221,000,000		
2 20 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.85 Nilai		0 Nilai	95.35 Nilai	749,373,450						95.35 Nilai	571,000,000	
2 20 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan	dokumen		dokumen	143 dokumen	35,700,000						143 dokumen	25,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD													
2 20 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	35,700,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 laporan		0 laporan	12 laporan	7,500,000						12 laporan	5,500,000	
2 20 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	7,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	6 Laporan	5,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen		dokumen	29 dokumen	230,445,200						29 dokumen	222,100,000	
2 20 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,010,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Paket	1,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 Paket	30,860,600	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Paket	23,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kantor yang Disediakan						Danurejan, Suryatmajan						DAERAH	
2 20 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13,938,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Paket	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16,477,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	2 Paket	12,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 dokumen	7,468,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	2 dokumen	4,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	158,690,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	3 Laporan	165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit		unit	75 unit	289,722,600						75 unit	180,400,000	
2 20 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	289,722,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	18 Unit	180,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	laporan		laporan	9 laporan	109,654,300						9 laporan	81,500,000	
2 20 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,026,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Laporan	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16,761,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Laporan	7,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,977,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Laporan	22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	83,889,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	unit		unit	240 unit	76,351,350						240 unit	56,500,000	
2 20 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	37,718,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Unit	22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2,075,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	2 Unit	1,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	13,604,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	18 Unit	13,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,232,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	1 Unit	12,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 20 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	5,720,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	BPPSD DIY	6 Unit	7,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	%		%	50 %	200,933,700						50 %	2,650,000,000	
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan	dokumen		dokumen	10 dokumen	200,933,700						10 dokumen	2,650,000,000	
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				9 Dokumen	200,933,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat daerah Pemda DIY, kabupaten/kot a,instansi vertikal di DIY	9 Dokumen	2,500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							237,139,100						470,000,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	85 %		0 %	70 %	237,139,100						70 %	470,000,000	
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	29,095,000						1 dokumen	45,000,000	
5 05 02 1.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Laporan	29,095,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	perangkat daerah Pemda DIY, kabupaten/kot a,instansi vertikal di DIY	2 Laporan	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	42,909,100						1 dokumen	65,000,000	
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	42,909,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kot a,instansi vertikal di DIY	1 Dokumen	65,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	20 laporan		0 laporan	5 laporan	165,135,000						5 laporan	295,000,000	
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan				5 Laporan	165,135,000	Kota Yogyakarta, Danurejan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Perangkat daerah Pemda DIY,	5 Laporan	295,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						Suryatmajan				kabupaten/kot a,instansi vertikal di DIY			DAERAH
TOTAL							23,369,652,563							19,307,436,279	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02						1,542,864,731,955						1,063,577,434,159						
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.50 Nilai		0 Nilai	87.25 Nilai	84,868,271,126		87.25 Nilai	89,752,098,470				
5	02	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	78,468,000		100 persen	100,500,000					
5	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renstra Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKT Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK/ROPK Perubahan Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK/ROPK Perubahan: BA Forum OPD			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	24,315,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			4 Dokumen	37,213,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	4 Dokumen	27,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja : konsep/bahan LKPJ Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja : konsep/bahan LPPD Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: laporan movev timbal			1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	16,939,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	23,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		balik triwulanan Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: monev bulanan Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : dokumen LKJIP dengan nilai AKIP "A" (Skor 87,60													
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	persen		persen	100 persen	82,059,712,244						100 persen	85,909,798,470	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 1 tahun	81,963,362,244	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	0 Orang/ Bulan 1 tahun	85,813,548,470	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	65,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Dokumen	65,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	17,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	2 Laporan	17,750,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	13,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	1 Laporan	13,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	33,600,000						100 persen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	33,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Laporan		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	persen		persen	100 persen	48,649,900						100 persen	50,000,000	
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	48,649,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD serta dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	persen		persen	100 persen	810,412,146						100 persen	1,399,600,000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,998,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Paket	17,600,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	151,270,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	8 Paket	176,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				38 Paket	70,000,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	38 Paket	77,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	212,953,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	7 Paket	260,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				4 Dokumen	10,144,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	4 Dokumen	11,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan													
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya penataan arsip SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 3 dokumen 13 Laporan	361,044,146		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	0 Laporan 3 dokumen 13 Laporan	770,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor	persen		persen	100 persen	1,422,490,636						100 persen	1,377,200,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	25,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	2 Laporan	27,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	915,745,836	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	3 Laporan	788,700,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	99,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	2 Laporan	66,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	382,744,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	2 Laporan	495,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan meubel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan	persen		persen	100 persen	414,938,200						100 persen	635,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		bangunan lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya													
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10,980,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	1 Unit	11,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	240,006,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	17 Unit	242,400,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	103,951,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	5 Unit	161,600,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	60,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	5 Unit	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %		0 %	100 %	1,452,116,830,489						100 %	965,542,253,489	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan KUA PPAS Murni dan perubahan, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA/RKAP SKPD, Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA/DPPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan dan Perkada tentang Pernjabaran APBD Murni dan Perubahan, serta penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	persen		persen	100 persen	1,168,166,800						100 persen	3,662,515,000	
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	71,914,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda DIY	2 Dokumen	450,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	70,414,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda DIY	2 Dokumen	450,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	473,529,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda DIY	32 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	206,706,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda DIY	2 Dokumen	1,200,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	226,565,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda DIY	6 Dokumen	1,100,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				30 Dokumen	119,037,300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda DIY	30 Dokumen	162,515,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	75,892,100						100 persen	822,100,000	
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				5 Laporan	23,559,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda Kabupaten/Kota se DIY	5 Laporan	270,100,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	23,559,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda Kabupaten/Kota se DIY	5 Laporan	269,100,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang				5 Laporan	23,559,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur Pemda Kabupaten/Kota se DIY	5 Laporan	274,900,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
5 02 02 1.02 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2022 disusun paling lambat Februari 2023 dan Laporan keuangan semester dana dekonsentrasi dan TP 2023 disusun paling lambat Agustus 2023				2 dokumen	5,213,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemda Kabupaten/Ko ta se DIY	2 dokumen	8,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	persen		persen	100 persen	151,970,500						100 persen	0	
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				7 Laporan	89,310,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	7 Laporan		BADAN PENGELOLA 0 KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8000 Dokumen	62,660,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	8000 Dokumen		BADAN PENGELOLA 0 KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada	persen		persen	100 persen	560,084,900						100 persen	942,676,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindak lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD													
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2023 selesai bulan Juli tahun 2023				1 dokumen	13,857,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	1 dokumen	120,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Audited 2022 Laporan Keuangan Unaudited 2022				1 dokumen 1 dokumen	17,484,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	1 dokumen 1 dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	340,453,600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	2 Dokumen	490,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima				1 dokumen	5,051,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	1 dokumen	7,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi				1 dokumen	5,778,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	1 dokumen	10,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah				1 sistem	110,777,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	1 sistem	160,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumberdaya manusia yang handal dan kompeten orang dalam pelaporan dan pertanggungjawaban				0 Orang 100 orang	16,704,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur pemda DIY	0 Orang 100 orang	90,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.04 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				8 Lembaga	49,977,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur pemda DIY	8 Lembaga	40,676,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	persen		persen	100 persen	1,450,160,716,189						100 persen	960,114,962,489	
5 02 02 1.05 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				9 Laporan	255,120,900	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Kabupaten/Kota, Kacamatan dan Kelurahan se DIY	9 Laporan	1,271,430,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	658,062,062,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Kabupaten/Kota, Kacamatan dan Kelurahan se DIY	1 Laporan	165,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	20,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Kabupaten/Kota, Kacamatan dan Kelurahan se DIY	1 Laporan	22,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	771,843,532,489	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan kualitas layanan publik	Kabupaten/Kota, Kacamatan dan Kelurahan se DIY	1 Laporan	771,843,532,489	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %		0 %	100 %	2,609,248,040						100 %	4,330,082,200	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah,	persen		persen	100 persen	2,609,248,040						100 persen	4,330,082,200	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	327,479,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Pengelola barang milik daerah	1 Dokumen	536,422,200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD				1 Dokumen	78,442,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola barang milik daerah	1 Dokumen	32,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	196,589,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola barang milik daerah	2 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	1,745,497,240		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola barang milik daerah	3 Laporan	3,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	118,177,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengelola barang milik daerah	2 Laporan	502,660,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	143,063,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Pengelola barang milik daerah	3 Dokumen	259,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah	160,058,080,379,00 Rupiah		0 Rupiah	509,558,989,944,00 Rupiah	3,270,382,300						509,558,989,944,00 Rupiah	3,953,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	3,270,382,300					100 persen	3,953,000,000		
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	2,739,046,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	1 Dokumen	3,150,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	84,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	1 Laporan	105,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	396,339,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	1 Laporan	643,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
5 02 04 1.01 14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	2 Laporan	55,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,194,391,900					4,045,146,000			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.50 Nilai		0 Nilai	87.25 Nilai	1,964,119,900					87.25 Nilai	2,445,146,000		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persen		persen	100 persen	39,120,000					100 persen	40,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39,120,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Dokumen	40,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	15,000,000						100 persen	16,000,000	
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	16,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persen		persen	100 persen	62,207,100						100 persen	89,146,000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,548,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	12,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14,693,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	3 Paket	22,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14,988,100	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo			Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	20,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,820,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	11,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,322,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	2 Paket	12,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,709,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Dokumen	12,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4,125,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	146,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	persen		persen	100 persen	140,286,600						100 persen	360,000,000	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	92,060,100	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	5 Unit	150,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	48,226,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	5 Unit	130,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	1,096,982,900						100 persen	1,230,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	2,648,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	6 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	342,360,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	450,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan	65,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	80,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Disediakan													
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	686,774,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	700,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	persen	persen	100 persen	610,523,300						100 persen	710,000,000		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	85,775,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	7 Unit	90,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				93 Unit	198,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	93 Unit	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	252,532,500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	3 Unit	200,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	73,715,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	10 Unit	200,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah	160.058.080,379,00 Rupiah		0 Rupiah	509.558.989.944,00 Rupiah	230,272,000						509.558.989.944,00 Rupiah	1,600,000,000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan	persen	persen	100 persen	230,272,000						100 persen	1,600,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	186,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	500,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	44,272,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	1,100,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						4,744,208,900						7,691,676,870		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.50 Nilai		0 Nilai	87.25 Nilai	3,658,905,800						87.25 Nilai	5,357,419,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persen		persen	100 persen	32,880,000						100 persen	36,000,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32,880,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD DIY	12 Dokumen	36,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	11,400,000						100 persen	12,540,000	
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11,400,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	12,540,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persen		persen	100 persen	184,107,500						100 persen	491,260,000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,829,100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	30,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	68,272,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	4 Paket	147,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	42,698,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	2 Paket	81,260,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10,100,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	2 Paket	36,600,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28,375,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	70,700,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				84 Dokumen	4,032,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	84 Dokumen	10,400,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,800,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	114,800,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	persen		persen	100 persen	339,020,900						100 persen	1,195,500,000	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	139,020,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	48 Unit	675,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Unit	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	2,286,096,400						100 persen	2,488,535,000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	795,960,800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	4 Laporan	843,100,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	155,044,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	3 Laporan	170,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1,335,091,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	4 Laporan	1,474,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	persen		persen	100 persen	805,401,000						100 persen	1,133,584,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya													
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	170,803,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	8 Unit	137,160,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	268,600,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	50 Unit	318,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	225,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	5 Unit	525,700,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	140,998,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	13 Unit	152,724,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah	160.058.080,379,00 Rupiah		0 Rupiah	509.558.989.944,00 Rupiah	1,085,303,100						509.558.989.944,00 Rupiah	2,334,257,870	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak	persen		persen	100 persen	1,085,303,100						100 persen	2,334,257,870	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	443,825,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	930,650,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	641,477,600	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	1,403,607,370	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,566,143,700						2,043,000,000		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.50 Nilai		0 Nilai	87.25 Nilai	1,818,916,100						87.25 Nilai	1,603,000,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persen		persen	100 persen	33,060,000						100 persen	35,000,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33,060,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	10,320,000						100 persen	0	
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10,320,000					Aparatur KPPD	12 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan	persen		persen	100 persen	102,895,600						100 persen	160,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5,783,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	2 Paket	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34,502,400	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	40,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12,615,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	17,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9,056,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Paket	13,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,430,400	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	16,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7,468,800	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Dokumen	9,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	23,040,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	65,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan	persen		persen	100 persen	124,017,400						100 persen	170,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	124,017,400	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	6 Unit	170,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	1,020,764,600						100 persen	988,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,020,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Laporan	4,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	473,538,200	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Laporan	440,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39,500,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Laporan	44,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	505,706,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	12 Laporan	500,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana	persen		persen	100 persen	527,858,500						100 persen	250,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya													
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	173,598,500	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	7 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	214,980,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	55 Unit	250,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	71,000,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	2 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	68,280,000	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Bolehharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur	22 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah	160.058.080,379,00 Rupiah		0 Rupiah	509.558.989,944,00 Rupiah	747,227,600						509.558.989,944,00 Rupiah	440,000,000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	747,227,600						100 persen	440,000,000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	290,212,900	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	1 Laporan	440,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	457,014,700	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02	KEUANGAN						2,453,130,300						2,965,500,000		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.50 Nilai		0 Nilai	87.25 Nilai	2,025,358,700					87.25 Nilai	1,665,500,000		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persen		persen	100 persen	31,200,000					100 persen	35,000,000		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31,200,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	13,200,000					100 persen	14,000,000		
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13,200,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	14,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persen		persen	100 persen	117,850,900					100 persen	176,500,000		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	28,460,400	Kab. Kulon Progo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	35,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Bangunan Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik					
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	19,410,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	5 Paket	28,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	23,299,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	3 Paket	37,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5,800,800	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	2 Paket	6,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13,302,800	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8,377,200	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Dokumen		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19,200,000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	70,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	persen		persen	100 persen	64,642,900						100 persen	200,000,000	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	62,335,200	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	11 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2,307,700	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	3 Unit	150,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	1,280,471,800						100 persen	1,090,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,914,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	5,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	577,644,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	450,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	79,625,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	85,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	620,288,400	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	550,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	persen		persen	100 persen	517,993,100						100 persen	150,000,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	140,773,100	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	7 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	155,250,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	4 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	95,000,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	6 Unit		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	126,970,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	4 Unit	150,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah	160.058.080,379,00 Rupiah		0 Rupiah	509.558.989,944,00 Rupiah	427,771,600						509.558.989,944,00 Rupiah	1,300,000,000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran	persen		persen	100 persen	427,771,600						100 persen	1,300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	189,848,000	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	500,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	237,923,600	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	800,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						4,388,534,050							12,267,800,000	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.50 Nilai		0 Nilai	87.25 Nilai	3,370,659,450						87.25 Nilai	9,417,545,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persen		persen	100 persen	44,820,000						100 persen	49,302,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	44,820,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	12 Dokumen	49,302,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	15,000,000						100 persen	22,000,000	
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	12 Laporan	22,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	persen		persen	100 persen	209,251,600						100 persen	407,618,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39,001,500	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur KPPD	1 Paket	49,725,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	84,273,900	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	4 Paket	149,609,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	19,061,900	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	6 Paket	39,512,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,079,500	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	1 Paket	9,946,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27,200,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	1 Paket	61,768,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,476,800	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	1 Dokumen	9,311,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28,158,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	12 Laporan	87,747,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	persen		persen	100 persen	171,612,600						100 persen	1,414,169,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	171,612,600	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	14 Unit	656,644,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	2,209,211,350						100 persen	2,207,877,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	1 Laporan	4,598,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	839,480,150	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	12 Laporan	849,652,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70,000,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	12 Laporan	77,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,298,731,200	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	12 Laporan	1,276,627,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan	persen		persen	100 persen	720,763,900						100 persen	5,316,579,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya													
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	93,650,100	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	9 Unit	102,943,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	390,122,800	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	8 Unit	429,135,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100,000,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	3 Unit	4,589,801,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	136,991,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur KPPD	1 Unit	194,700,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah	160.058.080, Rupiah	179,00 Rupiah	0 Rupiah	509.558.989,544,00 Rupiah	1,017,874,600						509.558.989,544,00 Rupiah	2,850,255,000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebaruasaan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	persen	persen	100 persen		1,017,874,600						100 persen	2,850,255,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	305,026,600	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	917,794,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	712,848,000	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Aparatur dan wajib pajak	12 Laporan	1,932,461,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
TOTAL							1,559,211,140,805							1,092,590,557,029	

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01						1,160,699,000							0		
4	01	10					1,160,699,000						66.67 %	0		
4	01	10	5.02				1,160,699,000						100 %	0		
4	01	10	5.02	01		Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	2 Dokumen	340,699,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY	2 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4	01	10	5.02	03		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	690 Orang	820,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY	690 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	03						61,050,159,689							68,204,250,244		
5	03	01					54,952,761,189						85.66 Nilai	53,488,507,982		
5	03	01	1.01				73,543,300						100 %	146,000,000		
5	03	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	49,330,600	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	5 Dokumen	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	3,405,200	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	4 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20,807,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	3 Laporan	36,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	13,984,816,189			100 %	14,983,507,982		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Perangkat Daerah													
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	13,916,589,789	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	97 Orang/ Bulan	14,905,007,982	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49,884,500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	12 Dokumen	52,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,428,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	1 Laporan	3,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	14,913,900	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY	13 Laporan	23,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	22,500,000						100 %	23,000,000	
5 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	22,500,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	2 Laporan	23,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	341,287,100						100 %	1,468,000,000	
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,181,700	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	1 Paket	34,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	27,925,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	2 Paket	80,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20,001,900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	1 Paket	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	64,462,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	2 Paket	87,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7,843,200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	4 Dokumen	7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	200,872,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY	2 Laporan	1,200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	38,679,938,000						100 %	34,750,000,000	
5 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				56 Unit	94,560,600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan Pemda DIY	56 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	38,500,000,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan Pemda DIY	1 Unit	34,700,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	85,377,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan Pemda DIY	1 Unit	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,465,492,200						100 %	1,435,000,000	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	18,518,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY , ASN, dan Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	458,419,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY , ASN, dan Masyarakat	3 Laporan	430,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	988,555,200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan BKD DIY, ASN, dan Masyarakat	2 Laporan	990,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	385,184,400						100 %	607,000,000	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,007,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan	1 Unit	12,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	170,000,900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan	11 Unit	175,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	99,998,100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan	27 Unit	280,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	104,178,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan	1 Unit	140,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi, kelengkapan data pegawai, pemenuhan kompetensi pegawai, dan petaan kompetensi individu	82 %		0 %	77.3 %	6,097,398,500						77.3 %	14,715,742,262	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %		0 %	100 %	1,518,038,000						100 %	5,040,300,000	
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	8,254,600	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat	2 Dokumen	140,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	904,671,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat	1 Dokumen	3,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	270,459,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat	2 Dokumen	421,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	233,672,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat	2 Dokumen	604,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	100,981,100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat	4 Dokumen	375,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100 %		0 %	100 %	778,756,700						100 %	1,438,059,000	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				200 Dokumen	132,860,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY	200 Dokumen	255,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	182,708,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY	2 Laporan	367,059,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	463,187,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY	1 Dokumen	816,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		0 %	100 %	3,618,587,100						100 %	8,150,224,747	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				3 Dokumen	686,752,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan Pemda DIY	3 Dokumen	1,131,011,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan				1 Dokumen	178,738,500	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan	ASN di Lingkungan Pemda DIY	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Sertifikasi ASN						Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing	budaya)				
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	2,094,130,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan Pemda DIY	1 Dokumen	4,300,706,630	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	577,895,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan Pemda DIY	1 Dokumen	2,416,674,617	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				5 Orang	39,756,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan Pemda DIY	5 Orang	174,332,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				50 Orang	41,314,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN di Lingkungan Pemda DIY	50 Orang	127,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatu	100 %		0 %	100 %	182,016,700						100 %	87,158,515	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	41,710,200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan ASN di DIY	1 Dokumen	52,358,515	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				7 Orang	12,218,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan ASN di DIY	7 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				450 Orang	17,043,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan ASN di DIY	450 Orang	22,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	105,603,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan ASN di DIY	100 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	5,442,000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	ASN Pemda DIY dan ASN di DIY	1 Laporan	12,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TOTAL							62,210,858,689						68,204,250,244		

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01						2,266,162,000						2,484,607,200			
4	01	10					2,266,162,000						2,484,607,200			
4	01	10	5.02				2,266,162,000						2,484,607,200			
4	01	10	5.02	03			450 Orang	2,266,162,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	450 Orang	2,484,607,200	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	04						23,088,030,386						27,411,152,383			
5	04	01					87 Skor	13,847,573,686					87 Skor	17,604,100,000		
5	04	01	1.01				100 persen	72,624,000					100 persen	88,500,000		
5	04	01	1.01	01			5 Dokumen	29,824,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	5 Dokumen	42,250,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	01	1.01	04			4 Dokumen	18,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	4 Dokumen	12,250,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	01	1.01	07			3 Laporan	24,800,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	3 Laporan	34,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	01	1.02				100 persen	10,598,221,370					100 persen	11,481,500,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Keuangan SKPD													
5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				972 Orang/ Bulan	10,537,521,370	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	972 Orang/ Bulan	11,400,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39,900,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,800,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Laporan	6,500,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	16,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	18 Laporan	25,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persen		persen	100 persen	15,000,000						100 persen	18,000,000	
5 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	15,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	4 Laporan	18,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persen		persen	100 persen	60,000,000						100 persen	235,000,000	
5 04 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				14 Dokumen	60,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	14 Dokumen	75,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan	persen		persen	100 persen	299,343,400						100 persen	1,206,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37,126,200	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Paket	47,500,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,562,500	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Paket	45,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17,172,500	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Paket	17,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	23,482,200	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Paket	37,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	200,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	24 Laporan	1,000,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	1,985,838,836						100 persen	2,106,000,000	
5 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,820,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	12 Laporan	6,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	643,621,672	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	12 Laporan	700,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,339,397,164	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, keehatan, dan budaya)	Aparatur	12 Laporan	1,400,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	persen		persen	100 persen	816,546,080						100 persen	1,752,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel													
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21,193,400	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Unit	35,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	158,806,600	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	12 Unit	180,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	560,092,080	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Unit	1,350,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	76,454,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	60 Unit	175,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi ASN Pemda DIY	persen		persen	100 persen	9,240,456,700						100 persen	9,807,052,383	
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	persen		persen	100 persen	50,000,000						100 persen	3,298,541,600	
5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				3 Dokumen	50,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya) Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	3 Dokumen	319,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	persen		persen	100 persen	9,190,456,700						100 persen	6,508,510,783	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				10 Dokumen	400,000,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	10 Dokumen	660,000,000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	96,706,100	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	1 Laporan	147,231,120	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				14 Dokumen	82,550,600	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	14 Dokumen	235,712,880	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				850 Orang	8,611,200,000	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Aparatur	850 Orang	5,465,566,783	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TOTAL							25,354,192,386							29,895,759,583	

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22						3,354,829,000						4,157,601,900		
2	22	08					3,354,829,000						4,157,601,900		
2	22	08	5.06				206,600,000						584,550,000		
2	22	08	5.06	01			206,600,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisma Jogja dan Griya Jogja	4 Unit	584,550,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2	22	08	5.09				3,148,229,000						3 Laporan	3,573,051,900	
2	22	08	5.09	12			3,148,229,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat	3 Laporan	3,573,051,900	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	07						7,180,185,318						10,113,500,000		
5	07	01					6,867,804,118						90.6 Nilai	8,363,500,000	
5	07	01	1.01				14,200,000						100 %	21,500,000	
5	07	01	1.01	01					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	5 Dokumen	15,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	04			1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	4 Dokumen	3,500,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.01	07			2,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	3 Laporan	3,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5	07	01	1.02				5,657,851,318						100 %	6,762,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD													
5 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	5,606,661,518		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	60 Orang/ Bulan	6,700,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	47,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,009,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	1 Laporan	2,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	3,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	12 Laporan	10,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %		0 %	100 %	6,600,000						100 %	7,000,000	
5 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	12 Laporan	7,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		0 %	100 %	230,734,400						100 %	410,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	1 Paket	12,500,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,728,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	1 Paket	30,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	1 Paket	13,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,734,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	2 Dokumen	4,500,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	192,272,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	2 Laporan	350,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		0 %	100 %	668,581,000						100 %	713,000,000	
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	12 Laporan	13,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	3 Laporan	325,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	356,611,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	2 Laporan	375,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	100 %		0 %	100 %	289,837,400						100 %	450,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
5 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	189,821,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	11 Unit	250,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	67,705,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	3 Unit	200,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	32,310,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Banhubda DIY	4 Unit	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Jumlah layanan yang diberikan Banhubda DIY	100 %		0 %	100 %	312,381,200						100 %	1,750,000,000	
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	28 Laporan		0 Laporan	7 Laporan	312,381,200						7 Laporan	1,750,000,000	
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5 Laporan	176,847,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/embaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat	5 Laporan	250,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5 07 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	135,534,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/embaga Pemerintah, Badan	2 Laporan	1,500,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat				
TOTAL							10,535,014,318						14,271,101,900		

INSPEKTORAT

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01						25,225,248,213						36,362,643,595		
6	01	01											91 Nilai	26,904,187,914	
6	01	01	1.01										100 %	45,376,500	
6	01	01	1.01	01									3 Dokumen	20,298,000	INSPEKTORAT
6	01	01	1.01	04									4 Dokumen	12,510,000	INSPEKTORAT
6	01	01	1.01	07									5 Laporan	12,568,500	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02										100 %	19,081,713,304	
6	01	01	1.02	01									12 Orang/ Bulan	19,023,877,304	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	03									12 Dokumen	46,320,000	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	07									18 Laporan	11,516,000	INSPEKTORAT

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD													
6 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100 %		0 %	100 %	17,912,100						100 %	31,500,000	
6 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	17,912,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	6 Laporan	31,500,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %		0 %	100 %	366,486,600						100 %	576,700,000	
6 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	7,217,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Inspektorat DIY	2 Dokumen	86,100,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	359,268,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	ASN Inspektorat DIY	22 Orang	490,600,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %		0 %	100 %	483,763,100						100 %	741,128,000	
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,027,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Paket	31,500,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	54,810,100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Paket	33,000,000	INSPEKTORAT

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	31,898,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Paket	8,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20,797,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Paket	25,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	274,230,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Laporan	528,428,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	90,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	1 Dokumen	90,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		0 %	100 %	316,243,700						100 %	3,937,500,000	
6 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	56,300,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	2 Paket	0	INSPEKTORAT
6 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				98 Unit	206,696,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	98 Unit	2,625,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	53,246,700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	1 Unit	0	INSPEKTORAT
6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		0 %	100 %	1,569,271,000						100 %	1,584,070,110	
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,202,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Laporan	6,835,500	INSPEKTORAT
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				12 Laporan	500,420,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Laporan	375,900,000	INSPEKTORAT

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Semaki							
6 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Laporan	27,300,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,053,049,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	12 Laporan	1,174,034,610	INSPEKTORAT
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		0 %	100 %	812,408,360						100 %	906,200,000	
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	302,296,800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	18 Unit	466,200,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	115,564,560	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	50 Unit	290,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	394,547,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	Inspektorat DIY	1 Unit	150,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		0 %	100 %	6,240,695,000						100 %	8,188,374,841	
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring	100 %		0 %	100 %	5,437,313,000						100 %	7,222,057,846	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	350,349,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	16 Laporan	1,015,775,145	INSPEKTORAT
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				174 Laporan	3,519,463,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	174 Laporan	4,043,357,010	INSPEKTORAT
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				113 Laporan	920,554,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	113 Laporan	996,000,000	INSPEKTORAT
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				38 Laporan	232,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	38 Laporan	501,637,500	INSPEKTORAT
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				21 Laporan	376,407,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	21 Laporan	428,562,698	INSPEKTORAT
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	17,728,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	2 Kesepakatan	198,771,930	INSPEKTORAT
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	19,818,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas layanan publik		UPTD, OPD-OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	2 Dokumen	37,953,563	INSPEKTORAT
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %		0 %	100 %	803,382,000						100 %	966,316,995	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	34,956,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD, OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	4 Laporan	44,100,000	INSPEKTORAT
6 01 02 1.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				90 Laporan	768,425,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD, OPD se-DIY, Kabupaten/Kota se-DIY	90 Laporan	922,216,995	INSPEKTORAT
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN	100 %		0 %	100 %	585,789,100						100 %	1,270,080,840	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100 %		0 %	100 %	32,704,500						100 %	200,710,125	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	4,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD, OPD se-DIY, Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi	140,584,185	INSPEKTORAT
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	27,844,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	UPTD, OPD se-DIY, Kabupaten/Kota	2 Rekomendasi	60,125,940	INSPEKTORAT
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %		0 %	100 %	553,084,600						100 %	1,069,370,715	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				37 Perangkat Daerah	5,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	OPD seDIY, Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	8,004,150	INSPEKTORAT

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				37 Perangkat Daerah	9,685,900	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	OPD seDIY, Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	52,699,500	INSPEKTORAT
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	384,780,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	OPD seDIY, Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	840,000,000	INSPEKTORAT
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				37 Perangkat Daerah	152,986,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas layanan publik	OPD seDIY, Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	168,667,065	INSPEKTORAT
TOTAL							25,225,248,213							36,362,643,595	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22																		
2	22	08																	
2	22	08	5.09																
2	22	08	5.09	21															
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01																		
8	01	01																	
8	01	01	1.01																
8	01	01	1.01	01															

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	33,172,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY, Mitra Kerja Badan Kesbangpol DIY	2 Dokumen	80,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	26,320,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY, Mitra Kerja Badan Kesbangpol DIY	3 Laporan	80,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100 persen		0 persen	100 persen	7,265,351,426						100 persen	8,640,000,000	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/ Bulan	7,170,211,426	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	52 Orang/ Bulan	8,500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	40,140,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	12 Dokumen	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Laporan	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	35,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	14 Laporan	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 persen		0 persen	100 persen	11,400,000						100 persen	15,000,000	
8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada				1 Laporan	11,400,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Laporan	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		SKPD								Berkualitas Dan Berdaya Saing					
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen		0 persen	100 persen	518,931,400					100 persen	700,000,000		
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	25,498,900	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	10 Paket	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	52,987,100	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	30 Paket	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	38,653,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	5 Paket	85,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	31,786,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	5 Paket	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,494,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Dokumen	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	343,512,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	12 Laporan	450,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Dokumen	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen		0 persen	100 persen	185,262,600					100 persen	455,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	37,022,300	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	2 Paket	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	80,525,100	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	9 Unit	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Unit	90,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	17,715,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	4 Unit	90,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen		0 persen	100 persen	930,307,200						100 persen	500,000,000	
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	201,520,800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	3 Laporan	500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	728,786,400	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	2 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen		0 persen	100 persen	908,894,000						100 persen	1,230,000,000	
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29,809,100	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Unit	350,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	255,055,200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	Badan Kesbangpol DIY	16 Unit	230,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	54,320,100	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	5 Unit	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 16 Unit	109,709,600	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	0 Unit 16 Unit	175,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	460,000,000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Badan Kesbangpol DIY	1 Unit	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Kebebasan Berkeyakinan	90.95 Nilai		0 Nilai	89.45 Nilai	115,071,800						89.45 Nilai	550,000,000	
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksanakannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen		0 persen	100 persen	115,071,800						100 persen	550,000,000	
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3 Laporan	115,071,800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY, LSM/Ormas, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Politik, Forum Kemitraan	3 Laporan	550,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Pendidikan Politik pada kader partai politik	27.33 Nilai		0 Nilai	24.33 Nilai	3,695,356,600						24.33 Nilai	4,950,000,000	
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksanakannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 persen		0 persen	100 persen	3,695,356,600						100 persen	4,950,000,000	
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1600 Orang	3,267,177,800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY, Pelajar/Mahasiswa, Partai Politik, LSM/Ormas, Organisasi Politik, Organisasi Perempuan, Penyelenggara Pemilu, Instansi vertikal terkait	1600 Orang	4,250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di				2 Laporan	428,178,800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat DIY, Pelajar/Mahasi	2 Laporan	700,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik		swa, Partai Politik, LSM/Ormas, Organisasi Politik, Organisasi Perempuan, Penyelenggara Pemilu, Instansi vertikal terkait			
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, bereksprei, berserikat dan berpendapat antar masyarakat	35.69 Nilai	0 Nilai	34.19 Nilai	408,588,000						34.19 Nilai	1,100,000,000		
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksanakannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 persen	0 persen	100 persen	408,588,000						100 persen	1,100,000,000		
8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	94,487,600	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Organisasi Kemasyarakata n, Masyarakat DIY	1 Dokumen	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				240 Orang	187,600,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat DIY	240 Orang	550,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	126,500,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat DIY	1 Laporan	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Anti monopoli	67 Nilai		0 Nilai	65.5 Nilai	794,797,400					65.5 Nilai	2,050,000,000		
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tertelaksanakannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen		0 persen	100 persen	794,797,400					100 persen	2,050,000,000		
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	71,848,800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat DIY, Pelajar/Mahasi swa, Pegiat ekonomi sosial budaya di DIY, LSM/Ormas	1 Dokumen	650,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat				750 Orang	338,652,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat DIY, Pelajar/Mahasi swa, Pegiat ekonomi sosial budaya di DIY, LSM/Ormas	750 Orang	1,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kepercayaan di Daerah						Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	384,295,700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	Masyarakat DIY, Pelajar/Mahasiswa, Pegiat ekonomi sosial budaya di DIY, LSM/Ormas	4 Laporan	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara	68.84 Nilai	0 Nilai	67.34 Nilai		2,648,087,400						67.34 Nilai	4,500,000,000	
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksanakannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	100 persen	0 persen	100 persen		2,648,087,400						100 persen	4,500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dan Penanganan Konflik Sosial													
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 laporan	937,123,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Forkopimda DIY, Masyarakat DIY, Forum Kemitraan, Kemantren se- DIY, Instansi Vertikal di DIY, Lembaga Asing	10 laporan	1,250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				3 Dokumen	1,710,963,900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas layanan publik	Forkopimda DIY, Masyarakat DIY, Forum Kemitraan, Kemantren se- DIY, Instansi Vertikal di DIY, Lembaga Asing	3 Dokumen	3,250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							20,565,522,826							29,400,000,000	

PANIRADYA KAISTIMEWAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01						26,820,328,656						28,629,907,765		
4	01	01													
4	01	01													
4	01	01	1.01												
4	01	01	1.01	01											
4	01	01	1.01	04											
4	01	01	1.01	07											
4	01	01	1.02												
4	01	01	1.02	01											
4	01	01	1.02	03											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,246,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Laporan	1,309,140	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	3,090,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	18 Laporan	3,801,210	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	11,400,000						100 %	11,970,000	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,400,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Laporan	11,970,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%		%	100 %	110,444,200						100 %	214,162,095	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,101,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Paket	3,273,585	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,676,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Paket	14,610,015	PANIRADYA KAISTIMEWAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	7,802,100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	2 Paket	11,844,630	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket 15685 Lembar	15,686,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	8 Paket 15685 Lembar	19,489,575	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	8,052,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	4 Dokumen	17,346,840	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	62,126,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Laporan	147,597,450	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	0 %	100 %	271,668,800							100 %	259,064,240	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Laporan	18,270,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	251,668,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Laporan	240,794,240	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	0 %	100 %	360,127,200							100 %	380,990,277	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				1 Unit	27,755,000	Kota Yogyakarta, Danurejan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Unit	29,096,025	PANIRADYA KAISTIMEWAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						Suryatmajan		Transformasi Pelayanan Publik					
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	194,672,200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	15 Unit	193,809,252	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	7,700,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	18 Unit	8,085,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	1 Unit	150,000,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	91,50 %		0 %	90,00 %	19,377,393,500						90,00 %	19,772,582,700	
4 01 10 5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	100 %		0 %	100 %	1,121,536,500						100 %	1,233,691,000	
4 01 10 5.03 01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun				6 Dokumen	678,045,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	6 Dokumen	745,850,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.03 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				4 Laporan	443,491,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	4 Laporan	487,841,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %		0 %	100 %	804,940,000						100 %	885,434,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 10 5.04 01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				5 Dokumen	454,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	5 Dokumen	499,609,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.04 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				4 Laporan	350,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya)	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	4 Laporan	385,825,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100 %		0 %	100 %	2,161,258,000						100 %	1,858,631,700	
4 01 10 5.05 01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				6 Dokumen	666,652,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	6 Dokumen	414,443,700	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.05 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan				4 Laporan	448,868,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	4 Laporan	293,876,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.05 03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				6 Dokumen	607,238,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	6 Dokumen	667,962,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.05 04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				4 Laporan	438,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	4 Laporan	482,350,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	100 %		0 %	100 %	4,131,659,000						100 %	4,544,826,000	
4 01 10 5.06 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan				6 Dokumen	1,997,915,000	Semua Kab/Kota,	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas	Penurunan kemiskinan	Paniradya Kaistimewan	6 Dokumen	2,197,707,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Keistimewaan	yang Disusun						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan			
4 01 10 5.06 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se- DIY				19 Laporan	2,133,744,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan kemiskinan	Paniradya Kaistimewan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan	19 Laporan	2,347,119,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	%		%	100 %	2,600,000,000						100 %	2,600,000,000	
4 01 10 5.07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan				3 Unit	2,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Paniradya Kaistimewan	3 Unit	2,600,000,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	100 %		0 %	100 %	1,558,000,000						100 %	1,300,000,000	
4 01 10 5.08 01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan				24 Rekomendasi	1,558,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Parampara Praja, OPD dan Masyarakat	24 Rekomendasi	1,300,000,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
4 01 10 5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	100 %		0 %	100 %	7,000,000,000						100 %	7,350,000,000	
4 01 10 5.09 01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				4 Dokumen	7,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan publik	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	4 Dokumen	7,350,000,000	PANIRADYA KAISTIMEWAN
TOTAL							26,820,328,656							28,629,907,765	

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih

berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Tahun 2023
Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka Inclusive Growth Index (IGI)	6,2	6,31
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi	81,98	82,58

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,34
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,42
3	Indeks Gini	0,426	0,423
4	Indeks Williamson	0,447	0,444
5	Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik
6	Indeks Pembangunan Manusia	80,63	81,07
7	Tingkat Kemiskinan	11,16	10,74
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58
9	Opini BPK	WTP	WTP
10	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA

Tabel 7-3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
Urusan Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	100%	100%
2	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	n/a	50%
3	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	n/a	50%
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	n/a	70.90%
Urusan Kesehatan			
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	94,14%	95,28%
2	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	94,25%	94,90%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	46,38%	70,53%
4	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	97.24%	97.80%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	99,57%	57,12%
6	Persentase capaian kinerja penataan ruang	39,27%	56,75%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	95,65%	96,12%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	n/a	65%
2	Indeks Ketahanan Daerah	80	81
Urusan Sosial			
1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	n/a	30.13%
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	25.35%
Urusan Tenaga Kerja			
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	990 orang	1.020 orang
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	11.000 orang	11.100 orang
3	Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	3.300 layanan	3.441 layanan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	n/a	18%
2	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di	n/a	80%

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
	UPTD dan P2TPA se-DIY		
3	Umur menikah pertama perempuan	25,17 tahun	21-30 tahun
Urusan Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,3	94,4
Urusan Pertanian			
1	Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	58,83%	60,47%
Urusan Lingkungan Hidup			
1	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	n/a	77,15%
Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil			
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	87,97%	92,20%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 dokumen	4 dokumen
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	12 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
1	Jumlah lembaga layanan puspaga di prov dan kab/kota	1 lembaga	3 lembaga
Urusan Perhubungan			
1	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	33,97%	42,21%
2	Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di koridor 2	0%	27,88%
Urusan Komunikasi dan Informatika			
1	Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik	91,5	92
2	Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY	3,49	3,54
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%)	n/a	3,50%
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	n/a	1.150 UMKM
3	Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil (%)	0,40%	0,40%
Urusan Penanaman Modal			
1	Realisasi Investasi (Trilyun Rupiah)	Rp33,7 Trilyun	Rp35,4 Trilyun
Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase pemuda bekerja	55,59%	55,61%
2	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	20 medali	22 medali
Urusan Statistik			
1	Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	n/a	50%

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
Urusan Persandian			
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	n/a	Level II
Urusan Kebudayaan			
1	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	2,17%	4,14%
2	Peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional	13 event	14 event
3	Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	365 lembaga	375 lembaga
4	Jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	18 desa	25desa
Urusan Perpustakaan			
1	Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	27%	28%
Urusan Kearsipan			
1	Jumlah arsip yang dimanfaatkan masyarakat	7.589 berkas	7.900 berkas
Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2.271.549 juta rupiah	2.276.954 juta rupiah
2	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan (%)	0%	25%
Urusan Pariwisata			
1	Lama Tinggal Wisatawan	1,85 hari	1,9 hari
2	<i>Spending money</i> wisatawan	Rp2.427.223	Rp2.600.000
Urusan Pertanian			

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	0,06%	0,45%
Urusan Kehutanan			
1	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	n/a	68,60%
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral			
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99%	99,99%
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	23,85%	40,31%
Urusan Perdagangan			
1	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta
Urusan Perindustrian			
1	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 34 Juta/Orang
Sekretariat DPRD			
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,50%	95,50%
Sekretariat Daerah			
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	4%	14%
2	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	76%

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
3	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru (%)	100%	100%
4	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Hukum yang Berkualitas	100%	100%
5	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	65%	75%
6	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	n/a	100%
7	Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	80%	33,33%
8	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	n/a	95
	Perencanaan Pembangunan		
1	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	85,50%	86%
	Keuangan		
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp6.967.568.518	Rp9.016.589.475
	Kepegawaian		

No	Indikator	Baseline	Target
		2022	2023
1	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	70,10%	70,10%
Pendidikan dan Pelatihan			
1	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun	n/a	13,90%
Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	n/a	70%
Penghubung Daerah			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	90 angka indeks	91 angka indeks
Pengawasan			
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90%	91%
2	Persentase kepatuhan pelaporan triwuanan Gratifikasi, <i>Whistle blowing system</i> dan Benturan Kepentingan	n/a	100
Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)			
1	Skor Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	76,42	76,72

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari penjabaran Dokumen Rencana Pembangunan (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang merupakan pelaksanaan tahapan RPJPD periode lima tahunan keempat. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2023, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2023 sebagai sebuah langkah baru dengan semangat baru yang lebih bersinergi dan kuat untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Yogyakarta, Juni 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X



BAPPEDA DIY

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ආයතනික වැඩසටහන සැලසුම් කළමනාකරු

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>

Email: bappeda@jogjaprov.go.id

